PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
LAMPUNG

BUKU I

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

TAHUN

2026

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
18. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 terdiri dari:

a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan;

b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2026 periode tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun 2026;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2026; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Lampung tahun 2026.

Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan

c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 - 7 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika Penulisan I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-42
2.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah II-47
2.1.4 Aspek Sumber Daya Manusia II-116
2.1.5 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan II-177
2.1.6 Tata Kelola Pemerintahan II-197
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD II-212
2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024 Provinsi Lampung II-212
2.3. Pemasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah II-251
2.3.1. Permasalahan Pembangunan II-251
2.3.2. Isu Strategis II-266

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Dinamika Perekonomian Global III-3
3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-5
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-17
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-19
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-27
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-32

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1 Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-2
4.1.2 Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Lampung IV-8
4.1.3 Strategi dan Arah Pembangunan Provinsi Lampung IV-19
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-33
4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.. IV-33

4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... IV-52
4.2.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2025 ..... IV-57
4.2.4 Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... IV-131
4.3 Pokok – pokok Pikiran DPRD IV-158
4.4 Rencana Pengembangan Wilayah IV-161
4.5 Rencana Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca) IV-164

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera dalam RKP 2026 ..... V-1
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung V-4
5.3 Arah Kebijakan Indikator Makro Kabupaten/Kota V-16
5.3.1 Pertumbuhan Ekonomi V-16
5.3.2 Indek Pembangunan Manusia V-24
5.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka V-29
5.3.4 Persentase Penduduk Miskin V-34
5.3.5 Ketimpangan Wilayah (Rasio Gini) V-39
5.4 Sinergi Pembangunan Daerah V-43
5.5 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-77

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1
6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026 ..... VI-2
6.2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung tahun 2026 ..... VI-5
6.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... VI-18
6.4 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026 ..... VI-36
6.5 Program Prioritas Berdasarkan SPM VI-60
6.6 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... VI-66

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII-1
7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) VII-3
7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) VII-5
7.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) VII-12

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... I-4
Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah I-9

BAB II

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Lampung II-2
Gambar 2. 2 Peta Klimatologi Provinsi Lampung II-4
Gambar 2. 3 Struktur Ruang Provinsi Lampung II-6
Gambar 2. 4 Peta Rencana Jalan Tol Provinsi Lampung II-8
Gambar 2. 5 Peta Struktur Ruang Provinsi Lampung II-14
Gambar 2. 6 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... II-15
Gambar 2. 7 Peta Baku Sawah Provinsi Lampung II-16
Gambar 2. 8 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung II-16
Gambar 2. 9 Peta Kawasan Strategis Provinsi Lampung II-19
Gambar 2. 10 Rencana Aglomerasi Kota Bandar Lampung Raya II-23
Gambar 2. 11 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung II-24
Gambar 2. 12 Peta Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung II-25
Gambar 2. 13 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung II-27
Gambar 2. 14 Peta Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung II-29
Gambar 2. 15 Rasio Jenis Kelamin dan Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020 ..... II-36
Gambar 2. 16 Persentase Penduduk Lampung Menurut Generasi, Tahun 2020 ... II-37
Gambar 2. 17 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020, 2023, dan 2024 (km2) II-37
Gambar 2. 18 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2025-2029 II-38
Gambar 2. 19 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2050 ..... II-40
Gambar 2. 20 Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020 ..... II-41
Gambar 2. 21 Jumlah Penduduk di Sepuluh Provinsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2020 ..... II-42
Gambar 2. 22 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2024 ..... II-46
Gambar 2. 23 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2024 ..... II-47
Gambar 2. 24 Indeks Ekonomi Hijau Seluruh Provinsi Tahun 2015 – 2021 ..... II-54
Gambar 2. 25 Pertumbuhan dan Kontribusi Pulau-Pulau se-Indonesia terhadap PDB Nasional II-56
Gambar 2. 26 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Indonesia Tahun 2023 ..... II-57
Gambar 2. 27 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2024 ..... II-58
Gambar 2. 28 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ..... II-61
Gambar 2. 29 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Seluruh

	Provinsi di Indonesia Tahun 2023	II-66
Gambar 2. 30	Peta Sebaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Seluruh Provinsi di Indonesia 2023	II-70
Gambar 2. 31	Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Jenis Koperasi di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-79
Gambar 2. 32	Peta Pembelian Antar Wilayah (PAW) Provinsi Lampung	II-82
Gambar 2. 33	Kondisi jalan Mantap di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023	II-87
Gambar 2. 34	Komposisi jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024	II-88
Gambar 2. 35	Panjang Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024	II-88
Gambar 2. 36	Kondisi Jalan Mantap Provinsi dan Jalan Mantap Nasional Tahun 2021-2024 (PIK)	II-89
Gambar 2. 37	Peta Pengairan Daerah Irigasi, Rawa (1000-3000 ha) dan Lintas Kabupaten Provinsi Lampung	II-90
Gambar 2. 38	Foto Infrastruktur Bendungan di Provinsi Lampung	II-92
Gambar 2. 39	Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung	II-96
Gambar 2. 40	Peta Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung	II-97
Gambar 2. 41	Indeks Modal Manusia Tahun 2021-2023	II-117
Gambar 2. 42	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	II-122
Gambar 2. 43	Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022	II-123
Gambar 2. 44	Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2022	II-124
Gambar 2. 45	Ketersediaan Sekolah Menengah Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Tahun 2023	II-131
Gambar 2. 46	Trend Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024	II-133
Gambar 2. 47	Trend Prevalensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2021-2024	II-137
Gambar 2. 48	Ketersediaan Puskesmas Di Provinsi Lampung Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2024	II-140
Gambar 2. 49	Distribusi 9 Jenis Tenaga di Puskesmas Per- Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-142
Gambar 2. 50	Ketersedian Rumah Sakit Berdasarkan Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-143
Gambar 2. 51	Jumlah Rumah Sakit Yang Ter- Akreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-145
Gambar 2. 52	Grafik Distribusi Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024	II-152
Gambar 2. 53	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung, Februari 2022-Februari 2024	II-160
Gambar 2. 54	Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur 2023-2029	II-161
Gambar 2. 55	TPT Provinsi Lampung menurut Tingkat Pendidikan, 2024	II-162
Gambar 2. 56	Tahun 2020-2024	II-167

Gambar 2. 57 Trend Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ..... II-175
Gambar 2. 58 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung II-179
Gambar 2. 59 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) di Provinsi Lampung II-181
Gambar 2. 60 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung II-182
Gambar 2. 61 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi II-193
Gambar 2. 62 Trend Indeks Pengawasan Kearsipan dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ..... II-203
Gambar 2. 63 Tahun 2020-2023 ..... II-209
Gambar 2. 64 Realisasi Capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... II-248
Gambar 2. 65 Capaian SPM per Urusan Kab/Kota Tahun 2024 ..... II-249
Gambar 2. 66 Kerangka Berpikir Perumusan Isu Strategis Daerah II-266

BAB III
Gambar 3. 1 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah III-24

BAB IV
Gambar 4. 1 Pioritas Nasional IV-4
Gambar 4. 2 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 ..... IV-34
Gambar 4. 3 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026 ..... IV-34

BAB V
Gambar 5. 1 Kontribusi PDRB per Wilayah V-2
Gambar 5. 2 Tema Wilayah Tahun 2025-2029 ..... V-2
Gambar 5. 3 Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung V-3
Gambar 5. 4 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang Tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029 ..... V-5
Gambar 5. 5 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... V-22
Gambar 5. 6 Penetapan Target PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2026 V-23
Gambar 5. 7 Penetapan Target IPM Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... V-28
Gambar 5. 8 Target Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... V-33
Gambar 5. 9 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... V-38
Gambar 5. 10 Penetapan Target Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... V-42

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung II-2
Tabel 2. 2 Curah Hujan Rata-Rata per Tahun (Mm)..... II-4
Tabel 2. 3 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung..... II-14
Tabel 2. 4 Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung..... II-24
Tabel 2. 5 Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung II-25
Tabel 2. 6 Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung II-26
Tabel 2. 7 Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung... II-28
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 (Ribu Jiwa)..... II-44
Tabel 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023..... II-49
Tabel 2. 10 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023..... II-52
Tabel 2. 11 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... II-67
Tabel 2. 12 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2019–2024..... II-68
Tabel 2. 13 Realisasi PMDN Provinsi Lampung Tahun 2019–2024..... II-69
Tabel 2. 14 Realisasi PMA Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 ..... II-69
Tabel 2. 15 Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung..... II-70
Tabel 2. 16 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024..... II-71
Tabel 2. 17 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2023..... II-72
Tabel 2. 18 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024..... II-73
Tabel 2. 19 Tabel Produksi Daging Sapi (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024..... II-75
Tabel 2. 20 Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2. 21 Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 ..... II-79
Tabel 2. 22 Jumlah Data UMKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023 Provinsi Lampung II-80
Tabel 2. 23 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan..... II-82
Tabel 2. 24 Pariwisata di Provinsi Lampung II-83
Tabel 2. 25 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Di Provinsi Lampung II-89
Tabel 2. 26 Persentase Status Kewenangan Daerah Irigasi di Provinsi Lampung. II-90
Tabel 2. 27 Status kepemilikan Rumah tangga di Provinsi Lampung II-98
Tabel 2. 28 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022..... II-99
Tabel 2. 29 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

	di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022	II-99
Tabel 2. 30	Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045	II-101
Tabel 2. 31	Luasan Lahan Permukiman 2025-2045	II-102
Tabel 2. 32	Spesifikasi dari Dermaga I.	II-108
Tabel 2. 33	Spesifikasi dari Dermaga II.	II-108
Tabel 2. 34	Spesifikasi dari Dermaga III.	II-109
Tabel 2. 35	Spesifikasi dari Dermaga IV.	II-110
Tabel 2. 36	Spesifikasi dari Dermaga V.	II-110
Tabel 2. 37	Kondisi Pertambangan Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota	II-113
Tabel 2. 38	Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tahun 2023	II-128
Tabel 2. 39	Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023	II-128
Tabel 2. 40	Ketersediaan Sekolah Menengah Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Tahun 2023	II-130
Tabel 2. 41	Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023..	II-132
Tabel 2. 42	Prevalensi Stunting 2013-2023	II-136
Tabel 2. 43	Ketersediaan Puskesmas Terhadap Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023	II-141
Tabel 2. 44	Ketersediaan Rumah Sakit Berdasar Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-144
Tabel 2. 45	Pencapaian Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Lampung Tahun 2020-2023	II-154
Tabel 2. 46	Coverage Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tahun 2024	II-157
Tabel 2. 47	Tabel Realisasi dan Target Coverage Kepesertaan Jamsostek Tahun 2023-2025 Wilayah Sumatera	II-159
Tabel 2. 48	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Februari 2024)	II-163
Tabel 2. 49	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Februari 2024)	II-164
Tabel 2. 50	Status Ketenagakerjaan	II-164
Tabel 2. 51	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-165
Tabel 2. 52	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-166
Tabel 2. 53	Data Kependudukan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-169
Tabel 2. 54	Jumlah Transmigran yang Dikirim Ke Luar Provinsi Lampung Tahun 2022-2023	II-177
Tabel 2. 55	Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung	II-178
Tabel 2. 56	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung	II-180
Tabel 2. 57	Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung	II-181
Tabel 2. 58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023	II-184
Tabel 2. 59	Capaian Cakupan Pelayanan & Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung	II-192
Tabel 2. 60	Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	II-192

Tabel 2. 61 Konsumsi Listrik per kapita tahun 2020 - 2024 ..... II-194
Tabel 2. 62 Capaian Indeks Resiko Bencana Tingkat Kabupaten / Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2024 ..... II-196
Tabel 2. 63 Provinsi Lampung Tahun 2016-2022 ..... II-198
Tabel 2. 64 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung II-200
Tabel 2. 65 Capaian Indikator Kinerja IID Balitbangda Provinsi Lampung Th. 2019-2023 ..... II-202
Tabel 2. 66 Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020 - 2024 ..... II-204
Tabel 2. 67 Data Kepegawaian Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024 ..... II-204
Tabel 2. 68 Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Diklat Tahun 2019-2023 ..... II-206
Tabel 2. 69 Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan II-207
Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 ..... II-212
Tabel 2. 71 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja II-215
Tabel 2. 72 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-218
Tabel 2. 73 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar) II-224
Tabel 2. 74 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar) II-231
Tabel 2. 75 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan) II-240
Tabel 2. 76 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Penunjang) II-245
Tabel 2. 77 Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 ..... II-268

BAB III

Tabel 3. 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... III-9
Tabel 3. 2 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026 ..... III-10
Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2026 ..... III-13
Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung III-23
Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... III-26
Tabel 3. 6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 – 2024 ..... III-28
Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... III-31
Tabel 3. 8 Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2022-2024 ..... III-32
Tabel 3. 9 Proyeksi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... III-34
Tabel 3. 10 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) III-35

BAB IV

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 .. IV-12
Tabel 4. 2 Asumsi Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... IV-56
Tabel 4. 3 Keselarasan RPJMD 2025-2029, Prioritas Pembangunan Daerah 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026 ..... IV-57
Tabel 4. 4 Program Dan Sub Kegiatan Prioritas Asta Cita Provinsi Tahun 2026 . IV-60

Tabel 4. 5 Outcome Prioritas Asta Cita Provinsi Tahun 2026 ..... IV-84
Tabel 4. 6 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... IV-119
Tabel 4. 7 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 ..... IV-159

BAB V

Tabel 5. 1 Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan Highlight Indikasi Intervensi V-5
Tabel 5. 2 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah. V-14
Tabel 5. 3 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-17
Tabel 5. 4 Analisis Kuadran PDRB per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-18
Tabel 5. 5 Capaian dan Laju Pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-24
Tabel 5. 6 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-25
Tabel 5. 7 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-29
Tabel 5. 8 Analisis Kuadran Capaian Persentase TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-30
Tabel 5. 9 Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-34
Tabel 5. 10 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-35
Tabel 5. 11 Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-39
Tabel 5. 12 Analisis Kuadran Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... V-40
Tabel 5. 13 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan V-44
Tabel 5. 14 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan V-47
Tabel 5. 15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V-49
Tabel 5. 16 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman V-50
Tabel 5. 17 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat V-51
Tabel 5. 18 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial V-52
Tabel 5. 19 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja V-55
Tabel 5. 20 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-56

Tabel 5. 21 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan V-57
Tabel 5. 22 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan V-58
Tabel 5. 23 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup V-59
Tabel 5. 24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa V-60
Tabel 5. 25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-61
Tabel 5. 26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perhubungan V-62
Tabel 5. 27 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika V-63
Tabel 5. 28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah V-64
Tabel 5. 29 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal V-65
Tabel 5. 30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olah Raga V-65
Tabel 5. 31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik V-67
Tabel 5. 32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian V-67
Tabel 5. 33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan V-68
Tabel 5. 34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan V-69
Tabel 5. 35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan V-70
Tabel 5. 36 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan V-71
Tabel 5. 37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata V-72
Tabel 5. 38 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian V-73
Tabel 5. 39 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan V-74
Tabel 5. 40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral V-74
Tabel 5. 41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan V-75
Tabel 5. 42 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian V-76
Tabel 5. 43 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Transmigrasi V-76

Tabel 5. 44 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesbangpol V-77
Tabel 5. 45 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional V-79

BAB VI
Tabel 6. 1 Kerangka Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... VI-3
Tabel 6. 2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... VI-6
Tabel 6. 3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2026 ..... VI-18
Tabel 6. 4 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026 ..... VI-36
Tabel 6. 5 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... VI-45
Tabel 6. 6 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM VI-50
Tabel 6. 7 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2026 .. VI-66

BAB VII
Tabel 7. 1 Asumsi Makro Provinsi Lampung Tahun 2026 ..... VII-2
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 ..... VII-4
Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah Per Aspek Pemerintahan VII-7
Tabel 7. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026 ..... VII-12

DAFTAR GRAFIK

BAB II

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Lampung Tahun 1971-2020 ..... II-30
Grafik 2. 2 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Distribusinya di Indonesia, Tahun 2020 ..... II-31
Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023 .. II-32
Grafik 2. 4 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1971-2020 ... II-33
Grafik 2. 5 Keragaman Pemeluk Agama Tahun 2022 dan Keragaman Suku Penduduk Tahun 2010 di Lampung II-35
Grafik 2. 6 Capaian Angka Kemiskinan Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024 II-43
Grafik 2. 7 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... II-45
Grafik 2. 8 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap target daerah dan Capaian Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-48
Grafik 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019-2024 ..... II-49
Grafik 2. 10 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024 (ADHB, Juta Rupiah) II-51
Grafik 2. 11 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024 (ADHB, Juta Rupiah) II-52
Grafik 2. 12 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2017 – 2021 ..... II-53
Grafik 2. 13 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akamodasi dan Makan Minum Indonesia II-58
Grafik 2. 14 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Lampung II-59
Grafik 2. 15 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional II-60
Grafik 2. 16 Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2006-2024 ..... II-63
Grafik 2. 17 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 ..... II-64
Grafik 2. 18 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2024 ..... II-64
Grafik 2. 19 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2024 ..... II-65
Grafik 2. 20 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024 ..... II-74
Grafik 2. 21 Produksi Daging Sapi (ton) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-75
Grafik 2. 22 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019 – 2023 .... II-77
Grafik 2. 23 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023 ..... II-78
Grafik 2. 24 Rekapitulasi Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kabupaten/Kota II-78
Grafik 2. 25 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2023 ..... II-118
Grafik 2. 26 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023 ..... II-119

Grafik 2. 27 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional Tahun 2022 – 2023 ..... II-119
Grafik 2. 28 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Berdasarkan Dimensi Tahun 2022 – 2023 ..... II-120
Grafik 2. 29 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung, 2010-2024 ..... II-121
Grafik 2. 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ..... II-125
Grafik 2. 31 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-126
Grafik 2. 32 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-127
Grafik 2. 33 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2020-2024 ..... II-130
Grafik 2. 34 Penyebab kematian bayi tahun 2019-2023 ..... II-133
Grafik 2. 35 Trend kasus kematian Ibu tahun 2020-2024 ..... II-134
Grafik 2. 36 Penyebab kematian Ibu tahun 2019-2023 ..... II-135
Grafik 2. 37 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Provinsi Lampung 2020-2024 ..... II-139
Grafik 2. 38 Rasio Puskesmas Terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 ..... II-140
Grafik 2. 39 Trend Capaian Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 ..... II-142
Grafik 2. 40 Cakupan Penemuan Kasus TBC (CDR) Di Provinsi Lampung Tahun 2024 II-146
Grafik 2. 41 Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru (success rate) Provinsi Lampung 2020-2024 ..... II-146
Grafik 2. 42 Distribusi Penemuan Kasus AFP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... II-149
Grafik 2. 43 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2023 II-150
Grafik 2. 44 Trend Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2019-2023 perbaiki grafik nya range nya 70-100 II-150
Grafik 2. 45 Trend Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Provinsi Lampung Tahun 2018-2024 ..... II-151
Grafik 2. 46 Trend Indeks Keluarga Sehat (IKK) (Metadata Baru) II-153
Grafik 2. 47 Trend Jaminan Kesehatan PBI Dan Non PBI Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ..... II-156
Grafik 2. 48 Trend Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2020-2024 ..... II-157
Grafik 2. 49 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung II-167
Grafik 2. 50 Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ..... II-168
Grafik 2. 51 Perkembangan TFR Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 ..... II-170
Grafik 2. 52 Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 ..... II-171
Grafik 2. 53 Persentase Perempuan usia 15-49 tahun yang Menggunakan Alat KB II-171
Grafik 2. 54 Trend capaian Pemuda Wirausaha Kerah Putih dan

	Tingkat Pengangguran Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2019-2022	II-172
Grafik 2. 55	Trend Peran Aktif pemuda dalam organisasi dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022	II-173
Grafik 2. 56	Trend Capaian Pemuda Berprestasi di Provinsi Lampung	II-174
Grafik 2. 57	Trend Atlet Pelajar Berprestasi tingkat Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	II-174
Grafik 2. 58	Persentase Pengunjung Perpustakaan yang menjadi Anggota Perpustakaan Tahun 2019 - 2023	II-176
Grafik 2. 59	Perubahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023	II-186
Grafik 2. 60	Capaian Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung	II-196
Grafik 2. 61	Trend Kepemilikan Dokumen Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023	II-208
Grafik 2. 62	Trend Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Lampung	II-209

BAB III

Grafik 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023 - 2026 (%, yoy)	III-5
Grafik 3. 2	Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	III-18

BAB V

Grafik 5. 1	Analisis Kuadran Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024	V-18
Grafik 5.2	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024	V-25
Grafik 5. 3	Analisis Kuadran Capaian TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024	V-30
Grafik 5. 4	Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024	V-35
Grafik 5. 5	Analisis Kuadran Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024	V-40

PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Lampung
2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: *1)* Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; *2)* Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; *3)* Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; *4)* Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; *5)* Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; *6)* Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan *7)* Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan.

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua periode Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sekaligus tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Diharapkan tahun 2026 sebagai tahun awal momentum perubahan kearah lebih baik dibawah kepemimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan memperkuat sinergi antar stakeholder pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen

perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*); dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan *pendekatan politik* dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif *pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif,* substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance.*
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari *proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (bottom-up)*, dimulai dari: Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Musrenbang Provinsi Lampung hingga Musrenbang Nasional; bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.
- Dalam hal proses *pendekatan perencanaan secara atas- bawah* (*top-down)*, penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 juga dipaduserasikan dan dukungan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan Rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda kabupaten/kota se Provinsi Lampung sekaligus *kick off* Penyusunan Perencanaan Tahun 2026, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, Musrenbang Kabupaten/Kota, dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi. Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2026 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Provinsi Lampung. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2025 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 pada bulan Juni 2025.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026

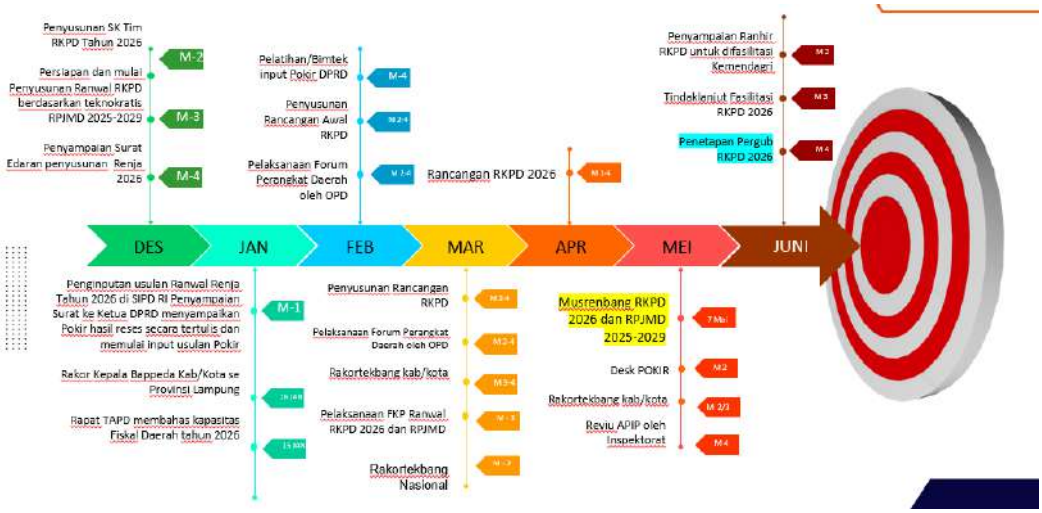

Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan

kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 adalah ***"Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** selaras dengan tema RKP 2026, yaitu : ***"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif".***

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

20. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap penganggaran daerah. Keterkaitan dengan dokumen RPJMD dengan memperhatikan Permendagri No.86 Tahun 2017, keterkaitan dengan RKP Tahun 2026 dengan memedomani Permendagri No.10 Tahun 2026. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1. 2 Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

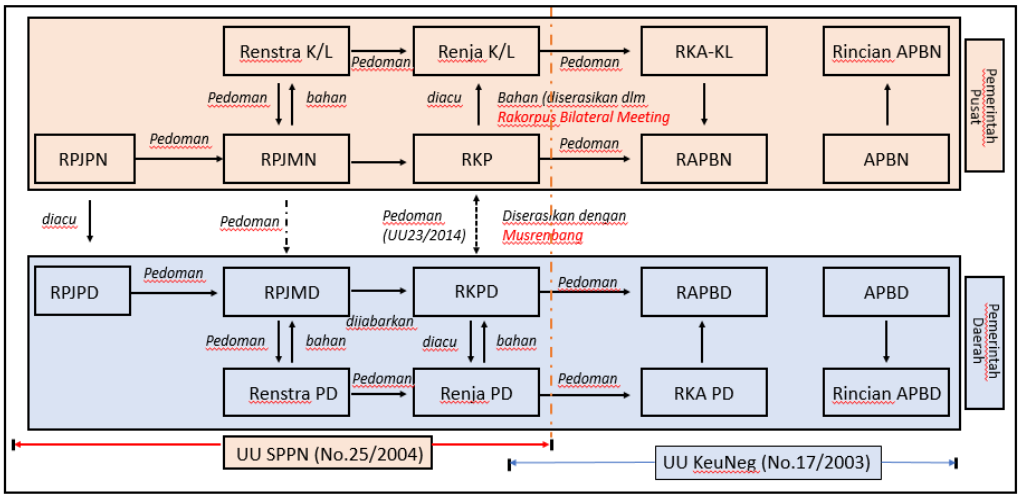

RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau Rancangan KUA PPAS. Rancangan KUA PPAS disusun minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Selanjutnya Rancangan KUA PPAS dibahas menjadi KUA PPAS dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.

Gambar 1.3 Hubungan antara RKPD dan APBD

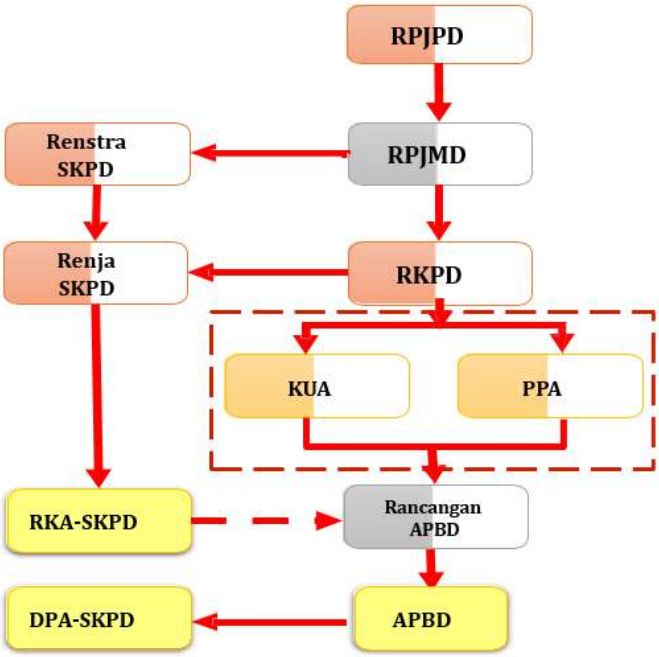

1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang disinergikan dengan arah kebijakan Nasional dan RKP Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)* untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2025.

6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

7) Dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan RKPD kabupaten dan kota tahun 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

1.3. Hubungan Antardokumen

Menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

1.5. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum dan capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun lalu dan RPJMD 2019-2024.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2024 dan pencapaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2024.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung hingga tahun 2026, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2025 dan tahun 2026.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2026.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2026 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

4.3 Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Menjelaskan rencana pembangunan tahun 2026 menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Pokok- Pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2026.

5.2 Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan target capaian sasaran makro kabupaten/kota tahun 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2026, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menjelaskan sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2026.

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan RKPD tahun 2026.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2026

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara astronomis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40' - 105°50' Bujur Timur dan 6°45' - 3°45' Lintang Selatan. Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung mempunyai posisi strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, cakupan wilayah Lampung meliputi 13 kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan 172 pulau dan panjang garis pantai mencapai 1.345,20 km, luas keseluruhan mencapai 4.997.290 ha, terdiri dari luas daratan 3.357.026,40 ha dan wilayah perairan pesisir mencakup wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut provinsi yang berdekatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Lampung memiliki 30 segmen batas wilayah antar kabupaten dan provinsi yang terdiri dari 21 segmen batas antar kabupaten/kota serta 8 (delapan) segmen batas antar Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) segmen batas antar Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yaitu sebesar 13,58 persen dari luas Provinsi Lampung, sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro dengan proporsi luasan hanya sebesar 0,21 persen dari total luas wilayah Lampung.

Berikut Provinsi Lampung yang dibagi dalam 15 Kabupaten/Kota, yaitu:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Km²)	Ibukota	Jumlah Pulau
1	Lampung Tengah	4.559,57	Gunung Sugih	-
2	Lampung Timur	3.860,92	Sukadana	5
3	Way Kanan	3.522,11	Blambangan Umpu	-
4	Tulang Bawang	3.116,06	Menggala	-
5	Tanggamus	2.947,59	Kota Agung	76
6	Pesisir Barat	2.939,60	Krui	3
7	Lampung Utara	2.669,30	Kotabumi	-
8	Lampung Selatan	2.227,38	Kalianda	50
9	Mesuji	2.200,41	Wiralaga Mulya	-
10	Lampung Barat	2.107,99	Liwa	-
11	Pesawaran	1.288,08	Gedong Tataan	36
12	Tulang Bawang Barat	1.257,09	Panaragan	-
13	Pringsewu	617,19	Pringsewu	-
14	Kota Bandar Lampung	183,75	Bandar Lampung	2
15	Kota Metro	73,21	Metro	-
Provinsi Lampung		33.570,26		172

Sumber: Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Lampung

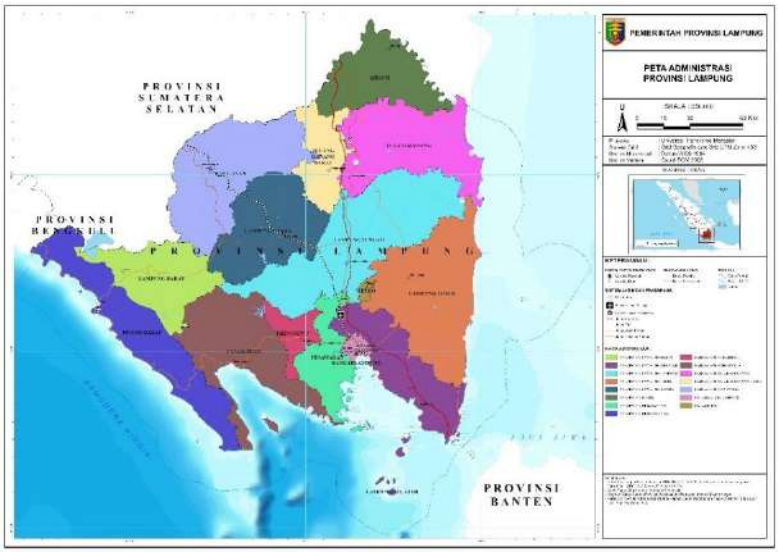

Sumber: Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2023

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Lampung dibagi dalam 5 (lima) unit topografi meliputi daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis

berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah dataran rawa pasang surut dan daerah *river* basin. Kemiringan lereng Provinsi Lampung didominasi kemiringan <2% seluas 1.359.206,7 ha. Kemiringan 2-8% seluas 1.161.679,4 ha yang tersebar disetiap kabupaten/kota. Ketinggian di Provinsi Lampung terbagi menjadi beberapa klasifikasi ketinggian dengan ketinggian yang mendominasi yaitu pada ketinggian <200 mdpl dengan luas 2.558.180,9 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Geologi di Provinsi Lampung didominasi oleh jenis Formasi Lampung dengan luas 585.365,98 ha atau 17,44% dan Formasi Ranau dengan luas 482.602,68 ha atau 14,38%. Jenis tanah di Provinsi Lampung terdiri dari Andaquepts; Tropaquepts, Dystrandepts; Eutrandep.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Lampung yang terbesar yaitu DAS Tulang Bawang dengan luas 946.428,81 Ha, DAS Seputih seluas 752.388,09 Ha, DAS Sekampung seluas 482.198,31 Ha dan DAS Mesuji seluas 277.370,52 Ha. Terdapat 9 (sembilan) Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Lampung dengan luas total 3.357.463,5 ha meliputi CAT Bandar Lampung, CAT Baturaja, CAT Gedung Meneng, CAT Kalianda, CAT Kota Agung, CAT Metro-Kotabumi, CAT Ranau, dan CAT Talang Padang. CAT Metro-Kotabumi merupakan CAT paling besar dengan luas 2.043.098,1 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Lampung.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Provinsi Lampung beriklim tropis-humid, karena terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan. Angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata rata berkisar antara 26°C - 28°C, dengan suhu maksimum sebesar 33°C dan minimum sebesar 20°C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Rata-rata curah hujan bulanan setiap tahunnya sebesar 168,95 mm/bulan dan rata-rata curah tahunan adalah antara 1.500 s/d 3.500 mm.

Tabel 2. 2 Curah Hujan Rata-Rata per Tahun (Mm)

No.	Kabupaten/ Kota	Curah Hujan Rata-Rata Normal Tahunan (mm)				
		<1.800	1.800-2.500	2.500-2.800	2.800-3.000	>3.000
1	Bandar Lampung	-	1.95	-	-	-
2	Lampung Barat	-	2.301	-	-	-
3	Lampung Selatan	-	1.994	-	-	-
4	Lampung Tengah	-	2.22	-	-	-
5	Lampung Timur	-	2.147	-	-	-
6	Lampung Utara	-	2.373	-	-	-
7	Mesuji	1.726	-	-	-	-
8	Metro	-	2.164	-	-	-
9	Pesawaran	-	1.905	-	-	-
10	Pesisir Barat	-	-	-	2.828	-
11	Tanggamus	-	2.067	-	-	-
12	Pringsewu	1.696	-	-	-	-
13	Tulang Bawang Barat	-	2.233	-	-	-
14	Tulang Bawang	-	2.155	-	-	-
15	Way Kanan	-	2.442	-	-	-

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2022

Gambar 2. 2 Peta Klimatologi Provinsi Lampung

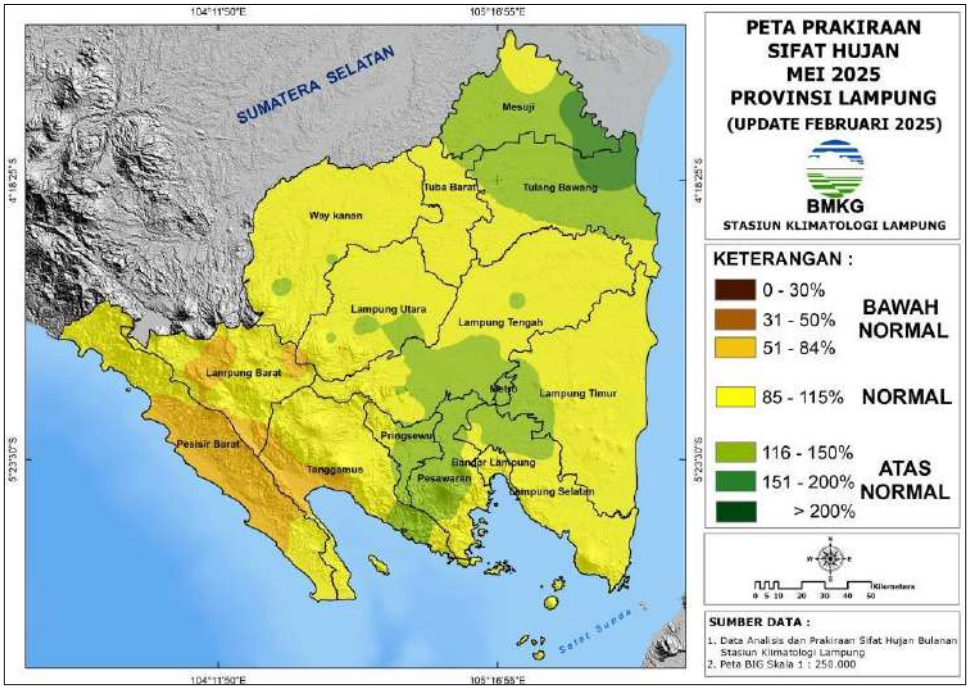

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2025

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kondisi potensi pengembangan wilayah dapat ditinjau dari rencana tata ruang. Berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 dengan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis sebagai berikut :

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur wilayah provinsi Lampung adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem pusat permukiman di Provinsi Lampung didasarkan pada penetapan sistem perkotaan di dalam RTRWN Tahun 2018-2038. Untuk mendorong pertumbuhan pengembangan wilayah, maka arahan sistem pusat perkotaan Provinsi Lampung meliputi:

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi; PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Arahan sistem perkotaan di Kota Bandar Lampung,
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi; PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Arahan sistem perkotaan di Kota Metro,Kawasan Perkotaan Kotabumi (Lampung Utara), Kawasan Perkotaan Liwa (Lampung Barat), Kawasan Perkotaan Kalianda (Lampung Selatan), Kawasan Perkotaan Kotaagung (Tanggamus), Kawasan Perkotaan Menggala (Tulang Bawang).
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Arahan sistem pusat permukiman di kawasan perkotaan Bakauheni (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Tanjung Bintang (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Sidomulyo (Lampung Selatan), kawasan perkotaan Unit II Banjar Agung (Tulang Bawang), kawasan perkotaan Seputih Banyak dan Kalirejo (Lampung Tengah), kawasan perkotaan Way Jepara (Lampung Timur), kawasan perkotaan Fajar Bulan (Lampung Barat), kawasan perkotaan Labuhan Maringgai

(Lampung Timur), kawasan perkotaan Bukit Kemuning (Lampung Utara), kawasan perkotaan Wiralaga (Mesuji), kawasan perkotaan Wonosobo (Tanggamus), kawasan perkotaan Natar-Jati Agung (Lampung Selatan), Kawasan Perkotaan Sukadana (Lampung Timur), Kawasan Perkotaan Pringsewu (Pringsewu), Kawasan Perkotaan Gedong Tataan (Pesawaran), Kawasan Perkotaan Krui (Pesisir Barat), Kawasan Perkotaan Simpang Pematang (Mesuji), Kawasan Perkotaan Panaragan (Tulang Bawang Barat), Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu (Way Kanan), Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus) (Lampung Tengah), Kawasan Perkotaan Lumbok Seminung (Lampung Barat); dan Kawasan Perkotaan Pura Jaya (Lampung Barat).

Gambar 2. 3 Struktur Ruang Provinsi Lampung

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

A. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Jaringan jalan, merupakan satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan

jalan desa. Dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala. Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, disebutkan bahwa persyaratan teknis untuk jalan diantaranya:

1. Jalan Arteri, Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2022, jalan arteri primer sejumlah 44 ruas jalan;
2. Jalan Kolektor, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022, jalan arteri primer sejumlah 21 ruas jalan; berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/297/V.03/HK/2023 tentang Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer dan Semua Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder serta Jalan Strategis Provinsi sejumlah 98 ruas jalan menurut fungsinya berupa Jalan Strategis Provinsi, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-2, dengan panjang 1.695,379 km;
3. Jalan Tol, Pengembangan jalan tol di Provinsi Lampung, meliputi 8 (delapan) ruas jalan;
4. Terminal Penumpang, Terminal Tipe A, meliputi: Terminal Rajabasa di (Bandar Lampung), dan Terminal Betan Subing (Lampung Tengah). Saat ini terdapat Terminal Tipe B yaitu Terminal 16C Mulyojati dan Terminal Propau dan direncanakan akan dikembangkan 15 terminal Tipe B yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung;
5. Terminal Barang, Rencana pengembangan Terminal Agribisnis di kawasan industri Way Pisang dan Terminal Barang Gayam;
6. Jembatan Timbang, Rencana pengembangan Jembatan Timbang Way Urang, Jembatan Timbang Simpang Pematang dan Jembatan Timbang Blambangan Umpu.

Gambar 2. 4 Peta Rencana Jalan Tol Provinsi Lampung

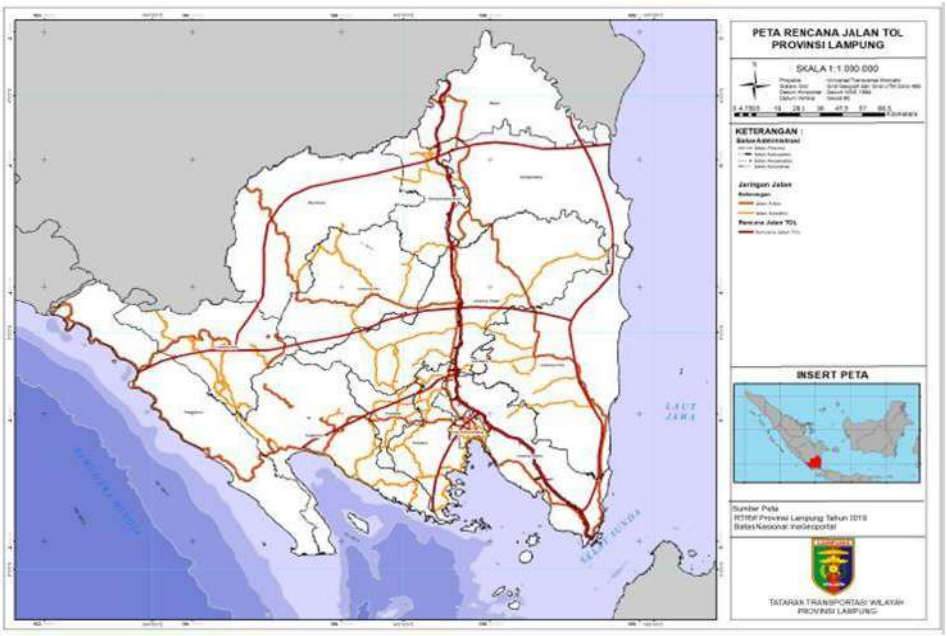

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

Sistem Jaringan Kereta Api, Provinsi Lampung mempunyai jalur kereta api antara Bandar Lampung – Palembang, yang merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api di Sumatera Bagian Selatan yang dioperasikan oleh PT Kereta Api (Persero) Divre IV Tanjung Karang, selain bersifat merakyat (SAUM/sarana angkutan umum massal) dan ekonomis juga dapat mengurangi beban jalan. Oleh karena itu, rencana pengembangan sistem jaringan kereta api di Provinsi Lampung meliputi, Jaringan dan Layanan Kereta Api antar Kota, Jaringan dan Layanan Kereta Api Perkotaan dan Stasiun Kereta Api. Jaringan jalur kereta api yang terdapat di Provinsi lampung diantaranya : Prabumulih (Sumatera Selatan) - Tegineneng - Tarahan; Reaktivasi jalur menuju Pelabuhan Panjang; dan beberapa rencana pengembangan antara lain : 1) Rencana jalur kereta api ganda (*double track*) Tanjung Karang - Kertapati; 2) Rencana jalur kereta api ganda (*double track*) Tanjung Karang - Pringsewu; 3) Rencana Shortcut Tegineneng - ITERA - Tarahan; 4) Rencana jalur Bandar Lampung - Bakauheni; 5) Terbanggi Besar - Unit II; dan Unit II - Simpang Pematang.

Sistem Jaringan (SDP) Sungai, Danau dan Penyeberangan, dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan penumpang dan barang di wilayah Provinsi Lampung melalui jalur sungai dan danau. Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata air menuju objek-objek wisata yang ada di kabupaten/kota. Pengembangan jaringan

sungai, danau dan penyeberangan didukung dengan pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung angkutan penumpang dan sumberdaya alam serta transportasi logistik.

Pelabuhan sungai dan danau berdasarkan Kepmenhub Nomor KP 432 Tahun 2017, pelabuhan sungai dan danau di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Pagar Dewa; 2) Pelabuhan Dermaga Lumbok; 3) Pelabuhan Sukau; 4) Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung; 5) Pelabuhan Wiralaga; 6) Pelabuhan Mesuji Timur; 7) Pelabuhan Sungai Sidang; 8) Pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih; 9) Pelabuhan Dermaga Sungai Kota Terpadu Mandiri SP.VIII; 10) Pelabuhan Dermaga Kuala Teladas; 11) Pelabuhan Dermaga Panaragan; 12) Pelabuhan Dermaga Karta; dan 13) Pelabuhan Dermaga Gunung Terang.

Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Lampung meliputi: 1) Pelabuhan Bakauheni; 2) Pelabuhan Ketapang; 3) Pelabuhan Tabuan; 4) Pelabuhan Madang; 5) Pelabuhan Pulau Sebesi; 6) Pelabuhan Canti; 7) Pelabuhan Teluk Betung dan Rencana Pelabuhan di Tanah Merah di Kabupaten Mesuji. Pelabuhan Lintas penyeberangan antarnegara di Provinsi Lampung meliputi: Kota Agung di Perairan Teluk Semangka; dan Panjang di Perairan Teluk Lampung. Sedangkan Pelabuhan Lintas penyeberangan antar provinsi berada di Lempasing di Kota Bandar Lampung.

Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi pelabuhan laut dan pelayaran di laut. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Adapun rencana pengembangan pelabuhan laut yang terdapat di Provinsi Lampung berdasarkan KepMen Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, meliputi: Pelabuhan utama adalah Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Kota Agung/Tanjung Balai di Kabupaten Tanggamus. Pelabuhan pengumpan regional, meliputi: 1) Pelabuhan Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan; 2) Pelabuhan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur; 3) Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; 4) Pelabuhan Mesuji di Kabupaten Mesuji; dan 5) Pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung.

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai dan danau. Adapun alur pelayanan berdasarkan RZWP3K Provinsi Lampung meliputi alur pelayaran internasional/nasional. Alur Pelayaran terbagi menjadi alur pelayaran umum dan perlintasan, alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan alur-pelayaran khusus.

- Alur pelayanan umum dan perlintasan meliputi Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI Perairan Selat Sunda; dan Perairan Timur Lampung.
- Alur Pelayaran masuk pelabuhan meliputi: Pelabuhan Kuala Penet; Pelabuhan Labuhan Maringgai; Pelabuhan Ketapang; Pelabuhan Muara Piluk; Pelabuhan Kalianda; Pelabuhan Sebesi; Pelabuhan Pahawang; Pelabuhan Siuncal; Pelabuhan Legundi; Pelabuhan Penyandingan; Pelabuhan Tegineneng; Pelabuhan P. Tabuan; Pelabuhan Kota Agung; Pelabuhan Pematang Sawa; Pelabuhan Way Haru; Pelabuhan P. Betuah; Pelabuhan Siging; dan Pelabuhan Tanjung Setia.
- Alur pelayaran khusus meliputi: Bakauheni - Merak di Kabupaten Lampung Selatan; dan Merak - Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan.
- Alur-pelayaran di laut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Sistem Jaringan Transportasi Udara, Sistem jaringan transportasi udara di Provinsi Lampung terdiri atas: 1) Bandar Udara pengumpul berada di Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan. 2) Bandar Udara pengumpan meliputi: Bandar Udara Muhamad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan (sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus TNI).

B. Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pentingnya energi listrik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tiap penduduk membuat pentingnya untuk memproyeksikan kebutuhan listrik tiap individu agar dapat tercukupi dalam masa mendatang.

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan :

1. Infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi: Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi : PLTA Besai, PLTA Batu Tegi, dan PLTA Semangka.

2. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi : PLTU Tarahan, PLTU Sebalang, PLTU Gunung Sugih, PLTU Gunung Sugih, dan PLTU Pelabuhan Tarahan.
3. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi: PLTP Ulu Belu, dan Rencana PLTP Rajabasa, Rencana PLTP Suoh Sekincau dan Rencana PLTP Way Ratai.
4. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi: PLTD Tarahan, PLTD Teluk Betung, PLTD Tegineneng; PLTD Pulau Sebesi; PLTD Pulau Tabuan; PLTD Pulau Legundi; PLTD Pulau Pahawang; PLTD Pulau Pisang; dan PLTD Natar.
5. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang meliputi: PLTG MPP Tarahan; dan PLTG Sebalang.
6. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang ditetapkan di PLTMG Sutami di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang ditetapkan di PLTBg Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah.
8. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) meliputi: PLTMH Batu Brak; PLTMH Melesom 2 (masih progres); PLTMH Besai Kemu; PLTMH Sumber Jaya; PLTMH Sukarame; PLTMH Kukusan; PLTMH Pahiton; dan PLTMH Tiga Orehon Putra.
9. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan di: PLTS Way Tias; PLTS Way Haru; PLTS Margomulyo; PLTS Suka Maju; Rencana PLTS Pulau Legundi; Rencana PLTS Pulau Tabuhan; dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) meliputi PLTBm Bumiwaras dan PLTBm Bumi Acid Jaya.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

1. Jaringan transmisi tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, meliputi: Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) dengan tegangan 500 KV; Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kekuatan 275 KV; Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dengan kekuatan 150 KV; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV;
2. Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik meliputi: Koridor Labuhan Maringgai-Tanjung Pakis; Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang; Koridor Zona Ekonomi Eksklusif-Laut Jawa; Legundi, Punduh Pidada; Pahawang; Kabel Laut Pulau Pisang; dan Potensi Kabel Laut Tegal Mas;
3. Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Wilayah Provinsi.

C. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Lampung terdiri atas:

1. Jaringan Tetap meliputi; Koridor Kalianda – Anyer; Koridor Lampung Barat - Pulau Pisang; dan Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi Koridor ZEE - Laut Jawa.
2. Jaringan Bergerak berupa jaringan 2G, 3G dan 4G tersebar di Kabupaten dan Kota.

D. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan waduk diarahkan untuk fungsi ekologis, ekosistem, konservasi sumber daya air, pengendalian banjir serta untuk menyuplai ke kawasan-kawasan strategis dan Pemanfaatan sumberdaya air guna menunjang program pemanfaatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pengembangan Sistem jaringan sumber daya air meliputi: Sistem Jaringan Irigasi meliputi:

1. Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas provinsi, yaitu: D.I Komering Selatan/Way Komering; Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI)

kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota, Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota;

2. Sistem Pengendalian Banjir berupa bangunan pengendalian banjir meliputi: Bendungan Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus; Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur; Banjir Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur; Banjir Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; dan Banjir Bendungan Way Sabu di Kabupaten Pesawaran;
3. Bangunan Sumber Daya Air meliputi bangunan prasarana air baku berupa Bendung irigasi sebanyak 49 Bendung dan Bendungan sebanyak 8 Bendungan;
4. Bangunan prasarana air baku berupa Embung berada di seluruh Kabupaten dan Kota;
5. Sumber air baku meliputi Danau Ranau dan Danau Suoh di Kabupaten Lampung Barat;

E. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam pembangunan dan pengembangan air minum Provinsi Lampung, cakupan pelayanan masih merupakan tujuan utama. Oleh karena itu, pembangunan konstruksi prasarana dan sarana air minum menjadi kegiatan utama sedangkan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi masih cenderung terabaikan. Kebijakan pengembangan air minum harus mampu menjangkau semua daerah kawasan permukiman perkotaan, khususnya daerah rawan air serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi Lampung meliputi: SPAM Regional Bandar Lampung; dan SPAM Regional Way Sabu/Way Sabu Atas/Pesawaran;
2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAL). Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah Provinsi Lampung bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Gambar 2. 5 Peta Struktur Ruang Provinsi Lampung

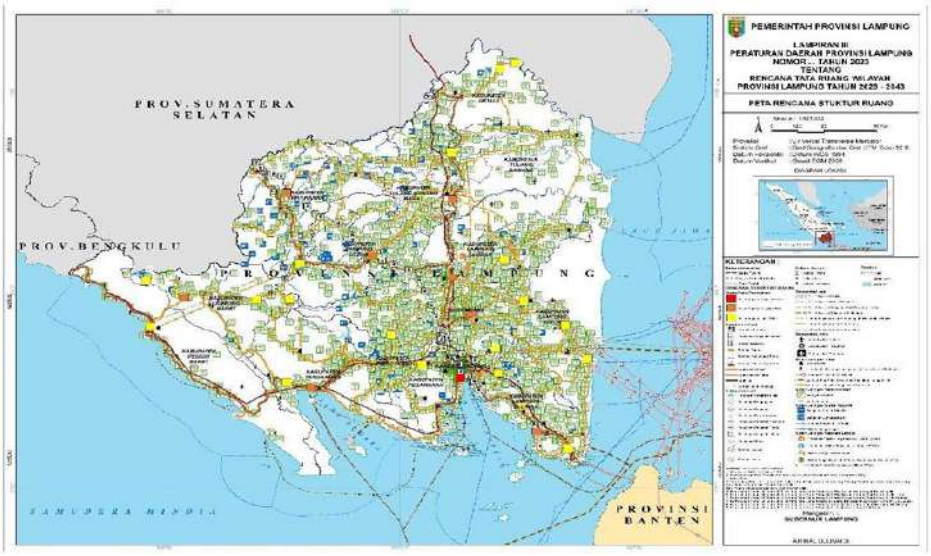

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi Lampung yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya Provinsi Lampung. Rencana pola ruang wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023- 2043 yang meliputi Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya seluas kurang lebih 4.990.415 ha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung

RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
Kawasan Peruntukan Lindung	920.839	18,45
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	321.753	34,94
Kawasan Konservasi	501.114	54,42
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	97.632	10,60
Kawasan Ekosistem Mangrove	340	0,04
Kawasan Peruntukan Budi Daya	4.047.342	81,55
Kawasan Hutan Produksi	197.881	4,86
Kawasan Pertanian	2.118.565	52,06
Kawasan Perikanan	1.430.824	35,16
Kawasan Pertambangan dan Energi	26.513	0,65
Kawasan Peruntukan Industri	22.417	0,55
Kawasan Pariwisata	28.235	0,69
Kawasan Permukiman	213.205	5,24
Kawasan Transportasi	29.827	0,73
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2.109	0,05

RENCANA POLA RUANG	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
TOTAL	4.990.415	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Lampung

Pengembangan pertanian pangan diarahkan untuk tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kebijakan pengembangan Lahan Sawah Lestari/Abadi (Lahan Pertanian Berkelanjutan) disetiap kabupaten dan kota. Karateristik wilayah di Provinsi Lampung didominasi dari kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 2.118.565 ha (52,06%) dari luas Provinsi Lampung tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung. Arahan pengembangan kawasan pertanian meliputi:

- Perwujudan kawasan tanaman pangan
- Pengembangan kawasan perkebunan
- Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kawasan pertanian juga meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS).

Gambar 2. 6 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Lampung Tahun 2022

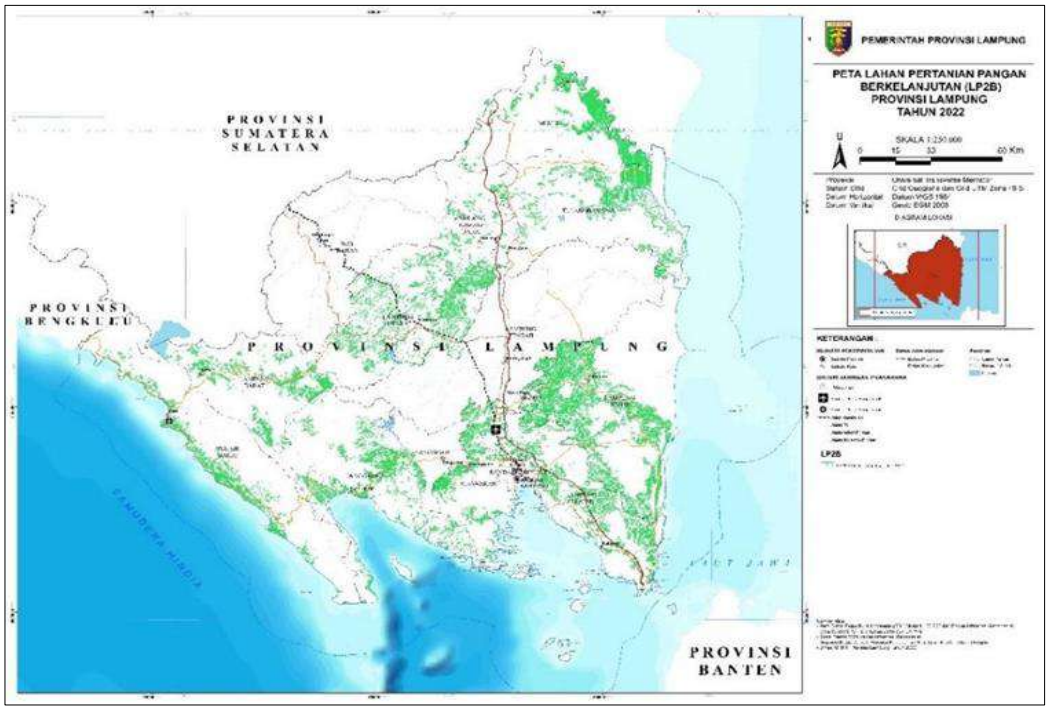

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

Luas lahan baku sawah di Provinsi Lampung seluas 361.699 ha. Lahan baku sawah terluas di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Tengah seluas 79.664 ha.

Gambar 2. 7 Peta Baku Sawah Provinsi Lampung

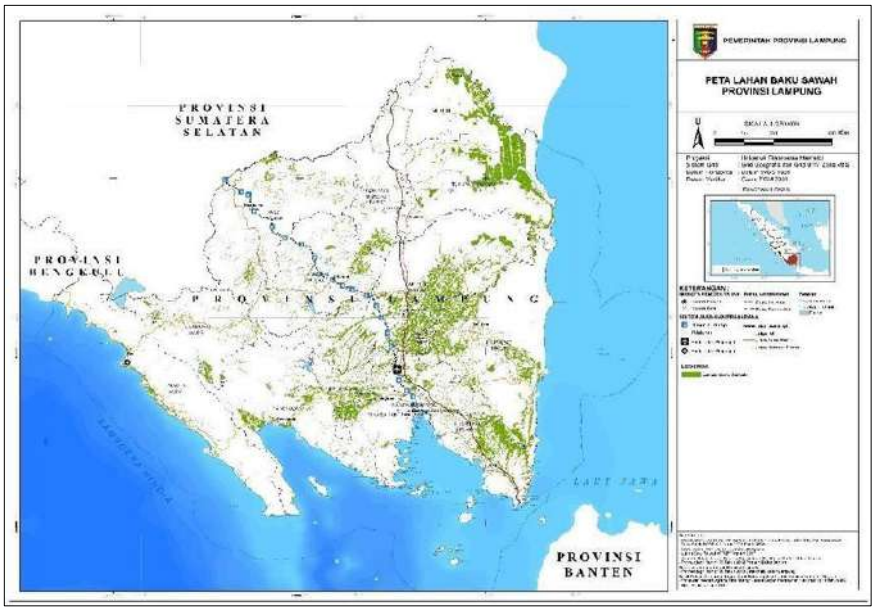

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

Gambar 2. 8 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung

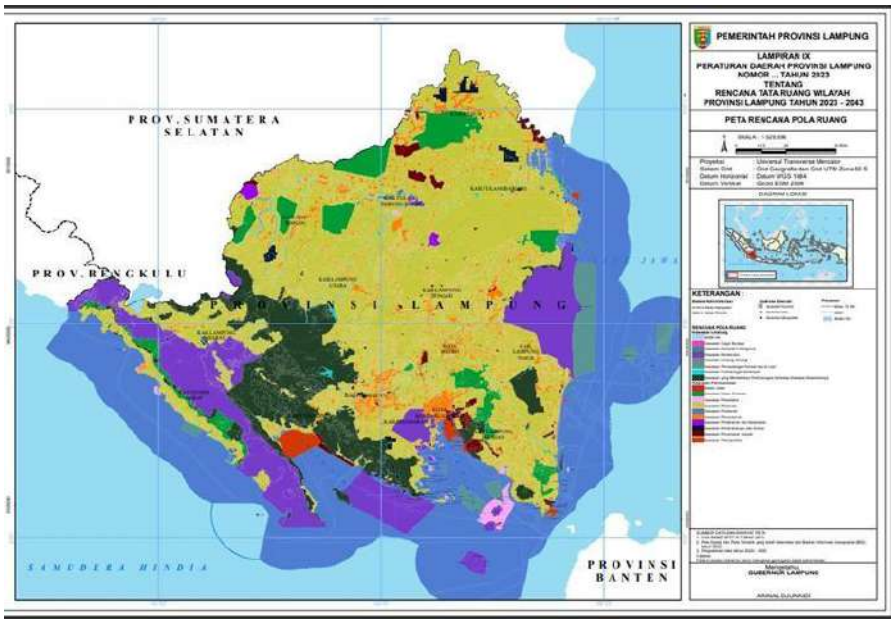

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

3. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Lampung termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi: Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung) dan Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten)

a. Kawasan Strategis Provinsi Lampung

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan Strategis Provinsi Lampung, ditetapkan berdasarkan dua sudut kepentingan diantaranya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung meliputi:

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya	Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran, Lampung Timur dan Lampung Tengah	Mewujudkan Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Industri, dan pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan	• Pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi • Mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau • Menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan • Ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan,

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
			jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi.
Kawasan Pariwisata Pesisir Barat	Kabupaten Pesisir Barat (kawasan pantai Labuan Jukung dan tanjung setia yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil, dan Kabupaten Lampung Barat (Danau Ranau)	Mewujudkan Pariwisata Pesisir Barat sebagai pusat pariwisata skala internasional	• Pengembangan wisata bahari dan ekowisata berbasis kelestarian alam • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata • Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata
Kawasan Teluk Lampung	Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus, Pesawaran	Mewujudkan kawasan Teluk Lampung sebagai pusat pengembangan Pariwisata, Perikanan,industri didukung oleh infrastruktur terpadu	• Pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Teluk Lampung sebagai Ecotourism Centre terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan perikanan • Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perikanan

Adapun deliniasi kawasan strategis dari sudut kepentingan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi:

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	Kabupaten Pesawaran (Gedong Tataan, Kedondong, Padang Cermin, Way Lima) dan Kota Bandar Lampung (Teluk Betung Barat, Teluk Betung	Mewujudkan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagai kawasan konservasi serta ekowisata	• Pelestarian kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman • pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan • pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup

KSP	Deliniasi	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
	Utara dan Kemiling)		
Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi	Kabupaten Tanggamus	Mengembangan kawasan resapan air Bendungan Batutegi sebagai pembangkit tenaga listrik, penyedia air baku, dan pariwisata	• pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan • Pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan
Kawasan Geopark Suoh	Kabupaten Lampung Barat	Mewujudkan kawasan geopark Suoh sebagai pusat konservasi, edukasi dan destinasi pariwisata nasional	• pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan • Pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata

Gambar 2. 9 Peta Kawasan Strategis Provinsi Lampung

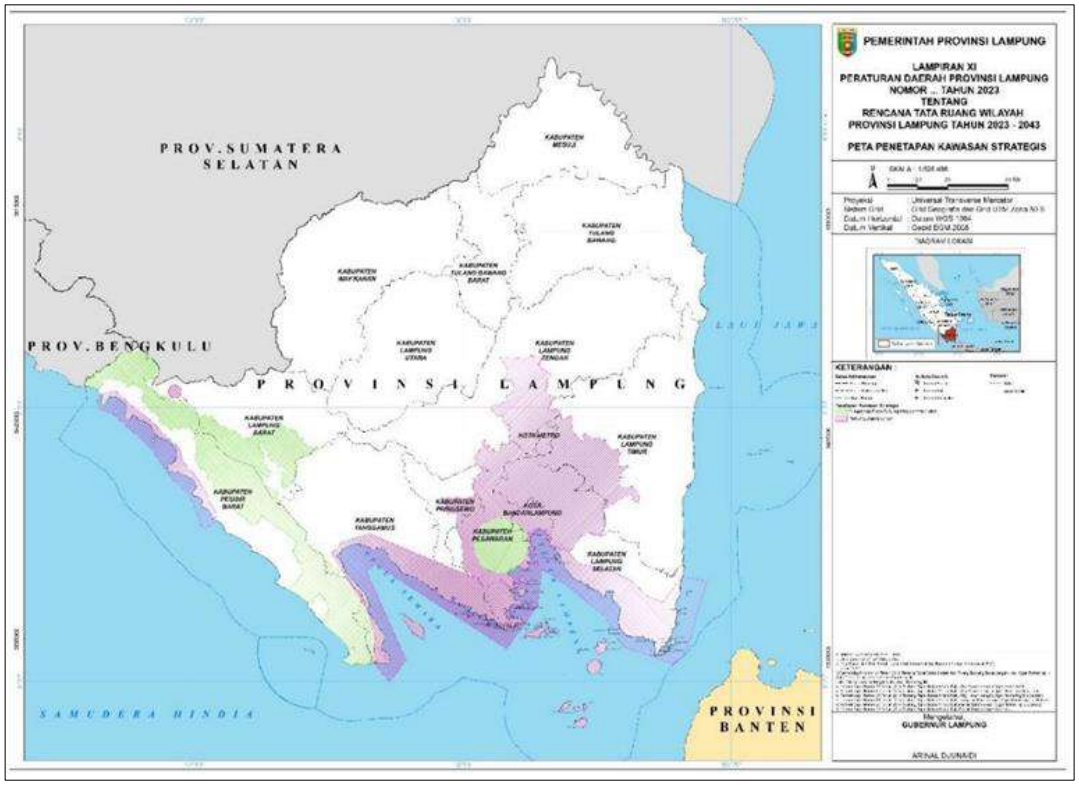

Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Lampung

b. Tinjauan Aglomerasi Metropolitan Bandar Lampung Raya

Berdasarkan kajian awal rencana pengembangan aglomerasi Kawasan Metropolitan Bandar Lampung Raya tahun 2022 lingkup deliniasi kawasan metropolitan meliputi 7 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, Kota Metro dan Bandar Lampung. Deliniasi tersebut diperoleh berdasarkan serangkaian analisa ekologi, sosial dan ekonomi wilayah.

1. Potensi dan Masalah

Adapun potensi dan masalah yang ditemukan dari kajian rencana pengembangan kawasan aglomerasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Daya dukung lahan pada wilayah aglomerasi sebagian besar memiliki klasifikasi kemampuan lahan pada kategori tinggi, sehingga pada aspek lingkungan/ekologi dapat mendukung pengembangan kawasan Metropolitan;
b. Pada aspek kependudukan (tenaga kerja) beberapa wilayah kecamatan sudah menunjukkan kriteria dari kawasan metropolitan yaitu proporsi tenaga kerja pada bidang pertanian < 25 %;
c. Berdasarkan analisis Tutupan Lahan Permukiman pada tahun 2010-2020, beberapa wilayah yang termasuk dalam delineasi kawasan metropolitan mengalami perkembangan secara signifikan diantaranya:
    - Bandar Lampung (Kecamatan Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang);
    - Metro (Kecamatan Metro Utara, Metro Pusat);
    - Lampung Selatan (Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jatiagung)
    - Lampung Tengah (Kecamatan Gunung sugih, Terbanggi Besar)
    - Lampung Timur (Kecamatan Sekampung, Sekampung Udik, Pekalongan)
    - Pringsewu (Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu)
    - Pesawaran (Kecamatan Gedong Tataan, Negerikaton, Tegineneng)
d. Berdasarkan kondisi fiskal daerah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam klasifikasi sedang-sangat tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis tipologi klassen, kedua wilayah tersebut masuk dalam kuadran 1 yang berarti bahwa memiliki potensi besar bagi sumber pendapatan daerah, dan berpotensi memiliki tingkat kemakmuran rakyat yang tinggi
e. Daya Dukung Lahan pada wilayah Kecamatan Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, dan Way Lima di Kabupaten Pesawaran memiliki

klasifikasi kemampuan lahan pada kategori Rendah-Sedang, sehingga pada aspek lingkungan/ekologi akan sangat terbatas dalam mendukung pengembangan kawasan Metropolitan

f. Pada aspek Kependudukan, di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro sebagian besar masih bekerja pada sektor pertanian. Sehingga terdapat batasan-batasan dalam pengembangan kawasan metropolitan

g. Berdasarkan kondisi fiskal daerah pada Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Pesawaran, dan Pringsewu termasuk dalam klasifikasi sangat rendah-sedang sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus dalam meningkatkan kondisi fiskal daerah masing-masing agar dapat mendukung pengembangan kawasan metropolitan

h. Berdasarkan rasio kemandirian daerah, seluruh wilayah kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan metropolitan masih tergolong dalam klasifikasi rendah. Artinya bahwa masing-masing wilayah masih bergantung pada dana yang berasal dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota masih tergolong rendah. Perlunya untuk memperkuat perekonomian dari seluruh Kab/Kota dalam upaya pengembangan kawasan metropolitan.

i. Berdasarkan kondisi ekonomi wilayah (analisis tipologi klassen), kabupaten Pesawaran termasuk dalam posisi kuadran 4 (daerah relatif tertinggal). Artinya bahwa Kabupaten tersebut memiliki tingkat pembangunan yang rendah, dan belum sepenuhnya didukung oleh SDM maupun SDA. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas SDM dimasa datang agar dapat mendukung pengembangan kawasan metropolitan.

2. Tujuan Pengembangan Kawasan

Tujuan Pengembangan Aglomerasi Kawasan Metropolitan Bandar Lampung Raya Kota yaitu Bandar Lampung sebagai kota inti yang memiliki peran sebagai PKN dikelilingi oleh kota dan kawasan perkotaan yang memiliki hirarki lebih kecil (PKW dan PKL) dengan fungsi dan peran sesuai dengan karakteristiknya. Secara umum arahan pengembangannya cenderung pada pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis isi (*Content Analysis*) dan tujuan pengembangan masing-masing kabupaten/kota, maka tujuan Pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Sekitarnya sebagai Kota Perdagangan dan jasa, Industri, dan Pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan".

3. Perwujudan Rencana Pembangunan

Prioritas pemanfaatan ruang yang diperoleh adalah program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahap I di 5 (lima) tahun pertama tahun perencanaan. Prioritas pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung adalah:

a. Perwujudan Struktur Ruang

- Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu
- Revitalisasi permukiman kumuh kota
- Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan umum secara merata
- Peningkatan status jalan antar kota satelit menjadi jalan provinsi
- Meningkatkan kapasitas jalan dengan melakukan pelebaran jalan dan desain geometrik jalan
- Menyediakan lahan parkir sesuai dengan analisis dampak lalu lintas bagi gedung untuk fasilitas umum
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana listrik
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana telekomunikasi
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana drainase
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana sampah

b. Perwujudan Pola Ruang

- Pengadaan ruang terbuka hijau diutamakan pada daerah-daerah yang secara alami peka dan dapat berdampak luas
- Penataan dan pengendalian ruang kota sesuai dengan peruntukannya
- Penataan bangunan di Teluk Lampung
- Pengawasan dan pengendalian daerah konservasi
- Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di sekitar wilayah reklamasi pantai (Teluk Lampung)

- Penyusunan Road Map industri-industri potensial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung.

Gambar 2. 10 Rencana Aglomerasi Kota Bandar Lampung Raya

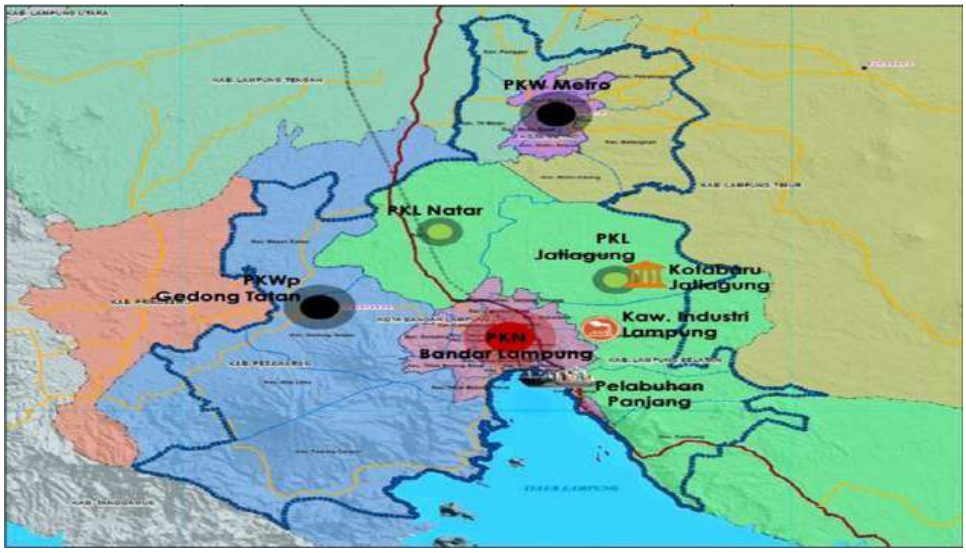

Sumber: Paparan Semiar Nasional Undip dan IAP Lampung oleh Ketua umum IAP 2023

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk dari bahaya tertentu. Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari longsor, gempa bumi dan letusan gunung api.

a. Longsor

Rawan bencana longsor di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan longsor rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan longsor yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan longsor rendah dengan luas 2.650.713,2 ha, sedangkan luasan rawan longsor tinggi adalah sebesar 195.535,5 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada bencana longsor tinggi.

Tabel 2. 4 Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Bencana Longsor (Ha)			Luas (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	46.105,4	101.414,8	63.279,2	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	208.678,0	10.974,1	3.080,9	222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	436.499,4	16.218,7	3.238,9	455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	382.858,4	3.506,1	12,4	386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	202.272,6	53.460,6	11.197,2	266.930,4
6	Kab. Mesuji	215.352,8	4.666,6	21,9	220.041,4
7	Kab. Pesawaran	94.530,6	25.852,5	8.428,6	128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat	154.739,3	97.837,7	41.446,9	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	56.075,0	4.752,7	891,5	61.719,2
10	Kab. Tanggamus	126.866,6	114.713,0	53.264,9	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	301.625,9	9.865,7	118,1	311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	119.806,0	5.843,2	59,5	125.708,8
13	Kab. Way Kanan	284.612,1	57.646,7	9.952,6	352.211,4
14	Kota Bandar lampung	15.521,1	2.310,8	542,9	18.374,9
15	Kota Metro	7.305,3	16,1	-	7.321,4
Jumlah		2.652.848,4	509.076,9	195.535,50	3.357.463,50

Sumber : BPBD Prov. Lampung

Gambar 2. 11 Peta Rawan Bencana Longsor di Provinsi Lampung

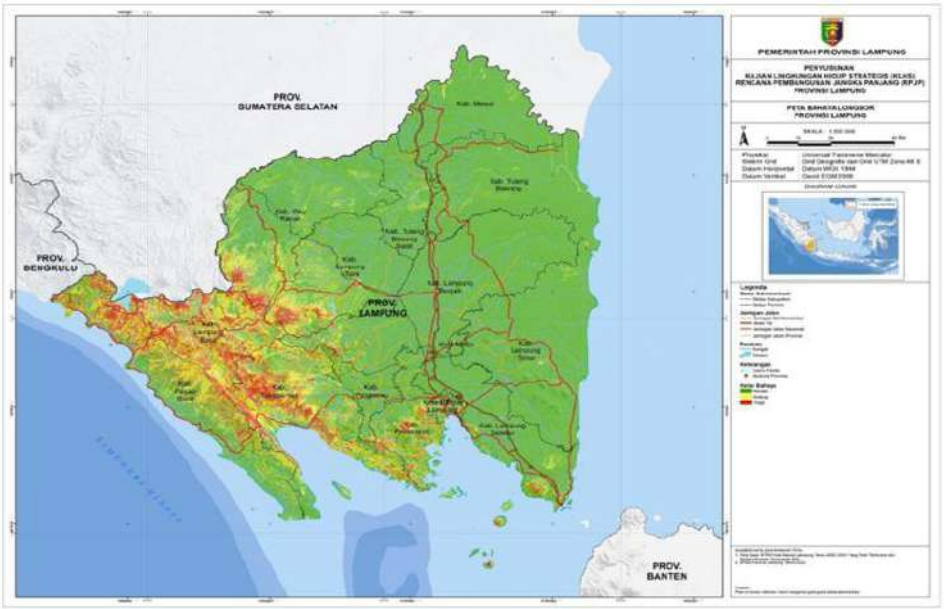

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2024 – 2029, Tahun 2024

b. Tsunami

Rawan bencana tsunami di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan tsunami rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan Kawasan rawan tsunami yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan tsunami tinggi dengan luas 23.868,2 ha yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luasan rawan tsunami tinggi berada di Kabupaten Pesisir Barat seluas 15.046,9 ha. Sedangkan rawan tsunami sedang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luas 3.073,6 ha.

Tabel 2. 5 Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Bencana Tsunami (Ha)			Luas (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Selatan	2.214,8	837,5	1.779,5	4.831,8
2	Kab. Lampung Timur	3.317,2	474,2		3.791,4
3	Kab. Pesawaran	116,7	131,4	2.704,2	2.952,4
4	Kab. Pesisir Barat	1.238,5	1.019,0	15.046,9	17.304,4
5	Kab. Tanggamus	469,6	550,5	3.977,5	4.997,6
6	Kab. Tulang Bawang	465,0			465,0
7	Kota Bandar Lampung	61,6	60,9	360,1	482,6
Jumlah		**7.883,4**	**3.037,6**	**23.868,2**	**34.852,2**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024

Gambar 2. 12 Peta Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Lampung

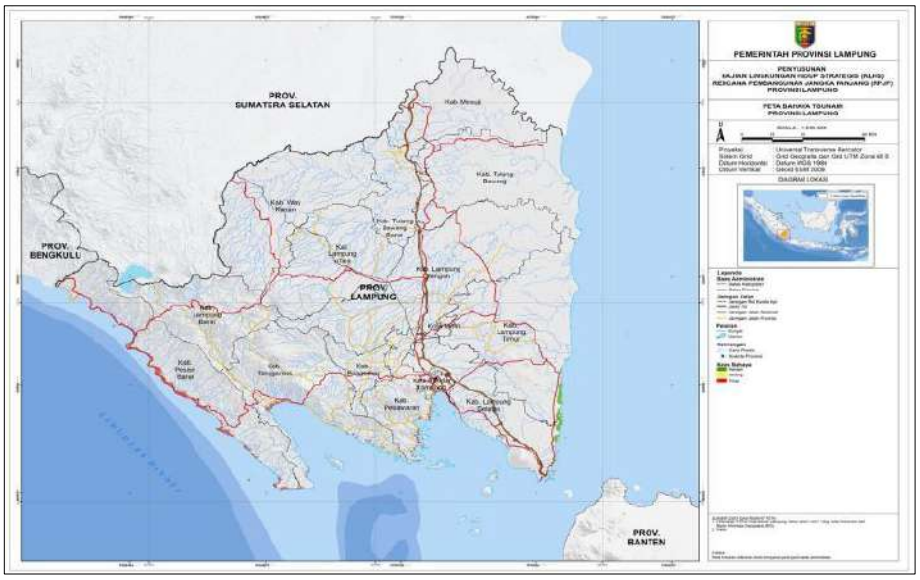

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2025-2045, Tahun 2024

c. Gempa Bumi

Rawan gempa bumi di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan gempa bumi rendah, gempa bumi menengah dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan gempa bumi yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan gempa bumi rendah dengan luas 1.804.548,2 ha, sedangkan luasan rawan gempa bumi tinggi adalah sebesar 442.617,1 ha yang tersebar hanya di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. 6 Luasan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Bencana Gempa (Ha)			Luas (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat		24.243,2	186.556,1	210.799,4
2	Kab. Lampung Selatan	90.010,3	132.722,7		222.733,0
3	Kab. Lampung Tengah	382.472,0	73.484,9		455.957,0
4	Kab. Lampung Timur	327.935,0	58.441,9		386.376,9
5	Kab. Lampung Utara	103.420,9	163.509,5		266.930,4
6	Kab. Mesuji	209.552,7	10.488,7		220.041,4
7	Kab. Pesawaran	92.132,6	36.679,1		128.811,7
8	Kab. Pesisir Barat		174.945,4	119.078,5	294.023,9
9	Kab. Pringsewu	53.628,4	8.090,8		61.719,2
10	Kab. Tanggamus	12.970,6	145.811,3	136.062,6	294.844,6
11	Kab. Tulang Bawang	301.061,7	10.547,9		311.609,6
12	Kab. Tulang Bawang Barat	118.836,2	6.872,6		125.708,8
13	Kab. Way Kanan	88.075,7	263.215,8	919,8	352.211,4
14	Kota Bandar lampung	17.130,6	1.244,3		18.374,9
15	Kota Metro	7.321,4			7.321,4
Jumlah		**1.804.548,2**	**1.110.298,2**	**442.617,10**	**3.357.463,50**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024

Gambar 2. 13 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Lampung

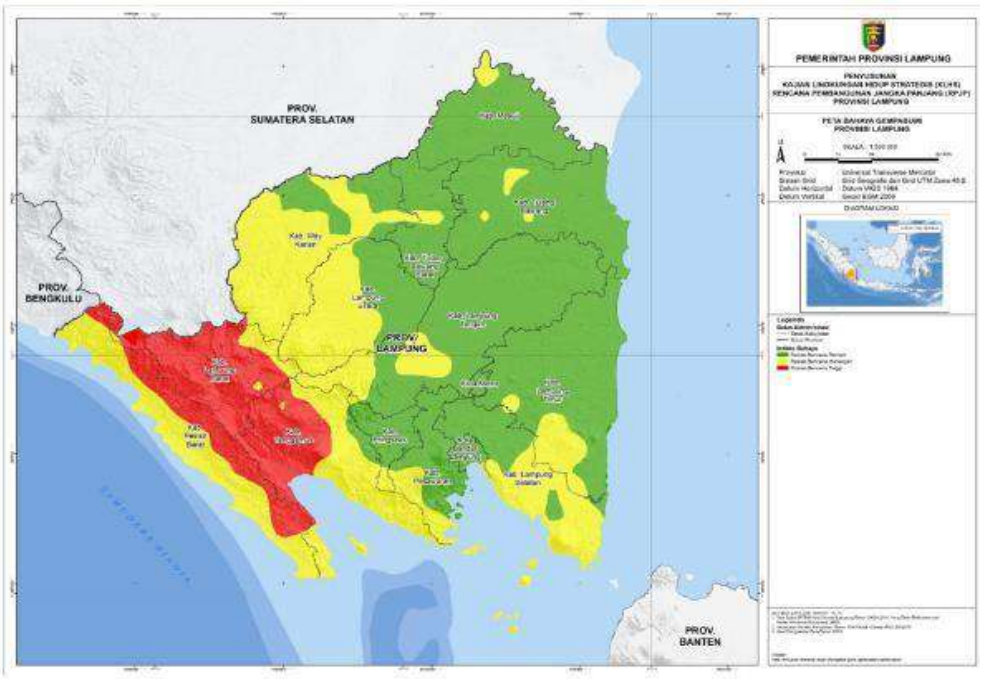

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2025-2045

d. Letusan Gunung Api

Rawan bencana letusan gunung api di Provinsi Lampung terdiri dari letusan gunung api berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava, berpotensi terhadap aliran lahar hujan, berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar, berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar hujan, berpotensi terlanda aliran lahar, berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas, berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm, berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar ukuran kerikil, berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar, berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter 2 - 6 cm dan hujan abu lebat, sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan gas vulkanik beracun, sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun, sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat, sering terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas, sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar atau bom vulkanik. Namun untuk Kabupaten Lampung Barat rata-rata berada pada rawan bencana letusan gunung api yang berpotensi terlanda hujan abu dan

kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm dengan luas 5.025,7 ha, sedangkan untuk Kabupaten Lampung Selatan berada pada rawan letusan gunung api berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar seluas 9.600,2 ha. Untuk luasan rawan letusan gunung api dengan kategori sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun memiliki luas 860,7 ha.

Tabel 2. 7 Kondisi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung

Kabupaten	Rawan Bencana Letusan Gunung Api	Luasan (ha)
Lampung Barat	Berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava	868,92
	Berpotensi terlanda aliran lahar	501,75
	Berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm	5.025,73
	Berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter 2 - 6 cm dan hujan abu lebat	2.119,94
	Sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan gas vulkanik beracun	1.273,55
	Sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	706,24
	Zona Tidak Bahaya	200.303,22
Lampung Selatan	Berpotensi terhadap aliran lahar hujan	1.263,49
	Berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar	9.600,20
	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan	2.002,62
	aliran lahar hujan	
	Berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	22,16
	Berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar ukuran kerikil	798,63
	Berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar	2.119,94
	Sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun	860,71
	Sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar	706,24
	berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat	
	Sering terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas	254,54
	Sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar atau bom vulkanik	276,70
	Zona Tidak Bahaya	204.827,76
Lampung Tengah	Zona Tidak Bahaya	455.956,96
Lampung Timur	Zona Tidak Bahaya	386.376,91
Lampung Utara	Zona Tidak Bahaya	266.930,41
Mesuji	Zona Tidak Bahaya	220.041,37
Pesawaran	Zona Tidak Bahaya	128.811,70

Kabupaten	Rawan Bencana Letusan Gunung Api	Luasan (ha)
Pesisir Barat	Zona Tidak Bahaya	294.023,95
Pringsewu	Zona Tidak Bahaya	61.719,21
Tanggamus	Zona Tidak Bahaya	294.844,56
Tulang Bawang	Zona Tidak Bahaya	311.609,61
Tulang Bawang Barat	Zona Tidak Bahaya	125.708,76
Way Kanan	Zona Tidak Bahaya	352.211,37
Kota Bandar Lampung	Zona Tidak Bahaya	18.374,90
Kota Metro	Zona Tidak Bahaya	7.321,40
Jumlah		**3.357.463,46**

Sumber: INARISK BNPB

Gambar 2. 14 Peta Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Lampung

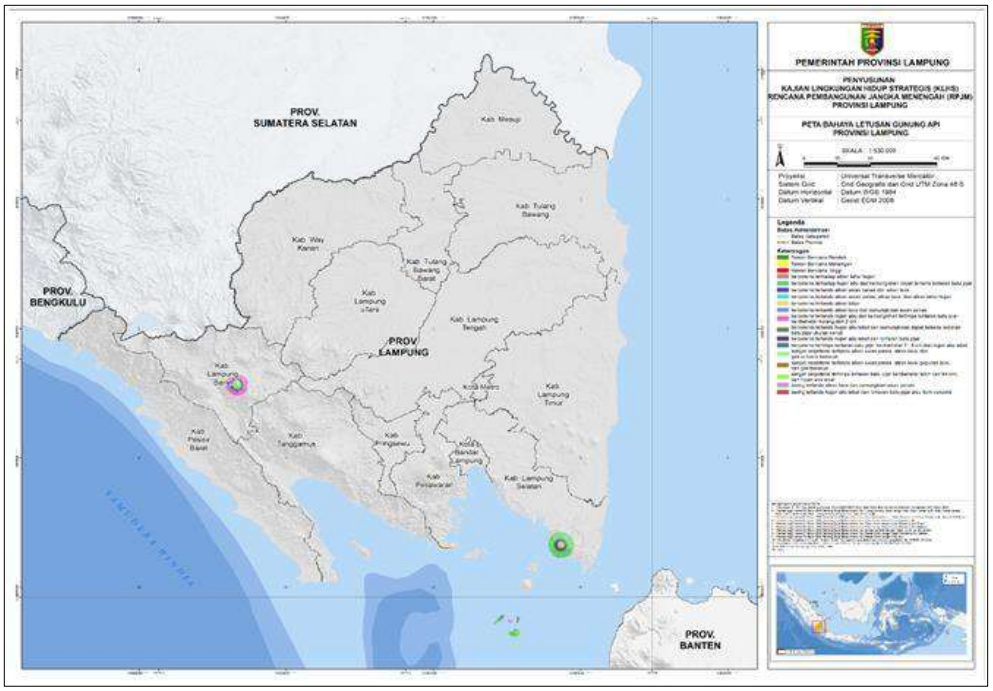

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Prov Lampung 2025-2029, Tahun 2024

2.1.1.8 Kondisi Demografi

Penduduk Provinsi Lampung pada September tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk (SP2020) BPS mencapai 9,01 juta jiwa atau tepatnya 9.007.848 jiwa. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, jumlah penduduk Provinsi Lampung berada di posisi ke-8 (delapan) terbanyak di Indonesia atau ke-2 (dua) terbanyak di Pulau Sumatera setelah provinsi

Sumatera Utara. *Share* penduduk Provinsi Lampung terhadap Nasional mencapai 3,33 persen sedangkan di Sumatera mencapai 15,38 persen.

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Lampung Tahun 1971-2020

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan publikasi BPS Lampung, sepanjang sensus penduduk yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali di Provinsi Lampung, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Lampung terjadi antara tahun 1971-1980, yang mencapai 5,77 persen. Laju Pertumbuhan penduduk pada periode tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 2,31 persen. Sementara pada periode selanjutnya 1980–2020, laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi di antara tahun 1990–2000 yang mencapai 1,17 persen (angka nasional mencapai 1,44 persen). Pada periode terakhir, tahun 2010–2020, laju pertumbuhan mencapai 1,65 persen sedangkan angka nasional sebesar 1,25 persen.

Grafik 2. 2 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Distribusinya di Indonesia, Tahun 2020

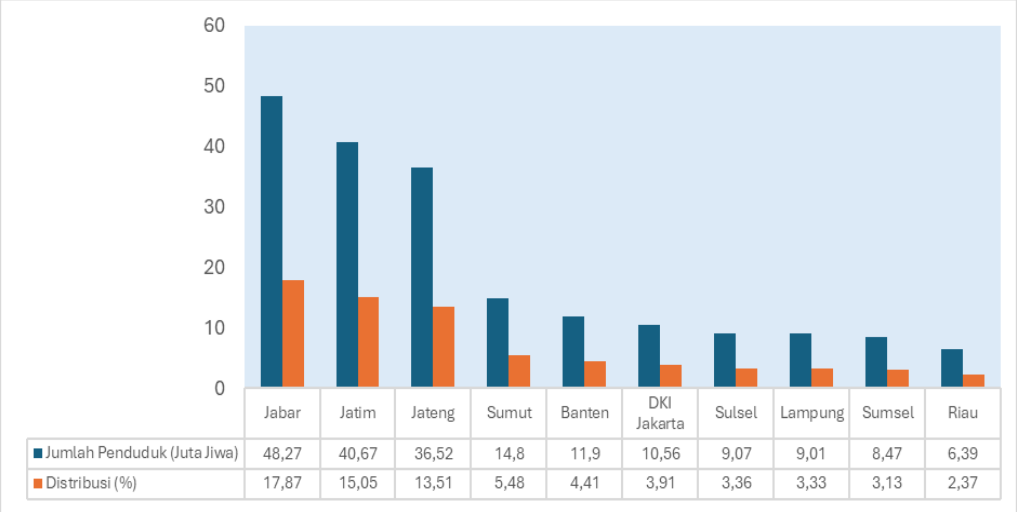

	Jabar	Jatim	Jateng	Sumut	Banten	DKI Jakarta	Sulsel	Lampung	Sumsel	Riau
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	48,27	40,67	36,52	14,8	11,9	10,56	9,07	9,01	8,47	6,39
Distribusi (%)	17,87	15,05	13,51	5,48	4,41	3,91	3,36	3,33	3,13	2,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Dinamika penduduk di 3 (tiga) provinsi terbanyak di Indonesia sepanjang 2010–2020 mengalami tren penurunan kontribusi. Hal ini berbeda dengan kontribusi penduduk di Provinsi Lampung. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 18,12 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 17,87 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 15,77 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 15,05 persen. Distribusi penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 13,63 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 13,51 persen. Sementara itu, distribusi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 mencapai 3,20 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,33 persen. Terjadinya pergeseran persentase penduduk di provinsi-provinsi besar (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) dan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia mengalami dinamika.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Lampung Tengah memiliki sumbangan terbesar terhadap total jumlah penduduk Provinsi Lampung yaitu sebesar 1.522.426 Jiwa yang diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 1.234.988 Jiwa , Kabupaten Lampung Timur sebesar 1.137.434 Jiwa, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 1.090.174 Jiwa.

Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2023

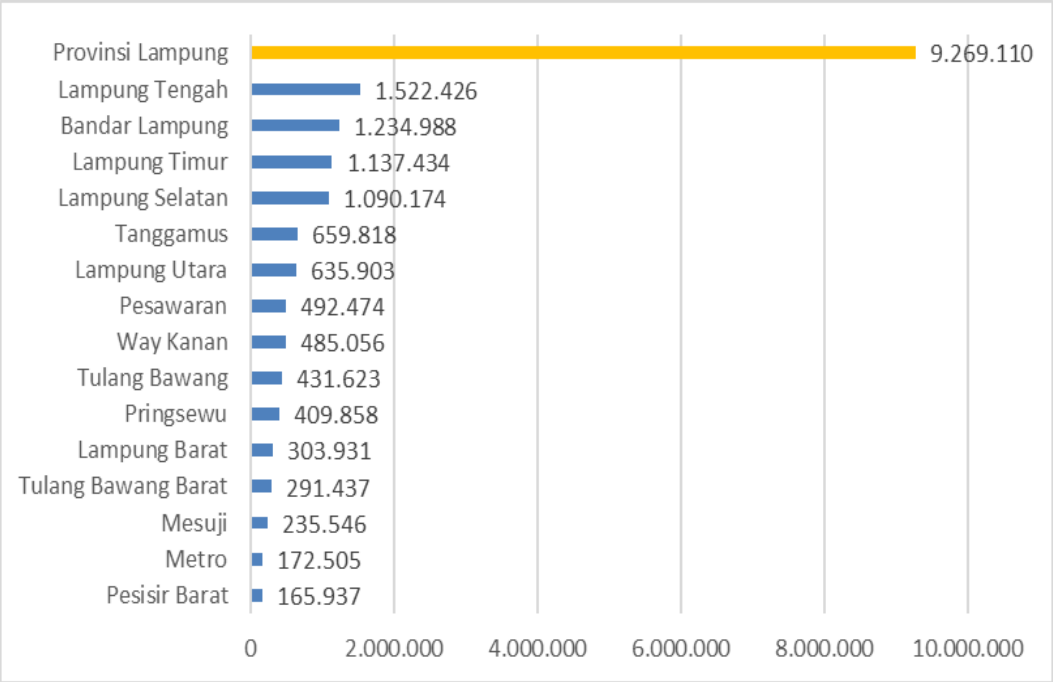

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023

a. Perubahan Struktur Penduduk Lampung

Seiring dengan peristiwa menurunnya tingkat kelahiran sejak tahun 70-an, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) di Provinsi Lampung terus menurun. Pada tahun 1971, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) mencapai 48,04 persen. Periode selanjutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1980 persentasenya mencapai 45,58 persen, tahun 1990 mencapai 41,05 persen, tahun 2000 mencapai 32,79 persen, tahun 2010 mencapai 29,44 persen, dan tahun 2020 mencapai 23,74 persen. Sementara itu, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 50,57 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,31 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Lampung masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,31 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

Grafik 2. 4 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1971-2020

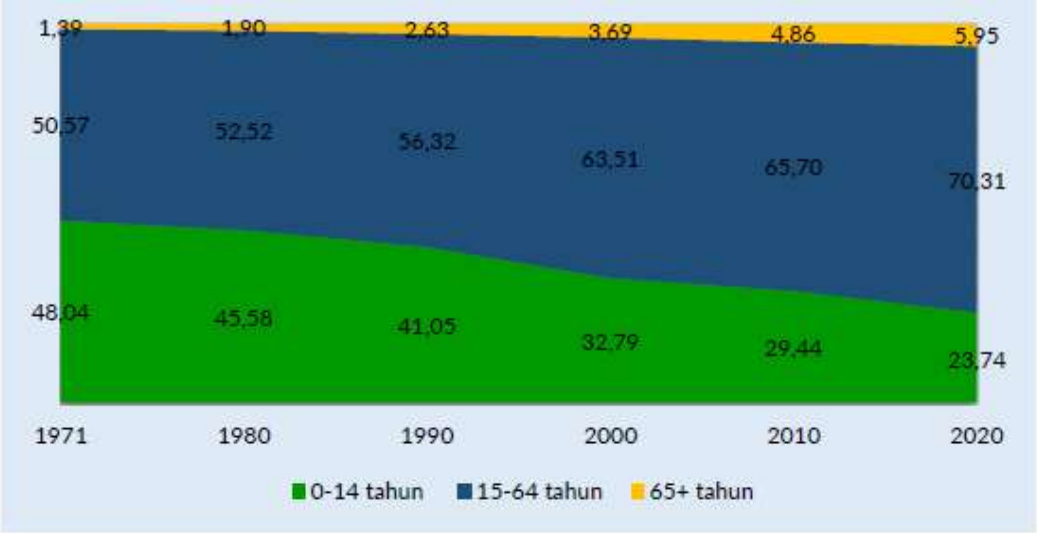

Sumber : BPS Provinsi Lampung

b. Keberadaan Masyarakat Adat

Secara historis, masyarakat asli Lampung yang terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung Pesisir (Ulun Peminggir) yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian pesisir dan Lampung Pepadun (Ulun Pepadun) adalah suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu di daerah Abung, Tulangbawang, Waykanan/Sungkai, Pubian dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung sendiri sebagai entitas yang berbudaya mempunyai kearifan lokal. Sifat dan watak orang Lampung mencakup: (1) *Piil pesenggiri*, rasa malu untuk melakukan sikap yang terhina menurut agama dan lingkungan sosial-budaya, (2) *Bejuluk-beadok* yakni kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandangnya, (3) *Nemui Nyimah* adalah sikap saling beramah tamah dengan tamu, (4) *Nengah Nyappur* ialah perilaku aktif dalam bermasyarakat serta tidak individualis, dan terakhir (5) *Sakai Sambayan* yaitu gotong royong dan saling membantu. Acuan keseluruhan sifat ideal tersebut merupakan sikap dan watak yang diharapkan dimiliki orang Lampung. Keseluruhan prinsip ini membangun konsepsi *piil ulun* Lampung, memiliki keterikatan yang kuat antara masing-masing prinsip dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

Keseluruhan sikap individu tersebutlah yang akhirnya membentuk karakter masyarakat Lampung yang menjunjung nilai-nilai luhur, menjaga sikap yang baik, saling menghormati antar sesama. Karakter masyarakat

Lampung tersebut menjadi landasan bagi sikap individu maupun masyarakat Lampung sehingga menjadi slogan provinsi yang bermakna dalam kesatuan daerah Lampung, yang memiliki dua golongan yaitu adat pepadun dan saibatin sekaligus orang asli dan orang pendatang di Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki toleransi yang cukup baik terhadap keragaman budaya dan pengaruh dari luar termasuk pendatang dari daerah lain. Piil Pesenggiri adalah salah satu cara masyarakat Lampung dalam menerima keberadaan masyarakat pendatang agar bersama-sama dapat saling menjaga keharmonisan dan saling bekerjasama.

Dari perspektif perdamaian, nilai-nilai yang terkandung dalam *piil pesenggiri* secara jelas membimbing masyarakat untuk saling menghargai, tolong-menolong, bermasyarakat, berjiwa besar dan bergaul dengan baik. Tindakan ideal bagi masyarakat Lampung adalah mengacu kepada nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal tersebut. Dalam konteks masyarakat yang masih berpegang pada adat, institusi lokal berperan sebagai rujukan dalam tata kelola birokrasi dan pola interaksi masyarakat. Semua didasarkan kepada kearifan lokal dan dilembagakan demi kepentingan bersama. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, terdapat sebuah institusi lokal yang mempunyai peran penting, yaitu kekerabatan (Djausal, 2018). Ikatan kekerabatan yang kuat terdorong oleh prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piil pesenggiri. *Bejuluk-beadok* menciptakan kedekatan emosional antara yang memberi *juluk* dan *adok* kepada pemberinya. *Nemuy nyimah* dan *nengah nyappur* menjaga kedekatan tersebut dan peluang untuk membangun relasi baru. Dan *sakai sambayan* mengikat kuat kekerabatan tersebut menjadi sebuah komunitas yang saling menghargai, membutuhkan dan tolong menolong. Memperkuat ikatan kekerabatan yang terus diperluas dalam interaksi sosial, merupakan *wujud keterbukaan masyarakat Lampung* selama berabad-abad.

Dalam perkembangannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat majemuk. Beragam suku, ras, etnik, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat hidup berdampingan di dalamnya. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang plural tersebut menjadikan Lampung berjuluk sebagai “Miniatur Indonesia”. Bersatunya keberagaman masyarakat di Provinsi Lampung selaras dengan semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai* yang juga menggambarkan bahwa penduduk Lampung terdiri dari *Jurai*/golongan penduduk asli dan pendatang sebagai wujud keharmonisan kehidupan

bermasyarakat yang tentunya sangat sejalan dengan amanah dasar negara Pancasila dan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang tercermin dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dengan beragam suku, budaya, ras dan agama maupun status sosial. Modal sosial tersebut akan saling melengkapi dan menjadi kekuatan besar untuk mencapai cita-cita pembangunan yang diharapkan, dan menjadi landasan dari proses pembangunan yang telah dan akan dijalankan.

Grafik 2. 5 Keragaman Pemeluk Agama Tahun 2022 dan Keragaman Suku Penduduk Tahun 2010 di Lampung

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

c. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dari pada perempuan, hasil Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Lampung sebanyak 4,62 juta orang, atau 51,25 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Provinsi

Lampung sebanyak 4,39 juta orang, atau 48,75 persen dari penduduk Provinsi Lampung. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Lampung sebesar 105, yang artinya terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Lampung pada tahun 2020.

Gambar 2. 15 Rasio Jenis Kelamin dan Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

d. Penduduk menurut Generasi.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Provinsi Lampung didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,80 persen dari total populasi (2,48 Juta orang) dan generasi milenial sebanyak 26,54 persen dari total populasi Provinsi Lampung. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. 16 Persentase Penduduk Lampung Menurut Generasi, Tahun 2020

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Beberapa tahun ke depan, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Kelompok Penduduk usia produktif terdiri dari kelompok generasi Z, Y, X (milenial) dan *baby boomer.* Generasi Z memiliki persentase paling besar dibandingkan generasi lainnya. Persentase generasi Z mencapai 31,95 persen dari total penduduk usia produktif. Selanjutnya generasi Y yang mencapai 30,51 persen, generasi X mencapai 24,82 persen, dan generasi *baby boomer* mencapai 12,72 persen.

1. Kepadatan Penduduk

Gambar 2. 17 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020, 2023, dan 2024 (km2)

Kabupaten/Kota	2020	2023	2024
Lampung Barat	142,60	147,65	149,30
Tanggamus	220,76	228,31	231,00
Lampung Selatan	479,53	498,01	504,46
Lampung Timur	287,30	295,44	298,33
Lampung Tengah	321,31	331,58	335,26
Lampung Utara	250,28	246,14	248,42

Kabupaten/Kota	2020	2023	2024
Way Kanan	129,48	139,08	140,82
Tulang Bawang	139,12	143,26	144,92
Pesawaran	373,54	386,28	390,98
Pringsewu	659,85	682,29	690,57
Mesuji	103,17	108,13	109,79
Tulang Bawang Barat	222,57	230,58	233,10
Pesisir Barat	54,45	56,70	57,56
Bandar Lampung	6.361,17	6.542,95	6.609,68
Metro	2.305,89	2.374,95	2.400,08
Lampung	268,46	277,41	280,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

- Tahun 2020 : Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)/*The Result of 2020 Population Census (September)*
- Tahun 2023 dan 2024 : Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of 2020–2050 Indonesia *population projection result of 2020 Population Census (mid year/June)*

Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 280,55 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 6.609,68 jiwa/km^2 dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 57,56 jiwa/km^2.

2. Proyeksi Jumlah Penduduk

Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2020-2030 berdasarkan buku proyeksi penduduk indonesia 2020-2045 yang di publikasikan BPS Provinsi Lampung menjelaskan bahwa jumlah penduduk lampung di tahun 2029 diproyeksikan sebanyak 9,910 juta jiwa dan menyentuh angka 10 juta jiwa pada tahun 2030.

Gambar 2. 18 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Lampung Tahun 2025-2029

Parameter	2020	2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki (000)	4.605,04	4.857,47	4.904,02	4.949,10	4.992,67	5.034,75
Perempuan (000)	4.379,84	4.665,44	4.719,77	4.772,93	4.824,88	4.875,61
Total (000)	8.984,88	9.522,91	9.623,79	9.722,03	9.817,55	9.910,36
Sex Ratio (%)	105,14	104,12	103,90	103,69	103,48	103,26
0–4	773,96	796,36	793,07	789,50	785,68	781,73
5–9	777,07	772,83	776,69	781,14	786,16	791,23
10–14	732,88	777,38	781,56	782,29	776,64	776,64
15–19	730,43	731,59	738,84	748,48	759,03	768,72

Parameter	2020	2025	2026	2027	2028	2029
20–24	749,66	757,46	762,69	722,69	728,32	724,30
25–29	742,85	746,73	743,66	739,36	733,96	728,83
30–34	736,07	739,60	740,79	742,54	744,17	744,72
35–39	701,00	731,72	734,17	735,09	735,06	734,95
40–44	662,02	695,66	702,33	709,36	716,26	722,07
45–49	592,62	654,11	662,66	669,62	675,57	681,29
50–54	506,18	579,38	593,11	606,45	619,06	630,53
55–59	417,45	488,57	502,82	517,34	531,78	545,96
60–64	321,48	393,94	409,37	420,92	434,28	447,99
65–69	234,97	291,97	304,82	318,21	331,87	345,44
70–74	147,62	199,57	206,61	219,34	229,19	236,17
75+	158,70	190,56	196,56	209,61	219,43	227,15
Total	8.984,88	9.522,91	9.623,79	9.722,03	9.817,55	9.910,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian "kue" ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam diperkirakan mengalami ageing population mulai tahun 2040. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk.

Gambar 2. 19 Proyeksi Piramida Penduduk Lampung, Tahun 2020-2050

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tabel 2.11 Proyeksi Jumlah Penduduk kabupaten/kota se Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2030

No.	Kabupaten/ Kota	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Lampung Barat	319,30	322,59	325,77	328,86	331,85	334,74
2	Tanggamus	678,02	685,54	692,88	700,03	707,01	713,82
3	Lampung Selatan	1.133,39	1.147,20	1.160,72	1.173,95	1.186,89	1.199,54
4	Lampung Timur	1.164,70	1.175,37	1.185,74	1.195,82	1.205,62	1.215,12
5	Lampung Tengah	1.541,43	1.557,29	1.572,66	1.587,53	1.601,85	1.615,63
6	Lampung Utara	665,76	671,49	677,04	682,43	687,65	692,71
7	Way Kanan	503,31	509,25	515,06	520,75	526,31	531,76
8	Tulang Bawang	455,40	460,34	465,17	469,88	474,46	478,94
9	Pesawaran	506,26	512,16	518,00	523,75	529,44	535,04
10	Pringsewu	429,74	434,74	439,68	444,51	449,27	453,93
11	Mesuji	245,21	248,75	252,21	255,60	258,91	262,15
12	Tulang Bawang Barat	301,79	304,76	307,62	310,39	313,03	315,60
13	Pesisir Barat	174,86	177,39	179,91	182,40	184,89	187,36
14	Bandar Lampung	1.226,21	1.237,63	1.248,53	1.258,92	1.268,79	1.278,14
15	Metro	177,52	179,31	181,05	182,74	184,39	185,98
Provinsi Lampung		**9.522,91**	**9.623,79**	**9.722,03**	**9.817,55**	**9.910,36**	**10.000,47**

Sumber: Data Diolah 2023

3. **Penduduk Usia Produktif**

Penduduk Usia Produktif. Berdasarkan komposisi penduduknya, penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Dalam kondisi ini, penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, rasio ketergantungan umur penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah sebesar 45,87, yang berarti dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 52,20. Kondisi peningkatan penduduk usia kerja dan penurunan rasio ketergantungan penduduk disebut sebagai bonus demografi atau *windows of opportunity*.

Gambar 2. 20 Komposisi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2020

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024

Dalam konteks kependudukan, setiap pertumbuhan penduduk harus disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas salah satunya dipicu oleh kualitas SDM. Keseimbangan antara laju pertumbuhan kuantitas dan pertumbuhan kualitas penduduk adalah modal

utama dalam mewujudkan pembangunan yang optimal. Banyak faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan di suatu wilayah. Tabel di bawah ini mendeskripsikan bahwa jumlah penduduk yang banyak tidak selalu selaras dengan kualitas yang tinggi penduduknya.

Gambar 2. 21 Jumlah Penduduk di Sepuluh Provinsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Lampung Barat	319,30	322,59	325,77	328,86	331,85	334,74
2	Tanggamus	678,02	685,54	692,88	700,03	707,01	713,82
3	Lampung Selatan	1.133,39	1.147,20	1.160,72	1.173,95	1.186,89	1.199,54
4	Lampung Timur	1.164,70	1.175,37	1.185,74	1.195,82	1.205,62	1.215,12
5	Lampung Tengah	1.541,43	1.557,29	1.572,66	1.587,53	1.601,85	1.615,63
6	Lampung Utara	665,76	671,49	677,04	682,43	687,65	692,71
7	Way Kanan	503,31	509,25	515,06	520,75	526,31	531,76
8	Tulang Bawang	455,40	460,34	465,17	469,88	474,46	478,94
9	Pesawaran	506,26	512,16	518,00	523,75	529,44	535,04
10	Pringsewu	429,74	434,74	439,68	444,51	449,27	453,93
11	Mesuji	245,21	248,75	252,21	255,60	258,91	262,15
12	Tulang Bawang Barat	301,79	304,76	307,62	310,39	313,03	315,60
13	Pesisir Barat	174,86	177,39	179,91	182,40	184,89	187,36
14	Bandar Lampung	1.226,21	1.237,63	1.248,53	1.258,92	1.268,79	1.278,14
15	Metro	177,52	179,31	181,05	182,74	184,39	185,98

Sumber : Hasil sensus penduduk 2020, BPS – Dioalah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan maka diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia. Indikator-indikator tersebut antara lain jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya yang terbanding antar waktu dan antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,62 persen

di tahun 2019 menjadi 10,69 persen di Tahun 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,03 persen.

Grafik 2. 6 Capaian Angka Kemiskinan Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024

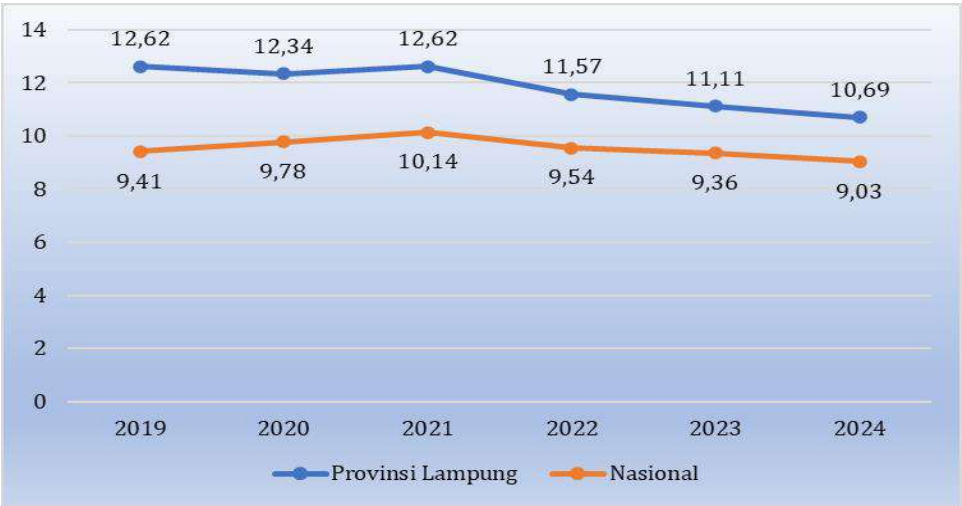

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September 2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 mencapai 970,67 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 31,74 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 24,9 ribu orang.

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir empat kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel di bawah ini menunjukkan pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 697,19 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 737,71 ribu jiwa. Namun, di perkotaan jumlah penduduk miskin Tahun 2024

mengalami peningkatan dari 232,96 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 244,04 ribu jiwa pada Tahun 2024.

Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan cukup fluktuatif, dimana pada periode 2019 mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2020 ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic Covid-19. Untuk kemiskinan di pedesaan, tren pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan tidak stabil dan memiliki karaketristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 (Ribu Jiwa)

LOKASI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota	224.69	259,28	236,48	239,11	232,96	244,04
Desa	816.79	831,86	770,54	756,48	737,71	697,19
Kota + Desa	1041.48	1.091,14	1.007,02	995,59	970,67	941,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Selanjutnya kondisi kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara (16,92%), Kabupaten Lampung Timur (13,9 %) dan Kabupaten Pesisir Barat (12,64 %), yang merupakan 3 (tiga) kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS, terdapat 6 (enam) kabupaten/kota yang capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 lebih baik daripada Nasional, yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Pringsewu serta Kota Metro dan Bandar Lampung.

Grafik 2. 7 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024

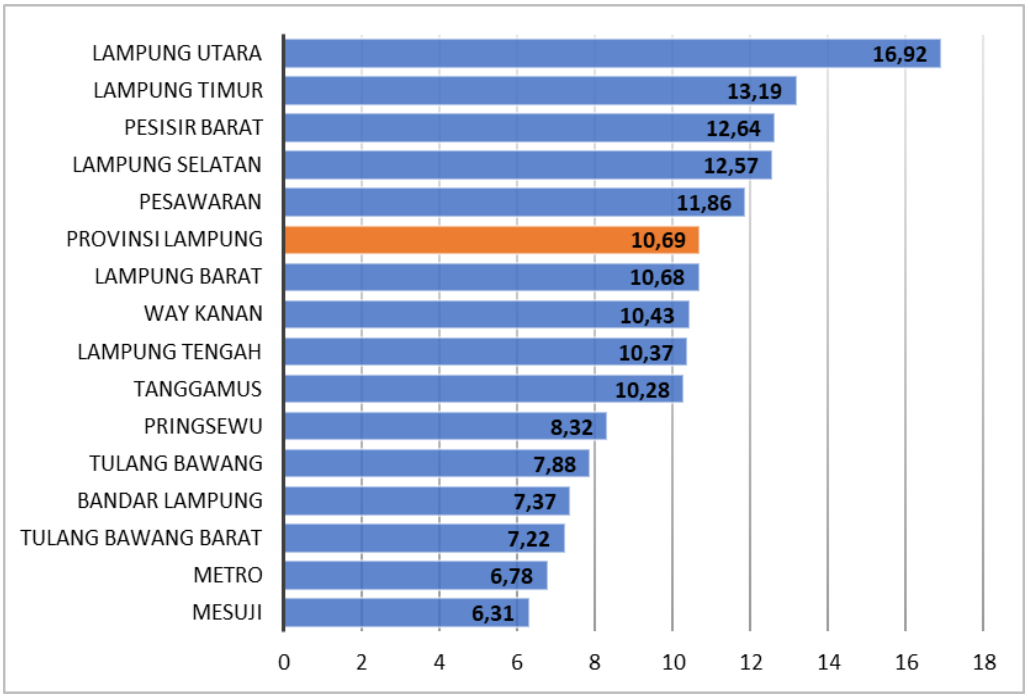

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

2.1.2.2 Nilai Tukar Petani

Nilai NTP kurang bersaing secara nasional. Data statistik ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir masih menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 27-30 persen) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Statitik tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 43 persen penduduk yang bekerja. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan pada sektor ini juga merupakan tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan menjadi *bumper* untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antar penduduk. Capaian pertumbuhan 2 persen di tahun 2022 merupakan capaian terbaik sepanjang periode pengamatan tahun 2017-2022 perlu terus dijaga kesinambungannya.

Gambar 2. 22 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2024

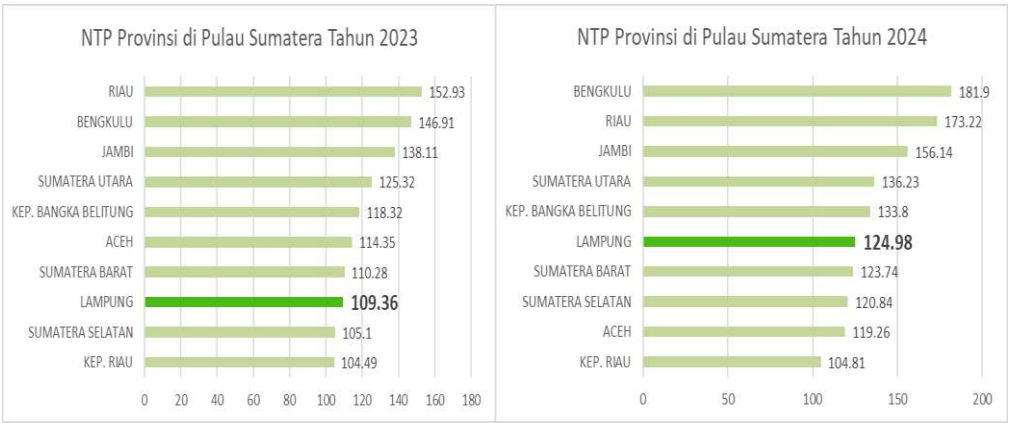

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di pedesaan. NTP juga menjadi indikator dari kesejahteraan pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif melambat. Di lingkup regional Sumatera, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung berada pada posisi ke 6(enam) dengan nilai 124,98, NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,,22 , Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 . Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin .

Gambar 2. 23 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2024

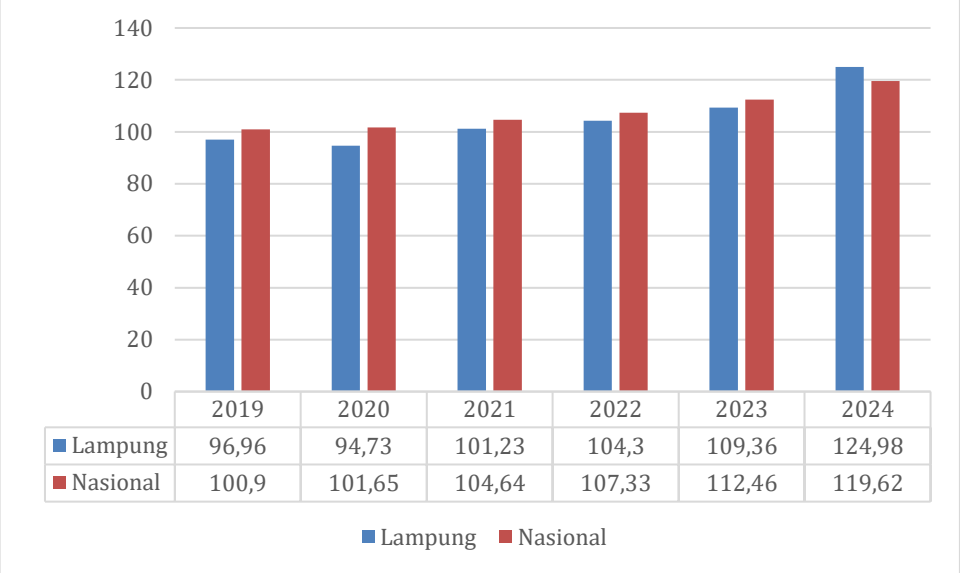

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung	96,96	94,73	101,23	104,3	109,36	124,98
Nasional	100,9	101,65	104,64	107,33	112,46	119,62

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

(Penghitungan NTP sejak tahun 2020 dst menggunakan tahun dasar 2018=100, dimana terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100).

2.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi.

Kinerja pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirlaba) dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Grafik 2. 8 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap target daerah dan Capaian Nasional Tahun 2019-2023

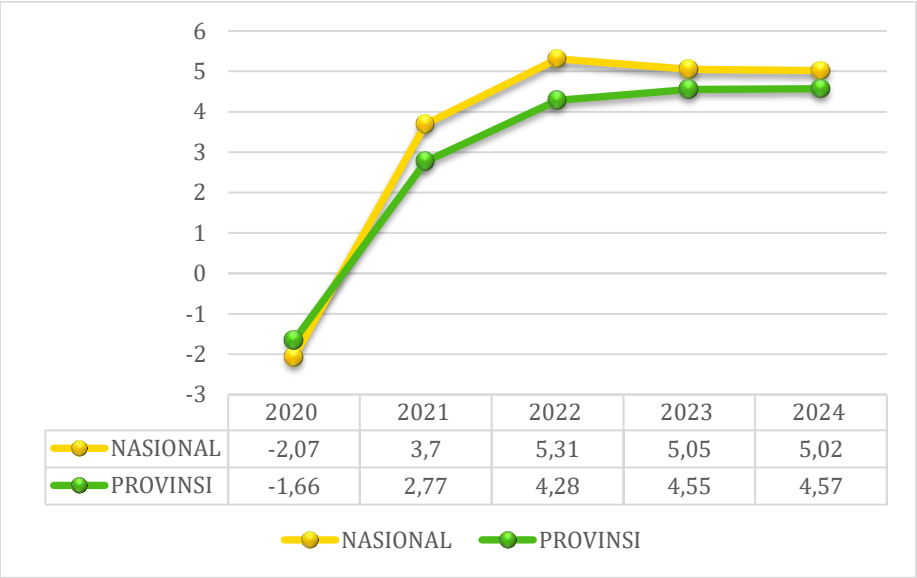

Sumber; BPS dan BPS Provinsi Lampung 2025.

Selama periode 2020-2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung setelah pandemic Covid 19 memperlihatkan trend yang terus meningkat dari -1,66 persen di tahun 2020 menjadi 4,57 persen pada tahun 2024. Selama periode ini Provinsi Lampung selalu berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, perekonomian Lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga mencapai minus 1,67 persen. Sejalan waktu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami *recovery*, untuk Tahun 2024, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (*c to c*), tumbuh sebesar 4,81 persen, menguat dibanding Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,55 persen.

Grafik 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019-2024

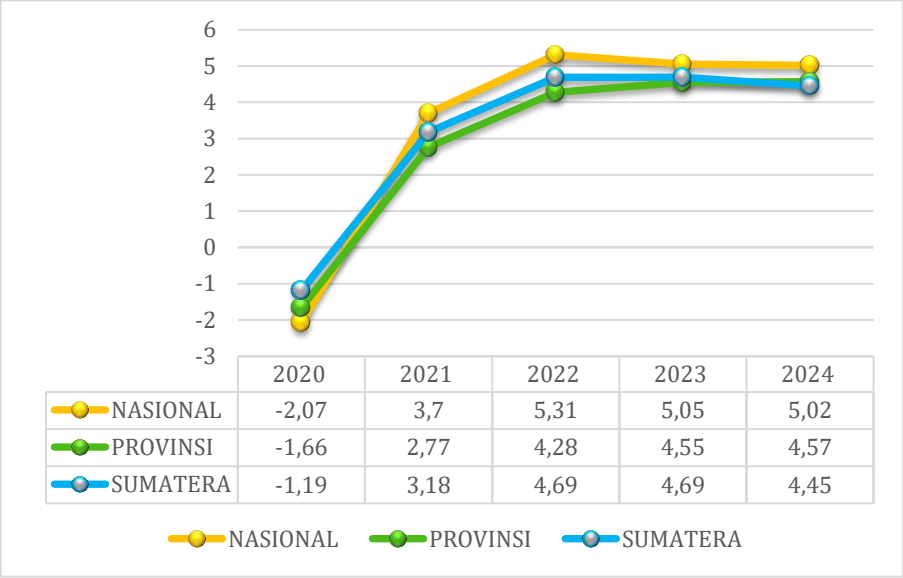

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2021 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp371.903,17 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp247.001,67 miliar. Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05) dan Sumatera (4,63). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 448.880,25 Miliar dan Rp. 269.240,54 Miliar.

Tabel 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	5.18	-1.16	2.55	4.09	4.69
Tanggamus	5.02	-1.77	2.34	4.16	4.70
Lampung Selatan	5.13	-1.73	2.6	4.81	4.82
Lampung Timur	3.79	-2.26	0.24	2.02	3.51
Lampung Tengah	5.35	-1.02	2.88	4.65	4.70
Lampung Utara	5.33	-1.45	2.82	3.16	4.22

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Way Kanan	5.17	-1.16	2.9	4.41	4.63
Tulang Bawang	5.41	-1.34	2.88	3.85	4.27
Pesawaran	5	-1.26	2.08	4.55	4.49
Pringsewu	5.03	-1.21	2.91	4.37	4.78
Mesuji	5.26	-1.35	2.84	3.49	4.06
Tulang Bawang Barat	5.36	-1.32	2.89	4.49	4.53
Pesisir Barat	5.47	-1.18	2.06	2.82	3.42
Bandar Lampung	6.17	-1.88	3.12	4.93	4.99
Metro	5.57	-1.79	2.91	4.51	4.86
Provinsi Lampung	**5.26**	**-1.67**	**2.77**	**4.28**	**4.55**
Nasional	**5.02**	**-2.07**	**3.69**	**5.31**	**5.05**

Sumber; BPS Provinsi Lampung 2023

Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2024 tumbuh sebesar 2,79 persen, menguat dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,26 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,78 persen.

2.1.3.2 PDRB Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan dari Rp. 32,29 juta menjadi Rp. 51,37 juta.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukan peningkatan sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp 51,37 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional,

PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 78,62 Juta Rupiah pada tahun 2024.

Grafik 2. 10 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 (ADHB, Juta Rupiah)

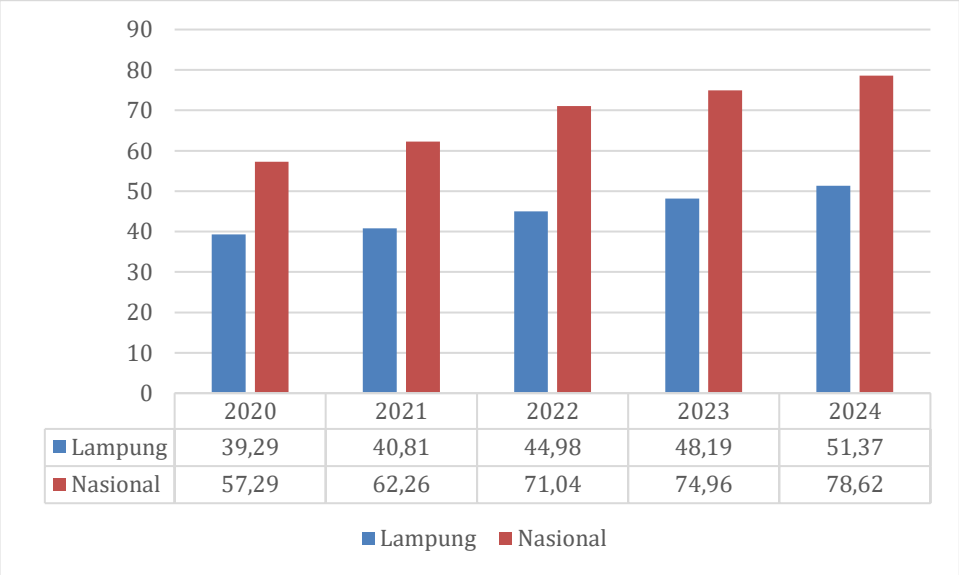

	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung	39,29	40,81	44,98	48,19	51,37
Nasional	57,29	62,26	71,04	74,96	78,62

Sumber: Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, PDRB Perkapita Provinsi Lampung hanya menempati 3 terendah bersama-sama Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor strategis di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 2. 11 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024 (ADHB, Juta Rupiah)

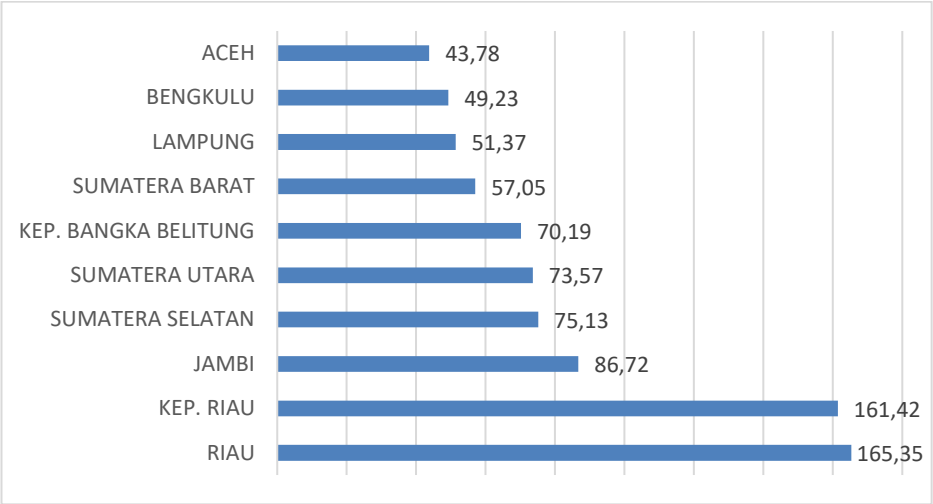

Sumber: Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan perkapita tertinggi sebesar 5,61 persen, diikuti Kabupaten Tulang Bawang sebesar 5,51 persen dan Kabupaten Pringsewu sebesar 5,05 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Mesuji dan Bandar Lampung, masing-masing sebesar 2,39 persen dan 3,32 persen. Pada Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar dengan capaian sebesar Rp. 63,34 juta, lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung sebesar Rp. 48,18 juta.

Tabel 2. 10 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Wilayah	PDRB PER KAPITA ADHB (RUPIAH)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	23.404.088	23.614.681	24.714.990	27.297.350	28.864.000
Tanggamus	26.034.307	24.224.635	25.297.765	27.758.940	29.597.000
Lampung Selatan	44.129.169	41.704.922	43.307.952	47.827.730	50.461.000
Lampung Timur	39.797.485	36.710.498	38.323.275	44.151.640	46.276.000
Lampung Tengah	55.368.656	48.861.769	50.315.555	54.968.950	59.720.000
Lampung Utara	38.512.596	37.549.879	39.212.125	42.521.960	44.751.000
Way Kanan	31.022.091	29.594.040	30.746.033	33.579.500	35.580.000
Tulang Bawang	51.065.626	53.691.359	56.118.778	60.292.390	63.341.000
Pesawaran	36.433.510	34.047.403	34.965.125	38.360.410	40.903.000

Wilayah	PDRB PER KAPITA ADHB (RUPIAH)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pringsewu	27.851.928	27.563.217	28.666.813	31.468.770	33.390.000
Mesuji	51.934.466	45.812.389	47.414.096	51.459.870	54.421.000
Tulang Bawang Barat	41.859.787	39.971.513	41.571.981	45.690.960	48.702.000
Pesisir Barat	30.246.494	28.889.489	30.062.936	32.457.020	33.782.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas yang menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memantau dan mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Capaian IPEI Provinsi Lampung selama Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali pada Tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Pola perkembangan IPEI Provinsi Lampung mengikuti pola IPEI Indonesia, namun capaiannya selalu di bawah capaian Indonesia.

Grafik 2. 12 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2017 – 2021

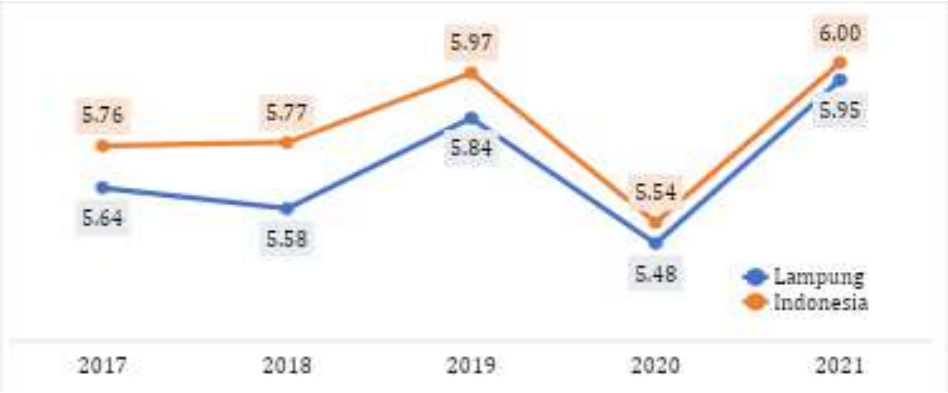

Sumber : Bappenas RI

Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan

pembangunan rendah karbon sebagai "tulang punggung"nya. Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga) pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2021 masuk dalam kategori sedang tier 2 pada rentang 40,82 – 47,33.

Gambar 2. 24 Indeks Ekonomi Hijau Seluruh Provinsi Tahun 2015 – 2021

Sumber : Ringkasan Eksekutif Capaian & Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015 – 2021 Bappenas RI Tahun 2023

Rata-rata pertumbuhan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2021 sebesar 2,58 %. Capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung didorong oleh skor pilar lingkungan (kualitas air permukaan pada parameter BOD, bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, dan kualitas udara pada parameter NO2), pilar ekonomi (intensitas emisi, intensitas energi final, serta produktivitas tenaga kerja sektor industri dan jasa), dan pilar sosial (rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran).

Indonesia Blue Economy Indeks (IBEI)

Indonesia Blue Economy Index adalah indeks dalam mengukur ekonomi maritim yang terdiversifikasi dan berkelanjutan untuk Indonesia, berdasarkan pada kepastian kesehatan dan ketahanan ekosistem laut dan pelestarian manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. IBEI terdiri dari tiga pilar, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial dengan bobot masing-masing 36,9% untuk pilar lingkungan, 32,6% untuk pilar ekonomi, dan 30,5% untuk pilar sosial. Pembuatan estimasi bobot tersebut menggunakan metode

multi-level Principal Component Analysis (PCA). *Principal Component Analysis* adalah metode reduksi dimensi yang akan tetap mempertahankan variasi dan pola dominan dari data.

Rasio Kewirausahaan Nasional

Indonesia sebagai negara berpopulasi terbesar ke empat di dunia, diproyeksikan akan mendapat puncak bonus demografi di 2030. Berdasarkan survei World Economic Forum tahun 2019, sebanyak 35,5% pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia berkeinginan menjadi pengusaha. Kewirausahaan (Enterpreneurship) menjadi isu nasional yang cukup mendapat perhatian saat ini. Aktivitas kewirausahaan yang masih belum optimal perlu didorong melalui peningkatan kualitas SDM dengan target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% di 2024.

Guna mencapai target rasio kewirausahaan dan pertumbuhan wirausaha baru, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Pengaturan dalam Perpres tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan ekosistem kewirausahaan. Pengaturan tersebut juga menjadi pedoman yang menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keberadaan Perpres juga bertujuan memperkuat ekosistem kewirausahaan, menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas wirausaha dan skala usaha.

Dalam Perpres disebutkan kemudahan yang diberikan kepada wirausaha, yakni pendaftaran perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi, akses pembiayaan dan peminjaman, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, akses pasar digital BUMN, akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, akses area komersial dan tempat perbelanjaan, akses riset dan pengembangan usaha, serta akses peningkatan kapasitas usaha.

Misi Transformasi ekonomi yang tercantum dalam rancangan akhir RPJPD Provinsi Lampung diarahkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM), khususnya para generasi muda yang membuka usaha sendiri atau berwirausaha sebagai dampak bonus demografi yang akan mencapai puncak dalam 5-10 tahun ke depan.

Aktivitas pembelajaran tidak hanya diarahkan pada transfer of knowledge semata, akan tetapi juga peningkatan aspek soft skill dan entrepreneur yang akan membuat peserta didik memiliki bekal keilmuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, riset, manajemen risiko, analisis, dan kemampuan pengambilan keputusan. Semua itu jika dipadukan dengan aspek kewirausahaan (entrepreneur) akan mampu menghasilkan generasi masa depan dengan tingkat produktivitas tinggi.

Kontribusi PDRB Provinsi

Sepanjang tahun 2023, Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar dalam struktur perekonomian nasional sebesar 57,05 persen, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,01 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,49 persen dan Pulau Sulawesi sebesar 7,10 persen. Sementara Maluku dan Papua memiliki kontribusi terendah yaitu sebesar 2,58 persen. Sementara itu dilihat dari pertumbuhan, Pulau dengan pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua, sebesar 6,94 persen. Di sisi lain, pertumbuhan terendah terjadi di Pulau Bali dan nusa Tenggara sebesar 4 persen.

Gambar 2. 25 Pertumbuhan dan Kontribusi Pulau-Pulau se-Indonesia terhadap PDB Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Dalam lingkup Nasional, ekonomi Provinsi Lampung berhasil tumbuh sebesar 4,55 persen pada tahun 2023, berada pada urutan ke-23 dari 34

provinsi di Indonesia. Sementara itu, Provinsi Lampung berkontribusi terhadap Struktur Perekonomian Nasional sebesar 2,19 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,08 persen dari tahun 2022.

Gambar 2. 26 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Indonesia Tahun 2023

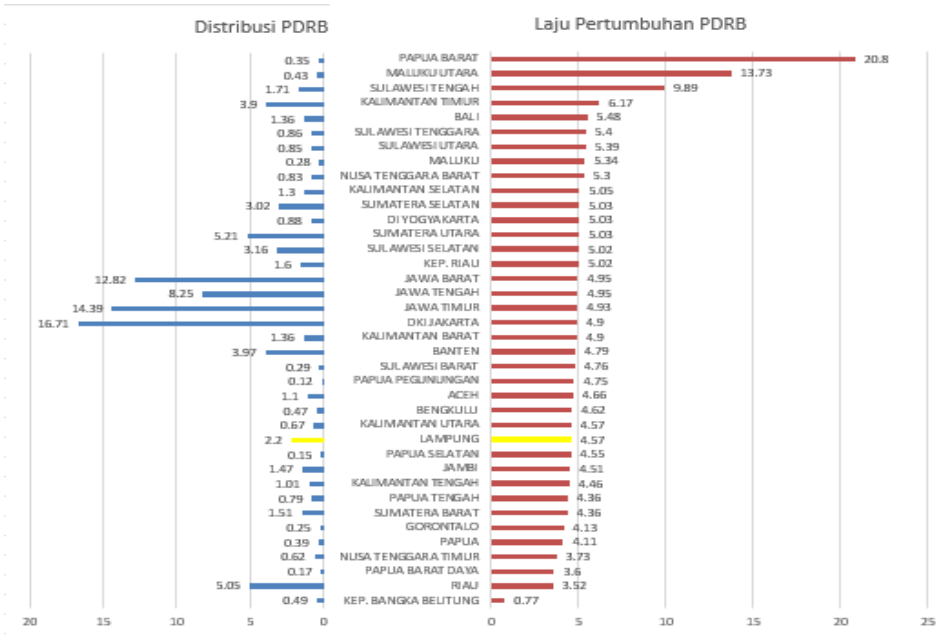

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Dalam lingkup regional Sumatera, kinerja ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen, berada pada urutan ke-6 (enam) setelah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat dan Jambi. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2. 27 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2024

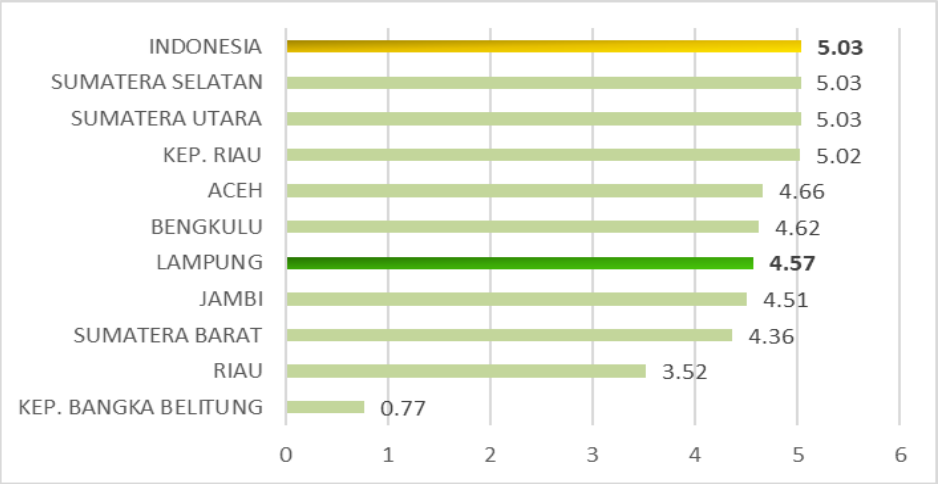

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan salah satu sektor lapangan usaha dalam PDRB. Dalam kurun waktu 2019-2023, PDRB (ADHK) sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp333,305 juta, menjadi RP415,418 juta yang menunjukkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Grafik 2. 13 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akamodasi dan Makan Minum Indonesia

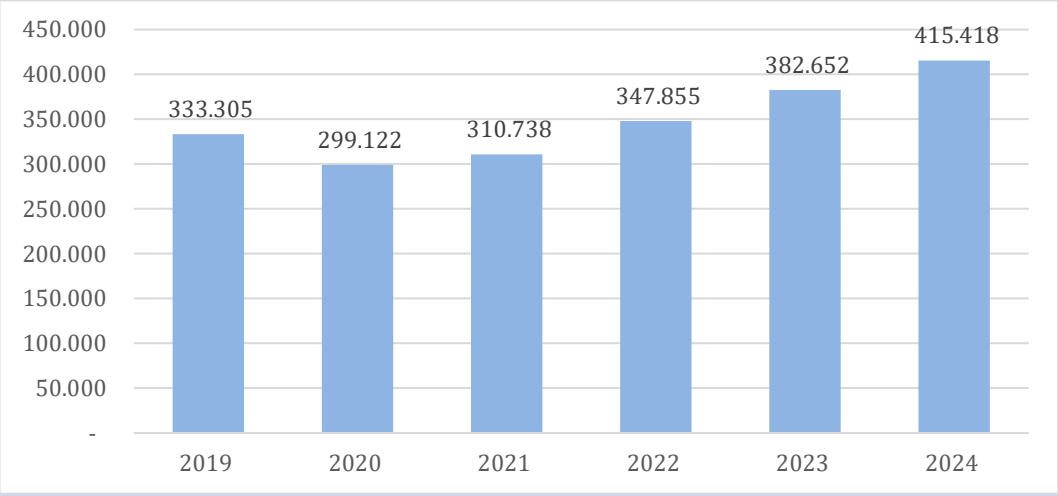

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

PDRB ADHK Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 10,26 persen yang mana pada tahun 2019 sebesar Rp333,304 Juta menjadi Rp299,122 Juta pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020 kemampuan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam hal konsumsi akomodasi makan dan minum namun perlahan membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2024.

Pada Provinsi Lampung, dalam kurun waktu 2023-2024, PDRB (ADHK) sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu senilai Rp4,37 juta, menjadi RP4,62 juta. Ini berarti pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen pada tahun 2024.

Grafik 2. 14 PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Lampung

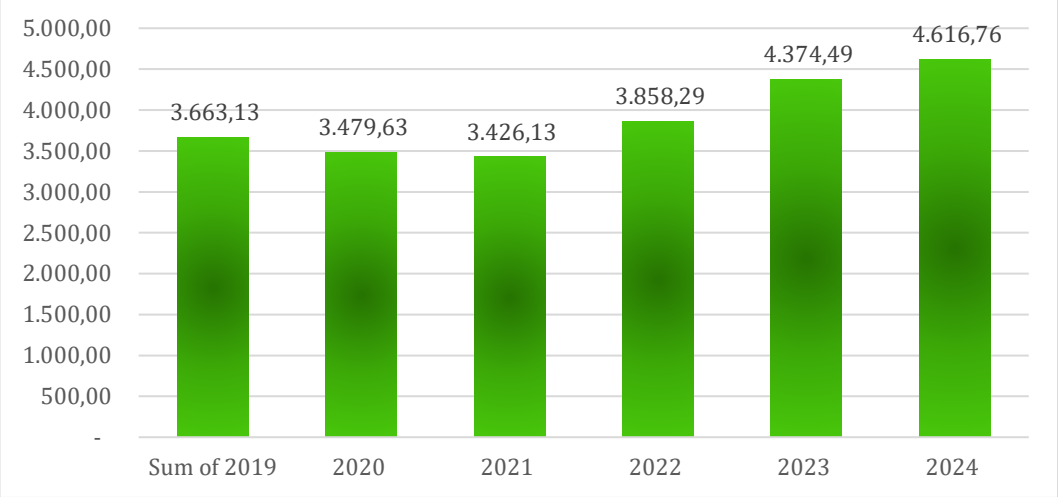

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Namun di Tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Provinsi Lampung pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 1,54% pada tahun 2020 menjadi Rp3,43 juta pada 2021 akan tetapi PDRB Indonesia pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari Rp299,12 Juta menjadi Rp310,73 Juta. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara Provinsi Lampung dengan Indonesia secara keseluruhan. Provinsi Lampung mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yang artinya kemampuan masyarakat Lampung mengalami penurunan dalam hal

konsumsi akomodasi makan dan minum dan baru kembali membaik pada tahun 2022.

2.1.3.3 Inflasi

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Grafik 2. 15 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Lampung dan Nasional

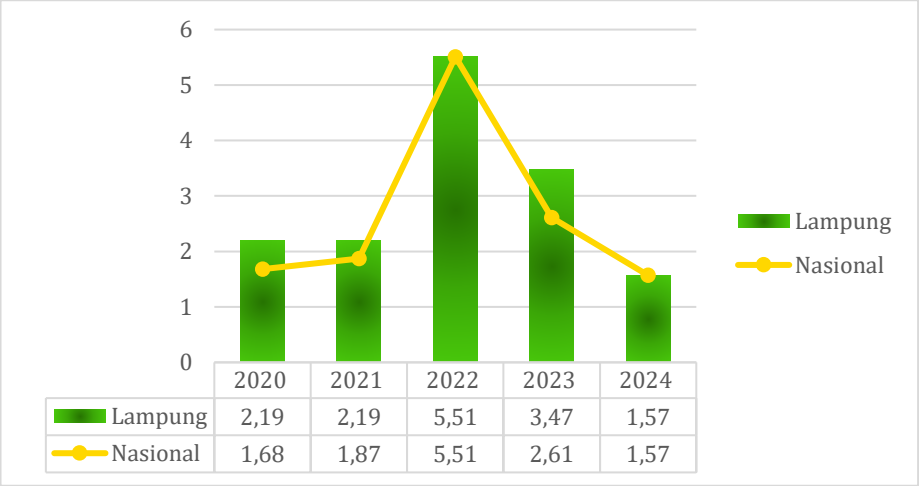

	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung	2,19	2,19	5,51	3,47	1,57
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025*

Secara tahunan (y to d), inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 tercatat masih berada pada rentang sasaran inflasi yaitu 3%±1, yaitu senilai 1,57%, lebih rendah jika dibandingkan inflasi tahun 2023 sebesar 3,47%. Capaian Tahun 2024 tersebut terpantau sama jika dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,57% (y on y).

Gambar 2. 28 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

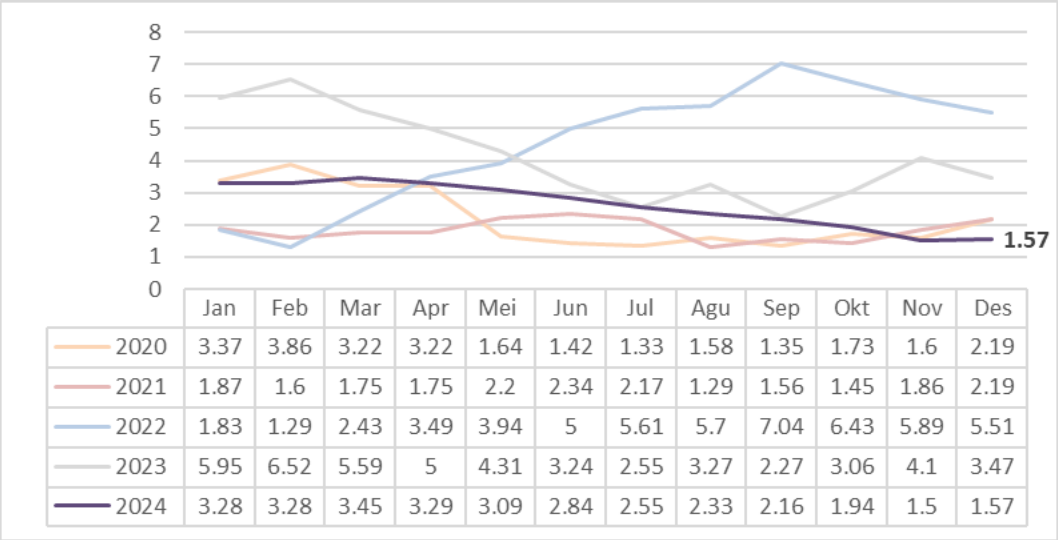

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2020	3.37	3.86	3.22	3.22	1.64	1.42	1.33	1.58	1.35	1.73	1.6	2.19
2021	1.87	1.6	1.75	1.75	2.2	2.34	2.17	1.29	1.56	1.45	1.86	2.19
2022	1.83	1.29	2.43	3.49	3.94	5	5.61	5.7	7.04	6.43	5.89	5.51
2023	5.95	6.52	5.59	5	4.31	3.24	2.55	3.27	2.27	3.06	4.1	3.47
2024	3.28	3.28	3.45	3.29	3.09	2.84	2.55	2.33	2.16	1.94	1.5	1.57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

Secara tahunan (years to date), Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 1,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,39 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,48 persen; kelompok kesehatan 2,68 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 5,85 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,47 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 7,54 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu: kelompok transportasi 0,03 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,01 persen.

Menghadapi inflasi dan menjaga stabilitas harga, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait

ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, terdapat Gerakan Nasional (Gernas) Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Pengendalian Inflasi. Data statistik Lampung menunjukkan bahwa lebih 60 persen porsi perekonomian Lampung ditopang oleh konsumsi masyarakat, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang juga dominan pada sisi permintaan (*demand*). Pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat, diantaranya dengan memperkuat program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif). Menguatnya daya beli masyarakat akan mendorong bergeraknya perekonomian pada sisi penawaran (*supply*). Pengendalian inflasi dalam tingkat yang wajar, akan menjadi insentif bagi pelaku ekonomi untuk terus berproduksi. Inflasi yang berlebihan akan menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi.

Tingkat inflasi Lampung pada periode tahun 2005-2010 sangat fluktuatif dan sempat berada pada level dua digit. Sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan oleh pemerintah pusat, sinergitas pengendalian inflasi di daerah dan antardaerah semakin diperkuat untuk menghadapi berbagai tekanan inflasi yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal dalam perekonomian. Sejak tahun 2011 tingkat inflasi terus dijaga pada rentang sasaran yang mendukung kondisi perekonomian. Pengendalian inflasi berfokus untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis, yang didukung dengan upaya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan antisipasi terhadap ancaman cuaca ekstrim yang dapat mengganggu rantai pasok bahan pangan masyarakat. Catatan pada lima tahun terakhir telah menunjukkan bahwa tingkat inflasi Lampung berada pada level 2-5 persen dan menjadi momentum untuk terus mendukung upaya pembangunan ekonomi yang diharapkan.

Grafik 2. 16 Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2006-2024

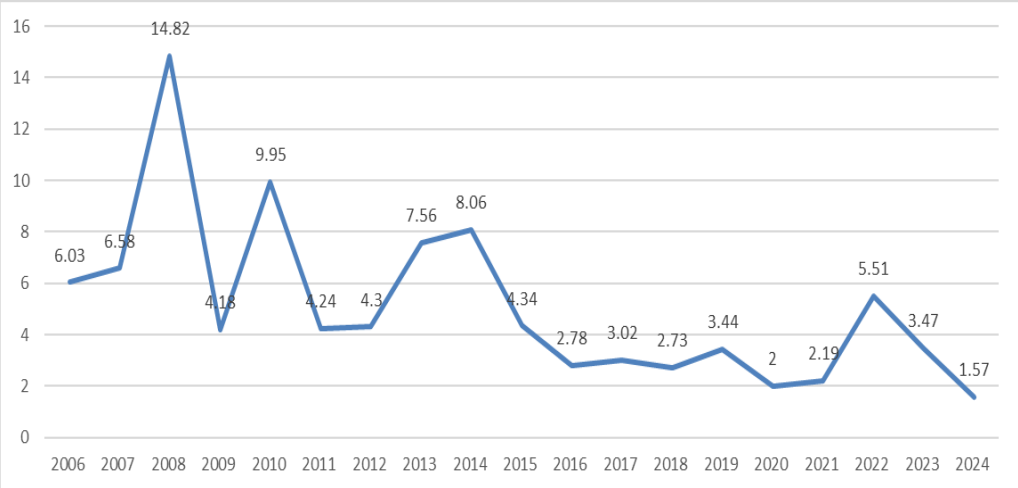

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024

2.1.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson

- **Rasio Gini**

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun 2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, Namun pada tahun 2023 Rasio Gini Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,319 dan nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional (0,385), dan pada Tahun 2024 nilai Rasio Gini Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,301 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,018 point. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor

(*crosscutting*), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

Grafik 2. 17 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

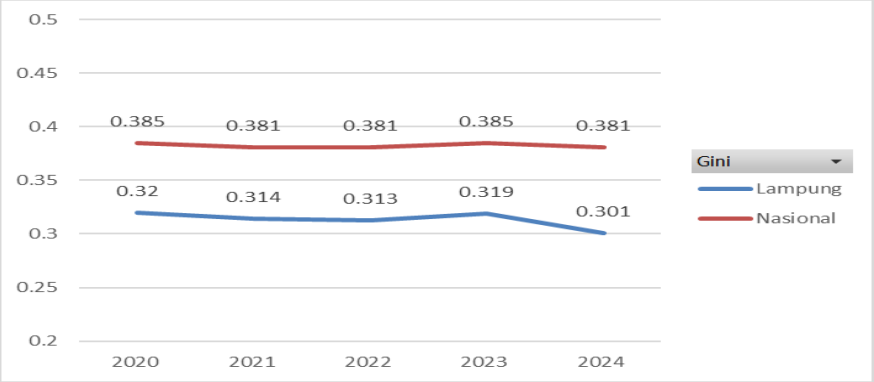

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025 (diolah).

Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan keempat terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh.

Grafik 2. 18 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2024

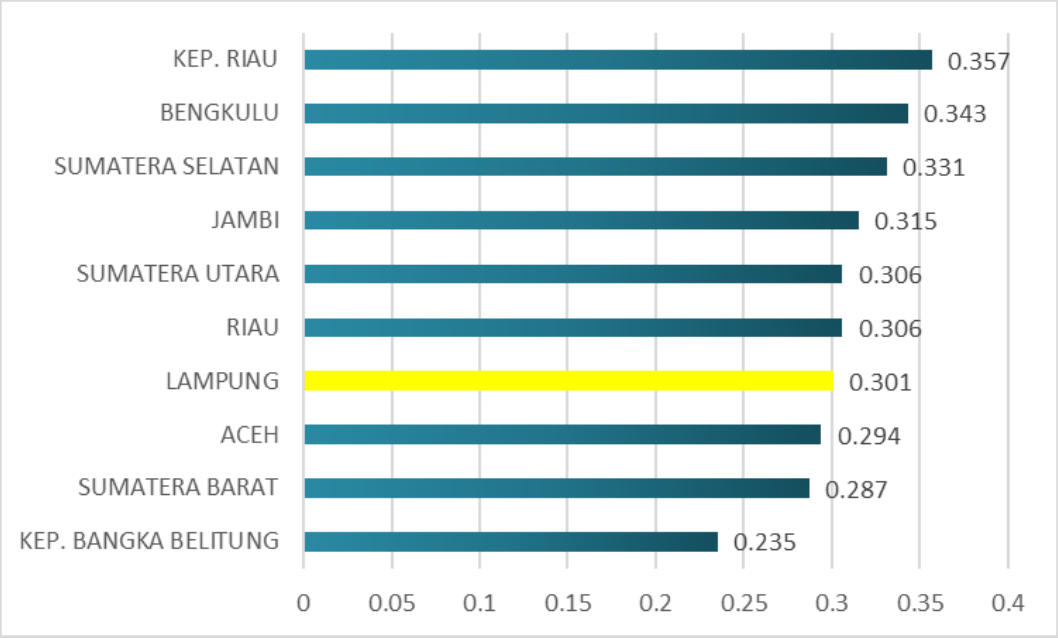

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025 (diolah).

Di Provinsi Lampung, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung, dimana dimana 59 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Kota Bandar Lampung.

Grafik 2. 19 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2024

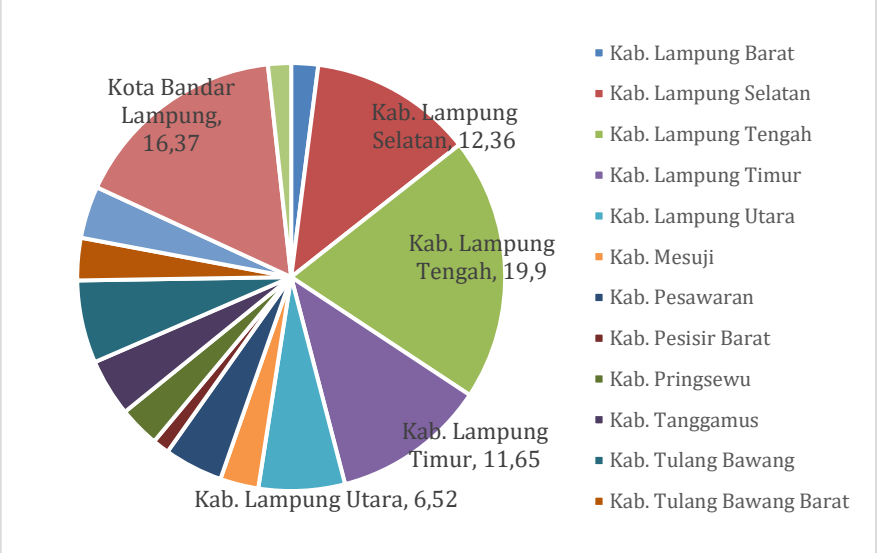

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

- **Indeks Williamson**

Indeks Williamson digunakan dalam mengukur selisih/ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam suatu daerah. Ketimpangan ini dapat terjadi karena kegiatan ekonomi (mobilitas barang dan jasa) yang terhambat, perbedaan pusat kegiatan ekonomi, potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, letak geografis, maupun perbedaan kapasitas fiskal. Nilai Indeks ini dihitung berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Besaran nilai Indeks ini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilainya atau semakin jauh dari angka Nol (0,00) artinya semakin tinggi ketimpangan antar wilayah tersebut. Besaran Nilai Indeks ini juga dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu nilai kurang dari 0,35 (kategori ringan), 0,35 hingga 0,5 (kategori sedang), dan lebih dari 0,5 (kategori tinggi).

Pada dasarnya Pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah sehingga kesenjangan dapat diminimalisir. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata justru menimbulkan permasalahan ketimpangan yang lebih kompleks.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung cenderung meningkat pada tahun 2017-2021 disertai dengan angka ketimpangan wilayah pada periode yang sama cenderung stabil (berada pada rentang 0,24-0,28) dan masuk dalam kategori Rendah. Namun di sisi lain, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 11,67 persen masih lebih besar dari persentase penduduk miskin nasional yakni 9,71 persen (BPS, 2022). Hal ini memberikan gambaran bahwa kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak serta-merta linier atau berdampak terhadap pemerataan pembangunan, khususnya di Provinsi Lampung.

2.1.3.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks ini menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkela

Gambar 2. 29 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah 2023 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

Skor IDSD Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 3, yang termasuk dalam tiga provinsi dengan skor terendah di Pulau Sumatera, namun capaian

tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,02. Provinsi Lampung memiliki skor yang cukup tinggi pada pilar institusi, adopsi TIK (determinan kemajuan industri), kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan dinamisme bisnis. Sementara skor IDSD rendah terdapat pada pilar infrastruktur, pasar produk, sistem keuangan, ukuran pasar dan kapabilitas inovasi. Sementara itu berdasarkan data pada tabel di bawah, rata-rata skor IDSD kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian provinsi serta masih terdapat beberapa kabupaten yang belum memiliki skor IDSD. Daerah yang memiliki skor IDSD di atas capaian Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Tabel 2. 11 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	**4,30**	**2,71**	**3,58**	**3,54**	**3,79**	**3,77**	**2,64**	**3,85**	**2,53**	**4,36**	**3,22**	**3,03**	**3,44**
PROV. LAMPUNG	**4,16**	**2,76**	**3,66**	**3,70**	**3,84**	**3,48**	**2,12**	**3,41**	**2,10**	**4,55**	**3,81**	**2,80**	**3,36**
RATA-RATA KAB/KOTA	**4,11**	**2,46**	**4,40**	**3,22**	**3,81**	**3,22**	**2,61**	**3,06**	**1,61**	**4,21**	**3,07**	**1,64**	**3,25**
LAMPUNG BARAT	4,42	1,98	4,41	3,37	3,68	3,25	2,85	2,72	0,88	3,82	2,70	0,88	**2,91**
TANGGAMUS	4,02	2,33	3,81	2,72	3,76	3,08	2,69	3,04	1,42	4,16	2,73	0,99	**2,90**
LAMPUNG SELATAN	3,97	2,06	4,69	3,23	3,82	2,97	2,26	3,38	1,66	4,62	2,60	2,67	**3,16**
LAMPUNG TIMUR	3,93	2,45	4,37	3,56	3,92	3,14	1,81	2,76	-	4,59	2,73	1,51	-
LAMPUNG TENGAH	3,90	2,32	4,31	3,38	3,85	3,04	1,89	3,09	2,28	4,83	2,97	1,54	**3,12**
LAMPUNG UTARA	-	2,79	4,19	2,74	3,81	3,14	2,67	3,13	1,48	4,35	3,09	1,84	-
WAY KANAN	4,21	2,50	4,49	3,31	3,82	3,03	2,03	3,01	-	4,11	2,43	0,72	-
TULANGBAWANG	4,01	2,14	4,54	3,52	3,86	3,03	1,97	2,99	0,82	4,33	3,74	1,30	**3,02**
PESAWARAN	4,10	2,55	4,31	3,24	3,80	3,15	2,34	2,93	-	4,19	3,24	1,48	-
PRINGSEWU	4,31	2,81	4,45	3,13	3,89	3,40	3,34	3,10	0,58	4,02	2,53	2,23	**3,15**
MESUJI	4,05	1,87	4,62	3,65	3,73	2,59	1,83	2,31	-	3,97	4,01	0,74	-
TULANG BAWANG BARAT	4,12	2,64	4,48	3,25	3,86	2,92	1,91	3,23	-	4,02	3,28	0,61	-
PESISIR BARAT	4,06	1,76	3,49	3,30	3,38	3,07	2,48	2,77	-	3,60	2,24	0,76	-
BANDAR LAMPUNG	3,90	3,01	4,88	2,92	3,97	4,04	4,20	3,67	2,74	4,74	3,38	3,59	**3,75**
METRO	4,54	3,74	4,90	2,94	3,99	4,38	4,88	3,73	2,65	3,75	4,33	3,69	**3,96**

Pilar 1 : Institusi
Pilar 2 : Infrastruktur
Pilar 3 : Adopsi TIK
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
Pilar 5 : Kesehatan
Pilar 6 : Keterampilan
Pilar 7 : Pasar Produk
Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 10: Ukuran Pasar
Pilar 11: Dinamisme Bisnis
Pilar12 : Kapabilitas Inovasi

Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah 2023 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

2.1.3.6 Investasi

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki dengan potensi investasi yang cukup menjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tren kenaikan realisasi investasi setiap tahunnya. Investasi atau penanaman modal di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan investasi ini diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 12 Target dan Realisasi Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2019–2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN
2019	6.000.000.000	4.756.685.700	79,28
2020	4.930.000.000	14.297.627.790	290,01
2021	10.800.000.000.000	13.050.668.202.202	120,84
2022	11.000.000.000.000	9.365.537.953.166	85,14
2023	11.000.000.000.000	10.890.002.000,00	99
2024	**12.960.000.000.000**	**9.660.900.000.000**	**74,54**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

- **Pertumbuhan PMDN**

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung periode Tahun 2019 - 2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, capaian terendah Tahun 2019 yaitu sebesar 2.480,9 Miliar Rupiah dan tertinggi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 10.513,2 Miliar Rupiah. Secara pertumbuhan nilai investasi, tahun 2020 adalah tahun dengan pertumbuhan nilai investasi tahunan tertinggi yaitu sebesar 193,15 %, capaian ini sebagai dampak pembangunan jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang berakhir pembangunannya pada tahun 2019.

Tabel 2. 13 Realisasi PMDN Provinsi Lampung Tahun 2019–2024

TAHUN	PMDN (Rp. Miliar)	Total Proyek
2019	2.428,90	241
2020	7.120,50	1.271
2021	10.513,20	2.169
2022	5.809,23	2.163
2023	7.625,80	5.957
2024	1.775,70	3.408

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

- **Pertumbuhan PMA**

Pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan pada Tahun 2020, realisasi nilai investasi PMA mencatat rekor kenaikan terbesar yaitu dengan nilai investasi sebesar 498,41 US$ Juta atau meningkat sebesar 221,18 % dibandingkan capaian Tahun 2019.

Tabel 2. 14 Realisasi PMA Provinsi Lampung Tahun 2019–2024

TAHUN	PMA (US$. Ribu)	Total Proyek
2019	155.187,70	158
2020	498.411,00	384
2021	173.800,00	363
2022	247.826,10	435
2023	220.553,90	911
2024	547.500	332

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

2.1.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan

- Kawasan Pertanian

Potensi kawasan pertanian di Provinsi Lampung terdiri dari hortikultura, perkebunan, tanaman pangan dan peternakan yang tersebar disetiap kabupaten/kota seluas 880.758,21 ha atau 26,24%. Luas potensi hortikultura seluas 72.820,47 ha, perkebunan seluas 446.346,52 ha, tanaman pangan seluas 361.407,17 ha dan peternakan seluas 184,05 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 15 Luas Kawasan Pertanian Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Kawasan Hortikultura	Kawasan Perkebunan	Kawasan Peternakan	Kawasan Tanaman Pangan	Grand Total (ha)
Bandar Lampung	0,18	0,12	-	602,62	602,93
Lampung Barat	7.117,16	63.833,24	-	10.276,56	81.226,97
Lampung Selatan	164,85	13.050,17	-	39.082,55	52.297,57
Lampung Tengah	21.832,20	111.793,29	181,46	79.566,71	213.373,65
Lampung Timur	-	-	-	58.275,68	58.275,68
Lampung Utara	-	0,03	-	15.094,48	15.094,51
Mesuji	-	56.920,45	-	29.653,76	86.574,21
Metro	45,69	-	2,59	2.945,62	2.993,90
Pesawaran	13.193,57	43.813,14		13.134,45	70.141,17
Pesisir Barat	-	-	-	8.583,44	8.583,44
Pringsewu	8.229,78	4.422,31	-	13.886,39	26.538,48
Tanggamus	0,39	24,46	-	17.123,52	17.148,34
Tulang Bawang	-	503,61	-	52.108,49	52.612,10
Tulang Bawang Barat	1.584,50	69.259,16	-	6.918,72	77.762,38
Way Kanan	20.652,16	82.726,54	-	14.154,17	117.532,88
Jumlah	**72.820,47**	**446.346,52**	**184,05**	**361.407,17**	**880.758,21**

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043

- Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Daerah Lampung Kuat dan Mantap dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung yang sangat baik dan masuk dalam kategori "sangat tahan" dengan nilai capaian 81,56 pada tahun 2023.

Gambar 2. 30 Peta Sebaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Seluruh Provinsi di Indonesia 2023

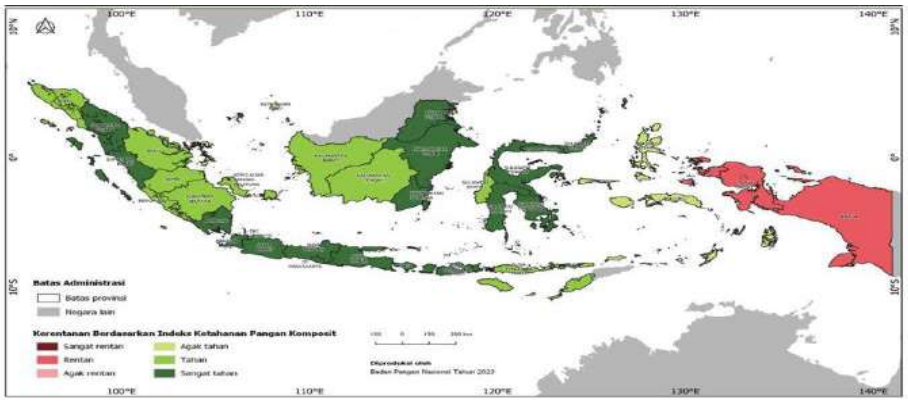

Keterangan : Data Termutakhir

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 oleh Badan Pangan Nasional

Berdasarkan data IKP Tahun 2023, terdapat 11 kabupaten dan 2 (dua) kota di Provinsi Lampung yang masuk dalam kategori ”sangat tahan” dengan IKP lebih dari 74,40. Sementara hanya terdapat 2 (dua) kabupaten yang masih masuk dalam kategori ”tahan” yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2. 16 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan
Tulang Bawang	88,78
Mesuji	88,18
Pringsewu	87,35
Lampung Timur	85,22
Lampung Selatan	84,46
Lampung Tengah	84,93
Tulang Bawang Barat	83,74
Way Kanan	79,61
Pesawaran	80,85
Lampung Utara	76,82
Lampung Barat	76,18
Tanggamus	76,40
Kota Bandar Lampung	84,64
Kota Metro	85,78
Pesisir Barat	75,77

Sumber : Satu Data Badan Pangan Nasional, 2025

Tabel 2. 17 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2023

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	87,65	18	Sulawesi Tenggara	74,96
2	Jawa Tengah	84,80	19	Kalimantan Utara	74,59
3	DKI Jakarta	83,80	20	Sumatera Selatan	73,82
4	Sulawesi Selatan	83,36	21	Sulawesi Barat	73,03
5	Sumatera Barat	83,22	22	Aceh	72,96
6	DI Yogyakarta	83,17	23	Bengkulu	72,27
7	Jawa Timur	82,46	24	Kalimantan Barat	72,20
8	Jawa Barat	82,19	25	Jambi	72,17
9	Gorontalo	81,63	26	Nusa Tenggara Timur	71,25
10	Lampung	81,56	27	Kep. Bangka Belitung	71,14
11	Kalimantan Selatan	81,26	28	Kalimantan Tengah	68,90
12	Kalimantan Timur	79,29	29	Riau	68,68
13	Banten	78,71	30	Kep. Riau	65,10
14	Sulawesi Utara	77,32	31	Maluku	64,37
15	Nusa Tenggara Barat	76,51	32	Maluku Utara	62,34
16	Sumatera Utara	75,97	33	Papua Barat	47,95
17	Sulawesi Tengah	75,83	34	Papua	42,27

Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 oleh Badan Pangan Nasional

Komoditas unggulan untuk tanaman pangan di Provinsi Lampung terdiri dari 3 (tiga) komoditas yaitu Padi, Jagung, dan Ubikayu. Produksi Jagung dan Ubikayu selama kurun waktu 2018 sampai 2023 mengalami peningkatan. Produksi Jagung meningkat sebesar 422.691 ton. Peningkatan produksi Jagung tertinggi terdapat di tahun 2021 dan 2022 yakni mencapai 3 (tiga) juta ton, namun produksi tersebut menurun di tahun 2023, meskipun secara umum terjadi peningkatan produksi selama periode waktu 6 (enam) tahun. Pada produksi Ubi kayu ditahun 2023 mencapai 7,3 juta ton, dengan peningkatan sebesar 2.252.135 ton selama periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Produksi ubi kayu sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dikarenakan adanya penurunan harga yang mengakibatkan petani tidak mendapatkan keuntungan, musim tanam yang tidak serentak dikarenakan banyak petani yang menunggu membaiknya harga ubi kayu, dan kualitas ubi kayu yang tidak memenuhi standar pabrik.

Tabel 2. 18 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No	Kab/Kota	Produksi Tanaman Jagung (ton)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lampung Barat	666	1,120	812	853	1,345	861
2	Tanggamus	11,388	29,558	3,502	8,065	8,400	33,585
3	Lampung Selatan	539,302	705,855	738,178	878,640	793,936	783,027
4	Lampung Timur	963,909	1,058,923	1,291,104	1,183,420	833,827	885,920
5	Lampung Tengah	325,063	416,321	515,596	602,709	553,862	557,388
6	Lampung Utara	212,261	211,911	218,859	204,216	174,733	186,633
7	Way Kanan	85,485	130,316	90,886	89,118	79,974	132,538
8	Tulang Bawang	37,312	56,747	44,542	6,059	11,889	13,818
9	Pesawaran	91,545	166,504	156,766	133,164	126,424	107,728
10	Pringsewu	44,696	45,615	41,687	33,175	37,301	42,073
11	Mesuji	1,847	13,898	3,667	2,549	300	288
12	Tuba Barat	27,897	32,582	7,614	15,065	16,211	14,362
13	Pesisir Barat	28,846	18,262	27,574	19,853	8,925	21,198
13	Bandar Lampung	720	1,141	1,511	2,466	2,144	2,486
14	Metro	3,447	7,439	2,716	5,093	2,019	2,220
Provinsi Lampung		**2,374,384**	**2,896,191**	**3,145,015**	**3,184,443**	**2,651,289**	**2,784,126**

No	Kab/Kota	Produksi Tanaman Padi (ton)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lampung Barat	59,142	57,093	60,666	62,802	70,923	63,046
2	Tanggamus	121,751	148,159	123,414	128,675	147,163	135,017
3	Lampung Selatan	265,878	311,669	330,326	339,942	294,549	317,834
4	Lampung Timur	355,113	459,301	397,374	449,295	475,668	482,716
5	Lampung Tengah	455,234	599,111	489,448	566,601	608,009	614,017
6	Lampung Utara	61,823	75,752	74,260	63,453	72,391	63,179
7	Way Kanan	59,419	78,825	82,235	100,985	84,631	95,711
8	Tulang Bawang	217,894	215,987	232,509	268,324	319,194	375,140
9	Pesawaran	111,281	113,207	113,403	130,559	121,693	115,934
10	Pringsewu	112,699	130,867	122,186	137,097	128,638	143,903
11	Mesuji	246,841	325,509	336,768	296,935	296,527	271,572
12	Tuba Barat	30,670	30,361	33,802	50,700	45,954	29,539
13	Pesisir Barat	50,951	60,274	62,296	60,773	60,121	51,619
13	Bandar Lampung	2,318	2,507	2,562	2,722	2,444	2,716
14	Metro	13,073	41,669	24,206	29,297	29,993	29,404
Provinsi Lampung		**2,164,089**	**2,650,290**	**2,485,453**	**2,688,160**	**2,757,898**	**2,791,348**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, 2024

Produksi komoditas tanaman pangan di Provinsi Lampung selama periode 2019 sampai 2024 untuk produksi padi mengalami tren peningkatan, dimana ditahun 2019 Produk padi mencapai 2,1 juta ton turun menjadi 2,7 juta ton di tahun 2024. Produksi jagung mengalami tren peningkatan, dimana ditahun 2019 Produk padi mencapai 2,3 juta ton turun menjadi 2,7 juta ton di tahun 2024.

Grafik 2. 20 Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024

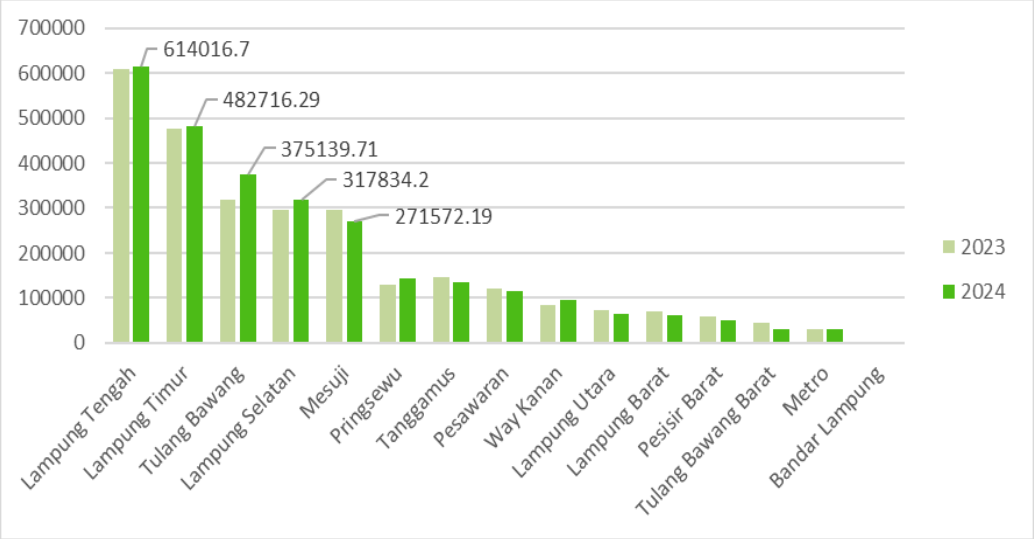

Sumber : BPS, 2025

Produksi daging sapi di Provinsi Lampung di tahun 2023 mencapai 22.895,20 ton meningkat dibandingkan tahun 2022. Dalam periode lima tahun produksi daging sapi meningkat sebesar 8.569,01 ton. Kontribusi produksi daging sapi Provinsi Lampung sebesar 4,55 persen terhadap produksi daging sapi Nasional. Kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kontribusi daging sapi Lampung terhadap nasional di tahun 2022 yang sebesar 4,24 persen.

Grafik 2. 21 Produksi Daging Sapi (ton) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024

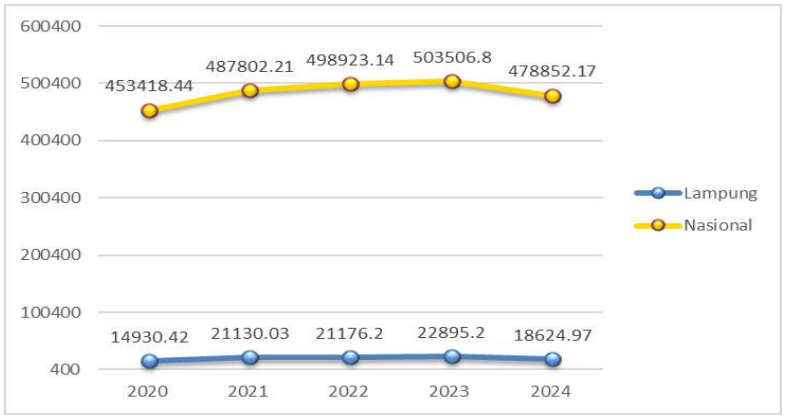

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Secara regional Sumatera produksi daging sapi Provinsi Lampung di tahun 2024 berada pada peringkat ke 1 (satu) dengan capaian produksi daging sapi sebesar 18.624,97 ton.

Tabel 2. 19 Tabel Produksi Daging Sapi (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024

Produksi Daging Sapi	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung	14.930,42	21.130,03	21.176,20	22.895,20	18.624,97
Sumatera Utara	12.986,16	13.745,06	13.859,09	15.902,80	18.245,02
Sumatera Barat	20.980,53	21.375,13	21.514,66	31.194,40	14.901,14
Riau	8.737,30	8.948,70	9.127,69	10.974,80	13.457,12
Sumatera Selatan	14.358,28	13.832,62	15.458,87	12.171,50	11.810,74
Aceh	12.927,76	11.674,10	12.014,96	15.644,50	11.006,35
Jambi	5.543,42	4.638,46	5.760,10	4.920,90	3.571,72
Kep. Bangka Belitung	2.986,10	3.233,04	3.395,04	3.485,70	2.490,58
Kep. Riau	2.263,10	1.453,07	1.390,39	1.820,90	2.202,22
Bengkulu	3.075,23	4.348,01	3.329,27	3.355,50	1.762,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Dalam hal produksi daging ayam ras pedaging, Provinsi Lampung merupakan produsen pada urusan ke 3 (tiga) di wilayah regional Sumatera dan konsisten dari sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Produksi daging ayam ras pedaging ini mencapai 86.895.157,00 ton di tahun 2024.

Tabel 2. 20 Produksi Daging Ayam Ras Pedaging (ton) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024

Produksi Ayam Ras Pedaging	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	139.447.786,00	147.044.203,00	162.495.132,00	163.512.287,00	162.457.033,00
Sumatera Selatan	94.283.758,00	99.833.249,00	104.071.426,00	111.911.551,00	110.193.702,00
Lampung	**83.762.079,00**	**84.286.013,00**	**103.657.519,00**	**89.057.394,00**	**86.895.157,00**
Riau	84.743.269,00	81.658.751,00	87.783.728,00	90.334.840,00	85.950.783,00
Sumatera Barat	54.364.507,00	46.715.100,00	36.835.762,00	55.107.244,00	53.522.495,00
Jambi	40.371.268,00	44.027.911,00	42.429.895,00	50.197.162,00	47.225.872,00
Aceh	32.590.982,00	34.075.587,00	42.624.010,00	35.758.787,00	35.891.791,00
Kep. Bangka Belitung	18.689.049,00	21.159.172,00	26.586.647,00	22.322.966,00	22.668.162,00
Kep. Riau	0.588.392	16.395.273,00	20.341.590,00	17.545.479,00	17.945.495,00
Bengkulu	8.663.406,00	9.846.509,00	12.066.512,00	10.466.973,00	10.704.499,00

Sumber : BPS Indonesia, 2025

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (*PoU*) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi. Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Penghitungan PoU ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (*NFA*) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami penurunan, yang dapat diartikan bahwa upaya Provinsi Lampung untuk memenuhi kecukupan pangan mengalami pertumbuhan yang tumbuh positif meskipun masih berada di bawah rata-rata capaian nasional. Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2019 sebesar 10,51 persen kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 12,19 persen yang disebabkan oleh menurunnya kecukupan pangan akibat pembatasan kegiatan masyarakat saat pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 capaian tersebut kembali mengalami perbaikan menjadi 10,25 persen, namun

mengalami kenaikan yang cukup drastis di Tahun 2022 menjadi 14,63 persen yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas di sektor pertanian yang mampu mencukupi konsumsi pangan daerah.

Grafik 2. 22 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2019 – 2023

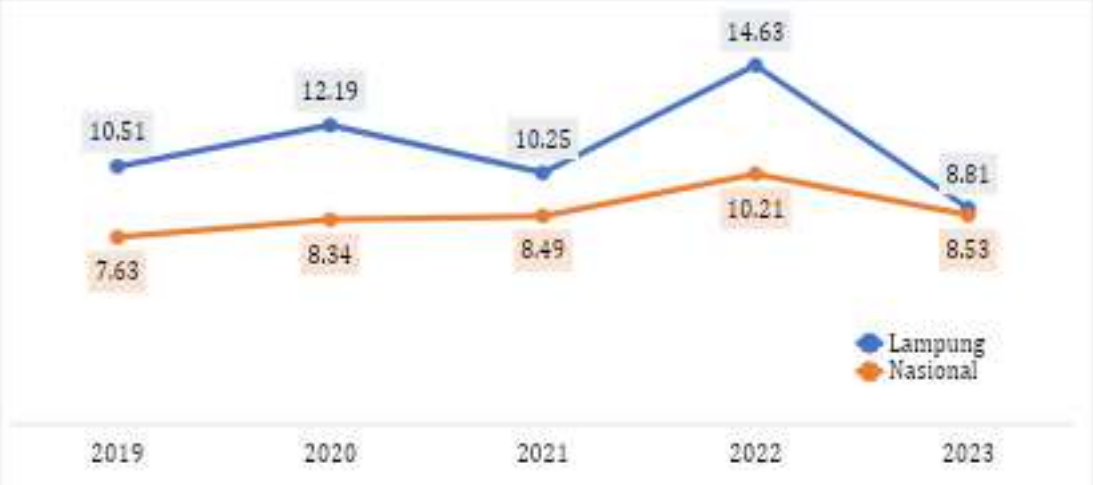

Sumber : BPS Indonesia, 2024

2.1.3.8 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Merujuk pada UU nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Jumlah koperasi di Provinsi Lampung baik yang menjadi kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 2.123 koperasi, dengan jumlah koperasi kewenangan nasional sebanayak 74 koperasi, kewenangan provinsi sebanyak 302, dan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1.720 koperasi. Secara nasional jumlah koperasi sebesar 131.164 koperasi.

Grafik 2. 23Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023

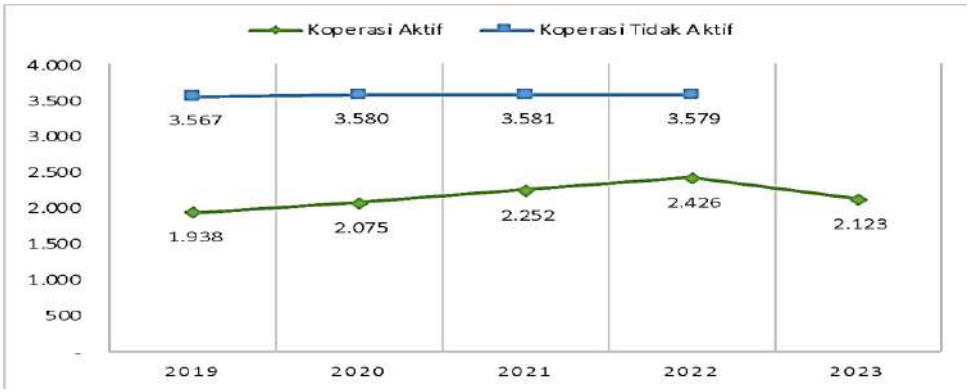

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2024

Jumlah koperasi aktif sejak tahun 2019 terus bertumbuh dari angka 1.938 menjadi 2.123, dengan pertambahan jumlah koperasi sebesar 185 unit selama lima tahun. Meskipun di tahun 2022, jumlah koperasi aktif berkurang sebesar 303 unit dari 2022 sampai 2023. Jumlah koperasi yang tidak aktif masih cukup tinggi selama periode lima tahun pada angka tiga ribu unit koperasi.

Grafik 2. 24 Rekapitulasi Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

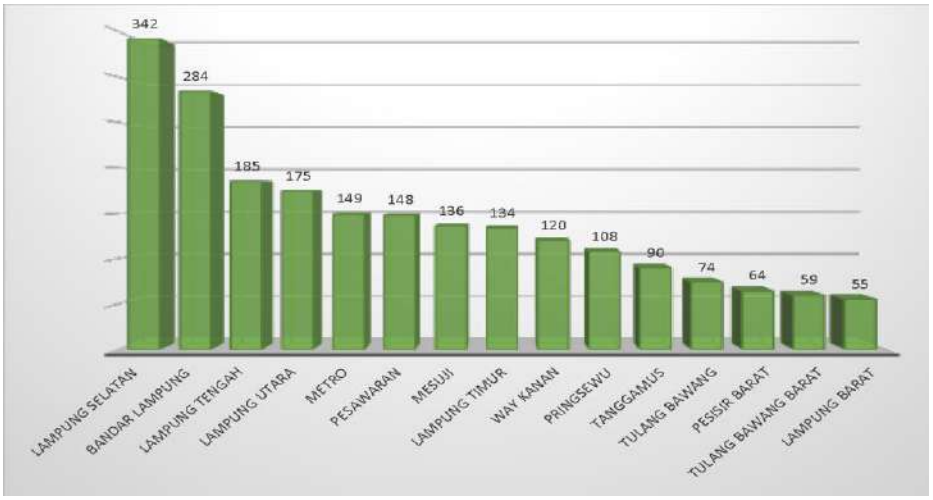

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2024

Berdasarkan Grafik jumlah koperasi di Provinsi Lampung, 3 (tiga) besar kabupaten dengan jumlah koperasi tertinggi adalah Kabupaten Lampung Selatan (342 koperasi), Kota Bandar Lampung (284 koperasi), dan

Kabupaten Lampung Tengah (185 koperasi). Untuk jumlah koperasi paling sedikit ada di Kabupaten Lampung Barat (55 koperasi).

Gambar 2. 31 Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Jenis Koperasi di Provinsi Lampung Tahun 2023

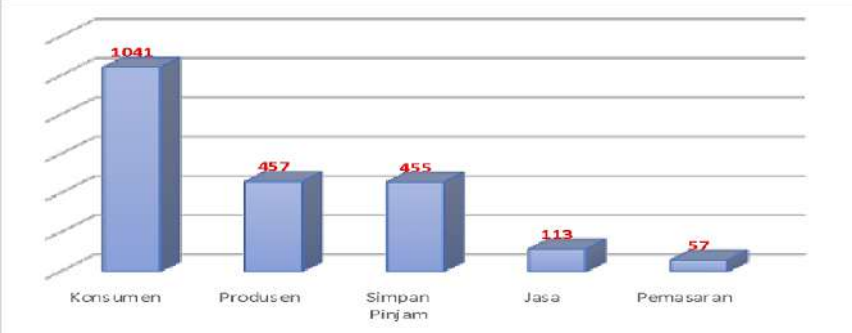

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2024

Jenis koperasi terbesar di Provinsi Lampung adalah jenis koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi. Jumlah koperasi yang hampir berimbang adalah jenis koperasi produsen dan simpan pinjam, yaitu jenis koperasi produsen sebanyak 457 dan jenis koperasi pemasaran sebanyak 455.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menjadi tulang punggung perekonomian dan mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Khususnya UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dimana UMKM terbukti mampu bertahan dalam kondisi kritis, sebagai contoh ketika menghadapi krisis moneter tahun 1998 dan pandemic covid-19.

Tabel 2. 21 Jumlah UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

No	Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	2020	143.948	3.452	156	147.556
2	2021	147.926	2.917	156	150.999
3	2022	273.120	291	46	273.457
4	2023	472.544	18.448	1.994	492.986

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2024

Sektor UMKM di tahun 2023 tumbuh sangat tinggi, dengan pertumbuhan usaha mikro mencapai 328.596 unit dalam periode tahun 2020 sampai 2023. Selama periode tersebut usaha mikro tumbuh konsisten,

berbeda dengan pertumbuhan usaha kecil dan usaha menengah dimana di tahun 2022 masing-masing mengalami penurunan dengan jumlah usaha kecil 291 unit dan usaha menengah sebanyak 46 unit. Secara umum di tahun 2023 pertumbuhan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sangat tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan asset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta, Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria asset lebih dari 500 juta dengan omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 milyar, dan usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan asset lebih dari 500 juta sampai 10 milyar, dengan omset lebih dari minimal 2,5 milyar sampai 50 milyar.

Berdasarkan data tersebut, Lampung memiliki potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan cukup banyak menyerap tenaga. Di tahun 2020 jumlah UMKM di Provinsi Lampung sebanyak 147.556 unit, secara konsisten mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi hingga berjumlah 492.986 unit di tahun 2023. Selama periode 2020 sampai 2023 pertumbuhan UMKM mencapai 345.430 unit.

Tabel 2. 22 Jumlah Data UMKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023 Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha		
		2021	2022	2023
1	Lampung Barat	1.747	9.736	20.521
2	Tanggamus	186	4.214	27.801
3	Lampung Selatan	701	15.406	41.173
4	Lampung Timur	547	41.250	33.528
5	Lampung Tengah	796	60.841	60.848
6	Lampung Utara	457	27.407	28.656
7	Way Kanan	840	1.100	58.004
8	Tulang Bawang	23	35.612	32.428
9	Pesawaran	482	7.394	43.330
10	Pringsewu	1.933	24.779	45.683
11	Mesuji	292	8.676	16.433

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha		
		2021	2022	2023
12	Tulang Bawang Barat	179	7.547	23.750
13	Pesisir Barat	429	8.346	10.621
14	Bandar Lampung	118.533	4.460	30.940
15	Metro	23.854	16.689	19.270
Jumlah		**150.999**	**273.457**	**492.986**

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2024

Begitu juga dengan jumlah UMKM yang tersebar di kabupaten/kota. Dalam periode tahun 2021 UMKM lebih banyak terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung dengan jumlah UMKM sebesar 118.533, namun di tahun 2022 UMKM di Kota Bandar Lampung menurun secara drastis sampai di angka 4.460 UMKM, namun kembali meningkat di tahun 2023 dengan jumlah 30.940 unit. Sebaran UMKM kabupaten/kota di tahun 2023 cukup merata, dengan pertumbuhan UMKM tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pringsewu.

2.1.3.9 Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu komponen penting dalam perekonomian. Perdagangan adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, atau negara. Perdagangan terbagi menjadi kedua kategori utama yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional.

Berdasarkan data rilis Perdagangan Antar Wilayah (PAW) Provinsi di Indonesia pada Tahun 2022 mengalami defisit 21,87 triliun rupiah, yang didominasi oleh penjualan minyak kelapa sawit mentah dengan nilai penjualan sebesar 5,11 triliun rupiah. Kelompok komoditas terbesar adalah: batubara (tidak diaglomerasi); cerutu, *cheroot,* cerutu kecil dan sigaret dari tembakau atau pengganti tembakau; minyak kelapa sawit mentah; minyak bahan bakar; dan alat transportasi umum dengan jenis kendaraan bermotor untuk penumpang.

Gambar 2. 32 Peta Pembelian Antar Wilayah (PAW) Provinsi Lampung

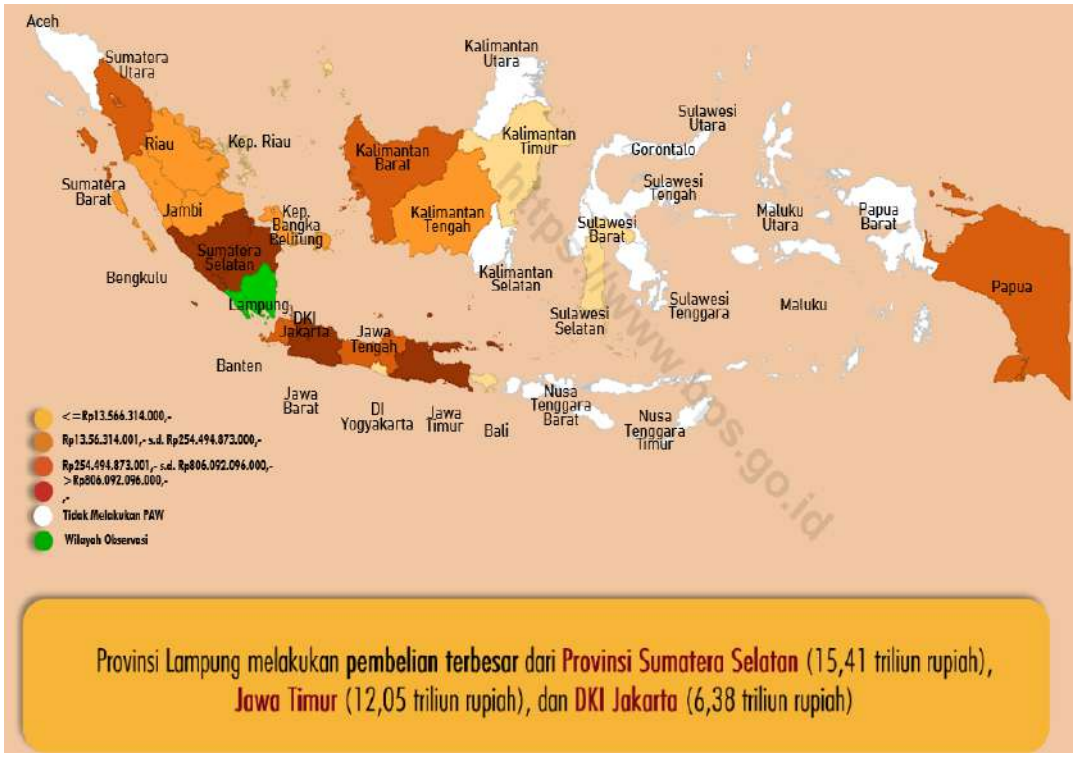

Sumber : Publikasi Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, BPS RI

2.1.3.10 Perindustrian

Perindustrian mengacu pada proses produksi barang dan jasa yang melibatkan penggunaan teknologi, tenaga kerja, dan bahan baku untuk menciptakan produk yang siap untuk dipasarkan. Perindustrian sering kali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Selain itu, industri juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga penting untuk mengelola proses industri dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Tabel 2. 23 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	-5,22	4,69	0,38	1,43	9,09
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-6,61	-0,71	0,42	3,05	-41,91
2. Industri Makanan dan Minuman	-4,58	5,85	0,65	1,9	12,28

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023	2024
3. Industri Pengolahan Tembakau	-14,01	-11,77	-7,52	0,37	0,61
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-15,68	5,9	-12,2	2,32	2,63
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6. Industri Barang Galian bukan Logam	-22,95	-24,78	-51,4	-25,83	-28,65
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas;	-5,55	4,7	19,53	12,59	4,20
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-6,5	2,5	-1,95	-1,79	-5,19
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-4,34	-3,16	-0,75	-1,99	-7,82
10. Industri Barang Galian bukan Logam	-9,71	1,19	-4,39	2,43	-3,25
11. Industri Logam Dasar	4,45	-1,39	1,13	-6,81	2,33
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik	-12,4	-0,5	-9,22	-4,65	-3,96
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-13,82	16,73	12,01	2,20	-1,42
14. Industri Alat Angkutan	-8,93	7,88	10,56	1,46	-8,22
15. Industri Furnitur	-15,14	-10,42	-10,42	4,12	-2,65
16. Industri Pengolahan Lainnya;	-5,16	-0,08	4,41	9,67	2,23

Sumber : BPS 2025

2.1.3.11 Pariwisata

Dari sisi pariwisata, Provinsi Lampung memiliki potensi pengembangan pariwisata baik alam maupun buatan sebagai sektor pendukung perekonomian. Potensi sektor pariwisata yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki dampak yang besar bagi pembangunan daerah apabila didukung dengan pengelolaan yang tepat, diantaranya :

Tabel 2. 24 Pariwisata di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Pariwisata
Kota Bandar Lampung	Taman wisata terdiri dari Taman Wisata Bumi Kedaton (Taman Satwa dan Wisata, Resort, Waterpark), Taman Wisata Wira Garden, Taman Wisata Lembah Hijau, Taman Kupu Kupu Gita Persada, Taman Wisata Alam Batu Putu dan Taman Dipangga. Objek wisata pantai terdiri dari

Kabupaten/Kota	Pariwisata
	Pantai Duta Wisata dan Pantai Puri Gading. Objek peninggalan sejarah yaitu Monumen Gunung Krakatau, Vihara Thay Hin Bio, dan Museum Negeri Lampung Ruwa Jurai.
Kabupaten Lampung Selatan	Objek wisata pantai yaitu Pantai Marina, Pantai Laguna, Pantai Pasir Putih, Pantai Bagus, Pantai Guci Batu Kapal, Pantai Kresna, Pantai Merak Belantung, Pantai Sapenan, Pantai Tanjung Beo, Pantai Way Urang, Tanjung Selaki, Pantai Tarahan, Pantai Mandiri, Pantai Belebuk, Teluk Mengkudu, Pantai Pancur Permai, Pantai Canti, Pantai Kahai, Pantai Kunjir, Pantai Wartawan, Pantai Way Muli, Pantai Suak, Teluk Nipah, dan Pulau Sebesi dan Sebuku. Objek wisata alam tirta yaitu Air Terjun Kembar, Air Terjun Curuk Layang, Air Tejun Way Kalam, Air Panas Ciperes, Sumber Air Panas Way Belerang, Way Panas Bumi Natar, Air Terjun Way Peros, dan Air Terjun Sarmun. Wisata gunung diantaranya Gunung Rajabasa, Gunung Batu, dan Gunung Anak Krakatau.
Kabupaten Pesawaran	Pantai Mutun dan Pulau Tangkil, Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal, Pantai Klara, Pantai Klaura, Pulau Tembikil, Pulau Kelagian, Pulau Pahawang, Pulau Tanjung Putus, dan *Marines Eco Park.*
Kabupaten Tanggamus	Objek wisata bahari terdiri dari Pantai Mulang Sayang, Pantai Bahari, Pantai Mutiara, Pantai Batu Malang, Pantai Batu Kebo, Pantai Cukuh Pandan, Pantai Harapan, Pantai *Saw Mill*, Pantai Harapan, Pantai Digul, Pantai Karang Teritos, Pantai Terbaya, Pantai Teba, Pantai Pihabung, Pantai Kerta, Pantai Pasir Putih, Pantai Teluk Yengokh, Pantai Cumuk, Pantai Badak Indah, Pantai Karang Indah, Pantai Karang Bolong, Pantai Harapan Jaya, Pantai Batu Naga, Pantai Selancar, Pantai Pegadungan, Pantai Karang Mulya, Pantai Batu Suluh, dan Pantai Karang Bebay. Objek wisata alam terdiri dari K. Tampang Belimbing, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lembah Sanggi, Bukit Batu Keramat, Gua Walet Putih, Karang Bebay, Pulau Kelapa, Pulau Tabuan, Pulau Kiluan, dan Eko Wisata Cikal Negri. Objek wisata alam tirta diantaranya Air Terjun Jeram Semaka, Air Terjun Curup Way Kerap, Air Terjun Curup Karang Agung, Air Terjun Way Nyapuk, Air Terjun Way Tapisan, Air Terjun Talang Ogan, Air Terjun Curup, Air Terjun Cihandak, Air Terjun Tirta Rima, Air Terjun Curup, Air Terjun Kelahang, Air Terjun Way Lalaan, dan Way Bekhak. Objek wisata buatan diantaranya Waduk Batu Tegi, Bendungan Pajajaran, dan Bendungan Way Payung.
Kabupaten Lampung Barat	Situs Megalitik Kebon Tebu Sumber Jaya, Kawasan Batu Brak, Kawasan Perkebunan Kopi Hanakau, Desa Tradisional KenaliDanau Ranau, Gunung Seminung, Gunung Pesagi, Desa Wisata Hujung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Danau Ranau, Wisata Gunung Pesagi, dan Wisata Alam Kubu Perahu.
Kabupaten Pesisir Barat	Rhino Camp Sukaraja Atas, Way Pemerihan (Pos Patroli Gajah), Way Heni, Penangkaran Penyu Muara Tembulih, Surfing Spots (Way Jambu,

Kabupaten/Kota	Pariwisata
	Karang Nyimbor, Mandiri, Pantai Labuhan Jukung, Way Redak, Pugung Tampak), Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Redak, Kawasan Wisata Alam dan Sejarah Way Manula, Pekon Pahmungan, dan Pulau Pisang.
Kabupaten Lampung Timur	Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Pusat Konservasi Gajah, Desa Tradisional Wana, Taman Purbakala Pugung Raharjo, Sentra Penjualan Bibit Buah-Buahan & Balai Benih Induk Hortikultura Pekalongan, Pantai Karang Mas, Pantai Mutiara, Pantai Baru, Pantai Cemara, Pantai Keruju dan Pesanggrahan Way Curup.
Kota Metro	Objek wisata Kota Metro yaitu Taman Merdeka, Lapangan Sember, Perpustakaan Daerah, Masjid Taqwa, Stadion Tejosari, dan Taman Palem Indah.
Kabupaten Lampung Tengah	Objek wisata alam yaitu Air Terjun Curup Tujuh, Danau Tirta Gangga, Air Terjun Bilik, Danau Telogo Rejo, dan Danau Bekri. Objek wisata religius yaitu Gua Maria. Objek wisata agro yaitu Perkebunan dan Pengalengan Nanas, Perkebunan Buah-buahan dan Pembibitan, serta Taman Pusat Tanaman Obat/Herbal.
Kabupaten Pringsewu	Beberapa Objek wisata yang ada di Kabupaten Prengsewu di antaranya tempat wisata ziarah berupa Makam KH Ghalib dan wisata religi umat Katolik Goa Maria La Verna, bangunan bersejarah peninggalan Belanda berupa Talang, kawasan Bukit Bintang, Telaga Gupit, Pure Giri Sutra Mandala, Kampung Air Balong Kuring, Bukit Sarinongko, Bukit Silitonga, Bukit Pangonan, Kolam Renang Grojogan Sewu, Kolam Renang Tirto Asri, Cekdam Way Ngison, dan Air Karawang.
Kabupaten Lampung Utara	Objek wisata yang ada dikabupaten ini merupakan objek wisata alam dan objek wisata agro, serta objek wisata budaya yaitu Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Tebabeng, Bendungan Tirta Sinta, Curup Klawas, Curup Selampung, Danau Buatan Way Abung, Danau Way Tulung Mas, Air Terjun (Curup) Fajar, Air Terjun (Curup) Gadung, Air Terjun (Curup) Merai, Air Terjun (Curup) Sukemi, Paya Udang, Paya Burung, Arung Sungai Way Rarem, Perkebunan Lada, Perkebunan Tebu, Perkebunan Salak.
Kabupaten Tulang Bawang	Kota Tua Menggala, Rest Area & Water Boom, Desa Cakat Nyenyek, dan Rumah Terapung.
Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kampung Tradisional, Makam Pahlawan, Bawang Lambu, *Water Boom*, Pemancingan dan Lesehan
Kabupaten Way Kanan	Danau Randing, Air Terjun Curup Kembar Bukit Duduk, Sialang Badas, Wisata Bendungan Irigasi Way Umpu, Putri Malu, Air Terjun Bukit Duduk, Air Terjun Curup Putri Kembar, Panorama Indah Bukit Duduk, Potensi Wisata Sungai Way Umpu, Curup Binatan, Goa Macan, Curup Batu Api, Air Terjun Pinang Indah, Air Terjun Maria, Air Terjun Curup Susukan, Air Terjun Curup Ranggau, Air Terjun Curup Penyandingan, Air Terjun Way Kawat, Bendungan Way Mencar

Kabupaten/Kota	Pariwisata
Kabupaten Mesuji	Bendungan Simpang Pematang, Puncak Wiralaga, Wisata Bahari Wiralaga, Bendungan Embung Blibis, Bendungan Benil, Bendungan Tanjung Sari, Bendungan Tri Karya Mulya, Bendungan Embung Buko Poso, Bendungan Embungan Bumi Harapan, dan Bendungan Embung Hadi Mulyo.

Sumber: BPS Provinsi Lampung. 2024

Berdasarkan potensi-potensi yang ada, terdapat beberapa wilayah pengembangan pariwisata Provinsi Lampung berdasarkan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), Kawasan Strategik Pariwisata Daerah (KSPD), dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD).

No.	DPD	KSPD	KPPD
1	DPD I Teluk Lampung, Selat Sunda dan Sekitarnya	1. KSPD Gunung Anak Krakatau-Sebesi & Gunung Rajabasa dan sekitarnya 2. KSPD kota BandarLampung 3. KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung Pesawaran dan 4. KSPD Kiluan dan Kelumbayan	1. KPPD di Kabupaten Lampung Selatan 2. KPPD di Kota Bandar Lampung 3. KPPD di Kabupaten Pesawaran
2.	DPD II Pesisir, Pabtai Barat, TNBBS dan Sekitarnya	1. KSPD pesisir pantai barat Lampung di Barat 2. KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 3. KSPD Danau Ranau dan sekitar di Kab.Lampung Barat	1. KPPD Suoh dan sekitar di kabupaten Lampung Barat 2. KPPD pesisir pantai Kota Agung sekitarnya di Kab. Tanggamus
3.	DPD III Way Kambas dan Sekitarnya	1. KSPD Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya	1. KPPD di Kota Metro 2. KPPD di Kabupaten Lampung Timur 3. KPPD di Kabupaten Lampung Tengah 4. KPPD di Kabupaten Way Kanan 5. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang 6. KPPD di Kabupaten Mesuji 7. KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat 8. KPPD di Kabupaten Lampung Utara

Sumber : RIPPAR Provinsi Lampung 2010 – 2025

2.1.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Gambar 2. 33 Kondisi jalan Mantap di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

Kondisi	TA.2020		TA.2021		TA.2022		TA.2023	
	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi
Baik	513.250	1.091.243	431.580	882.798	402.540	832.659	261.390	979.767
Sedang	723.630	196.398	784.440	393.697	826.770	468.629	958.180	354.123
Rusak	22.650	239.435	56.930	164.725	52.440	126.510	71.530	75.180
Kritis	37.080	166.197	23.560	252.053	14.760	265.475	7.310	286.409
Jumlah (km)	**1.296.610**	**1.693.273**	**1.296.510**	**1.693.273**	**1.296.510**	**1.693.273**	**1.298.410**	**1.695.479**
Mantap	92,07%	76,05%	93,79%	75,39%	94,82%	76,85%	93,93%	78,67%
Tdk Mantap	7,93%	23,96%	6,21%	24,61%	5,18%	23,15%	6,07%	21,33%

Sumber : data PIK-Bappeda, 2024

Data menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 kondisi Mantap berada pada kisaran 76.05% hingga 78,67%. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas, pada tahun 2024 kondisi tersebut akan terus ditingkatkan. Selanjutnya, jaringan jalan provinsi juga didukung dengan adanya jaringan jalan nasional yang relatif lebih mapan, dengan tingkat kemantapan jalan yang tinggi. Di tahun 2023, kondisi jaringan Jalan Nasional tercatat 93,93% dalam kondisi mantap.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar yang bertujuan untuk mendukung kelancaran, distribusi barang, maupun jaringan transportasi manusia serta fungsi sosial lainnya. Gambaran infrastruktur jalan yang merupakan penunjang transportasi darat di Provinsi Lampung sebagaimana grafik di bawah ini :

Gambar 2. 34 Komposisi jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024

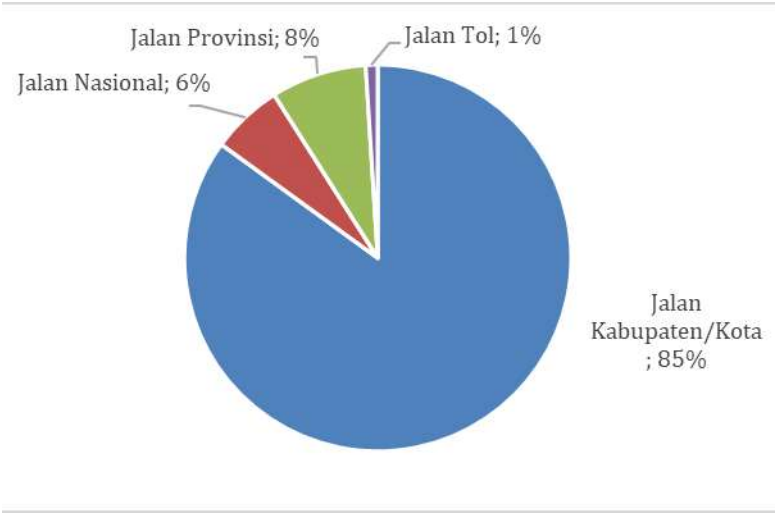

Sumber : data PIK-Bappeda, 2024 (**)

Gambar 2. 35 Panjang Infrastruktur Jalan di Provinsi Lampung Tahun 2024

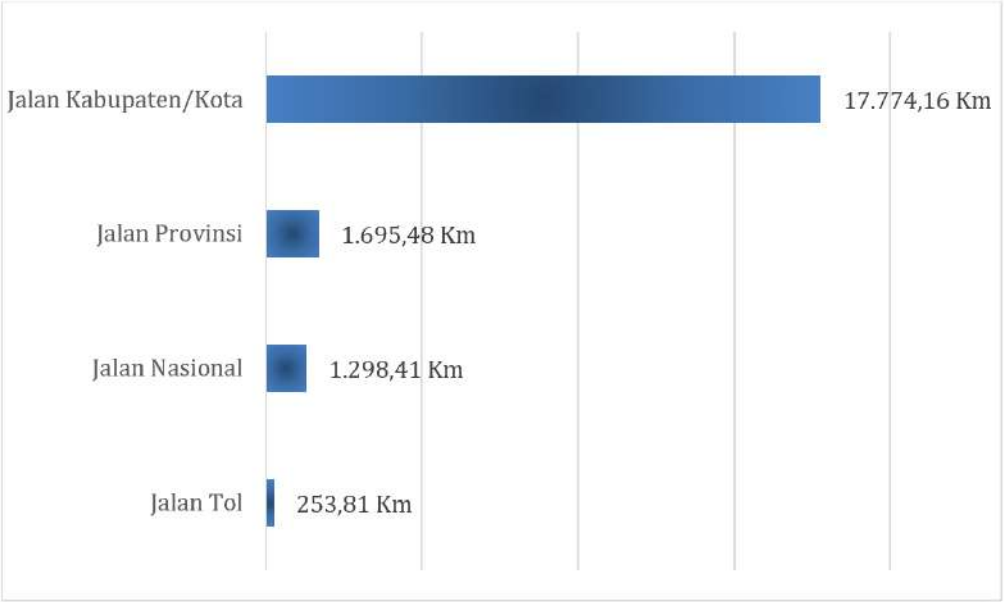

Sumber: (Nasional) 430/KPTS/M/2022 (Provinsi) G/434/V.03/HK/2023 (Kab/Kota) Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekertariat Jenderal Kemen PUPR Tahun 2019 (Tol) Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2023, panjang jalan nasional di Provinsi Lampung tercatat 93,93 persen dalam kondisi mantap. Sementara, panjang jalan yang merupakan kewenangan provinsi dengan kondisi 78,67 persen dalam kondisi mantap.

Gambar 2. 36 Kondisi Jalan Mantap Provinsi dan Jalan Mantap Nasional Tahun 2021-2024 (PIK)

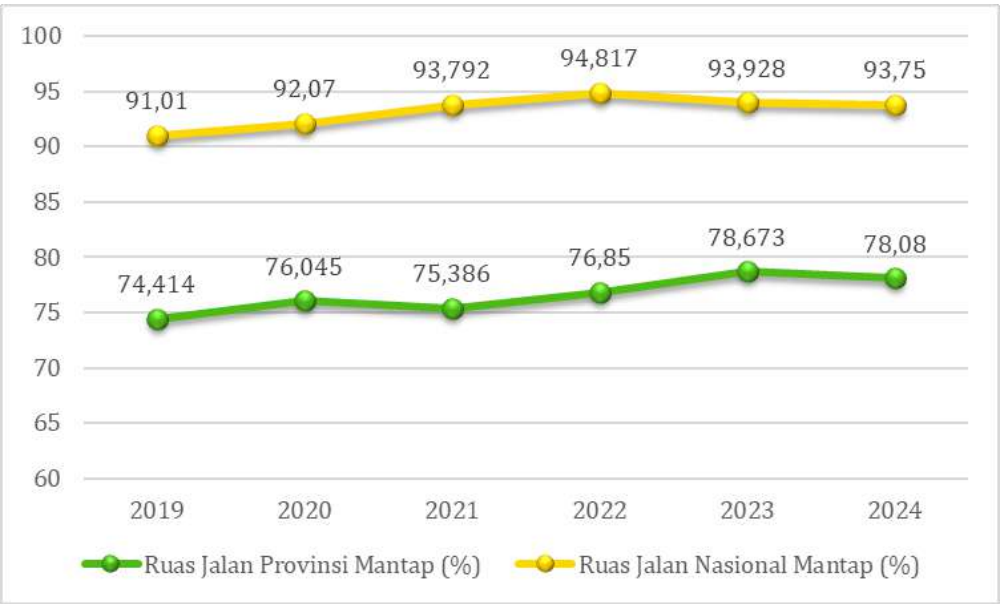

Sumber : Data PIK-Bappeda, 2024

Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, pengelolaan daerah irigasi dibagi menjadi 3 yaitu menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Provinsi Lampung memiliki luas daerah irigasi total seluas 388.631 Ha yang terbagi menjadi 60,1% daerah irigasi kewenangan pemerintah, 6,1% daerah irigasi kewenangan provinsi, dan 33,8% daerah kewenangan irigasi kabupaten.

Tabel 2. 25 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Di Provinsi Lampung

No.	Kewenangan	Irigasi Air permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa		Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
		D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha
1.	Pemerintah	14	185.333	-	-	-	-	4	48.372	-	-	18	233.705
2.	Pemerintah Provinsi	19	21.045	-	-	-	-	1	2.578	-	-	20	23.623
3.	Pemerintah Kabupaten/	1.084	126.823	112	2.857	-	-	3	1.623	-	-	1.199	131.303

No.	Kewenangan	Irigasi Air permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa		Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
		D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha	D.I.	Ha
	Kota												
	JUMLAH	34.084	333.201	112	2.857	-	-	8	52.573	-	-	39.199	388.631

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2. 26 Persentase Status Kewenangan Daerah Irigasi di Provinsi Lampung

NO.	KEWENANGAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Pemerintah Pusat	233.705	60,1%
2	Pemerintah Provinsi Lampung	23.623	6,1%
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	131.303	33,8%
	JUMLAH	388.631	100%

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015

Peta pengairan daerah irigasi, rawa, dan lintas kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 37 Peta Pengairan Daerah Irigasi, Rawa (1000-3000 ha) dan Lintas Kabupaten Provinsi Lampung

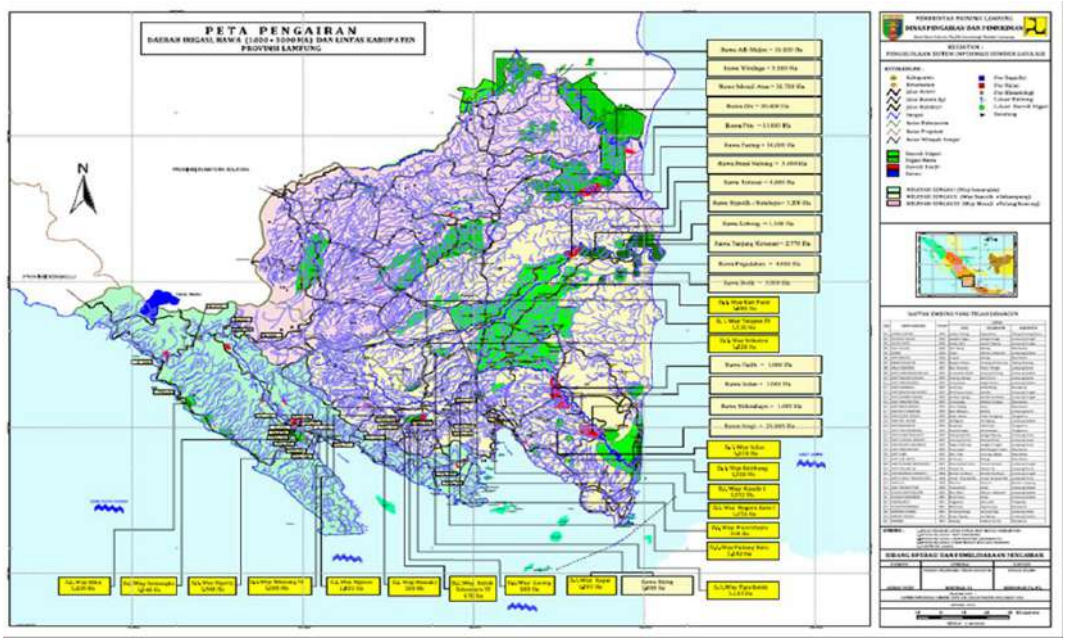

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, 2024

- **BENDUNGAN**

Provinsi Lampung memiliki Infrastruktur sumber daya air yang memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, irigasi, pengendalian banjir. Berikut beberapa bendungan/waduk yang ada di Provinsi Lampung:

1. Bendungan Way Rarem

Terletak di Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kab. Lampung Utara. Waduk Way Rarem merupakan waduk bagi Bendungan Way Rarem yang mulai dibangun tahun 1980 dan selesai pada tahun 1984. Bendungan ini adalah bendungan batu berinti tanah setinggi 24,0 m.

Waduknya berfungsi sebagai waduk irigasi. Luas daerah layanannya pada mulanya adalah 22.972 ha sawah yang terbentang di Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kota Kotabumi. Waduk Way Rarem menggenangi daerah seluas 106,1 ha dan menampung air dari *catchment area* seluas 385,0 km^2. Volume tampungan efektif waduk adalah sekitar 56,9 juta m^3 dengan kedalaman waduk kira-kira 32 m. Konservasi Air, Bendungan Way Rarem di prioritaskan untuk mengairi daerah irigasi Way Rarem seluas 22.000 ha, di daerah Kecamatan Abung Timur, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Kotabumi. Bendungan Way Rarem mempunyai manfaat sebagai :

- Pengendali Banjir
- Pariwisata

Selain manfaat diatas bendungan ini digunakan untuk Keramba Jaringan Apung (KJA). Pertumbuhan KJA di Bendungan Way Rarem memang cukup signifikan tetapi mengakibatkan dampak negatif untuk Bendungan.

Gambar 2. 38 Foto Infrastruktur Bendungan di Provinsi Lampung

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, 2024

2. Bendungan Way Jepara

Merupakan sebuah bendungan yang terletak di Jalan Simpang Danau, Sumberjo, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Bendungan ini pada awalnya hanya seluas 5 (lima) hektar namun pada tahun 1972 diperluas menjadi 200 hektar. Pelaksanaan konstruksi bendungan Way Jepara dimulai pada tahun 1975 dan selesai pada tahun 1978. Bendungan Way Jepara memiliki kedalaman kurang lebih 26 m dengan diameter berkisar 1,9 km. Air Bendungan Way Jepara berasal dari tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jejawai, dan Way Jepara, yang berhulu di Register 38 Gunung Balak. Bendungan ini berfungsi untuk melayani keperluan irigasi dalam rangka mendukung produksi pangan di daerah Lampung. Waduk ini direncanakan mampu

melayani daerah irigasi seluas 6.651 Ha. Perubahan tata guna lahan mengakibatkan ketersediaan air di waduk Jepara menurun. Rusaknya kawasan Register 38 menjadi penyebab utama terus merosotnya debit air Danau Jepara. Daerah tangkapan air banyak yang diubah menjadi lahan perkebunan, seperti jagung dan kakao. Register 38 Gunung Balak dan Gunung Mas yang menjadi daerah aliran sungai (DAS) Danau Jepara sudah rusak parah. Pada tahun 2008 waduk hanya mampu melayani daerah irigasi seluas 4.126 ha dengan cara menerapkan pola tanam bergilir. Seiring dengan merosotnya debit air, kini danau ini hanya mampu mengairi 1.800 hektar sawah.

3. Bendungan Batu Tegi

Merupakan salah satu bendungan terbesar se-Asia Tenggara dengan luas 3.560 hektar yang terletak di Pekon Batutegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bendungan yang dibangun sejak tahun 1994, diresmikan pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Bendungan Batutegi dibangun dengan memanfaatkan sumber air dari dua sungai yaitu Way Sekampung dan Seputih, yang berjarak kurang lebih sekitar 65 km dari sebelah hulu bendung Argoguruh atau kurang lebih sekitar 90 km dari sebelah Barat Daya Kota Bandar Lampung.

Bendungan Batu Tegi didesain memiliki kapasitas tampung air sebesar 690 juta m^3 yang saat ini dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi dari 43.585 ha menjadi 66.573 ha di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Kota Metro. Disamping itu, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 2 x 14 Megawatt, penyediaan air baku air bersih untuk Kota Bandar Lampung, Branti (Kec. Natar) dan Kota Metro sebesar 2.250 l/d, pengendalian banjir, perikanan dan wisata.

Bendungan Batu Tegi merupakan bendungan alternatif bagi pengembangan irigasi Way Sekampung dan memenuhi kebutuhan air irigasi ke Bendung Argoguruh. Elevasi muka air waduk Batutegi sejak mulai beroperasi pada tahun 2004 belum pernah mencapai posisi elevasi normal (+274 m), diduga sebagai akibat semakin menurunnya debit *inflow* waduk Batutegi pada satu sisi dan di sisi lain terjadi peningkatan debit *outflow* untuk memenuhi permintaan (demand) air irigasi oleh Bendung Argoguruh. Meningkatnya permintaan air di Bendung Argoguruh akibat menurunnya debit Sungai Sekampung yang berasal dari daerah tangkapan hujan Bendung Argoguruh.

4. Bendungan Way Sekampung

Berlokasi di kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dengan tumpuan kanan Desa Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran dan tumpuan kiri Desa Banjarejo Kecamatan Banyumas. Bendungan Way Sekampung merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Lampung, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.03 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017. Proses konstruksi Bendungan Way Sekampung dimulai dari tahun 2016 dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021.

Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m^3 yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi seluas 72.707 hektar dengan rincian 55.373 hektar untuk daerah irigasi (DI) Sekampung, dan 17.334 hektar untuk (DI) Rumbia Extension, sehingga meningkatkan intensitas tanam menjadi 270%. Bendungan multifungsi ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2.482 l/det untuk kota Bandar Lampung, Branti dan Kota Metro, PDAM Way Sekampung Pringsewu 487 l/dt, Pembangkit listrik tenaga Mikrohidro (PLTM) dengan daya sebesar 5,4 MW (2 x 2,7 MW), menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu, serta dengan luas genangan 800 hektar yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan banjir karena terintegrasi dengan Bendungan Batutegi dan Bendungan Margatiga.

Dengan dibangunnya bendungan Way Sekampung, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan debit sungai Way Sekampung, meningkatkan fungsi waduk Batutegi serta adanya integrasi dengan bendung Argoguruh, Bendungan Marga Tiga dan Bendung Gerak Jabung dapat melayani kebutuhan air sampai ke hilir.

5. Bendungan Margatiga

Bendungan Margatiga membendung aliran Sungai Way Sekampung di daerah hilir untuk dimanfaatkan sebagai pengairan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Lampung seluas 16.588 ha, yaitu DI Jabung kiri seluas 5.638 ha dan potensi DI Jabung kanan seluas 10.950 ha. Bendungan Margatiga memiliki kapasitas tampung 42,31 juta m^3 dengan luas genangan 2.314 ha dan tinggi bendungan 22,5 m, juga dipersiapkan untuk memasok air baku sebesar 0,8 m^3/detik untuk Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan Bendungan Margatiga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air Sungai Way Sekampung khususnya di bagian hilir, memiliki potensi sebagai konservasi air, penggelontoran air yang mencegah air asin, dan destinasi pariwisata baru di Lampung Timur. Bendungan dengan konstruksi tipe urugan yang memiliki tinggi panjang puncak 321,76 meter, dan lebar puncak 7 meter ini juga diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 m^3/detik untuk sebagian wilayah di Bandar Lampung dan Lampung Timur.

6. Bendung Agroguruh

Bendung ini terletak di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang merupakan pembangunan bendungan hasil dari pelaksanaan kebijakan politik etis Belanda pada bidang irigasi. Bendungan ini dibangun pada 4 Agustus 1935 yang berupa bangunan bendung (*stuwdam*) yang membendung Sungai Way Sekampung. Bangunan utama bendung memiliki panjang 70 m dan tinggi 4 m, dan saluran air induk (primer) yang dibangun pada tahap awal sepanjang 9 km, dan saluran air sekunder sepanjang 75 km (Soerabaijasch_handelsblad, 1937a). Pada awal pembangunan, bendung air Argoguruh mencakup daerah resapan ± 2.150 km^2 dan laju alirannya diperkirakan 35 m^3/detik, sebagai bangunan bendung yang modern di masanya, bendung ini memiliki blower dengan lebar 6 m dan dapat dikunci dengan seluncuran roller besi, dilengkapi dengan peredam di bagian atas dengan ketinggian angkat 7 m (De_Indische_courant, 1937; Soerabaijasch_handelsblad, 1937b). Fungsinya untuk menaikkan permukaan

air sehingga air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah di Kolonisasi Sukadana, Lampung, yang sekarang mengaliri ladang dan persawahan untuk Kota Metro dan Kabupaten di sekitarnya.

7. EMBUNG

Provinsi Lampung memiliki beberapa embung/danau yang tersebar pada 11 kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan memiliki jumlah embung terbanyak di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 37 embung seluas 3.687.225 m^3 dan paling sedikit terdapat pada Kabupaten Pesawaran sebanyak 2 (dua) embung dengan luas 223.38 m^3. Untuk lebih lengkapnya mengenai persebaran embung/waduk dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Gambar 2. 39 Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Jumlah Embung/Waduk	Luas (m^3)
1	Lampung Utara	4	659.14
2	Lampung Tengah	12	2.160.064
3	Lampung Timur	3	291.2
4	Lampung Selatan	15	1.928.605,5
5	Pringsewu	11	458.924
6	Tanggamus	3	125.014,25
7	Way Kanan	37	3.687.225
8	Mesuji	7	1.354.794
9	Pesawaran	2	223.38
10	Tulang Bawang	5	678.139
11	Tulang Bawang Barat	18	2.521.837
Total		**127**	**14.088.322,75**

Sumber : BBWS Mesuji Sekampung 2024

Gambar 2. 40 Peta Sebaran Lokasi Waduk/Embung di Provinsi Lampung

Sumber : BBWS Mesuji Sekampung 2024

Sanitasi (Air Bersih, Hunian Layak & Kawasan Kumuh). Catatan statistik (sumber: BPS- Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2022) bidang Perumahan, memberi gambaran capaian sebagai berikut:

1) Di tahun 2021 sebanyak 91,92% rumah tangga telah memiliki fasilitas MCK secara mandiri; 5,48% menggunakan fasilitas MCK Umum; 0,02% tidak menggunakan MCK; dan masih terdapat 2,57% rumah tangga belum memiliki fasilitas MCK.
2) Hingga Tahun 2021, sebanyak 88,14% rumah tangga menggunakan Gas LPG untuk memasak; 11,11% dengan Kayu Bakar; 0,38% dengan listrik; 0,08% dengan minyak tanah; dan 0,28% sisanya dengan alat/media lainnya.
3) Disisi kepemilikan rumah, data tahun 2021 menjelaskan bahwa sebanyak 89,40% rumah berstatus milik sendiri; 3,92% mendiami rumah dengan status kontrak/sewa; sisanya 6,68% dengan status kepemilikan lainnya.
4) Di tahun 2021 sebanyak 83,89% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Kondisi tersebut membaik bila dibanding tahun 2017 yang tercatat 52,78%.

5) Catatan tahun 2021 juga menunjukkan bahwa sebanyak 80,20% rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Kondisi tersebut meningkat signifikan bila dibanding tahun 2017 yang sebesar 35,16%.
6) Data Kementerian PUPR *(sumber: Laporan Profil Perumahan di Indonesia, Kemen.PUPR-2021),* data sebaran rumah tangga menurut status kepemilikan rumah tangga di Provinsi Lampung tahun 2019-2021, menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 masih terdapat 227.138 rumah tangga belum memiliki rumah (status "*backlog*").

Tabel 2. 27 Status kepemilikan Rumah tangga di Provinsi Lampung

Th. 2022		**Th. 2023**		**Th. 2024**	
Belum memiliki rumah	Memiliki rumah	Belum memiliki rumah	Memiliki rumah	Belum memiliki rumah	Memiliki rumah
8.19%	91.81%	7.6%	92.4%	6.95%	93.05%

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Selanjutnya, data BPS-Statistik Perumahan dan Permukiman Tahun 2019, memberi gambaran bahwa :

- Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, sebanyak 45,06% memiliki sertifikat SHM a.n. ART; 19,29% memiliki sertifikat SHM bukan a.n. ART; 1,34% memiliki bersertifikat Non-SHM; dan 26,49% dalam bentuk Surat Bukti Lainnya; serta masih terdapat sekitar 7,28% belum memiliki bukti kepemilikan.
- Dalam rangka memperbaiki kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bertempat tinggal di Rumah yang Tidak Layak Huni (RTLH), Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menangani Rehabilitasi RTLH sejumlah 20.573 Unit dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dengan tingkat persentase capaian penanganan RTLH sebesar 97,01%.
- Peningkatan juga terjadi pada pemenuhan Aakses Air Minum Layak di Provinsi Lampung, bahwa hingga tahun 2022, capaian Akses Air Minum Layak sebesar 85,74%

- Hingga tahun 2022 sebesar 84,52% penduduk Provinsi Lampung telah memiliki akses terhadap Sanitasi Layak sebesar 84,52%
- Diawal tahun 2020, capaian Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung sebesar 66,20%, dan di tahun 2022 capaian Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung meningkat sebesar 72,59%, merupakan pencapaian yang sangat baik.

Air Bersih/Air Minum Layak. Di tahun 2022, persentase penduduk Provinsi Lampung yang memiliki akses Air Minum Layak mengalami peningkatan menjadi 71,67% dari 84,55% di Tahun 2015.

Tabel 2. 28 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%
2018	8.405.478	6.024.373	71,67
2019	8.850.763	6.300.230	74.05
2020	8.984,880	7.065.496	79,24
2021	9.096,520	7.077.721	79,47
2022	9.190,082	7.893.260	84,55

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Provinsi Lampung, 2023

Sanitasi Layak. Untuk persentase penduduk yang memiliki akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2018 hanya 71,67% penduduk Provinsi Lampung memiliki Akses Sanitasi Layak menjadi 82,86% di Tahun 2022.

Tabel 2. 29 Persentase Capaian Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung	Capaian Akses Sanitasi	Persentase (%)
2018	8.405.478	6.024.373	71,67
2019	8.850.763	6.300.230	74,05

2020	8.984,880	6.307.313	74,84
2021	9.096,520	6.308.813	74,85
2022	9.190,082	7.722.257	82,86

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung,2023

2.1.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil proyeksi rumah dengan pembagian kategori luasan rumah, terdiri dari luasan Kavling Rumah Mewah seluas 600 m^2, luasan Kavling Rumah Sedang seluas 400 m^2, luasan Kavling Rumah Sederhana seluas 200 m^2, dan luasan Kavling Rumah Sangat Sederhana seluas 70 m^2 . Dari hasil analisis dapat diketahui Proporsi kebutuhan rumah tahun 2045 adalah 198.984 Rumah Mewah (RM), 397974 Rumah Sedang (RSd), 795.944 Rumah Sederhana (RS), dan 596957 Rumah Sangat Sederhana (RSS). Jadi total rumah yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk di tahun 2045 yaitu 1.989.858 rumah. Untuk lebih jelasnya proyeksi pemenuhan kebutuhan rumah tahun 2025 hingga tahun 2045 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ;

Tabel 2. 30 Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	2023					2025					2030					2035					2040					2045				
		RSS	RS	BSH	RM	Total	RSS	RS	BSH	RM	Total	RSS	RS	BSH	RM	Total	RSS	RS	BSH	RM	Total	RSS	RS	BSH	RM	Total	RSS	RS	BSH	RM	Total
		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1		0,3	0,4	0,2	0,1	
1	Lampung Barat	18746	24994	12497	6249	62486	19158	25544	12772	6386	63860	20084	26779	13390	6695	66948	20882	27843	13922	6961	69608	21647	21647	14431	7216	64940	22248	29664	14832	7416	74160
2	Tanggamus	39752	53003	26502	13251	132508	40681	54242	27121	13560	135604	42829	57106	28553	14276	142764	44732	59642	29821	14911	149106	46106	46106	30737	15369	138318	47387	63183	31591	15796	157956
3	Lampung Selatan	66300	88400	44200	22100	221000	68003	90671	45336	22668	226678	71972	95963	47982	23991	239908	75574	100765	50382	25191	251912	77258	77258	51506	25753	231775	79405	105873	52936	26468	264682
4	Lampung Timur	68555	91406	45703	22852	228516	69882	93176	46588	23294	232940	72907	97210	48605	24302	243024	75527	100702	50351	25176	251756	78875	78875	52583	26292	236625	81066	108088	54044	27022	270220
5	Lampung Tengah	90500	120666	60333	30167	301666	92486	123314	61657	30829	308286	96938	129250	64625	32313	323126	100658	134210	67105	33553	335526	104515	104515	69676	34838	313544	107418	143224	71612	35806	358060
6	Lampung Utara	39211	52308	26154	13077	130770	39946	53261	26630	13315	133152	41563	55417	27708	13854	138542	42965	57287	28644	14322	143218	45039	45039	30026	15013	135117	46290	61720	30860	15430	154301
7	Way Kanan	29467	39289	19644	9822	98222	30199	40265	20132	10066	100662	31906	42541	21270	10635	106352	33469	44625	22312	11156	111562	34289	34289	22859	11430	102866	35241	46988	23494	11747	117470
8	Tulang Bawang	26710	35614	17807	8903	89034	27324	36432	18216	9108	91080	28736	38315	19158	9579	95788	29997	39996	19998	9999	99990	30942	30942	20628	10314	92826	31802	42402	21201	10601	106006
9	Pesawaran	29657	39542	19771	9886	98856	30376	40501	20250	10125	101252	32102	42803	21402	10701	107008	33739	44986	22493	11246	112464	34547	34547	23031	11516	103642	35507	47343	23671	11836	118356
10	Pringsewu	25175	33567	16784	8392	83918	25784	34379	17190	8595	85948	27236	36314	18157	9079	90786	28558	38078	19039	9519	95194	29293	29293	19529	9764	87880	30107	40143	20071	10036	100357
11	Mesuji	14276	19035	9518	4759	47588	14713	19617	9808	4904	49042	15729	20972	10486	5243	52430	16640	22187	11094	5547	55468	16764	16764	11176	5588	50293	17230	22973	11487	5743	57434
12	Tulang Bawang Barat	17729	23638	11819	5910	59096	18107	24143	12072	6036	60358	18936	25248	12624	6312	63120	19640	26187	13094	6547	65468	20434	20434	13623	6811	61302	21002	28002	14001	7001	70006
13	Pesisir Barat	10185	13580	6790	3395	33950	10492	13989	6994	3497	34972	11242	14989	7494	3747	37472	11978	15970	7985	3993	39926	12012	12012	8008	4004	36035	12345	16460	8230	4115	41151
14	Bandar Lampung	72124	96166	48083	24041	240414	73573	98097	49048	24524	245242	76688	102251	51126	25563	255628	79093	105457	52728	26364	263642	82868	82868	55245	27623	248604	85170	113560	56780	28390	283900
15	Metro	10412	13910	6955	3477	34774	10651	14202	7101	3550	35504	11159	14878	7439	3720	37196	11585	15447	7724	3862	38618	12028	12028	8018	4009	36083	12362	16482	8241	4121	41206
	Provinsi Lampung	558839	745119	372560	186280	1862798	571375	761833	380916	190458	1904582	600028	800038	400019	200009	2000094	625037	833383	416692	208346	2083458	646649	646649	431099	215550	1939946	664613	886150	443075	221538	2215376

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJPD, Data Diolah 2024

Tabel 2. 31 Luasan Lahan Permukiman 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	KONDISI SAAT INI 2022		KEBUTUHAN 2025		KEBUTUHAN 2030		KEBUTUHAN 2040		20245	
		Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)	Rumah	Lahan (ha)
1	Lampung Barat	60550	1459,255	61995,92	1494,102	63441,85	1528,948	64887,77	1563,795	66333,69	1598,642
2	Tanggamus	129162	3112,804	132246,4	3187,137	135330,7	3261,471	138415,1	3335,804	141499,5	3410,137
3	Lampung Selatan	214346	5165,739	219464,5	5289,096	224583,1	5412,452	229701,6	5535,809	234820,2	5659,166
4	Lampung Timur	223624	5389,338	228964,1	5518,035	234304,2	5646,731	239644,3	5775,428	244984,4	5904,124
5	Lampung Tengah	295480	7121,068	302536	7291,118	309592	7461,168	316648	7631,217	323704	7801,267
6	Lampung Utara	126824	3056,458	129852,5	3129,446	132881,1	3202,434	135909,6	3275,421	138938,1	3348,409
7	Way Kanan	95374	2298,513	97651,51	2353,401	99929,03	2408,29	102206,5	2463,178	104484,1	2518,066
8	Tulang Bawang	86126	2075,637	88182,67	2125,202	90239,35	2174,768	92296,02	2224,334	94352,69	2273,9
9	Pesawaran	96342	2321,842	98642,63	2377,287	100943,3	2432,733	103243,9	2488,178	105544,5	2543,623
10	Pringsewu	81364	1960,872	83306,96	2007,698	85249,92	2054,523	87192,87	2101,348	89135,83	2148,174
11	Mesuji	45954	1107,491	47051,37	1133,938	48148,75	1160,385	49246,12	1186,831	50343,49	1213,278
12	Tulang Bawang Barat	57542	1386,762	58916,09	1419,878	60290,19	1452,993	61664,28	1486,109	63038,37	1519,225
13	Pesisir Barat	32728	788,7448	33509,54	807,5799	34291,08	826,415	35072,62	845,2501	35854,15	864,0851
14	Bandar Lampung	236990	5711,459	242649,3	5847,848	248308,6	5984,236	253967,8	6120,625	259627,1	6257,013
15	Metro	33956	818,3396	34766,86	837,8814	35577,73	857,4232	36388,59	876,965	37199,45	896,5068
Provinsi Lampung		1816362	43774,322	1859736,4	44819,6473	1903110,9	45864,97	1946485,07	46910	1989859,57	47955,6

Sumber : Data Diolah 2023

2.1.3.14 Perhubungan

Transportasi sangat diperlukan sebagai suatu bentuk bantuan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Hal ini dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri dibagi menjadi tiga jenis: darat, laut, dan udara.

1) Terminal

Provinsi Lampung memiliki beberapa terminal penumpang di beberapa kabupaten / kota dengan rincian sebagai berikut :

- **Terminal Type A** : 2 (dua) buah, yaitu Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Terminal Betan Subing Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VI Lampung-Bengkulu selaku perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
- **Terminal Type B** : 3 (tiga) buah, yaitu Terminal Mulyojati Kota Metro, Terminal Simpang Propau Kotabumi dan Terminal Bakauheni yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- **Terminal Type C** : 26 buah, yaitu Terminal Rajabasa, Kemiling, Panjang, Bakauheni, Kota Agung, Bunut Padang Cermin, Pasar Bawah Tanjung Karang, Sukaraja Telukbetung, Kalianda, Metro, Bandar Jaya, Gaya Baru, Sub Terminal Kota, Sub Pasar Sentral, Unit II, Way Tenong, Mataram Baru, Daya Murni, Pringsewu, Gedong Tataan, Gadingrejo, Krui, Menggala, Liwa, Mesuji, Panaragan yang masing-masing dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten setempat.

2) Kereta Api

Perkembangan realisasi angkutan penumpang dan barang dari stasiun Tanjung karang – stasiun Kertapati dan angkutan batu bara dari Tanjung Enim – Tarahan dan pengapalan ke Surabaya Tahun 2018 – 2021, diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan realisasi angkutan penumpang dan barang dari stasiun Tanjung karang – stasiun Kertapati dan angkutan batubara dari Tanjung Enim – Tarahan dan pengapalan ke Surabaya Tahun 2018 – 2021

NO.	URAIAN	TAHUN				KET.
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
I	ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG					
A	JUMLAH KA	8	8	8	8	
B	PENUMPANG					
1	Penumpang Naik					
	- KapasitasTersedia	1.184.790	1.184.790	536.388	678.800	
	- KapasitasTerpakai	1.086.416	1.183.721	420.567	284.202	
	- Load Factor (%)	92	100	78	42	
2	PenumpangTurun					
	- KapasitasTersedia	1.184.790	1.184.790	536.388	678.800	
	- KapasitasTerpakai	1.060.253	1.182.000	281.364	240.545	
	- Load Factor (%)	89	100	52	35	
II	ANGK. BATUBARA					
A	TG. ENIM-TARAHAN					
	a. Target	20.052.807	20.460.000	16.320.000	20.337.000	Tonase
	b. Realisasi	19.670.164	20.783.148	18.226.112	20.053.105	Tonase

Keterangan : Data Termutakhir, 2023

Infrastruktur Perhubungan Laut digunakan sebagai angkutan barang dan angkutan penumpang, terkhusus antar pulau dalam provinsi. Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan yang meliputi pelabuhan umum, baik yang dikelola secara komersial oleh PT. Pelindo II Persero maupun yang dikelola untuk kepentingan swasta atau BUMN. Pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Panjang yang bertaraf internasional, yang melayani trayek dalam negeri (*inter island*), meliputi : Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Surabaya dan Palembang. Sementara trayek dan diluar negeri (*ocean going*), meliputi : Timur Tengah, Singapura, Vietnam dan Malaysia. Pelabuhan Panjang akan dikembangkan untuk memenuhi persyaratan ISIMPANGS code dan menjadikan pelabuhan internasional dalam skala yang lebih besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 tahun 2002 tentang tatanan Kepelabuhanan Nasional Provinsi Lampung memiliki beberapa pelabuhan antara lain, Pelabuhan Panjang yang merupakan satu-satunya pelabuhan Internasional di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung juga mempunyai 5 (lima) pelabuhan regional antara lain, Pelabuhan Teluk Betung, Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Menggala dan Pelabuhan Kota Agung yang memiliki Peran dan fungsi sebagai Pelabuhan

Nasional. Kelima pelabuhan tersebut dikelola oleh Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) dimasing-masing Pelabuhan. Untuk pelabuhan Lokal Provinsi Lampung memiliki 6 (enam) pelabuhan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung antara lain, Pelabuhan Canti Kalianda, Pelabuhan Legundi, Pelabuhan Sebesi, Pelabuhan Way Seputih, Pelabuhan Kuala Penat dan Pelabuhan Way Penat. Selain dari beberapa Pelabuhan tersebut Provinsi Lampung juga memiliki Pelabuhan Penyeberangan yang merupakan urat nadi Perekonomian Nasional yaitu Pelabuhan Bakauheni yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry.

1) Pelabuhan Yang Diusahakan

Satu-satunya Pelabuhan Laut yang diusahakan di Provinsi Lampung adalah Pelabuhan Panjang yang dikelola oleh BUMN, yaitu PT (Pesero) PELINDO II Cabang Panjang. BUMN pengelola pelabuhan tersebut bertugas memberikan pelayanan jasa kepelabuhan antara lain:

- Menyediakan perairan dan kolam pelabuhan.
- Menyediakan pelayanan jasa pandu/tunda dan kepil dalam kegiatan sandar lepas kapal di dermaga.
- Menyediakan fasilitas pergudangan, tempat penumpukan barang dan alat bongkar muat.
- Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan *roll on/roll off* (ro-ro)
- Menyediakan fasilitas umum seperti listrik, air minum, telpon baik untuk kapal maupun untuk kepentingan umum di areal pelabuhan.
- Menyediakan alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran.
- Menyiapkan sarana transportasi darat.
- Menyiapkan keamanan dan ketertiban.

Tugas pemerintah di Pelabuhan ditangani oleh Instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran serta Bea Cukai, Imigrasi serta Karantina (orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan) dimana Adpel (Administrator Pelabuhan) Panjang bertindak selaku koordinator, dan pada saat ini berubah nama menjadi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Panjang merupakan Pelabuhan Alam yang cukup terlindungi dari gelombang laut, dan sesuai hirarkinya merupakan Pelabuhan Internasional karena terbuka untuk lalu-lintas barang perdagangan dengan luar negeri. Dewasa ini Pelabuhan Panjang hanya

digunakan untuk jasa angkutan barang (Kargo) karena tidak ada lagi kapal penumpang PT. PELNI yang singgah di pelabuhan ini.

Permasalahan yang masih dihadapi di Pelabuhan Panjang antara lain belum tersedianya sarana Bunker (Pengisian BBM) yang memadai untuk kapal-kapal besar sehingga bila kapal-kapal *first call* ke Panjang sekaligus untuk bunker terpaksa harus masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih dulu sehingga mengakibatkan penambahan *cost*.

3) Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan

Pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini **Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP)**. Secara administrasi pemerintahan, pelabuhan-pelabuhan tersebut dikelompokkan menjadi 5 unit pelaksana, yaitu :

1. **Unit Pelaksana Pelabuhan Kota Agung** di Kabupaten Tanggamus merupakan pelabuhan nasional yang membawahi 4 (empat) pelabuhan kecil lainnya. Kegiatannya melayani Kapal Tangker Pertamina dan Kapal-kapal Rakyat/lokal.
2. **Unit Pelaksana Pelabuhan Teluk Betung** di Kota Bandar Lampung yang membawahi 9 (sembilan) pelabuhan kecil lainnya, terutama melayani kapal-kapal rakyat.
3. **Unit Pelaksana Pelabuhan Labuhan Maringgai** di Kabupaten Lampung Timur yang membawahi 5 (lima) Pelabuhan kecil lainnya terutama melayani kapal-kapal rakyat/ Nelayan.
4. **Unit Pelaksana Pelabuhan Menggala** di Kabupaten Tulang Bawang, yang membawahi 2 (dua) Pelabuhan kecil lainnya untuk melayani kapal-kapal rakyat/Nelayan.
5. **Unit Pelaksana Pelabuhan Mesuji** di Kabupaten Mesuji untuk melayani kapal –kapal Rakyat/Nelayan.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2002 pelabuhan Kota Agung merupakan pelabuhan nasional sedangkan pelabuhan Teluk Betung, Labuhan Maringgai, Mesuji dan Menggala merupakan pelabuhan regional dan sesuai kewenangannya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni adalah lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan jaringan kereta api antar provinsi. Pelabuhan bakauheni masing dapat dikembangkan lebih lanjut karena saat ini fasilitas yang digunakan baru mencapai 25%. Operasi pelayanan angkutan penyeberangan Bakauheni – Merak berjalan 24 jam setiap hari dengan kemampuan rata – rata pelayaran kapal adalah 24 trip/hari. Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000 – 5.000 GPT dan mempunyai daya angkut penumpang 379 – 1900 orang dan kendaraan 45 – 200 unit.

Sarana penyeberangan di Provinsi Lampung selain terdapat pelabuhan penyeberangan, terdapat pula dermaga – dermaga sungai yang khusus melayani masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung mempunyai sungai – sungai yang bisa dipergunakan sebagai alternatif dari moda transportasi darat. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Lampung mempunyai potensi yang cukup bagus. Maka dari itu pembangunan fasilitas – fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana untuk moda angkutan sungai ini dapat membantu pergerakan atau mobilitas masyarakat yang berada di daerah aliran sungai.

Angkutan Penyeberangan (Pelabuhan Bakauheni). Penyeberangan dari Pulau Jawa (Merak) dilayani melalui Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan), yang letaknya ± 97 Km dari Kota Bandar Lampung. Pelabuhan ini mulai dioperasikan pada 26 Mei 1985. Fasilitas Prasarana dan Sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Penyeberangan yang tersedia berupa dermaga sebanyak 7 (tujuh) unit yang dilengkapi dengan *moveable bridge* (MB). Dermaga I, II dan III memiliki gangway, khusus dermaga I dan III juga dilengkapi dengan *side ramp door*. Selain itu terdapat 2 (dua) dermaga eksekutif, untuk spesifikasi dermaga – dermaga yang ada di pelabuhan bakauheni adalah sebagai berikut:

A. Dermaga I

Dermaga I di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dibangun pada tahun 1981 dan mulai dioperasikan tahun 1987. Mempunyai panjang dermaga 172,8M dan kedalaman kolam sandar 10–12M. Dermaga I di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe *Quay Wall*. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 32 Spesifikasi dari Dermaga I.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	172,8 M
2.	Kolam	L = 50 M
		d = 10-12 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L = 2 M
		P = 14 M
		Kapasitas = 1 T
5.	MoveableBridge	L = 11,6 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 50 T
6.	SideRamp	L = 2,8 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 20 T
7.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
8.	Luas Areal Parkir	11237 M^2

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

B. Dermaga II

Dermaga II di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di bangun pada tahun 1981 dan mulai dioperasikan tahun 1991. Mempunyai panjang dermaga 134,66 M dan kedalaman kolam sandar 8 – 10 M Dermaga II di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Quay Wall. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah spesifikasi dari Dermaga II.

Tabel 2. 33 Spesifikasi dari Dermaga II.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	134,66 M
2.	Kolam	L = 20 M
		d = 8-10 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L = 1,5 M
		P = 14 M

		Kapasitas = 1 T
5.	MoveableBridge	L = 9 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 50 T
6.	SideRamp	L = 3 M
		P = 17 M
		Kapasitas = 20 T
7.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
8.	LuarAreal Parkir	9.594 M^2

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

C. Dermaga III

Dermaga III ini di bangun pada tahun 2001 dan mulai dioperasikan tahun 2001. Mempunyai panjang dermaga 166,83 meter dan kedalaman kolam sandar 10 – 12 Meter.

Tabel 2. 34 Spesifikasi dari Dermaga III.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	166,83 M
2.	Kolam	L = 25 M
		d = 10-12 M
3.	Dolphin	12 buah
4.	GangWay	L = 1,8 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 1,5 T
5.	MoveableBridge	L = 10 M
		P = 16 M
		Kapasitas = 45 T
6.	SideRamp	L = 2,8 M
		P = 21 M
		Kapasitas = 2 T
7.	Kapasitas Dermaga	12000 GRT
8.	LuarAreal Parkir	13.965 M^2

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

D. Dermaga IV

Dermaga IV di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dibangun tahun 1998 dan mulai dioperasikan tahun 2001. Mempunyai panjang dermaga 57,69 M dan kedalaman kolam sandar 10 – 12 M Dermaga IV di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Dolphin. Dermaga ini adalah dermaga milik swasta yaitu milik KSO. PT. Infinity Indosakti. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah spesifikasi dari Dermaga IV.

Tabel 2. 35 Spesifikasi dari Dermaga IV.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	57,69 M
2.	Kolam	L = 20 M
		d = 10-12 M
3.	Dolphin	3 buah
4.	MoveableBridge	L = 7,9 M
		P = 17,82 M
		Kapasitas = 60 T
5.	Kapasitas Dermaga	6000 GRT
6.	Luar Areal Parkir	10.519 M^2
7.	Mooring Dolphin	2 buah

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

E. Dermaga V

Dermaga V di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di bangun pada tahun 2009 dan mulai dioperasikan tahun 2012. Mempunyai panjang dermaga 138 M dan kedalaman kolam sandar 10 Dermaga V di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni merupakan dermaga dengan tipe Dolphin dan Jetty.

Tabel 2. 36 Spesifikasi dari Dermaga V.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Panjang Dermaga	138 M
2.	Kolam	L = 20 M
		d = 10-12 M
3.	Dolphin	5 buah
4.	MoveableBridge	L = 7,8 M
		P = 17,8 M
		Kapasitas = 80 T
5.	Kapasitas Dermaga	12000 GRT
6.	Luar Areal Parkir	13.464 M^2
7.	Mooring Dolphin	4 buah

Sumber: Profil dan Kinerja Kantor OPP Merak, 2024

Untuk melayani permintaan jasa angkutan penyeberangan lintas Bakauheni – Merak PT ASDP Cabang Bakauheni menerapkan tiga pola pengoperasian yakni normal, padat dan sangat padat. Untuk pola normal PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni mengoperasikan 56 kapal dengan rata – rata kapasitas penumpang sebanyak 915 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 200 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 103 unit. Untuk waktu berlayar atau Sailing Time selama 120 menit, sedangkan waktu berlabuh dan bongkar muat adalah selama 60 menit, apabila sangat padat dipercepat menjadi 40 menit. Sedangkan untuk produksi trip per hari adalah 60 trip, trip rata – rata penumpang per hari adalah 3.526 orang dan trip kendaraan per hari adalah 5.199 unit.

Bandara Radin Inten II dan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas merupakan Bandara umum yang melayani Penerbangan komersial di Provinsi Lampung. Bandara Radin Inten II terletak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak lebih kurang 28 Km dari Kota Bandar Lampung, sedangkan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas terletak di wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan yang melayani penerbangan komersil dan penerbangan Khusus Militer. Selain Bandara Umum di Provinsi Lampung juga terdapat 8 (delapan) lokasi Bandara Khusus yang dikelola oleh pihak swasta yaitu :

1. Bandara Khusus PT. Gula Putih Mataram (Lampung Tengah)
2. Bandara Khusus PT. Indo Lampung Perkasa (Tulang Bawang)
3. Bandara Khusus PT. Nusantara Tropical Fruit (TulangBawang)
4. Bandara Khusus Tambling (Suoh, Lampung Barat)
6. Bandara Khusus Sungai Buaya (Mesuji)
7. Bandara khusus Sumber Indah Perkasa (Lampung Tengah)
8. Bandara Khusus Way Kambas (Lampung Timur)
9. Bandara Khusus Sungai Merah (Mesuji)

Saat ini Fasilitas landasan Bandara Radin Inten II telah mampu untuk didarati oleh pesawat Boeing 737 kapasitas terbatas dengan fasilitas keselamatan penerbangan yang memadai untuk bandara yang berfungsi sebagai bandar udara dengan klasifikasi kelas II dan tingkat pelayanan lalu lintas udara ADC. Untuk letak Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, posisi geografis Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai aksesibilitas transportasi terbatas, jangkauan dengan transportasi darat sering mendapat gangguan

akibat tanah longsor dan jalan rusak, menjadikan Pesisir Barat kurang menarik untuk membangun investasi strategis.

Maka salah satu upaya membuka keterisolasian, menggali potensi, meningkatkan iklim usaha sekaligus menarik minat para investor, sebagai sarana mitigasi bencana, mengingat Kabupaten Pesisir Barat rawan longsor dan gempa. Pada tahun 2013 Bandara Muhammad Taufiq Kiemas tersebut telah diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Lampung. Bandara Muhammad Taufiq Kiemas telah melayani penerbangan rute dari Tanjung Karang ke Krui selama tahun 2016 rata-rata 2 kali per minggu dan penerbangan rute Krui ke Bengkulu rata-rata 2 kali per minggu. Pada tahun 2017 subsidi operasional penerbangan tidak diperpanjang oleh Ditjen Perhubungan Udara hal ini menyebabkan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas tidak ada pelayanan penerbangan sipil reguler.

Adapun, jenis pesawat dan kapasitas kursi yang melayani penerbangan wilayah Lampung adalah sebagai berikut :

Garuda Ind. : B.737-800 (162 seat), ATR 72-600(70),dan CRJ-100 (96)
Sriwijaya Air : B. 737-300~400~500~800 NG = 120~189 seat
Lion Air : B. 737-800 NG (189), B. 737-900 ER (215)
Express Air : DORNIER 328 (32)
Wings Air : ATR 72-500 (70)
Batik Air : AIR BUS
Nam Air : B 737-500 (120)

2.1.3.15 Pertambangan

Provinsi Lampung memiliki keanekaragaman sumber daya yang diinvetarisir merupakan bahan-bahan tambang yang meliputi Galian Industri, Mineral Logam, Galian Kontruksi dan Bahan Galian Energi. Untuk jenis dari sumber daya itu sendiri antara lain Andesit, Basalt, Batu Andesit, Batu Gamping, Batu Kapur, Batuan, Batuan (Andesit), Batu Bara, Bijih Besi, Emas, Feldspar, Gamping, Gamping/Kapur, Mangan, Marmer, Marmer dan Kapur, Pasir, Pasir (Batuan), Pasir Kuarsa, Pasir Laut, Pasir Pasang, Silika, Sirtu, Trass, Zeolit, dan Pertambangan Lain.

Tabel 2. 37 Kondisi Pertambangan Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota

No	Komoditas	Luas (Ha)	No	Komoditas	Luas (Ha)
1	Bandar Lampung	108,58	11	Pesisir Barat	660,50
	Andesit	72,96		Andesit	141,04
	Batuan	35,63		Batu Andesit	143,88
2	Bandar Lampung/ Lampung Selatan	102,36		Batuan Andesit	186,85
	Andesit	102,36		Pertambangan Lain	183,33
3	Lampung Selatan	2.939,62		Sirtu	5,40
	Andesit	833,70	12	Pringsewu	1.878,01
	Basalt	29,71		Andesit	46,59
	Batu Andesit	221,88		Batu Andesit	5,07
	Batu Kapur	9,94		Batuan	6,17
	Batuan (Andesit)	4,93		Mangan	837,73
	Batuan Andesit	30,03		Pertambangan Lain	211,32
	Bijih Besi	508,06		Silika	771,13
	Pasir Laut	994,47	13	Tanggamus	3.088,14
	Pertambangan Lain	286,02		Andesit	419,65
	Zeolit	20,88		Batu Gamping	13,51
	Panas Bumi	2 Titik		Emas	1.221,97
4	Lampung Tengah	2.256,16		Gamping/Kapur	5,07
	Andesit	311,19		Pasir	7,41
	Batubara	942,55		Pasir (Batuan)	25,61
	Feldspar	92,32		Pasir Kuarsa	368,80
	Pasir Kuarsa	546,21		Pasir Pasang	576,16
	Pertambangan Lain	350,73		Pertambangan Lain	449,98
	Silica	13,17		Panas Bumi	2 TITIK
5	Lampung Timur	2.147,58	14	Tanggamus-Pringsewu	65,58
	Andesit	8,43		Andesit	65,58
	Pasir Laut	990,70	15	Tulang Bawang	7.819,13
	Pertambangan Lain	1.148,46		Batubara	4.967,78
6	Lampung Timur-Tulang Bawang	185,57		Pasir	355,65
	Pasir	185,57		Pasir Kuarsa	389,27
7	Lampung Utara	449,10		Pasir Laut	1.984,74
	Andesit	298,41		Pertambangan Lain	121,69
	Batu Andesit	135,55	16	Tulang Bawang-Lampung Timur	197,50
	Batuan Andesit	15,14		Pasir	197,50
8	Lampung Utara/Way Kanan	57,09	17	Pesawaran	2.917,59
	Andesit	57,09		Andesit	281,00
9	Way Kanan	3.990,78		Batu Gamping	180,19
	Andesit	128,40		Bijih Besi	59,65
	Emas	3.623,99		Emas	1.970,45
	Marmer	1,33		Gamping	50,19

No	Komoditas	Luas (Ha)	No	Komoditas	Luas (Ha)
	Pertambangan Lain	205,15		Marmer Dan Kapur	190,71
	Trass	31,91		Pasir	2,16
	Panas Bumi	2 Titik		Pertambangan Lain	183,24
10	Lampung Barat	5 Titik		Panas Bumi	2 TITIK
	Panas Bumi	5 Titik	18	Mesuji	8.233,03
				Batubara	4.772,89
				Pasir	133,74
				Pertambangan Lain	3.326,40

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung, 2021

Seluruh komoditas pertambangan tersebar dihampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan jumlah yang cukup banyak disetiap daerahnya kecuali hanya dua yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro yang tidak memiliki kawasan pertambangan, selain itu juga ada beberapa kawasan pertambangan yang berada di dalam dua wilayah administrasi seperti contoh Kawasan Pertambangan Andesit yang berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan Pertambangan Andesit yang berada di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan juga Tanggamus-Pringsewu, dan yang terakhir Kawasan Pertambangan Pasir yang berada pada Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Timur.

Potensi panas bumi di Provinsi Lampung cukup melimpah, terdapat 13 lokasi potensi panas bumi yang tersebar di kabupaten/kota. Lokasi potensi panas meliputi Panas Bumi Way Umpu, Panas Bumi Danau Ranau, Panas Bumi Purunan, Panas Bumi Sekincau Barat-Gunung Sekincau, Panas Bumi Sekincau Timur-Becingut, Panas Bumi Suoh Kalibata- Suoh Antatai, Panas Bumi Pajar Bulan, Panas Bumi Natar, Panas Bumi Ulubelu, Panas Bumi Lempasing, Panas Bumi Lempasing, Panas Bumi Wai Ratai, Panas Bumi Kalianda dan Panas Bumi Pematang Belirang.

Kabupaten Lampung Timur, disekitar Pulau Segama dan Pulau Batang terdapat eksploitasi minyak bumi yang dilakukan kontraktor asing, yaitu China National Oil Ofshore Company SES (CNOOC SES). Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan sebagai kabupaten Penghasil Minyak Bumi dengan SK Menteri ESDM Nomor 357.K/80/MEM/2001 tanggal 9 April 2001. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur bahwa realisasi lifting minyak bumi tahun 2011 sebesar 2.706,98 ribu barel dan tahun 201 sebanyak 2.724,22 ribu barel.

Selain itu juga terdapat penemuan ilmiah baru rencana pengembangan eksplorasi minyak dan gas yang berdampak pada berubahnya alokasi ruang dalam RZWP-3-K atau RZR. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT0291/SKKMI2000/2020/S0 Tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyesuaian Tata Ruang Laut PT. Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) di Wilayah Kerja Sutheast Sumatera Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung. Penetapan lokasi keseluruhan PT. OSES hasil penetapan Nomor B-55 MEN-KPII2021.

2.1.3.16 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa

Pembangunan ekonomi masyarakat desa di Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan signifikan, berbagai tantangan struktural dan sosial masih menghambat percepatan kesejahteraan masyarakat desa secara merata. Kemiskinan pedesaan masih menjadi isu krusial, di mana sekitar 12 persen warga desa di Lampung masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka adalah petani dengan pendapatan yang tidak stabil dan sangat bergantung pada hasil panen musiman. Ketergantungan terhadap sektor primer tanpa diversifikasi ekonomi membuat masyarakat desa sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan bencana alam.

Usaha ekonomi mikro di desa masih berada dalam kondisi lemah, baik dari sisi kapasitas usaha maupun akses terhadap pembiayaan. Lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi belum berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Minimnya inovasi usaha, rendahnya pendampingan manajerial, serta keterbatasan modal menjadi hambatan utama dalam membangun daya saing ekonomi mikro desa.

Dari aspek sumberdaya manusia, kesenjangan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja desa turut memperparah kondisi tersebut. Rata-rata lama sekolah masyarakat desa di Lampung hanya sekitar 7 hingga 8 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja yang tersedia, yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah—menciptakan fenomena pekerja miskin, yakni mereka yang bekerja namun tetap hidup dalam kemiskinan.

Pemanfaatan teknologi tepat guna masih minim di desa-desa Lampung, baik dalam bidang pertanian, pengolahan hasil panen, maupun kegiatan usaha lainnya. Rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan kurangnya pelatihan membuat adopsi teknologi sulit berkembang. Akibatnya, produktivitas dan efisiensi kerja masyarakat desa masih tertinggal jauh dibandingkan wilayah perkotaan.

2.1.4 Aspek Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Indeks Modal Manusia (IMM)/ Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan sumber daya manusia merujuk pada usaha-usaha peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, akhlak, dan karakter untuk meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan bangsa.

Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) merupakan indikator baru yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2018 digunakan untuk menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan bagi produktivitas individu dan negara, dengan mengukur modal manusia yang bisa diakumulasi seorang anak yang lahir pada hari ini, saat dia berusia 18 tahun nanti, serta melihat risiko kondisi kesehatan dan pendidikan yang terjadi di negara tempat dia hidup.

Indikator-indikator yang digunakan mencakup *survival* (kemampuan bertahan hidup masyarakat sampai umur lima tahun), pendidikan (diukur dari harapan pencapaian lama bersekolah) dan kualitas pendidikan (skor tes), serta kesehatan (diukur dari kelangsungan hidup usia 15-60 tahun dan persentase balita tidak tengkes/*stunting*).

Berdasarkan penjelasan dari Bank Dunia, Indeks Modal Manusia ditampilkan dalam rentang nilai antara 0 dan 1, apabila nilai suatu negara mendekati angka 1, maka produktivitas pekerja generasi selanjutnya dipastikan sangat tinggi, didukung oleh lingkungan hidup yang sehat dan pendidikan yang mumpuni.

Tahun 2018 Indeks Modal Manusia Indonesia menempati peringkat ke-87 dari total 157 negara dengan nilai 0,53. Tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 0,54 dengan peringkat ke-96 dari 173 negara, artinya, produktivitas dari setiap anak yang lahir hanya mencapai 54 persen dari kapasitas idealnya. Pada level Asia Tenggara, Indonesia mencapai urutan ke enam setelah

Singapura 0,88 poin, Vietnam 0,69 poin, Brunei Darussalam 0,63 poin, Malaysia 0,61 poin, dan Thailand 0,61 poin.

Gambar 2. 41 Indeks Modal Manusia Tahun 2021-2023

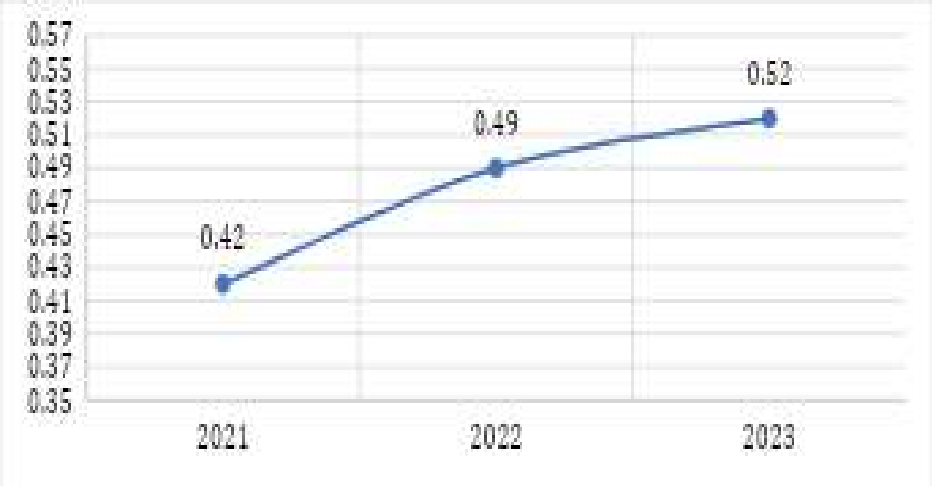

Sumber: Hasil Rakortek Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

Dari Data IMM Tahun 2021 (0,42) hingga Tahun 2023 (0,52) terlihat peningkatan capaian ditiap tahunnya, ini menandakan bahwa potensi produktivitas sumberdaya manusia di Provinsi Lampung semakin baik, karena semakin mendekati angka satu.

2.1.4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) menganalisis ketimpangan gender dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 IPG Provinsi Lampung sebesar 90,49 persen dan turun menjadi 90,37 persen di tahun 2021. Capaian ini lebih rendah dari IPG nasional tahun 2021 yang sebesar 91,27 persen.

Kualitas SDM juga terukur melalui perbandingan capaian IPM laki-laki dan perempuan yaitu melalui indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender). Peningkatan ini membawa IPG mendekati angka 100, yang artinya semakin baik karena ketimpangan IPM perempuan dan IPM laki-laki semakin hilang. Capaian IPG Provinsi Lampung pada periode tahun 2015-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 89,89 menjadi sebesar 90,58 ditahun 2022, akan tetapi capaian tersebut masih berada dibawah capaian nasional

sebesar 91,63. Tren pertumbuhan IPG di Provinsi Lampung pada periode ini dapat dilihat pada :

Grafik 2. 25 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2023

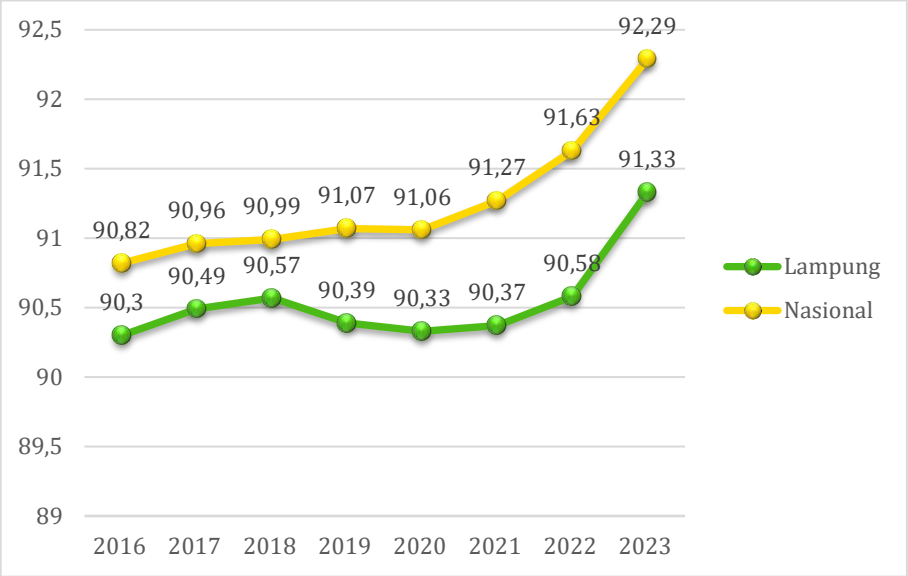

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

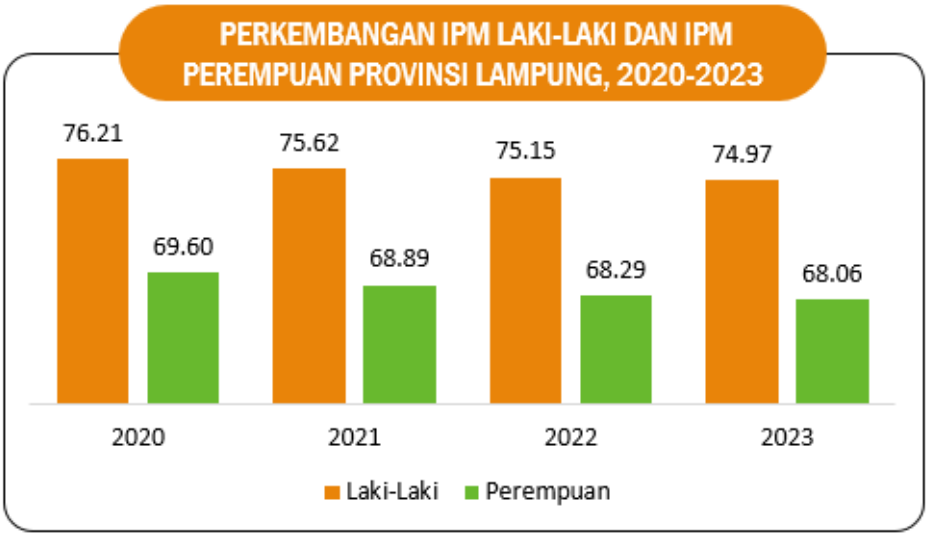

Grafik menunjukkan tren penurunan IPM laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung dari 2020 hingga 2023. IPM laki-laki turun dari 76,21 menjadi 74,97, sementara IPM perempuan menurun dari 69,60 menjadi 68,06. Penurunan IPM perempuan lebih besar dibanding laki-laki, yang mengindikasikan dampak pembangunan yang kurang merata. Selain itu, kesenjangan IPM antar gender meningkat dari 6,61 poin pada 2020 menjadi

6,91 poin pada 2023. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif untuk mendorong pembangunan manusia yang lebih setara dan inklusif bagi perempuan.

2.1.4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 55,71 persen, meningkat sebesar 2,52 persen dari tahun sebelum sebesar 53,19 persen. Jika melihat Angka capaian pembangunan kebudayaan secara Nasional sebesar 55,71 persen, maka capaian Provinsi Lampung saat ini lebih besar dari capaian nasional dan masuk dalam katagori SEDANG, namun seiring perkembangan pembangunan kebudayaan di provinsi-provinsi lain juga mengalami peningkatan sehingga Provinsi Lampung yang berada pada sepuluh besar IPK di tahun 2021, menurun menjadi peringkat 13 secara Nasional di tahun 2022.

Grafik 2. 26 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023

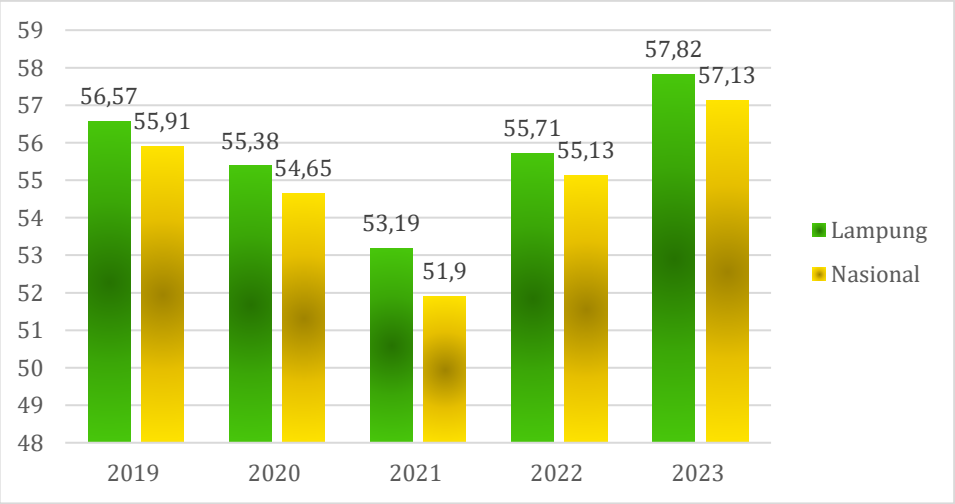

Sumber : Kementrian Kebudayaan, 2025

Grafik 2. 27 Trend Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional Tahun 2022 – 2023

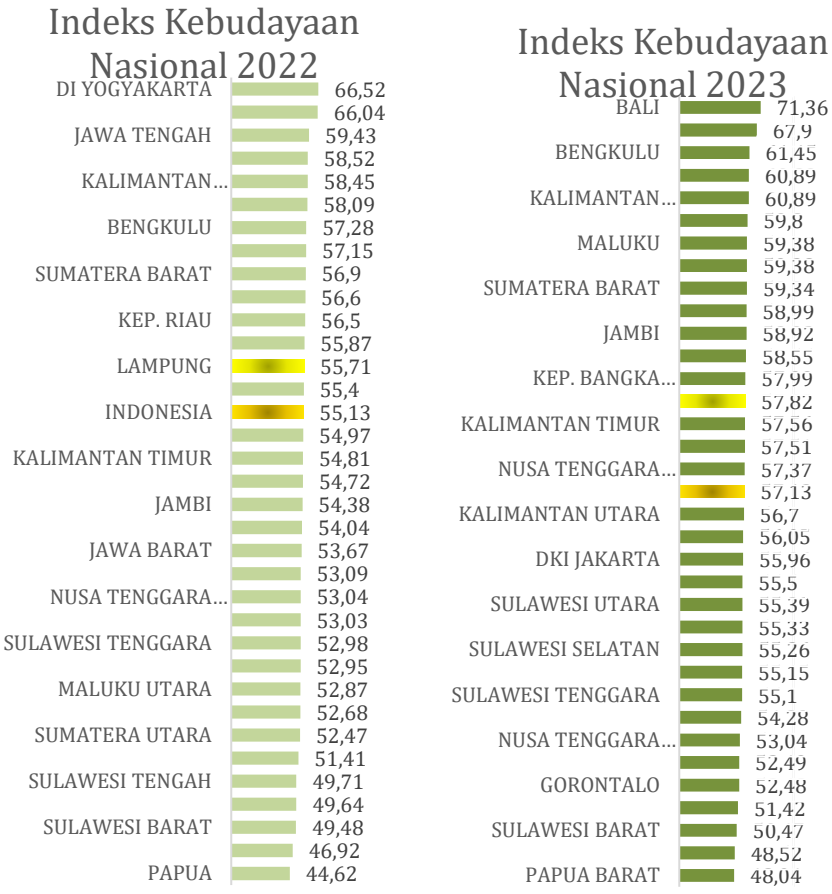

Sumber : Kementrian Kebudayaan, 2025

Beberapa indikator dimensi IPK di Provinsi Lampung masih perlu menjadi perhatian, yaitu (1) Dimensi Ekonomi Budaya berada pada angka 18,61 persen, masih lebih rendah dibandingkan dengan skor di tahun 2018 dan angka nasional, (2) Dimensi Ekspresi Budaya masih berada di bawah angka nasional yaitu sebesar 25,41 persen serta (3) Dimensi Gender yang mencapai 57,61 persen, dimana angka ini dipengaruhi oleh keberadaan Perempuan Parlemen Perwakilan Lampung sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan, mengoptimalkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peran keterwakilan perempuan di parlemen.

Grafik 2. 28 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Berdasarkan Dimensi Tahun 2022 – 2023

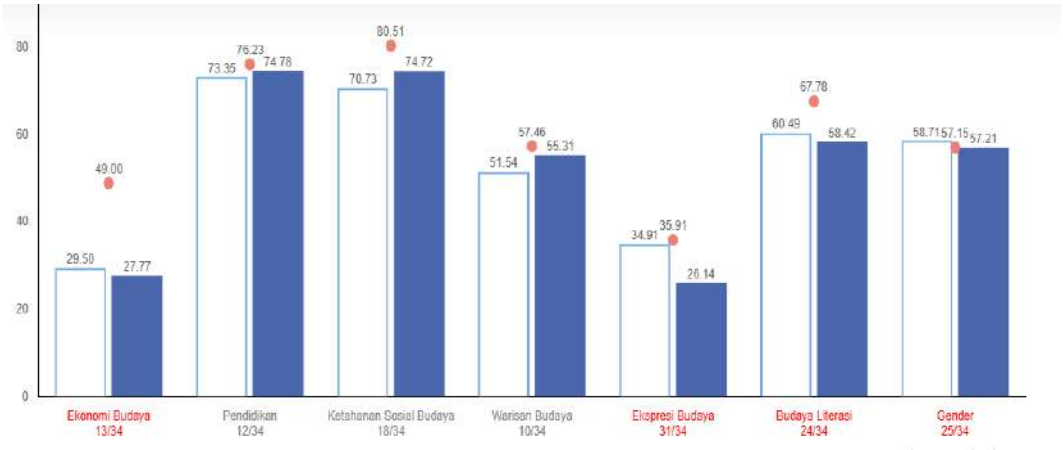

Sumber : IPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2.1.4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang yang rendah pula.

Pendidikan menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Komitmen Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan terlihat dengan menetapkan wajib belajar hingga 12 tahun dan menganggarkan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anak yang telah berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, dapat digunakan indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu sedangkan

RLS dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Grafik 2. 29 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung, 2010-2024

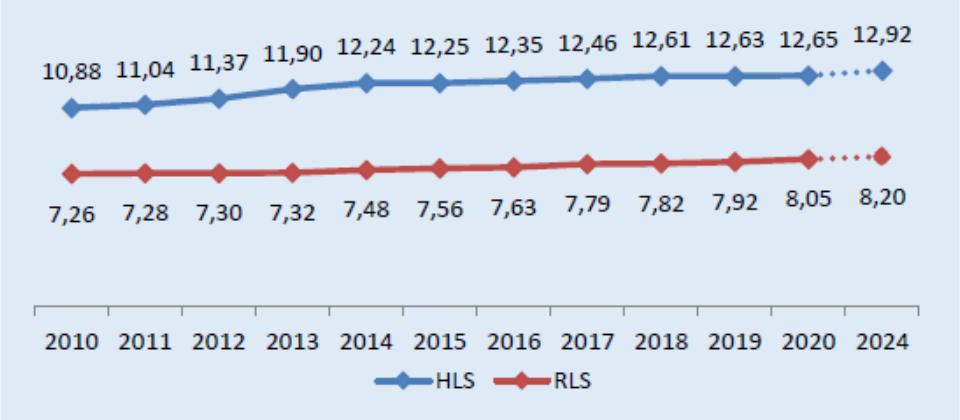

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka, 2025

Perkembangan HLS dan RLS Provinsi Lampung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,92 atau bisa dikatakan rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,92 tahun atau setara dengan Diploma I. Sedangkan RLS Lampung pada tahun 2024 telah mencapai 8,20 atau secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,20 tahun atau telah menamatkan kelas VIII/kelas 2 SMP.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk mengakses pendidikan secara umum pada suatu wilayah tersebut. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Gambar 2. 42 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Umur di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Indonesia, 2025, diolah

Berkurangnya capaian Partisipasi Sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan terlihat pada grafik diatas. Capaian partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang Pendidikan dasar yaitu pada rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun telah mencapai diatas 95%, jenjang Pendidikan menengah yaitu 16-18 tahun masih mencapai 71,74 persen dan jenjang pendidikan tinggi baru mencapai 21,66 persen.

Selama periode 2019-2023, Perkembangan APS usia 16 – 18 tahun di Provinsi Lampung menunjukan peningkatan, namun peningkatannya masih sangat lambat. Pada tahun 2019 capaiaanya sebesar 71,05 persen dan meningkat menjadi 72.35 persen di tahun 2024.

Angka Putus Sekolah -SMA/MA/SMK

Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena bekerja, ataupunn alasan lain. Angka Putus Sekolah digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, serta keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Penilaian

berdasarkan proporsi anak kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan sekolah.

Gambar 2. 43 Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

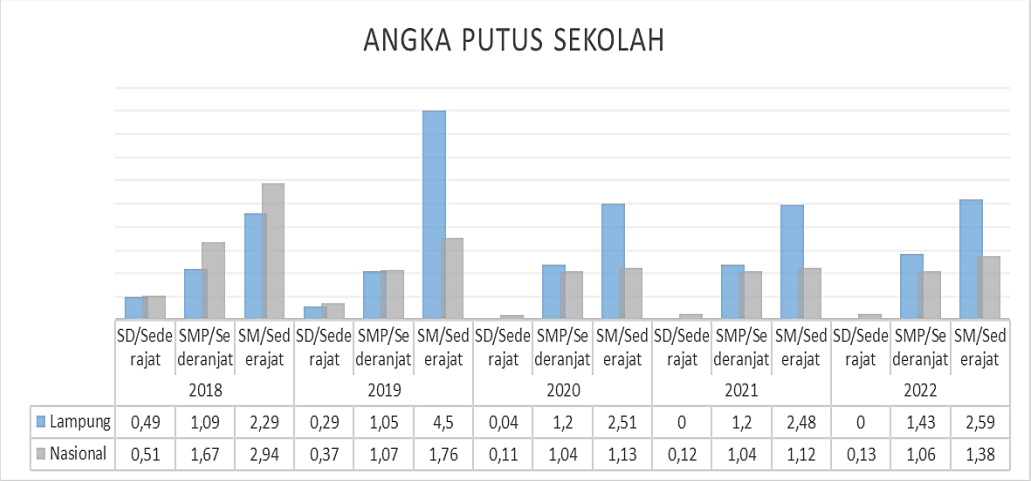

	SD/Sederajat	SMP/Sederanjat	SM/Sederajat	SD/Sederajat	SMP/Sederanjat	SM/Sederajat	SD/Sederajat	SMP/Sederanjat	SM/Sederajat	SD/Sederajat	SMP/Sederanjat	SM/Sederajat	SD/Sederajat	SMP/Sederanjat	SM/Sederajat
	2018			2019			2020			2021			2022		
Lampung	0,49	1,09	2,29	0,29	1,05	4,5	0,04	1,2	2,51	0	1,2	2,48	0	1,43	2,59
Nasional	0,51	1,67	2,94	0,37	1,07	1,76	0,11	1,04	1,13	0,12	1,04	1,12	0,13	1,06	1,38

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2020-2023, diolah

Berdasarkan grafik di atas, Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung pada jenjang SD di tahun 2021 dan 2022 berada di bawah angka Nasional, akan tetapi pada jenjang SMP dan SMA secara umum masih berada di atas angka Nasional. Angka Putus Sekolah jenjang SMP mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dari 1,20 persen menjadi 1,43 persen. Sementara itu Angka Putus Sekolah jenjang SMA mengalami penurunan hingga mencapai 2,48 persen di tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan angka putus sekolah sebesar 2,59 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena target capai Kementerian Pendidikan tidak boleh lebih dari 1 persen. Tingginya Angka Putus Sekolah di jenjang SMP dan SMA sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, selain karena tidak ada biaya untuk bersekolah, anak-anak ini juga dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sejalan dengan tingginya Angka Putus Sekolah Provinsi Lampung di jenjang SMP dan SMA, maka Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA juga tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, yaitu menempati urutan ke 2 tertinggi, setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pada jenjang SMP menjadi Provinsi yang Angka Putus Sekolahnya tertinggi di Sumatera seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2. 44 Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan se-Sumatera Tahun 2022

Provinsi	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
Aceh	0,19	0,33	0,83
Sumatera Barat	0,1	0,6	1,28
Riau	0,11	1,08	1,25
Indonesia	0,13	1,06	1,38
Sumatera Selatan	n/a	1,34	1,36
Sumatera Utara	n/a	0,98	1,22
Jambi	n/a	0,65	1,25
Bengkulu	n/a	0,83	1,97
Lampung	n/a	1,43	2,59
Kep. Bangka Belitung	n/a	1,26	3,62
Kep. Riau	n/a	n/a	2,14

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2023, diolah

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik 2. 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

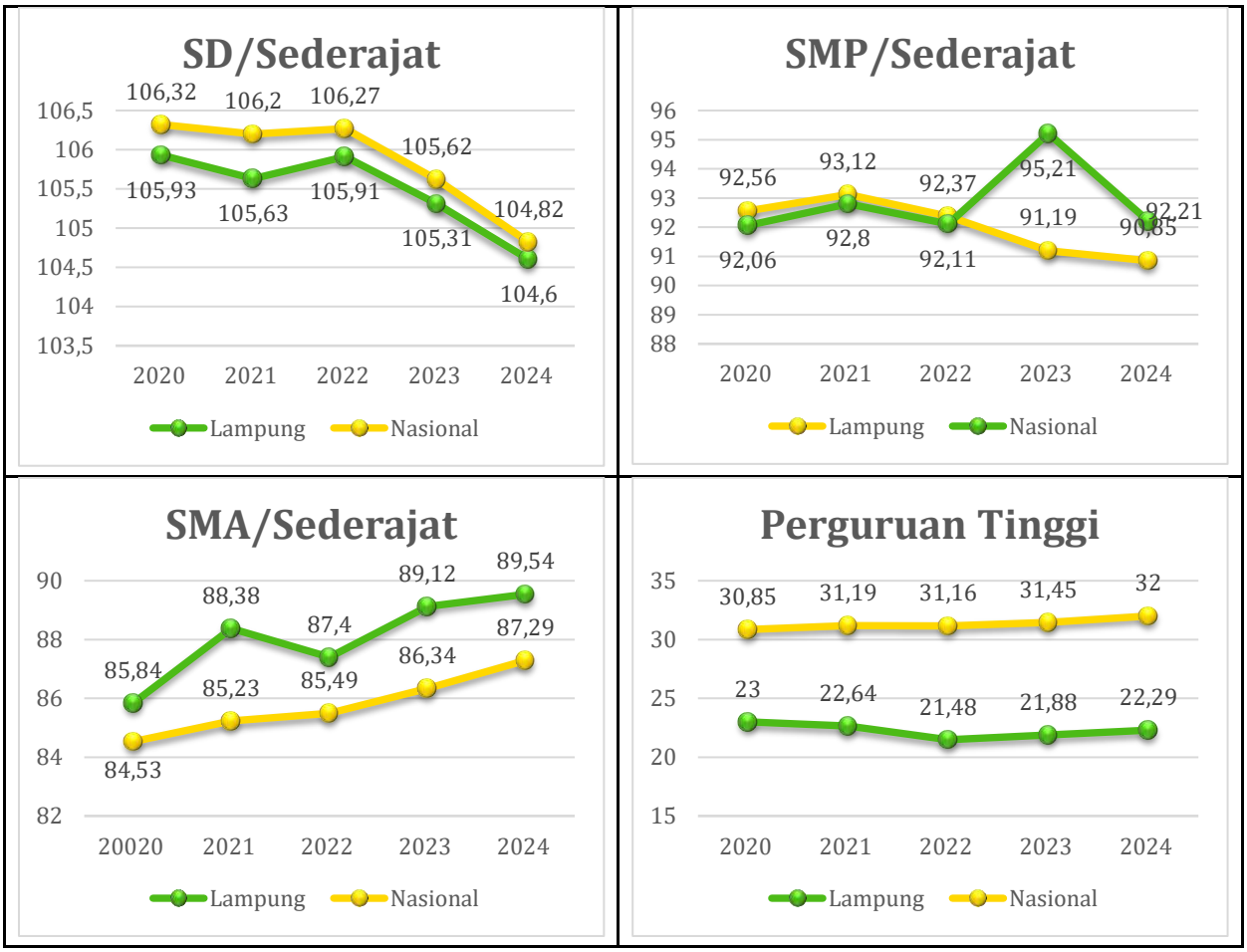

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dari grafik terlihat bahwa peningkatan APK terjadi pada setiap jenjang pendidikan, meskipun angka capaian semakin rendah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Selain itu nilai APK yang melebihi 100 persen dapat juga merupakan indikasi adanya peserta didik di atas atau di bawah umur dari *official age* sebagai indikasi terlalu dini atau terlambat mendaftar sekolah dan adanya pengulangan kelas.. Berdasarkan Renstra Kemendikbud tahun 2020- 2024, pemerintah menargetkan capaian indikator APK pendidikan menengah dan sederajat untuk level provinsi dapat melebihi angka 95 persen. Untuk capaian APK Provinsi Lampung belum mencapai terget tersebut, oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung perlu berupaya untuk meningkatkan nilai APK pendidikan menengah dan sederajat, karena dengan tingginya nilai APK menunjukkan bahwa partisipasi penduduk yang bersekolah pada jenjang Pendidikan menengah telah cukup merata. Pada jenjang Pendidikan tinggi nilai APK Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Capaian APK perguruan tinggi ini juga masih di bawah capaian APK Nasional yang sebesar 31,45 persen di tahun 2023.

Angka Partisipasi Murni

Selain Angka Partisipasi Sekolah (APS) indikator lain yang digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan Pendidikan, terkait dengan aspek kepastian mendapatkan layanan Pendidikan dan pemerataan layanan pada berbagai jenjang Pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM tidak hanya menggambarkan partisipasi penduduk tetapi juga mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi pada jenjang Pendidikan formal.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Indikator APM termasuk dalam jajaran indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk melihat ketidakmerataan partisipasi pendidikan, meskipun APM tidak termasuk dalam target RPJMN 2020-2024.

Grafik 2. 31 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

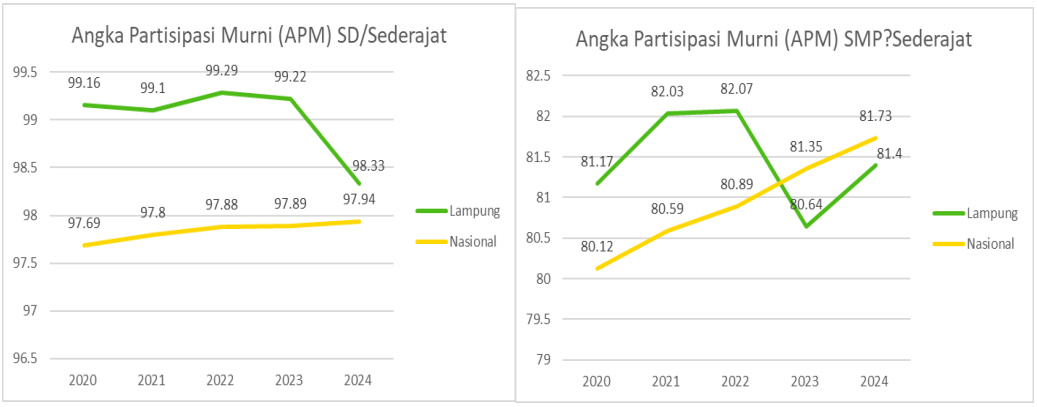

Sumber : BPS Indonesia, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/Sederajat di Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai 2023 cukup berfluktuasi, dimana di tahun 2019 sebesar 99,24 persen menurun menjadi 99,22 persen di tahun 2023 dengan penurunan sebanyak 0,02 poin. Di tahun 2022 sempat meningkat

menjadi 99,29 tetapi kembali turun di tahun 2023. Meskipun begitu, APM jenjang SD/Sederajat masih diatas APM nasional yang pada tahun 2023 mencapai angka 97,89 persen.

Berbeda halnya dengan APM pada jenjang SMP/Sederajat, yang dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar sampai berada di bawah angka nasional. Secara umum APM pada jenjang Pendidikan dasar ini mengalami penurunan di tahun 2023, meskipun pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat masih tetap di atas angka nasional

Grafik 2. 32 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024

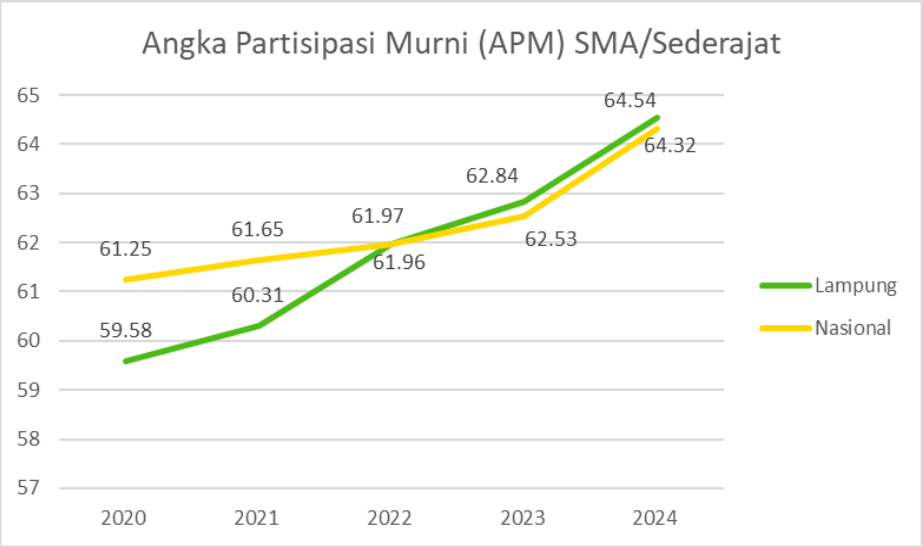

Sumber : BPS Indonesia, 2024

Pada APM jenjang SMA/Sederajat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus meningkat dengan peningkatan sebesar 3,43 poin, dari angka 59,41 persen di tahun 2019 menjadi 62,84 persen di tahun 2023. APM di Tahun 2023 meningkat hingga di atas angka APM nasional yang sebesar 62,53 persen. Jika dibandingkan dengan APM jenjang SD/Sederajat dan SMP/Sederajat, Angka Partisipasi Murni jenjang SMA lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap jenjang Pendidikan SMA/Sederajat perlu ditingkatkan kembali.

Tabel 2. 38 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tahun 2023

Wilayah Tempat Tinggal	Angka Partisipasi Murni			
	SD /Sederajat	SMP /Sederajat	SMA /Sederajat	Perguruan Tinggi
Perkotaan				
Laki-Laki	99,24	81,65	66,17	21,45
Perempuan	99,59	76,63	62,09	27,34
Laki-Laki + Perempuan	99,42	78,98	64,02	24,39
Perdesaan				
Laki-Laki	99,35	79,99	58,82	7,03
Perempuan	98,86	82,91	65,84	13,90
Laki-Laki + Perempuan	99,12	81,45	62,17	10,34
Perkotaan + Perdesaan				
Laki-Laki	99,31	80,52	61,30	12,08
Perempuan	99,11	80,75	64,40	18,81
Laki-Laki + Perempuan	99,22	80,64	62,84	15,37

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Jika dibandingkan berdasarkan wilayah, APM tahun 2023 pada jenjang SD dan SMA lebih tinggi di wilayah perkotaan, sedangkan APM jenjang SMP lebih tinggi di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa telah cukup banyak penduduk perdesaan sesuai dengan usianya yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Dan berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan di perdesaan lebih banyak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama dibandingkan penduduk perempuan perkotaan.

Tabel 2. 39 Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kabupaten/Kota	2022			2023		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Lampung Barat	99,02	81,90	55,18	98,51	81,99	51,96
Tanggamus	99,96	80,01	55,72	99,76	81,80	50,76
Lampung Selatan	99,04	80,73	59,04	99,07	82,58	63,89
Lampung Timur	98,25	89,19	60,53	98,34	86,31	62,59
Lampung Tengah	99,76	76,95	67,44	99,80	78,29	69,45
Lampung Utara	99,05	78,62	62,19	98,87	80,28	69,34
Way kanan	99,05	79,67	61,78	98,88	81,31	62,49
Tulang Bawang	99,89	81,17	44,47	99,78	81,39	56,37
Pesawaran	98,93	80,59	67,15	99,49	72,18	65,19
Pringsewu	99,99	87,62	62,11	99,72	79,26	60,93

Kabupaten/Kota	2022			2023		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Mesuji	99,01	84,15	59,53	98,58	80,07	52,84
Tulang Bawang Barat	99,46	84,18	57,24	99,55	85,36	63,48
Pesisir Barat	99,87	81,48	72,96	99,49	69,60	56,26
Bandar Lampung	99,35	83,77	69,86	99,14	81,06	65,51
Metro	99,93	95,29	82,85	99,33	72,89	62,91
Jenis Kelamin						
Laki-laki / *Male*	99,31	81,23	59,79	99,31	80,52	61,30
Perempuan / *Female*	00,27	82,91	64,35	99,11	80,75	64,40

Sumber : BPS Indonesia, 2023

Angka Partisipasi Murni berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukan pada jenjang SD hampir mendekati 100 persen, dan pola yang sama dengan APS, dimana terjadi penurunan persentase seiring bertambahnya usia kelompok penduduk. APM jenjang Pendidikan SMP sebagian besar telah mencapai 80 persen, namun untuk Kabupaten Pesisir Barat pada angka 69,60 persen dan menurun dari tahun 2022. Sedangkan APM jenjang SMA di tahun 2023 masih pada kisaran 60-70 persen kecuali di Kabupaten Tanggamus yang masih cukup rendah sebesar 50,76 persen.

Jumlah Guru Dan Murid SMA dan SMK

Berdasarkan data jumlah murid SMA, terdapat peningkatan jumlah siswa dari tahun 2019 sampai 2023, dengan selisih jumlah siswa sebanyak 21.477 siswa. Jumlah siswa SMK juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021, namun pada tahun 2022 sampai 2023 terdapat penurunan jumlah siswa. Secara umum jumlah siswa SMK dalam periode 2019 sampai 2023 tetap meningkat, dengan peningkatan sebanyak 4.474 siswa.

Peningkatan Jumlah guru SMA dan SMK dari tahun 2019 sampai tahun 2023 cukup berfluktuasi. Jumlah guru SMA di tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat sampai di tahun 2023. Namun secara umum dalam periode tahun 2019 sampai 2023, terdapat peningkatan jumlah guru SMA sebesar 192 guru. Berbeda dengan jumlah guru SMK, dari tahun 2019 sampai 2023 menurun dari 10.168 guru SMK di tahun 2019 menjadi berjumlah 10.077 guru SMK di tahun 2023. Secara rinci jumlah guru dan murid dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 33 Jumlah Guru dan Murid SMA/SMK 2020-2024

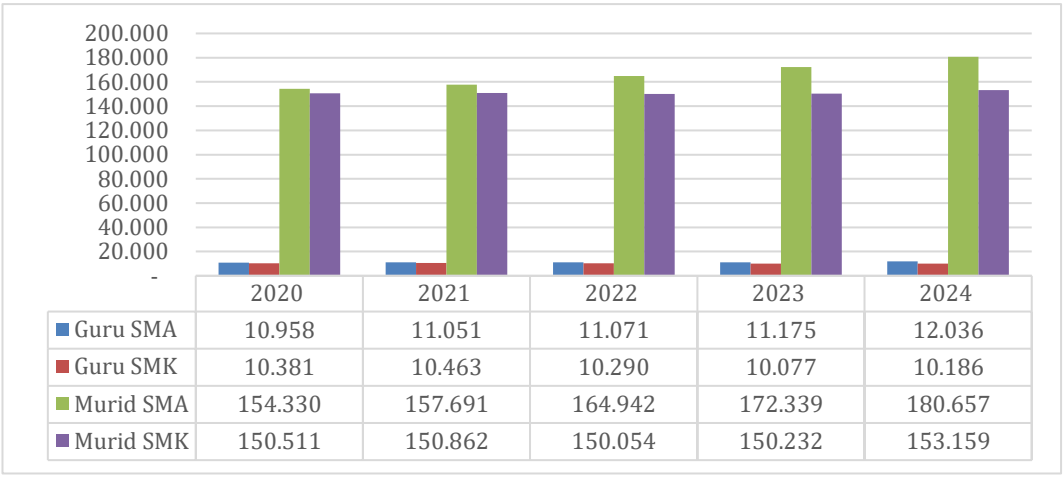

	2020	2021	2022	2023	2024
Guru SMA	10.958	11.051	11.071	11.175	12.036
Guru SMK	10.381	10.463	10.290	10.077	10.186
Murid SMA	154.330	157.691	164.942	172.339	180.657
Murid SMK	150.511	150.862	150.054	150.232	153.159

Sumber: Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Sarana Prasarana Sekolah

Kebutuhan ketersediaan sekolah di suatu wilayah menurut Permendikbud Ristek Nomor 47 tahun 2023, ditentukan berdasarkan rasio jumlah jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) terhadap jumlah rombongan belajar (rombel) di satuan pendidikan. Untuk setiap satuan pendidikan memiliki jumlah maksimal rombel sebanyak 36 rombel dengan masing-masing rombel terdiri dari 36 siswa. Berdasarkan hal tersebut, setiap dibangunnya 1 (satu) unit sekolah diperuntukan bagi 1.296 orang penduduk usia 16-18 tahun. Kondisi saat ini berdasarkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun di masing-masing kabupaten/kota dan jumlah sekolah yang tersedia, kebutuhan sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Lampung telah terpenuhi.

Tabel 2. 40 Ketersediaan Sekolah Menengah Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Tahun 2023

No	Wilayah	Usia Penduduk 15-19 Tahun	Ketersedian Sekolah SMA /SMK /MA	Kebutuhan Sekolah	Keterangan
1	Lampung Tengah	111460	148	86	Terpenuhi
2	Lampung Timur	83333	124	65	Terpenuhi
3	Lampung Selatan	72672	117	56	Terpenuhi
4	Bandar Lampung	91439	128	71	Terpenuhi
5	Lampung Utara	46804	82	37	Terpenuhi
6	Tanggamus	51435	54	40	Terpenuhi

No	Wilayah	Usia Penduduk 15-19 Tahun	Ketersedian Sekolah SMA /SMK /MA	Kebutuhan Sekolah	Keterangan
7	Way Kanan	37209	65	29	Terpenuhi
8	Pringsewu	31128	56	24	Terpenuhi
9	Pesawaran	40482	40	32	Terpenuhi
10	Tulang Bawang	36640	54	29	Terpenuhi
11	Lampung Barat	26134	30	21	Terpenuhi
12	Tulang Bawang Barat	19761	35	16	Terpenuhi
13	Kota Metro	13683	41	11	Terpenuhi
14	Mesuji	18384	33	15	Terpenuhi
15	Pesisir Barat	14450	16	12	Terpenuhi
	Provinsi	**695014**	**1023**	**544**	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024, Data diolah

Gambar 2. 45 Ketersediaan Sekolah Menengah Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Tahun 2023

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024, Data diolah

Sarana ruang kelas pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang dalam kondisi baik semakin meningkat setiap tahun pelajaran. Pada jenjang Pendidikan SMA meningkat dari 4096 di tahun ajaran 2019/2020 menjadi 9084 prasarana dengan kategori baik di tahun 2022/2023. Pada jenjang SMK juga terjadi

peningkatan dari jumlah 4085 di tahun ajaran 2019/2020 menjadi 8655 prasarana dengan kategori baik di tahun 2022/2023. Begitu juga dengan jenjang Pendidikan SLB jumlah prasarana meningkat dari 268 di tahun 2019/2020 menjadi 582 di tahun 2022/2023. Meskipun tingkat kerusakan berat mencapai angka 0 (nol) namun kondisi prasarana rusak ringan masih cukup tinggi khususnya pada jenjang SMA dan SMK. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat. Kondisi prasarana yang rusak berat dan rusak total pada jenjang Pendidikan SMK dan SLB bernilai 0 (nol) menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMK dan SLB karena siswa dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik.

Tabel 2. 41 Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kategori	2019/2020			2021/2022			2022/2023		
	SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB
Rusak Berat + Rusak Total	12	1	7	6	0	0	4	0	0
Rusak Ringan	4432	3941	252	136	535	4	136	224	4
Baik	4096	4085	268	8770	7911	553	9084	8655	582

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2024, diolah

2.1.4.5 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia kurang 1 tahun per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Kematian bayi terjadi pada masa bayi perinatal (0-6 hari), diikuti kematian pada masa bayi neonatal (7 – 28 hari) dan masa bayi (>28 hari - < 1 tahun). Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 30 kasus, dimana 2023 sebanyak 624 kasus dan tahun 2024 sebanyak 654 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, trendnya kasus kematian bayi tahun 2020-2024 terlihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2. 46 Trend Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024

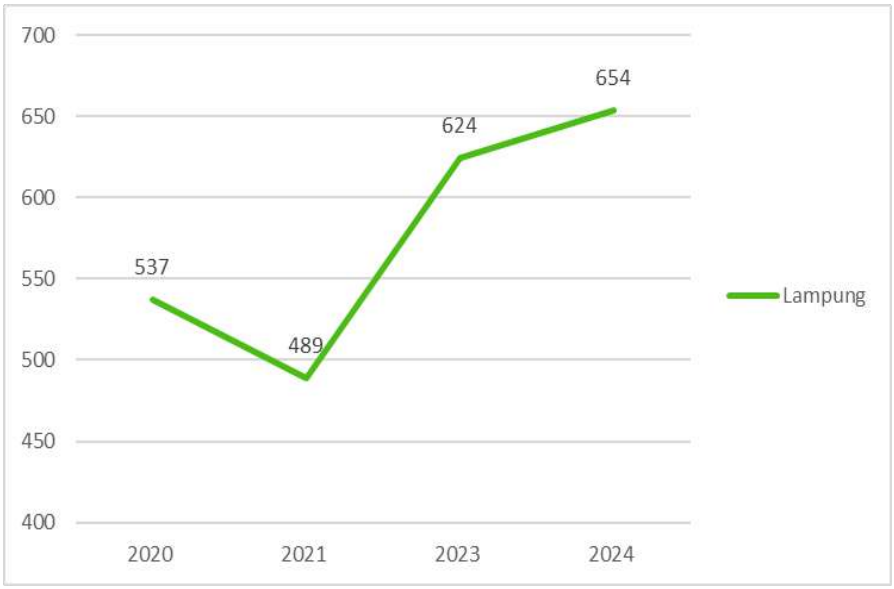

Sumber Laporan Tahun Bidang Kesmas, Dinkes 2023

Tingginya angka kematian bayi disebabkan karena berat badan bayi lahir yang rendah (dibawah 2.500 gram) sebanyak 29 persen , Asfiksia sebanyak 20 persen, Kelainan bawaan sebanyak 9 persen , infeksi besar sebanyak 4 persen, Pnemoni sebanyak 1 persen dan l

Grafik 2. 34 Penyebab kematian bayi tahun 2019-2023

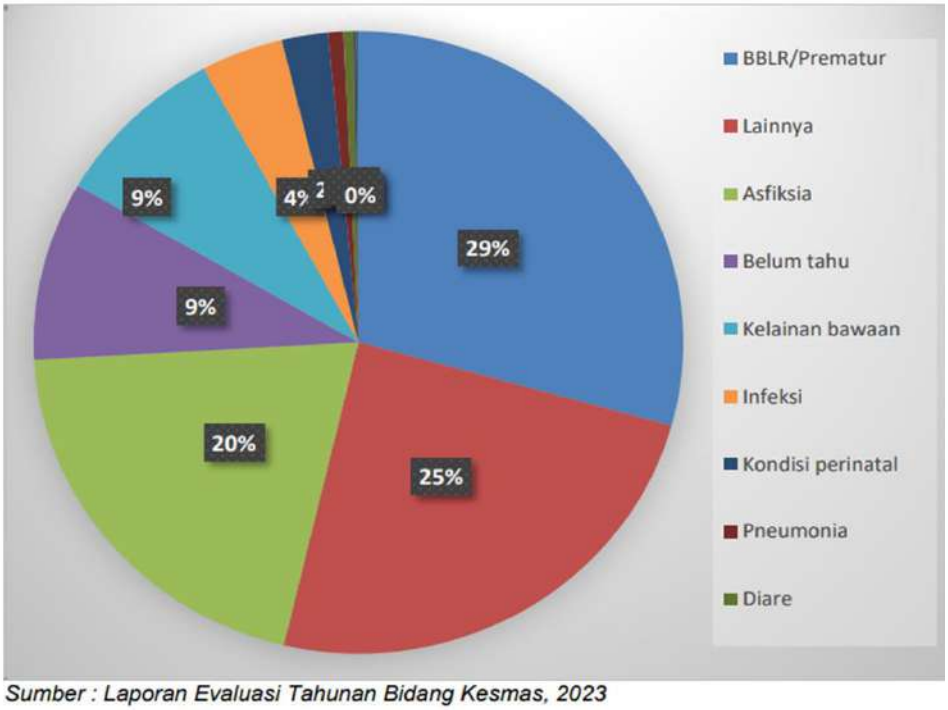

Sumber : Laporan Evaluasi Tahunan Bidang Kesmas, 2023

Kematian bayi sendiri tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa adanya dukungan terhadap upaya penurunan kematian ibu dan peningkatan kesehatan ibu. Perawatan antenatal berkualitas dan penolong persalinan sesuai standar harus disertai dengan perawatan neonatal yang cukup dan upaya menurunkan kematian bayi akibat berat lahir rendah, infeksi pasca lahir (seperti tetanus neonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia. Sebagian besar kematian neonatal pasca lahir disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak mahal, mudah dilakukan, dan bisa dikerjakan efektif.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lainnya. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu terus menunjukan penurunan, hingga mencapai 100 kasus pada tahun 2024, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan. Penurunan kasus ini juga disebabkan karena kasus Covid-19 sudah mereda sehingga ibu hamil dapat memeriksakan dirinya secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan.

Grafik 2. 35 Trend kasus kematian Ibu tahun 2020-2024

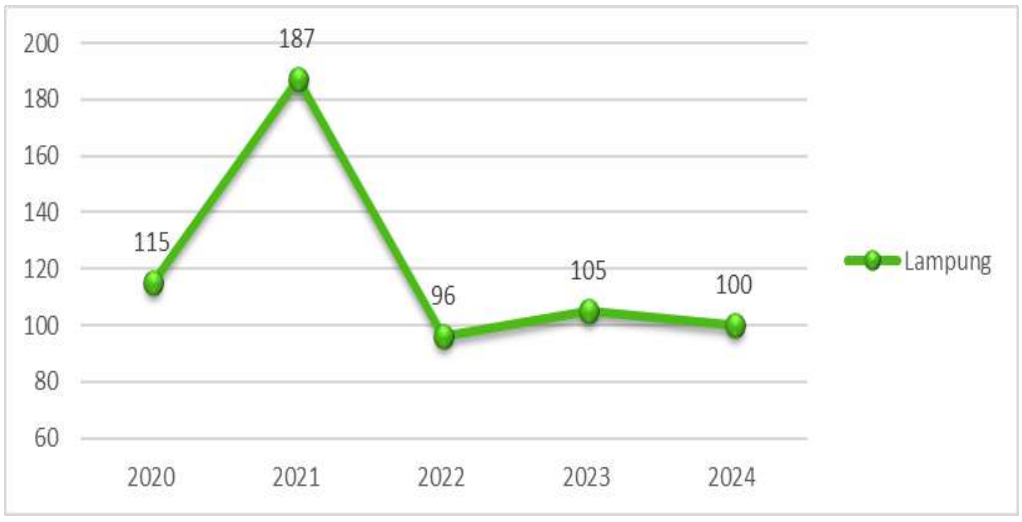

Sumber Laporan Tahun Bidang Kesmas, Dinkes 2025

Penyebab kematian ibu di Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh perdarahan obstetrik 36 persen, komplikasi non obstetrik sebesar 21 persen, hipertensi dalam kehamilan 19 persen, lainnya

17 persen infeksi terkait kehamilan 5 persen dan komplikasi obstetrik lain 2 persen.

Grafik 2. 36 Penyebab kematian Ibu tahun 2019-2023

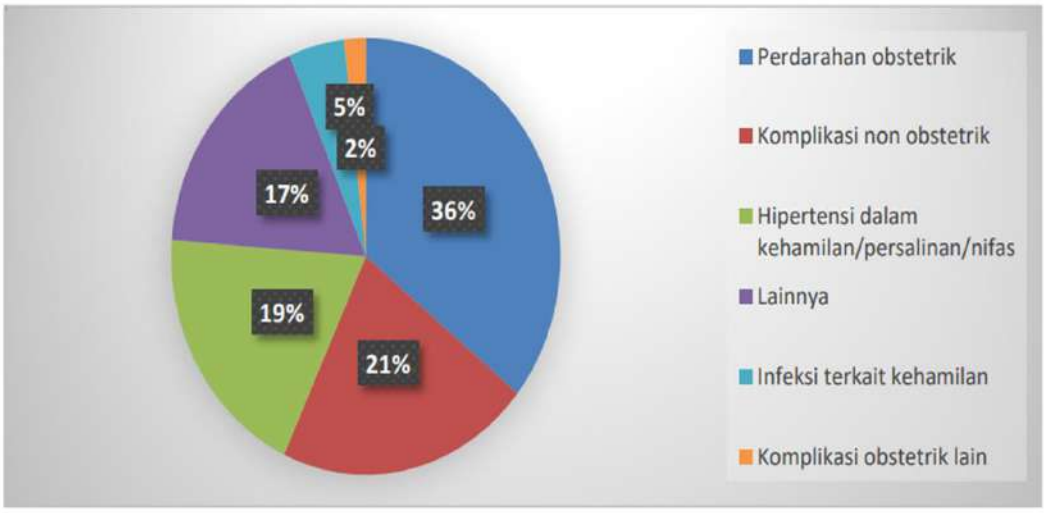

Sumber : Laporan Evaluasi Tahunan Bidang Kesmas, 2023

Dalam upaya menurunkan kematian ibu, diperlukan peningkatan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil, nifas dan menyusui dengan meningkatkan akses ibu hamil untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standar, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, Perbiakan sisten rujukan maternal neonatal dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

3. Status Gizi Masyarakat

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kondisi status gizi masyarakat khususnya balita adalah dengan menggunakan indikator prevalensi stunting. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi

stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Tabel 2. 42 Prevalensi Stunting 2013-2023

Prevalensi Stunting	Riskesda		SSGBI	SSGI		
	2013	2018	2019	2021	2022	2024
Lampung	42,6	27,28	26,26	18,5	15,2	15,9
Nasional	37,2	30,8	27,7	24,4	21,6	

Sumber: Riskesdas SSGI 2024

Prevalensi *stunting* berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan lima tahun sekali mengalami penurunan menjadi 27,28 persen pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 pengukuran stunting dilakukan melalui Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) bersamaan dengan Susenas. Berdasarkan survei tersebut prevalensi stunting pada tahun 2019 tercatat sebesar 26,26 persen, pada tahun 2020 SSGBI tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, dilanjutkan dengan Survey status Gizi Indonesia (SSGI) ditahun 2021 dan 2022, capaian penurunan preavalensi stunting Provinsi Lampung terus menurun menjadi 18,5 persen ditahun 2021 dan 15,2 persen ditahun 2022. Ditahun 2023 berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia prevalensi stunting menurun kembali menjadi 14,9 persen, namun di tahun 2024 mengalami sedikit meningkat menjadi 15,9. Beberapa hal yang menyebabkan kejadian stunting di antaranya:

a. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

b. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dan anak belum mendapat akses memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi memadai serta masih terbatasnya akses layanan pembelajaran dini berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini.

c. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.

d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih Buang Air Besar (BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

Prevalensi Stunting pada Balita .Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhFan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting Provinsi Lampung telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, berdasarkan data SKI 2023 prevalensi stunting Provinsi Lampung sebesar 14,9 persen, menurun sebesar 0,3 persen dari kondisi tahun 2022 sebesar 15,2 persen. Angka capaian ini menjadikan Provinsi Lampung menjadi 4 Provinsi terendah angka prevalensi stunting. Penurunan yang cukup signifikan ini diperoleh karena aksi konvergensi stunting penurunan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Lampung sejak tahun 2018. Beberapa strategi juga terus diupayakan, untuk mencapai target prevalensi stunting Provinsi Lampung sebesar 13,2 persen ditahun 2025 dan 3,8 persen ditahun 2045 serta mencapai ***Zero New Stunting***.

Gambar 2. 47 Trend Prevalensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

KABUPATEN/KOTA	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	SSGI 2024	selisih
Lampung Barat	22,7	16,6	24,6	20,5	-4,1
Lampung Utara	20,2	24,7	23,5	20	-3,5
Way Kanan	20,7	18,4	22,7	13,9	-8,8

KABUPATEN/KOTA	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	SSGI 2024	selisih
Tanggamus	25	20,4	17,1	24,9	7,8
Lampung Tengah	20,8	8,7	16,7	15,5	-1,2
Pesisir Barat	22,8	16,7	16,1	19,8	3,7
Pringsewu	19	16,2	15,8	19,5	3,7
Lampung Timur	15,3	18,1	14,2	14	-0,2
Bandar Lampung	19,4	11,1	13,4	14,8	1,4
Tulang Bawang Barat	22,1	16,4	10,5	13,4	2,9
Lampung Selatan	16,3	9,9	10,3	10,4	0,1
Pesawaran	17,6	25,1	10	15,5	5,5
Tulang Bawang	9,5	10,2	9,8	18,3	8,5
Metro	19,7	10,4	7,1	14,8	7,7
Mesuji	21,8	22,5	5	11,1	6,1
Provinsi	18,5	15,2	14,9	15,9	1

Sumber : Riskesdas SSGI 2024

Berdasarkan data prevalensi stunting Kabupaten/Kota tahun 2024 terdapat lima kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya menurun dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu : Lampung barat, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Namun, ada 10 kabupaten/kota angka prevalensi stunting meningkat jika dibanding tahun 2023.

4. Sarana Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas)

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja, puskesmas merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Puskesmas memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Puskesmas di Provinsi Lampung dari tahun ketahun meningkat jumlahnya, baik rawat inap, keliling atau pembantu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, diterangkan bahwa setiap wilayah Kecamatan harus memiliki minimal 1 (Satu) Puskesmas atau lebih

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.

Grafik 2. 37 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Provinsi Lampung 2020-2024

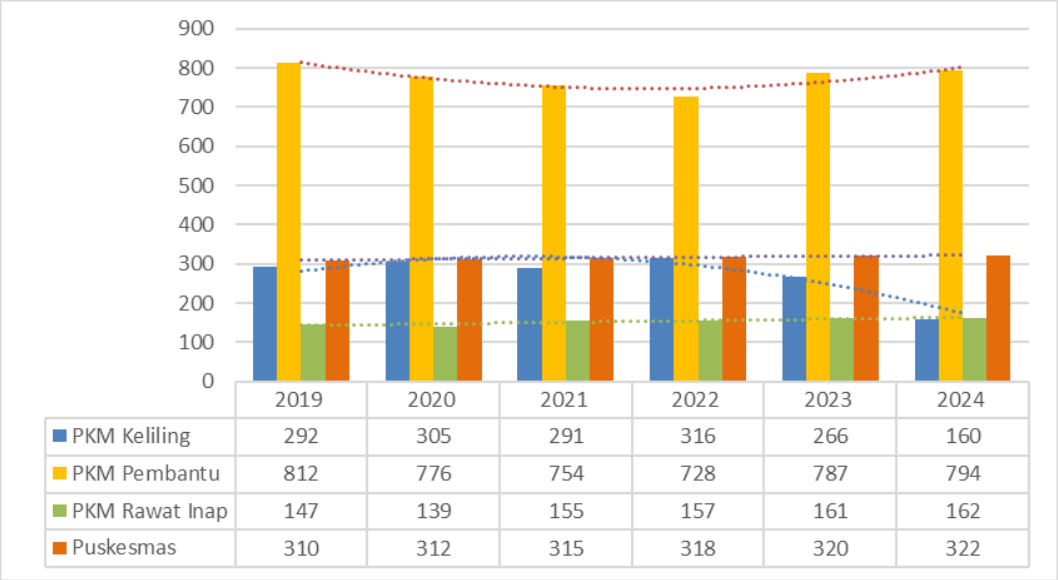

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKM Keliling	292	305	291	316	266	160
PKM Pembantu	812	776	754	728	787	794
PKM Rawat Inap	147	139	155	157	161	162
Puskesmas	310	312	315	318	320	322

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data jumlah wilayah Kecamatan yang ada di Provinsi Lampung tahun 2024 sebanyak 299 kecamatan, seluruh kecamatan telah memiliki minimal 1 Puskesmas, bahkan beberapa kecamatan ada yang memiliki puskesmas lebih dari satu.

Gambar 2. 48 Ketersediaan Puskesmas Di Provinsi Lampung Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2024

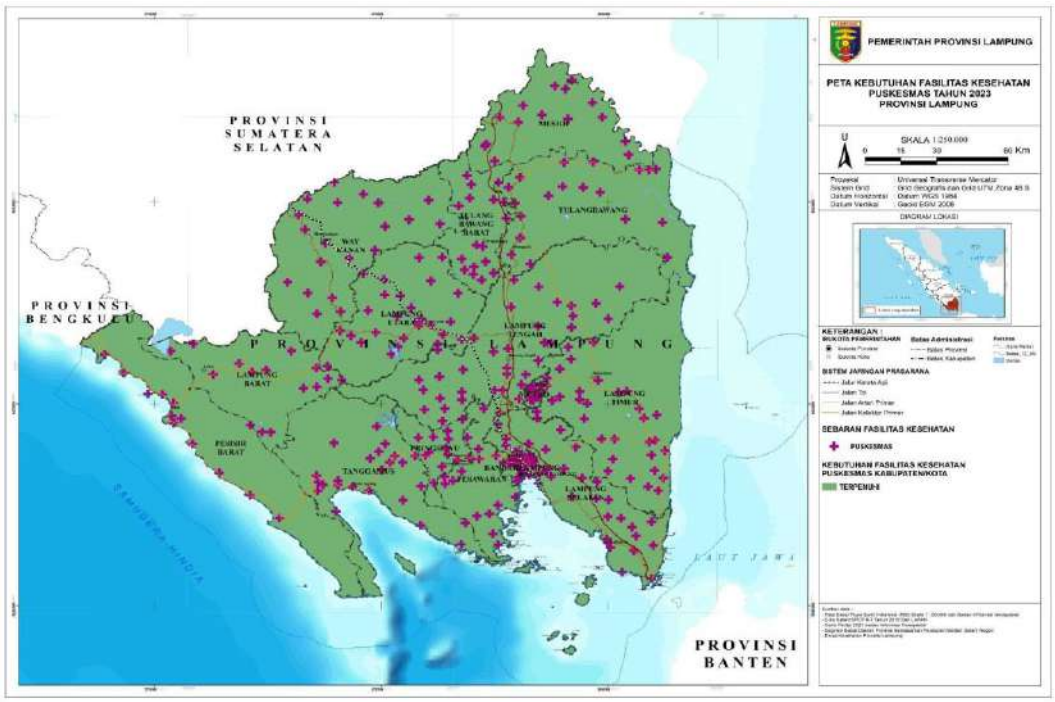

Sumber : Bapeeda Provinsi Lampung,2024, Data diolah

Namun bila dilihat rasio ketersedian berdasarkan jumlah puskesmas diwilayah Kabupaten/Kota dengan sasaran penduduk yang dilayani oleh puskesmas, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 peningkatannya sangat sedikit dan jika dilihat berdasarkan standar 1 (satu) Puskesmas melayani 20.000 penduduk, maka ketersediaan Puskesmas untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebagian besar belum terpenuhi.

Grafik 2. 38 Rasio Puskesmas Terhadap 100.000 Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

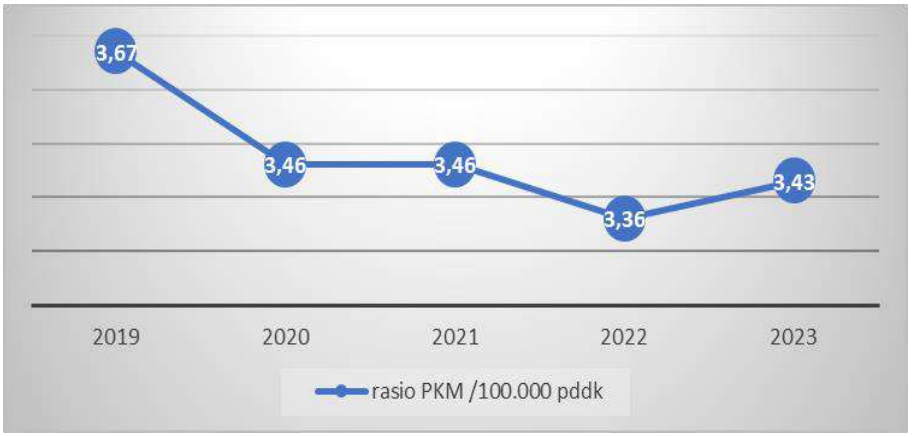

Sumber : Bapeeda Provinsi Lampung,2024, Data diolah

Tabel 2. 43 Ketersediaan Puskesmas Terhadap Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2023	Jumalh Kecamatan	Ketersediaan Puskesmas	Kebutuhan Puskesmas Berdasarkan Jumlah Penduduk	Keterangan
Lampung Barat	303.931	15	15	15	Terpenuhi
Tanggamus	659.818	20	26	33	Belum Terpenuhi
Lampung Selatan	1.090.174	17	28	55	Belum Terpenuhi
Lampung Timur	1.137.434	24	34	57	Belum Terpenuhi
Lampung Tengah	1.522.426	28	39	76	Belum Terpenuhi
Lampung Utara	635.903	23	27	32	Belum Terpenuhi
Way Kanan	485.056	15	20	24	Belum Terpenuhi
Tulang Bawang	431.623	15	20	22	Belum Terpenuhi
Pesawaran	492.474	11	15	25	Belum Terpenuhi
Pringsewu	409.858	9	13	20	Belum Terpenuhi
Mesuji	235.546	7	14	12	Terpenuhi
Tulang Bawang Barat	291.437	9	16	15	Terpenuhi
Pesisir Barat	165.937	11	11	8	Terpenuhi
Bandar Lampung	1.234.988	20	31	62	Belum Terpenuhi
Metro	172.505	5	11	9	Terpenuhi
Provinsi Lampung	**9.269.110**	**229**	**320**	**463**	

Sumber : Bapeeda Provinsi Lampung,2024, Data diolah

Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Strategis

Akreditasi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama/Puskesmas memiliki standar ketenagaan 9 jenis tenaga, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas. Jenis tenaga kesehatan yang menjadi standar terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Promosi Kesehatan (Kesehatan Masyarakat), Sanitasi, Nutrisionis, tenaga apoteker dan ahli teknologi laboratorium medik. Saat ini di Provinsi Lampung dari 320 Puskesmas yang ada, hanya 121 Puskesmas (37,81%) yang

memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dan 199 Puskesmas (62,19 %) belum memiliki standar 9 tenaga kesehatan.

Gambar 2. 49 Distribusi 9 Jenis Tenaga di Puskesmas Per- Kabupaten/Kota Tahun 2023

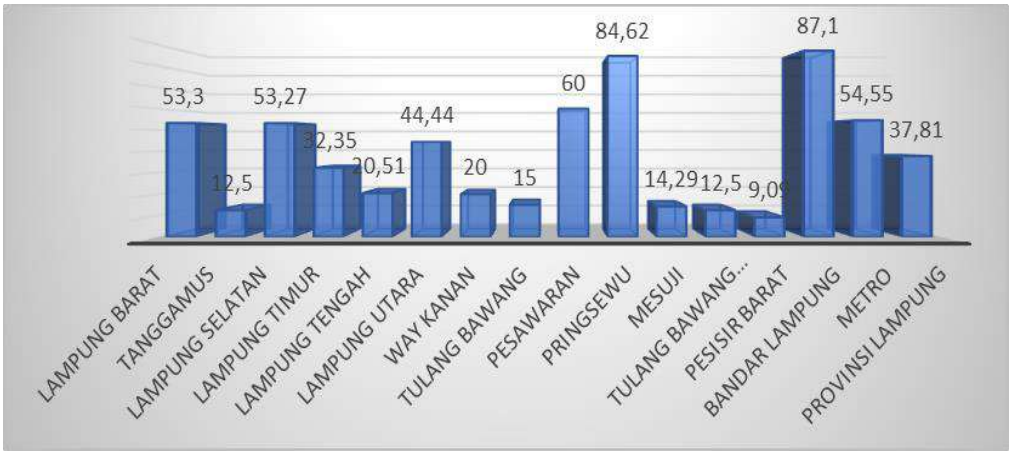

Sumber : Laporan Evaluasi Subbag Kepegawaian dan SDMK Dinkes Prov. Lampung, 2023

Akreditasi Puskesmas (FKTP)

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan mekanisme regulasi yang bertujuan mendorong dan memotivasi upaya peningkatan mutu serta kinerja dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Di Provinsi Trend

Grafik 2. 39 Trend Capaian Akreditasi Puskesmas di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

Sumber: Evaluasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional,2023

Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Saat ini Provinsi Lampung memiliki 81 Rumah sakit yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Menurut undang-undang Nomor 44 tahun 2019 tentang rumah sakit, Penyediaan Rumah Sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk. didasari standar WHO, setiap RS minimal memilik 250 tempat tidur dan 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk, sehingga dengan kata lain 1 RS diperuntukan untuk 250.000 penduduk. Saat ini berdasarkan jumlah penduduk di 15 Kabupaten/Kota, ketersedian RS sudah sebagian besar terpenuhi, hanya kabupaten Tanggamus yang belum terpenuhi.

Gambar 2. 50 Ketersedian Rumah Sakit Berdasarkan Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2023

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023, Data Diolah

Tabel 2. 44 Ketersediaan Rumah Sakit Berdasar Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2023	Ketersedian Rumah Sakit	Kebutuhan Rumah Sakit	Keterangan
Lampung Barat	303.931	2	1	Terpenuhi
Tanggamus	659.818	2	3	Belum terpenuhi
Lampung Selatan	1.090.174	6	4	Terpenuhi
Lampung Timur	1.137.434	5	5	Terpenuhi
Lampung Tengah	1.522.426	10	6	Terpenuhi
Lampung Utara	635.903	6	3	Terpenuhi
Way Kanan	485.056	2	2	Terpenuhi
Tulang Bawang	431.623	4	2	Terpenuhi
Pesawaran	492.474	3	2	Terpenuhi
Pringsewu	409.858	7	2	Terpenuhi
Mesuji	235.546	2	1	Terpenuhi
Tulang Bawang Barat	291.437	2	1	Terpenuhi
Pesisir Barat	165.937	1	1	Terpenuhi
Bandar Lampung	1.234.988	20	5	Terpenuhi
Metro	172.505	9	1	Terpenuhi
Provinsi Lampung	**9.269.110**	**81**	**37,08**	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023, Data diolah

Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan data dari aplikasi RS ONLINE per tanggal Januari 2024 disebutkan bahwa jumlah rumah sakit telah terakreditasi pada tahun 2023 sebanyak 80 rumah sakit atau sebesar 98.77 % dengan rincian rumah sakit pemerintah sebanyak 21 RS atau sebesar 25.93% dan rumah sakit swasta sebanyak 59 RS atau sebesar 72.84%. Hanya 1 satu rumah sakit yang belum terakreditasi yaitu RSK Bedah Kurnia Centre di Kab. Pringsewu terlihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2. 51 Jumlah Rumah Sakit Yang Ter- Akreditasi di Provinsi Lampung Tahun 2023

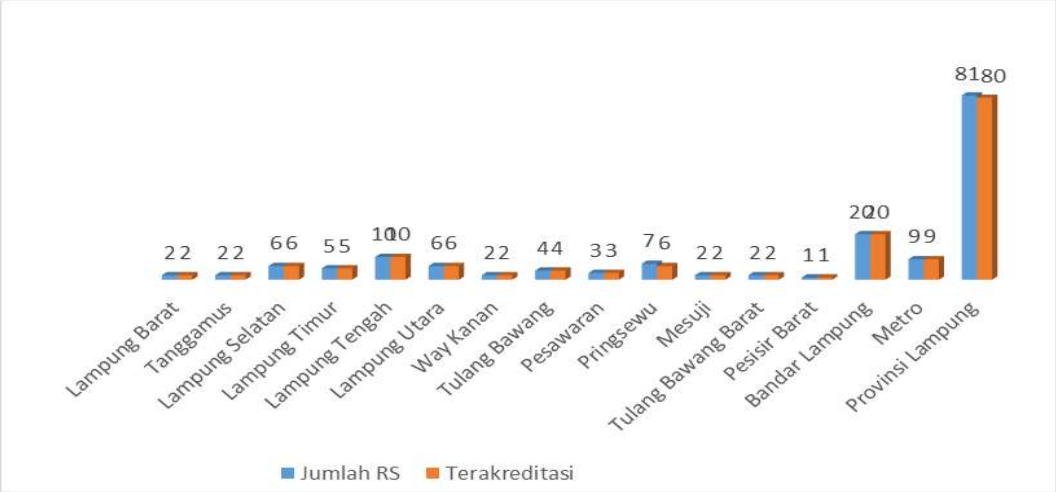

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Untuk kelulusan akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Lampung sebesar 7 persen sudah mencapai status utama dan 93 persen perstatus Paripurna.

4. Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis merupakan penyebab kematian ke-9 di dunia dan penyebab utama agen infeksius tunggal dengan peringkat di atas HIV/AIDS. Menurut WHO dalam Global TB Report tahun 2020, saat ini Indonesia berada di urutan 2 negara terbesar di dunia sebagai penyumbang penderita TBC setelah India, dengan estimasi insiden sebesar 845.000 kasus atau 312 per 100.000 penduduk dan mortalitas 92.000 atau 34 per 100.000 penduduk (selain TB HIV).

Berdasarkan data angka penemuan kasus TBC (CDR) semua kasus TB di Provinsi Lampung terlihat bahwa penemuan kasus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat, namun angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Semakin tinggi CDR mengartikan semakin banyak kasus TBC yang ditemukan secara dini dan diobati, sehingga menurunkan angka penularan di masyarakat. CDR yang rendah mengartikan kasus TBC masih banyak yang belum ditemukan sehingga mengindikasikan penularan TBC yang tinggi di Kabupaten/Kota tersebut.

Grafik 2. 40 Cakupan Penemuan Kasus TBC (CDR) Di Provinsi Lampung Tahun 2024

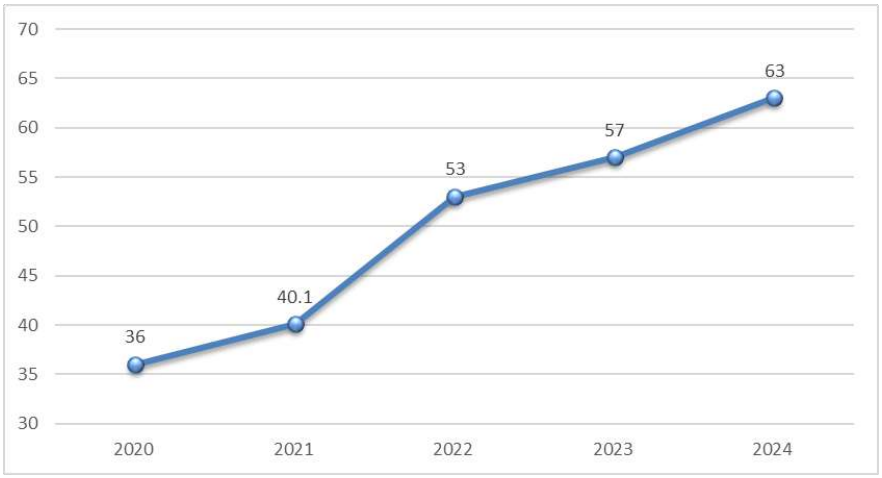

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2. 41 Angka Keberhasilan Pengobatan TB paru (success rate) Provinsi Lampung 2020-2024

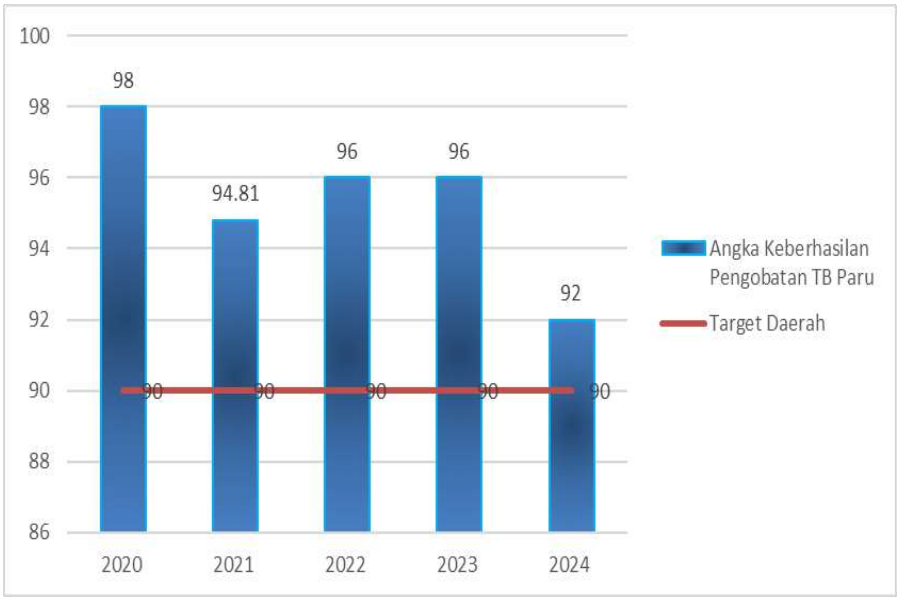

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas di wilayah pulau Sumatera Indonesia yang memiliki daya ungkit besar dalam capaian program Tuberkulosis nasional dengan jumlah penduduk yang dimilikinya. Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas di Indonesia untuk melaksanakan strategi *Public Private Mix* (PPM) dimana sebelumnya salah satu masalah di program tuberculosis adalah rendahnya pencatatan dan pelaporan dari tingkat FKTP maupun FKRTL baik pemerintah dan swasta.

Dengan penerapan strategi PPM, terjadi peningkatan capaian secara signifikan. Pada tahun 2021 sampai 2024 terjadi peningkatan keterlibatan fasyankes dalam program tuberkulosis, Rumah Sakit Pemerintah di angka 70% dan saat ini di tahun 2023 sudah 100%, Rumah Sakit Swasta dari 61% menjadi 95%, Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) dari 0% menjadi 28%, Klinik Pemerintah dari 0% menjadi 25% dan Klinik Swasta dari 3% menjadi 46%. Tidak hanya peningkatan jumlah fasyankes terjadi juga peningkatan dalam capaian angka kasus TBC. Capaian dari Rumah Sakit Pemerintah tahun 2021 berjumlah 1667 kasus sementara tahun 2023 sudah 2453 kasus ditemukan (masih bisa meningkat), dari rumah sakit swasta tahun 2021 berjumlah 2316 kasus pada tahun 2023 sudah ditemukan 4788 kasus (masih bisa meningkat), sementara dari TPMD, Klinik Swasta dan Pemerintah dari 47 kasus ditemukan tahun 2021 saat ini sudah ditemukan 815 kasus di tahun 2023 dan masih bisa mengalami peningkatan.

Komponen yang menyebabkan keberhasilan pengobatan TB paru (success rate) adalah sebagai berikut :

1. Berhasilnya petugas puskesmas dalam melakukan pendampingan pengawasan minum obat pasien yang ada di layanannya serta terjalin dengan baiknya komunitas atau mitra TBC yaitu ILS (inisiatif lampung sehat) yang kader-kadernya memiliki tupoksi sebagai PMO (Pengawasan Menelan Obat) serta petugas investigasi kontak.
2. Tingkat kepatuhan tinggi pasien pengobatan salah satunya dapat dipengaruhi oleh adanya motivasi. Motivasi dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan berobat penderita.
3. Obat-obatan dan layanan diberikan secara gratis, pusat pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat serta adanya keinginan dari dalam diri untuk sembuh.
4. Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk pengobatan TB, dimana keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggota keluarganya yang sakit.

Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk).

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen infeksius. Target global dan milestone untuk penurunan insiden TBC dan kematian TBC telah ditetapkan sebagai bagian dari SDGs dan End TBC Strategi TBC pada akhir tahun 2030; yaitu penurunan 90% kematian TBC dan 80% penurunan insiden

TBC (kasus baru dan kambuh per 100.000 penduduk per tahun) antara 2015 dan 2030.

5. *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana >80% dari umlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4dosis He p. B, 1 dosis campak), sedangkan indikator penilaian untuk desa UCI adalah BCG, DPT/Hb3, Polio4 dan Campak dimana ke 4 (empat) indikator tersebut angka cakupan desa harus diatas >90% secara Provinsi. Cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 98,9%. Persentase cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 68,9%. Saat ini secara nasional target capaian pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi terus ditingkatkan untuk mencapai target dalam eradikasi, eliminasi dan redukasi hingga mencapai tingkat *Population Immunity* (Kekebalan Masyarakat).

Dalam upaya untuk membebaskan Indonesia dari polio, pemerintah melaksanakan program Eradikasi polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara rutin, pemberian imunisasi massal pada anak Balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis). Angka AFP rate non polio per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 2,7 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dan sudah mencapai target yang ingin dicapai yaitu > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun. Kasus AFP rate tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Grafik 2. 42 Distribusi Penemuan Kasus AFP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022

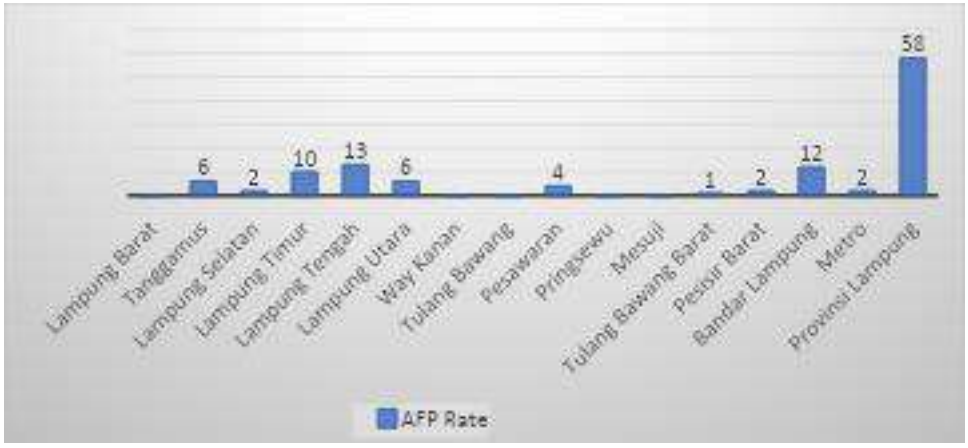

Sumber : Seksi P2PM Dinkes Prov. Lampung, 2022

Penemuan kasus AFP merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan indikator non polio AFP rate > 2 pada anak berusia <15 tahun yang dilaporkan baik puskesmas/masyarakat maupun rumah sakit.

6. Cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)

Untuk menjamin setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana amanat UUD 1945. Dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, Pemerintah memberikan bantuan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemberian bantuan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebelum tahun 2019, Pembiayaan jaminana kesehatan masyarakat miskin dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 melalui kontribusi penerimaan pajak rokok sebesar 37,5%, Pemerintah Provinsi Lampung ikut mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. Pembiayaan JKN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Lampung dialokasikan untuk PBI yang berasal dari narapidana, penghuni panti sosial, guru honor murni SMK/SMA dan membantu pembiayaan PBI masyarakat miskin di Kabupaten/Kota. Sehingga Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi

Lampung meningkat hingga mencapai 75,2 persen, yaitu dari 6.618.935 jiwa pada tahun 2019 menjadi 8.801.766 jiwa di tahun 2023.

Grafik 2. 43 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019-2023

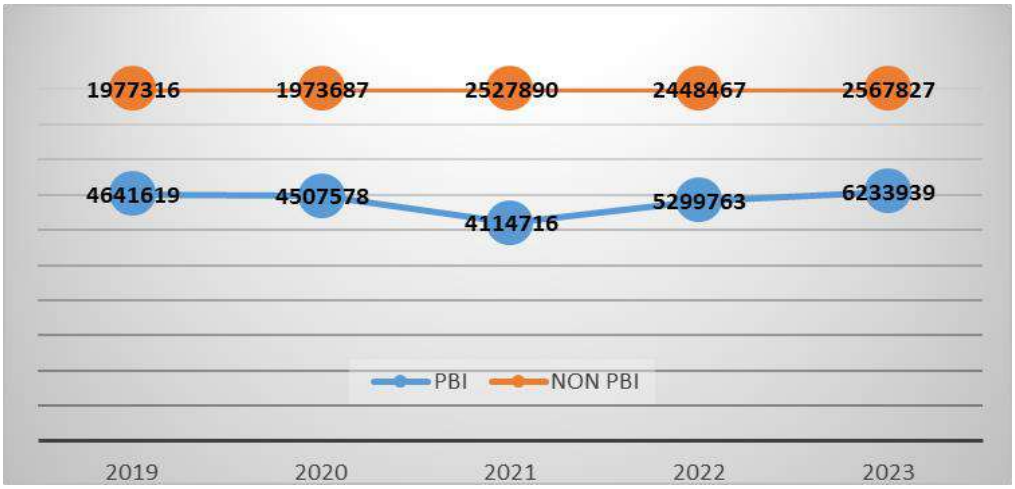

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2023

Dalam rangka mendukung kebijakan jaminan sosial secara nasional, khususnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Provinsi Lampung terus meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam program JKN. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah penduduk Provinsi Lampung yang menjadi Peserta JKN terus mengalami peningkatan, ditahun 2019 sebesar 72,77 persen meningkat menjadi 97,78 persen ditahun 2023. Dengan capaian tersebut Provinsi Lampung menyandang predikat *Universal Health Coverage (UHC)*. Keberhasilan tersebut tidak terlepas partisipasi mandiri dari masyarakat dan dukungan pemerintah baik pusat, daerah dan Kabupaten/Kota.

Grafik 2. 44 Trend Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2019-2023 perbaiki grafik nya range nya 70-100

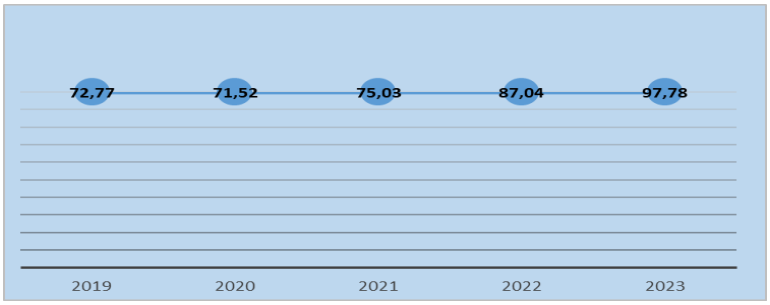

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2023

2.1.4.6 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

A. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat melalui kondisi kesehatan keluarga. Penilaian IKS dilakukan dengan memperhitungkan 12 indikator keluarga sehat, dan hasilnya berupa nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin baik kondisi kesehatan keluarga tersebut. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat apabila memiliki nilai IKS lebih dari 0,8.

Grafik 2. 45 Trend Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Provinsi Lampung Tahun 2018-2024

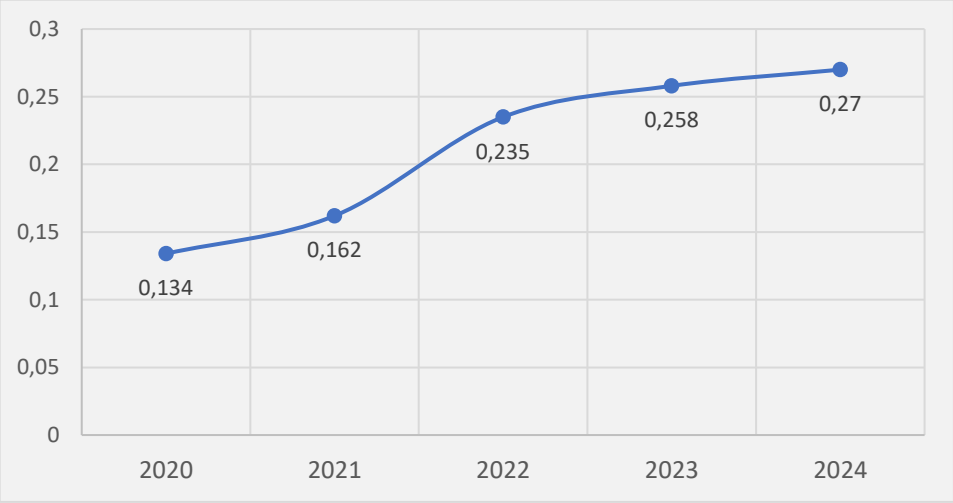

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan grafik terjadi peningkatan IKS secara bertahap dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan tercatat antara tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 0,073 poin, yang menunjukkan adanya percepatan dalam pencapaian indikator-indikator kesehatan keluarga pada periode tersebut. Hal ini dapat diasumsikan sebagai dampak dari intensifikasi program promotif dan preventif pascapandemi COVID-19, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

Pada tahun 2023 dan 2024, peningkatan IKS relatif lebih moderat, masing-masing sebesar 0,023 dan 0,012 poin. Meskipun tren tetap menunjukkan perbaikan, perlambatan ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan strategis ke depan. Indikasi ini dapat mencerminkan tantangan dalam menjangkau kelompok keluarga yang rentan atau berada di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Gambar 2. 52 Grafik Distribusi Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) per Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024

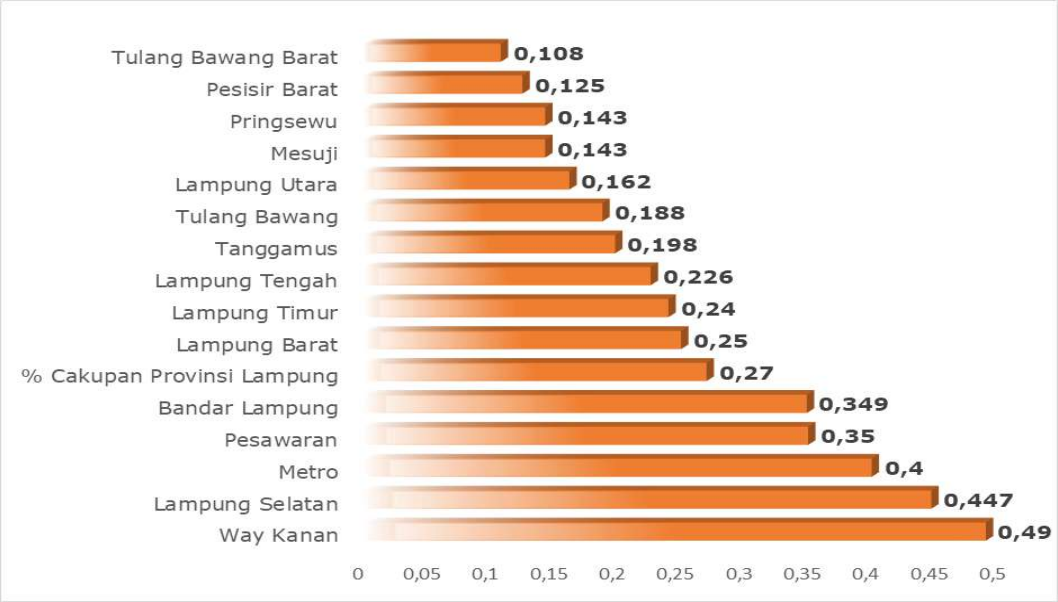

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Nilai IKS Provinsi Lampung tahun 2024 tercatat sebesar 0,27, yang menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pencapaian antarwilayah di dalam provinsi menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Kabupaten Way Kanan mencatatkan IKS tertinggi (0,49), hampir lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan Tulang Bawang Barat (0,108)

Kabupaten dengan IKS di bawah rata-rata provinsi (0,27) seperti Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Utara, Mesuji, Pringsewu, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang Barat perlu menjadi prioritas dalam perencanaan program kesehatan keluarga.

B. Indeks Kualitas Keluarga

Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, peningkatan kualitas keluarga menjadi fondasi yang sangat penting. Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai ruang awal yang membentuk dan memengaruhi kualitas hidup setiap anggotanya. Di dalam lingkungan keluarga inilah nilai-nilai seperti kesetaraan gender mulai diperkenalkan dan ditanamkan, yang kemudian tercermin dalam perilaku anggota keluarga, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia melalui pendekatan berbasis keluarga, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) hadir sebagai alat ukur yang komprehensif. IKK mencakup berbagai dimensi dan indikator yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas kehidupan keluarga dalam rangka mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Grafik 2. 46 Trend Indeks Keluarga Sehat (IKK) (Metadata Baru)

Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

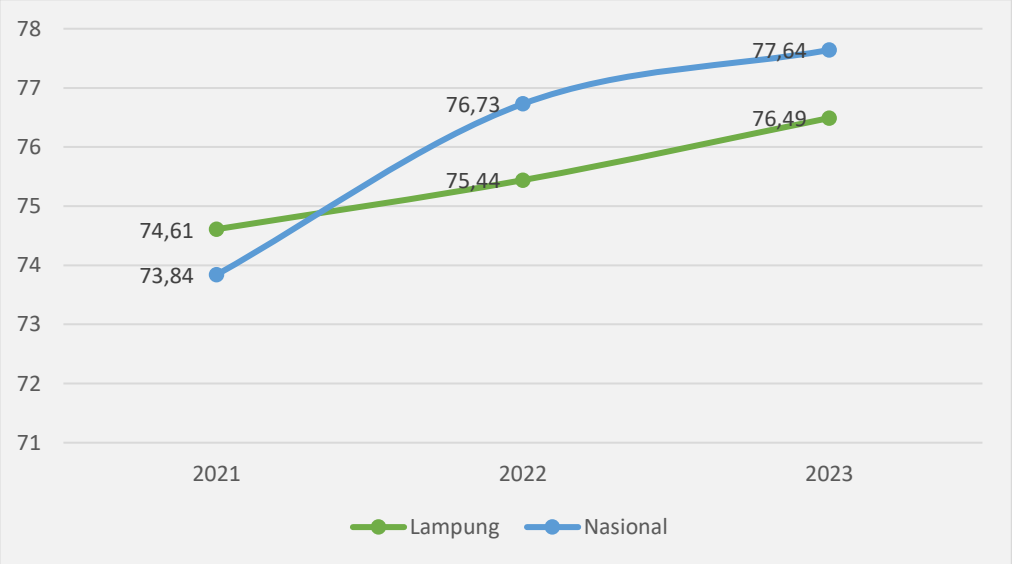

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Indeks Kualitas Keluarga, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun

2021, IKK Lampung tercatat sebesar 74,61, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 73,84. IKK Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, yakni dari angka **75,44** menjadi **76,49**. Meskipun mengalami pertumbuhan positif, capaian IKK Provinsi Lampung tahun 2023 **masih berada di bawah rata-rata nasional**, yang berada pada angka **77,64.**

Data ini menunjukkan bahwa meskipun Lampung mengalami perbaikan dalam kualitas keluarga dari tahun ke tahun, kecepatan peningkatannya masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dan strategis dalam memperkuat dimensi-dimensi yang membentuk kualitas keluarga di Lampung agar dapat sejajar, bahkan melampaui pencapaian nasional di masa mendatang.

Tabel 2. 45 Pencapaian Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

No	Dimensi	2022	2023	Nasional 2023
1	Kualitas Legalitas Struktur (KLS)	89,30	88,33	87,66
2	Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	74,98	76,00	77,38
3	Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	70,08	73,23	74,10
4	Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)	71,27	72,76	76,67
5	Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB)	65,74	66,22	66,23
	IKK	**75,44**	**76,49**	**77,64**

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Indeks Kualitas Keluarga, 2024

Secara umum, tren capaian IKK Provinsi Lampung menunjukkan arah positif, meskipun **masih terdapat beberapa dimensi yang perlu mendapat perhatian khusus**, terutama pada aspek **Ketahanan Sosial-Psikologis dan Sosial-Budaya.**

C. Perlindungan Sosial

Dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang inklusif dan merata, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah telah merancang dan melaksanakan kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan akses yang adil kepada seluruh

lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah secara bertahap melakukan pendaftaran terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya untuk menjadi peserta dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pendaftaran ini dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan.

Dalam hal ini, perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program JKN ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani oleh biaya pengobatan yang tinggi. Pembiayaan ini diberikan oleh pemerintah melalui PBI, yang memastikan bahwa kelompok masyarakat ini tetap terlindungi dalam hal kesehatan meskipun tidak mampu membayar iuran secara mandiri.

Pemberian bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh alokasi pendanaan yang memadai. Selain itu, proses pendaftaran dan verifikasi peserta menggunakan sistem yang mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas unik untuk setiap individu. Sebelum tahun 2019, pembiayaan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dikelola bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di mana masing-masing pihak turut serta dalam pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini.

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dialokasikan untuk sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan, antara lain narapidana, penghuni panti sosial, serta guru honor murni di tingkat SMK/SMA. Selain itu, alokasi pembiayaan ini juga digunakan untuk membantu pembiayaan PBI bagi masyarakat miskin yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, jumlah peserta PBI menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 4,5 juta jiwa pada 2020 menjadi 6,2 juta jiwa pada 2024, meskipun sempat mengalami fluktuasi akibat pemutakhiran data dan penyesuaian DTKS. Sementara itu, peserta Non-PBI juga mengalami pertumbuhan, dari 1,9 juta jiwa pada 2020 menjadi 2,7 juta jiwa pada 2024, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kesehatan mandiri.

Grafik 2. 47 Trend Jaminan Kesehatan PBI Dan Non PBI Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

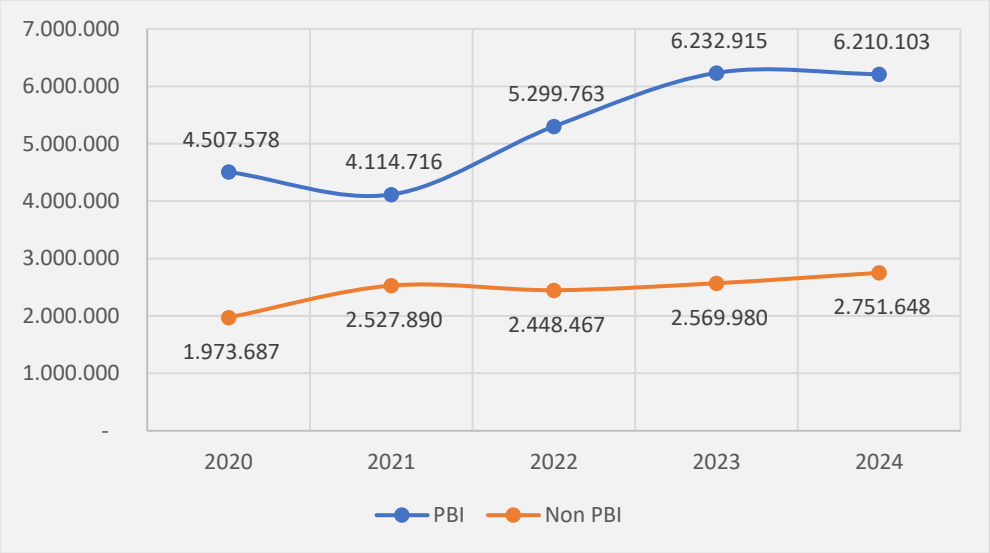

Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, 2025

Tren pertumbuhan peserta JKN di Provinsi Lampung pada periode 2020–2024 menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Terjadi peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam persentase penduduk yang menjadi peserta JKN di Provinsi Lampung. Dimulai dari 71,52% pada tahun 2020, angka tersebut melonjak menjadi 98,39% pada tahun 2024. Lonjakan tertinggi tercatat antara tahun 2021 ke 2022, yaitu peningkatan sebesar 12,01 poin persentase, yang mencerminkan efektivitas berbagai program strategis perluasan kepesertaan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan terkait.

Grafik 2. 48 Trend Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Peserta JKN Tahun 2020-2024

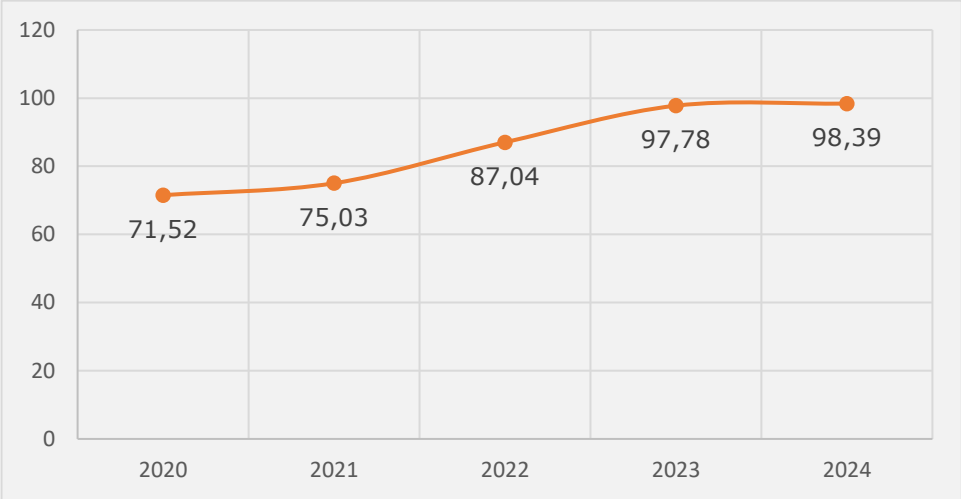

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2025

Dengan pencapaian 98,39% pada tahun 2024, Provinsi Lampung mendekati target *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu seluruh penduduk terdaftar dalam program jaminan kesehatan. Meski target kuantitatif hampir tercapai, fokus perencanaan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan bagi peserta JKN. Ini mencakup upaya penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta penyederhanaan proses administrasi untuk memastikan bahwa kepesertaan yang tinggi sejalan dengan kepuasan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Tabel 2. 46 Coverage Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan	% Coverage Kepesertaan Aktif			
			PU	BPU	Jakon	Total
1	Bandar Lampung	3.942	47,81	12.69	94.67	40.25
2	Metro	806	52,07	22.37	24.96	37.54
3	Tanggamus	474	152.62	6.20	56.68	36.38
4	Lampung Tengah	1.692	69.44	8.53	50.54	32.28
5	Lampung Selatan	1.292	80.52	8.60	12.74	31.24
6	Lampung Utara	589	94.87	5.33	35.80	31.17
7	Tulang Bawang	620	54.12	10.10	43.24	30.90
8	Mesuji	244	69.21	9.26	13.70	29.15
9	Tulang Bawang Barat	309	92.10	5.54	25.85	28.55
10	Pringsewu	464	58.37	6.06	24.76	27.40
11	Pesawaran	293	72.71	7.27	17.02	27.19
12	Lampung Barat	281	107.54	8.45	51.14	26.58
13	Way Kanan	536	56.67	6.30	28.06	24.59
14	Lampung Timur	286	64.23	5.45	12.09	22.57

No	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan	% Coverage Kepesertaan Aktif			
			PU	BPU	Jakon	Total
15	Pesisir Barat	116	76.15	3.03	10.14	19.01
	Total	**11.944**	**66.96**	**7.79**	**36.37**	**30.68**

Sumber : BPS, data diolah, 2025

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 11.944 perusahaan tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan rata-rata tingkat coverage kepesertaan aktif sebesar 30,68%.

Cakupan ini terdiri atas tiga segmen utama, yakni Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi (Jakon). Masing-masing segmen memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam perluasan partisipasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kota Bandar Lampung mencatatkan capaian tertinggi dengan total coverage sebesar 40,25%, didukung oleh jumlah perusahaan yang dominan serta tingginya partisipasi pekerja di sektor jasa konstruksi (94,67%). Meskipun demikian, rendahnya coverage BPU (12,69%) menunjukkan perlunya peningkatan strategi penetrasi terhadap pekerja sektor informal.

Kota Metro menyusul dengan capaian 37,54%, dan dinilai cukup baik dalam menjangkau pekerja informal, ditandai dengan tingkat kepesertaan BPU sebesar 22,37%. Sementara itu, Kabupaten Tanggamus menempati posisi ketiga dengan coverage 36,38%, meskipun terdapat kejanggalan pada data PU yang mencapai 152,62%, yang mengindikasikan perlunya validasi data lebih lanjut.

Beberapa kabupaten masih menunjukkan capaian kepesertaan yang rendah diantaranya, Kabupaten Pesisir Barat dengan coverage hanya 19,01%, dan tingkat kepesertaan BPU serta Jakon yang sangat rendah; Kabupaten Lampung Timur dengan coverage 22,57%, serta angka BPU hanya 5,45%, menunjukkan terbatasnya penetrasi program pada pekerja informal; Kabupaten Way Kanan yang juga mencatat coverage 24,59%, dengan keterbatasan partisipasi di seluruh segmen.

Tabel 2. 47 Tabel Realisasi dan Target Coverage Kepesertaan Jamsostek Tahun 2023-2025 Wilayah Sumatera

No	Provinsi	Tahun					
		2023		2024		Target 2025	
		(%)	orang	(%)	orang	(%)	orang
1.	Aceh	29,54	460.159	32,44	555.985	43,54	820.761
2.	Sumatera Utara	41,31	1.964.263	46,80	2.447.853	51,08	3.021.682
3.	Sumatera Barat	37,09	643.738	42,16	804.901	48,81	1.024.975
4.	Riau	39,16	874.811	49,16	1.207.961	55	1.486.812
5.	Kepulauan Riau	48,87	407.698	79,47	729.265	80,63	813.890
6.	Jambi	26,83	515.172	53,06	661.112	55,36	857.224
7.	Sumatera Selatan	32,34	877.330	37,58	616.065	49,46	1.623.316
8.	Kep. Bangka Belitung	40,43	207.557	50,83	272.797	55,17	344.868
9.	Lampung	26,83	732.922	32.62	930.059	38,39	1.149.447
10.	Bengkulu	34,80	220.750	39,71	302.843	48,24	395.194

Sumber : Hasil pembahasan dalam Rakortekbang Tahun 2024, Bappeda Provinsi Lampung

Kondisi Lampung dalam pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan yang stabil. Meskipun kenaikan targetnya tidak setinggi provinsi lain di Sumatera, Lampung tetap memiliki kesempatan besar untuk memperluas cakupan program ini, terutama dengan fokus pada sektor informal dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial.

Realisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 Provinsi Lampung sebesar 26,83 persen dengan jumlah 732.922 orang. Di tahun 2024 Target kepesertaan meningkat menjadi 32,62 persen (930.059 orang), yang menunjukkan kenaikan sekitar 5,79 persen dalam jumlah orang yang terdaftar. Kemudian di tahun 2025 ditargetkan sebesar **38,39%** (1.149.447 orang) dengan peningkatan sebesar 5,77 persen.

2.1.4.7 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal.

Persentase tenaga kerja yang tidak pernah sekolah / tidak tamat sekolah di Provinsi Lampung, baik tenaga kerja perempuan maupun laki laki di perkotaan maupun pedesaan, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019. Sedangkan persentase tenaga kerja yang lulus sekolah dasar, SMP, SMA dan sekolah tinggi di Provinsi Lampung Tahun 2020 mengalami peningkatan dari Tahun 2019.

Tingkat Pendidikan tenaga kerja.

Berdasarkan data Sakernas Februari 2024, Tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi penduduk yang tamat SD dan SMP, yaitu mencapai 63,41 persen. Sekitar 8,67 persen pekerja yang pernah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Gambar 2. 53 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung, Februari 2022-Februari 2024

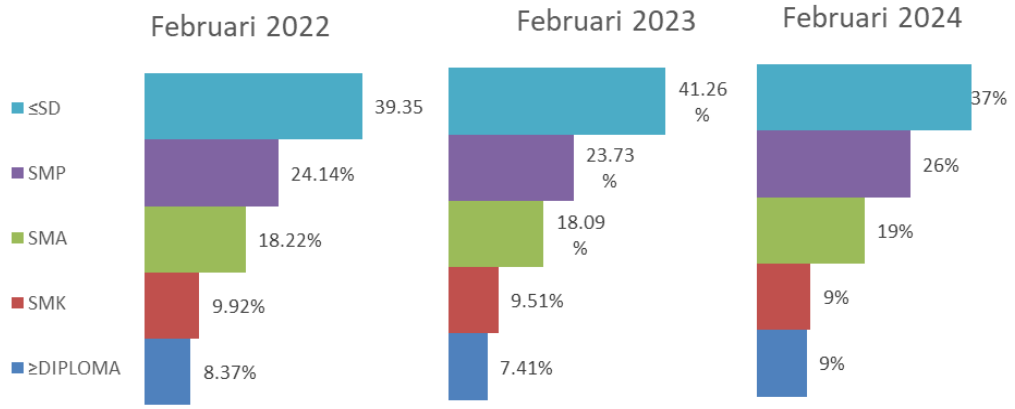

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung, 2025

Setelah melalui masa bonus demografi, suatu negara akan memasuki era *aging population,* dimana terjadi peningkatan proporsi penduduk usia tua dari total penduduk suatu negara. Di Indonesia era bonus demografi diperkirakan hanya mencapai tahun 2035, hanya kurang dari 15 tahun lagi. Dimulainya penuaan populasi tercermin dari meningkatnya proporsi

angkatan kerja dengan usia diatas 40 tahun. Data tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa penduduk Lampung sudah mulai memasuki *aging population*. Proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas di Provinsi Lampung terjadi peningkatan selama kurun waktu 2020-2023 Pada tahun 2023, proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas mencapai 47.47 persen. Setelah 2 (Dua) tahun berjalan, proporsi angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 42.15 persen. Sedangkan proporsi angkatan kerja usia 20-39 tahun terjadi penurunan dari persen menjadi 41.05persen.

Gambar 2. 54 Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur 2023-2029

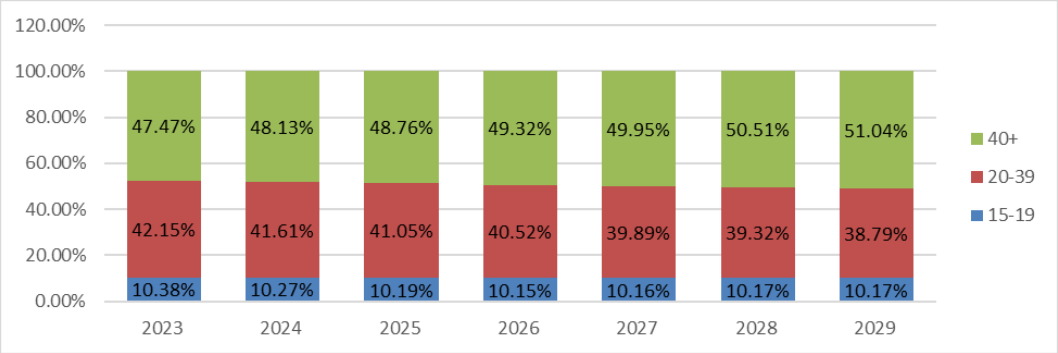

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2035

Tingkat Pengangguran berdasarkan tingkat Pendidikan. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi menganggur akibat tidak kompeten dalam dunia kerja yang di bidanginya. Tidak hanya teori yang dibutuhkan dalam dunia kerja, akan tetapi skill dan kemampuan teknologi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan karir. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Lampung menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan terdapat pada jenjang pendidikan SMK, yaitu mencapai 9,21 persen. Diikuti lulusan SMA dengan TPT sebesar 6,97 persen. Pengangguran yang cukup tinggi juga dialami oleh lulusan diploma dan perguruan tinggi, yaitu berkisar 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar persaingan dalam dunia kerja.

Gambar 2. 55 TPT Provinsi Lampung menurut Tingkat Pendidikan, 2024

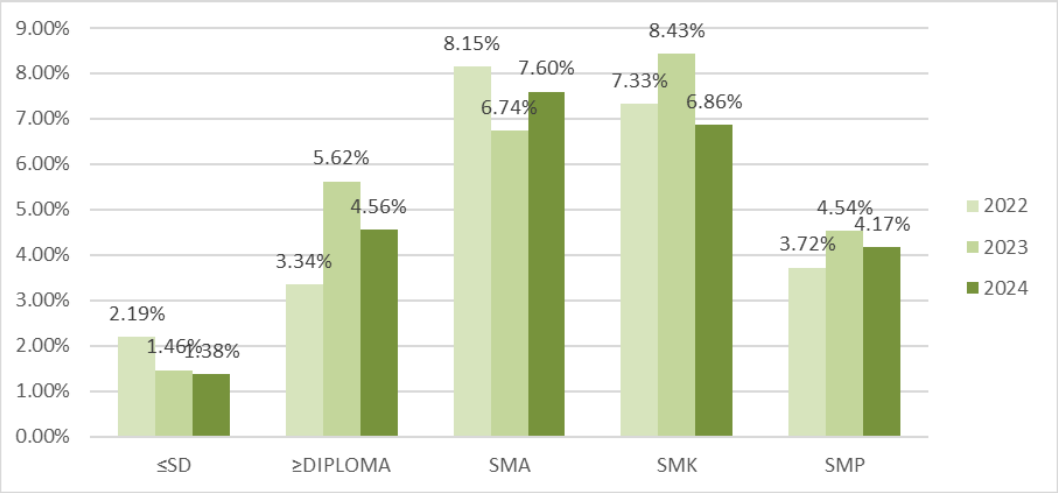

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung, 2024

Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Tingkat setengah penganggur di Provinsi Lampung berdasarkan Sakernas Agustus 2024, mencapai 9.63 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar sembilan orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,12 persen poin

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah tempat tinggal, pada Agustus 2024, jumlah setengah penganggur di perkotaan mencapai 5.33 persen, sementara di perdesaan sebanyak 3.54 persen. Pada periode Agustus 2024 menunjukan adanya peningkatan jumlah setengah penganggur, pada laki-laki yaitu sebanyak 0,28 persen, dan perempuan mengalami penurunan sebesar -0.66. Jumlah setengah penganggur di perkotaan mengalami penurunan sebesar -0,38 persen dan di perdesaan mengalami peningkatan yaitu 0,09 persen.

Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota

Setiap perusahaan dalam menetapkan perhitungan gaji karyawannya, harus berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan satu kali dalam setahun oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, dan sedangkan Pemerintah Provinsi menetapkan Upah

Minimum Provinsi (UMP). UMP Provinsi Lampung dan UMK di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selalu meningkat tiap tahunnya. UMK tertinggi pada Tahun 2020 berada di Kota Bandar Lampung yaitu Rp. 2.653.222,-, sedangkan UMP Provinsi Lampung pada Tahun 2020 yaitu Rp. 2.432.001,- yang jumlahnya sama dengan UMK terendah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi

Penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Februari 2024 masih di dominasi oleh pekerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama sebesar 1.276.043 orang, disusul oleh kategori pekerja dengan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar sebesar 1.233.377 orang. Pekerja dengan Pendidikan terakhir yang ditamatkan dari Universitas masih berkisar di angka 6,9 persen dari total jumlah pekerja di tahun 2024. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja yang sebesar 4,8 juta orang.

Tabel 2. 48 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Februari 2024)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	4.676
2	Tidak/Belum Tamat SD	552.681
3	Sekolah Dasar (SD)	1.233.377
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.276.043
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	901.327
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	448.957
7	Diploma (I/II/III)	85.043
8	Universitas	334.230
Jumlah		4.836.334

Sumber : BPS Indonesia, 2024

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, Sebagian besar penduduk bekerja adalah pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,19 persen dari jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja, diikuti dengan jumlah penduduk yang bekerja pada perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 17,92 persen.

Tabel 2. 49 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Februari 2024)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah
A	Pertanian, kehutanan, perikanan	2.233.849
B	Pertambangan dan penggalian	15.572
C	Industri pengolahan	421.695
D	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, steam dan air	2.703
E	Treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi	11.753
F	Konstruksi	228.518
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	866.799
H	Pengangkutan dan pergudangan	171.023
I	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	213.947
J	Informasi dan komunikasi	66.430
K	Aktivitas keuangan dan asuransi	22.511
L	Real estate	3.560
M,N	Aktivitas professional dan perusahaan	40.156
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	144.644
P	Pendidikan	230.507
Q	Aktivitas Kesehatan dan kegiatan sosial	51.651
R,S,T,U	Aktivitas jasa lainnya	111.016
Jumlah		4.836.334

Sumber : BPS Indonesia, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, jumlah penduduk umur 15 tahun yang termasuk angkatan kerja mencapai 4.904,90 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 543,05 ribu orang selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel 2. 50 Status Ketenagakerjaan

Status Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	4.489,68	4.494,95	4.595,93	4.904,90	4.996,75
TPAK	70,16	69,35	70,06	70,04	70,41
1. TPAK Perempuan	54,13	52,36	53,54	52,01	54,58
2. TPAK Laki-Laki	85,41	85,55	85,84	87,30	85,61

Sumber : BPS, 2024

Sementara itu, TPAK selama periode Agustus 2020 sampai Agustus 2024 mengalami penurunan dari 70.16 di Agustus 2020 menjadi 70,41 di Agustus 2024, penurunan tertinggi terdapat di tahun 2021 pada angka 69,35. Hal yang sebaliknya terjadi, jumlah penduduk usia kerja selama periode 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dilihat menurut jenis kelamin, menunjukan TPAK Laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK Perempuan. Di Agustus 2023 TPAK Laki-Laki mencapai 85.61 sementara TPAK perempuan hanya sebesar 54.58. Dalam periode Agustus 2020 sampai Agustus 2024, TPAK Perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen poin. Sedangkan TPAK Laki-laki mengalami peningkatan sedikit lebih tinggi yaitu 0.2 persen poin. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pada Agustus 2024 untuk TPAK perempuan dari 100 penduduk usia kerja perempuan terdapat sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja.

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 penyandang disabilitas fisik dan mental adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran atau kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental dan tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan wajar.

Tabel 2. 51 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Ragam Disabilitas	Jumlah
Disabilitas Fisik	497
Disabilitas Ganda	8
Disabilitas Mental	13
Disabilitas Sensorik	418
Disabilitas Intelektual	8
Total	944

Sumber : Satu Data Kemnaker, 2025

Secara Nasional, Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa untuk penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, penempatan tertinggi adalah pada disabilitas fisik tengan total 497 orang. Diikuti oleh tenaga kerja disabilitas sensorik dengan total 418 orang. Di tahun 2024 telah ditempatkan sebanyak 44 tenaga kerja penyandang disabilitas diantaranya 33 orang laki-laki dan 11 orang Perempuan.

Tabel 2. 52 Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja Disabilitas		Total Tenaga Kerja Disabilitas
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bandar Lampung	9.004	15	15	30
2	Lampung Selatan	2.940	-	-	-
3	Tanggamus	1.056	1	-	1
4	Metro	1.598	4	2	6
5	Lampung Tengah	2.865	4	1	5
6	Lampung Timur	2.558	-	-	-
7	Lampung Utara	1.550	17	5	22
8	Lampung Barat	635	-	-	-
9	Tulang Bawang	1.178	11	14	25
10	Way Kanan	1.163	-	-	-
11	Pesawaran	905	4	1	5
12	Tulang Bawang Barat	477	-	-	-
13	Mesuji	737	6	-	6
14	Pringsewu	1.562	-	-	-
15	Pesisir Barat	336	-	-	-
	Jumlah	28.564	62	38	100

Sumber : Disnaker Provinsi Lampung, 2023

Jumlah tenaga kerja disabilitas di tahun 2023 sebesar 100 orang yang tersebar di sejumlah perusahaan di Provinsi Lampung, dengan jumlah terbesar terdapat di kota Bandar Lampung. Tenaga kerja disabilitas yang telah tersebar di seluruh perusahaan di Provinsi Lampung sebagian besar tenaga kerja disabilitas laki-laki dengan jumlah sebesar 62 orang dan tenaga kerja disabilitas perempuan sebesar 38 orang.

2.1.4.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dilakukan dengan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Berdasarkan data kekerasan yang ditangani pada UPTD PPA, maka jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terjadi

peningkatan, dari tahun 2020 sebanyak 146 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 118 korban dan jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 28 orang meningkat menjadi 171 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 127 korban dan jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 44 kasus.

Grafik 2. 49 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung

Gambar 2. 56 Tahun 2020-2024

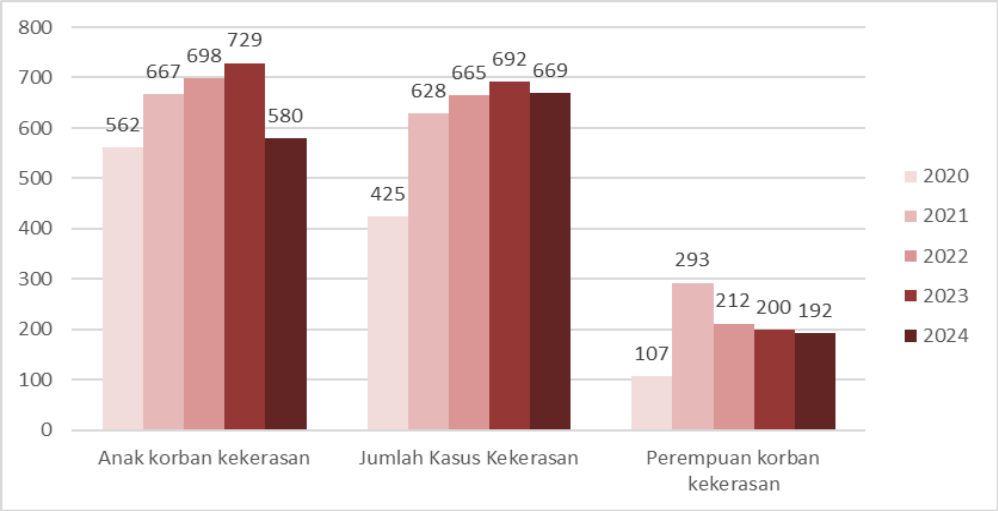

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)

Dari data terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dewasa pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan dan jumlah kasus kekerasan pada anak lebih banyak dari kasus kekerasan pada perempuan serta mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena posisi anak yang lemah sehingga mudah sekali menjadi korban kekerasan baik oleh pihak luar maupun oleh pihak keluarga terdekat.

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan target seluruh kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Lampung tertangani (100 persen).

Grafik 2. 50 Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

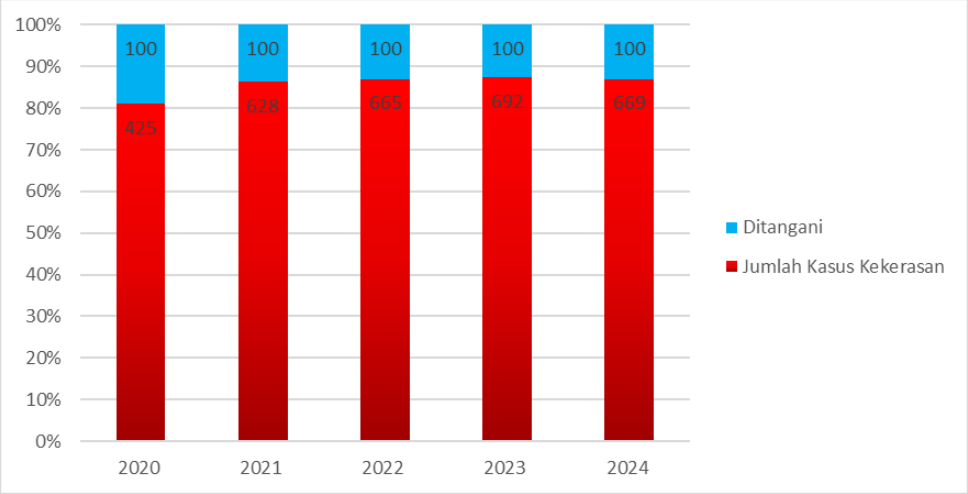

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2025

2.1.4.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar memiliki peran penting dalam pembangunan dengan cakupan aspek penduduk beserta dinamikanya. Situasi kependudukan yang terdiri dari kondisi jumlah penduduk, struktur, persebaran dan pertumbuhan penduduk sangat berdampak terhadap aspek pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya.

Gambaran perkembangan penduduk dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu: kuantitas, kualitas maupun mobilitas atau pertumbuhan yang terdiri dari kelahiran, kematian dan migrasi. Pada komposit kuantitas penduduk dapat dilihat komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk berdasarkan karakteristik demografi.

Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 9.176.546 jiwa (2022) menjadi 9419.58 ribu jiwa. Adapun distribusi penduduk per kabupaten/kota terbanyak di tahun 2024 terdapat di Lampung Tengah (1.525.09 ribu jiwa), Bandar Lampung (1214.33 ribu jiwa), Lampung Timur (1153.77 ribu jiwa) dan Lampung Selatan (1119.31 ribu jiwa), artinya 53 persen dari jumlah penduduk Provinsi Lampung bertempat di 4 (empat) wilayah tersebut.

Tabel 2. 53 Data Kependudukan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk (persen)	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin
Pesisir Barat	172.32	1.45	1.83	57.56	107.53
Metro	175.71	1.03	1.87	2400.08	100.83
Mesuji	241.6	1.51	2.56	109.79	105.62
Tulang Bawang Barat	298.7	1.08	3.17	233.1	103.69
Lampung Barat	315.92	1.12	3.35	149.3	106.94
Pringsewu	424.68	1.16	4.51	690.57	105.01
Tulang Bawang	450.34	1.16	4.78	144.92	106.13
Way Kanan	497.26	1.23	5.28	140.82	104.43
Pesawaran	500.3	1.17	5.31	390.98	105.43
Lampung Utara	659.89	1.04	7.01	248.42	103.24
Tanggamus	670.37	1.15	7.12	231	106.63
Lampung Selatan	1119.31	1.27	11.88	504.46	104.07
Lampung Timur	1153.77	0.96	12.25	298.33	103.04
Bandar Lampung	1214.33	1.02	12.89	6609.68	103.53
Lampung Tengah	1525.09	1.10	16.19	335.26	103.93
Provinsi Lampung	9419.58	1.12	100	280.55	104.33

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator utama dalam pengendalian penduduk, pada periode 2020-2024 sebesar 1,12 persen, dengan penduduk Lampung sebanyak 9,419.58 juta jiwa menunjukkan bahwa jumlah penduduk Lampung bertambah 105,59 ribu jiwa selama setahun terakhir. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk ini karena saat ini Lampung memasuki struktur penduduk usia tua (Ageing Population).

Jumlah penduduk yang sangat besar juga perlu diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, hal ini akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya dengan kualitas penduduk yang rendah dapat menjadi beban dalam pembangunan. Komponen kualitas penduduk ini dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah sosial,

ekonomi, budaya, politik, lingkungan, SDA. Pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui program keluarga berencana.

Kelahiran penduduk (Total Fertility Rate/angka kelahiran total) sebagai ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas, menjadi salah satu faktor bertambahnya jumlah penduduk. Penghitungan TFR ini diukur berdasarkan jumlah kelahiran hidup bayi berbanding tiap 1.000 penduduk. Berdasarkan data hasil pemutakhiran pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN, bahwa pada kurun waktu 2020-2023 angka TFR terus menurun dari 2,81 (2020) menjadi 2,21 (2023), namun capaian 2023 ini masih di atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,14. Dari Tabel berikut dapat dilihat bahwa rata-rata anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya masih sebanyak 2 anak.

Grafik 2. 51 Perkembangan TFR Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

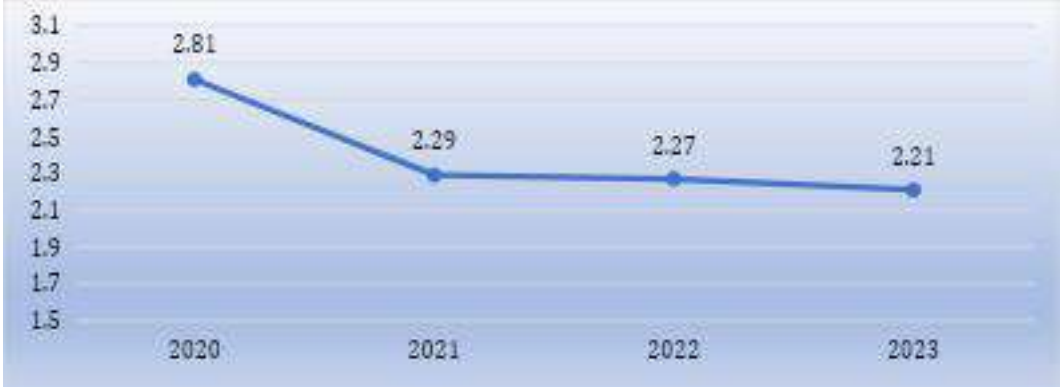

Sumber: BKKBN Provinsi Lampung, 2024

Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu (Age Spesific Fertility Rate atau ASFR) menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur tertentu per 1000 perempuan. Tren angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun (menikah di bawah umur) pada tahun 2019-2023 di Provinsi Lampung masih berfluktuasi, pada tahun 2023 sebesar 19,3 persen, menurun sebesar 3,9 persen dari tahun 2022.

Grafik 2. 52 Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

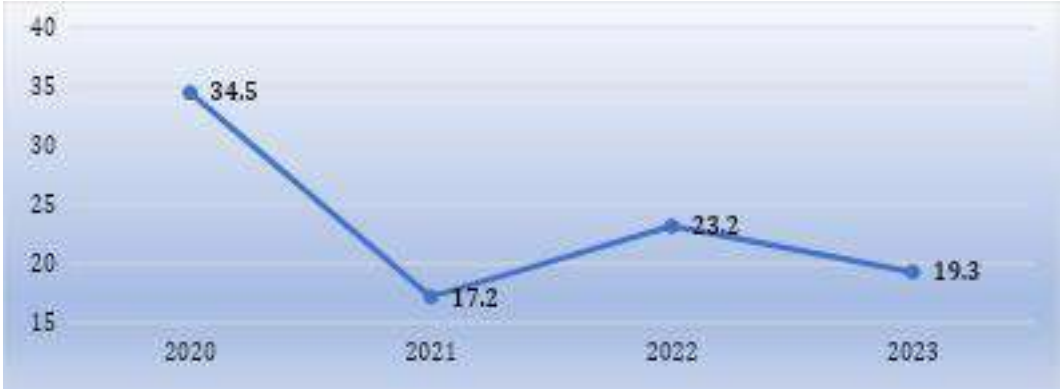

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Upaya pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana telah meningkatkan sebesar 0,2 persen. Persentase pengguna alat kontrasepsi dalam ber KB tahun 2023 sebesar 64,11 persen, dengan pemakaian kontrasepsi terbanyak adalah jenis suntik.

Grafik 2. 53 Persentase Perempuan usia 15-49 tahun yang Menggunakan Alat KB

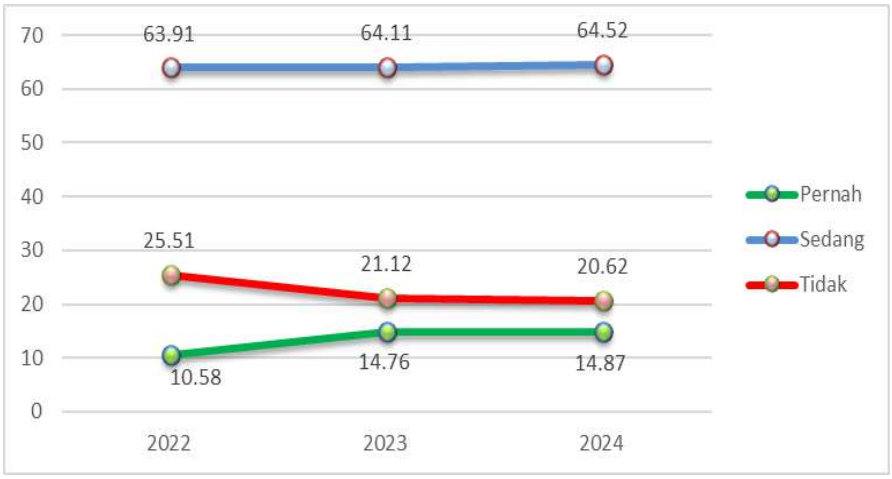

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Unmet Need sebagai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Dengan rendahnya angka unmet need maka capaiannya semakin bagus. Tahun 2023 capaian unmet need Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 9,64 lebih baik

dari tahun sebelumnya sebesar 20,69, dan capaian ini telah memenuhi target sebesar 12,68.

2.1.4.10 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Untuk menciptakan kewirausaan inklusif untuk pemuda maka adanya gagasan pemuda wirausaha kerah putih yaitu pemuda bekerja dengan status berusaha sendiri yang dibantu buruh tidak tetap dan buruh tetap. Berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda di Provinsi Lampung mencapai 11,10 persen, artinya terdapat 11 orang pemuda dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Berdasarkan data IPP Indonesia, presentase pemuda wirausaha kerah putih di Provinsi Lampung tahun 2022 hanya sebesar 0,57 persen, meningkat hanya 0,43 persen dari 2021, sedangkan angka ideal pemuda wirausaha kerah putih sebesar 2 persen.

Grafik 2. 54 Trend capaian Pemuda Wirausaha Kerah Putih dan Tingkat Pengangguran Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik dan IPP Nasional, 2023

Pemuda aktif dalam organisasi dan Kemasyarakatan

Capaian pemuda Provinsi Lampung yang memberikan saran/pendapat mengalami penurunan, dimana tahun 2019 sebesar 4,84 persen menjadi 3,75 persen ditahun 2022. Rendahnya pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat/kegiatan dikarenakan pemuda belum dianggap sebagai sumber

daya manusia yang potensial, akses dan mekanisme partisipasi yang belum memadai serta kurangnya kepedulian pemuda terhadap pembangunan. Pemuda yang aktif dalam organisasi di Provinsi Lampung masih sangat kurang, pada tahun 2022 sebesar 4,2 persen, angka ini menurun dari capaian tahun 2019 sebesar 5,79. Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 85,17 persen menjadi 71,38 persen di tahun 2022.

Grafik 2. 55 Trend Peran Aktif pemuda dalam organisasi dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022

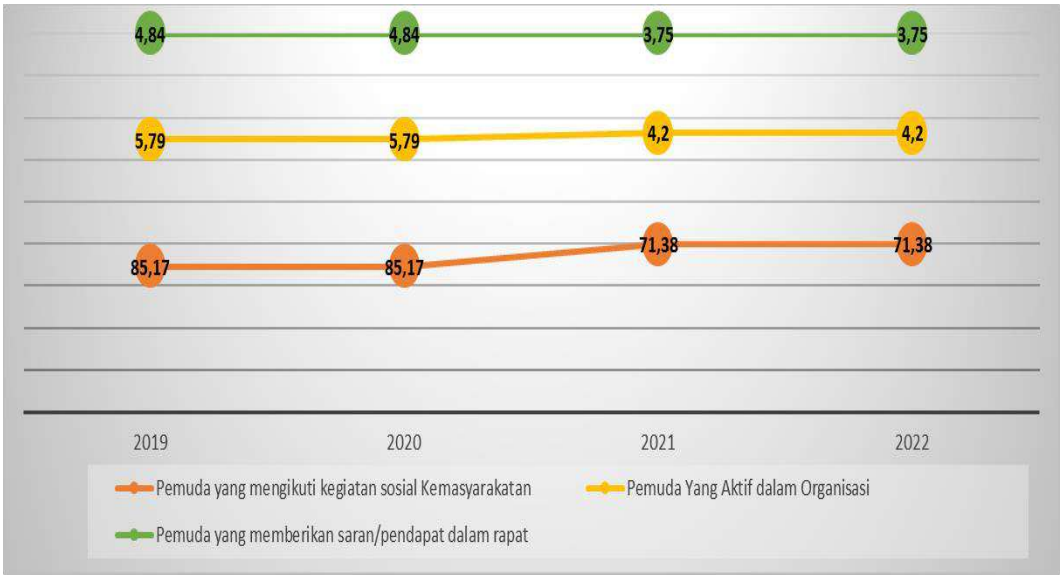

Sumber : IPP Indonesia, 2023

Pemuda Berprestasi

Pemuda berprestasi adalah pemuda yang berhasil mencapai suatu prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang ditekuni sehingga patut dibanggakan. Pemuda berprestasi di Provinsi Lampung dari tahun 2019 -2023 mengalami penurunan, dimana tahun 2019 sebesar 67,06 persen menurun sebesar 17,06 persen ditahun 2023. Penurunan prestasi tersebut dikarenakan penyesuaian dari pasca pandemi covid.

Grafik 2. 56 Trend Capaian Pemuda Berprestasi di Provinsi Lampung

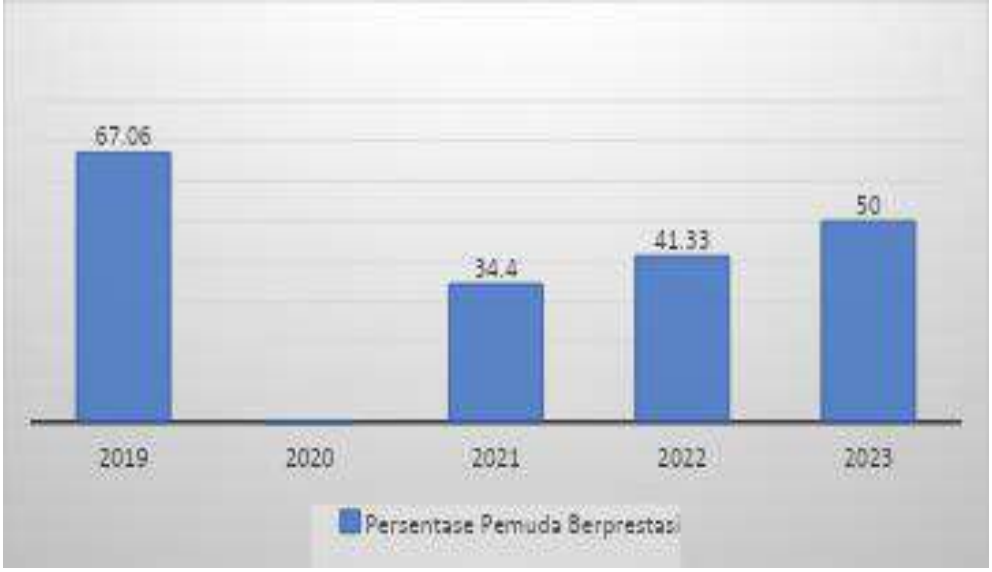

Sumber: Laporan Dispora Provinsi Lampung, 2023

Atlet Pelajar yang berprestasi ajang Nasional

Pembibitan dan pembinaan olahraga pelajar yang harus dilaksanakan dengan konsisten. Melalui kegiatan pertandingan tingkat daerah diberharap akan terjaring bibit-bibit potensial atlet pelajar berbakat yang akan dibina lebih lanjut, agar dapat berprestasi diajang nasional. Prestasi pelajar tingkat nasional Provinsi Lampung terus menunjukan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 42 persen, meningkat menjadi 55,87 persen ditahun 2023, namun ditahun 2020 tidak mengirimkan atlet pelajar dikarenakan pandemic covid.

Grafik 2. 57 Trend Atlet Pelajar Berprestasi tingkat Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

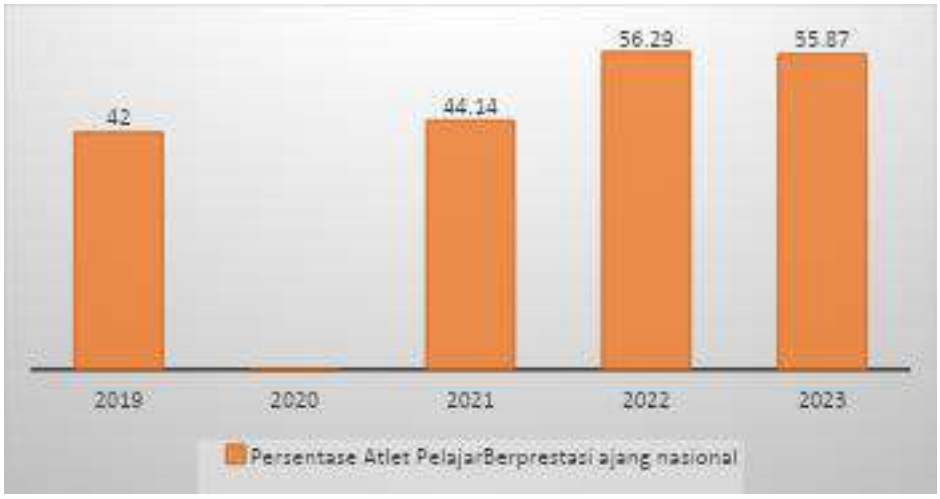

Sumber : Laporan Dispora, 2023

2.1.4.11 Perpustakaan

Dalam pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat digunakan indikator indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir sangat berfluktuatif, dengan capaian di tahun 2023 sebesar 55,35 persen dengan katagori sedang dan angka ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 55,99 persen. Indikator-indikator penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencakup pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kualitas sumber daya tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, dan keterlibatan serta jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan berbasis SNP juga menjadi salah satu indikator yang dinilai dan belum banyak OPD yang punya perpustakaan, beberapa sekolah juga belum punya, termasuk perpustakaan di tingkat desa (belum seluruhnya memiliki.

Gambar 2. 57 Trend Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

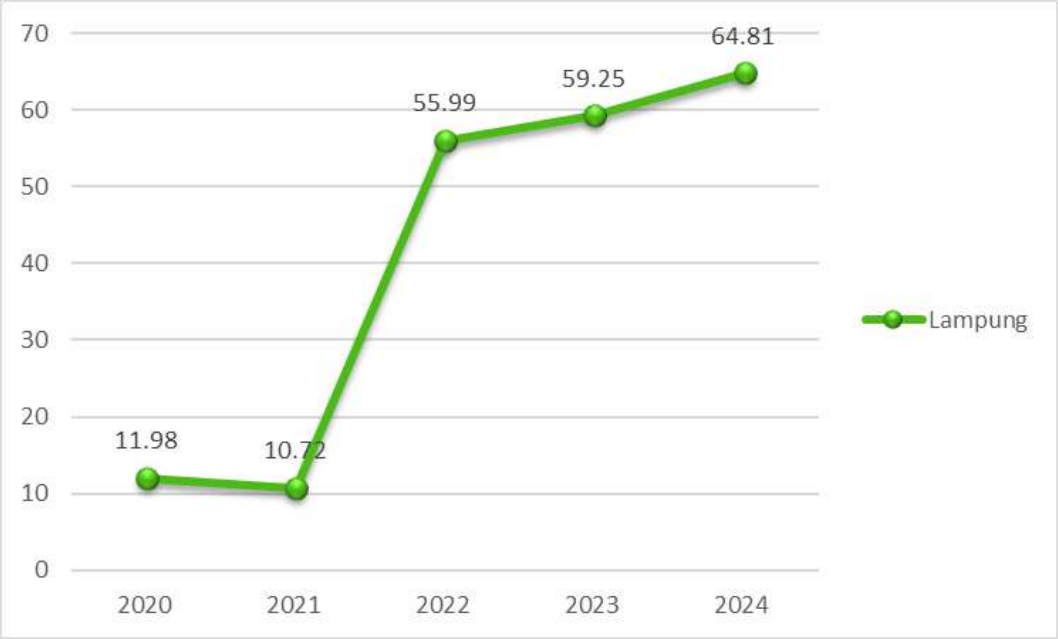

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2025

Provinsi Lampung terus mengupayakan strategi peningkatan literasi dilaksanakan melalui pembudayaan literasi keluarga, satuan pendidikan, dan pembudayaan literasi masyarakat. Sinergi lintas pemangku kepentingan

sangat diperlukan dalam peningkatan budaya literasi. Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang daerah dengan melaksanakan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif.

Salah satu upaya meningkatkan literasi masyarakat adalah meningkatkan pengunjung perpustakaan yang telah mendaftar jadi anggota perpustakaan baik secara online maupun offline yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota perpustakaan. Capaian pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2019 sebesar 9,3 persen meningkat menjadi 77,4 persen dengan rata-rata peningkatan sebesar 11 persen setiap tahunnya,

Grafik 2. 58 Persentase Pengunjung Perpustakaan yang menjadi Anggota Perpustakaan Tahun 2019 - 2023

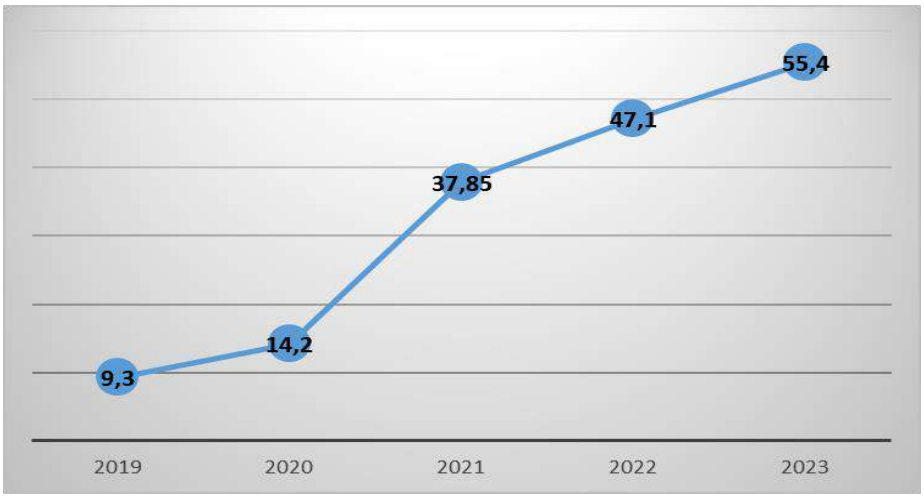

Sumber : Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Lampung

2.1.4.12 Transmigrasi

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah telah menetapkan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang tersebar seluruh Indonesia (kecuali provinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa). Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan program transmigrasi yang ditujukan ke daerah/lokasi sebagaimana telah ditetapkan pemerintah pusat dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Jumlah Transmigran yang Dikirim Ke Luar Provinsi Lampung Tahun 2022-2023

DAERAH YANG DITUJU	JUMLAH	TAHUN
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe)	5 KK (22 jiwa)	2022
Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa)	9 KK (33 jiwa)	2022
Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju Tengah)	9 KK (30 jiwa)	2022
Provinsi Sulawesi Selatan (Desa Mahalona, Kabupaten Luwu Timur)	14 KK (37 jiwa)	2022 dan 2023

Sumber: Dinas PMDT, 2023

Kebijakan transmigrasi sempat tersendat pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan dibatasinya mobilisasi penduduk sehingga pelaksanaan transmigrasi baru kembali terlaksana di tahun 2022 dan 2023. Adanya kebijakan transmigrasi ini diharapkan akan medukung percepatan pertumbuhan multidimensi pada seluruh aspek pembangunan meliputi sosial, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan transmigrasi di Provinsi Lampung mengalami perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Mesuji dan hasilnya akan dapat berdampak terhadap peningkatan indikator kesejahteraan desa pada jenjang Mandiri yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah sekitarnya.

2.1.5 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

2.1.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat

dimodelkan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

Daya Dukung Air

Dilihat dari jumlah kebutuhan total air sebesar 19.017.149.319,12 m^3/tahun, sedangkan jumlah ketersediaan sumber daya air sebesar 32.633.644.484,59 m^3/tahun, dengan selisih 13.616.495.165,47 m^3/tahun. Yang artinya kondisi DDDTLH air di Provinsi Lampung Belum Terlampaui dimana ketersediaan sumber daya air lebih besar dibandingkan kebutuhan.

Tabel 2. 55 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Provinsi Lampung

Kabupaten / Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Total	Selisih	Ambang Batas Populasi	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
	m^3/tahun						Belum Terlampaui	Terlampaui	
Kota Bandar Lampung	102.803.980,7	45.918.784,4	100.750.608,0	146.669.392,4	43.865.411,7	102.803.980,7	1.945,7	16.418,4	18.364,1
Kota Metro	86.502.933,8	71.638.715,1	14.573.520,0	86.212.235,1	290.698,7	108.128,7	3.831,7	3.405,9	7.237,6
Lampung Barat	1.804.273.400,8	1.101.907.937,7	26.139.024,0	1.128.046.961,7	676.226.439,2	2.255.341,8	196.370,9	15.581,8	211.952,7
Lampung Selatan	1.657.747.426,6	1.398.648.426,2	91.934.438,4	1.490.582.864,6	167.164.562,0	2.072.184,3	136.476,2	85.761,1	222.237,3
Lampung Tengah	5.240.695.972,0	2.770.025.963,7	126.179.510,4	2.896.205.474,1	2.344.490.497,9	6.550.870,0	406.915,6	47.863,0	454.778,6
Lampung Timur	4.049.215.216,2	1.739.864.240,3	95.970.182,4	1.835.834.422,7	2.213.380.793,5	5.061.519,0	318.012,1	68.776,0	386.788,1
Lampung Utara	2.609.602.388,7	1.375.055.679,1	54.751.420,8	1.429.807.099,9	1.179.795.288,8	3.262.003,0	258.374,6	7.156,0	265.530,6
Mesuji	1.657.079.110,7	1.593.104.004,0	19.651.852,8	1.612.755.856,8	44.323.253,9	2.071.348,9	110.769,8	108.555,8	219.325,6
Pesawaran	960.279.706,4	776.473.942,9	41.247.360,0	817.721.302,9	142.558.403,5	1.200.349,6	82.870,3	45.141,4	128.011,7
Pesisir Barat	2.760.643.022,1	785.947.396,4	14.058.403,2	800.005.799,6	1.960.637.222,5	3.450.803,8	285.721,7	13.480,9	299.202,6
Pringsewu	484.604.943,1	515.392.401,2	35.035.027,2	550.427.428,4	65.822.485,2	605.756,2	32.177,6	29.363,4	61.541,0
Tanggamus	2.155.321.986,6	1.543.916.472,8	55.387.238,4	1.599.303.711,2	556.018.275,4	2.694.152,5	214.294,2	75.899,2	290.193,4
Tulang Bawang	3.355.710.830,7	2.196.144.327,0	37.168.156,8	2.233.312.483,8	1.122.398.346,9	4.194.638,5	251.420,7	58.699,1	310.119,8
Tulang Bawang Barat	1.322.846.444,4	733.352.930,7	24.731.481,6	758.084.412,3	564.762.032,0	1.653.558,1	118.641,8	9.545,6	128.187,4

Kabupaten / Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Penggunaan Lahan	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Total	Selisih	Ambang Batas Populasi	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
	m^3/tahun						Belum Terlampaui	Terlampaui	
Way Kanan	3.587.724.818,9	2.051.735.684,7	40.962.067,2	2.092.697.751,9	1.495.027.067,0	4.484.656,0	344.444,4	7.934,0	352.378,4
Jumlah	31.835.052.182,0	18.699.126.906,3	778.540.291,2	19.477.667.197,5	12.357.384.984,4	39.793.815,2	2.762.267,3	593.581,6	3.355.848,9

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2. 58 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Lampung

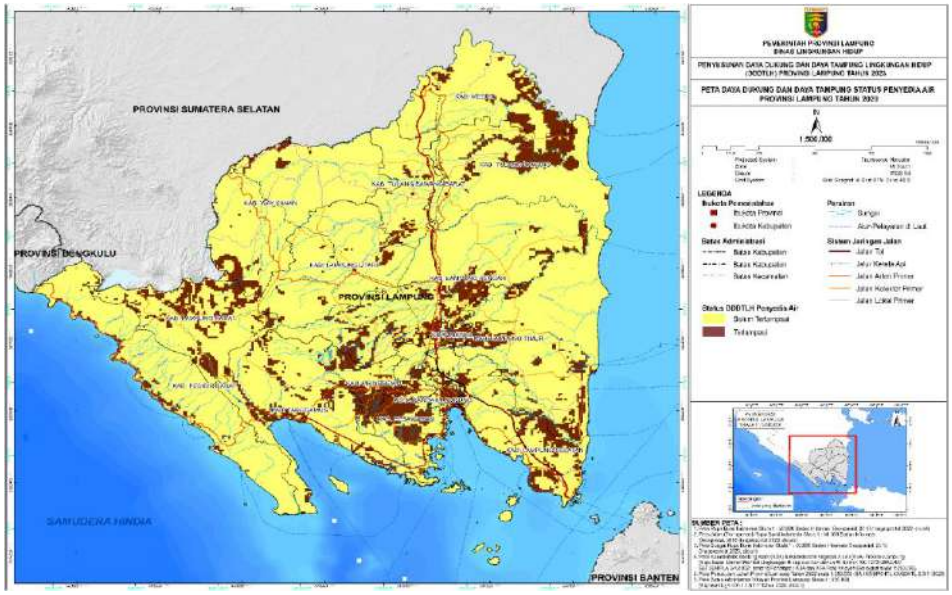

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status Belum terlampaui. Ambang batas penduduk untuk pangan yang tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan di Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan.

Tabel 2. 56 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung

Kabupaten /Kota	kkal/tahun		Ambang Batas (jiwa)	Seslsih (kkal/tahun)	Status (ha)		Jumlah (ha)
	Ketersediaan	Kebutuhan			Belum Terlampaui	Terlampaui	
Lampung Barat	592.073.081.943,3	238.090.795.750,0	754.473,5	353.982.286.193,0	190.077,5	26.527,4	216.605,0
Lampung Selatan	1.505.806.707.045,9	848.404.996.249,6	1.918.836,2	657.401.710.797,5	197.702,2	33.389,9	231.092,1
Lampung Tengah	3.440.883.774.482,0	1.177.142.264.500,9	4.384.687,8	2.263.741.509.979,6	390.339,0	53.298,0	443.637,0
Lampung Timur	3.213.863.366.975,1	885.155.623.500,1	4.095.397,7	2.328.707.743.474,8	358.258,0	26.131,4	384.389,4
Lampung Utara	1.923.146.483.087,5	498.417.482.750,1	2.450.648,6	1.424.729.000.338,7	258.957,0	20.898,0	279.855,0
Mesuji	1.258.417.564.830,5	182.599.553.750,2	1.603.590,4	1.075.818.011.080,8	204.319,8	9.621,9	213.941,7
Pesawaran	500.481.992.055,3	382.293.316.750,1	637.759,8	118.188.675.305,4	95.834,6	29.601,1	125.435,6
Pesisir Barat	776.839.545.016,5	129.339.356.000,0	989.919,8	647.500.189.016,8	275.340,4	7.302,5	282.642,9
Pringsewu	379.361.990.517,3	320.503.671.250,2	483.417,6	58.858.319.267,0	53.622,0	18.387,0	72.009,0
Tanggamus	689.418.949.173,5	512.361.705.501,3	878.520,5	177.057.243.672,4	240.531,5	58.746,2	299.277,7
Tulang Bawang	2.181.527.280.857,4	338.390.477.999,5	2.779.901,0	1.843.136.802.856,7	278.399,3	23.891,2	302.290,5
Tulang Bawang Barat	996.035.860.764,9	227.279.295.000,1	1.269.239,7	768.756.565.764,6	122.448,3	2.364,2	124.812,5
Way Kanan	2.533.321.000.172,5	377.493.001.000,2	3.228.188,6	2.155.827.999.171,8	336.324,1	12.186,5	348.510,6
Kota Bandar Lampung	113.138.242.079,8	949.498.060.750,8	144.171,1	-836.359.818.671,1	6.406,2	15.785,4	22.191,7
Kota Metro	86.233.280.997,6	134.324.872.749,9	109.886,3	-48.091.591.752,2	8.181,0	2.592,0	10.773,0
Jumlah	20.190.549.119.999,0	7.201.294.473.502,9	25.728.638,6	12.989.254.646.495,9	3.016.740,8	340.722,7	3.357.463,5

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Daya Dukung Pangan yang berada pada status Terlampaui hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhan lebih besar dari pada ketersediaan yang ada, sehingga dihasilkan selisih sebesar - 836.359.818.671 kkal/tahun. Daya dukung pangan berdasarkan luasan berada pada Daya Dukung Pangan Belum Terlampaui seluas 3.016.741 ha dan Terlampaui seluas 340.723 ha.

Gambar 2. 59 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) di Provinsi Lampung

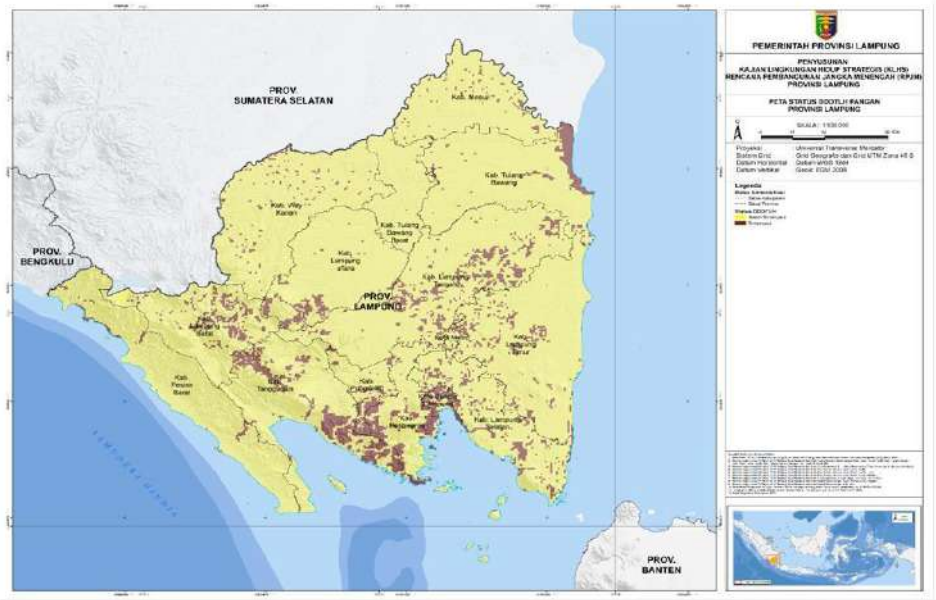

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Daya Dukung Lahan

Provinsi Lampung berada pada daya dukung lahan potensial, kendala dan limit dimana berada pada lahan potensial dengan luas 2.101.957,0 ha, sedangkan daya dukung lahan limit sebesar 739.623,2 ha, lahan limitasi (lindung) merupakan lahan yang memiliki keterbatasan atau pembatasan dalam penggunaannya atau kawasan yang mutlak tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman. Lahan potensial terbesar berada di Lampung Tengah seluas 396.644,7 ha. Daya dukung lahan dengan kategori kendala hanya tersebar di beberapa wilayah dengan luas 515.883,3 ha, lahan kendala merupakan area yang memiliki pembatasan dalam penggunaannya untuk kegiatan tertentu atau memiliki kemampuan lahan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 57 Luas Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (ha)			Jumlah (ha)
		Limit	Kendala	Potensial	
1	Lampung Barat	106.927,20	36.644,00	67.228,10	210.799,30
2	Lampung Selatan	16.891,30	45.895,90	159.945,80	222.733,00
3	Lampung Tengah	26.088,60	33.223,70	396.644,70	455.957,00

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (ha)			Jumlah (ha)
		Limit	Kendala	Potensial	
4	Lampung Timur	152.324,10	5.475,30	228.577,50	386.376,90
5	Lampung Utara	28.008,70	30.496,00	208.425,70	266.930,40
6	Mesuji		130.440,10	89.601,30	220.041,40
7	Pesawaran	34.341,60	35.032,20	59.437,80	128.811,70
8	Pesisir Barat	192.064,50	44.655,20	57.304,20	294.023,90
9	Pringsewu	13.039,30	5.301,80	43.378,20	61.719,20
10	Tanggamus	142.295,40	65.295,40	87.253,70	294.844,60
11	Tulang Bawang		5.754,70	305.855,00	311.609,60
12	Tulang Bawang Barat	1.374,60	10.431,40	113.902,80	125.708,80
13	Way Kanan	25.779,30	64.264,60	262.167,40	352.211,40
14	Kota Bandar Lampung	488,5	2.973,00	14.913,40	18.374,90
15	Kota Metro			7.321,40	7.321,40
	Jumlah	739.623,20	515.883,30	2.101.957,00	3.357.463,50

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2024

Gambar 2. 60 Peta Daya Dukung Lahan di Provinsi Lampung

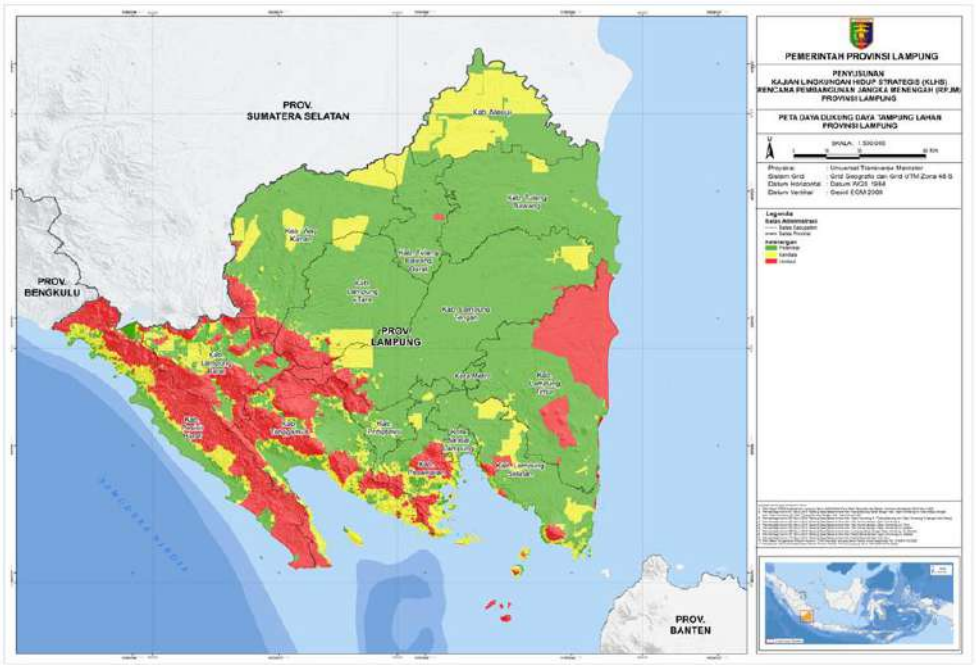

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, 2024

2.1.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Data IKLH Tahun 2023 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (https://ppkl.menlhk.go.id/ iklh/login). Namun pelaksanaannya terdapat permasalahan pada data yang disampaikan oleh kabupaten/kota yang tidak semuanya (memenuhi) standar sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tidak lengkapnya data dalam pengulangan sampel menyebabkan kurangnya varian data. Dari data IKLH yang ada, terlihat bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup perlu diselaraskan dan disinkronisasikan serta terus ditingkatkan agar nilai IKLH mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 58 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Capaian IKA			Capaian IKU			Capaian IKL			Capaian IKAL			Capaian IKLH			Target IKLH (SE No.4 RPJMD)			Kriteria/ Status IKLH 2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kabupaten Lampung Barat	60,00	63,08	66,06	84,73	88,03	90,52	41,63	40,81	41,33	-	-	-	65,99	68,31	70,55	64,74	65,36	65,99	Baik
Kabupaten Lampung Selatan	60,00	55,00	50,51	87,37	87,89	84,7	26,13	26,10	33,12	-	-	-	63,67	61,99	60,55	60,89	61,41	61,93	Sedang
Kabupaten Lampung Tengah	56,67	50,00	53,33	83,46	82,55	84,09	24,48	24,64	26,75	-	-	-	60,47	57,63	59,97	61,83	62,41	63,00	Sedang
Kabupaten Lampung Timur	53,53	49,46	50,54	86,15	87,73	87,74	45,75	45,79	48,80	-	-	-	65,04	64,16	65,22	62,97	63,38	63,79	Sedang
Kabupaten Lampung Utara	57,50	55,93		86,75	88,2	86,98	25,7	25,7	29,72	-	-	-	62,38	62,38	41,73	63,19	63,88	64,58	Kurang
Kabupaten Mesuji	58,57	61,43	59,00	87,05	88,46	89,5	28,13	28,14	28,54	-	-	-	63,44	65,09	64,68	61,20	61,72	62,24	Sedang
Kabupaten Pesawaran	60,00	57,78	63,33	91,83	91,00	89,37	25,73	25,71	38,59	-	-	-	65,39	64,21	68,46	61,83	62,48	63,13	Sedang
Kabupaten Pesisir Barat	52,86	50,00	50,00	87,63	89,06	89,9	73,93	73,93	78,67	-	-	-	71,56	71,06	72,44	73,21	73,54	73,87	Baik
Kabupaten Pringsewu	63,33	50,65	52,22	86,03	86,76	88,98	23,63	23,5	35,00	-	-	-	63,83	59,33	63,34	62,16	62,71	63,26	Sedang
Kabupaten Tanggamus	57,92	51,54	53,75	84,22	86,78	86,97	34,42	34,42	42,57	-	-	-	63,42	62,06	64,75	64,27	64,92	65,57	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang	56,67	50,00	50,00	90,15	92,74	92,03	24,09	24,11	24,79	-	-	-	63,09	61,64	61,5	62,01	62,64	61,12	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang Barat	60,00	52,22	50,00	85,18	88,49	88,15	23,61	23,61	26,51	-	-	-	62,23	60,64	60,31	63,27	63,87	64,48	Sedang

Kabupaten/Kota	Capaian IKA			Capaian IKU			Capaian IKL			Capaian IKAL			Capaian IKLH			Target IKLH (SE No.4 RPJMD)			Kriteria/ Status IKLH 2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kabupaten Way Kanan	50,00	67,33	63,33	80,39	84,75	91,94	23,47	39,19	28,10	-	-	-	56,5	68,22	67,2	67,22	67,83	68,43	Sedang
Kota Bandar Lampung	63,75	50,95	50,00	82,31	83,73	82,54	25,89	26,43	28,08	-	-	-	62,98	58,86	58,38	60,94	61,39	61,84	Sedang
Kota Metro	50,00	50,69	50,00	78,69	83,62	87,2	22,59	22,59	36,71	-	-	-	55,62	57,87	62,15	60,45	60,65	60,84	Sedang
Provinsi Lampung	57,77	54,72	55,36	85,46	87,32	88,04	33,54	34,29	38,42	79,56	86,48	83,87	68,56	69,1	69,91	68,23	68,66	69,09	Sedang
Nasional	55,20	55,30	54,55	87,36	88,05	88,65	62,5	63,5	61,75	59,00	59,50	78,58	71,45	72,42	72,48	68,96	69,22	69,48	Baik
Sumber : KLHK, 2023 (https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login)																			

Dari Tabel diatas terlihat bahwa IKLH Provinsi Lampung tahun 2023 telah mencapai target dan berada pada status "**sedang**" yaitu 69,91. IKLH kabupaten/kota tahun 2023 didominasi kriteria "**sedang**" dengan dua kabupaten yang memiliki kriteria "**baik**" yaitu Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai IKLH 71,06 dan Kabupaten Lampung Barat dengan nilai IKLH 70,55. Berdasarkan capaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 terdapat 8 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara; Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Grafik 2. 59 Perubahan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023

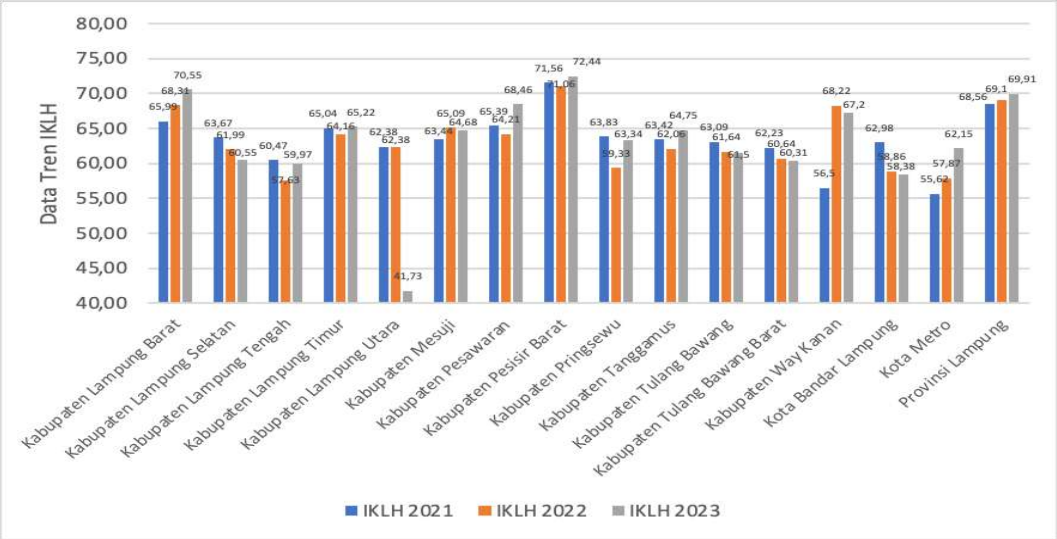

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2024

Dari Indeks Kualitas Air (IKA) terlihat bahwa dari 8 (delapan) parameter kualitas air yang dianalisa parameter COD, DO, BOD, dan Total Phospat sebagian besar memiliki indeks pencemar lebih dari batas ambang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK dan kualitas air mengalami penurunan yang disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri.

Untuk kualitas udara yang mengalami penurunan (Lampung Selatan) dan belum mencapai target (Lampung Tengah) hal ini disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara disebabkan peningkatan polutan SO_2 dan NO_2 sehingga terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Selain itu, pada parameter IKU data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya. Lokasi

perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan kabupaten yang kepadatannya masih rendah, begitu juga untuk kawasan transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran.

Indeks kualitas lahan Provinsi Lampung masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa ada alih fungsi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (agroforestri) yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

Karena keterbatasan data tutupan lahan yang ada dalam perhitungan ini menggunakan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui metode interpretasi citra sehingga data tutupan hutan dengan luasan yang kecil tidak terhitung serta tanaman yang masih muda hasil dari rehabilitasi tutupan lahan tidak terdeteksi sebagai tutupan hutan sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung yang sebenarnya.

2.1.5.3 Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, longsor) yang berpotensi merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan masyarakat, serta menyebabkan erosi pantai/abrasi di sekitar wilayah pesisir. Perubahan Iklim merupakan isu yang sedang gencar diperjuangkan secara global di seluruh negara. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global/*global warming* yang terjadi karena konsentrasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer semakin tinggi yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kondisi ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistem.

Komitmen penurunan emisi GRK sejalan dengan dengan tujuan SDG's yang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, melalui Peraturan Gubernur Nomor 32A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung. Pemprov Lampung

juga telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 17,159 jt ton CO2e atau sebesar 38,59 % dari total *Business As Usual*/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton CO2e. Terbaru, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang RAD GRK dan menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 8,40%. Dengan target demikian maka emisi yang dapat diturunkan tahun 2030 yakni sebesar 2,32 juta ton CO2e dari skenario BAU *baseline* 27,63 juta ton CO2e. Kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menurunkan emisi kumulatif pada 2010-2023 sebesar 5,59 ton CO2eq atau setara 14,93%.

2.1.5.4 Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kerusakan Lingkungan dan Polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Fenomena ini akan berakibat langsung dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah Emisi GRK di berbagai sektor. Selain itu, jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat mengakibatkan eksploitasi dan kerusakan lingkungan juga terus terjadi, sedangkan daya pulih alam tidak secepat peningkatan kebutuhan tersebut.

Provinsi Lampung juga menghadapi tekanan serius terhadap kualitas lingkungan hidup akibat dampak perubahan iklim dan meningkatnya intensitas bencana. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 menunjukkan angka 73,11 (kategori baik), capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada pada kategori sedang (62,97) akibat pencemaran limbah domestik dan pertanian, sementara Indeks Kualitas Lahan menunjukkan angka yang memprihatinkan (38,49), mencerminkan masifnya alih fungsi kawasan lindung dan praktik pemanfaatan tanah yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan, menurunkan produktivitas lahan, serta meningkatkan kerentanan ekologis masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pedesaan dan pesisir.

Di sektor kelautan-perikanan, praktik ilegal seperti *illegal fishing* yang menggunakan alat tangkap merusak, seperti bom dan pukat harimau, turut mempercepat degradasi biota laut. Kerusakan terumbu karang, berkurangnya

populasi ikan, serta hilangnya habitat biota laut berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan ketahanan ekosistem pesisir terhadap bencana. Reklamasi pesisir yang tidak terkontrol juga memperburuk kondisi, karena mengorbankan hutan mangrove—pelindung alami dari badai dan abrasi—dan memicu pencemaran serta konflik sosial akibat terganggunya ruang hidup masyarakat pesisir. Jika dibiarkan, kedua praktik ini akan mempercepat krisis ekologis di wilayah pesisir dan memperbesar risiko bencana lingkungan jangka panjang.

Dalam menjaga pembangunan wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan, diperlukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang diikuti penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.

2.1.5.5 Kualitas Lahan

Indeks kualitas lahan Provinsi Lampung Tahun 2024 sebesar 38,49 kondisi ini masih dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa ada alih fungsi lahan dari hutan menjadi penggunaan lain. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (agroforestri) yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

Karena keterbatasan data tutupan lahan yang ada dalam perhitungan ini menggunakan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui metode interpretasi citra sehingga data tutupan hutan dengan luasan yang kecil tidak terhitung serta tanaman yang masih muda hasil dari rehabilitasi tutupan lahan tidak terdeteksi sebagai tutupan hutan sehingga

kurang dapat menggambarkan kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung yang sebenarnya.

2.1.5.6 Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan Berkelanjutan

Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan beragam, meliputi hutan lindung, hutan konservasi, serta hutan produksi yang tersebar di berbagai wilayah. Hutan-hutan ini menyimpan potensi besar, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kawasan hutan di Provinsi Lampung semakin meningkat akibat berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pemanfaatan hutan secara lestari belum sepenuhnya menjadi praktik dominan di wilayah ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu (HHNK) umumnya masih dilakukan secara konvensional dan sering kali tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Potensi hasil hutan seperti rotan, damar, madu hutan, tanaman obat-obatan, serta jasa lingkungan (ekowisata, karbon, dan air) belum dimaksimalkan secara optimal. Sementara itu, hasil hutan kayu juga masih didominasi oleh pemanfaatan tradisional dengan tingkat pengolahan yang rendah, sehingga nilai tambah yang diperoleh masyarakat dan daerah juga belum signifikan.

Dari sisi pengolahan hasil hutan, masih terdapat banyak keterbatasan, terutama dalam hal teknologi, modal usaha, dan akses pasar. Usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan sering menghadapi kendala teknis maupun administratif, seperti perizinan yang rumit, kurangnya pelatihan pengolahan berstandar industri, serta terbatasnya kemitraan dengan sektor swasta yang lebih besar. Padahal, pengolahan hasil hutan yang berbasis industri hilir dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan dan membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah sekitar kawasan hutan. Lebih jauh, aspek keberlanjutan dalam pemanfaatan hutan juga masih menghadapi tantangan besar. Laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan belum terkelola secara baik. Belum adanya skema insentif yang kuat bagi pelaku usaha yang menjalankan praktik lestari, serta lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang merusak hutan, memperparah kondisi ini.

Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan juga masih terbatas, padahal mereka merupakan aktor penting yang berada langsung di sekitar kawasan dan memiliki potensi besar sebagai penjaga hutan. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan dan tata kelola menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemanfaatan dan

pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mendorong pendekatan multipihak (multi-stakeholder approach) yang melibatkan masyarakat adat, kelompok tani hutan, pelaku usaha, akademisi, dan LSM dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kehutanan. Skema Perhutanan Sosial, yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, perlu dipercepat dan diperluas cakupannya dengan dukungan teknis dan pendampingan yang memadai.

Selain itu, investasi dalam pengembangan industri hilirisasi hasil hutan harus diarahkan untuk mendukung prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan memiliki dampak ekonomi lokal. Penguatan riset dan inovasi juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan global. Pengembangan model-model bisnis yang inklusif, seperti ekowisata berbasis masyarakat dan koperasi hutan, juga dapat menjadi alternatif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sembari menjaga kelestarian hutan. Secara keseluruhan, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan secara berkelanjutan di Provinsi Lampung memerlukan sinergi kebijakan, komitmen lintas sektor, serta peran aktif masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan. Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan dan kualitas hidup generasi mendatang

2.1.5.7 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelayanan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung khususnya program listrik pedesaan yang merupakan program dari pemerintah maupun PT.PLN untuk mengalirkan listrik kepada masyarakat di pedesaan terus diupayakan dengan menjalankan strategi pengembangan jaringan distribusi listrik yang tersedia saat ini. Namun demikian untuk daerah-daerah yang masih terisolasi dan tidak mungkin melakukan pengembangan jaringan secara grid (jaringan listrik utama), maka dikembangkan dengan pembangkit yang diutamakan dari energi baru terbarukan. Selain desa terisolasi, program listrik juga dikembangkan untuk menjangkau desa 3T yaitu Terdepan, Terluar dan Tertinggal, bagi daerah tersebut jika pemanfaatan EBT belum terwujud maka dimungkinkan adanya pengembangan pembangkit berbahan bakar fosil. Selain melistriki desa juga dilakukan program pra-elektrifikasi dengan menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi daerah dan desa-desa yang sulit teraliri listrik.

Rasio Elektrifikasi

Realisasi rasio elektrifikasi rumah tangga di provinsi Lampung pada Tahun 2023 telah mencapai sebesar 99,99% dan capaian rasio desa berlistrik pada Tahun 2023 adalah sebesar 99,73%.

Tabel 2. 59 Capaian Cakupan Pelayanan & Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung

No.	Indikator	2023	2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	99,99	99	99.99	101

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2024

Berikut adalah kondisi kebutuhan daya listrik di Provinsi Lampung Tahun 2023-2045, dengan ketentuan bahwa satu jiwa penduduk dengan kebutuhan pemenuhan daya listriknya adalah 450 VA.

Tabel 2. 60 Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL KEBUTUHAN DAYA LISTRIK (KVA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Lampung Barat	143,685	150,633	156,618	162,349	166,859
2	Tanggamus	305,109	321,219	335,489	345,795	355,402
3	Lampung Selatan	510,026	539,793	566,802	579,438	595,535
4	Lampung Timur	524,115	546,804	566,451	591,562	607,996
5	Lampung Tengah	693,644	727,03 4	754,934	783,860	805,635
6	Lampung Utara	299,592	311,720	322,241	337,793	347,177
7	Way Kanan	226,490	239,292	251,015	257,164	264,308
8	Tulang Bawang	204,930	215,523	224,978	232,066	238,513
9	Pesawaran	227,817	240,768	253,044	259,104	266,302
10	Pringsewu	193,383	204,269	214,187	219,699	225,802
11	Mesuji	110,345	117,968	124,803	125,733	129,226

12	Tulang Bawang Barat	135,806	142,020	147,303	153,256	157,513
13	Pesisir Barat	78,687	84,312	89,834	90,086	92,589
14	Bandar Lampung	551,795	575,163	593,195	621,510	638,776
15	Metro	79,884	83,691	86,891	90,208	92,713
PROVINSI LAMPUNG		**4.285,310**	**4.500,212**	**4.687,781**	**4.849,866**	**4.984,596**

Sumber : Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2024

Gambar 2. 61 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi

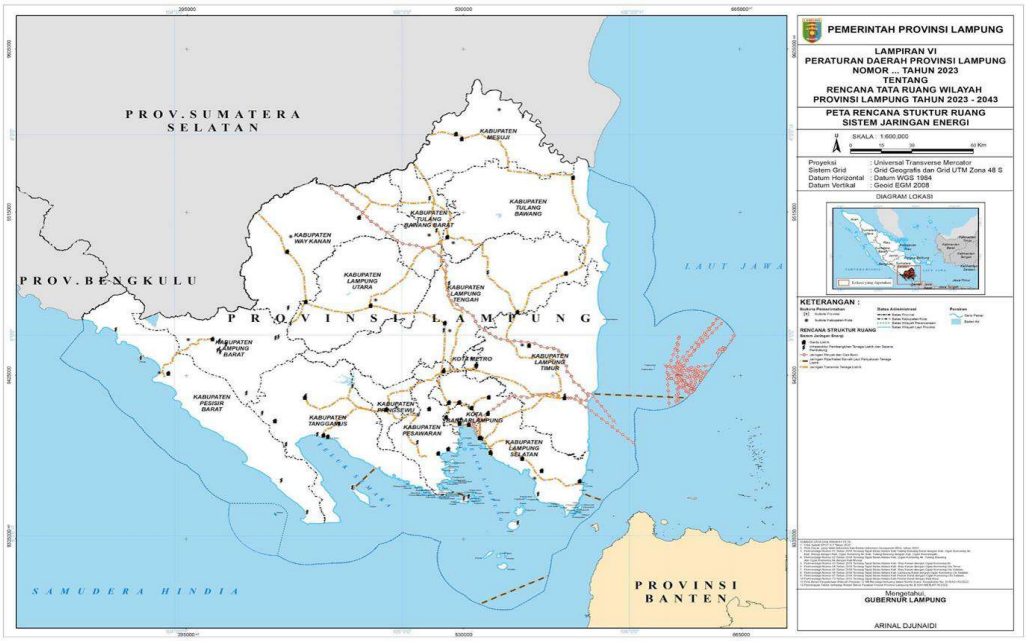

Sumber : Data diolah, Bappeda Provinsi Lampung, 2023

Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional

Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Di samping itu, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir 2020 mencapai sekitar 98,67 persen. Akan tetapi, secara umum kualitas akses listrik tersebut masih harus ditingkatkan. Selanjutnya, masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan akses listrik.

Konsumsi Listrik per Kapita

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, konsumsi listrik Tahun 2024 di Provinsi Lampung menunjukkan sebesar 14% dibanding tahun 2020. Seiring dengan **pertumbuhan jumlah penduduk** tahun **2020**, konsumsi listrik per kapita adalah **556,04 kWh**, meningkat menjadi **567,99 kWh** pada 2021, **586,55 kWh** pada 2022, dan **618,63 kWh** pada 2023. Di tahun **2024**, konsumsi listrik per kapita akan mencapai **637,09 kWh**. Peningkatan ini mencerminkan **bertambahnya kebutuhan energi** akibat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang terus berkembang, yang memerlukan perencanaan energi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. 61 Konsumsi Listrik per kapita tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Konsumsi Listrik (kwh)	Konsumsi listrik/kapita (kwh)
2020	9.007.850	5.008.763.180,00	556,04
2021	9.081.790	5.158.404.690,00	567,99
2022	9.176.550	5.382.475.876,00	586,55
2023	9.313.990	5.761.907.084,00	618,63
2024	9.419.580	6.001.147.920,00	637,09

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.5.8 Penanggulangan Bencana

Indeks Resiko Bencana saat ini dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh beberapa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, ini menunjukkan bahwa sektor bencana menjadi salah satu fokus dalam pembangunan wilayah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan di Provinsi Lampung didasari oleh 3 (tiga) hal, yaitu **pertama**, kondisi risiko bencana, **kedua**, kemampuan daerah untuk menjawab kondisi risiko bencana, dan **terakhir**, peluang atau potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanggulangan bencana di Provinsi Lampung;

Perkembangan IRB Provinsi Lampung dari tahun 2015-2018 menunjukkan Bahwa 7 (tujuh) Kabupaten/Kota memiliki risiko **TINGGI** (Merah), dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota lainnya berkategori **SEDANG** (Kuning). TIDAK ADA Kabupaten/Kota dengan Risiko bencana RENDAH (Hijau); **7 (tujuh) Kabupaten/Kota memiliki risiko Tinggi (Merah)**, yaitu: Kab. Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung.; **8 (delapan) Kabupaten/Kota lainnya berkategori**

Sedang (Kuning), yaitu: Kab. Tanggamus, Pringsewu, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Kota Metro.

Kajian Risiko Bencana (KRB) Lampung Tahun 2019 memetakan Kab/Kota berdasarkan jenis ancaman bencana alam sebagai berikut:

- Risiko Tinggi **Banjir** yaitu: Kab. Way Kanan dan Tulang Bawang Barat;
- Risiko Tinggi **Longsor** TIDAK ADA, namun dapat terjadi di wilayah sisi barat Lampung, a.l Kab. Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Way Kana, Lampung Tengah, dan Lampung Utara;
- Risiko Tinggi Cuaca Ekstrim **Puting Beliung** yaitu: Kab. Pesawaran dan Lampung Timur;
- Risiko Tinggi **Tsunami** yaitu: Kab. Tanggamus, Pesisir Barat, Pesawaran dan Lampung Selatan;
- Risiko Tinggi **Kekeringan** yaitu Kab. Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Lampung Tengah
- Risiko Tinggi **Gempa** yaitu: Kab. Pesawaran (Keterpaparan TINGGI);
- Risiko Tinggi **Gelombang Tingi dan Abrasi** yaitu: Kab. Pesisir Barat;
- Risiko Tinggi **Kebakaran Hutan dan Lahan** yaitu: Kab. Way Kanan, Pesisir Barat, dan Lampung Timur.
- Risiko Tinggi **Letusan Gunung Api** yaitu: Kab. Lampung Selatan;
- Risiko Tinggi **Likuefaksi atau Pencairan Tanah** yaitu: Kab. Tulang Bawang (DAS Mesuji-Tulang Bawang)

Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung setiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Provinsi Lampung telah masuk dalam tingkat risiko bencana Menengah dari sebelumnya tahun 2021 dalam kategori Tinggi. Ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan ketangguhan terhadap bencana di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Grafik 2. 60 Capaian Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung

Tahun 2015-2024

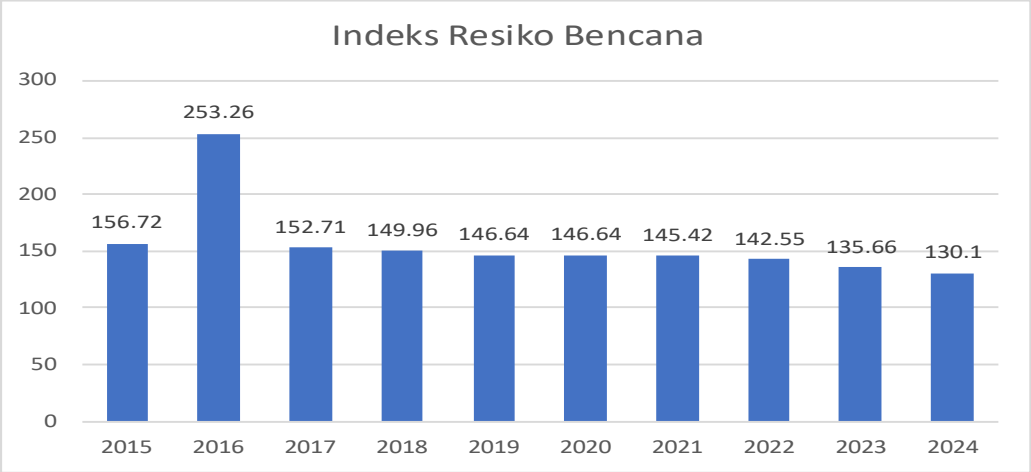

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, 2025

Tabel 2. 62 Capaian Indeks Resiko Bencana Tingkat Kabupaten / Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2024

No	Kabupaten / Kota	IRB 2023	Kelas IRB 2023	IRB 2024	Kelas IRB 2024
1	Lampung Barat	180.34	Tinggi	176.28	Tinggi
2	Tanggamus	132.54	Tinggi	120.21	Sedang
3	Lampung Selatan	167.23	Tinggi	151.15	Tinggi
4	Lampung Timur	183.2	Tinggi	166.4	Tinggi
5	Lampung Tengah	113.24	Sedang	106.14	Sedang
6	Lampung Utara	131.2	Sedang	131.2	Sedang
7	Way Kanan	108	Sedang	94.92	Sedang
8	Tulang Bawang	122.66	Sedang	114.44	Sedang
9	Pesawaran	162.28	Tinggi	152.79	Tinggi
10	Pringsewu	95.2	Sedang	88.82	Sedang
11	Mesuji	116.7	Sedang	113.03	Sedang
12	Tulang Bawang Barat	120.28	Sedang	112.66	Sedang
13	Pesisir Barat	189.7	Tinggi	188.85	Tinggi
14	Kota Bandar Lampung	119.79	Sedang	130.61	Sedang
15	Kota Metro	96.29	Sedang	104.07	Sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, 2025

Pada Tahun 2024, Capaian mengacu kepada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Provinsi Lampung memiliki Indeks Risiko sebesar 130,1 (SEDANG), mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2023 sebesar 135,66.

Dengan melihat ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas, dari aspek *Penguatan Kebijakan* hingga *Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana*, mengindikasikan bahwa Pelaksanaan pilar-pilar penanggulangan bencana harus dibangun diatas pondasi kelembagaan bencana daerah yang kuat, yang terbentuk melalui pemahaman yang sama tentang bencana disemua pihak (***pentahelix***) di daerah, yang akan bermuara pada kesepahaman untuk menjadikan bencana sebagai isu bersama dan menjadi peluang bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana daerah dalam membangun ketangguhan di tingkat lokal secara sinergis, antara lain menjadi sarana mobilitas dan realokasi *resosurces* (sumber daya manusia, dan sarana prasarana), keterpaduan kegiatan dan anggaran, serta berbagi pengetahuan dan pemahaman (*sharing knowledge*) bencana.

2.1.6 Tata Kelola Pemerintahan

2.1.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintahan (Indeks Reformasi Birokrasi). Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat melaksanakan dan menyusun peta jalan "Reformasi Birokrasi" di seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2010-14, Tahun 2015-2019, dan Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 20202024.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pemberian penilaian Opini WTP diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 70 Nilai Reformasi Birokrasi, Sakip dan Pengelolaan Keuangan

Tabel 2. 63 Provinsi Lampung Tahun 2016-2022

Tahun	Reformasi Birokrasi	SAKIP	Pengelolaan Keuangan
2016	CC (56,13)*	B (60,33)	WTP
2017	CC (57,63)*	B (61,36)	WTP
2018	CC (58,49)*	B (62,31)	WTP
2019	B (60,05)*	B (63,80)	WTP
2020	CC (52,03)**	B (66,04)	WTP
2021	CC (58,38)**	B (66,88)	WTP
2022	CC (58,92)**	B (67,11)	WTP

Keterangan : Data Awal

2.1.6.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Aspek daya saing memiliki 1 (satu) indikator, yaitu; Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dengan angka capaian pada tahun 2023 sangat tinggi. Selama kurun waktu periode RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, rata-rata capaian kinerja indikator tersebut terhadap target kondisi akhir juga sangat tinggi, yaitu; 98,86%.

Tingginya nilai kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan disebabkan karena terjadi perubahan dalam sistem perizinan sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan usaha. Kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat adalah:

1. Adanya OSS-RBA (Perizinan Berusaha Berisiko), sehingga perizinan menjadi lebih mudah, karena perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha, memangkas birokrasi yang panjang dan prosedur yang rumit, karena saat ini telah berubah ke-

era digital sehingga mempercepat perizinan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2. Telah dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Penerapan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikl (SPBE) Se-Provinsi, sehingga menjadi tindak lanjut terhadap perubahan sistem Layanan Perizinan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang tentu saja menambah pengetahuan serta kompetensi bagi para pelaku usaha terhadap OSS-RBA dan pelaporan LKPM;
3. Adanya pengaduan pelayanan publik sebagai alat ukur pelayanan yang ada dan mengatasi permasalahan pada pelayanan tersebut. Pengaduan Pelayanan Publik adalah salah satu prasarana yang memudahkan setiap penerima pelayanan dan merupakan usaha peningkatan potensi terhadap kemudahan pelayanan yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
4. Terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, menjadi rujukan yang pasti bagi para pelaku usaha dalam melalukan pengurusan izin usaha.

2.1.6.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu indikator capaian transformasi tata kelola dalam RPJPN 2025 – 2045. Indikator ini digunakan untuk mewujudkan arah (tujuan) pembangunan yaitu regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif. Untuk wilayah Sumatera, transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pada SPBE Summit 2024, KemenPAN-RB memberikan apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik dimana Pemerintah Provinsi Lampung meraih urutan ketujuh Indeks SPBE tertinggi untuk Kategori Pemerintah Provinsi. Sesuai Keputusan Menpan RB No. 13 Tahun 2024, Indeks SPBE Provinsi Lampung tahun 2023 yaitu 3,81 dengan

predikat Sangat Baik. Adapun Indeks SPBE Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 64 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks 2021*	Predikat	Indeks 2022**	Predikat	Indeks 2023***	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Lampung	2,76	Baik	3,37	Baik	3,81	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	1,67	Kurang	2,10	Cukup	2,68	Baik
3.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	1,86	Cukup	2,43	Cukup	2,70	Baik
4.	Pemerintah Kab. Lampung Barat	1,91	Cukup	2,26	Cukup	2,76	Baik
5.	Pemerintah Kab. Tanggamus	1	Kurang	1,60	Kurang	2,60	Baik
6.	Pemerintah Kab. Way Kanan	2,10	Cukup	2,24	Cukup	3,08	Baik
7.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	1,97	Cukup	2,07	Cukup	2,27	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,03	Kurang	2,00	Cukup	2,97	Baik
9.	Pemerintah Kab. Mesuji	1,69	Kurang	2,59	Cukup	3,57	Sangat Baik
10.	Pemerintah Kota Metro	2,14	Cukup	2,49	Cukup	3,04	Baik
11.	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1,2	Kurang	1,50	Kurang	2,15	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	-		1,70	Kurang	2,74	Baik
13.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	-		2,09	Cukup	2,55	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Lampung Timur	-		1,90	Cukup	2,27	Cukup
15.	Pemerintah Kab. Pesawaran	-		1,95	Cukup	2,91	Baik
16.	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	-		1,94	Cukup	2,32	Cukup

Sumber :

* Keputusan Menpan RB No 1503 Tahun 2021

** Keputusan Menpan RB No. 108 Tahun 2023

*** Keputusan Menpan RB No. 13 Tahun 2024

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui super platform percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Arah kebijakan transformasi digital mencakup:

1. **Pengembangan sisi permintaan meliputi percepatan digitalisasi sektor** utamanya melalui dorongan dan dukungan insentif dan subsidi untuk terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri dan *e-commerce*; penguatan pemerintah digital melalui penyiapan infrastruktur pendukung dan SDM SPBE yang dibutuhkan serta

pembangunan *smart city* di berbagai kota dan digitalisasi pedesaan (*smart village*) secara bertahap; digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif; peningkatan peran UMKM dalam e-commerce domestik dan global; dan percepatan literasi digital masyarakat.

2. **Pengembangan keterpaduan data (*data enablement*)** antara lain melalui pengembangan berbagai pusat data nasional baik pemerintah dan swasta, serta penguatan Satu Data Indonesia (SDI).

Arah kebijakan transformasi digital pemerintahan difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesia, dan peningkatan keamanan siber.

2.1.6.4 Penelitian dan Pengembangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 388 ayah (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk penjabaran dan perundangan tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang diberikan mandat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri di Tahun 2024. Bentuk inovasi daerah terdiri dari Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi bentuk lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jenis inovasinya antara lain Inovasi Digital dan Inovasi Nondigital.

Pemerintah daerah didorong untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi dengan melaksanakan penilaian inovasi daerah melalui rangkaian pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Awards (IGA). IID dan IGA yang dilaksanakan setiap tahun, dimana Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib untuk berpartisipasi. Kedua kegiatan tersebut merupakan tahapan wajib penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja daerah dalam melaksanakan inovasi, dimana IID adalah tahapan penjaringan dan penilaian inovasi yang telah dilakukan daerah, sedangkan IGA adalah tahapan pemaparan inovasi unggulan oleh Kepala Daerah dan

pengapresiasian atas daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam pelaksanaan birokrasi. Skor Indeks Inovasi Daerah diukur dan ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan kategori yang diberikan kepada daerah yang mengikuti IID yaitu daerah terinovatif, sangat inovatif dan inovatif. Pemerintah Pusat akan memberi apresiasi dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah yang meraih kategori daerah terinovatif.

Pada Tahun 2022 Provinsi Lampung masuk dalam sepuluh besar Provinsi dengan Predikat Sangat Inovatif di peringkat 8 (delapan) dengan skor indeks 60,90, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022.. Namun capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung mengalami penurunan di Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, yang berada pada peringkat 10 dengan predikat Inovatif dan capaian skor indeks 58,70.

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Kinerja IID Balitbangda Provinsi Lampung Th. 2019-2023

No.	Tahun	Inovasi daerah	Skor	Predikat
1.	2020	319	14,599	Sangat inovatif
2.	2021	179	50,18	Inovatif
3.	2022	130	60,90	Sangat inovatif
4.	2023	88	58,70	inovatif

Sumber : Balitbangda, 2024

2.1.6.5 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan mudah diakses dan bisa memberikan perlindungan kepentingan negara dan menjamin hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, agar arsip bisa menjadi bukti akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka adanya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Strategi percepatan untuk mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan baik yang dilakukan pihak eksternal (ANRI) maupun internal pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap seluruh Perangkat Daerah merupakan trigger yang perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas

kinerja dan alat bukti yang sah, yang pada saatnya menjadi memori daerah dan akan membentuk memori bangsa. Pengawasan kearsipan dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Perangkat Daerah baik di Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam mengukur tingkat pengawasan penyelenggaraan kearsipan digunakan Indeks Pengawasan Kearsipan dilingkup Pemerintah Daerah yang dirilis oleh Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI. Capaian indeks Pengawasan Kearsipan dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 51,88 persen dengan katagori CUKUP, dan menurun ditahun 2021 sebesar 38,91 dengan katagori KURANG, namun naik kembali pada tahun 2022 sebesar 69,02 dengan katagori BAIK dan terus naik ditahun 2023 menjadi 86,51 persen dengan katagori MEMUASKAN.

Gambar 2. 62 Trend Indeks Pengawasan Kearsipan dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

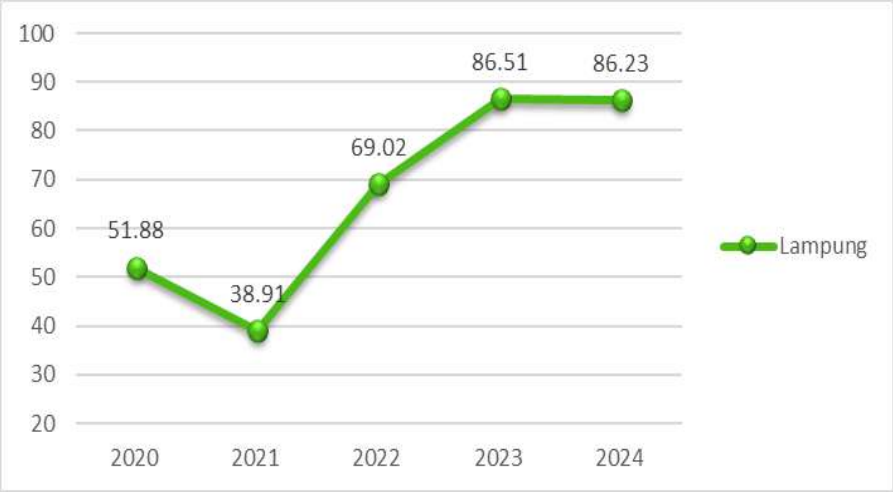

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah, 2025

2.1.6.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang kurang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh nilai 68,36 dalam evaluasi SAKIP atau berada pada kategori B. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai nilai 68,10 namun masih belum signifikan dan masih pada kategori B. Evaluasi SAKIP mencakup 5 (lima)

komponen utama : **Perencanaan Kinerja**, menilai sejauh mana perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis dan terukur. **Pengukuran Kinerja**, mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. **Pelaporan Kinerja**, menilai kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kinerja kepada publik dan pihak terkait. **Evaluasi Internal**, mengevaluasi sejauh mana instansi melakukan penilaian terhadap kinerja internal untuk perbaikan berkelanjutan**. Capaian Kinerja**, menilai hasil akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah perkembangan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai oleh Kemen PAN RB.

Tabel 2. 66 Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020 - 2024

Tahun	Nilai SAKIP	KATEGORI
2020	63,80	B
2021	66,04	B
2022	67,11	B
2023	68,10	B
2024	68,36	B

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian PAN RB.

2.1.6.7 Manajemen ASN

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijelaskan terkait Sistem Merit yang memuat kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Tabel 2. 67 Data Kepegawaian Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH PNS BERDASARKAN						
JENIS KELAMIN						
-Laki-laki	orang	7673	7356	7057	6812	6782
-Perempuan	orang	7951	7922	7845	7884	7867
JABATAN						
-Fungsional Umum	orang	5317	4593	4286	3889	3849
-Fungsional Tertentu	orang	9054	9358	9824	10021	9958
-Struktural Esselon IV	orang	894	946	441	440	467
-Struktural Esselon III	orang	311	332	303	296	321
-Struktural Esselon II	orang	47	48	47	49	53

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
-Struktural Esselon I	orang	1	1	1	1	1
TINGKAT PENDIDIKAN						
-SD/MI/Sederajat	orang	141	117	81	61	48
-SMP/MTS/Sederajat	orang	167	149	100	85	79
-SMA/MA/Sederajat	orang	2343	2112	1873	1652	1601
-D-I dan D-II	orang	87	77	57	51	50
-D-III	orang	898	974	947	910	874
-Strata-1/D-IV	orang	9614	9524	9367	9148	9064
-Strata-2	orang	2359	2309	2459	2764	2906
-Strata-3	orang	15	16	18	25	27
KEPANGKATAN						
-Juru Muda	orang	1	1	1	1	1
-Juru Muda Tingkat I	orang	13	10	3	2	2
-Juru	orang	19	12	14	7	7
-Juru Tingkat I	orang	62	57	46	32	32
-Pengatur Muda	orang	134	95	77	62	60
-Pengatur Muda Tingkat I	orang	363	362	228	140	141
-Pengatur	orang	500	455	519	605	590
-Pengatur Tingkat I	orang	844	908	875	592	584
-Penata Muda	orang	1179	1220	1399	1939	1955
-Penata Muda Tingkat I	orang	1992	1853	1736	1646	1645
-Penata	orang	2628	2106	1752	1427	1412
-Penata Tingkat I	orang	3247	3402	3373	3558	3565
-Pembina	orang	2313	2385	2446	2235	2199
-Pembina Tingkat I	orang	2115	2184	2143	2120	2114
-Pembina Utama Muda	orang	156	179	246	290	301
-Pembina Utama Madya	orang	47	36	32	28	29
-Pembina Utama	orang	11	13	12	12	12

Sumber BKD Provinsi Lampung, 2024 data diolah

Ketersediaan potensi sumber daya aparatur Provinsi Lampung dengan jumlah 14.649 orang yang bervariatif dan kompleks maka diperlukan manajemen penataan ASN melalui sistem Merit. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 07/KEP.KASN/C/IV/2024 tanggal 29 April 2024 bahwa Indeks Merit Sistem Provinsi Lampung tahun 2023 adalah 298,5 atau berada dalam Kategori III (Baik). Meskipun sudah cukup baik, masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:

1. Melakukan assesment pemetaan kompetensi pada seluruh ASN Provinsi Lampung berdasarkan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan;
2. Membangun manajemen talenta untuk pengembangan karir juga penyusunan rencana suksesi ASN;

3. Menyelesaikan penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi ASN.

Manajemen ASN tidak hanya berkisar pada manajemen karier, pengembangan dan pola karier, mutasi dan promosi namun juga pengembangan kompetensi aparatur. Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur saat ini semakin penting dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik, selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berdinamika, perubahan kebijakan dan paradigma pemerintahan, serta globalisasi, menuntut sumber daya manusia yang profesional dalam mewujudkan terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur dengan capaian periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 68 Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Diklat Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	12,50	20,28	25,34	32,39	38,30	12,50	18,28	23,49	32,39	38,40
2.	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B

Sumber: BPSDM Provinsi Lampung, 2024

Persentase ASN yang mengikuti diklat dan memiliki sertifikat dari Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan, namun realisasi yang tercapai di atas target dengan rasio 100 persen baru terlihat di periode 2022-2023.

Demikian pula untuk nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat belum tercapai secara optimal dengan capaian pada nilai B. Akreditasi ini sangatlah penting karena bermanfaat untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi ASN serta saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

2.1.6.8 Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan dilaksanakan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lainnya. Data Administrasi Kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi sekaligus bermanfaat bagi kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum atau pencegahan tindak kriminal.

Dalam proses Pengadministrasian Data Kependudukan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Database Kependudukan Berskala Provinsi berisi data *by name by address by* NIK untuk meminimalisir data penduduk ganda. Adapun bila dilihat capaian sampai dengan tahun 2023, persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Lampung menunjukkan angka yang cukup signifikan sebagaimana tabel di bawah ini. Hal ini terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan Administrasi Kependudukan melalui pendataan penduduk sebagai data dasar dalam pemberian pelayanan secara merata.

Tabel 2. 69 Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

No	Kepemilikan Dokumen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Akta Kelahiran	96,80	98,51	100,00	97,00	96,00
2	Perekaman KTP Elektronik	97,00	95,30	101,14	97,31	98,69
3	Kartu Identitas Anak	11,37	35,13	39,58	59,75	71,06
4	Akta Kematian	100,00	100,00	93,09	88,00	91,00
5	Kartu Keluarga	90,00	94,00	96,00	99,00	99,00
6	Akta Perkawinan	6,00	23,00	32,00	35,00	39,00
7	Akta Perceraian	79,00	24,00	13,00	43,00	12,00
8	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-	-	-	-	3,82

Sumber: Disdukcapil, 2024 (data diolah)

Data tersebut merupakan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang telah disinkronisasikan dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI. Data Kependudukan Bersih adalah data yang telah dikonsolidasikan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan melakukan filter terhadap data yang bersifat anomali dan data ganda. Adapun data yang bersifat anomali adalah data yang dalam proses rekam dan penginputan datanya tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah juga yang menyebabkan naik turunnya persentase perekaman data kependudukan setelah melalui proses filter dari data pelayanan kependudukan di disdukcapil Kabupaten/Kota. Adapun Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Program

inovasi KTP dalam Digital yang mulai dijalankan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI dari tahun 2023 dan diperkuat dengan instruksi dari Presiden RI pada awal tahun 2024.

1. Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan seperti Kartu Keluarg, KTP dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Pencapaian kepemilikan dokumen adminsitrasi kependudukan di Provinsi Lampung dari tahun 2020 terus menunjukan peningkatan, dimana tahun 2020 sebesar 83,44 persen, saat ini tahun 2023 seluruh penduduk Provinsi Lampung telah memiliki dokumen kependudukan (100 persen).

Grafik 2. 61 Trend Kepemilikan Dokumen Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

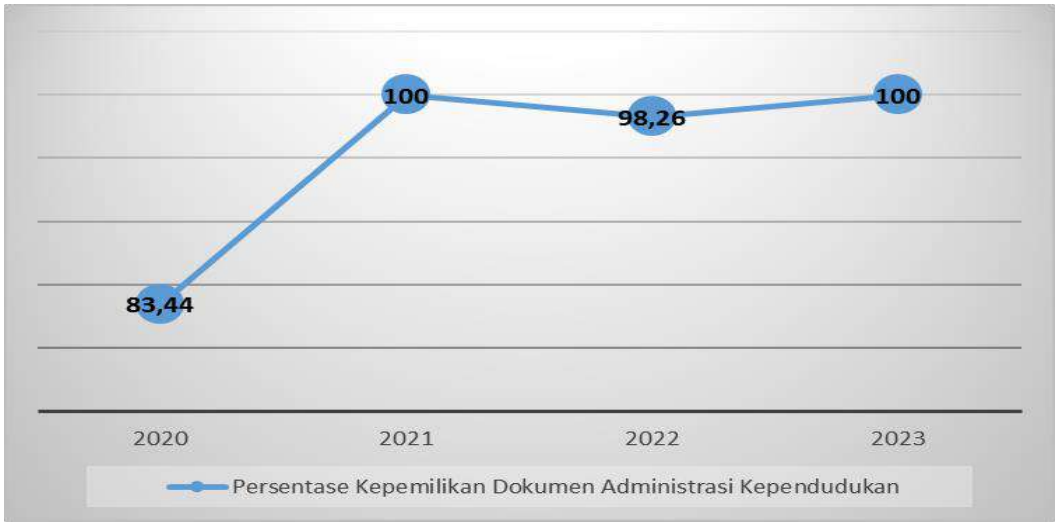

Sumber : Laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, 2023

2. Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemberian Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara. Pengguna sebagaimana dimaksud diatas meliputi lembaga negara, Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Badan hukum Indonesia dan/atau Organisasi perangkat daerah. Pemanfaatan data Kependudukan di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 pemanfaatan data kependudukan sebesar 53 persen dan meningkat sebesar 26,49 persen ditahun 2023 yaitu sebesar 79,49 persen. Hal ini menunjukan bahwa sudah terjalin kerja Sama disertai pemberian hak akses Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga yang berbadan hukum.

Grafik 2. 62 Trend Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Lampung

Gambar 2. 63 Tahun 2020-2023

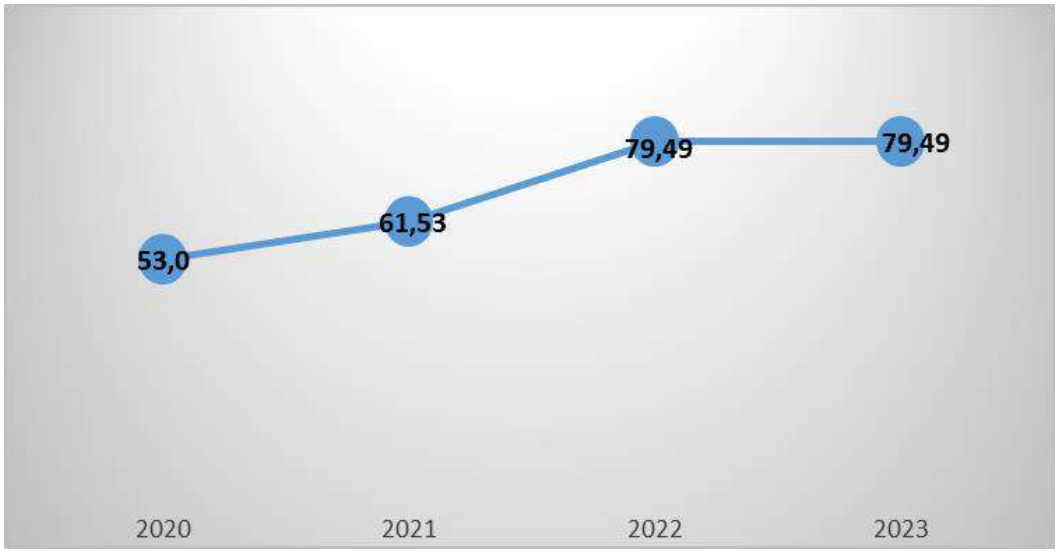

Sumber : Laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, 2023

2.1.6.9 Perencanaan

Berdasarkan hasil penilaian Indek Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) tahun 2024, Provinsi Lampung mendapatkan nilai "Sangat Baik" dengan Skor 93,94. Tujuan dilakukannya pengukuran IPPN adalah mengukur kualitas perencanaan yang dihasilkan

oleh daerah berbasis dampak (outcome) dan memastikan kebermanfaatan program pembangunan untuk masyarakat. Hasil penilaian IPPN Provinsi Lampung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 81,01.

Namun demikian, perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan di Provinsi Lampung masih menunjukkan tingkat keselarasan yang belum optimal terutama dengan perencanaan kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari kurangnya integrasi antara kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Selanjutnya, Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah juga menjadi tantangan di Provinsi Lampung. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, terbuka, dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak, pada kenyataannya, data yang disediakan masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Data yang tersedia belum sepenuhnya akurat, terbuka, dan interoperabel, atau mudah dibagikan dan digunakan antar pengguna data. Hal ini menghambat efektivitas pengambilan keputusan berbasis data yang valid, yang seharusnya dapat mempercepat dan menyempurnakan perencanaan serta pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Selain itu, Perencanaan berbasis kinerja yang harus didukung dengan adanya instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja (cascading, crosscutting, dan pohon kinerja) di tingkat perangkat daerah juga masih belum optimal. Instrumen ini seharusnya dapat digunakan untuk menghubungkan tujuan dan sasaran pembangunan di tingkat provinsi dengan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah, serta memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami dan bekerja menuju pencapaian tujuan tersebut. Namun, implementasi instrumen ini di lapangan sering kali kurang maksimal, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.6.10 Pengawasan

Hasil Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung pada Tahun 2024 menunjukkan skor sebesar 65,83, yang masuk dalam kategori rentan. Skor ini mengalami penurunan sebanyak 2,61 poin dibandingkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas pada Tahun 2023 yang mencatatkan skor sebesar 68,44.

Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam beberapa aspek tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung, terutama terkait dengan belum optimalnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern. Hal ini berdampak pada kurangnya keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang semuanya merupakan faktor penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan daerah.

Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbatasan ini mempengaruhi

efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pemerintahan daerah, sehingga menghambat tercapainya tata kelola yang lebih baik dan lebih efisien.

2.1.6.11 Pertanahan

Urusan pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki peran dalam perencanaan tata ruang, pengawasan, pembinaan, dan penyusunan peraturan daerah terkait pertanahan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan, antara lain:

- Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023–2043. Perda ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang di tingkat provinsi, serta sebagai dasar bagi kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selaras dan terintegrasi.
- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam hal perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. DPKPCK juga bertugas menyusun kebijakan teknis, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memastikan sinkronisasi antara kebijakan provinsi dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota.
- Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) sektor pertanahan untuk menjaring isu-isu strategis dan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Sebagai bagian dari upaya penataan ruang yang lebih spesifik, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penyusunan RDTR Kawasan Industri Katibung dan sekitarnya. Konsultasi publik pertama telah dilaksanakan pada 18 Juli 2024 untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan aset tanah pemerintah daerah melalui penandatanganan komitmen bersama dalam Rakor Program Tematik Sektor Pertanahan pada 14 Agustus 2023. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat sertifikasi aset dan memastikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024 Provinsi Lampung

2.2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No.	IKU PROVINSI	SATUAN	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1	2	4	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis). Berbudaya. Aman. Dan Damai																
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,09	73,1	73,3	72,44	98,83	73,5	71,07	96,69	73,7	73,35	99,53	74	74,04	100,05
2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	72,56	72,79	73	80,18	109,84	74	78,32	105,84	75	78,37	104,5	78,6	78,37	99,71
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	56,57	55,38	54,8	53,19	97,06	55,3	53,71	97,12	55,8	55,71	99,84	56,3	57,82	102,7
Misi 2: Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik																
4	Nilai reformasi birokrasi	Angka	B	CC	B	CC	83,33	B	CC	83,33	B	B	100	BB	82,68	118,11
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM. Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak. Pemberdayaan Perempuan. dan Penyandang Disabilitas																
5	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,51	70,65	70,8	73,3	103,53	70,95	73,95	104,23	71,2	74,17	104,17	74,5	74,39	99,85

No.	IKU PROVINSI	SATUAN	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1	2	4	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,63	12,65	12,66	12,73	100,55	12,67	12,74	100,55	12,68	12,77	100,71	12,82	12,78	99,69
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,92	8,05	8,1	8,08	99,75	8,2	8,18	99,76	8,3	8,29	99,88	8,4	8,36	99,52
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	4,03	4,67	4 – 4,5	4,69	95,78	4,3-4,4	4,52	97,27	4-4,3	4,23	101,63	4-3,8	4,19	95,47
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	63,47	65,07	67,66	61,61	91,06	69,17	64,78	93,65	71,37	64,78	90,77	71,5	64,78	90,6
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	69,23	69,06	69,1	67,96	98,35	69,14	68,24	98,69	69,18	68,24	98,64	69,23	68,16	98,45
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah																
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	%	74,41	76,05	74	75,38	101,86	76	76,85	101,12	77	78,68	102,18	78	78,08	100,1
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	%	88,8	90,21	91,2	91,22	100,02	92,31	96,5	104,54	93,01	96,28	108,44	97	88,34	91,07
13	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	%	95,76	96,5	96	99,94	104,1	97	99,99	103,08	98	99,99	102,03	99	99,99	101
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan																

No.	IKU PROVINSI	SATUAN	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1	2	4	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,27	-1,67	2,5 – 3,5	2,79	111,6	03-Apr	4,28	142,67	3,5-4,5	4,55	130	4,5-5,0	4,57	101,56
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	103,2	94,73	101 – 102	101,23	100,23	102-103	104,3	102,25	104-105	115,4	110,96	117-119	124,98	105,02
16	Laju Inflasi	%	3,44	2	3 ± 1	2,19	145,25	3 ± 1	5,51	62,25	3 ± 1	3,47	113,25	3 ± 1	1,57	127,39
17	Angka Kemiskinan	%	12,3	2	12,76-12,4	11,67	108,54	12,4-11,9	11,44	107,74	11,9-11,4	11,11	106,64	10,5-10,00	10,62	98,86
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama																
18	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	59,28	66,95	68,23	68,56	100,48	68,66	69,1	100,64	69,09	69,91	101,19	70,2	73,11	104,15
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	6,28	6,86	6,74	6,74	100	6,914	12,84	185,71	7,07	12,3	173,975	12,35	15,86	128,42
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	146,78	146,64	142,9	145,42	101,76	141	145,55	103,23	139,1	135,66	97,53	133,7	130,1	102,69

2.2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penyajian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah. Dalam melakukan penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 71 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi
3.	66 % ≤ 75%	Sedang
4.	51 % ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat berjumlah 24 indikator, dimana pada akhir tahun 2024 terdapat 9 indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator Nilai SAKIP pada tahun 2024 telah mencapai kategori Tinggi dan mencapai target BB yang ditetapkan.

Indikator yang tidak mencapai target adalah Indikator Persentase Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah. Kendala dari tidak tercapainya indikator ini karena sulitnya melakukan observasi dilapangan untuk melakukan peninjauan lapangan. Dimana kondisi wilayah dikuasai oleh tetua adat atau pribumi keturunan yang berasumsi bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah nenek moyang atau peninggalan orang tua mereka yang diklaim milik pribadi. Meskipun begitu pemerintah telah membentuk Tim Penegasan Batas melalui SK gubernur No. G/19/B/HK/2021 dan SK Gubernur Lampung No. G/139/B.03/HK/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria Provinsi Lampung Tahun 2021.

Tabel 2. 72 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	13
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Persentase perumusan kebijakan umum. koordinasi. supervisi. pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian		100	100	97,22	100	101	**96,33**	**Sangat Tinggi**	Sekretariat Daerah
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	58,92	B	B	BB	A	**100**	**Sangat Tinggi**	Biro Organisasi
3	Nilai SAKIP (TPB)	Predikat	67,11	BB	B	BB	11,34	**103**	**Tinggi**	Biro Organisasi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor/nilai	85,13	86	86	88	86,16	**97**	**Sangat Tinggi**	Biro Organisasi
5	Nilai SKM untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial			3.2		3,3				Sekretariat Daerah
6	Nilai SKM untuk Fasilitasi Pelayanan Penataan produk perundang-undangan. bantuan hukum dan HAM serta pembinaan dan pengawasan produk hukum			3.2		3,3				Sekretariat Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
7	Nilai SKM untuk Pelayanan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan di Sekretariat Daerah			3.2		3,3				Sekretariat Daerah
8	Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan			3.2		3,3				Sekretariat Daerah
9	Persentase OPD yang nilai Hasil evaluasi Kinerjanya B			70		75				Sekretariat Daerah
10	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	94,69	98	92,67	100	98,34	**98,34**	**Sangat Tinggi**	Biro Kesejahteraan Rakyat
11	Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan. Pemahaman. Pengamalan keagamaan dan Lembaga Keagamaan			89		89				Sekretariat Daerah
12	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	49,69	100	100	100	96,67	**96,67**	**Sangat Tinggi**	Biro Umum
13	Persentase Pelayanan Ketatausahaan Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pimpinan yang dilaksanakan	Persen	50,13	100	100	100				Biro Umum
14	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan	Persen	51,92	100	93,75	100				Biro Umum

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
	Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku									
15	Skor LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Nilai (skor)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi				Biro Pem Otda
16	Persentase Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	Persen	100	100	60	100				Biro Pem Otda
17	Pesentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Persen	100	100	100	100	100	**100**	**Sangat Tinggi**	Biro Pem Otda
18	Persentase Perangkat Daerah yang evaluasi kinerja anggarannya baik	Persen	91	85	90,06	90				Biro Adbang
19	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Persen	100	87,5	100	90	50	**50**	**Sangat Rendah**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih	Persen	74.09	72.75	74.09	73	17,00	**21**	**Sangat Rendah**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	%	80	93	102,5	94	309	**47,53**	**Sangat Rendah**	Biro PBJ
22	Persentase pelayanan keprotokolan	%	98,5	93	93	94	20	**100**	**Sangat Tinggi**	Biro Administrasi Pimpinan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
23	Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD	Persen	100	100	100	100				Biro Perekonomian
24	% Tingkat kepuasan masyarakat Lampung terhadap pelayanan Badan Penghubung	Persen	100	85	100	90	100	**100**	**Sangat Tinggi**	Badan Penghubung

2. Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar berjumlah 25 indikator, dan terdapat pada 6 bidang, yaitu 1 indikator pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6 indikator pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 1 indikator pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, 2 indikator pada bidang Pendidikan, 11 indikator pada bidang Kesehatan, 2 indikator pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan 2 indikator pada bidang sosial.

Indikator dengan kategori Tinggi adalah Indikator Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Indikator Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan, serta Indikator dengan kategori Rendah adalah Indikator Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

Capaian kinerja indikator Jumlah Kasus Kematian Bayi masuk dalam kategori Tinggi dengan mencapai angka 86,55 persen, namun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 550 kasus. Sedangkan jumlah Kasus Kematian Bayi yang terjadi di tahun 2023 masih sebanyak 624 kasus. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator ini karena masih tingginya angka BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan Asfiksia, penanganan balita sakit belum menerapkan standar pemeriksaan yang benar, keterbatasan jumlah dokter spesialis anak di Kabupaten/Kota, sistem rujukan maternal yang belum efektif, dan terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan pendukung pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Indikator lain dengan capaian kinerja Tinggi yaitu Indikator Survey Kepuasan Pasien/Penerima Layanan berada pada angka 88,62 persen. Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 87 persen dan hanya tercapai 77,1 persen di tahun 2023. Hal ini disebabkan belum dilakukan penilaian SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga, meskipun begitu perangkat daerah tetap melakukan survey secara internal dengan melalui Elektronik Survey Kepuasan Pasien Online.

Selanjutnya, Indikator Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023 dengan target 886 dan realisasi 525

orang dengan capaian 59,26 persen (Rendah). Kendala tidak tercapainya indikator ini karena adanya perubahan anggaran sehingga pelayanan terhadap Rehabilitasi NAPZA tidak optimal. Meskipun begitu, bagi masyarakat kurang mampu pelayanan tetap dilakukan dengan pembayaran untuk pasien NAPZA dapat difasilitasi dengan menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Tabel 2. 73 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	13
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1.1	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	76,85	77	78,67	78	78,08	100,10	**Sangat Tinggi**	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
2	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**									
2.1	Persentase kesesuaian perencanaan & pemanfaat-an ruang thp rencana tata ruang	Persen	86	86	90	95	100	100	**Sangat Tinggi**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
2.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Air Minum Layak	Persen	85,74	85,74	87,32	95	65	72,22	**Sedang**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
2.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak	Persen	83,88	82,44	88,1	84,52	86,12	100,14	**Sangat Tinggi**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
2.4	Persentase Jumlah Kawasan kumuh Provinsi yang tertangani	Persen	72,59	72,74	75,7	73,83	75,7	100	**Sangat Tinggi**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
2.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (TPB)	Persen	97,01	97.92	93,05	98,47	93,27	95,25	**Sangat Tinggi**	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
3	**PSDA**									
3.1	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan IP>2	Persen	45	50	50	55	55	100	**Sangat Tinggi**	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
4	**Pendidikan**									
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ Sederajat	Persen	97,16	97,83	98,89	99,33	99,52	100,19	**Sangat Tinggi**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat	Indeks	71,37	68,24	74	69,24	75	100	**Sangat Tinggi**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	**Kesehatan**									
5.1	Prevalensi stunting	Persen	15,2	16	15.2	14	14,90	93,57	**Sangat Tinggi**	Dinas Kesehatan
5.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	96	130	105	110	100	109,09	**Sangat Tinggi**	Dinas Kesehatan
5.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	526	550	624	520	654	74,23	**Sedang**	Dinas Kesehatan
5.4	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	Persen	96	90	96	90	92,20	102,44	**Sangat Tinggi**	Dinas Kesehatan
5.5	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	462	886	525	974	688	70,64	**Rendah**	Rumah Sakit Jiwa Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
5.6	Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Dasar	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100	**Sangat Tinggi**	Rumah Sakit Jiwa Daerah
5.7	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	80,63	84	80.63	86	88,80	88,80	**Tinggi**	Rumah Sakit Jiwa Daerah
5.8	Akreditasi rumah sakit		Paripurna SNARS Nilai Rara-rata Pokja 93%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 93%	Paripurna SNARS Nilai Ratarata Pokja 88%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95%	Verifikasi Paripurna SNARS dengan capaian indikator 95%	95,00	**Sangat Tinggi**	RSUAM
5.9	Nilai SPM	Persen	85	88	85,1	91	88	96,70	**Sangat Tinggi**	RSUAM
5.10	Tingkat Layanan Sub Spesialis	Persen	77	88	92	95	93	97,89	**Sangat Tinggi**	RSUAM
5.11	Survey Kepuasaan Pasien/Penerima Layanan	persen	73	87	77,1	88	80,00	90,91	**Tinggi**	RSUAM
6	**Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
6.1	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada Yang Terselesaikan	Persen	75	75	75	80	80	100	**Sangat Tinggi**	Satpol PP
6.2	Persentase Penanganan tindak/kasus kriminalitas yang terselesaikan	Persen	75	75	75	80	80	100	**Sangat Tinggi**	Satpol PP
7	**Sosial**									

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
7.1	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen	5,6	1.74	1,72	1,76	2.00	100	**Sangat Tinggi**	Dinas Sosial
7.2	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan. Keperintisan. dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen	20	20	20	20	17,3	98,45	**Sangat Tinggi**	Dinas Sosial

a. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung pada aspek Pelayanan Umum pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar berjumlah 40 indikator, yang tersebar pada 17 bidang, yaitu 2 indikator bidang tenaga kerja, 5 indikator bidang Pangan, 2 indikator bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 1 indikator bidang Penanaman Modal, 6 indikator bidang Lingkungan Hidup, 1 indikator bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 3 indikator bidang Perhubungan, 5 indikator bidang Komunikasi dan Informatika, 1 indikator bidang Persandian, 3 indikator bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 indikator bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , 1 indikator bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2 indikator bidang Kepemudaan dan Olahraga, 1 indikator bidang Kebudayaan, 1 indikator bidang Perpustakaan, dan 1 indikator bidang Kearsipan.

Terdapat 8 indikator yang tidak dilaksanakan yaitu 4 indikator pada bidang pangan, 1 indikator pada bidang penanaman modal, 2 indikator pada bidang lingkungan hidup, dan 1 indikator pada bidang komunikasi dan informatika. Tiga indikator belum mencapai target yaitu indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian 89,29 persen (Tinggi), indikator Persentase Desa Mandiri dengan capaian 44,39 persen (Sangat Rendah), dan Indikator Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-Event Nasional Rata-Rata dengan capaian 55,87 persen (Rendah).

Pada indikator bidang Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) belum mencapai target meskipun tingkat capaian kinerja termasuk pada kategori Tinggi. Berdasarkan data trend perubahan Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung selama periode 2022-2024, mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target dengan capaian 38,42. Hal ini merupakan upaya pemangku kepentingan terutama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, dan Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melakukan inventarisasi dan deleniasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Tutupan vegetasi lainnya yang relevan di Provinsi Lampung. Terdapat 14

kabupaten/kota mengalami peningkatan dan hanya kabupaten Way Kanan mengalami penurunan dikarenakan titik RTH No 1-1329 rata-rata tidak memiliki tutupan vegetasi pepohonan/memiliki tutupan vegetasi pepohonan <50%, dan tidak memiliki deliniasi/polygon serta beberapa titik pada tutupan vegetasi duplikat titik. Hal tersebut perlu tindakan dan perhatian terhadap upaya mempertahankan kualitas lahan melalui survei lokasi Ruang Terbuka Hijau dan tutupan vegetasi relevan lain dan peningkatan melalui program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati). Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung, Tahun 2023 masih berada dibawah target (38,42) dan terdapat 7 kabupaten yang mencapai target, antara lain Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Kota Metro serta terdapat 8 kabupaten/kota yang belum mencapai target diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung. Capaian indeks kualitas lahan berada dibawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial, agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

Keberhasilan terhadap tutupan lahan di Provinsi Lampung dengan adanya kegiatan/program tersebut belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Lampung secara signifikan. Hal ini disebabkan karena tutupan lahan tersebut teridentifikasi sebagai lahan pertanian lahan kering campuran. Harapan kedepan penilaian Indeks Kualitas Lahan juga memperhatikan pembobotan dan penilaian terhadap tutupan lahan yang lainnya sehingga setiap tutupan lahan memberikan kontribusi terhadap nilai Indeks Kualitas Lahan.

Ketidaktercapaian indikator Persentase Desa Mandiri disebabkan karena belum terbangunnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan Desa Mandiri, selain itu masih terdapatnya desa yang belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga menyulitkan

operasional Smart Village yang merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa mandiri. Penyebab sulitnya pengembangan program Smart Village juga disebabkan karena penambahan jumlah desa user yang terintegrasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam program Smart Village sehingga memiliki resiko penurunan aksesibilitas ke server/over load.

Penyebab tidak tercapainya Indikator Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-Event Nasional antara lain masih kurangnya atlet yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung untuk diikutsertakan pada event kejuaraan pelajar nasional, dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pembinaan olahraga prestasi.

Tabel 2. 74 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	13
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1	**Tenaga Kerja**									
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Persen	95.48	96.43	95.77	96,52	95,81	95,82	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
1.2	Persentase tenaga kerja di perusahaan yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan	Persen	82,64	86	86	88	88,47	88,47	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
2	**Pangan**									
2.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.61	79	83,04	80	82,58	103,23	Sangat Tinggi	Dinas KPTPH
2.2	Stabilisasi harga pangan	Koefisien	4,21	cv ≤ 5%		cv ≤ 5%				Dinas KPTPH
2.3	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	Persen	6	1		1				Dinas KPTPH
2.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (TPB)	Persen	90,6	88		89				Dinas KPTPH
2.5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	Persen	100	99,5		100				Dinas KPTPH
3	**Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah**									
3.1	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Persen	3,98	4,47	4,31	5,71	8,38	97,73	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
3.2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen	32,61	35,22	35,35	36,18	43,05	119	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
4	**Penanaman Modal**									
4.1	Realisasi investasi	Rupiah	9,36 Trilyun	13,5 Triliyun	7,9 Triliyun (S.d TW III)	16 Triliyun	9,6 Triliyun	87,82	Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.2	Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (IKD Baru)						88,00	87,27	Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	**Lingkungan Hidup**									
5.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,72	58.54	55,36	58,64	62,97	107,38	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,32	84,44	88,04	84,54	90,94	107,57	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	86,48	73.94	83,87	74,56	77,35	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	34,29	43,03	38,42	45,21	38,49	85,14	Tinggi	Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup
5.6	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	Persen	2,61	8.42		8,83				Dinas Lingkungan Hidup
5.7	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan. izin perlindungan dan pengelolaan	Persen	99,03	91		93	82,86	89,10	Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
	lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah									
6	**BPBD**									
6.1	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana		5,29	6,21	6,49	6,6				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	**Perhubungan**									
7.1	Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	Indeks	0.68	0.72	0.7	0,73	0,69	94,52	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	83,34	85	83	86	87,37	101,59	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
7.3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Persen	33	40	37	45	49,33	109,62	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
8	**Komunikasi dan Informatika**									
8.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	0	Baik	Baik	3,5 (Baik)	4,09	117	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi. Informatika. dan Statistik
8.2	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update	Persen	85	90	90	95				Dinas Komunikasi. Informatika. dan Statistik
8.3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	0	80	91,57	85 (menuju informatif)	95,27	112	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi.

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
										Informatika. dan Statistik
8.4	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik			Cukup Informatif	Informatif	Informatif				Sekretariat Daerah
8.5	Skoring LPPD Provinsi din Tingkat Nasional		N/A		Tinggi	Sangat Tinggi		N/A		Sekretariat Daerah
8.6	Persentase peliputan dan rilis kegiatan pimpinan daerah	Persen	100	92	92	93				Biro Administrasi Pimpinan
8.7	Indeks Pembangunan Statistik (IKU Baru)	Indeks					2,62	105	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi. Informatika. dan Statistik
8.8	Indeks Keamanan Informatika (Indeks KAMI) (IKU Baru)	Indeks					398	105	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi. Informatika. dan Statistik
9	**Persandian**									
9.1	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan sertifikat elektronik dan terintegrasi dengan BSSN	Persen	6	8	8	10				Dinas Komunikasi. Informatika. dan Statistik
10	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
10.1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	persen	2,02	3,1	6,35	3,2	5,61	175,31	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.2	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	persen	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
										Perlindungan Anak
10.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	persen	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
11.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	persen	98,26	88	100	92				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	persen	61,53	82	79,49	100				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
12.1	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	Persen	68,89	31,89	130,92	31,89				Dinas PMDT
12.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	4,3	16,67	7,4	23,44				Dinas PMDT
12.3	Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal	Persen		23,44	70,31					Dinas PMDT
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
13.1	Cakupan KB Aktif		67,21	67,71	70,8	68,24	65,22	95,63	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	**Kepemudaan dan Olahraga**									

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
14.1	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Pada Event-event Nasional	Persen	52,54	45	24,14	50	83,00	58,21	Rendah	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.2	Persentase Peran Serta Pemuda Berprestasi	Persen	34,13	53,82	50	55,15				Dinas Pemuda dan Olahraga
15	**Kebudayaan**									
15.1	Persentase Warisan Seni dan budaya yang tersertifikasi nasional	persen	70	76,25	80	80	91,25	100	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	**Perpustakaan**									
16.1	Persentase pengunjung perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan	Persen	37,85	48,2	47,1	55,6	54,50	98,02	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKD Baru)	Indeks					64,81	97,06	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tingkat Gemar Membaca (IKD Baru)						67,67	101,35	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	**Kearsipan**									
17.1	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	persen	30	35	40	40	40	100	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2	Nilai Indeks Digitalisasi Arsip	Indeks					87,63	99,58	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai					86,20	99,11	Sangat Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

b. Urusan Pilihan

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung, aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pilihan berjumlah 29 indikator, yang tersebar pada 8 bidang, yaitu 4 indikator bidang Pariwisata, 5 indikator bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan), 3 indikator bidang Perdagangan, 1 indikator bidang Perindustrian, 3 indikator bidang Kelautan dan Perikanan, 7 indikator bidang Perkebunan, 3 indikator bidang Kehutanan, dan 1 indikator bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Capaian kinerja di tahun 2024 pada Urusan Pilihan berada pada angka 100 persen (Sangat Tinggi). Satu indikator tidak dilaksanakan yaitu indikator pada bidang Kehutanan, dengan Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik Dengan Mekanisme Alam, Rehabilitasi Maupun Restorasi. Terdapat 19 indikator dengan Capaian Sangat Tinggi, 4 indikator dengan capaian Tinggi, 3 indikator dengan capaian Sedang, 1 indikator dengan capaian Rendah, dan 1 indikator dengan capaian Sangat Rendah.

Indikator dengan capaian Sangat Rendah terdapat di bidang Perdagangan, pada Indikator Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan target 6 persen dan realisasi 1,4 persen. Oleh karena itu tingkat capaian pada indikator ini hanya sebesar 23,33 persen (Sangat Rendah). Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan ini menggunakan dasar perhitungan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Hasil perhitungan di tahun 2023 menunjukkan progress capaian dari indikator ini masih jauh dari target yang ditetapkan karena beberapa komoditas mengalami penurunan harga.

Indikator dengan capaian Rendah terdapat pada bidang Pariwisata yaitu Indikator Persentase Peningkatan Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan dengan Target 12 persen di tahun 2024 dan realisasi sebesar 7,2 persen dengan tingkat capaian 60 persen

(Rendah). Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya indikator ini karena terdapat perubahan target yang disesuaikan dengan dokumen review Renstra Dinas Pariwisata, sehingga target yang ditetapkan pada Dinas Pariwisata lebih rendah daripada target yang ditetapkan pada RKPD. Perubahan target ini berdasarkan pada kondisi pariwisata yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak dari pandemi covid-19.

Tingkat capaian kinerja dengan kategori Sedang dicapai oleh 3 indikator antara lain pada bidang Pariwisata dengan Indikator Nilai Sektor Pariwisata dan (Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB Provinsi Lampung, Bidang Pertanian dengan Indikator Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura, dan pada Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Persentase Ekspor Perikanan. Permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian Indikator Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura antara lain disebabkan oleh :

1. Menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian
2. Konversi lahan yang tidak terkendali
3. Lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani
4. Tingkat kehilangan hasil yang cukup tinggi, penanganan pasca panen yang belum optimal, dan rendahnya daya saing terhadap produk impor.
5. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam mengakses sumber permodalan, penurunan tenaga kerja dan minat pemuda pada pengembangan tanaman hortikultura, dan kemampuan petani mengadopsi teknologi masih kurang.
6. Dalam pengembangan produksi tanaman hortikultura dapat sekaligus menjadi lokasi pariwisata, namun sinkronisasi sektor pertanian khususnya tanaman hortikutura dengan pariwisata masih belum terjalin dengan baik.

Pada bidang Pariwisata dengan Indikator Nilai Sektor Pariwisata dan (Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB Provinsi Lampung, capaian kinerja kategori sedang dan belum mencapai target mengalami hambatan dikarenakan masih belum pulih secara menyeluruh kondisi pariwisata yang terdampak dari pandemi covid-19. Kemudian pada Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Persentase Eksport Perikanan capaian kinerja pada kategori sedang namun belum mencapai target. pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian ekspor perikanan, berupa bantuan dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan berupa paket sarana rantai dingin (*cheest freezer*, *coolbox*), dan sarana pengolahan (*vacuum sealer*), bazar perikanan, dan pemantauan produk perikanan.

Tabel 2. 75 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
1	2	3	5	6	7	8	9		10	13
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Layanan Urusan Pilihan									
1	**Pariwisata**									
1.1	Presentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	37,9	37	315	20	1,73	78,30	**Tinggi**	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.2	Presentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	11,24	37	315	17	15,78	92,80	**Sangat Tinggi**	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.3	Presentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	7,9	14	12,1	17	29,70	174,90	**Sangat Tinggi**	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.4	Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung	Persen	1,52	3,75	2,7	4				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	**Pertanian (Tanaman pangan. Perkebunan dan Peternakan)**									
2.1	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Pangan (Padi. Jagung dan Ubi Kayu)	Persen	80	100	100,98	100	100,61	100,61	**Sangat Tinggi**	Dinas KPTPH
2.2	Persentase Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai Besar. Bawang Merah. Nenas. Pisang dan Manggis)	Persen	70	100	72,19	100	79,57	79,57	**Tinggi**	Dinas KPTPH
2.3	Jumlah Populasi Ternak	Jumlah								Dinas Peternakan dan

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
										Kesehatan Hewan
	-Sapi Potong		907,606	936.865	968.364	909.888				
	- Ayam Pedaging		114.422,47	88.017.528		89.777.878				
	- Ayam Petelur		16.599,64	13.634.285	15.708.329	10.033.943				
2.4	Jumlah Produksi Daging (Ayam dan Sapi)	Jumlah	147,533	115.293	235.556	114.758				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.5	Jumlah Produksi Telur	Jumlah	213,206	203.090	235.556	179.847				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	**Perdagangan**									
3.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	15,35	6	1,4	6,3	9,09	144,29	**Sangat Tinggi**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.2	Nilai Ekspor Non Migas	Indeks	5,18	3,65	4,65	3.8	5,58	111,60	**Sangat Tinggi**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.3	Andil Inflasi Bahan Makanan	Indeks	1.46	≤1.5	2,74	≤2	0,62	31,00	**Sangat Rendah**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	**Perindustrian**									
4.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	15,35	6.8	9,76	7,2	7,19	95,87	**Sangat Tinggi**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	**Kelautan dan Perikanan**									

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
5.1	Pntase Produksi Perikanarosen	Persen	100,5	100	96,7	100	100,47	100,47	**Sangat Tinggi**	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2	Prosentase Ekspor Perikanan	Persen	106,5	100	70,09	100	64,45	64,45	**Rendah**	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3	Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Patuh Kepada Alokasi Pemanfaatan Ruang	Persen		95	95		100	100	**Sangat Tinggi**	
6	**Perkebunan**									
6.1	Jumlah produksi lada rakyat	TON	15.455	15.695	15.036	15.932				Dinas Perkebunan
6.2	Jumlah produksi kopi robusta rakyat	TON	118.139	119.546	113.739	121.34				Dinas Perkebunan
6.3	Jumlah produksi tebu rakyat	TON	184.006	192.450	197.823	195.337				Dinas Perkebunan
6.4	Jumlah produksi Karet rakyat	TON	192.395	167.177	192.616	169.684				Dinas Perkebunan
6.5	Jumlah produksi kakao rakyat	TON	53.991	62.170	48.198	63.101				Dinas Perkebunan
6.6	Jumlah produksi kelapa sawit rakyat	TON	202.216	202.958	203.104	206.003				Dinas Perkebunan
6.7	Jumlah produksi kelapa dalam rakyat	TON	78.319	87.519	78.571	88.831				Dinas Perkebunan
7	**Kehutanan**									
7.1	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam. Rehabilitasi maupun Restorasi	Persen	538							Dinas Kehutanan
7.2	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen		0,05	0,5		0,85	100	**Sangat Tinggi**	

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
7.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks		43,03	38,42	39,13	38,49	98,36	**Sangat Tinggi**	
8	**Energi dan Sumber Daya Mineral**									
8.1	Rasio Dusun Berlistrik	Indeks	53,14	54	54,01	55	66,57	121,04	**Sangat Tinggi**	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8.2	Persentase EBT dalam Bauran Energi (IKD Baru)	Persen				34,80	35,22	101,20	**Sangat Tinggi**	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

c. Urusan Penunjang

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung, aspek Pelayanan Umum pada Urusan penunjang berjumlah 21 indikator, yang tersebar pada 5 bidang, yaitu 3 indikator bidang Keuangan, 5 indikator bidang Perencanaan Pembangunan, 2 indikator bidang Penelitian dan Pengembangan, 4 indikator bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, 7 indikator bidang Pengawasan.

Satu indikator tidak dilaksanakan yaitu indikator pada bidang Pengawasan, dengan Indikator Level Kematangan/Maturitas PBJ. Terdapat 16 indikator dengan Capaian Sangat Tinggi, 1 indikator dengan capaian Tinggi, 1 indikator dengan capaian Sedang, 1 indikator dengan capaian Rendah, dan 1 indikator belum mencapai 100 persen yaitu Indikator Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Belum tercapainya indikator ini karena pada saat dokumen evaluasi ini disusun, evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan oleh BPK sedang dalam proses pelaksanaan. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimuat dalam Lampiran BAB VII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah halaman 387 Point B.h bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksan Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tabel 2. 76 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum (Urusan Penunjang)

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
	Penunjang Urusan									
1	**Keuangan**									
1.1	Tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian		N/A	WTP	N/A	WTP			-	BPKAD
1.2	Persentasse Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	13.64	4,75	2,75	5	7,47	156,37	**Rendah**	Badan Pendapatan Daerah
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan	Persen	86,22	88,3	89,46	88,5	89,64	101,29	**Sangat Tinggi**	Badan Pendapatan Daerah
2	**Perencanaan Pembangunan**									
2.1	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	**Sangat Tinggi**	Bappeda
2.2	Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	42,77	31	48,3	32	43,00	100	**Sangat Tinggi**	Bappeda
2.3	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100	**Sangat Tinggi**	Bappeda
2.4	Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	**Sangat Tinggi**	Bappeda
2.5	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	Persen	90	95	70	95	95	100	**Sedang**	Bappeda
3	**Penelitian dan Pengembangan**									
3.1	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang di desiminasikan	Persen	82	85	85	87				Balitbangda

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
3.2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	**Sangat Tinggi**	Balitbangda
4	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**									
4.1	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi		70.3	75	73,15	80	81,17	101,4	**Sangat Tinggi**	BKD
4.2	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik		70,83	91	87,5	100	91,66	91,66	**Sangat Tinggi**	BKD
4.3	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat		32,9	38,3	38,4	48,40	49,30	101,86	**Sangat Tinggi**	BPSDM
4.4	Nilai Akreditasi Penyelenggaraan Diklat		B	A	A	A	B	105,36	**Sangat Tinggi**	BPSDM
5	**Pengawasan**									
5.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	Level	3 (3.192)	3 (3.05)	3,19	3 (3,08)	3,16	102	**Sangat Tinggi**	Inspektorat
5.2	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	persen	96	86	94	88	91,67	104	**Sangat Tinggi**	Inspektorat
5.3	Persentase Peraturan daerah (Perda) yang ditetapkkan.	persen	78,57	80	80,68	90				Sekretariat DPRD
5.4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan		100	100	100	100	100	100	**Sangat Tinggi**	Biro Hukum
5.5	Presentase Bantuan Hukum yang di fasilitasi		100	100	100	100	100	100	**Sangat Tinggi**	Biro Hukum
5.6	Level Kematangan/Maturitas PBJ			4		5				Sekretariat Daerah

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2022	2023		2024				Perangkat Daerah Pengampu
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
5.7	Persentase PD dalam pemenuhan dokumen Tata Kelola Organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Tatalaksana)	persen	85	90	90	100	100	100	**Sangat Tinggi**	Biro Organisasi

2.2.1.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung

Provinsi Lampung menunjukkan capaian SPM yang sangat baik di berbagai sektor, dengan perumahan rakyat dan kesehatan mencapai 100%. Namun, sektor pendidikan masih memiliki tantangan untuk mencapai target yang lebih tinggi, dan sektor ketertiban juga masih memerlukan perhatian untuk pencapaian yang lebih optimal.

Tabel 2.76 menunjukkan realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Lampung pada tahun 2024. Sektor Sosial mencapai 99,6%, Trantibumlinmas 96,7%, Perumahan Rakyat 100%, Pekerjaan Umum 97,9%, Kesehatan 100%, dan Pendidikan 92,2%.

Gambar 2. 64 Realisasi Capaian SPM Provinsi Lampung Tahun 2024

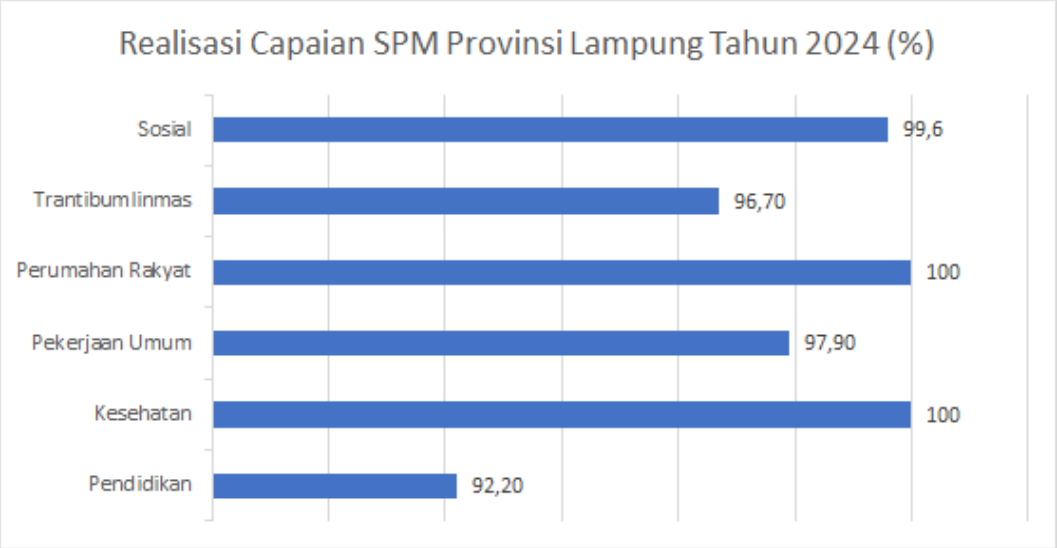

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

Selanjutnya kalo dilihat capaian SPM per urusan SPM pada Kabupaten/Kota Tahun 2024, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berada pada kategori "Tuntas Utama" dalam Indeks Pencapaian (IP) SPM, dengan capaian rata-rata di atas 90%. Kota Metro menempati posisi tertinggi dengan IP SPM 99,82%, menunjukkan konsistensi luar biasa di seluruh sektor. Di sisi lain, Pesisir Barat dan Lampung Timur menunjukkan capaian paling rendah, masing-masing masuk dalam kategori "Tuntas Pratama" dan "Tuntas Madya", dengan rata-rata hanya 77,11% dan 88,69%. Sektor Pendidikan masih menjadi tantangan di beberapa daerah seperti Lampung Selatan (66,25%) dan Pesisir Barat (61,03%). Sementara itu, sektor Perumahan Rakyat umumnya menunjukkan capaian maksimal (100%) di hampir seluruh

daerah. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Lampung menunjukkan capaian SPM yang sangat baik secara agregat, masih terdapat disparitas antar daerah yang perlu menjadi perhatian untuk pemerataan pelayanan publik.

Gambar 2. 65 Capaian SPM per Urusan Kab/Kota Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Capaian SPM Tahun 2024 (%)						Rata-rata	IP (Indeks Pencapaian) SPM
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas	Sosial		
1	Provinsi Lampung	92,2	100	97,9	100	96,67	99,64	97,74	Tuntas Utama
2	Lampung Selatan	66,25	97,78	100	95	98,96	100	93,00	Tuntas Utama
3	Lampung Tengah	100	97,45	100	100	100	100	99,58	Tuntas Utama
4	Lampung Utara	87,42	86,75	97,39	100	100	97,55	94,85	Tuntas Utama
5	Lampung Barat	70,77	93,11	91,49	50	96,24	92,25	82,31	Tuntas Madya
6	Tulang Bawang	87,71	92,81	100	76,92	83,36	97,76	89,76	Tuntas Madya
7	Tanggamus	86,15	93,43	81,78	95	97,77	100	92,36	Tuntas Utama
8	Lampung Timur	66,58	83,61	90,33	95	97,07	99,56	88,69	Tuntas Madya
9	Way Kanan	90,32	93,18	100	100	99,56	94,36	96,24	Tuntas Utama
10	Pesawaran	99,92	87,6	100	100	91,67	100	96,53	Tuntas Utama
11	Pringsewu	82,1	86,64	100	100	95,67	94,5	93,15	Tuntas Utama
12	Mesuji	94,87	86,74	100	100	98,16	99,4	96,53	Tuntas Utama
13	Tulang Bawang Barat	94,99	93,71	91,23	100	100	99,07	96,50	Tuntas Utama
14	Pesisir Barat	61,03	87,4	100	100	67,33	46,92	77,11	Tuntas Pratama
15	Bandar Lampung	100	100	96,84	100	86,8	85,6	94,87	Tuntas Utama
16	Metro	100	100	100	100	98,89	100	99,82	Tuntas Utama

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

2.2.1.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Provinsi Lampung telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) 2020–2024 sebagai panduan pembangunan berkelanjutan, dan saat ini tengah disusun RAD TPB periode 2025–2030. Penyusunan ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang RAD TPB/SDGs 2020–2024 dan juga diselaraskan dengan RAN TPB menggunakan metadata indikator terbaru.

Implementasi RAD TPB 2020–2024 dilakukan dengan pendekatan kolaborasi multipihak: Pemda (seluruh Kabupaten/Kota), Perguruan Tinggi, LSM dan dunia usaha, dengan dibantu sistem *digital dashboard SDGs* (kerja sama dengan Universitas Lampung) dalam proses monitoringnya. Selain itu, Rapat Koordinasi dan Monitoring Tahunan juga digelar oleh Bappeda untuk evaluasi pelaksanaan pada setiap pilar tujuan pembangunan.

Pemantauan implementasi RAD TPB 2020–2024 yang telah dilakukan (per data tahun 2022/2023) meliputi 12 dari 17 Tujuan TPB dan lebih dari 200 indikator yang dimonitor secara rutin. Data capaian dan analisis tematik per pilar disajikan sebagai berikut :

A. Pilar Sosial

- Dari total 91 indikator 74 diantaranya telah tercapai (81,3%).
- Fokus pada pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender.
- Tantangan pada pilar ini adalah akses pendidikan inklusif dan kesehatan universal di wilayah terpencil.

B. Pilar Ekonomi

- Dari total 35 indikator 31 diantaranya telah tercapai (88,6%).
- Kinerja baik dalam pertumbuhan ekonomi inklusif dan ketenagakerjaan produktif.
- Tantangan pada penguatan UMKM dan sektor informal berkelanjutan.

C. Pilar Lingkungan

- Dari total 22 indikator 16 diantaranya telah tercapai (72,7%).
- Terdapat indikator rawan seperti perubahan iklim, pengelolaan air dan sanitasi.
- Perlu peningkatan kerja dan aksi nyata terhadap perubahan iklim dan degradasi lahan.

D. Pilar Hukum & Tata Kelola

- Dari total 22 indikator 17 diantaranya telah tercapai (77,3%).
- Pilar ini meliputi transparansi, partisipasi publik, dan akses keadilan.
- Masih diperlukan penguatan kapasitas institusi lokal dan juga pelibatan masyarakat sipil.

Berdasarkan data tersebut, diperoleh beberapa hal yang menjadi tantangan berikut rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu :

1) Tantangan dan Isu Strategis

- Masih banyak indikator yang data capaiannya belum tersedia.
- Kapasitas Kabupaten/Kota belum merata dalam pelaksanaan RAD TPB.
- Koordinasi antar OPD dan mitra kerjanya masih belum optimal.
- Isu lingkungan menjadi salah satu prioritas/perhatian khusus yang perlu penanganan lintas sektor.

2) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Finalisasi RAD TPB/SDGs 2025–2030.
- Perluasan cakupan data SDGs, agar semua 17 tujuan dapat dipantau.
- Penguatan peran Kabupaten/Kota melalui RAD TPB di tingkat lokal serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan.

- Penguatan sinergi lintas sektor dan pelibatan universitas, swasta, dan komunitas.
- Fokus pada percepatan pencapaian indikator pilar lingkungan dan pilar hukum/tata kelola.
- Pengembangan dan pemanfaatan platform *dashboard digital monitoring SDGs* untuk publikasi dan transparansi data perkembangan TPB.

Secara umum, capaian TPB Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan berarti, terutama pada Pilar Ekonomi dan Sosial. Dengan penguatan Tata Kelola, pendekatan evaluasi berkelanjutan, data yang lebih baik, dan kerja kolaboratif, Provinsi Lampung berpeluang mencapai TPB secara menyeluruh pada tahun 2030. Lampung telah berada di jalur yang tepat, meski masih perlu dorongan khusus untuk menyelesaikan sisa indikator, terutama pada pilar lingkungan.

2.3. Pemasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Permasalahan pembangunan per-urusan di Provinsi Lampung antara lain berikut:

1. Pendidikan

- Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung tahun 2024 mencapai 8,36 tahun atau setara dengan kelas 2 sekolah menengah pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Lampung belum dapat mencapai wajib belajar 13 tahun;
- Masih kurangnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, hal ini terlihat pada angka partisipasi sekolah jenjang menengah yang baru mencapai 72,35 persen dan di bawah rata-rata

nasional sebesar 74,64 persen serta angka putus sekolah jenjang menengah/sederajat melebihi target Nasional sebesar 1 persen (2,59 persen);

- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan rasio antara guru dan siswa baik SMA (1:20) maupun SMK (1:15) sudah memenuhi standar yang ditetapkan, namun bila melihat penyebaran guru untuk daerah perkotaan dan pedesaan serta status PNS dan Non PNS masih belum terpenuhi;
- Kualitas mutu pendidikan (kompetensi minimum pendidikan dan pendidikan karakter) yang masih perlu ditingkatkan, yang dilihat berdasarkan asesmen Nasional kemampuan literasi, numerasi, iklim kebhinekaan, iklim keamanan dan iklim inklusivitas. Saat ini capaian literasi untuk semua jenjang dalam kategori "sedang" dan capaian Numerasi dalam kategori "sedang" pada jenjang SMA, SMPLB dan SDLB. Untuk SMK dan SMALB masuk dalam kategori "kurang". Capaian Iklim kebhinekaan, inklusivitas dan keamanan di Provinsi Lampung untuk semua jenjang kewenangan provinsi mencapai kategori "sedang" dan kurangnya pengembangan kurikulum pendidikan menengah;
- Masih kurangnya pendidikan inklusif (Partisipasi sekolah anak disabilitas baru mencapai 51,52%, Kategori "rendah"), hal ini dikarenakan belum semua sekolah menengah umum/kejuruan mampu menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), kurangnya edukasi kepada orang tua dan juga kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran ABK serta kompetensi guru ;
- Masih rendahnya tingkat melanjutkan sekolah menengah kejuruan ke perguruan tinggi (14,15%), lulusan yang bekerja (46,25%), lulusan yang berwirausaha (25,98%) dan nilai capaian kualitas/kompetensi lulusan sekolah menengah khususnya sekolah menengah kejuruan sebesar 67,34/ kategori sedang dan persentase kepuasan DUDI terhadap lulusan SMK sebesar 76,5 persen/kategori sedang, hal ini yang menyebabkan lulusan SMK sulit bersaing di pasar kerja ;
- Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran, hanya 63,71 % sekolah kejuruan yang memiliki fasilitas TIK

2. **Kesehatan**
   - Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, dapat dilihat dari peningkatan kasus kematian ibu sebanyak 96 kasus (tahun 2021), meningkat menjadi 105 kasus (tahun 2023). Begitu juga kasus kematian bayi yang meningkat dari 511 kasus di tahun 2019 menjadi 624 kasus di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas pelayanan, kondisi bumil yang kurang baik dan faktor lainnya;
   - Status gizi masyarakat yang masih kurang ditandai dengan masih tingginya prevalensi stunting yaitu 14,9 persen (SKI, 2023), bumil KEK (10,7 persen), remaja putri dengan anemia (13,3 persen) dan obesitas pada balita (0,6 persen);
   - Belum optimalnya akses dan mutu layanan kesehatan yang ditandai masih rendahnya rasio Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (3,43), masih rendahnya puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (37,8%) dan masih rendahnya Puskesmas dan Rumah sakit yang akreditasi
   - Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DBD, TB, Malaria dll) dan masih tingginya angka kejadian penyakit tidak menular terutama hipertensi, diabetes, jantung dan paru serta meningkatnya gangguan kesehatan mental;
   - Kurang optimalnya capaian pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi guna mencapai ***Population Immunity*** (Kekebalan Masyarakat).
3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
   - Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap provinsi, pada tahun 2024 capaian Provinsi Lampung sebesar 78,08% di bawah capaian Nasional sebesar 93,75%;
   - Jalan Nasional/Kab/Kota (belum terintegrasi kelas jalannya hingga ke sentra produksi)
   - Belum tercapainya target Nasional (100%) dan Provinsi Lampung (87,19%) terkait Air Minum layak 2024;
   - Kondisi jaringan Irigasi kewenangan Provinsi Lampung memiliki rata-rata kerusakan sebesar 37% (mulai 30% sampai dengan 70%) dengan luas areal layanan 17.440 Ha. Kerusakan ini mengakibatkan usia pakai

jaringan irigasi semakin pendek dan mengganggu pengairan pertanian.

- Belum tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional dan pendataan septic tank kedap BNBA serta belum optimalnya pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kabupaten/kota.
- Terbatasnya kapasitas prasarana pengendali banjir serta menurunnya kapasitas tampung sungai berkontribusi pada bertambahnya daerah rawan banjir.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

- Masih minimnya kualitas rumah dan Pelayanan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada kawasan kumuh di Provinsi Lampung seluas 465,85 Ha atau 23,66% dari total kawasan kumuh di Provinsi Lampung;
- Masih belum optimalnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perumahan terkait lahan untuk perumahan bagi korban bencana 35,3% (TW 2 2024);
- Kurangnya dukungan atensi pemerintah pusat terhadap Provinsi Lampung, atensi pemerintah pusat terfokuskan terhadap PSN (Program Strategis Nasional);

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Tingkat radikalisme yang semakin tinggi berasal dari konten digital dan marak terjadi pada kelompok rentan (ibu-ibu, remaja, dan pelajar);
- Kasus konflik sosial di masyarakat pada tahun 2019-2023 terjadi 10 kasus) dan tingginya rasio kriminalitas (sebesar 121,59% di tahun 2023 dengan total kejadian kriminal sebanyak 11.194 kejadian);
- Belum optimalnya penegakan peraturan daerah terutama yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, longsor) yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan masyarakat, serta menyebabkan erosi pantai/abrasi yang dapat merusak lingkungan pesisir.

6. Sosial

- Belum optimalnya penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena tidak sebanding dengan populasi PPKS dan sasaran penanganan;
- Kurangnya sinergi, kolaborasi, dan inovasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Penanganan PPKS;
- Masih minimnya afirmasi dari dunia usaha kepada tenaga kerja PPKS yang telah diberdayakan;
- Belum maksimalnya upaya pemulihan kegiatan ekonomi yang berdampak pada perbaikan kualitas hidup keluarga miskin khususnya daerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah Afirmasi 3TP;
- Kurangnya kesejahteraan terutama keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas; serta keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan disabilitas;
- Masih minimnya akses peningkatan kapasitas *care giver* lansia maupun keluarga lansia dalam mendampingi lansia terutama bagi lansia non potensial di komunitas maupun panti sosial, serta belum terintegrasinya upaya pemberdayaan dan pengembangan lansia dengan kegiatan ekonomi produktif.

7. Tenaga Kerja

- Tenaga kerja Provinsi Lampung Per Februari 2024 masih didominasi sektor informal sebesar 72,5%, sementara tenaga kerja sektor informal di Nasional sebesar 59,17% dan Sumatera sebesar 58,40%. Selain itu, tenaga kerja disabilitas yang bekerja di sektor formal juga masih terbatas;
- Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Provinsi Lampung Per Februari 2024 sebesar 46,19%, sementara di Nasional sebesar 28,64% dan rata-rata Sumatera sebesar 34,02%;
- Mayoritas penduduk bekerja di Provinsi Lampung memiliki tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) Per Februari 2024 sebesar 37,03%, sementara Nasional sebesar 36,54% dan rata-rata Sumatera sebesar 32,23%;

- Kurangnya *link and match* kebutuhan pasar kerja lokal serta keterbatasan jenis pelatihan (tidak *update*) yang ada di BLK (hanya ada 4 BLK di Provinsi Lampung dengan *output* 320 orang per tahun). Selain itu, lulusan pelatihan di BLK masih kurang diminati pasar kerja karena tidak adanya sertifikasi kompetensi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih rendahnya perlindungan bagi perempuan dan anak, terlihat dari peningkatan jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD P2TP2A dalam kurun waktu 3 tahun dari 146 kasus (2020) menjadi 171 kasus (2023) yang didominasi kekerasan terhadap anak kemudian diikuti kekerasan terhadap perempuan;
- Ketimpangan gender di Provinsi Lampung tahun 2023 mencapai 0,43, meski lebih baik 0,01 point dari angka Nasional namun pada komposit keterlibatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan menikmati hasil pembangunan belum mendapatkan porsi yang seimbang dengan laki-laki.

9. Pangan

- Turunnya laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan dari 2,31% (2022) menjadi -2,97% (2023); hortikultura dari 3,38% (2022) menjadi 1,66% (2023); dan peternakan dari 7,79% (2022) menjadi 7,01% (2023);
- Prevalensi ketidakcukupan pangan Provinsi Lampung cenderung fluktuatif (Tahun 2021 sebesar 10,25%, Tahun 2022 sebesar 14,63%, dan Tahun 2023 sebesar 8,81%) dan lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,53% (Tahun 2023) namun lebih baik dari rata-rata Sumatera sebesar 9,86% (Tahun 2023);
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 92,4%, masih berada di bawah skor PPH Nasional sebesar 94,1% meskipun berada di atas rata-rata skor PPH Sumatera sebesar 90,14%.

10. Lingkungan Hidup

- Kualitas lingkungan hidup di Lampung masih perlu ditingkatkan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung pada tahun 2024 berada pada kategori "BAIK" dengan nilai 73,11. Capaian IKLH Provinsi Lampung Tahun 2024 masih berada di bawah capaian IKLH Nasional Tahun 2024 yaitu sebesar 73,57 poin;
- Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 62,97 (kategori SEDANG) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 38,49 (kategori KURANG) yang masih di bawah target.;
- Belum tersedianya TPST Regional dan minimnya lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) baik kuantitas maupun kualitas.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih banyaknya masyarakat penduduk rentan administrasi kependudukan yang menempati wilayah tempat tinggal tidak sesuai dengan domisili sebagaimana data kependudukan;
- Minimnya pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih rendahnya capaian desa mandiri yaitu sebesar 7,4 persen pada tahun 2023 dan berada di posisi terendah ke-5 se Sumatera;
- Revitalisasi BUMDes salah satu upaya untuk mengembalikan BUMDes sebagai badan usaha yang menghimpun, mewadahi dan mengembangkan potensi lokal desa. Dari total 2.446 BUMDes, sebanyak 1.000 BUMDes telah termasuk dalam kategori **maju** dan 500 BUMDes termasuk dalam kategori **mandiri** serta sisanya masih perlu ditingkatkan kembali agar mampu mendukung pengembangan desa dan masyarakat desa;
- Masih tingginya persentase kemiskinan di pedesaan dibandingkan perkotaan (kemiskinan perdesaan sebesar 12,65% berbanding 8,02% untuk kemiskinan perkotaan tahun 2023);
- Migrasi penduduk dari desa ke kota yang berdampak negatif bagi desa, yaitu minimnya sumber daya manusia produktif dalam mengolah potensi lokal dan mengembangkan pembangunan desa.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 tahun atau menikah di bawah umur (*Age Spesific Fertility Rate*/ASFR) sebesar 19,3 persen yang berakibat kurangnya kualitas bayi yang dilahirkan.

14. Perhubungan

- Konektivitas jaringan transportasi yang masih rendah untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dan kegiatan antar wilayah;
- Kondisi fasilitas dan simpul transportasi yang belum memadai seperti terminal, pelabuhan, dan bandara;
- Masih tingginya tingkat *Over Dimension Over Loaded* (ODOL);
- Belum ada transportasi massal perkotaan di Wilayah Aglomerasi Metropolitan Bandar Lampung;
- Belum terintegrasi pelabuhan panjang sebagai pelabuhan logistik dengan jalur kereta api.

15. Komunikasi dan Informatika

- Masih terbatasnya akses dan infrastruktur telekomunikasi dalam pengembangan SPBE;
- Kurangnya keamanan data dan privasi dalam adopsi SPBE.

16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Koperasi Simpan Pinjam masih mendominasi jumlah koperasi dan lebih diminati anggotanya.Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
- Masih belum optimalnya pemasaran dan promosi produk UKM melalui media digital dan terkendalanya akses pasar.
- Terkendalanya akses pembiayaan dan permodalan bagi UKM.
- Hasil produksi UKM masih belum optimal (desain produk belum berbasis inovasi dan bahan baku belum sesuai standar) serta masih bergantung pada pekerja yang belum profesional.

17. Penanaman Modal

- ICOR Provinsi Lampung yang masih tinggi sebesar 7,46 (Tahun 2023) dibandingkan ICOR Nasional sebesar 6,33 (Tahun 2023);

- Kontribusi PMTB yang cenderung melambat (33,48% Tahun 2019 menjadi 32,33% Tahun 2023);
- Realisasi PMA dan PMDN cenderung melambat (Realisasi Investasi Tahun 2023 sebesar 10,8 atau tercapai sekitar 99% dari target);
- Terbatasnya proyek investasi yang *ready to offer* untuk ditawarkan pada investor

18. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendahnya keikutsertaan pemuda dalam pembangunan atau kegiatan masyarakat (69,17%) serta masih banyaknya pemuda yang terlibat dalam masalah sosial;
- Masih rendahnya pemuda yang berwirausaha (0,4 %);
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, hal ini terlihat dari masih rendahnya persentase Atlet Pelajar Berprestasi ajang nasional (58,31%)
- Masih rendahnya budaya dan partisipasi masyarakat pada kegiatan olahraga, hal ini terlihat pada capaian persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir yang masih rendah (39,41%) .

19. Statistik

- Kurangnya keterbukaan informasi publik;
- Pemahaman terkait pengumpulan data sektoral melalui kegiatan statistik dan metadata statistik masih minim;
- Sebaran data sektoral masih belum sesuai prinsip satu data.

20. Kebudayaan

- Masih rendahnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang berada pada kategori "sedang" terutama dimensi ekonomi budaya yang masih rendah (27,77%) dan ekspresi budaya (26,14%);
- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal yang menyebabkan terjadinya degradasi budaya lokal dalam lingkungan masyarakat.

21. Perpustakaan

- Masih rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat, dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Lampung sebesar 55,9 persen atau kategori sedang;
- Masih rendahnya implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Digital dan Inklusi Sosial.

22. Kearsipan

- Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dinamis pada perangkat daerah serta masih terbatasnya SDM fungsional pengelola arsip.

23. Pariwisata

- Masih rendahnya kontribusi sektor penyediaan makan minum dalam PDRB Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 1,61% dibanding Nasional sebesar 2,52%;
- Masih rendahnya daya saing pariwisata Lampung di tingkat Nasional (Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan Tahun 2023 sebesar 13,4 Juta orang atau hanya 1,6% dari total wisatawan Nasional sebesar 825,8 juta orang);
- Kurangnya daya Tarik wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara (Rata-rata lama menginap tamu asing dan mancanegara Tahun 2023 adalah 1,46 hari, sementara di Nasional adalah 1,62 hari);
- Menurunnya tingkat penghunian kamar hotel berbintang dari 55,67% (Tahun 2022) menjadi 53,52% (Tahun 2023).

24. Pertanian

- Laju pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas) cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir (Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2023 sebesar 0,55 persen, menurun dibandingkan capaian 2019 sebesar 1,36 persen);
- Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung selama 10 tahun terakhir (Kontribusi Sektor Pertanian

terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 27,29 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 33,16 persen);

- Masih rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung jika dibandingkan Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 NTP Lampung 109,36; Sumatera 122,52; dan Nasional 112,46);
- Masih rendahnya nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dibanding Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 sebesar Rp.61.626.262,3, Nasional Rp. 66.352.036,91 dan rata-rata Sumatera sebesar Rp. 96.897.736,88 per tenaga kerja);
- Sumber daya manusia pertanian didominasi oleh pendidikan dasar sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian
- Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan masih terdapat lahan yang tidak mendapatkan irigasi akibat supply air dari bendungan yang kurang ketika musim kemarau;
- Masih terbatasnya hilirisasi produk hasil pertanian dan masih rendahnya harga di tingkat petani;
- Terbatasnya akses permodalan di tingkat petani dan dukungan sarana prasarana pertanian (dalam arti luas);
- Mayoritas petani didominasi oleh petani gurem/lahan kurang dari 0,35 ha dan penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas;

25. Peternakan

- Produk peternakan belum dilengkapi sertifikasi agar bisa bersaing di nasional maupun global serta keterbatasan pengolahan peternakan;
- Harga pakan ternak yang cenderung tinggi mengakibatkan tingginya harga produksi;
- Keterbatasan permodalan karena mayoritas peternak masih didominasi peternak kecil;
- Investasi sektor peternakan masih sangat minim, hanya 0,24% di Tahun 2023 padahal potensi Lampung sangat besar;
- Laju pertumbuhan sektor peternakan menurun dari 7,51% (Tahun 2019) menjadi 7,01% (Tahun 2023).

26. Perkebunan

- Produktivitas sektor perkebunan masih rendah, khususnya kopi Lampung (0,7 ton/hektar) masih di bawah Sumatera Selatan (0,8 ton/hektar) bahkan Negara Brazil bisa mencapai 7-8 ton/hektar;
- Laju pertumbuhan sektor perkebunan menurun dari 2,79% (Tahun 2019) menjadi -3,14% (Tahun 2023);
- Masih terbatasnya SDM dan penggunaan teknologi perkebunan.

27. Kehutanan

- Degradasi hutan yang semakin tinggi, dengan banyaknya alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies flora dan fauna.
- Makin banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Kewenangan Provinsi yang dapat menyebabkan persoalan pengelolaan hutan diantaranya: deforestasi, konflik tenurial, tindak pidana kehutanan, dan pemicu kebakaran hutan dan lahan.
- Masih tingginya jumlah luasan lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman lingkungan.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Lampung.

28. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Lampung mengalami defisit kapasitas pembangkitan listrik, yang mengakibatkan ketidakstabilan pasokan listrik, dan ketergantungan pada interkoneksi wilayah Sumbagsel. Pasokan Pembangkit Listrik pada Januari 2024 sebesar 673,2 MW dengan beban puncak 1280,2 MW sehingga defisit sebesar 606,7 MW. kekurangan ini dipasok oleh Transfer P3BS Sumatera Selatan;
- Potensi energi listrik yang berasal dari panas bumi masih belum termanfaatkan secara maksimal dari 13 WK panas bumi baru 1 lokasi yang dapat dimanfaatkan di Ulu Belu;
- Masih rendahnya pembangunan jaringan gas sementara kebutuhan energi gas di Lampung mencapai sekitar 5% sampai Tahun 2023 pemasangan SR sebesar 17.156 dari target 100.000 (Tahun 2025 dalam Perda RUED).

29. Perdagangan

- Masih kurangnya kemitraan antar industri kecil menengah dengan perusahaan besar dan BUMN/BUMD;
- Meningkatnya andil inflasi bahan makanan terhadap capaian Inflasi Provinsi Lampung (andil inflasi bahan makanan tahun 2023 sebesar 2,74 persen, meningkat dibandingkan capaian 2022 sebesar 0,9 persen);
- Kerjasama antar daerah masih terbatas pada perdagangan komoditas pertanian yang bernilai tambah rendah.

30. Perindustrian

- Masih rendahnya nilai tambah sektor industri manufaktur dibanding Sumatera dan Nasional (Tahun 2023 Lampung sebesar Rp.5070 per kapita, Sumatera sebesar Rp.10.221 per kapita, dan Nasional sebesar Rp. 9.000 per kapita);
- Kinerja sektor perindustrian masih didominasi oleh industri makanan dan minuman (Tahun 2024 sebesar 16,14%), dengan kontribusi yang cenderung menurun selama 5 tahun terakhir dari 20% (Tahun 2019) menjadi 18,01% (Tahun 2023), berada di bawah capaian kontribusi industri pengolahan Nasional sebesar 18,67%;
- Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Tahun 2023 sebesar 1,40% sementara sebesar Nasional sebesar 4,64%;
- Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam penerapan standar mutu/kualitas produk (PIRT, BPOM, HALAL, HACCP), penggunaan teknologi, inovasi, diversifikasi produk dan pengemasan produk;
- Terbatasnya jumlah industri besar dan sedang.

31. Transmigrasi

- Perpindahan penduduk mengakibatkan pergeseran budaya dan sosial antara pendatang dan penduduk lokal bahkan berpotensi menimbulkan konflik budaya, perbedaan adat istiadat, dan penolakan dari masyarakat setempat;
- Belum meratanya ketersediaan dan akses sarana prasarana dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah) di daerah transmigrasi yang berdampak pada kesulitan beradaptasi.

32. Kelautan dan Perikanan

- Kontribusi sub sektor perikanan cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir (kontribusi sub sektor perikanan tahun 2023 sebesar 5,26 persen, meningkat dari capaian tahun 2019 sebesar 2,40 persen);
- Laju pertumbuhan sub sektor perikanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir (laju pertumbuhan sub sektor perikanan tahun 2021 sebesar 0,91 persen, Tahun 2022 sebesar -5,34 persen dan Tahun 2023 sebesar 5,52 persen);
- Masih belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penggunaan alat tangkap ikan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan;
- Penggunaan lahan perikanan yang tidak sesuai menyebabkan kontaminasi sumber penyakit;
- Produksi kebutuhan pakan belum tercukupi meski sudah dilakukan kerjasama dengan universitas namun masih kekurangan bahan baku pembuatan pakan yang masih impor.

33. Perencanaan Pembangunan

- Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan yang masih belum optimal;
- Implementasi kebijakan satu data indonesia sebagai acuan perencanaan pembangunan di daerah masih belum memenuhi kriteria data yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data;
- Instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja (cascading, crosscutting, dan pohon kinerja) di tingkat perangkat daerah masih belum optimal digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

34. Keuangan

- Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah;
- Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dioptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber–sumber pendapatan daerah lainnya;

- Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat;
- Belum optimalnya sistem pengelolaan aset daerah.

35. Kepegawaian Serta Pendidikan Pelatihan

- Belum efektifnya layanan digitalisasi kepegawaian secara terpadu sebagai dasar peningkatan kompetensi ASN;
- Belum terintegrasinya sistem pembelajaran yang memadukan antara pekerjaan dengan pembelajaran ASN secara efisien dan efektif.

36. Penelitian dan Pengembangan

- Kurangnya kolaborasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang inovatif dan relevan, antara lembaga penelitian, universitas, dan instansi/lembaga swasta;
- Belum optimalnya peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Pengembangan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- Belum adanya penjamin kualitas riset dan inovasi dikarenakan belum optimalnya tim pengendali mutu.

37. Pengawasan

- Hasil Survei Penilaian Integritas Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebesar 65,83 masuk dalam kategori rentan, menurun sebanyak 2,61 poin dari hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 sebesar 68,44.
- Belum optimalnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern di Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Keterbatasan SDM APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Lampung tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kondisi tahun 2024 serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional (global), nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Provinsi Lampung. Beberapa Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2. 66 Kerangka Berpikir Perumusan Isu Strategis Daerah

Perumusan prioritas pembangunan tahun 2026 dilakukan melalui proses yang sistematis dan berbasis pada berbagai dokumen perencanaan serta analisis kondisi strategis. Proses ini diawali dengan merujuk pada dokumen-dokumen utama daerah, yaitu **RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029** dan **dokumen RTRW/KLHS**. Dokumen-dokumen ini memberikan arah pembangunan jangka menengah serta memastikan kesesuaian pembangunan dengan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Selanjutnya, proses ini juga memperhitungkan hasil **evaluasi capaian pembangunan tahun 2024**, serta memperhatikan berbagai **tantangan pembangunan** baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Di samping itu, dilakukan **penelaahan terhadap dokumen nasional** seperti RPJMN, RKP, serta komitmen internasional seperti SDGs dan dokumen KLHS nasional.

Dari proses tersebut, diidentifikasi **isu strategis tahun 2026** yang menjadi dasar dalam merumuskan **sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan**. Isu strategis ini mencerminkan persoalan aktual yang perlu direspon secara tepat, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan.

Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam bentuk **program dan kegiatan prioritas**, sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

Tabel 2. 77 Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026

Tantangan/Isu Global	Tantangan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029	Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMD 2025 -2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2026
1. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan 2. Krisis Energi 3. Pemulihan Ekonomi pasca Covid-19 4. Perang dan Ketegangan Geopolitik 5. Isu Kesehatan Mental dan Kesejahteraan 6. Krisis Pengungsi dan Migrasi 7. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi 8. Transformasi Digital dan Keamanan Siber 9. Krisis Pangan Global	1. Rendahnya Produktivitas 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 4. Kebutuhan Hidup Tingai pada Usia Produktif 5. Krisis Lingkungan 6. Dinamika Geopotitik dan Geoekonomi 7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Stagnasi Kinerja Sektor Industri 2. Penguatan Blue dan Green Economy untuk Meningkatkan pertumbumbuhan Ekonomi 3. Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Pertanian berbasis Teknologi untuk Mencapai Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional 4. Potensi Ekosistem Ekonomi Desa 5. Pariwisata dan UMKM sebagai sektor pendorong perekonomian daerah 6. Ketahanan dan Kemandirian Energi 7. Penguatan Infrastruktur Transportasi untuk Konektivitas Wilayah yang Handal 8. Tingginya Proporsi Penduduk Usia Produktif Provinsi Lampung 9. Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi	1. **Aspek Pembangunan Ekonomi dan SDA** • Masih rendahnya produktivitas dan hilirisasi pertanian berbasis tekhnologi • Stagnasi sektor industry (kontribusi PDRB sektor sekitar 18%) • Sektor Pariwista dan UMKM belum signifikan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah • Rendahnya Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (5 tahun terakhir kontribusi PMTB cenderung turun) • Blue dan Green Economy belum optimal • Economy digital belum dimanfaatkan secara	1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Kurang efektifnya Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi wilayah. 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung 4. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung 5. Belum optimalnya tata Kelola Pemerintahan untuk pelayanan publik. 6. Semakin menurunnya daya dukung dan daya tamping lingkungan untuk mendukung bpembangunan

Tantangan/Isu Global	Tantangan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029	Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMD 2025 -2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2026
		10. Pelestarian Nilai Religi, Budaya dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial Pembangunan 11. Pengentasan Kemiskinan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 13. Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan 14. Masih Relatif tingginya Kerentanan dan Potensi Bencana di Provinsi Lampung 15. Mewujudkan Birokrasi yang Berintegritas 16. Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17. Pembangunan Kota Baru "Bandar Negara" yang perlu dilanjutkan Berbasis Eco-City 18. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar	optimal • Angka kemiskinan masih tinggi (maret 2024 sebesar 10,69%) 2. **ASPEK PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA** • Kurangnya Akses dan mutu Pendidikan serta Derajad Kesehatan Masyarakat • Belum maksimalnya perlindungan Sosial untuk kelompok rentan • Masih rendahnya jumlah pekerja formal (30,86% pada Agt 2024) • Masih terjadi konflik antar masyarakat akibat permasalahan ekonomi dan sosial 3. Aspek Tata Kelola Pemerintahan • Belum optimalnya Pelayanan Publik	berkelanjutan. 7. Tantangan untuk mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya.

Tantangan/Isu Global	Tantangan Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029	Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMD 2025 -2029	Permasalahan Pembangunan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Lampung Tahun 2026
			• Kompetensi dan integritas Aparatur perlu ditingkatkan • Digitalisasi pemerintahan belum optimal 4. Aspek Pembangunan Infrastruktur Dan Kewilayahan • Kemantapan infrastruktur jalan belum merata • Jaringan Irigasi belum sepenuhnya mendukung swasembada pangan • Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan • Masalah persampahan	

PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
LAMPUNG

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Lampung
2026

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, pembangunan daerah harus membuka kesempatan dan memperluas pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, sehingga tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan aman; beriring dengan terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan dukungan perencanaan pembangunan wilayah yang memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui kebijakan yang bersifat inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju “Indonesia Emas 2045” serta sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029.

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan, transformasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, dengan

fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas, dan hilirisasi produk pertanian. Kebijakan ini dipadukan dengan pengembangan kawasan pesisir melalui pendekatan ekonomi biru guna mendorong Lampung sebagai pusat pertumbuhan pangan akuatik di kawasan barat Indonesia.

Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi mengalokasikan prioritas pada pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, irigasi pertanian, serta penyediaan energi terbarukan guna mendukung konektivitas antarwilayah dan efisiensi rantai pasok. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan iklim investasi dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas basis ekonomi lokal.

Selaras dengan prinsip pembangunan berkeadilan, kebijakan ekonomi tahun 2026 juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan menjadi kunci penguatan daya saing daerah, dengan dukungan sistem informasi pembangunan berbasis data statistik yang akurat dan real-time.

Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan partisipasi publik sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, arah kebijakan ekonomi Lampung tahun 2026 diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, mempersempit ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menyadari bahwa perekonomian Provinsi Lampung merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi), perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Lampung.

3.1.1 Dinamika Perekonomian Global

Ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama akibat ketegangan perdagangan dan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi menghambat perdagangan internasional dan investasi global. Risiko eskalasi perang dagang, seperti kenaikan tarif AS terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, pengenaan tarif atas produk baja dan aluminium yang masuk pasar AS, serta tarif resiprokal pada mitra dagang AS, juga dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan potensi inflasi dan menekan kinerja perdagangan internasional. Dampaknya eskalasi perang dagang juga dirasakan Indonesia, khususnya pada ekspor komoditas yang berpotensi menekan penerimaan negara dan menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Strategi *de-risking* dan *friendshoring* oleh Amerika Serikat dan mitra dagangnya turut mengubah pola perdagangan global, yang pada gilirannya juga memicu pergeseran aliran investasi dan perdagangan global. Percepatan inovasi digital dan adopsi teknologi baru juga mengubah lanskap industri, yang menuntut negara berkembang untuk beradaptasi guna mempertahankan daya saing. Tanpa penguatan industri berbasis teknologi dan peningkatan efisiensi produksi, Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global.

Tingkat suku bunga global yang masih relatif tinggi serta kembalinya sentimen high for longer di AS dapat memicu aliran modal keluar dan depresiasi nilai tukar di negara berkembang. Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta asing dan menekan kondisi fiskal. Di sisi lain, kebutuhan menjaga imbal hasil yang kompetitif untuk menarik arus modal masuk dapat mengancam keberlanjutan fiskal akibat tingginya cost of fund pemerintah.

Konflik berkepanjangan di Ukraina dan Timur Tengah menambah ketidakpastian dengan meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan perdagangan. Gangguan pada rantai pasok energi dan pangan global

berpotensi memicu lonjakan inflasi, yang berdampak pada fluktuasi harga ekspor-impor dan tekanan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sentimen negatif dari ketidakstabilan geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian dalam arus investasi global.

Pada saat yang sama, dunia saat ini sedang mengalami pergeseran geopolitik yang melemahkan sistem multilateral, sebagaimana tecermin dari kebijakan tarif impor agresif dari AS dan tindakan balasan dari Tiongkok. Dinamika ini mendorong bangkitnya proteksionisme serta intervensi negara yang lebih aktif dalam perekonomian. Institusi multilateral semakin kehilangan pengaruh, sementara kerja sama ekonomi global terus mengalami kemunduran. Pola kebijakan negara yang semakin inward looking, didorong oleh kepentingan geostrategis dan kebijakan proteksionis, memberikan tekanan besar terhadap rules based trade system yang selama ini menjadi landasan stabilitas ekonomi global.

Perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi ancaman serius bagi ekonomi global, dan terutama negara-negara yang secara geografis dekat dengan Tiongkok termasuk Indonesia. Sebagai salah satu kontributor signifikan manufaktur dan perdagangan dunia, moderasi pertumbuhan Tiongkok dapat menurunkan permintaan global dan berdampak signifikan pada ekspor negara mitranya. Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi Tiongkok berisiko mengurangi permintaan ekspor khususnya komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Penurunan ekspor ini pada gilirannya akan menurunkan kinerja neraca perdagangan, menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dan dapat berdampak negatif pada penerimaan negara.

Sementara itu, perubahan iklim yang semakin ekstrem juga meningkatkan risiko ketahanan pangan dan energi global. Bencana alam akibat faktor iklim yang lebih sering terjadi dapat mengganggu produksi pertanian dan memicu volatilitas harga pangan internasional. Di sisi lain, transisi menuju energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon mengubah struktur permintaan energi dan komoditas mineral, sehingga menuntut negara- negara untuk mampu menyesuaikan diri dengan tren ini, apabila tidak ingin kehilangan daya saing di sektor ekspor energi dan bahan baku industri hijau.

Perekonomian global tahun 2026 diproyeksikan masih akan lemah. Dalam World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,2 persen pada 2024 ke 2,8 persen di 2025 dan 3,0 persen di 2026. Angka ini turun cukup jauh dari proyeksi sebelumnya, masing-masing sebesar 0,5 poin persentase dan 0,3 poin persentase. Angka proyeksi pertumbuhan ini tetap di bawah rata-rata pertumbuhan global tahunan pada periode 2000–2019 sebesar 3,7 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global ini dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023 - 2026 (%, yoy)

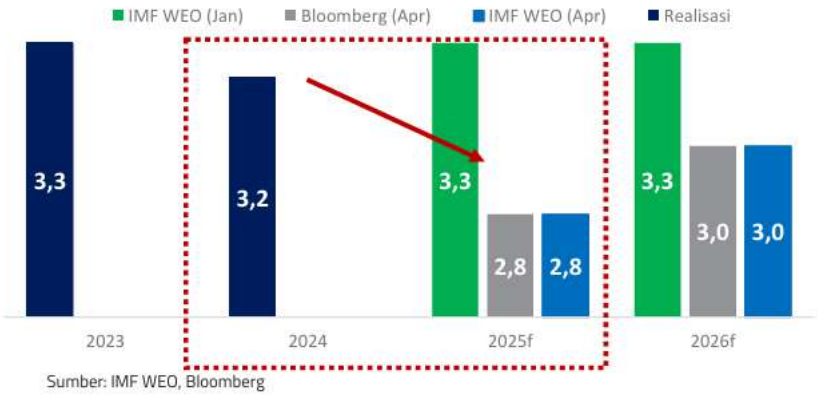

Sumber: IMF WEO, Bloomberg

3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Gejolak perekonomian global yang bergerak sangat dinamis berdampak pada kinerja perekonomian domestik yang terefleksi pada perlambatan kinerja ekspor-impor, terganggunya investasi, tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Indonesia saat ini juga masih menghadapi tantangan struktural yang membutuhkan respons secara tepat, terukur dan konsisten yaitu: (1) Bonus demografi yang semakin terbatas; (2) Pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital (artificial intelligence/AI) dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang masih perlu ditingkatkan; serta (4) Perubahan iklim yang semakin ekstrem sehingga perlu diantisipasi dan dimitigasi.

Hal ini tentunya harus diantisipasi dan dimitigasi baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dengan strategi yang tepat. Dalam jangka pendek difokuskan untuk meredam gejolak melalui upaya stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga agar APBN tetap sehat dan kredibel. Sementara, strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi reformasi struktural untuk memperkuat daya saing dan daya tahan ekonomi menuju Indonesia yang berdaulat, tangguh, mandiri, dan sejahtera. Eskalasi perang dagang yang tengah terjadi juga menjadi momentum untuk berbenah, untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi. Upaya tersebut antara lain dengan membangun kerja sama dan kolaborasi antarnegara yang lebih solid di bidang perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan, sehingga terbangun pola kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan dalam koridor kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa tetap menjadi yang utama.

Kerja sama dengan LKI selama ini telah memberikan dukungan yang signifikan bagi Indonesia. Diantaranya dengan World Bank Group (WBG) yang memberikan dukungan finansial untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia serta peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan mitra strategis lainnya seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). ADB mendukung pembangunan di Indonesia melalui pinjaman dan hibah aktif untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. IsDB bekerja sama dengan Indonesia berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang krusial seperti pertanian, keamanan pangan, dan pembangunan pedesaan, yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial di daerah-daerah terpencil. AIIB memberikan dukungan finansial pada proyek proyek infrastruktur, kesehatan, dan respons krisis yang membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

Pemerintah menyadari bahwa dalam menangani isu-isu global yang semakin kompleks, dibutuhkan penguatan kerja sama untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Hal ini juga yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota BRICS pada awal 2025. Indonesia saat ini sedang dalam proses aksesi menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-

operation and Development/OECD). OECD merupakan forum internasional yang terdiri dari negara negara maju dengan komitmen untuk mendorong kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, tema RKP Tahun 2026 adalah ***" Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif ".*** Dalam rangka mendukung pencapaian tema *tersebut*, pemerintah menetapkan **5 Direktif Presiden** sebagai panduan strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2026 dan Pengarusutamaan Pembangunan dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2026. Kelima direktif tersebut mencerminkan fokus pemerintah terhadap penguatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut :

1. **Penguatan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.**

   Pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis desa dan kelurahan. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperluas lapangan kerja berbasis potensi lokal.

2. **Penerapan Digitalisasi Pendidikan**

   Digitalisasi sektor pendidikan menjadi prioritas strategis dalam rangka peningkatan mutu dan akses pendidikan nasional. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat proses belajar-mengajar, pemerataan layanan pendidikan, serta percepatan transformasi sistem pendidikan nasional.

3. **Pengentasan Kemiskinan melalui Perlindungan Sosial**

   Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui penguatan program perlindungan sosial berbasis **Kartu Kesejahteraan** dan **Kartu Usaha Afirmatif**. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, serta mendorong mobilitas sosial yang inklusif.

4. **Pengelolaan Sampah Terpadu**

   Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan terpadu dalam pengelolaan sampah mencakup pengurangan, pemilahan, daur ulang, serta pengolahan sampah yang ramah lingkungan guna mendukung kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

5. **Sekolah Rakyat**

   Dalam upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu, pemerintah merancang program "Sekolah Rakyat" sebagai wadah pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu. Fasilitas pendidikan ini ditujukan untuk memperkecil kesenjangan akses dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pendidikan.

Pengarusutamaan Pembangunan dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2026 yang menjadi bagian integral dari kerangka perencanaan nasional, sebagai berikut:

1. **Gender dan Inklusi Sosial**

   Pemerintah menargetkan peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup, serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, inklusivitas bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi perhatian utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan setara.

2. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

   Pelaksanaan agenda SDGs diperkuat melalui integrasi ke dalam proses perencanaan, pelaporan, dan penganggaran pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan, guna menjamin pencapaian target pembangunan global secara sistematis dan terukur.

3. **Transformasi Digital**

   Transformasi digital diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, memperluas pelayanan publik berbasis digital, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.

4. **Pembangunan Rendah Karbon**

   Upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi prioritas dalam mendukung komitmen nasional terhadap perubahan iklim. Kebijakan pembangunan rendah karbon akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan sektoral dan wilayah.

5. **Pembangunan Berketahanan Iklim**

   Pemerintah berupaya meminimalkan dampak ekonomi dari perubahan iklim melalui peningkatan ketahanan pada empat sektor utama: kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta melindungi masyarakat dari risiko iklim yang meningkat.

Untuk mendukung pencapaian tema pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah target makro yang menjadi ukuran capaian pembangunan nasional, yang dikelompokkan ke dalam tiga sasaran utama:

Tabel 3. 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

No.	Sasaran Pembangunan Nasional	Target 2026
1.	**Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan**	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3
	GNI per capita (USD)	5.870
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
2.	**Penurunan Kemiskinan**	
	Kemiskinan Ekstrim (%)	0
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
	Rasio Gini (Nilai)	0,377 – 0,380
3.	**Sumber Daya Manusia Berkualitas**	
	Indek Modal Manusia (Nilai)	0,57

Sumber : Ranwal RKP 2026, Kementerian PPN/Bappenasm- Maret 2025.

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan sejumlah **asumsi dasar makro ekonomi** yang

merepresentasikan kondisi ekonomi nasional dan global yang diproyeksikan akan memengaruhi pelaksanaan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

Asumsi-asumsi tersebut disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian domestik, ketidakpastian global, serta arah kebijakan transformasi struktural yang tengah berjalan. Berikut adalah rincian asumsi makroekonomi Tahun 2026:

Tabel 3. 2 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran 2026 (KEM-PPKF)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8
2.	Inflasi (%)	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500 – 16.900
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6 – 7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) (USD/barel)	60 – 80
6.	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600 – 605
7.	Lifting Gas Bumi (mmscfd)	953 – 1.017

*) KEM-PPKF : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Sumber : Kementerian Keuangan, 2025

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Kinerja ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen (ctc), menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,55 persen (ctc). Pertumbuhan ini mencerminkan konsistensi positif dalam pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen (ctc). Ketimpangan ini menandakan perlunya optimalisasi sektor-sektor strategis di daerah, termasuk peningkatan nilai tambah produk unggulan, penguatan iklim investasi, serta akselerasi transformasi digital dan infrastruktur.

Secara struktural, perekonomian Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 26,21 persen terhadap PDRB. Namun, sektor ini mengalami kontraksi sebesar –2,09 persen, menandakan tekanan produksi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem dan gangguan iklim.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan justru menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2024. Dengan kontribusi sebesar 18,93 persen, sektor ini mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 9,09 persen dan menyumbang sekitar 1,60 poin pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan mulai menunjukkan hasil signifikan dalam meningkatkan nilai tambah daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, turut memberikan kontribusi yang kuat dengan porsi 14,25 persen terhadap PDRB dan kontribusi pertumbuhan sekitar 1,03 poin. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 10,04 persen, sejalan dengan peningkatan aktivitas distribusi dan konektivitas wilayah.

Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy), mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada level 2,61 persen. Penurunan inflasi ini menunjukkan efektivitas koordinasi pengendalian harga di tingkat daerah, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan dan musim panen raya. Inflasi Lampung pada tahun 2024 sejajar dengan inflasi nasional yang juga berada pada level 1,57 persen (yoy). Ini merupakan capaian yang relatif stabil dalam konteks tekanan harga pangan global dan fluktuasi nilai tukar. Sebagai provinsi lumbung pangan, pengendalian distribusi dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur ayam ras menjadi kunci keberhasilan stabilitas harga.

Dalam aspek Pembangunan Manusia, Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Lampung mencapai 73,13, naik dari 72,48 di tahun 2023. Pertumbuhan sebesar 0,65 poin ini memperkuat posisi Lampung dalam kategori IPM "tinggi", sebagaimana telah dicapai sejak tahun 2022. Meskipun demikian, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional maupun regional Sumatera. Hal ini menjadi catatan penting untuk terus memperkuat program-program yang menyasar kelompok rentan, memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan primer, dan membuka peluang ekonomi yang lebih merata hingga ke desa-desa.

Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,62 persen di tahun 2019 menjadi 10,69 persen di Tahun 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,03 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif selama enam tahun terakhir, mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani secara gradual. Pada tahun 2024, NTP Lampung tercatat sebesar 124,98, melampaui NTP nasional yang berada di angka 119,62. Capaian ini mengindikasikan bahwa petani di Lampung mengalami perbaikan daya beli dan pendapatan riil yang lebih tinggi dibandingkan rerata petani secara nasional. Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung se Sumatera berada pada posisi ke 6 (enam) dengan nilai 124,98, NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,,22 , Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 . Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin .

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Lampung Tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,2 - 5,7 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 - 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Lampung. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,9 – 8,9 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,05 - 3,51 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,290 - 0,274 di Tahun 2026.

Tabel 3. 3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Lampung Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Proyeksi 2026*)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20 – 5,70
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,05 - 3,51
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	9,9 – 8,9
4.	Rasio Gini	Rasio	0,290 – 0,274
5.	Intensitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	64,03

**) Target sesuai dengan hasil pembahasan pada Rakortek dengan Bappenas RI*

Pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diarahkan dengan tema Pembangunan : **"Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Arah kebijakan perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2026 merupakan bagian dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu:

a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif
b. Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan produktif
c. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas

Upaya memperkuat perekonomian Lampung dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran,

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain:

1) **Membangun Ekosistem ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.**

   Provinsi Lampung memegang keyakinan bahwa kekuatan pembangunan ekonomi daerah terletak di akar rumput—di desa-desa yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan lebih dari 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pedesaan, Lampung menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan yang harus diberdayakan, disambungkan, dan dinaikkan kelasnya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Lampung tahun 2025–2026 dan ke depan diarahkan untuk membentuk **ekosistem desa yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing dalam jaringan ekonomi yang lebih luas**.

2) **Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah.**

   Upaya meningkatan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan. Kapasitas perkonomian yang diharapkan tumbuh tinggi mengalami kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian Provinsi Lampung belum didukung ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

3) **Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat**

   Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

4) **Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan.**

Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik *full employment.* Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja formal dan keseimbangan demand dan supply di pasar kerja.

5) **Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil**

Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersedian barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat *booming* namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

6) **Pemerataan distribusi pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

Berbagai dinamika global dan nasional saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih memerlukan upaya-upaya percepatan menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia, Untuk mewujudkan target pembangunan daerah, diperlukan kerja keras disertai pilihan-pilihan **kebijakan strategis** dalam mengatasi tantangan yang tengah berlangsung, diantaranya :

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.
2. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
3. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian debottlenecking kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek *clean and clear*, serta sinergi *calender of event* promosi investasi dan perdagangan antar intansi dan mendorong penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS).
4. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru (a.l melalui *behaviorally informed policy intervention*) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
5. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda).
6. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
7. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melaui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan

efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara serta merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi dan saling terkait secara hukum. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Lampung 2025–2029, yaitu: **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"**. Visi ini diterjemahkan ke dalam kebijakan keuangan yang berpihak pada rakyat, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Gambaran kemampuan

keuangan daerah yang dikelompokan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah yang disebut Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Grafik 3. 2 Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

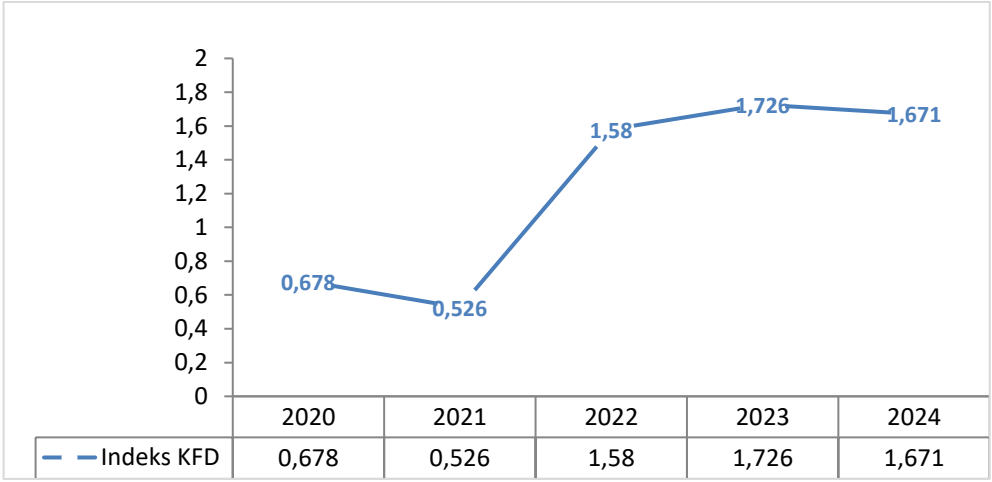

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks KFD	0,678	0,526	1,58	1,726	1,671

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020-2024

Pada tahun 2020, rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung sebesar 0,678dalam Kategori Sedang. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan kapasitas fiskal menjadi 0,526, yang masih berada dalam kategori sangat rendah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan drastis dalam kapasitas fiskal daerah menjadi 1,58 yang menempatkan Lampung dalam kategori rendah. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerimaan daerah, baik dari PAD maupun dana transfer. Tren peningkatan berlanjutsampai tahun 2023 sebesar 1,726 dalam Kategori Sedang, walaupun pada tahun 2024 Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mengalami sedikit penurunan menjadi 1,671, tetapi masih dalam Kategori Sedang.Meskipun terjadi sedikit penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan mampu membiayai kebutuhan pembangunan dengan tingkat kemandirian yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama setelah tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya upaya

optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Ke depan, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan.

Kebijakan keuangan daerah 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah agar tetap sehat dan berkelanjutan; memastikan belanja daerah digunakan secara efisien dan efektif untuk pelayanan publik yang berkualitas; dan mendorong pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan antardaerah.

Dengan demikian, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Lampung tahun 2026 akan difokuskan pada:

1. Mobilisasi pendapatan daerah yang terukur dan realistis dengan tetap menjaga daya beli masyarakat;
2. Belanja daerah yang berkualitas dan berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), terutama dalam pemulihan ekonomi pasca-COVID-19, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
3. Pengelolaan pembiayaan daerah yang cermat, produktif, dan berkelanjutan;
4. Sinkronisasi antara kebijakan perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (R-APBD) guna memastikan efisiensi kebijakan publik dan pencapaian sasaran pembangunan prioritas daerah maupun nasional

Dengan arah kebijakan tersebut, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi alat untuk pengendalian fiskal, tetapi juga sebagai pendorong utama tercapainya kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan kapasitas pendapatan daerah, khususnya dari sektor PAD dan pendapatan transfer, dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendapatan daerah harus dirancang secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dilandasi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", serta mendukung pencapaian visi Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas", kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada:

1. **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   Meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak dan penerapan teknologi informasi (e-tax system). Penyesuaian regulasi daerah terkait tarif dan jenis retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal dan potensi yang dimiliki. Mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif dan legal untuk menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Peningkatan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis.

2. **Peningkatan Kualitas Pendapatan Transfer**

   Mengoptimalkan penerimaan dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui pemenuhan indikator kinerja dan kelengkapan dokumen perencanaan. Memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan fiskal nasional memberikan nilai tambah langsung bagi pendapatan daerah.Mendorong kinerja fiskal daerah agar memenuhi syarat penerimaan Dana Insentif Fiskal dan dana tambahan lainnya.

3. **Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif**

   Meningkatkan kapasitas penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti pendapatan dari hibah, bantuan keuangan, kerja sama

pemerintah-swasta, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mendorong pelibatan CSR dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan.

4. **Peningkatan Ketahanan Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Pajak Daerah**

   Melanjutkan implementasi kebijakan opsen pajak provinsi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sinkronisasi sistem pemungutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah duplikasi dan menurunkan biaya kepatuhan masyarakat.

Momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang mulai terasa sejak tahun 2022, dan diperkirakan terus membaik hingga tahun 2026, menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung pada periode 2021–2023 menunjukkan tren positif, meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2022 akibat pandemi dan perubahan kebijakan penyaluran dana BOS yang mengalihkan sebagian besar dana ke kabupaten/kota.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta reformasi fiskal nasional yang mendukung desentralisasi fiskal, maka pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diharapkan dapat tumbuh secara sehat, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja pelaksanaan APBD 2024 dari sisi Pendapatan. **Pendapatan Daerah,** realisasi pendapatan daerah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan persentase pencapaian berkisar antara 86,33% hingga 98,87% dari target yang ditetapkan. Tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan mengingat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup tinggi. Efektivitas penggalian sumber

pendapatan daerah terlihat dari capaian realisasi yang relatif tinggi, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dalam persentase realisasi (86,33%). Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan fiskal, perlambatan ekonomi, atau tantangan dalam optimalisasi PAD.

Tabel 3. 4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2022-2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.958.447.624.498,40**	**7.097.803.289.872,31**	**7.451.586.834.830,78**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.678.122.084.867,40**	**3.779.539.366.740,31**	**4.039.218.171.476,78**
4.1.01	Pajak Daerah	3.126.137.885.658,00	3.232.821.385.715,00	3.301.063.910.591,76
4.1.02	Retribusi Daerah	6.602.045.154,00	7.066.246.737,00	485.949.536.889,25
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.568.658.794,74	51.110.035.229,39	193.520.241.461,01
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	499.813.495.260,66	488.541.699.058,92	58.684.482.534,76
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.240.611.684.323,00**	**3.307.347.162.132,00**	**3.401.546.333.354,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.225.777.269.427,00	3.307.347.162.132,00	3.375.379.510.190,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.834.414.896,00	-	26.166.823.164,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**39.713.855.308,00**	**10.916.761.000,00**	**10.822.330.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	39.713.855.308,00	3.962.951.000,00	10.822.330.000,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2022-2024(Audited)

Tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Gambar xxxx), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dengan tetap menjadimayoritas komponen pembentuk pendapatan daerah. Hal tersebutmenunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Lampung sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

Perkembangan proporsi pendapatan daerah Provinsi Lampung selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya perubahan dalam komposisi sumber pendapatan, khususnya antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 40,49% pada Tahun 2020 menjadi 54,21% di Tahun 2024, menunjukkan upaya optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kemandirian fiskal.Pendapatan Transfer menurun dari 56,35% pada tahun 2021 menjadi 45,65% di tahun 2024, menandakan berkurangnya ketergantungan terhadap dana pusat seiring dengan peningkatan PAD.Lain-lain Pendapatan yang Sah tetap kecil (0,14%–0,58%) dan belum menjadi sumber signifikan bagi keuangan daerah.

Gambar 3. 1 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

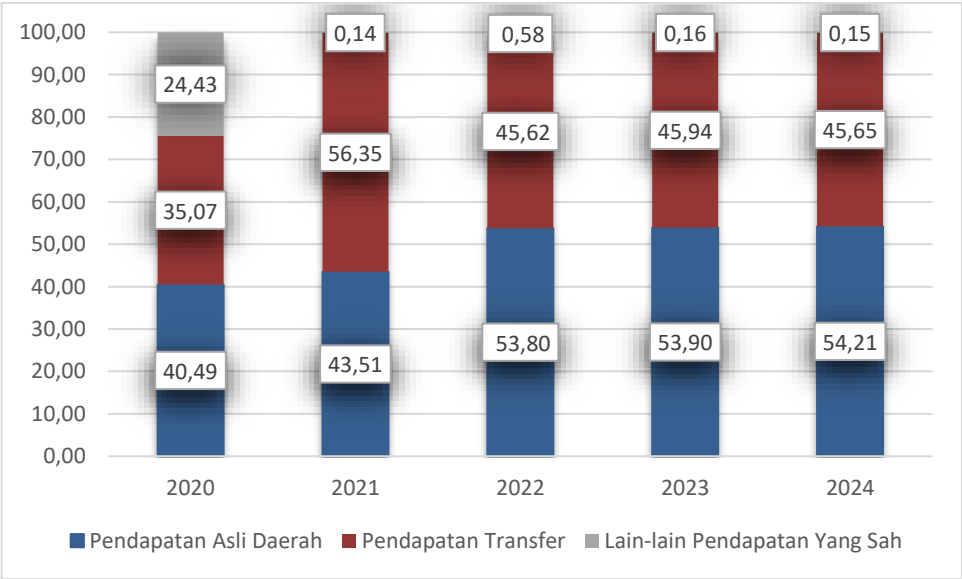

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2020-2024 (Audited)

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan perbaikan dalam kemandirian fiskal daerah Provinsi Lampung, meskipun perlu terus didorong inovasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar pendapatan daerah lebih stabil dan berkelanjutan.

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,2 – 5,7 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2022-2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 6, 804 Triliun rupiah.

Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025	Proyeksi RKPD 2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.958.447.624.498,40**	**7.097.803.289.872,31**	**7.451.586.834.830,78**	**7.557.909.717.848,21**	**7.250.000.000.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.678.122.084.867,40**	**3.779.539.366.740,31**	**4.039.218.171.476,78**	**4.020.052.532.113,21**	**3.675.032.820.130**
4.1.01	Pajak Daerah	3.126.137.885.658,00	3.232.821.385.715,00	3.301.063.910.591,76	2.921.136.897.166,00	2.881.083.331.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.602.045.154,00	7.066.246.737,00	485.949.536.889,25	450.121.878.920,00	481.946.670.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.568.658.794,74	51.110.035.229,39	193.520.241.461,01	316.148.941.374,21	202.001.691.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	499.813.495.260,66	488.541.699.058,92	58.684.482.534,76	332.644.814.653,00	110.001.128.130
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.240.611.684.323,00**	**3.307.347.162.132,00**	**3.401.546.333.354,00**	**3.524.066.287.000,00**	**3.463.958.189.270**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.225.777.269.427,00	3.307.347.162.132,00	3.375.379.510.190,00	3.489.381.614.000,00	3.431.028.425.470
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.834.414.896,00	-	26.166.823.164,00	34.684.673.000,00	32.929.763.800
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**39.713.855.308,00**	**10.916.761.000,00**	**10.822.330.000,00**	**13.790.898.735,00**	**111.008.990.600,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	39.713.855.308,00	3.962.951.000,00	10.822.330.000,00	13.790.898.735,00	111.008.990.600,00

Sumber : Bapenda Provinsi Lampung, 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pencapaian prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi belanja daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan total belanja daerah yang cukup konsisten. Total belanja daerah tercatat sebesar Rp6,78 triliun pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp7,05 triliun pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi Rp7,51 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperluas cakupan layanan publik dan memperkuat pemulihan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, struktur belanja daerah Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan pada belanja yang bersifat operasional dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan belanja ke depan perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, guna memastikan efektivitas APBD dalam mendorong pencapaian visi pembangunan daerah yaitu "**Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**", serta mendukung prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2026.

Tabel 3. 6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 – 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**6.911.597.640.054,94**	**7.048.993.246.382**	**7.506.810.403.825**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.533.082.558.484,61**	**4.628.237.542.976**	**5.164.775.276.916**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.970.972.929.853,00	2.066.144.093.644	2.386.292.035.527
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.816.562.339.989,79	1.972.392.255.140	1.978.510.550.970
5.1.03	Belanja Bunga	12.829.045.899,00	3.112.977.135	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	2.800.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	712.329.197.992,82	570.388.618.057	797.803.865.119
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.389.044.750,00	13.399.599.000	2.168.825.300
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.025.176.634.169,33**	**1.207.289.357.587**	**797.024.095.018**
5.2.01	Belanja Modal Tanah		1.209.400.000	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.633.889.873,25	152.608.643.054	119.206.756.912
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	284.350.079.189,95	280.952.181.006	219.628.388.605
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	481.854.158.305,13	743.100.436.419	435.067.370.012
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.338.506.801,00	29.418.697.108	22.806.679.489
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	314.900.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**223.500.000,00**	**2.794.882.500**	**1.077.864.999**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	223.500.000,00	2.794.882.500	1.077.864.999
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.353.114.947.401,00**	**1.210.671.463.319**	**1.543.933.166.892**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.353.014.947.401,00	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000,00	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Dalam rangka menghadapi adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas (*money follow program)* dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 adalah **"Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi; 2) Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi; 3) Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif; 4) Pengentasan Kemiskinan; 5) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas; 6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan; 7) Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya.

Selanjutnya, teknis pembahasan dan penyusunan proyeksi Belanja Daerah tahun 2026 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Proyeksi Belanja Daerah didasari dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, terdiri dari : belanja pegawai diproyeksi berdasarkan perhitungan gaji pegawai beserta tunjangan pegawai ; belanja bunga diproyeksi berdasarakan perhitungan bunga pinjaman terhadap pokok utang Provinsi Lampung; Belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan berdasarkan perhitungan pendapatan asli daerah; Belanja tidak terduga diperhitungkan untuk mengampu belanja standar pelayanan minimal.

- Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Lampung secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan.
- Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
- Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025	Proyeksi RKPD 2026
5	**BELANJA DAERAH**	**6.911.597.640.055**	**7.048.993.246.382**	**7.506.810.403.825**	**7.632.909.517.648,21**	**8.114.000.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.533.082.558.485**	**4.628.237.542.976**	**5.164.775.276.916**	**5.203.967.155.913,75**	**5.000.885.771.845**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.970.972.929.853	2.066.144.093.644	2.386.292.035.527	2.916.687.302.416,00	3.040.054.260.608
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.816.562.339.990	1.972.392.255.140	1.978.510.550.970	1.897.854.129.785,63	0
5.1.03	Belanja Bunga	12.829.045.899	3.112.977.135	-	-	41.457.723.215
5.1.04	Belanja Subsidi	-	2.800.000.000	-	-	30.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	712.329.197.993	570.388.618.057	797.803.865.119	385.958.861.512,62	328.522.553.930
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.389.044.750	13.399.599.000	2.168.825.300	3.466.862.199,50	0
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.025.176.634.169**	**1.207.289.357.587**	**797.024.095.018**	**980.196.729.933,19**	**1.671.831.671.370**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**223.500.000**	**2.794.882.500**	**1.077.864.999**	**42.472.500.000,00**	50.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.353.114.947.401**	**1.210.671.463.319**	**1.543.933.166.892**	**1.406.273.131.801,27**	**1.391.282.556.785**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.353.014.947.401	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892	1.405.273.131.801,27	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000	-	-	1.000.000.000,00	0

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berdampak pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, Oleh karenanya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada dukungan terciptanya anggaran yang berimbang (*zero defisit*),

Tabel 3. 8 Realisasi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2022-2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	Penerimaan Pembiayan Daerah	383,279,770,163.01	292,676,358,793.37	125.120.850.614,70
6.1.01	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	141,176,332,704.00	105,882,243,536.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**242,103,437,459.01**	**186,794,115,257.37**	**125.120.850.614,70**

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022-2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis serta melakukan rencana pinjaman daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan

modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung adalah:

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan modal investor daerah;
2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan,Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya;

Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Proyeksi Pembiayaan Provinsi Lampung Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2022 (Rp)	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025 (Rp)	Proyeksi RKPD 2026 (Rp)
6	**Pembiayaan Daerah**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**383.279.770.163,01**	**292.676.358.793**	**125.120.850.614,70**	**75.000.000.000,00**	**1.004.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	383.279.770.163,01	292.676.358.793	125.120.850.614,70	75.000.000.000,00	4.000.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman daerah					1.000.000.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**141.176.332.704,00**	**105.882.243.536**			**210.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal	0				**40.000.000.000,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	141.176.332.704,00	105.882.243.536			170.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**242.103.437.459,01**	**186.794.115.257,00**	**125.120.850.614,70**	**75.000.000.000,00**	1.004.000.000.000,00

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2025

3.2.2 Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Lampung, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3. 10 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Lampung Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	DK/TP	PAGU *)
1	Bappeda Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	1.400.615.000,00
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	85.000.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	3.019.961.000,00
4	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	3.376.000.000,00
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	517.261.000,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	359.628.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	2.667.240.000,00
8	Inspektorat Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	148.316.000,00
9	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	1.720.675.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Dekonsentrasi	369.040.000,00
Total Dekonsentrasi			**13.663.736.000,00**
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	1.264.393.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	283.173.331.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	145.111.000,00
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	181.297.000,00
5	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	1.063.430.000,00
6	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	2.023.765.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	21.940.743.000,00
8	Dinas Cipta Karya Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Tugas Pembantuan	29.518.616.000,00
Total Tugas Pembantuan			**339.310.686.000,00**
Total APBN			**352.974.422.000,00**

Sumber : Bappeda, 2025, *) Besaran alokasi pagu anggaran masih menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi dari pusat.

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah sering kali menjadi tantangan utama dalam merealisasikan proyek infrastruktur berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan alternatif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan skema pembiayaan kreatif di luar APBD dalam pembangunan infrastruktur melalui kemitraan Publik-Swasta (KPS) dan pembiayaan/ hibah dari lembaga-lembaga Internasional ((World Bank, dll). antara lain:

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti Rencana pengembangan Kawasan Kota Baru, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi perkotaan. Pemanfaatan skema KPBU memungkinkan proyek dibiayai oleh swasta, sementara pemerintah daerah tetap mengawasi keberlangsungan dan manfaat sosialnya.
2. Penerbitan Obligasi Daerah, Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti jalan tol dan kawasan industri.
3. Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Filantropi, Meningkatkan sinergi dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk mendukung proyek infrastruktur berbasis kepentingan sosial dan ekonomi.
4. Pinjaman Daerah dengan Mekanisme yang Terkelola dengan Baik, Mengakses pinjaman dari Lembaga Keuangan seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) atau Lembaga Keuangan Lainnya dan Bank Pembangunan Daerah dengan skema yang berkelanjutan.
5. Sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meningkatkan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur energi, air bersih, dan transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Skema LVC (Land Value Capture)Pendekatan pembiayaan pembangunan yang menangkap kenaikan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah mengenakan kontribusi pada pengembang properti yang diuntungkan oleh pembangunan jalan atau transportasi publik.
7. Pembiayaan hijau (green finance). Pendanaan yang diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan melaluiCarbon trade: Mekanisme jual-beli kredit karbon antara pihak yang menghasilkan emisi lebih rendah dan yang menghasilkan emisi lebih tinggi

Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung serta strategi kebijakan pembangunan nasional, termasuk mendukung agenda peningkatan konektivitas, pembangunan ekonomi daerah, serta percepatan investasi. Dengan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan alternatif, diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat lebih cepat terealisasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan, sekaligus menciptakan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakattanpa membebani kapasitas fiskal daerah.

Provinsi Lampung telah menyiapkan beberapa rencana proyek infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan melalui skema pembiayaan pinjaman daerah antara lain :

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KABUPATEN	PANJANG RUAS (Km)
1	042	Lempasing - Padang Cermin	Pesawaran	29,157
2	022	Bandar Jaya - Sp. Mandala	Lampung Tengah	37,016
3	032	Padang Ratu - Kali Rejo	Lampung Tengah	22,603
4	025	Kali Rejo - Bangunrejo	Lampung Tengah	14,086
5	030	Padang Ratu - Pekurun Udik	Lampung Tengah	24,796
6	006	Jabung - Sp. Labuhan Maringgai	Lampung Timur	22,962
7	075	Kasui - Ai Ringkih (Bts Sumatera Selatan)	Way Kanan	26,295
8	045	Sp. Umbar - Putih Doh	Tanggamus	23,830
9	092	Sp. Unit Viii - Gedong Aji	Tulang Bawang	22,050
10	088	Tegal Mukti - Tajab	Way Kanan	36,000
11	016	Sp. Korpri - Purwotani	Lampung Selatan	14,551
12	043	Padang Cermin - Sp Teluk Kiluan	Pesawaran	31,732
13	049	Suoh - Sp. Blok 9	Lampung Barat	30,447
14	095	Brabasan - Wiralaga	Mesuji	29,443

PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
LAMPUNG

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Tahun 2026 menjadi tahun ke-2 dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah pertama guna menggapai target besar Visi Indonesia Emas 2045. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen operasional awal yang menguraikan arah pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029. Mengusung **visi Lampung 2045** yaitu : **"SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN",** pembangunan ke depan memerlukan landasan transformasi yang kuat dan kokoh. Periode 2025–2029 menjadi fase krusial untuk membangun fondasi transformasi tersebut, sekaligus menentukan laju pertumbuhan pada tahap-tahap selanjutnya.

Pembangunan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2026 difokuskan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan berbagai tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memastikan tercapainya target pembangunan secara terukur. Keberhasilan pencapaian tersebut akan dilihat melalui indikator kinerja makro serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tolok ukur efektivitas dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Lampung.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun nasional maka diperlukan kesinambungan perencanaan pembangunan. Perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Disatu sisi, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi

Lampung Tahun 2026 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2026 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disisi yang lain, penyusunan RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan landasan strategis yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Penyusunan sasaran pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan dan keterpaduan dengan sasaran pembangunan nasional, guna memastikan sinergi antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional.

4.1.1 Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi RPJMN 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025-2029, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."** Visi ini menegaskan pentingnya kerja sama seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Dengan fondasi yang kokoh yang telah dibangun selama kepemimpinan sebelumnya, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut. Pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang maju dan sejahtera.

Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 320 program kerja.

Visi adalah gambaran besar dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dalam RPJMN ini, visi tersebut terwujud dalam Indonesia Emas 2045, yang menggambarkan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur pada abad ke-21. Visi ini mencakup segala aspek pembangunan, dari ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan hidup, dengan harapan agar Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya.

Asta Cita, yang terdiri dari delapan prioritas nasional, merupakan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan visi tersebut dalam jangka menengah, yaitu dari tahun 2025 hingga 2029. Asta Cita ini mencakup berbagai sektor penting yang harus dikuatkan, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, sistem pertahanan negara, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga reformasi hukum dan pemerintahan.

Gambar 4. 1 Pioritas Nasional

Sumber: Perpres No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing nasional, terdapat 17 Program Prioritas Presiden yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan Indonesia ke depan, sebagai berikut:

1. **Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air**: Program ini bertujuan untuk memastikan ketahanan nasional dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan, energi, dan air yang cukup dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia.

2. **Penyempurnaan Sistem Pemerimaan Negara**: Fokus pada penyempurnaan administrasi negara agar lebih efisien dan transparan, sehingga layanan publik dapat lebih optimal dan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang.

3. **Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi**: Meningkatkan kualitas sistem politik dan hukum, serta reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. **Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**: Memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5. **Pemberantasan Kemiskinan**: Menanggulangi kemiskinan dengan berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

6. **Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba**: Mengurangi dampak buruk narkoba di masyarakat dengan penegakan hukum yang lebih tegas serta program rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba.

7. **Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**: Menjamin akses kesehatan yang merata melalui penguatan sistem jaminan kesehatan nasional dan memperbaiki infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia.

8. **Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, serta Digitalisasi**: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan integrasi teknologi dan sains, serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan digital.

9. **Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara**: Meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan keamanan domestik serta memperkuat diplomasi luar negeri untuk menjaga stabilitas nasional dan regional.

10. **Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas:** Memastikan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan.

11. **Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup:** Mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup dengan fokus pada pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk masa depan yang lebih hijau.

12. **Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida untuk Petani**: Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan menjamin ketersediaan sarana produksi yang tepat bagi petani.

13. **Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas**: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
14. **Melanjutkan Pemetaan Ekonomi dan Penguatan UMKM**: Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan memperkuat sektor UMKM, termasuk memberikan kemudahan akses ke pembiayaan dan pasar.
15. **Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam**: Meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia melalui hilirisasi industri, yang akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor.
16. **Memastikan Kerukunan Antaragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Ibadah**: Memastikan kerukunan antarumat beragama serta memberikan kebebasan beribadah dengan aman, tanpa adanya diskriminasi.
17. **Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga**: Melestarikan warisan budaya Indonesia serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan prestasi olahraga untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Selain Program prioritas, **8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)** yang dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam waktu singkat. Program-program ini fokus pada aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :

1. **Memberi Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil**: Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka, dengan fokus pada sekolah dan pesantren.

2. **Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten**: Program ini memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui pemeriksaan gratis dan pembangunan rumah sakit dengan fasilitas yang memadai di berbagai kabupaten.

3. **Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional**: Fokus pada pengembangan sektor pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian melalui pembentukan lumbung pangan yang dapat mendukung ketahanan pangan baik di tingkat desa maupun nasional.

4. **Membangun Sekolah-sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten, dan Memperbaiki Sekolah-sekolah yang Perlu Renovasi**: Program ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, dengan membangun sekolah-sekolah berkualitas dan memperbarui fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan.

5. **Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut:** Program ini memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin melalui kartu-kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk mendukung pengurangan kemiskinan secara cepat.

6. **Meningkatkan Gaji ASN (terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh), TNI/POLRI, dan Pejabat Negara:** Fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil, tenaga kesehatan, pendidik, serta aparat negara lainnya agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

7. **Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersubsidi Baik untuk Masyarakat Umum, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**: Program ini bertujuan untuk meratakan pembangunan infrastruktur desa serta meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah yang terjangkau melalui bantuan subsidi.

8. **Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%:** Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem penerimaan negara dan meningkatkan kontribusi sektor formal terhadap perekonomian nasional dengan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

4.1.2 Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Lampung

Provinsi Lampung menetapkan Rencana Pembangunan Tahun 2025-2029 dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan yaitu : **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"** dengan **3 (tiga) Misi / 3 (tiga) Cita Pembangunan** yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat.

CITA KE-1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

Fokus pembangunan ekonomi Lampung akan dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif sehingga semua kelompok dan golongan secara bersama-sama melakukan upaya pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya melalui penerapan ekonomi hijau di sektor pertanian, ekonomi biru di sektor kelautan, serta mendorong kewirausahaan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM maupun koperasi. Mengutamakan swasembada pangan, air, dan energi, serta investasi dalam hilirisasi dan industrialisasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dimulai dari desa, menjadi salah satu tulang punggung dalam mendorong perekonomian daerah. Selain itu perlu didorong inisiatif menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memperluas lapangan pekerjaan. Program kerja yang diusulkan meliputi pembangunan pusat ekonomi baru dengan cara bekerjasama dengan BUMN, serta

investor dalam negeri dan luar negeri. Pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, dan pengintegrasian desa dalam ekonomi digital melalui konsep desa cerdas. Selain itu, ditekankan juga penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui teknologi digital dan IoT serta hilirisasi untuk meningkatkan output dan diversifikasi ekonomi lokal. Pemerataan infrastruktur untuk mendorong perekonomian, peningkatan akses ke modal untuk usaha kecil, dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat mendukung semua inisiatif ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung. Strategi ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan Lampung yang maju dan berkelanjutan. Melanjutkan revitalisasi pasar dan memperkuat peran bank daerah khususnya bank rural guna mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. Inisiatif seperti hilirisasi dan industrialisasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi produk unggulan untuk memperluas pasar baik domestik maupun ekspor. Misi ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat desa, perempuan, generasi muda, dan kaum disabilitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan diharapkan juga akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di Provinsi Lampung.

CITA KE-2 Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif

Fokus misi ini adalah memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui komitmen dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan inovatif, meningkatkan layanan kesehatan yang komprehensif, mendukung kegiatan olahraga, mendorong kemajuan dalam sains dan teknologi serta penguatan peran perempuan, generasi muda dan penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, misi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang berkualitas, sehat dan produktif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkontribusi dan ikut serta merasakan hasil pembangunan daerah.

Dalam misi memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Mirza-Jihan berkomitmen untuk meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan

pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan berkualitas dijamin melalui inisiatif seperti meningkatkan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya pengajar di sekolah tingkat atas dan perguruan tinggi, serta mengintegrasikan kurikulum yang mengakomodir kebutuhan industri modern dan penguatan karakter termasuk kearifan lokal. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta kampanye kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit. Khusus untuk generasi muda, pemerintah fokus pada pembinaan keterampilan melalui pusat pelatihan dan inkubator bisnis yang mendukung kewirausahaan dan inovasi. Program ini melibatkan kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Selain itu, pemerintah mendukung pemberdayaan perempuan melalui program yang menargetkan peningkatan peran wanita dalam semua sektor ekonomi dan sosial. Pengembangan olahraga juga menjadi salah satu prioritas, dengan tujuan menjadikan Lampung sebagai pusat atlet berprestasi, mendukung pembangunan fasilitas olahraga modern, dan melaksanakan program-program yang dapat mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat muda di berbagai cabang olahraga. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga tetapi juga mendorong gaya hidup aktif dan sehat di kalangan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan SDM yang unggul dan produktif.

<u>CITA KE-3</u> Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Untuk menciptakan masyarakat Provinsi Lampung yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, strategi yang diusulkan berfokus pada harmonisasi antara lingkungan alam, budaya, dan layanan publik. Pendekatan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang merangkul keberagaman seni dan budaya melalui penyelenggaraan festival dan workshop, serta revitalisasi lembaga kebudayaan untuk memperkuat identitas Lampung. Perlindungan dan

pemberdayaan perempuan, anak, lansia, disabilitas, serta kelompok terlantar juga menjadi prioritas. Upaya peningkatan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan regulasi yang mendukung kesetaraan di tempat kerja juga diintegrasikan.

Komitmen untuk memperkuat keberagaman dan inklusivitas di Provinsi Lampung melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terus diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan. Selain itu, peningkatan layanan publik yang berbasis digital bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif dan mempercepat penyampaian layanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan birokrasi. Dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang harmonis, program kerja dan strategi implementasi yang telah dirancang mencakup pembaruan kebijakan dan praktik yang mendukung interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini antara lain meliputi pelatihan dan pendampingan bagi lembaga kebudayaan dan komunitas seni, peningkatan fasilitas publik yang mendukung aktivitas sosial dan budaya, serta inisiatif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam setiap aspek pembangunan. Penekanan pada penggunaan teknologi modern dalam layanan publik dan pengelolaan sumber daya alam juga direncanakan untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Misi ini juga mengarah pada proses pembangunan Kota Baru “Bandar Negara” dengan konsep Eco City yang berwawasan hijau, smart, dan didukung oleh kawasan komersial sebagai penyangga kota. Tujuan lain dari pembangunan kota ini adalah sebagai pusat kebudayaan dan peradaban masyarakat lampung. Selain itu, Provinsi Lampung sebagai daerah yang rawan bencana memerlukan mitigasi bencana yang terencana serta efektif dalam penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Berikut adalah misi, tujuan, dan indikator tujuan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029. Misi berfungsi sebagai arah umum, tujuan sebagai sasaran konkret yang ingin dicapai dalam lima tahun, dan indikator tujuan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Dengan menyusun misi, tujuan, dan indikator tujuan yang jelas, RPJMD dapat memastikan pembangunan yang terarah dan terukur.

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS												
Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif												
1.1	Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,57 (2024)	5,1	5,45	5,65	5,85	6,05	6,25	-
			Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5	3,51	3,52	-
			Gini Rasio	indeks	0,301	0,298	0,296	0,294	0,292	0,29	0,288	-
		1.1.1 Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Pertumbuhan PMTB	persen	1,78 (2024)	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	Bapenda, Dinas PMPTSP
			Pertumbuhan sektor industri pengolahan	persen	9,09 (2024)	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1.1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)	persen	-2,09	1,2	1,21	1,4	1,4	1,4	1,4	Dinas KPTPH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Ketahanan Pangan	indeks	81,56 (2023)	83,07	83,58	84,09	84,6	85,11	85,62	Dinas KPTPH, Dinas PSDA,Disbun, BMBK
		1.1.3 Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri	persen	23,51	23,67	23,96	24,37	24,98	25,22	25,45	Dinas PMDT
		1.1.4 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	5,58	5,64	5,69	5,75	5,81	5,86	5,92	Disparekraf, DiskopUKM
		1.1.5 Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	Kemantapan Jalan	persen	78,08	78	85,7	87,2	89,9	92,7	96	Dinas BMBK
			Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	19,45	20,17	20,88	21,6	22,31	23,03	21	Dinas PKPCK
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	35,22	36	36,6	37	37,4	37,8	38,2	Dinas ESDM, Perindag, KPTPH, Kehutanan, LH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1.1.6 meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Tingkat kemiskinan	persen	10,62	9,75	9,4	9	8,9	8,8	8,6	Dinas KPTPH, , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan,Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Ekraf, Dinas BMBK, Dinas PKPCK, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo
			Tingkat inflasi	persen	1,5	2,5 + 1	2,5 + 1	2,5 + 1	2,5 + 1	2,5 + 1	2,5 + 1	Dinas Perindag, Biro Perekonomian Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan
			Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,19	3,93	3,78	3,55	3,35	3,15	2,9	Dinas Tenaga Kerja
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif												

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia		Indeks Modal Manusia	indeks	0,52 (2023)	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	-
		2.1.1 Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	Rata rata lama sekolah	tahun	8,36	8,46	8,55	8,64	8,74	8,82	8,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
			Harapan Lama sekolah	tahun	12,78	12,82	12,83	12,86	12,88	12,91	12,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.12 Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	53,17 (2023)	53,51	53,68	53,85	54,02	54,19	54,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora, Dinkes, PPPA
		2.1.3 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	74,39	74,55	74,74	74,93	75,12	75,31	75,62	Dinas Kesehatan, RSUAM, RSJ, RSBNH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Prevalensi Stunting	persen	15,9 (2024)	13,2	12,8	12,5	12	11,32	10,85	Dinas Kesehatan, RSAM, Dinas KPTPH, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, PKPCK, Dinas PPPA, Dinas PMDT, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo
		2.1.4 Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64,78 (2022)	66,22	66,94	67,66	68,38	69,1	69,82	Dinas PPPA, Dinas Sosial
			Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,43 (2023)	0,422	0,42	0,418	0,405	0,395	0,385	Dinas PPPA, Dinas Sosial, Disnaker
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas												
3.1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3.1.1 Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	Sekretriat Daerah, BAPPEDA, BPKAD,Inspektorat, Kominfo, Litbang, BKD, BPSDM, Set DPRD, Badan Penghuibung, Dukcapil, Dinas Perpustakaan dan Arsip
3.2	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	60,64	62,79	64,03	67,96	70,43	72,13	74,17	-
		3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	70,57 (2023)	70,99	71,2	71,41	71,63	71,84	72,05	DLH, Dinas Kehutanan, DKP
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,1	129,97	129,01	128,5	127,99	127,99	127,48	Badan Penanggulangan Bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						OPD PENDUKUNG
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9,15	9,52	9,95	10,47	11,07	11,66	12,3	Dinas Kehutanan, KPTPH, Perkebunan, DKP, DLH, PKPCK, ESDM, Perindag, Perhubungan
3.3	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.		Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	-
			Indeks pembangunan Kebudayaan	indeks	57,82 (2023)	58,5	59,6	60,8	61,9	63	63,5	-
		3.3.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79,5	80,5	80,5	81,5	81,5	82,5	Badan Kesbangpol, Satpol PP
			Ekspresi Budaya	persen	26,14 (2023)	37,31	38,71	40,11	41,51	42,91	44,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Kesra

4.1.3 Strategi dan Arah Pembangunan Provinsi Lampung

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Tahun 2025 – 2045 yaitu **"Lampung Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan"**, strategi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang lima tahun ke depan. Strategi ini bertumpu pada penguatan keunggulan daerah, pemantapan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi sinergi pusat-daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
Visi: Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas				
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif				
1.	Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusi	1.1	Mendorong investasi dan hilirisasi industri	1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi 2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung 3. Meningkatkan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan 4. Meningkatkan Promosi dan Branding Investasi Daerah 5. Mengelola dan mengawasi investasi secara berkelanjutan 6. Mempermudah proses Perizinan dan Non-Perizinan 7. Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan 8. Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi
		1.2	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	1. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pertanian yang presisi melalui penggunaan teknologi 2. Peningkatan penerimaan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian 3. Meningkatkan Sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan dan perbaikan Pendidikan vokasi di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian 4. Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau; 5. Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara; 6. Meningkatkan peran kelembagaan petani baik melalui Bumdes, Koperasi dan Kelompok Tani untuk meningkatkan keberdayaan perekonomian masyarakat 7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian terutama dalam penyediaannya dari daerah lokal; 8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian agar lebih presisi dan biaya produksi yang murah melalui kerjasama dengan akademisi, peneliti dan Lembaga pemberdayaan
		1.3	Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	1. Meningkatkan jumlah Bumdes berkembang dan maju untuk mendukung penciptaan ekosistem ekonomi berbasis desa
		1.4	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Daya Ungkit Ekonomi Daerah	1. Penguatan Infrastruktur Destinasi Wisata • Peningkatan aksesibilitas jalan menuju destinasi utama (pantai, taman nasional, dll). • Penyediaan fasilitas umum yang ramah wisatawan. 2. Pengembangan Destinasi Unggulan • Pengembangan kawasan wisata prioritas seperti Teluk Kiluan, Pahawang, dan Way Kambas. • Promosi dan penataan desa wisata berbasis potensi lokal. 3. Digitalisasi Promosi Wisata • Pemanfaatan media sosial, website resmi, dan platform digital untuk pemasaran destinasi. • Kolaborasi dengan influencer dan content creator lokal. 4. Penguatan SDM Pariwisata • Pelatihan pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku industri wisata. • Sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. 5. Inkubasi dan Pendampingan UMKM Kreatif • Pelatihan desain produk, manajemen usaha, dan branding. • Fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan lembaga keuangan daerah.
		1.5	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	1. Menyusun roadmap energi terbarukan Provinsi Lampung 2. Mendorong Penyelesaian kendala regulasi dan harga jual listrik panas bumi 3. Melakukan riset per jenis EBT 4. Mendorong Mengembangkan pilot project TPST berbasis ekonomi sirkular yang menghasilkan listrik

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				5. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi lokal sebagai sumber energi alternatif 6. Pemanfaatan EBT sekala kecil untuk rumah tangga
		1.6	Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	1. Penguatan konektivitas jaringan jalan pendukung sentra produksi komoditas utama Provinsi Lampung, akses bagi pengembangan investasi, hilirisasi industri dan sektor pariwisata. 2. Penguatan peran transportasi laut sebagai moda pendukung distribusi logistik antar pulau. 3. Pengembangan transportasi massal perkotaan khususnya dalam mendukung pertumbuhan kawasan Metropolitan Lampung Raya. 4. Mendorong pembangunan jalur ganda (double track) Kereta Api rute Giham-Martapura dan Kotabumi - Sukamenanti, serta jalur lingkar luar (Shortcut/ Longcut) Tegineneng – Pelabuhan Panjang – Tarahan. 5. Mendorong peran transportasi udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas wilayah. 6. Pembiayaan alternatif diluar APBD untuk mendukung upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif				
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	2.1	Generasi Cerdas dan Berakhlak	1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) 2.Meningkatkan kualitas pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan 4. Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital 5. Penguatan sistem pembiayaan pendidikan 6. Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan SPM
		2.2	Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	1. Program Pelatihan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja 2. Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit. 3. Meningkatkan semangat kewirausaha muda dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
		2.3	Mendukung Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Menguatkan sistem pembinaan organisasi pemuda dan meningkatkan prestasi pemuda secara terpadu 2. Meningkatkan prestasi olahraga pemuda dan olahraga masyarakat
		2.4	Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat	1. Meningkatkan status gizi masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		2.5	Lampung Pusat Teknologi Terpadu	1. Meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri melalui intervensi dan rekomendasi tindak lanjut program pembangunan dan pemberdayaan desa
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas				
3.	Menurunkan angka kemiskinan	3.1	Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	1. Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) • Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. • Penggunaan teknologi digital untuk menyinkronkan data antarinstansi. 2. Penguatan Program Bantuan Sosial yang Responsif • Penyaluran bansos tunai dan non-tunai dengan target prioritas rumah tangga miskin ekstrem. • Intervensi darurat saat terjadi bencana, inflasi, atau krisis ekonomi lokal. 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin • Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. • Fasilitasi akses modal melalui KUR, koperasi, dan UMKM berbasis desa. • Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja langsung. 4. Aksesibilitas Layanan Dasar • Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal. • Penghapusan hambatan administratif seperti kepemilikan identitas atau BPJS. 5. Kolaborasi Multipihak (Pentahelix) • Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. • Program CSR perusahaan lokal diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. 6. Pemantauan dan Evaluasi Tepat Waktu • Monitoring berkala efektivitas program berbasis indikator kemiskinan multidimensi.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Tindak lanjut cepat atas ketidaksesuaian implementasi di lapangan.
		3.2	Penguatan ketahanan keluarga	1. Memperkuat ketahanan keluarga dari segi ekonomi ,sosial, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan melalui partisipasi masyarakat
		3.3	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar	1. Memastikan peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif dalam perlindungan hak-hak anak 2. Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak, perlindungan dan pencegahan kekerasan 3. Mendirikan dan memperkuat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai sarana pendidikan dan pencegahan dalam perlindungan anak
4	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	4.1	Mewujudkan Birokrasi berintegritas	1. Meningkatkan Implementasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah melalui Pembinaan dan Monitoring Capaian Kinerja 2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik
5	Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	5.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	4. Menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon • Integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK) dalam RPJMD dan RTRW. • Penguatan sistem inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di tingkat daerah. • Insentif bagi sektor swasta yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan energi terbarukan. 2. Meningkatkan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim • Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk cuaca ekstrem dan bencana iklim. • Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami (hutan, mangrove, rawa, DAS). • Perencanaan tata ruang berbasis risiko iklim dan bencana. • Pelatihan adaptasi iklim berbasis komunitas, terutama untuk petani dan nelayan. 5. 3. Mengurangi Risiko Bencana dan Penguatan Ketangguhan Daerah • Penguatan kelembagaan BPBD dan relawan desa tangguh bencana (Destana). • Sosialisasi dan edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				• Audit kerentanan bencana untuk infrastruktur publik dan fasilitas vital. • Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, embung, atau sistem drainase terpadu.
6	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	6.1	Membangun Semangat Lampung Bersama	1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah dan TNI Polri 2. Mempersiapkan pendidikan karakter dan muatan lokal untuk pendidikan dasar hingga menengah 3. Melestarikan warisan budaya Lampung

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025–2030 difokuskan pada penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi digital di sektor publik dan swasta, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama dengan mengarusutamakan perlindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan, guna memastikan terwujudnya Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Tabel 4.3 Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		
Tujuan 1.1. Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		
1.1.1	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	1. Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. 2. Lampung sebagai magnet investasi PMA dan PMDN. 3. Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis. 4. Mendukung kegiatan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. 5. Mendukung kegiatan Ekonomi Biru dalam meningkatkan pemanfaatan sektor maritim. 6. Memfasilitasi akses pembiayaan skema KUR (kredit usaha rakyat) dan keuangan syariah yang mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		7. Menyederhanakan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi. 8. Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global. 9. Optimalisasi BUMD Provinsi Lampung ke dalam sektor yang strategis dan menyangkut hajat masyarakat Lampung dan ketahanan ekonomi Provinsi Lampung. 10. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung. 11. Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. 12. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. 13. Peningkatan peran koperasi (Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 14. Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor.
1.1.2	Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	1. Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi perikanan. 2. Menjamin distribusi pupuk, benih, dan pestisida. 3. Memberikan subsidi yang ditujukan khusus untuk nelayan, petani, dan peternak. 4. Melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyaluran/distribusi pupuk pertanian. 5. Menjamin dan mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat waktu. 6. Menyediakan pupuk organik melalui pembangunan unit produksi mikro pupuk organik yang dikelola oleh BUMDes. 7. Mendukung keberlangsungan swasembada pangan. 8. Mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan supply produk lokal. 9. Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan Lampung menuju lumbung pangan nasional. 10. Melakukan penguatan literasi digital sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 11. Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, peternakan, dan pertanian (*off farm*). 12. Budidaya ikan endemik Lampung berkelanjutan. 13. Mendorong inovasi pemanfaatan teknologi digital dan IoT (*Internet of Things*) dalam pengembangan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan (on farm). 14. Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor. 15. Memaksimalkan peran BUMD bidang pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		16. Mendorong diversifikasi produk komoditas pertanian dan perkebunan Lampung. 17. Menerapkan program asuransi pertanian dan perikanan untuk melindungi petani dan nelayan.
1.1.3	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	1. Revitalisasi atau pembenahan tata niaga komoditas unggulan Lampung. 2. Peningkatan nilai tambah komoditas Provinsi Lampung yang dilakukan dari desa. 3. Mendorong penyempurnaan kelembagaan ekonomi profesional (koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lampung Hub, Pelabuhan Komoditi). 4. Mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan daerah serta mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah dengan peningkatan kapasitas BUMDes. 5. Mendirikan Lampung Hub sebagai ruang kolaborasi hexahelix (pemerintah, regulasi, swasta, pengusaha, masyarakat, media, dan komunitas kreatif). 6. Inisiasi pembangunan Pelabuhan Komoditi Sebalang dan Labuhan Maringgai sebagai Pilot Project Pelabuhan Nasional di Lampung. (Pembangunan Pelabuhan Logistik Sebalang sebagai simpul penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung)* FGD Tematik Infrastruktur. 7. Menciptakan iklim investasi dan pembangunan ekonomi partisipatif berbasis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, UMKM, dan swasta. 8. Meningkatkan peran bank daerah dalam pembangunan di daerah dan desa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan UMKM. 9. Penguatan permodalan bank daerah untuk memenuhi standar kebutuhan pelayanan bank daerah dengan menggandeng partner strategis atau melalui kelompok usaha bank (KUB). 10. Meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dan perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha desa dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. 11. Mengembangkan layanan digital bank daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan keuangan. 12. Mengembangkan dan mempromosikan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan lokal.
1.1.4	Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, komunitas, dan investasi. 2. Penguatan konektivitas menuju dan dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Menciptakan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan (green/ eco tourism).

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		4. Meningkatkan kualitas pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif dari tingkat UMKM. 5. Memperkuat peran Pokdarwis sebagai kekuatan lokal pariwisata. 6. Membangun ekosistem digital pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pelayanan prima. 7. Menyediakan identitas digital yang kuat dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung secara nasional dan global. 8. Memperkuat peran Badan Promosi dan Pengelola Pariwisata Lampung dalam rangka peningkatan indeks kinerja pariwisata (IKP).
1.1.5	Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	1. Mendorong interkonektivitas jalan dan moda transportasi antar wilayah. 2. Mewujudkan keadilan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pembangunan infrastruktur dengan kearifan lokal. 4. Aksesibilitas transportasi publik dengan konsep smart, modern, terjangkau, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan ramah terhadap lansia, anak, dan kaum disabilitas. 5. Memelihara infrastruktur jalan untuk kelancaran mobilitas publik, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya logistik. 6. Pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang menunjang pelayanan publik serta produktivitas ekonomi dan sosial. 7. Melanjutkan Pembangunan Kota Bandar Negara sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, dan peradaban dengan dengan konsep *Eco City* yang Hijau, Cerdas, dan Ramah 8. Menerapkan konsep pelayanan ramah publik dan terpadu kepada masyarakat dengan berbasis pada TI dan Teknologi *Smart City.* 9. Menyiapkan kawasan komersial sebagai penunjang utama Kota Baru 'Bandar Negara'. 10. Pengembangan Roadmap industri energi terbarukan berbasis biomassa (Pengembangan Roadmap industri berbasis energi terbarukan)* FGD Tematik Infrastruktur. 11. Menyediakan skema pembiayaan dan kredit yang memudahkan masyarakat dan perusahaan kecil mengadopsi teknologi energi terbarukan. 12. Inisiasi pengembangan potensi energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya. 13. Memasyarakatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan. 14. Mendorong kerjasama energi terbarukan antara industri dan masyarakat penyedia bahan biomassa (berbagai sumber energi terbarukan)* FGD Tematik Infrastruktur.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		15. Melakukan optimalisasi BUMD dalam pengelolaan transaksi energi di interkoneksi Lampung untuk peningkatan PAD (Optimalisasi BUMD dalam Pengelolaan Transaksi energi daerah secara mandiri dan strategis untuk peningkatan PAD)* FGD Tematik Infrastruktur.
1.1.6	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	1. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem. 2. Memetakan dengan tepat menggunakan big data bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan. 3. Menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin secara tepat waktu dan tepat sasaran. 4. Memantau kondisi masyarakat miskin dan yang membutuhkan dan melakukan mitigasi sesuai kebutuhan. 5. Optimalisasi peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah (PKH, Tagana, Pendamping Desa, TKSK, Pekerja Sosial, atau sejenisnya).
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif		
Tujuan 2.1.Meningkatkan kualitas pembangunan manusia		
2.1.1	Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	1. Memfasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai pusat aktivitas pendidikan akhlak dan karakter. 2. Menyelenggarakan sertifikasi pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah vokasi. 3. Pemerataan dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan tenaga kerja terampil di daerah. 4. Memfasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja Lampung. 5. Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat. 6. Mendorong pengembangan sekolah menengah unggulan dan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri. 7. Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan pesantren. 9. Menciptakan tata kelola teknologi informasi sekolah dan pesantren demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal. 10. Menjamin anggaran pendidikan tepat guna dan tepat sasaran. 11. Memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. 12. Sinergi tridharma perguruan tinggi dalam pembentukan generasi cerdas dan berakhlak.
2.1.2	Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	1. Membangun sinergitas para pemuda, atlit, dan organisasi olahraga (PSSI, KONI, KORMI, dan lainnya) untuk penciptaan prestasi olahraga dan kebugaran masyarakat.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		2. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan secara profesional dalam keterlibatan pembangunan daerah dan Pengembangan daya saing Kepemudaan. 3. Memberikan apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan, dan olahraga. 4. Mengangkat silat sebagai budaya olahraga daerah. 5. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga untuk meraih prestasi. 6. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat mulai dari desa, sekolah, dan instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan, dan produktivitas masyarakat. 7. Mencanangkan dan mempersiapkan Lampung sebagai tuan rumah PON tahun 2032. 8. Membangun pusat olahraga berstandar internasional (Lampung Sport Center). 9. Mendukung pengembangan UMKM dan pengusaha pemula. 10. Mengakses potensi pemuda melalui peningkatan kompetensi untuk berwirausaha. 11. Meningkatkan kemudahan dan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi generasi muda. 16. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis dan penyediaan fasilitas pelatihan bisnis yang komprehensif untuk umum, generasi muda, perempuan, dan kaum disabilitas. 12. Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap manfaat dan risiko keuangan. 13. Mendorong pemuda desa untuk berwirausaha. 14. Memfasilitasi kegiatan business matching antar stakeholders terkait untuk meningkatkan angka aktivasi dan sustainability usaha bisnis pemuda. 15. Mengadakan kompetisi atau program akselerator bidang inovasi dan kewirausahaan untuk mendorong generasi muda mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 16. Memfasilitasi perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk melakukan penelitian bersama dalam rangka penciptaan inovasi-inovasi baru. 17. Mengembangkan potensi Ekonomi Kreatif dengan Menyiapkan Pusat Kreativitas dan Inovasi Daerah (*Lampung Creative and Innovation Center*) melalui kemitraan bersama perguruan tinggi. 18. Mendorong pemasangan sistem monitoring berbasis digital untuk melacak dan merespons semua tindak kejahatan dan musibah di area publik. 19. Melakukan implementasi desa cerdas sebagai peningkatan indeks desa membangun (IDM).

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		20. Melakukan penelitian terapan yang berfokus pada solusi pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional. 21. Implementasi teknologi dalam peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Lampung yang dilakukan dari desa. 22. Meningkatkan penerapan ekonomi sirkular yang mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dengan meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. 23. Melibatkan dan mendukung perguruan tinggi swasta dan negeri dalam program-program pembangunan Lampung.
2.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Mendukung program nasional pemberian makanan gratis untuk peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu. 2. Menyediakan pusat layanan kesehatan yang berstandar layanan minimal di tingkat provinsi. 3. Mendukung peningkatan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Lampung. 4. Mendukung pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten dan kota. 5. Melakukan kampanye pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular. 6. Melakukan kampanye imunisasi bagi anak usia dini, remaja, dan perempuan. 7. Berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas-komunitas lokal untuk menyebarkan informasi kesehatan dan menyelenggarakan kampanye gaya hidup sehat. 8. Memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran dan tepat waktu. 9. Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. 10. Menyelenggarakan bantuan medis darurat bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti transportasi medis, penanganan pertolongan pertama, dan bantuan medis lainnya dalam keadaan darurat.
2.1.4	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	1. Melanjutkan Program Keluarga Harapan. 2. Mensosialisasikan fungsi keluarga sebagai jaring pengaman sosial. 3. Membudayakan keluarga inti harmonis. 4. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan pranata sosial budaya yang tangguh. 5. Lampung ramah anak dan perempuan. 6. Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi kaum rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlantar.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		7. Memberikan akses dan meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. 8. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memberikan perlindungan kepada ibu dan anak terdampak. 9. Standarisasi infrastruktur publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. 10. Menyelenggarakan pembinaan bagi kaum difabel guna menciptakan kemandirian kaum disabilitas.
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas		
Tujuan 3.1. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas		
3.1.1	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	1. Menjunjung tinggi pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan berdasarkan hukum. 2. Memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan. 3. Menguatkan jejaring kerjasama antar kota-kabupaten. 4. Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan dan akuntabel. 5. Memperkuat instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif. 6. Upaya lanjutan percepatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan pada sektor prioritas. 7. Mewujudkan pengelolaan APBD secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Memperkuat sinergitas pertahanan dan keamanan daerah bersama TNI, Polisi, dan lembaga lainnya. 9. Mengembangkan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam pengajuan perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, retribusi, dan layanan lainnya dilakukan secara online melalui portal resmi pemerintah daerah. 10. Mengoptimalkan fungsi hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital. 11. Melakukan pemutakhiran website resmi yang berisi informasi terkait pembangunan daerah, termasuk rencana pembangunan, progres proyek, dan anggaran yang digunakan.

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		12. 12.Mengadakan forum dialog publik secara rutin untuk membahas perkembangan pembangunan daerah dan mendengarkan masukan dari masyarakat. 13. Menjamin pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang transparan dan akuntabel. 14. Membangun Data Recovery Center (DRC) untuk mendukung SPBE yang aman dan handal. 15. 15.Mengintegrasikan sistem digital pada semua tingkat dalam satu pengelolaan terpusat di Command Center secara realtime yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.
Tujuan 3.2 Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana		
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	1. Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan. 2. Mewujudkan desa tangguh bencana. 3. Peningkatan capaian akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak. 4. Pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan. 5. Mengelola kawasan pesisir Lampung dengan program berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. 6. Mencanangkan dan mempersiapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah zero waste. 7. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). 8. Mengintegrasikan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. 9. Memitigasi dampak perubahan iklim global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
	Tujuan 3.3 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	
3.3.1	Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila dengan merevitalisasi prinsip hidup orang Lampung “Piil Pesenggiri”. 2. Membangun semangat persatuan masyarakat Lampung melalui pendekatan budaya “Sakai Sambayan. 3. Sinergitas TNI, Polri, Tokoh masyarakat, stakeholder dengan pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. 4. Menyelenggarakan Festival Seni dan Budaya (festival yang meliputi seni, musik, tari, dan kuliner dari berbagai suku di Provinsi Lampung). 5. Melakukan pendampingan, revitalisasi dan supervisi bagi lembaga kebudayaan dan atau kelompok masyarakat 6. Penguatan keimanan dan ketaqwaan melalui kegiatan pembinaan, kolaborasi, dukungan kegiatan keagamaan,

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN
		penyediaan sarana & prasarana ibadah, dan pemberian bantuan/insentif kepada umat dan pemuka agama. 7. Revitalisasi sarana dan lembaga kebudayaan (sanggar, balai desa, perguruan silat, lembaga adat). 8. Optimalisasi masyarakat desa sebagai penggerak aktivitas kebudayaan. 9. Menyelenggarakan workshop, seminar, dan diskusi publik tentang berbagai budaya dan tradisi yang ada di Provinsi Lampung. 10. Penggunaan simbol, aksara dan bahasa Lampung di ruang publik. 11. Mendorong kreasi seni dan budaya karya seniman dan budayawan lokal. 12. Penguatan muatan pendidikan berbasis budaya Lampung.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Gambar 4. 2 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Keterangan: *) Lima Direktif Presiden
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada sebagai berikut.

Gambar 4. 3 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

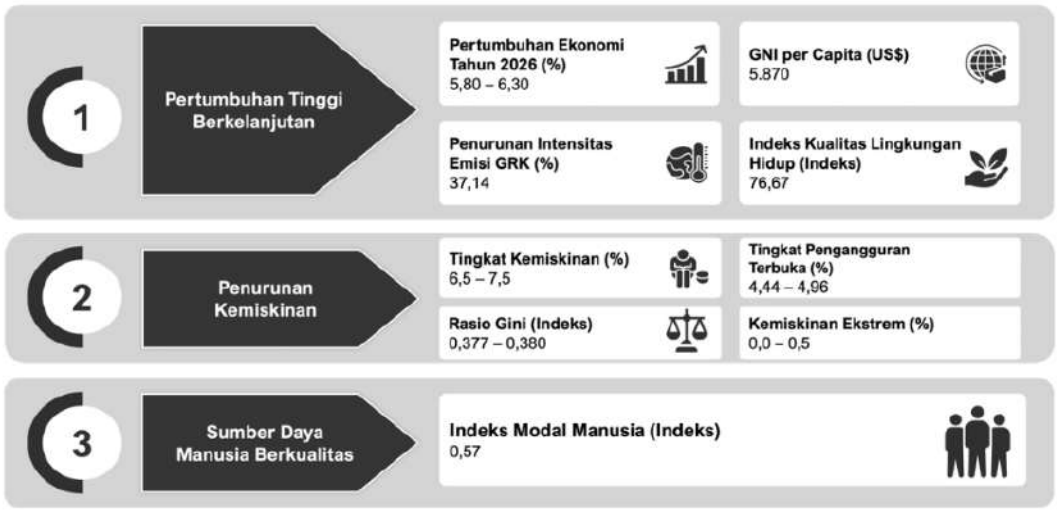

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

4.2.1.1 Prioritas Nasional RKP Tahun 2026

1. **Prioritas Nasional 1**: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

   Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan yang perlu diperkuat. Dalam RKP Tahun 2026, hal ini diwujudkan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan merata.

   Sasaran Utama dalam Prioritas Nasional 1 untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM, yaitu :

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandasakan Pancasila, demokrasi dan HAM				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69 - 85,23	82,12 - 85,66
2	Indeks HAM	2,70 (2023)	2,75	2,80

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (Diolah)

Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, serangkaian arah kebijakan dilaksanakan, melalui (i) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; serta (iv) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

2. **Prioritas Nasional 2**: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

   Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada

penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, sebagai berikut:

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan				
1	Asia Power Index (Military Capability)	15,7	16,0	17,0
2	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,6	65,7	65,8
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,80 (2020)	67,50	68,00
4	Global Cybersecurity Index	100		
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	61
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2	73,2	75,4
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,67	3,16	3,33
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	8,27	7,21	6,55
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
9	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,82
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	14,68	20,00	23,00
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
11	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,50
12	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	59,59	59,31	60,16
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	24,00 (2020)	39,20	42,24
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,25	12,50	17,00

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan				
15	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	3 (2023)	3	2
16	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	41,66
17	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43 (2023)	42	41
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
18	Indeks Ekonomi Hijau	60,07 (2023)	68,34	70,01
19	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,64 (2023)	58,00	60,00
20	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	28 (17 terdaur ulang)
21	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	17,47 (2023)	18,37	19,07
22	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	28,53 (2023)	26,67	27,35
23	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,40	0,45
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,53 (2024)	76,49	76,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut.

Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan

Menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui (i) pembangunan postur pertahanan; (ii) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (iii) penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; (iv) penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; (v) peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (vi) peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (vii) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (viii) peningkatan profesionalisme

pelayanan kepolisian; serta (ix) penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi.

Meningkatkan Kemandirian Bangsa menuju Swasembada Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan FEW Nexus Kemandirian bangsa menuju swasembada pangan, energi dan air yang berkualitas dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui:

Pangan

(i)pengembangan KSPP/lumbung pangan; (ii) penguatan cadangan pangan; (iii) pengembangan pangan hewani; (iv) pengembangan pangan akuatik (blue food); (v) pengembangan pangan lokal dan nabati; (vi) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (vii) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia (SDM), riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; serta (viii) penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.

Energi

(i) peningkatan penyediaan energi; (ii) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; serta (iii) penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih.

Air

(i) penyediaan pasokan air berkelanjutan; (ii) konservasi sumber daya air; (iii) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir; (iv) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation); serta (v) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa.

Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan

Ekonomi Syariah

Meningkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif melalui (i) penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal; (ii) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi internasional; (iii) penguatan ekosistem

halal; (iv) penguatan keuangan syariah; dan (v) penguatan dana sosial syariah.

Ekonomi Digital

Meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

Ekonomi Biru

Meningkatkan kontribusi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola ekonomi biru; (ii) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (iii) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (iv) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (v) penguatan industri transportasi laut; (vi) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (vii) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru.

Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

Memperluas pelaksanaan transformasi ekonomi hijau yang dilaksanakan melalui (i) penguatan ekosistem ekonomi sirkular; (ii) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (iii) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (iv) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (v) pembangunan rendah karbon; (vi) peningkatan pekerjaan hijau/green jobs; dan (vii) penguatan pengelolaan hutan lestari.

3. **Prioritas Nasional 3**: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

   Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya

logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,00 (2019)	46,50	47,00
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	169,10	188,50	188,04
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,21	66,90	64,51
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	6,81	8,00	7,63
5	Aset Asuransi/PDB (%)	8,93	9,10	9,30
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,72	57,80	59,90
7	Total Kredit/PDB (%)	35,35	37,80	38,46
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70 (2023)	91,00	91,50
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	24,50	35,00	37,95
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	0,97	1,10	1,12
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,15
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,18
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,72 (2022)	4,20–4,30	4,60–4,70
14	Devisa Pariwisata (miliar USD)	16,71	17,10–18,30	22,00–24,70
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,30–7,90	7,40–8,00

Sumber : Kemeneterian PPN/Bappenas, 2025 (Diolah)

Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, arah kebijakan akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
2. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan.
3. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
5. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

4. **Prioritas Nasional 4**: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (human capabilities) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi. Dalam RKP Tahun 2026, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat

peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 Keberhasilan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas pada tahun 2026 diwujudkan melalui lima sasaran utama, sebagai berikut:

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)	9,22	9,33	9,45
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,21	13,32	13,36
3a	Rata-rata Nilai PISA - Membaca	359 (2022)	396	396
3b	Rata-rata Nilai PISA - Matematika	366 (2022)	404	404
3c	Rata-rata Nilai PISA - Sains	383 (2022)	416	416
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:	63,06	64,89	65,89
4a	(a) Literasi Membaca Numerasi	55,92	57,36	58,86
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	32,00	33,94	34,92
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,20	11,11	11,49
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,14	68,32	68,50
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,39	74,43	74,68
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	2,11	2,10	2,10
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122	109
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	21,50 (2023)	18,80	17,50
5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	387 (2023)	329	252
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,42	98,60	98,70
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	73,83
2	Indeks Perlindungan Anak	68,29 (2023)	70,19	72,33

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
3	Indeks Pembangunan Pemuda	60,59 (2023)	65,16	67,24
4	Indeks Ketimpangan Gender	0,421	0,430	0,421
5	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023)	92,02–92,11	92,11–92,21
6	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94,00	94,50
7	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69,00	69,50
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	52

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (Diolah)

Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut.

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (i) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (ii) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (iii) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (iv) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (v) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (vi) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM); serta (vii) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.

Kesehatan untuk Semua

Mewujudkan kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (i) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia; (ii) pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (iii) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (iv) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; serta (v) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (i) peningkatan ketangguhan keluarga; (ii) peningkatan kualitas perlindungan anak; (iii) peningkatan kualitas pemuda; (iv) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (v) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja

Menguatkan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja akan dicapai melalui (i) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja; (ii) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; serta (iii) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga.

Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat akan dicapai melalui peningkatan pembinaan.

5. **Prioritas Nasional 5**: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

   Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi.

   Selain itu, hilirisasi industri, termasuk yang berbasis sumber daya hayati, perlu diperkuat agar dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih berdaya saing. Dengan industri yang lebih efisien dan produktif, ketersediaan pangan dan energi serta produk olahan lainnya akan lebih stabil dan berkelanjutan.

Produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi yang meningkat juga akan membuka peluang ekspor yang lebih luas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tidak hanya di sektor industri pengolahan, tetapi juga pada sektor pendukung lainnya seperti jasa perdagangan, transportasi dan lainnya. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif dan berdaya saing, termasuk yang berbasis hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sebagai berikut:

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,98	20,80	21,20
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
1	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	13,30
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,15	29,37	29,44
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22,2	21,7	22,7

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan

Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan yang dilaksanakan melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.

Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (ii) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (iii) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; serta (iv) optimalisasi investasi strategis Danantara.

6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

   Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

   Salah satu persyaratan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah **pertumbuhan ekonomi yang inklusif**. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memperhatikan dan memberikan prioritas pada penguatan kemandirian, peningkatan kapasitas kerja dan daya saing usaha, peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan layanan dasar yang inklusif, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan intensif, serta pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif.

   Perlindungan sosial adaptif merupakan perlindungan sosial yang menjawab dinamika ekonomi nasional maupun global, perubahan iklim, dan kerentanan terhadap bencana. Perlindungan sosial yang responsif dan inklusif dicapai melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi yang terintegrasi, adaptif, dan inklusif sehingga sesuai dengan risiko, kerentanan, dan kedaruratan yang dihadapi seluruh penduduk. Perlindungan sosial termasuk didalamnya adalah rehabilitasi sosial, layanan sosial, dan perawatan yang diberikan kepada penduduk dengan kerentanan tertentu.

   Pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional memungkinkan pemerintah mengidentifikasi dan menargetkan kelompok masyarakat miskin dan rentan dengan lebih akurat dan mendukung upaya digitalisasi penyaluran bantuan dan program yang transparan dan efisien.

Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi dan memperhatikan daerah tertinggal dan kawasan afirmasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 Sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6 tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan				
1	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	7,0 - 8,10	6,5 - 7,5
2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	1,47	0,50 - 1,00	0,0 - 0,50
3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	17,13	17,50	18,20
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	31,21	32,15	34,99
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	9,07 (2023)	10,00	10,40
Meningkatkan akses rumah layak, terjankau dan berkelanjutan				
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,25	67,00	68,66
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagi sumber Pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
1	Persentase Desa Mandiri (%)	22,85	23,29	23,91
Perkotaan sebagai sumber pertuimbuhan ekonomi				
1	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	57,70
2	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	44,13 (2022)	44,35	44,58

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan

Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui (i) sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; (ii) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (iii) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.

Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman.

Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah

Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN.

7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui perbaikan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sektor prioritas seperti pangan, energi dan industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efisiensi birokrasi dan penguatan kebijakan fiskal menjadi pilar utama dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Reformasi birokrasi diarahkan pada digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola migrasi untuk mendukung pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kebijakan fiskal berperan strategis dalam

meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Stabilitas makroekonomi juga dijaga melalui pengendalian inflasi yang didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk mendorong swasembada pangan nasional.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026, sebagai berikut:

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,70
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38	40
3	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00 - 64,99	65,00 - 66,99
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani				
1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98*)	71,38	72,80*)
2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,0	93,5	94,0
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba				
1	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,73 (2023)	1,70	1,70**)
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan				
1	Return on Asset (RoA) BUMN	3,14 (2023)	3,21	3,26
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan				
1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,84	12,36	12,22 - 13,35
2	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,08	10,24	10,45 - 11,40
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				
1	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,50 ± 1,00	2,50 ± 1,00

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (ii) reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan; (iii) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; (iv) transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; serta (v) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi.

Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; (ii) transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan melalui penguatan manajemen kinerja pembangunan; (iii) penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang adaptif, produktif, serta memiliki kinerja unggul dan daya saing tinggi; (iv) pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; serta (v) pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif.

Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba

Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Tata Kelola BUMN yang Baik

Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan peningkatan produktivitas BUMN.

Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal

Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) optimalisasi pendapatan negara; (ii) optimalisasi belanja negara; serta (iii) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil

Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan pengendalian inflasi.

8. **Prioritas Nasional 8**: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Upaya untuk meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif harus didukung oleh masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya, serta lingkungan alam yang terjaga dan lestari. Agama dan kebudayaan berperan penting sebagai landasan moral dan basis etika dalam pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berikhtiar menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilai nilai agama dan kearifan lokal, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Etika lingkungan yang bersumber dari agama dan budaya juga menjadi panduan dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menguatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selaras dengan itu, optimalisasi pemanfaatan lingkungan secara produktif dan berkelanjutan perlu terus didorong antara lain dengan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi telah terbukti mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lestari, termasuk dalam sistem pertanian berbasis ekologi, konservasi hutan, serta perlindungan ekosistem laut. Tradisi keagamaan dan budaya juga memiliki

peran strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan yang menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur, sebagai berikut:

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan				
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	66,15
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	58,99
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	77,14
Terwujudnya Resiliense terhadap Bendacana dan Perubahan Iklim				
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,136

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas 2025 (diolah)

Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
2. Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RKP Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun

2026 : **"Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2026, sebagai berikut :

1. **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;**

   Dari sisi ekonomi, infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan mempermudah akses ke pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat sektor industri serta jasa.

   Di sisi sosial, infrastruktur yang berkualitas seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang sangat penting. Infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan akses yang merata, menciptakan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang baik seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang publik meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

2. **Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;**

   Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga budaya. Untuk itu, pengembangan SDM harus difokuskan pada peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi.

   Penguatan SDM yang unggul dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, di mana akses pendidikan yang merata dan fasilitas yang memadai menjadi fondasi yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pola pikir yang kritis serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, inovasi menjadi faktor yang tak kalah penting. SDM yang inovatif tidak hanya mampu menguasai pengetahuan yang ada, tetapi juga mampu menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada di masyarakat dan dunia industri. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan teknis, penguatan kreativitas, dan kemampuan berpikir out-of-the-box harus menjadi bagian integral dalam pengembangan SDM.

3. **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;**
   Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Faktor investasi dan hilirisasi industri, menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, mengembangkan ekonomi berbasis desa, memanfaatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inisiasi lumbung energi terbarukan—saling terkait dan dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

4. **Pengentasan Kemiskinan;**
   Upaya-upaya dilakukan dengan memberikan akses ke sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka, maka mereka akan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Tidak kalah penting, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, perumahan yang layak, dan air bersih sangat berpengaruh dalam mengurangi beban kemiskinan.

5. **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;**
   Pemerintahan yang efektif memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, integritas memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip moral yang tinggi. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan

harus dapat menghasilkan dampak yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat, tanpa pemborosan anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan yang efektif juga memprioritaskan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, integritas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang berintegritas menuntut para pejabat dan aparatnya untuk selalu bertindak dengan jujur, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;**

   Dukungan Kualitas lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai tidak merusak keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan produktif, sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam jangka panjang.

7. **Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;**

   Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Keharmonisan memungkinkan saling menghargai meski ada perbedaan, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai. Keamanan juga penting, karena masyarakat yang aman memungkinkan semua orang beraktivitas tanpa rasa takut, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kualitas hidup. Keamanan mencakup perlindungan fisik serta stabilitas sosial, memastikan kenyamanan emosional dan psikologis bagi setiap anggota masyarakat. Penguatan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat. Melestarikan tradisi, seni, dan adat istiadat lokal tidak hanya memberikan kekayaan budaya, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang mendalam di antara masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,

situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional maka ditetapkan sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2026. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan pembahasan dengan Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemendagri).

Penetapan target indkator makro pembangunan ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga menjadi pertimbangan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Asumsi Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026

INDIKATOR MAKRO		Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	5,2 - 5,7*
2.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	51,37	54,0-56,0
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,13	73,80-74,4
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	3,51 - 4,05*
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,62	8,90 - 9,90*
6.	Gini Rasio (Nilai)	0,301	0,274 - 0,290*
7.	Inflasi (%)	1,50	2,5 -/+ 1,0
8.	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78,08	85,7
9.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Nilai)	124,97	125-127
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,87	-4,61
11.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	60,64	62,41 – 64,03*

*) Target hasil kesepakatan pada Forum Rakortek Pembangunan Tahun 2025 antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi Lampung.

4.2.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Tahun 2026 menjadi momentum awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung periode 2025–2029. Pada saat penyusunan perubahan RKPD ini, dokumen RPJMD 2025–2029 masih berada pada tahap perumusan, yakni dalam bentuk Rancangan RPJMD. Namun demikian, arah kebijakan yang termuat dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah telah mulai diintegrasikan ke dalam substansi Perubahan RKPD Tahun 2026.

Sebagai landasan pembangunan jangka menengah, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2029, yaitu **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas",** menjadi arah utama pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya mencerminkan semangat kemandirian dan kemajuan Lampung, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi nyata daerah dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4.2.3.1 Keselarasan RPJMD, Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional

Dengan memperhatikan posisi strategis tahun 2026 sebagai tahun transisi dan awal RPJMD, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan untuk menyelaraskan antara agenda pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Integrasi ini mencakup sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, dan pelaksanaan program yang berbasis pada prinsip kolaboratif dan hasil nyata. Oleh karena itu, RKPD 2026 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung, tetapi juga menjadi wujud nyata peran Provinsi Lampung dalam mengakselerasi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Tabel 4. 3 Keselarasan RPJMD 2025-2029, Prioritas Pembangunan Daerah 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2026

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 :		
"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".		
Keselarasan		
Misi / Cita Pembangunan Lampung Tahun 2025 - 2029	**Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2026**	**Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2026**
Tahun 2025-2029		

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 : "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".		
Keselarasan		
Misi / Cita Pembangunan Lampung Tahun 2025 - 2029	**Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2026**	**Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2026**
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	**Prioritas Daerah 1.** Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	**Prioritas Nasional 3** :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Prioritas Daerah 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;	**Prioritas Nasional 2 :** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Prioritas Daerah 4. Pengentasan Kemiskinan secara tepat sasaran	**Prioritas Nasional 6 :** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	**Prioritas Daerah 2.** Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	**Prioritas Nasional 4 :** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan,dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	**Prioritas Daerah 5.** Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	**Prioritas Nasional 7 :** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 : "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".		
Keselarasan		
Misi / Cita Pembangunan Lampung Tahun 2025 - 2029	**Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2026**	**Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2026**
	Prioritas Daerah 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	**Prioritas Nasional 8 :** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Prioritas Daerah 7. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	**Prioritas Nasional 1 :** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
		Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

KESELARASAN SASARAN INDIKATOR MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI

NO.	INDIKATOR	TARGET NASIONAL RKP TAHUN 2026	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2026	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 - 5,7	5,2 - 5,7	5,2 - 5,7*
2	PDRB per Kapita (juta)	58,1 - 59,7	54,0-56,0	54,0-56,0
3	Kontribusi PDRB Provinsi	2.2	2.2	2.2
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 - 9,90	8,90 - 9,90	8,90 - 9,90*
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51 - 4,05	125-127	125-127*
6	Rasio Gini	0,274 - 0,290	0,274 - 0,290	0,274 - 0,290*
7	Indeks Modal Manusia	0.56	0,55	0,55
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	62,42 - 64,03	62,41 – 64,03	62,41 – 64,03*
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76.83	71,2	71,2

Keterangan : *) kesepakatan pada Forum Rakortekbangnas Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional menjadi acuan utama dalam merumuskan prioritas, sasaran, serta rencana program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan bersifat dua arah, yaitu *bottom-up* dan *top-down*, sehingga tercipta sinergi antara kebutuhan riil masyarakat di daerah dengan agenda strategis nasional.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Setiap capaian program, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari implementasi nyata kebijakan di tingkat daerah, yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Berikut adalah sinkronisasi program prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 terhadap prioritas nasional Tahun 2026 telah disusun secara sistematis dan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Program Dan Sub Kegiatan Prioritas Asta Cita Provinsi Tahun 2026

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
					1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
					1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			KESEHATAN MASYARAKAT		
					1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
					1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
					1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi
					1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMKÂ
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
					1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
					1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
					1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	masyarakat yang adil dan makmur.					
					1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
					1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
					1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
					2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
					2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
					2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
					2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
					2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			LINGKUNGAN HIDUP		
					2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional
					2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
					2.12.02.3.01.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
					2.12.03.3.02.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
					2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
					2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			di Jalan Provinsi			
					2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
					2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan				2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
					2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
					2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
					2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet
					2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
					2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal
					2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
					2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah
					2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,				2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	narkoba, judi, dan penyeludupan.					
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
					2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
					2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
					2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Kolektif Bangsa			
					2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
					3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
					3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
					3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
					3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
					3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
					3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
					3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
					3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
					3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
					3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual
					3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
					3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
					3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
					3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
					3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
					3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
					3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional
					3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
					3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
					3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
					3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					

Sumber : Rakortek, 2025

4.2.3.2 Keselarasan Target Makro Pembangunan Daerah dan Pusat

Pemerintah pusat menetapkan sasaran yang mencakup berbagai indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Target ini berfungsi sebagai acuan utama dalam merancang kebijakan dan program pembangunan di seluruh Indonesia, dengan harapan agar pencapaian target nasional dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan target-target tersebut untuk mencapai sasaran nasional. Forum untuk menyelaraskan target makro pusat dan daerah dilakukan elalui Forum Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortek) yang dihadiri oleh Bappenas, Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Berikut adalah hasil penyelrasan target makro pembangunan natar Pusat dan Pemerintah Provinsi lampung.

Tabel 4.4 Keselarasan Target Makro Pusat dan Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro	Target Nasional RKP 2026	Target Provinsi RKP 2026	Target Provinsi RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan	5,8 - 6,3	5,5 - 5,7	5,2 - 5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 - 4,96	3,51 - 4,05	3,51 - 4,05
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	8,90 - 9,90	8,90 - 9,90
4	Rasio Gini	0,377 - 0,380	0,274 - 0,280	0,274 - 0,280
5	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	37,14	62.41 - 64.03	62.41 - 64.03

Sumber : Hasil kesepakatan target makro pda Forum Rakortekbang Tahun 2025.

4.2.3.3 Keselarasan Outcome Prioritas Pusat dan Daerah mendukung Asta Cita

Berikut adalah hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemendagri) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk semua urusan pemerintahan membahas dukungan daaerah dalam pencapaian target urusan.

Tabel 4. 5 Outcome Prioritas Asta Cita Provinsi Tahun 2026

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100	73,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100	70,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,19	70,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	NIlai	63,74	62,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,9	67,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,31	60,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,79	69,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,31	80,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,33	75,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,37	64,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67,25	71,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,34	71,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	85,83	89,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	82,84	84,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim keamanan SMA	Nilai	73,73	81,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim keamanan SMK	Nilai	70,68	69,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim keamanan SDLB	Nilai	77,53	76,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim keamanan SMPLB	Nilai	74,67	74,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim keamanan SMALB	Nilai	73,35	73,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim kebinekaan SMA	Nilai	73,5	72,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim kebinekaan SMK	Nilai	71,2	71,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	73,55	71,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	73,07	73,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	73,99	74,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	62,98	61,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	61,23	60,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	70,26	68,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	71,51	71,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	70,41	72,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	109	109	Dinas Kesehatan
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	98,7	98,9	Dinas Kesehatan
				Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	19	0	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	13,8	13,8	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17,5	12,8	Dinas Kesehatan
				Presentase lanjut usia yang mandiri	%	77	87	Dinas Kesehatan
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	1,4	0,5	Dinas Kesehatan
				Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	%	11,4	12	Dinas Kesehatan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	30	5	Dinas Kesehatan
				Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	45	85	Dinas Kesehatan
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	71	76	Dinas Kesehatan
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	46	50	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	23,4	23,4	Dinas Kesehatan
				Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kab/Kota	100	15	Dinas Kesehatan
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	55	40	Dinas Kesehatan
				Insidensi Tuberkulosis	Kasus	252	26853	Dinas Kesehatan
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	10,2	Dinas PKPCK
				Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Ha	143897	19,925	Dinas PSDA
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	1	Dinas PKPCK
				Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	1	Dinas PKPCK
				Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	2	Dinas PKPCK

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Penetapan RTRW	Perda/ Perkada	107	2	Dinas PKPCK
				Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	1	Dinas PKPCK
				Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	133	2	Dinas PKPCK
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,6	63,81	Dinas PKPCK
4.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	100	BPBD
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	100	Satpol PP
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	0	BPBD
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	100	BPBD

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	masyarakat yang adil dan makmur.							
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	100	Satpol PP
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75		BPBD
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan SDM	Keluarga	1500000		
				Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	100	Dinas Sosial
				Mengikuti Sertifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	60	Dinas Sosial
				Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71,01	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	-	Dinas Sosial
				SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	100	Dinas Sosial
				Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	60	Dinas Sosial
				Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71,01	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
				Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	Dinas Sosial
8.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34,99	32	Disnaker
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	15389510	6250	Disnaker
				Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283168	1600	Disnaker
				Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Dokumen	38	1	Disnaker
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34,99	32	Disnaker
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	15389510	6250	Disnaker

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283168	1600	Disnaker
				Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Dokumen	38	1	Disnaker
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,421	0,42	Dinas PPPA
				Persentase ARG Daerah	%	7	3,4	Dinas PPPA
				Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	901	Dinas PPPA
				Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	73,5	100	Dinas PPPA
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72,33	66,94	Dinas PPPA
				Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85	100	Dinas PPPA
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	100	Dinas PPPA
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,11	91,8	Dinas PPPA
11.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	95	Dinas KPTPH

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
				Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50	40	Dinas KPTPH
				Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	92,8	Dinas KPTPH
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15,6	11	Dinas KPTPH
12.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	197650	500	Dinas PKPCK
				Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	124000	1000	Dinas PKPCK
13.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	76,67	71,20	Dinas LH
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	61	30,45	Dinas LH

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	%	64	29,70	Dinas LH
14.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	76,67	71,20	Dinas LH
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	61	30,45	Dinas LH
				Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	29,70	Dinas LH
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	97	99,00	Dinas DukCapil
				Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	Persentase	97	99,00	Dinas DukCapil
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,8	64,71	Dinas DukCapil

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19		Dinas DukCapil
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,11		Dinas DukCapil
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85,3		Dinas DukCapil
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	65		Dinas DukCapil
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	10,9		Dinas DukCapil
17.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,67	0,35	Dinas Perhubungan
				Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	99,99	27,73	Dinas Perhubungan
18.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan			Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,67	0,35	Dinas Perhubungan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							
				Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	99,99	27,73	Dinas Perhubungan
19.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	2	Dinas Kominfo
				Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	2	Dinas Kominfo
				Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2	2	Dinas Kominfo
				Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20		
				Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	75	Dinas Kominfo
20.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	2	Dinas Kominfo
				Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	2	Dinas Kominfo
				Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provins	Level	2	2	Dinas Kominfo

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20		
				Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	75	Dinas Kominfo
21.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,12	1,2	Dinas Koperasi dan UMKM
				Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	15	5	Dinas Koperasi dan UMKM
				Proporsi Jumlah UKM	Persentase	3,15	2,7	Dinas Koperasi dan UMKM
				Rasio Kewirausahaan	Persentase	3,24	2,93	Dinas Koperasi dan UMKM
				Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	8,90	6,90	Dinas Koperasi dan UMKM
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10	2	Dinas Koperasi dan UMKM
22.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	2175	10,2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
23.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	77,55	71,38	Dispora
				Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	5,91	8,78	Dispora
				Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67,00	53,68	Dispora
				Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	23,79	23,79	Dispora
				Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	39,41	39,41	Dispora
				Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	38,00	12,00	Dispora
				Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	99,00	99,00	Dispora
				Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	79	79	Dispora
24.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase	79	79	Diskominfo

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	narkoba, judi, dan penyeludupan.							
25.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	40	Diskominfo
26.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	40	Diskominfo
27.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71,67	81,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/ peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8,74	8,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	%	1,76	2,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				pelaku/ pendukung pertunjukan seni				
				Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20,17	17,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65,50	28,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal dan/atau ekskul kesenian	%	32,46	41,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0,31	0,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71,67	81,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/ peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8,74	8,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,76	2,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20,17	17,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65,50	28,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal dan/atau ekskul kesenian	%	32,46	41,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0,31	0,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	74	70	Dinas Perpustakaan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75,4	72	Dinas Perpustakaan
30.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat			Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73,6	70	Dinas Perpustakaan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75,4	72	Dinas Perpustakaan
31.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	67	Dinas Perpustakaan
32.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	28,85	39,27	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Produksi Garam	Ton	2500000	110	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6470000	166068	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19380000	198982	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	83,0	83	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	19100000	152096	Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dok	7	1	Dinas Perikanan dan Kelautan
33.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	220000000000	11615250000	Dinas Pariwisata dan Ekraf
				Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1176000000	20500000	Dinas Pariwisata dan Ekraf
				Rasio PDB Pariwisata	%	4,7	1,65	Dinas Pariwisata dan Ekraf
				Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	26530000	590000	Dinas Pariwisata dan Ekraf
				Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	26060000	580000	Dinas Pariwisata dan Ekraf
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persentase	7,4		Dinas Pariwisata dan Ekraf
34.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Ton	22704470	2887502	Dinas KPTPH

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							
				Jumlah Produksi Padi	Ton	57534326	2875716	Dinas KPTPH
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	3084276	39337	Dinas KPTPH
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2000158	1678	Dinas KPTPH
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2890917	85143	Dinas Perkebunan
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	633290	47722	Dinas Perkebunan
				Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	5109804	156866.08	Dinas Peternakan
				Jumlah Produksi Telur	Ton	7044963	256456.47	Dinas Peternakan
				Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	16422126.32	312872	Dinas KPTPH
35.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Ha	1100000	6276	Dinas Kehutanan
				Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	########## ####	339.000.000.000	Dinas Kehutanan
				Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	258500	50	Dinas Kehutanan
				Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan	Persentase	1	0,01	Dinas Kehutanan

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
36.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pencapaian Ketahanan Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,22	36,6	Dinas ESDM
				Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1497	685	Dinas ESDM
				Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	145,4		Dinas ESDM
				Rasio Elektrifikasi	%	99,9		Dinas ESDM
37.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	Persentase	7,1	6,2	Dinas Perindag
				Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	Persentase	5	5	Dinas Perindag
38.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	880,0	5,7	Dinas Perindag
				Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	71	71	Dinas Perindag
39.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	45	5	Dinas PMD dan Transmigrasi

No	Asta CIta	Urusan	Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Target Nasional 2026	Target Daerah 2026	Perangkat Daerah Pengampu
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		pertumbuhan lokal Transmigrasi					
40.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,12		Kesbangpol
				Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68		Kesbangpol
41.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,12		Kesbangpol
				Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68		Kesbangpol
42.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,12		Kesbangpol
				Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68		Kesbangpol

Sumber : Rakortek, 2025

4.2.3.4 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional (PN)

Tabel 4. 5 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).		
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	01.02PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik
	01.03PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	01.04PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	01.05PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.		
	02.01PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.02PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
		Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	02.03PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	==	==
	02.04PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.05PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	02.06PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Program Pengaturan Pertahanan Di Wilayah Pesisir , Laut Dan Pulau	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Cipta Karya
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	==	==
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	==	==
	02.10 PP: Swasembada Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	02.11 PP: Swasembada Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	02.12 PP: Swasembada Air	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	02.14 PP: Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Dan Umkm
	02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau / Green Jobs	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Pengelolaan Hutan Adat	Dinas Kehutanan
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,		

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		
	03.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ)	Dinas Perhubungan
	PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata dan Ekraf
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Ekraf
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
	Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas		
		Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesra
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	Diknas
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dispora
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi UMKM
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Balitbangda
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Balitbangda
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Program Kepegawaian Daerah	Bkd
		Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pengembangan Kurikulum	Dikbud
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dispora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pppa
	04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas PMDT

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan TPH
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUAM
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rsam
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rsj
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSAM, RSJ
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas PPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMDT
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPPA
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPPA
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dispora
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.		
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Bappeda

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Peternakan & Keswan
		Program Mineral dan Batubara	Dinas EDSM
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas BMBK
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PKPCK
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PKPCK
	05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas BMBK
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas PTSP
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas PTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PTSP
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas PTSP
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PTSP

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Kerja Sama Penanaman Modal	Dinas PTSP
	05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara	Program Kerja Sama Penanaman Modal	Dinas PTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.		
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas PKPCK
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Bappeda
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PKPCK
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PKPCK

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PKPCK
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PKPCK
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dinas PKPCK
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Bukan Kewenangan Provinsi	
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PKPCK
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas PKPCK
		Program Kawasan Permukiman	Dinas PKPCK
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMDT
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.		
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol
	07.02 PP: Reformasi Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	07.03	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Lampung
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Lampung
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pem Otda
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negera	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung
			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.		
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	PD Pengampu
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
	08.03	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
	08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.2.4 Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 menetapkan dua arah utama dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Penetapan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nyata dan terukur.

Pertama, program prioritas diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Program ini fokus pada sektor-sektor yang menjadi pengungkit utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan pertanian, pembangunan infrastruktur strategis, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berkelanjutan. Program-program ini disusun secara terintegrasi dengan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaannya dapat mendorong percepatan capaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kedua, program prioritas diarahkan untuk menghasilkan dampak terbaik dalam waktu cepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah menitikberatkan pada efektivitas program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti penyederhanaan birokrasi layanan, digitalisasi pelayanan, serta percepatan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, dan layanan kesehatan primer. Tujuannya adalah menciptakan transformasi layanan publik yang lebih responsif, mudah diakses, dan berkualitas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

4.2.4.1 Program Prioritas Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas daerah Provinsi Lampung dilaksanakan untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Program Prioritas Daerah Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
PD 1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;	1.1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
PD 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	2.1 Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	2.2 Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Jiwa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Jiwa

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	2.4 Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PD 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	2.1 Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	2.3 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
PD 4. Pengentasan Kemiskinan	4.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
PD 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;	5.1 Terwujudnya Birokrasi berintegritas	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Umum
		Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengembangan SDM Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan SDM Daerah
		Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung Provinsi Lampung
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Lampung
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Lampung
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;	6.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PD 7. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;	7.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat

4.2.4.2 Program Unggulan Daerah

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1.	**Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)**	Jumlah Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	66	602	1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura 2) Dinas Peternakan dan Keswan 3) Dinas Kelautan dan Perikanan 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5) Dinas Koperasi dan UMKM 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi 7) Dinas PKPCK 8) Dinas PPPA 9) Dinas Perkebunan 10) Dinas Pendidikan 11) Dinas BMBK	1	**Dinas KPTPH :** Peningkatan Produksi bahan pangan dan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan,Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Prevalensi Stunting	13,2	11,32		2	**Dinas peternakan dan Kesehatan hewan :** kampanye gizi dan Fasilitasi UMKM Pendukung Makan Bergizi , Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
						3	**Dinas kelautan dan perikanan :** Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Jumlah Volume Ekspor Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
						4	**Dinas koperasi dan UMKM :** Persentase UMKM yang meningkat daya saing usahanya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Persentase usaha kecil yang terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola dan manajemen usaha menuju skala menengah, Program Pengembangan UMKM Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
						5	**Dinas PMDT :** Pembinaan dan pengawasan Bumdes, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan desa, untuk kegiatan pembinaan pengawasan Bumdes Program administrasi pemerintah desa.
						5	**Dinas Perkebunan :** Pembibitan Tanaman Perkebunan, Peremajaan Tanaman Sawit, Peremajaan

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
							tanaman tebu, Intensifikasi tanaman lada, Rehabilitasi Lada, Intercropping tanaman lada pada kebun kopi, Peremajaan Lada, Pasca Panen Kakao, Hilirisasi Kelapa (Pengolahan Kelapa) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Demplot lada organic Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian,Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian OPT tanaman lada, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Pembinaan, pengawalan, dan pemantauan harga Program Penyuluh Pertanian.
						6	**Dinas BMBK :** Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk memperlancar distribusi makan bergizi gratis.
						7	**Dinas PKPCK** : Perbaikan Jalan Desa, Pembuatan Akses Jalan Desa
						8	**Dinas Pendidikan** : Menentukan target penerima manfaat (misalnya, siswa dari keluarga kurang mampu),

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
							Memastikan makanan bergizi gratis didistribusikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan siswa
						9	**Dinas Kesehatan** : Memastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang diberikan, memastikan gizi makanan yang diberikan sesuai standar.
						10	**Dinas Perindag** : Program Perencanaan dan pembangunan Industri pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
						11	**Dinas PPPA : Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
						12	**Bappeda : Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**
2.	**Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi**	Persentase BUMDes berkembang dan maju	35,47	45,33	1) Dinas PMDT 2) Dinas KPTPH 3) Dinas Koperasi dan UMKM 4) Dinas Perindag 5) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6) Dinas Peternakan 7) Dinas Kominfotik 8) Dinas Kelautan dan Perikanan 9) Dinas Tenaga Kerja 10) Dinas PKPCK	1	**Dinas Koperasi** : Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Persentase Koperasi Yang Berkualitas	24,11	30,05		2	**Dinas Perindag** : Program Pengembangan Ekspor, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program perencanaan dan pembangunan industri
						3	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**, Program AdministrasiDesa
						4	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						5	**Dinas Perkebunan,** Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
						6	**Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif,**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
						7	**Dinas KPTPH**, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						8	**Dinas Perikanan** : Melakukan pendampingan teknis dalam budidaya ikan, pengelolaan kolam, hingga pemasaran hasil perikanan, Mendorong BUMDes untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan, seperti abon ikan, kerupuk ikan, atau nugget ikan.
						9	**Dinas Tenaga Kerja** : Mengadakan pelatihan kerja gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja.
						10	**Dinas PKPCK :** Penyediaan jalan lingkungan, saluran drainase, dan penerangan jalan di kawasan permukiman,
3.	**Lampung Menjadi Lumbung Pangan**	Indeks Ketahanan Pangan	83,07	85,11	1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman	1	**Dinas KPTPH :** Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
	Nasional				Pangan dan Hortikultura 2) Dinas Peternakan dan Keswan 3) Dinas Kelautan dan Perikanan 4) Dinas Perindag 5) Dinas PSDA 6) Dinas Koperasi dan UMKM 7) Dinas Perkebunan		Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyuluhan Pertanian
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	8,5	4,75		2	**Dinas Kelautan dan Perikanan** : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
						3	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan** : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
						4	**Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air :** Program Pengelolaan Sumber Daya Air
						5	**Dinas Koperasi UKM :** Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan Ksp / Usp Koperasi,Program Pemberdayaan Dan

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
							Perlindungan Koperasi,Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Pengembangan UMKM
						6	**Dinas Peternakan dan Keswan :** Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
						7	**Dinas Perkebunan :** Program Penyuluh Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4.	**Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan**	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	35,22	37,8	1) Dinas Kehutanan 2) Dinas ESDM 3) Dinas LH 4) Dinas Perindag 5) Bappeda 6) Biro Perekonomian 7) Dinas PKPCK	1	**Dinas Kehutanan** : Pengelolaan kawasan hutan yang berada di atas cadangan panas bumi, Program Pengelolaan Hutan
						2	**Dinas Lingkungan Hidup** : Izin Lingkungan serta Regulasi dan pengawasan dampak lingkungan dari pengembangan EBT, Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						3	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan** : Fasilitasi pengembangan industri

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
							pengolahan bioenergi dan produk energi baru terbarukan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri
						4	**Bappeda** : Perencanaan strategis dan penganggaran program EBT, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						5	**Biro Perekonomian :** Koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung investasi energi hijau, Program Perekonomian dan Pembangunan
						6	**Dinas PKPCK :** Penyediaan ruang dan regulasi tata ruang untuk pengembangan infrastruktur EBT, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
						7	**Dinas ESDM :** Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Penyusunan roadmap pengembangan energi baru terbarukan, Inventarisasi Energi Baru terbarukan, review RUED, Fasilitasi Pemanfaatan Energi baru Terbarukan,

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
5.	**Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal**	**INFLASI**	**2,5 + 1**	**2,5 + 1**	1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 3) Biro Perekonomian 4) Dinas Perhubungan 5) Dinas Kelautan dan Perikanan 6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7) Dinas Perhubungan 8) Satpol PP 9) Dinas Kominfo	1	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan:** Dukungan Pengendalian Inflasi melalui pelaksanaan pasar murah, dan fasilitas pasar Lelang, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
						2	**Biro Perekonomian**: Koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung stabilisasi harga pangan, Program Perekonomian Masyarakat.
						3	**Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**: Pasar Mitra Tani merupakan salah satu cara untuk memotong rantai distribusi, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (TPID), Perlindungan Produsen dan Konsumen, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
						4	**Dinas Perhubungan**: Pengendalian inflasi melalui 4K – ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga,

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
							kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif), Program Pembinaan, pengawalan dan pemantauan harga
						5	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**: Pembinaan, pengawasan dan pendampingan bagi pelaku usaha peternakan, Program Penyuluhan Peternakan.
						6	**Dinas Kelautan dan Perikanan**: Peningkatan Produksi Perikanan untuk mendukung ketersediaan produk perikanan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
						7	**Dinas Perhubungan**: Fasilitasi terhadap kelancaran distribusi, **Program Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
						8	**Satuan Polisi Pamong Praja**: Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
						9	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik: Penyebarluasan informasi, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

4.2.4.3 Program Perangkat Daerah mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026

Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengintegrasikan program-program perangkat daerah yang mendukung tematik pembangunan dalam RPJMN 2025–2029. Tematik pembangunan yang dimaksud mencakup SPM, pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, stabilitas harga pangan, dan penyediaan cadangan pangan. Setiap perangkat daerah merumuskan program prioritas yang sejalan dengan kebijakan nasional, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian target nasional. Berikut disajikan tabel keselarasan tematik dan program perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Tabel 4. 4 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kesenian tradisional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pembinaan sejarah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengelolaan permuseuman	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rumah Sakit Jiwa
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan gedung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
2	Pengendalian Inflasi	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program pengembangan ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
3	Penurunan Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
		Program pengendalian penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
4	Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pengembangan umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Dinas Kehutanan
		Program pengelolaan ketenagalistrikan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program fasilitasi dan koordinasi hukum	Biro Hukum

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program penyelenggaraan jalan	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan gedung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Dinas Sosial
		Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program penanganan bencana	Dinas Sosial
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Perkebunan
		Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian provinsi	Dinas Perkebunan
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5	Ketahanan Pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

4.3 Pokok – pokok Pikiran DPRD

DPRD memiliki peran strategis sebagai perwakilan langsung dari rakyat. Setiap anggotanya dipilih melalui proses demokratis dalam pemilihan umum, mencerminkan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karena itu, DPRD tidak hanya menjadi simbol representasi, tetapi

juga harus menjadi saluran yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang mereka wakili.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, kontribusi DPRD sangat penting, khususnya melalui penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD (pokir). Sesuai ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, DPRD diberikan ruang untuk menyampaikan saran dan pendapat berdasarkan hasil kegiatan reses—yakni penjaringan aspirasi yang dilakukan langsung di tengah masyarakat. Pokok-pokok pikiran ini menjadi masukan penting dalam perumusan kegiatan, penentuan lokasi, dan sasaran program pembangunan yang harus selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

Di Provinsi Lampung, kegiatan reses telah dilaksanakan secara aktif oleh anggota DPRD. Melalui kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing, para legislator tidak hanya menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah. Reses menjadi momentum penting untuk memperkuat kedekatan antara wakil rakyat dengan masyarakat, sekaligus memperdalam pemahaman terhadap realitas dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Dari berbagai hasil penjaringan aspirasi selama masa reses, ditemukan bahwa masyarakat Lampung masih menghadapi beragam tantangan, terutama di sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Persoalan-persoalan ini menjadi catatan penting yang perlu direspons dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah. Kehadiran DPRD dengan suara dan pokok pikirannya menjadi salah satu pilar penting dalam menjembatani antara kebutuhan rakyat dan arah kebijakan pembangunan.

Berdasarkan usulan yang masuk dalam aplikasi Sipd.ri sampai dengan 1 minggu sebelum Musrenbang Provinsi dilakukan telah dilakukan desk pembahasan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Bersama Perangkat Daerah terkait yang telah dilaksanakan tanggal 2-5 Juni 2025 dapat djabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 6 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH USULAN POKIR	DITERIMA	DITOLAK	PERANGKAT DAERAH
1.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	60	60	0	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH USULAN POKIR	DITERIMA	DITOLAK	PERANGKAT DAERAH
					Dinas Kelautan dan Perikanan
					Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Dinas Perkebunan
2.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	259	18	241	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
3.	Penguatan SDM yang Unggul dan Inovatif	203	106	97	Dinas Pemuda dan Olahraga Biro Kesejahteraan Rakyat
					Dinas Perhubungan
					Dinas Koperasi dan UKM
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Pengetasan Kemiskinan	43	1	42	Dinas Sosial
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	59	0	59	
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	158	18	140	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
7.	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Aman dan Berbudaya	19	0	19	
		801	**203**	**598**	

Kriteria usulan Pokir DPRD adalah kegiatan yang diusulkan adalah kewenangan provinsi dan diusulkan sebagai respon terhadap isu strategis dan permasalahan sektoral perangkat daerah. Usulan diinput ke dalam aplikasi system informasi pembangunan daerah Kemendagri dengan alamat *https://sipd-ri.kemendagri.go.id/* sampai dengan 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan.

4.4 Rencana Pengembangan Wilayah

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Arah pembangunan kewilayahan yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan arah pembangunan kewilayahan yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pembiayaan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pembiayaan lainnya.

Setiap wilayah memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda—baik dari segi sumber daya alam, letak geografis, budaya, maupun sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang selaras dengan potensi tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Pada daerah dengan potensi pariwisata tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung wisata akan membuka akses, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, wilayah dengan potensi pertanian atau perikanan memerlukan infrastruktur irigasi, jalan produksi, dan sarana logistik yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berbasis potensi akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilient, inklusif, dan mandiri.

Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah tercantum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi dimana pembangunannya bersumber pada alokasi dana APBD Provinsi ataupun diusulkan melalui pembiayaan APBN. Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Lampung.

No	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi		

No	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
1	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	• Kawasan Pendidikan Terpadu Kota Metro • Kawasan Agropolitan Metro • WPPI Kawasan Industri Lampung Tengah • Terminal Tipe A Betan Subing Lampung Tengah • WPPI Lampung Timur • Jalan akses KSPN • Dukungan perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Perkeretaapian PringsewuRejosari-Metro-Sukadana • Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya
2	Bandar Lampung – Pesawaran	• Rencana Jaringan KA Tanjung Karang – Pringsewu • Kawasan Industri Tegineneng • Kawasan Pangkalan Utama TNI AL Pesawaran • Terminal Barang Tegineneng • Pembangunan Jalur Lintas Kereta Api Tegineneng – Bandar Lampung - Tarahan
3	Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan	• Kawasan Waterfront City • Kawasan Pendidikan UNILA-ITERA-UIN RIL • Kawasan Industri Tegineneng • Kawasan sekitar bandara Radin Inten II • Kawasan KotaBaru Jatiagung • Kawasan Industri Lampung • Pengembangan Jalan Tol Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Pembangunan Stasiun Relung Helok, Karangsari, Sabah Balau, dan Stasiun Bandara
Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism		
1	Lampung Utara – Way Kanan	• Rencana pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; • Bendung Way Besai dan Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara • Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan • Pengembangan Panas Bumi Way Umpu
2	Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji	• Kawasan industri Tulang Bawang • Kawasan industri Tulang Bawang Barat • Kawasan industri Mesuji • Dermaga Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat • Pelabuhan Pengumpan regional Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; • Pelabuhan perikanan pantai Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;

No	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		• Pengembangan Dermaga Gunung Terang • Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Megow Pak yang melintasi sungai Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji
Koridor Ekonomi Wilayah III : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam		
1	Tanggamus	• Kawasan Industri Maritim • Kawasan geothermal ulu belu • Pelabuhan Perikanan • Sentra industri kelautan • Sentra industri pengolahan ikan • Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung • Pembangunan Dermaga di Pematang Sawa • Pembangunan Pelabuhan di Pekon Martanda dan Pekon Tampang Tua • Pengembangan Pelabuhan Laut Batu Balai, Kecamatan Kota Agung Timur
2	Pringsewu	• Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu dan Rejosari-Pringsewu • Bagian dari pengembangan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung – BTS. Bengkulu
3	Pesisir Barat	• Bandar Udara Muhamad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat • Sistem jaringan air bersih terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. • Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Pisang • Pengembangan Kawasan Industri • Jalan Tol Bengkunat – Batas Provinsi Lampung – • Pembangunan Jalan Lingkar Exit Tol Wilayah Barat
4	Lampung Barat	• Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kabupaten Lampung Barat; • Rencana pelabuhan Heni Arong di Kabupaten Lampung Barat • Penyediaan Infrastruktur Hijau seperti Kebun Raya Liwa • Pengembangan Akses menuju Geopark • Revitalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Dermaga Lumbok, sebagai pelabuhan pengumpan pada perairan Danau Ranau, yang melayani antar Propinsi dan Kabupaten maupun lokal

No	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		• Penataan kawasan permukiman tradisional, guna meningkatkan nilai tambah KSPN Danau Ranau • Restorasi ekosistem taman TNBBS

4.5 Rencana Pembangunan Rendah Karbon (Emisi Gas Rumah Kaca)

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki intensitas tinggi dalam aktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ketiga sektor ini, meskipun menjadi tulang punggung perekonomian daerah, juga merupakan penyumbang utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengendalian emisi di Provinsi Lampung menjadi sangat krusial dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Upaya pengendalian ini bertujuan untuk menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi lahan yang selama ini menjadi sumber utama pelepasan emisi dari sektor penggunaan lahan. Selain itu, diperlukan peningkatan efisiensi energi serta pemanfaatan energi terbarukan sebagai langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Di sisi lain, sektor pertanian juga perlu diarahkan pada praktik-praktik yang ramah lingkungan, sehingga produktivitas tetap terjaga tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap ekosistem.

Dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara efektif, Provinsi Lampung menetapkan beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon. Setiap sektor memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1. Sektor Kehutanan dan Lahan

Sektor ini menjadi salah satu sumber emisi terbesar, terutama akibat deforestasi dan degradasi lahan. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti **rehabilitasi hutan dan lahan kritis** menjadi sangat penting untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang rusak. Selain itu, **pencegahan kebakaran hutan dan lahan** terus diperkuat melalui sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal. **Perlindungan**

kawasan konservasi juga dijadikan prioritas agar keanekaragaman hayati tetap terjaga dan fungsi penyerap karbon dapat dipertahankan secara optimal.

2. Sektor Energi

Untuk mengurangi emisi dari konsumsi energi fosil, Provinsi Lampung mulai mengembangkan **energi terbarukan** seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dan bioenergi yang berbasis sumber daya lokal. Selain itu, upaya peningkatan **efisiensi energi** terus didorong, khususnya di sektor industri dan rumah tangga, melalui teknologi hemat energi dan kampanye kesadaran masyarakat.

3. Sektor Pertanian

Pertanian berkelanjutan menjadi kunci dalam menekan emisi dari kegiatan agrikultur. Praktik **pertanian rendah emisi (low emission agriculture)** diterapkan dengan memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. **Pemanfaatan pupuk organik** dan **pengelolaan limbah pertanian** juga terus didorong agar tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesuburan tanah dan kesejahteraan petani.

4. Sektor Limbah

Pengelolaan limbah menjadi isu penting dalam pengurangan emisi GRK, khususnya dari metana yang dihasilkan oleh sampah organik. Pendekatan **3R (reduce, reuse, recycle)** diimplementasikan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Selain itu, **peningkatan pengolahan limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)** dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan potensi bahaya bagi kesehatan masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan Provinsi Lampung adalah **penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK)**, yang menjadi dokumen acuan dalam menetapkan target, strategi, dan program penurunan emisi di tingkat provinsi. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam merancang intervensi sektoral yang tepat sasaran.

Selain itu, Lampung juga telah mengintegrasikan **indikator hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**. Hal ini memastikan bahwa aspek lingkungan dan pengendalian emisi menjadi bagian

dari kebijakan dan program pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam rangka memperkuat kapasitas pelaksanaan di lapangan, berbagai **pelatihan dan peningkatan kapasitas** telah diberikan kepada pemerintah daerah, dunia usaha, dan pelaku terkait lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam perencanaan dan implementasi kegiatan rendah karbon.

Provinsi Lampung juga menjalin **kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan**, seperti GIZ, UNDP, dan lembaga lainnya, dalam mengembangkan proyek-proyek hijau, berbagi pengetahuan, serta mendukung mobilisasi sumber daya teknis dan finansial. Untuk memperkuat pembangunan rendah karbon ke depan, Provinsi Lampung perlu mengarahkan kebijakan pada lima langkah strategis. Pertama, **meningkatkan investasi hijau** untuk mendukung proyek ramah lingkungan dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Kedua, **mengembangkan insentif bagi sektor swasta** agar lebih aktif dalam aksi iklim.

Ketiga, **memperkuat pengawasan tata guna lahan dan deforestasi** guna menjaga ekosistem dan mencegah emisi dari alih fungsi lahan. Keempat, **mendorong penggunaan energi bersih** di sektor transportasi dan industri untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Terakhir, **memperluas peran desa dalam aksi iklim** melalui program desa iklim dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kelima arah kebijakan ini menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2026

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 mencakup arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan pencapaian indikator makro pembangunan, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kewilayahan, dan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam program-program prioritas.

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera dalam RKP 2026

Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju **Indonesia Emas 2045**. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Tema dan sasaran pembangunan wilayah periode 2025-2029 disampaikan pada infografis di bawah ini.

Gambar 5. 1 Kontribusi PDRB per Wilayah

	2025	2029
Kontribusi PDRB KBI (%)	78,6	77,6
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	22,4

KBI: Kawasan Barat Indonesia | KTI: Kawasan Timur Indonesia

Gambar 5. 2 Tema Wilayah Tahun 2025-2029

Gambar 5.3 Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025	6,3 (Rata-rata 2025-2029)	22,1	85,0	4,48–4,73	7,49–8,49
2029	7,2 (2029)	22,5	124,4	3,82–4,42	4,24–5,24

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan *highlight* intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan wilayah tahun 2025-2029 per provinsi.

(1) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

(2) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris. Prioritas intervensi Kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Pusat mentargetkan sasaran makro pembangunan nasional tahun 2026 di Provinsi Lampung. Target sasaran Nasional di Provinsi Lampung, Prioritas Nasional dan *Highlight* Indikasi Intervensi di Provinsi Lampung ditunjukkan oleh Matrik dibawah ini.

Gambar 5. 3 Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung

Arah pembangunan kewilayahan sangat penting karena menjadi landasan bagi pembangunan yang adil, berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai wilayah. Pembangunan yang berarah ini memastikan bahwa setiap daerah dapat memanfaatkan potensi uniknya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Arah pembangunan kewilayahan yang jelas dan terukur sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan arah pembangunan kewilayahan yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pembiayaan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pembiayaan lainnya.

Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Provinsi Lampung yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Lampung pada RPJMN dibagi menjadi 5 (lima) kawasan, yaitu: Kawasan Pertumbuhan; Kawasan Komoditas Unggul; Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi; Kawasan Afirmasi serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5. 4 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang Tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029

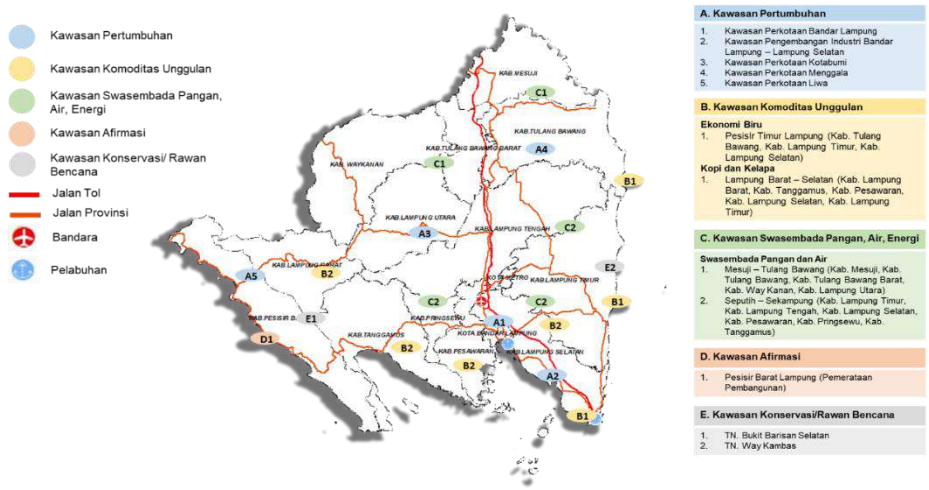

Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Dukungan program dan kegiatan pada Arah Pengembangan Kewilayahan RPJMN 2025-2029, tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 pada bab IV. Lokasi prioritas rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan highlight indikasi intervensi antara lain:

Tabel 5. 1 Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan Highlight Indikasi Intervensi

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
A. KAWASAN PERTUMBUHAN		
1 2	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan	a. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung antara lain melalui: • Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		b. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman)
		c. Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa dan

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		arang tempurung serta produk hilirisasi lanjutankelapa a.l. krimer nabati, santan instan dan karbon aktif
		d. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu a.l. raw sugar, GKP, molase, bagasse serta produk hilirisasi lanjutan tebu a.l. bioetanol, sirup glukosa dan bioplastik
		e. Pengembangan pelabuhan Panjang
		f. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (PHTC)
		g. Pengembangan SPAM Regional Pesawaran-Bandar Lampung-Lampung Selatan
		h. Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang
		i. Preservasi jalan ruas Bandar Lampung- Gedongtataan-Pringsewu-Kota Agung dan Bandar Lampung-Metro-Sukadana
		j. Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Interkoneksi Sumatera-Jawa (Jembatan Selat Sunda)
		k. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 Kv Kalianda-Merak (Interkoneksi 500 Kv Sumatera-Jawa)
		l. Pembangunan TPST Regional Bandar Lampung-Metro-Lampung Selatan
		m. Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bandar Lampung
		n. Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung
		o. Pembangunan Infrastruktur PLTP Rajabasa
		p. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Serta Kotabumi produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan indusri wilayah
3	Kawasan Perkotaan Kotabumi	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kotabumi, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan /pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		b. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)
		c. Pengembangan SPAM Perkotaan Kotabumi
		d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukit kemuning–Blambangan Umpu

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayor Jenderal HM Ryacudu Kotabumi (PHTC)
		f. Pengembangan kota agropolitan Kotabumi
4	Kawasan Perkotaan Menggala	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Menggala, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		b. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)
		c. Pengembangan SPAM Perkotaan Menggala
		d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Menggala– Wiralaga Mulya dan Menggala–Panaragan
		e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu- anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi danKab/Kota, khususnya pada RSUD Menggala Tulang Bawang (PHTC)
		f. Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala)
		g. Pengembangan kota agropolitan Menggala
5	Kawasan Perkotaan Liwa	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Liwa, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		b. Pengembangan SPAM Perkotaan Liwa
		c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Liwa–Bukit Kemuning dan Liwa–Krui
		d. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/ Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa (PHTC)
		e. Pengembangan kota agropolitan Liwa
		f. Pengembangan kota agropolitan Liwa
B. KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN		
1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab.Lampung Selatan)	a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai
		b. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan
		c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
		d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap
		e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat
		f. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
		g. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
		h. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
2	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa yaitu Lampung Barat - Selatan (Kab.Lampung Barat, Kab. Tanggamus. Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur)	a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, kelapa)
		b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa)
		c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa)
		d. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa)
		e. Pengembangan Produk Bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
		f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa
C. KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI		
1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji-Tulangbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Ata
		b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
		c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)
		d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan perternakan)

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
	Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara	e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
		f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
		g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu
		h. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub-DAS Way Umpu
		i. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
		j. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pascapanen
		k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		l. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
2	Kawasan Swasembada	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I.

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
	Pangan dan Air yaitu Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)	Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem
		b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
		c. Peningkatan luas lahan pertanian (Ekstensifikasi)
		d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)
		e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
		f. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
		g. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
		h. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas
		i. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara
		j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/ pakan organik
		k. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatanprasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasanakses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisidaberkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen
		l. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		m. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D. KAWASAN AFIRMASI		
1	Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan)	a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
		b. Peningkatan ketahanan bencana
		c. Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah
		d. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perkebunan (kopi) dan pariwisata bahari
		e. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
		f. Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat
		g. Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui
		h. Pengembangan SPAM Perkotaan Krui
		i. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan Krui (PHTC)
		j. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi & akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital
		k. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		l. Peningkatan tips RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Pesisir Barat
E. KAWASAN KONSERVASI DAN RAWAN BENCANA		
1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana yaitu: TN Bukit Barisan Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat) dan TN Way Kambas (Kab. Lampung Timur, Kab.	a. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistemdan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
		b. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
		c. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		d. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		e. Penguatan Hutan Lestari Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		f. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
		g. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
	Lampung Tengah)	h. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
2	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung (Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Lampung Barat)	a. Penerapan Nature Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandarlampung dan Pesisir Selatan Lampung (Megathrust Selat Sunda)
		b. Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
PROVINSI LAMPUNG		a. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
		b. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara Iain melalui: • Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah • Revitalisasi pendidikan nonformal • Penguatan pengetolaan dan ekselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkuaIitas
		c. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: • Penurunan kematian ibu dan anak • Pencegahan dan Penurunan stunting • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan Iansia serta KB dan kespro • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
		d. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara Iain melalui: • Penuntasan TBC • Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa • Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
		e. Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: • Penguatan kapasitas dan kemendirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	f. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara Iain melalui: • Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	g. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendal, antara lain melalui: • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan • Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi • Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik • Penerapan Intemet or things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time • Perluasan penggunaan kendaraan listrik
	h. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: • Perluasan infrastruktur digital • Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital • Pembangunan jaringan broodbond hingga ke pelosok
	i. Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: • Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital • Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN • Digitalisasi layanan publik prioritas • Pengembangan ekosistem layanan Publik digital
	j. Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, antara lain melalui: • Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) • Penanggulangan judi dan penyelundupan • Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2025-2029, 2025

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap wilayah memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda—baik dari segi sumber daya alam, letak geografis, budaya, maupun sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang selaras dengan potensi

tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Pada daerah dengan potensi pariwisata tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung wisata akan membuka akses, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, wilayah dengan potensi pertanian atau perikanan memerlukan infrastruktur irigasi, jalan produksi, dan sarana logistik yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah, mempercepatpemerataan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berbasis potensi akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilient, inklusif, dan mandiri. Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah tercantum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi dimana pembangunannya bersumber pada alokasi dana APBD Provinsi ataupun diusulkan melalui pembiayaan APBN. Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Lampung.

Tabel 5. 2 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi		
1	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	• Kawasan Pendidikan Terpadu Kota Metro • Kawasan Agropolitan Metro • WPPI Kawasan Industri Lampung Tengah • Terminal Tipe A Betan Subing Lampung Tengah • WPPI Lampung Timur • Jalan akses KSPN • Dukungan perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Perkeretaapian Pringsewu-Rejosari-Metro-Sukadana • Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya
2	Bandar Lampung – Pesawaran	• Rencana Jaringan KA Tanjung Karang –Pringsewu • Kawasan Industri Tegineneng • Kawasan Pangkalan Utama TNI AL Pesawaran • Terminal Barang Tegineneng • Pembangunan Jalur Lintas Kereta Api Tegineneng – Bandar Lampung - Tarahan
3	Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan	• Kawasan Waterfront City • Kawasan Pendidikan UNILA-ITERA-UIN RIL • Kawasan Industri Tegineneng

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		• Kawasan sekitar bandara Radin Inten II • Kawasan KotaBaru Jatiagung • Kawasan Industri Lampung • Pengembangan Jalan Tol Lematang –Padang Cermin – SP. Kota Agung • Pembangunan Stasiun Relung Helok, Karangsari, Sabah Balau, dan Stasiun Bandara
Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism		
1	Lampung Utara – Way Kanan	• Rencana pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; • Bendung Way Besai dan Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara • Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan Pengembangan Panas Bumi Way Umpu
2	Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji	• Kawasan industri Tulang Bawang • Kawasan industri Tulang Bawang Barat • Kawasan industri Mesuji • Dermaga Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat • Pelabuhan Pengumpan regional • Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; • Pelabuhan perikanan pantai Teladas di Kabupaten Tulang Bawang; • Pengembangan Dermaga Gunung Terang • Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Megow Pak yang melintasi sungai Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji
Koridor Ekonomi Wilayah III : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam		
1	Tanggamus	• Kawasan Industri Maritim • Kawasan geothermal ulu belu • Pelabuhan Perikanan • Sentra industri kelautan • Sentra industri pengolahan ikan • Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung • Pembangunan Dermaga di Pematang Sawa • Pembangunan Pelabuhan di Pekon Martanda dan Pekon Tampang Tua • Pengembangan Pelabuhan Laut Batu Balai, Kecamatan Kota Agung Timur
2	Pringsewu	• Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu dan Rejosari-Pringsewu • Bagian dari pengembangan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung – BTS. Bengkulu
3	Pesisir Barat	• Bandar Udara Muhamad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat • Sistem jaringan air bersih terdapat di Kabupaten Pesisir Barat.

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
		• Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Pisang • Pengembangan Kawasan Industri • Jalan Tol Bengkunat – Batas Provinsi Lampung – • Pembangunan Jalan Lingkar Exit Tol Wilayah Barat
4	Lampung Barat	• Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kabupaten Lampung Barat; • Rencana pelabuhan Heni Arong di Kabupaten Lampung Barat • Penyediaan Infrastruktur Hijau seperti Kebun Raya Liwa • Pengembangan Akses menuju Geopark • Revitalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Dermaga Lumbok, sebagai pelabuhan pengumpan pada perairan berdasarkan Potensi Wilayah Danau Ranau, yang melayani antar Provinsi dan Kabupaten maupun lokal • Penataan kawasan permukiman tradisional, guna meningkatkan nilai tambah KSPN Danau Ranau • Restorasi ekosistem taman TNBBS

5.3 Arah Kebijakan Indikator Makro Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pembangunan kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan dapat mendukung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja makro Provinsi Lampung yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

5.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah.

Tabel 5. 3 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi
Lampung Barat	28.86	4.36
Tanggamus	29.60	4.01
Lampung Selatan	50.46	4.62
Lampung Timur	46.28	4.62
Lampung Tengah	59.72	4.62
Lampung Utara	44.75	4.10
Way Kanan	35.58	4.65
Tulang Bawang	63.34	4.75
Pesawaran	40.90	3.90
Pringsewu	33.39	4.58
Mesuji	54.42	4.58
Tulang Bawang Barat	48.70	4.55
Pesisir Barat	33.78	2.61
Bandar Lampung	61.65	4.97
Metro	45.24	4.88
Provinsi Lampung	48.19	4.57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PE kabupaten/kota dan PDRB Per Kapita tahun 2024, maka capaian PE kabupaten/kota dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 5. 1 Analisis Kuadran Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024

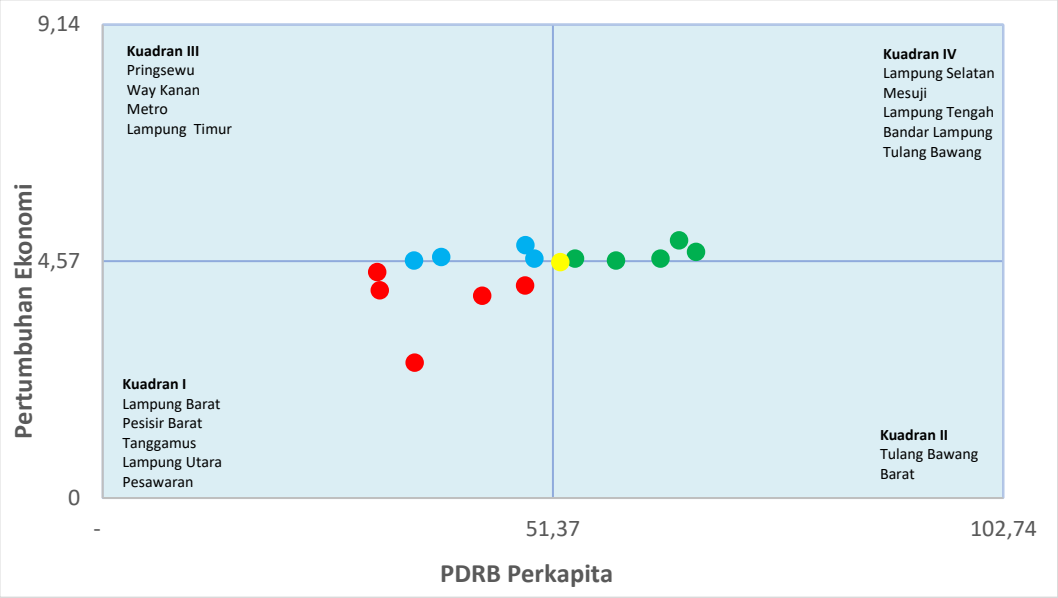

Tabel 5. 4 Analisis Kuadran PDRB per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
🔴	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Utara dan Pesawaran.
🟡	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH TINGGI dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten

		tersebut adalah Tulang Bawang Barat.
	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita LEBIH RENDAH dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih rendah dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Pringsewu, Way Kanan, Kota Metro dan Lampung Timur.
	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Lampung Selatan, Mesuji, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Tulang Bawang.

Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa struktur dan pola pertumbuhan ekonomi 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih menunjukkan adanya disparitas yang cukup tajam. Kelompok kabupaten/kota yang berwarna merah merupakan kelompok kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih rendah dari capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, prioritas intervensi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan perlu diarahkan ke kabupaten/kota tersebut, Intervensi kebijakan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Mengoptimalkan sektor unggulan agar dapat mendongkrak PDRB perkapita;
2. Mendorong investasi di sektor industri padat karya; dan
3. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2024 pada hakekatnya merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Lampung menggambarkan pula percepatan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Lampung, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Lampung.

Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita pada Tahun 2024 melebihi capaian Provinsi Lampung, yaitu: Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang. Namun demikian, masih terdapat 5 (lima) kabupaten yang capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita masih dibawah capaian Provinsi Lampung, yaitu: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Lampung, telah direncanakan program-program Pembangunan berbasis kewilayahan guna pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, infrastruktur dasar dan jaringan transportasi. Ke depan diharapkan, program-program tersebut dapat menjadi pengungkit pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru. Program-program tersebut meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Kota Baru dan sekitarnya.
2. Pengembangan Kawasan Industri Katibung dan KAIL.
3. Pengembangan Pelabuhan Sebalang di Lampung Selatan.
4. Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC) di Lampung Selatan.
5. Pengembangan Pelabuhan Panjang dan Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Lematang.
6. Pengembangan Kawasan Pariwisata Teluk Lampung.
7. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Lampung.
8. Pengembangan Jalur Kereta Api Tarahan–Bakauheni dan jalur logistik Tegineneng-Tarahan.
9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri.
10. Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto di Way Kanan.
11. Pembangunan/peningkatan Sarana dan Prasarana Bandar Udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat (Bandara Taufik Kiemas).

12. Pengembangan Jalur KA Tarahan – Bakauheni dan jalur logistik Tegineneng – Tarahan.
13. Revitalisasi Tambak Perikanan dan Udang di Kawasan Pantai Timur Lampung.
14. Pembangunan dan Pengembangan Terminal type B Lampung.
15. Pengembangan Pemanfaatan Bendungan Way Sekampung.

Gambar 5. 5 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026

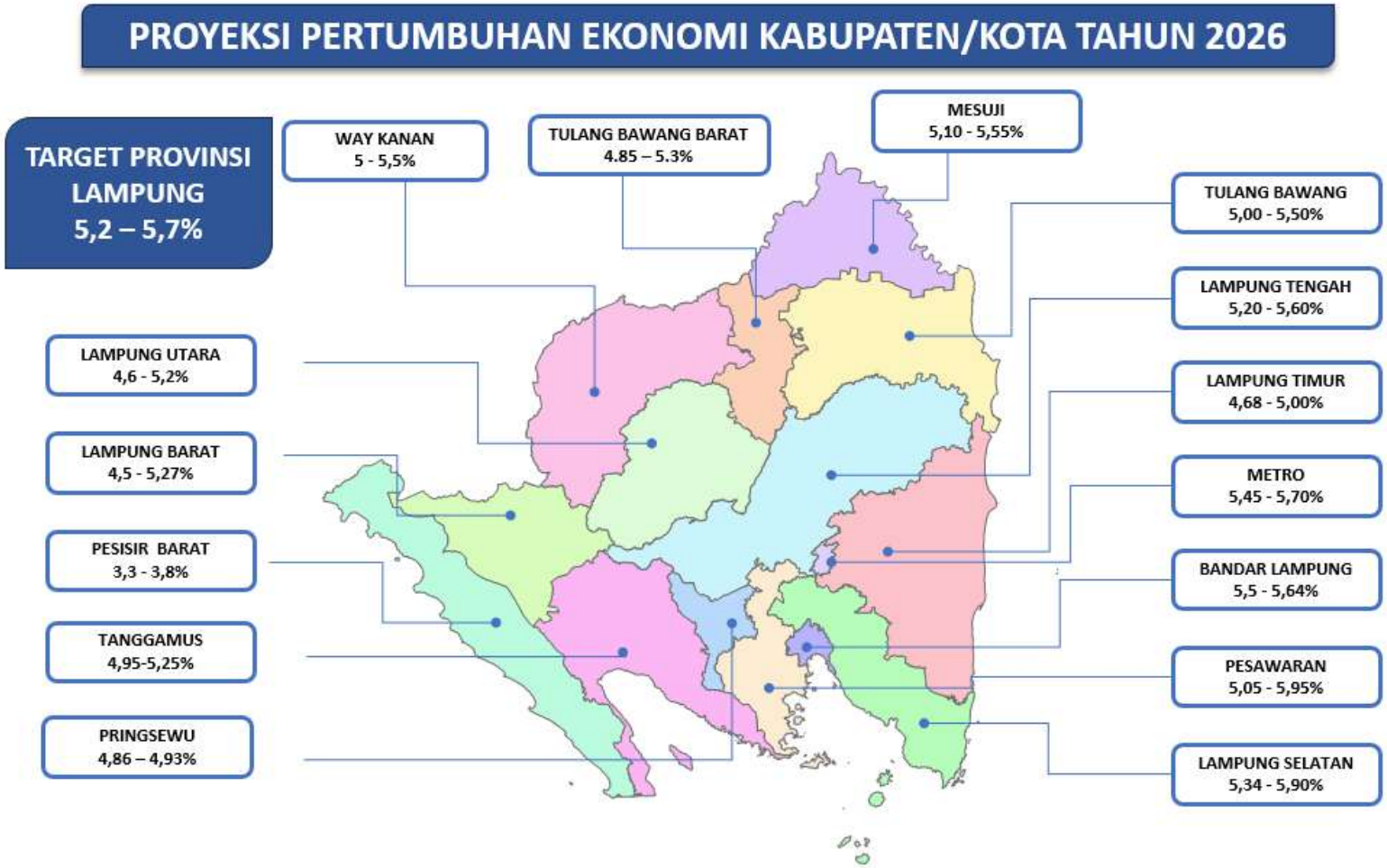

Gambar 5. 6 Penetapan Target PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2026

5.3.2 Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang berkualitas akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Gambaran capaian dan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Capaian dan Laju Pertumbuhan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tahun		Laju Pertumbuhan
	2023	2024	
Lampung Barat	71,72	72,41	0,96
Tanggamus	69,93	70,54	0,87
Lampung Selatan	71,55	72,15	0,84
Lampung Timur	72,44	73,05	0,84
Lampung Tengah	73,39	74,16	1,05
Lampung Utara	70,78	71,42	0,90
Way Kanan	70,51	71,17	0,94
Tulang Bawang	71,56	72,24	0,95
Pesawaran	69,46	70,24	1,12
Pringsewu	73,11	73,84	1,00
Mesuji	67,79	68,59	1,18
Tulang Bawang Barat	69,38	70,04	0,95
Pesisir Barat	70,40	71,04	0,91
Kota Bandar Lampung	79,86	80,46	0,75
Kota Metro	79,85	80,41	2,52
Provinsi Lampung	72,48	73,13	2,03

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi, Capaian IPM kabupaten/kota berkisar

antara 68,59 (Kabupaten Mesuji) hingga 80,46 (Kota Bandar Lampung). Hal ini menunjukan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 2 (dua) kota dengan status "Sangat Tinggi" (capaian IPM ≥ 80), yaitu Kota Bandar Lampung (80,46) dan Kota Metro (80,41), 12 kabupaten dengan status "Tinggi" (capaian 70 ≤ IPM < 80. Sedangkan 1 (satu) kabupaten lainnya berstatus "Sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70) yaitu Kabupaten mesuji (68,59), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus "Rendah" (IPM < 60),

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten dan kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Grafik 5.2 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024

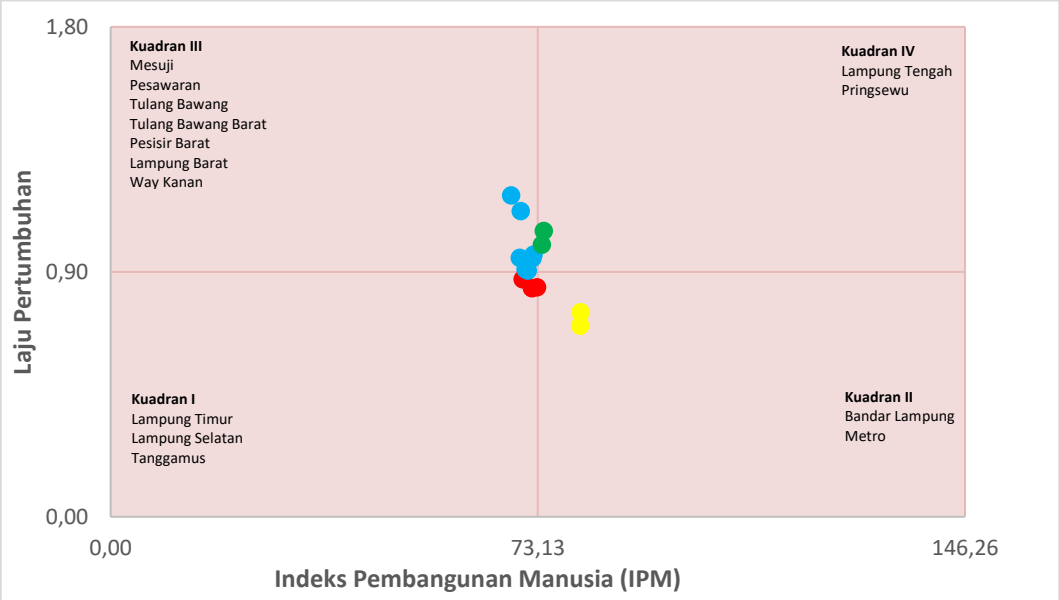

Tabel 5. 6 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
●	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus.
	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kota tersebut adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.
	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan.
	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM lebih tinggi dan Laju Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	TINGGI dibanding capaian provinsi	adalah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui peningkatan akses Pendidikan dan pelayanan Kesehatan serta pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antarwilayah kabupaten/kota, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah,

Gambar 5. 7 Penetapan Target IPM Kabupaten/Kota Tahun 2026

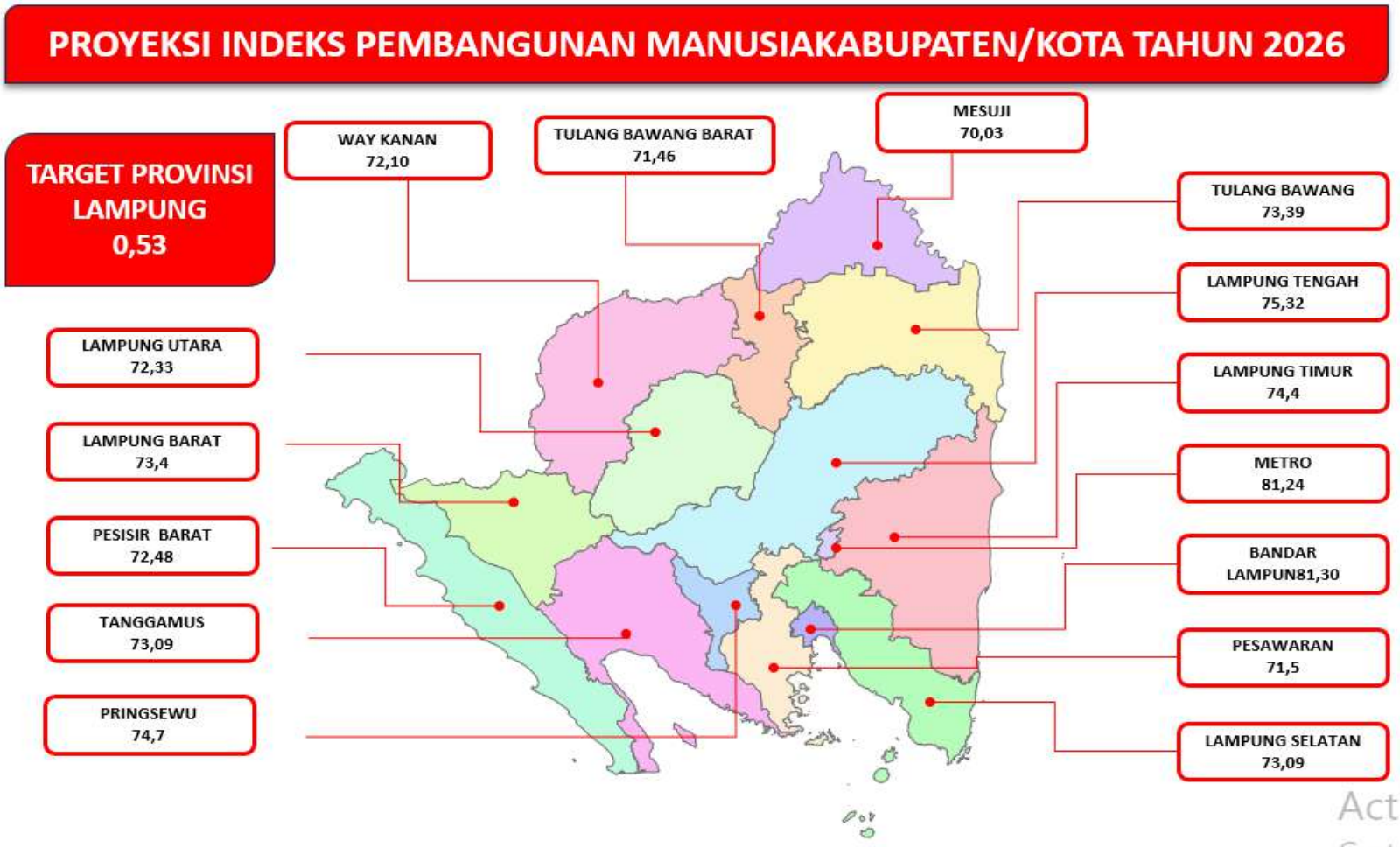

Activ
Go to

5.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja, Persentase TPT di suatu wilayah menunjukkan kemampuan ekonomi wilayah tersebut untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, Dalam hal ini, aspek yang diukur yaitu persentase TPT dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, dinilai terhadap capaian Provinsi Lampung, Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan dengan PE tahun 2024, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini,

Tabel 5. 7 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Lampung Barat	2,09	4,36
Tanggamus	3,19	4,01
Lampung Selatan	4,84	4,62
Lampung Timur	3,02	4,62
Lampung Tengah	3,33	4,62
Lampung Utara	5,85	4,10
Way Kanan	3,27	4,65
Tulang Bawang	3,23	4,75
Pesawaran	4,36	3,90
Pringsewu	4,39	4,58
Mesuji	2,85	4,58
Tulang Bawang Barat	4,12	4,55
Pesisir Barat	3,04	2,61
Bandar Lampung	7,44	4,97
Metro	3,71	4,88
Provinsi Lampung	4,19	4,57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 5. 3 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

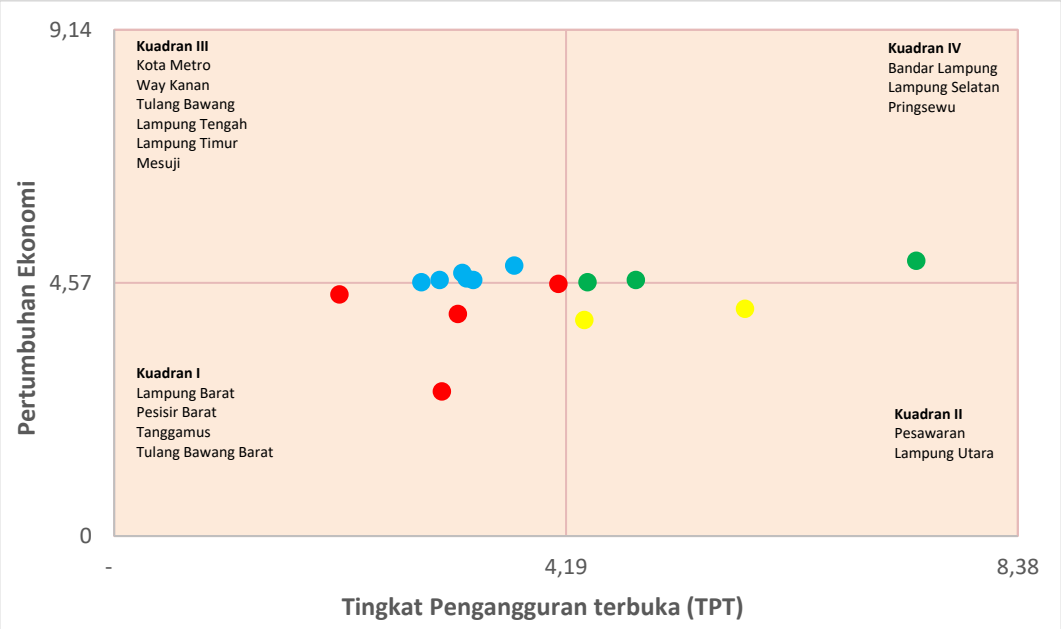

Tabel 5. 8 Analisis Kuadran Capaian Persentase TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
🔴	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan PE TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
🟡	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan PE LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan PE lebih rendah dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
		Pesawaran dan Kabupaten Lampung Utara.
	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji.
	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan dan PE LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dan PE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran bersifat negatif, dalam arti pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penurunan jumlah pengangguran, Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan warna merah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu menciptakan lapangan kerja yang luas sehingga belum berdampak pada penurunan jumlah pengangguran secara signifikan, Dampak dari pengangguran yang tinggi berimbas pada penurunan

tingkat perekonomian, Oleh karena itu, prioritas intervensi kebijakan dapat diarahkan pada kelompok kabupaten/kota tersebut,

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota, Angka TPT kabupaten/kota berkisar antara 2,09 persen (Kabupaten Lampung Barat) hingga 7,44 persen (Kota Bandar Lampung), Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan tingkat penyerapan angkatan kerja antara kabupaten/kota satu dengan lainnya,

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada,

Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja, Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Lampung sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi,

Berdasarkan hasil capaian TPT tahun 2024 dan berbagai pembentuk lainnya, ditargetkan angka TPT Provinsi Lampung sebesar 3,51-4,05 persen pada tahun 2026, Sementara di tingkat kabupaten/kota, ditargetkan TPT kabupaten/kota pada tahun 2026 berkisar antara 1,54 persen (Kabupaten Lampung Barat) hingga 7 persen (Kota Bandar Lampung), Secara rinci, target capaian TPT kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2026 dapat disimak pada gambar di bawah ini,

Gambar 5. 8 Target Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Tahun 2026

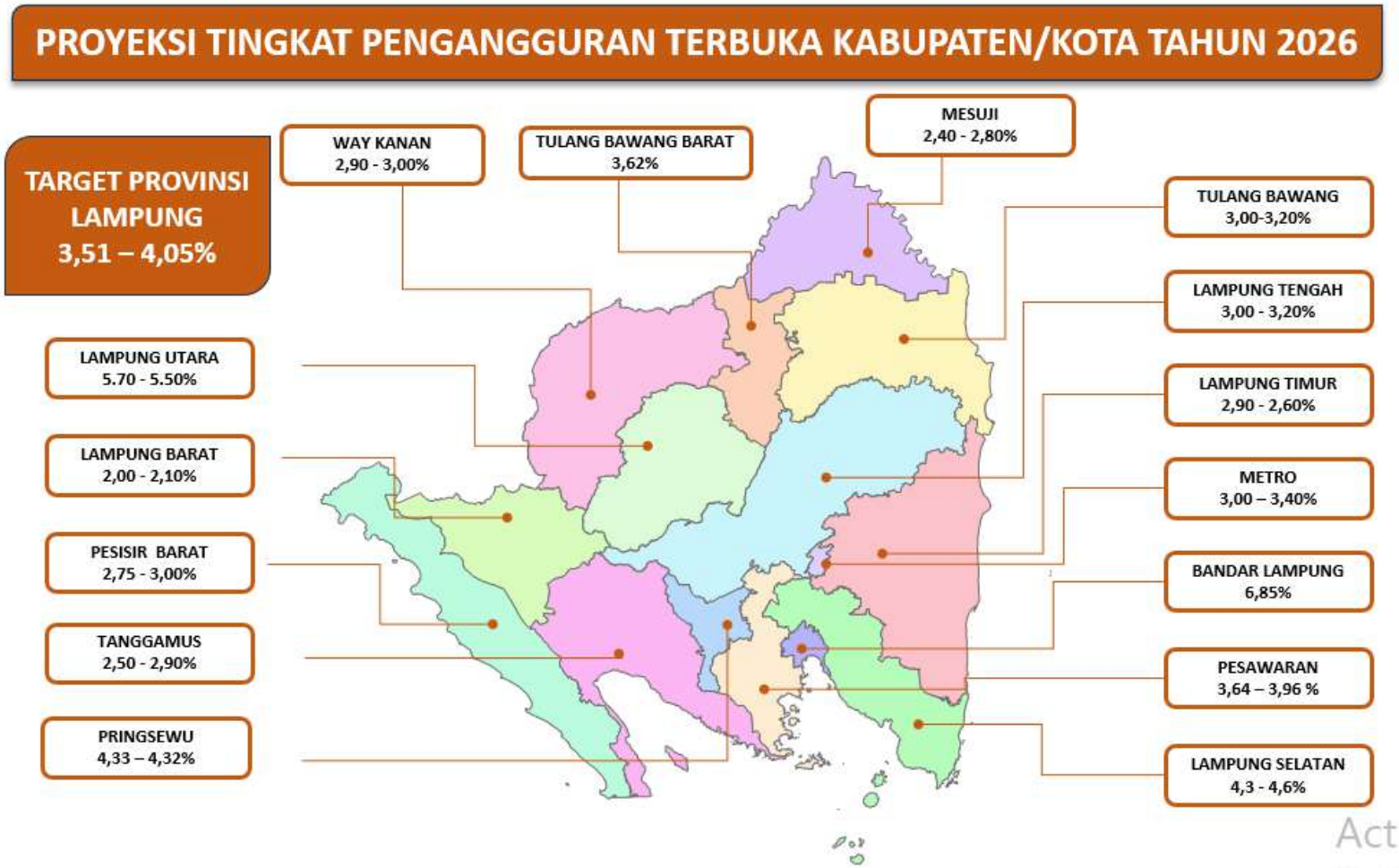

Activate Win
Go to Settings to

5.3.4 Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai kelompok masyakarat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, aspek yang diukur yaitu persentase penduduk miskin dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, dinilai terhadap capaian Provinsi Lampung, Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 9 Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Lampung Barat	10,68	4,36
Tanggamus	10,28	4,01
Lampung Selatan	12,57	4,62
Lampung Timur	13,19	4,62
Lampung Tengah	10,37	4,62
Lampung Utara	16,92	4,10
Way Kanan	10,43	4,65
Tulang Bawang	7,88	4,75
Pesawaran	11,86	3,90
Pringsewu	8,32	4,58
Mesuji	6,31	4,58
Tulang Bawang Barat	7,22	4,55
Pesisir Barat	12,64	2,61
Bandar Lampung	7,37	4,97
Metro	6,78	4,88
Provinsi Lampung	10,69	4,57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 5. 4 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

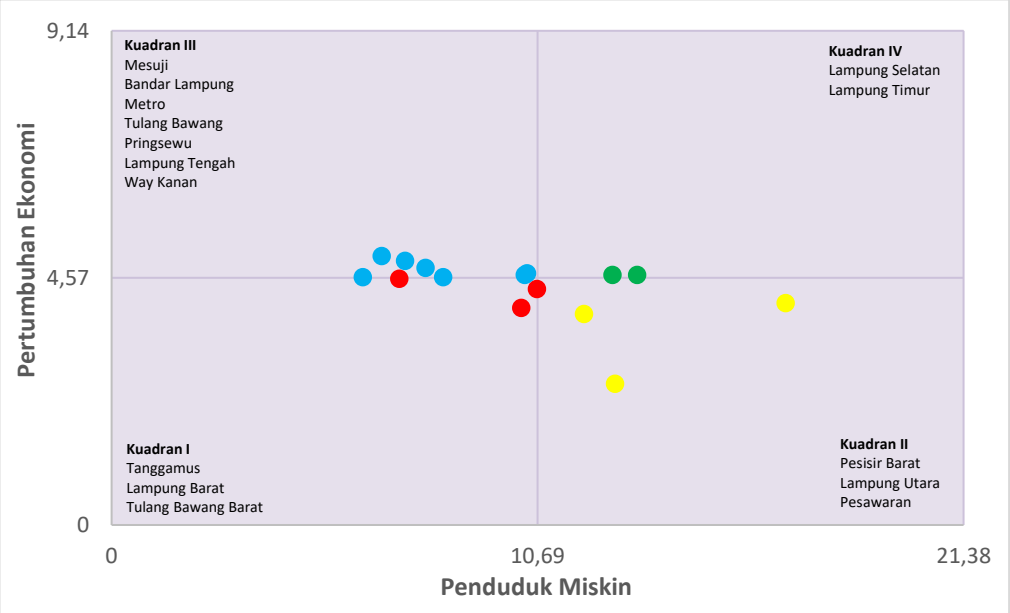

Tabel 5. 10 Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
🔴	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
🟡	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan	Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.
	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH RENDAH dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mesuji, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Way Kanan.
	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren terus menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dan pertumbuhan

ekonomi yang lebih rendah dibanding provinsi terutama di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian indikator pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin tahun 2024, terdapat 3 (tiga) kelompok kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada provinsi dan persentase penduduk miskin lebih tinggi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan diprioritaskan pada kelompok kabupaten/kota yang berwarna kuning. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong peningkatan investasi sehingga dapat menurunkan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Investasi tidak hanya di sektor swasta tetapi juga investasi publik atau pemerintah.

Untuk itu Provinsi Lampung fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2024 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024.

Gambar 5. 9 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2026

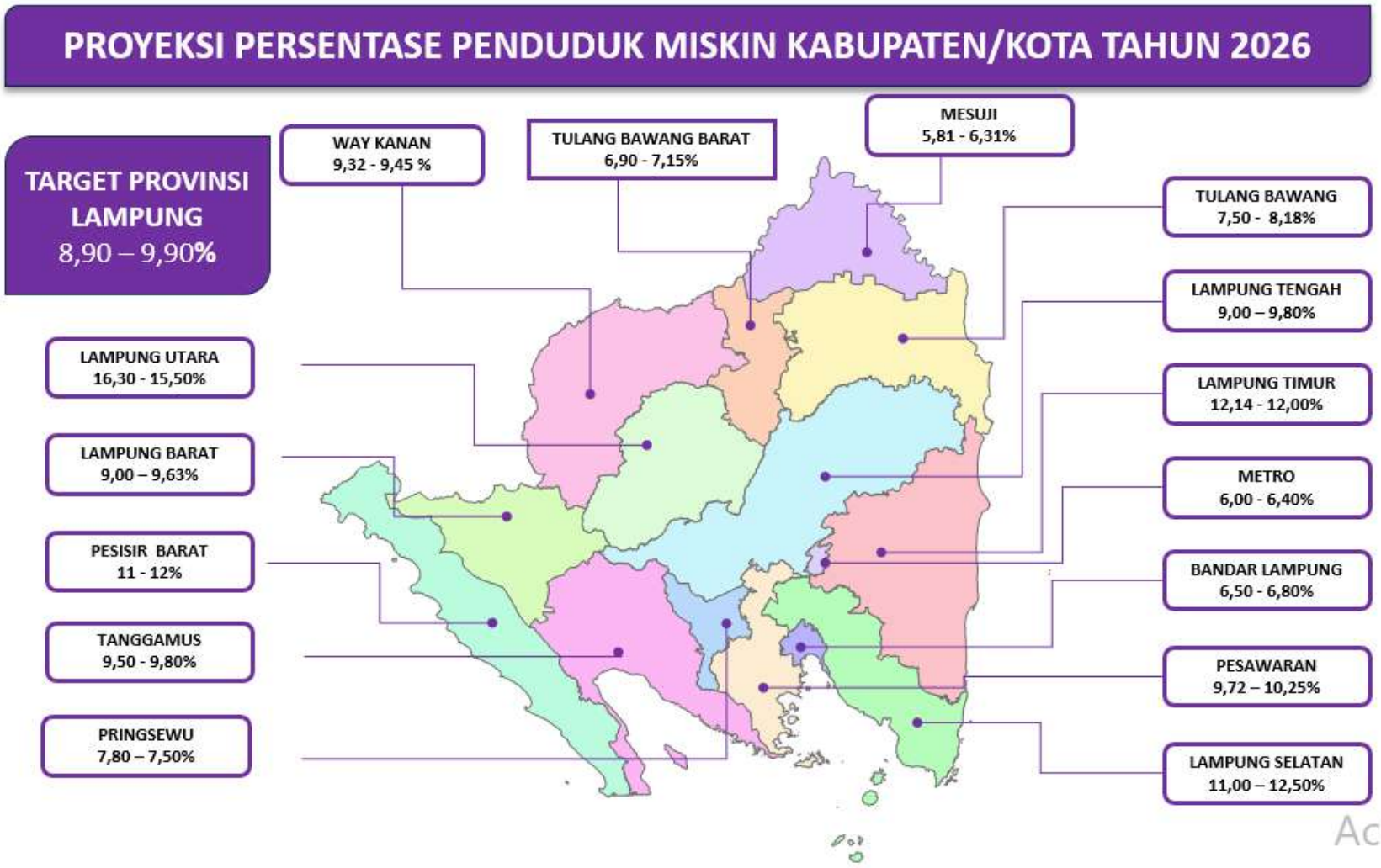

5.3.5 Ketimpangan Wilayah (Rasio Gini)

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan salah satu alat ukur tingkat ketimpangan pendapatan antar individu di satu wilayah yang mencerminkan sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi *Gini Ratio* di suatu wilayah, berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, aspek yang diukur yaitu nilai *Gini Ratio* serta tingkat pertumbuhan ekonomi, dinilai terhadap capaian Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian *Gini Ratio* kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024, maka kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 11 Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	*Gini Ratio*	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Lampung Barat	0,274	4,36
Tanggamus	0,256	4,01
Lampung Selatan	0,257	4,62
Lampung Timur	0,315	4,62
Lampung Tengah	0,285	4,62
Lampung Utara	0,300	4,10
Way Kanan	0,281	4,65
Tulang Bawang	0,284	4,75
Pesawaran	0,287	3,90
Pringsewu	0,306	4,58
Mesuji	0,285	4,58
Tulang Bawang Barat	0,274	4,55
Pesisir Barat	0,315	2,61
Bandar Lampung	0,289	4,97
Metro	0,381	4,88
Provinsi Lampung	0,324	4,57

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 5. 5 Analisis Kuadran Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

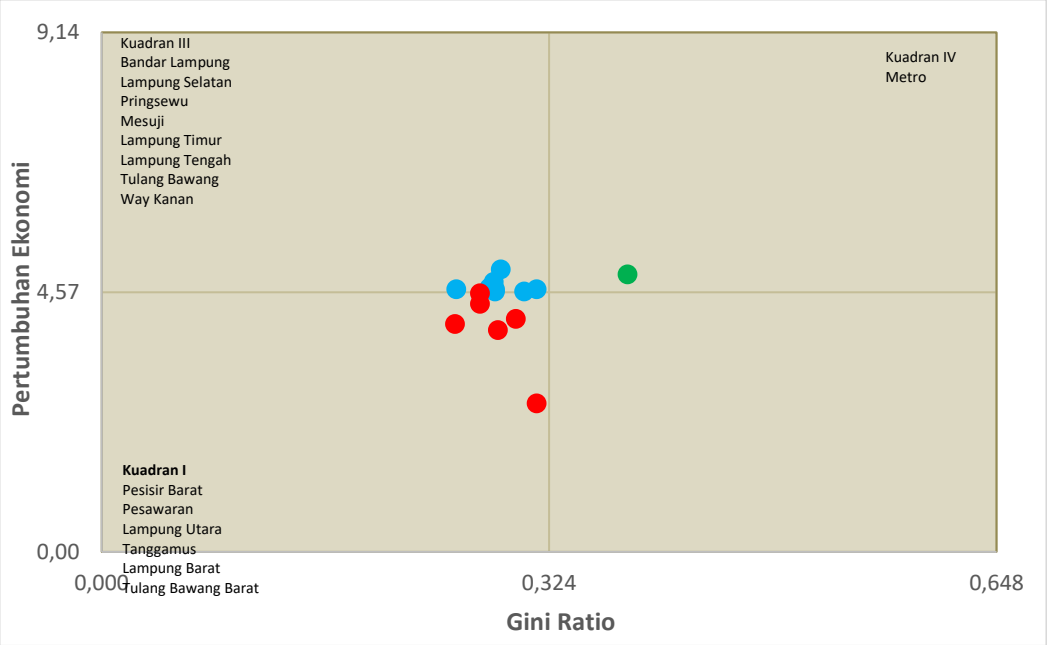

Tabel 5. 12 Analisis Kuadran Capaian *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
●	Kuadran I : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian *Gini Ratio* dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian *Gini Ratio* dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Simbol	Interpretasi	Penjelasan
	Kuadran II : Kelompok kabupaten/kota dengan dengan capaian *Gini Ratio* LEBIH TINGGI dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian *Gini Ratio* lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih rendah dibanding capaian provinsi.
	Kuadran III : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian *Gini Ratio* LEBIH RENDAH dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten dengan capaian *Gini Ratio* lebih rendah dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan.
	Kuadran IV : Kelompok kabupaten/kota dengan capaian *Gini Ratio* LEBIH TINGGI dan dan Pertumbuhan Ekonomi LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi	Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian *Gini Ratio* lebih tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Metro.

Gambar 5. 10 Penetapan Target *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Tahun 2026

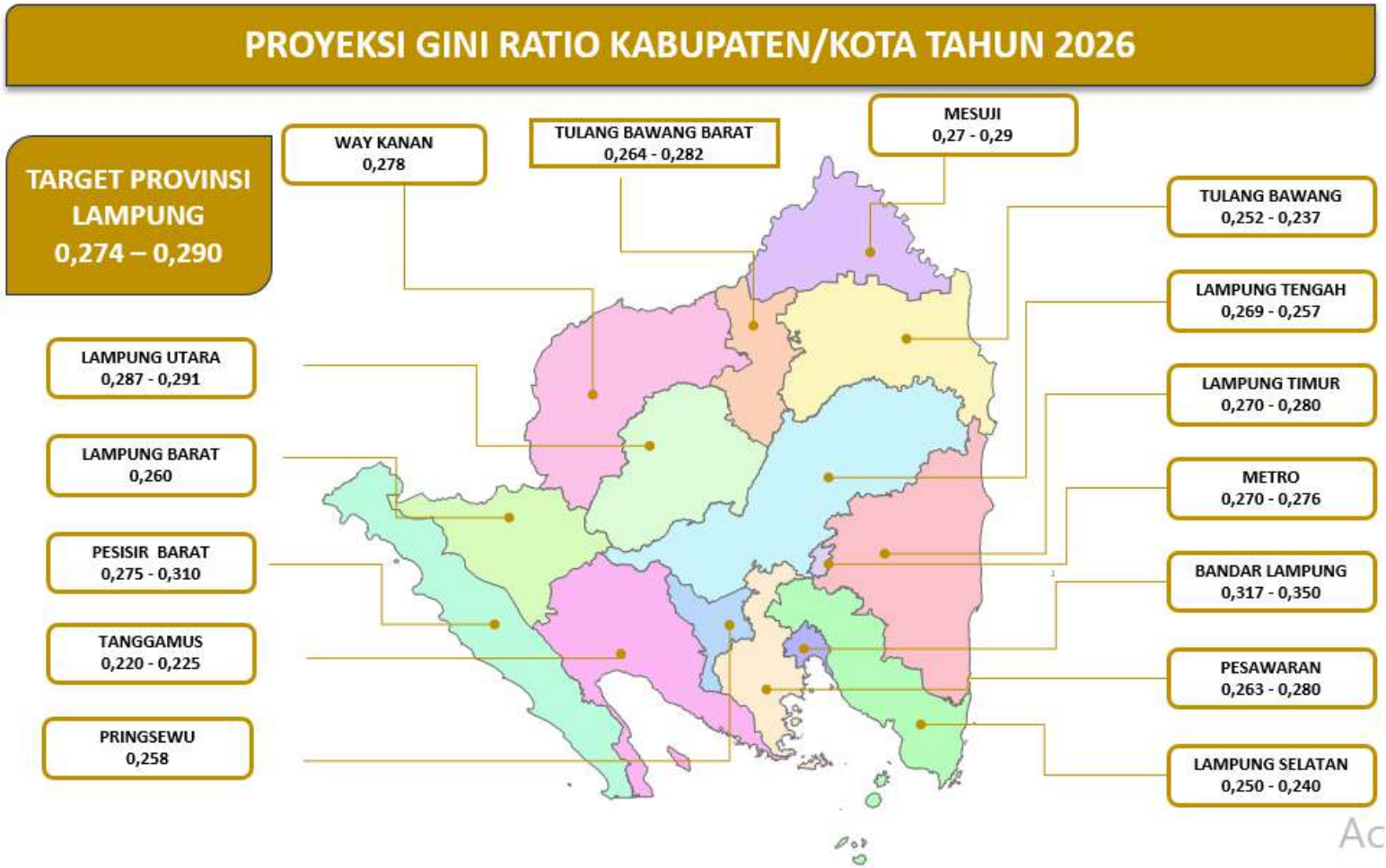

Activate Win
Go to Settings to

5.4 Sinergi Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan di Provinsi Lampung, terus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar subsektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud yaitu adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan dalam memperdayakan kelompok masyarakat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memperdayakan kualitas kehidupan berkelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam aspek pendidikan, daya beli dan kesehatan. Upaya untuk membangun sinergitas ini, berdasarkan kepada 2 (dua) pendekatan yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal yaitu adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal yaitu adanya keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Tahun 2026 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung pada RPD periode Tahun 2025-2026, Berikut tabel Sinergi Pembangunan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan.

Tabel 5. 13 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pendidikan

No.	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
1.	Outcome: Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,63%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	70,92%	
		3	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	70,12 Nilai	
		4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	62,03 Nilai	
		5	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	67,13 Nilai	
		6	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	60,60 Nilai	

No.	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
		7	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	69,67 Nilai	
		8	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	80,07 Nilai	
		9	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-	75,84 Nilai	
		10	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	64,62 Nilai	
		11	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		71,67 Nilai	
		12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	-	71,25 Nilai	
		13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	89,91%	
		14	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	-	84,93%	
		15	Iklim keamanan SMA	-	81,54 Nilai	

No.	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
		16	Iklim keamanan SMK	-	69,59 Nilai	
		17	Iklim keamanan SDLB	-	76,43 Nilai	
		18	Iklim keamanan SMPLB	-	74,63 Nilai	
		19	Iklim keamanan SMALB	-	73,67 Nilai	
		20	Iklim kebinekaan SMA	-	72,75 Nilai	
		21	Iklim kebinekaan SMK	-	71,01 Nilai	
		22	Iklim kebinekaan SDLB	-	71,64 Nilai	
		23	Iklim kebinekaan SMPLB	-	73,98 Nilai	
		24	Iklim kebinekaan SMALB	-	74,47 Nilai	
		25	Iklim Inklusivitas SMA	-	61,16 Nilai	
		26	Iklim Inklusivitas SMK	-	60,01 Nilai	
		27	Iklim Inklusivitas SDLB	-	68,60 Nilai	
		28	Iklim Inklusivitas SMPLB	-	71,72 Nilai	
		29	Iklim Inklusivitas SMALB	-	72,60 Nilai	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

2. Kesehatan

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan Kesehatan, Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju

cakupan kesehatan semesta, Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Tabel 5. 14 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kesehatan

No,	Asta Cita/Outcome		Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
1,	Outcome: Kesehatan Untuk Semua	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	109 per 100.000 kelahiran hidup	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	-	98,9%	
		3	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	0 kab/kota	
		4	Angka Kematian Balita	Angka Kematian Balita	13,80 Per 100.000 Kelahiran Hidup	
		5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	12,80%	
		6	Presentase lanjut usia yang mandiri	-	87 %	
		7	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	-	0,5 %	
		8	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	-	12%	
		9	Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	5%	

No,	Asta Cita/Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
		10	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	85%	
		11	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	76%	
		12	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	50%	
		13	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	-	23,4%	
		14	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	15 kab/kota	
		15	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	40%	
		16	Insidensi Tuberkulosis	Insidensi Tuberkulosis	26.853 kasus	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu urusan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat, Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan strategi dan kebijakan yang dilakukan, Berikut tabel sinergi pembangunan kabupaten/kota untuk urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel 5. 15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No,	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri						
1.	Outcome: Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1	Rumah tangga dengan akses air minum aman	-	10,20%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	19.925 Ha	
2	Outcome: Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	3	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Kasus	
		4	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	1 Provinsi	
		5	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	2 Materi Teknis	
		6	Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	2 Perda/Perkada	
		7	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	1 Materi Teknis	
		8	Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	2 Perda/Perkada	
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
3	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	9	Rumah tangga dengan akses air minum aman	-	10,20 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		10	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	19.925 Ha	
4	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	11	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 kasus	

No,	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
		12	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	1 provinsi	
		13	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	2 Materi Teknis	
		14	Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	2 Perda/Perkada	
		15	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	1 Materi Teknis	
		16	Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	2 Perda/Perkada	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk kabupaten/kota dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 16 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No.	Asta Cita/Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan						
1.	Outcome: Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	63,81 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada; Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat; Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat; dan Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 17 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)						
1	Outcome: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	100	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	100	
		3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	100	
Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
2	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	4	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	100	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		5	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	100	
		6	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan	100	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Kebakaran	Kebakaran		

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

6. Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Lampung yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang sosial dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 18 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Sosial

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan						
1	Outcome: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	-	Keluarga	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	-	100 Orang	
		3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	-	60 Lembaga	
		4	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		5	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar	100%	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
			yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		7	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		8	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		9	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas						
2	Outcome: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	10	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	-	Keluarga	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		11	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	-	100 Orang	
		12	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	-	60 Lembaga	
		13	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100%	
		14	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar	100%	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
			yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		15	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		16	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		17	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		18	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan, Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal, Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan, Peningkatan Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas diperlukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 19 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Tenaga Kerja

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan						
1	Outcome: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	6.250 Orang	
		3	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	1.600 Orang	
		4	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	1 Dokumen	
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas						
2	Outcome: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		6	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	6.250 Orang	
		7	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	1.600 Orang	
		8	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	1 Dokumen	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu berkualitas dan berdaya saing. Dalam mendukung peningkatan SDM

yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui kegiatan prioritas diantaranya pemenuhan hak dan perlindungan anak, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kualitas pemuda. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 20 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
1	Outcome: Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,42 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Persentase ARG Daerah	Persentase ARG Daerah	3,4 %	
		3	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	901 Nilai	
		4	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	100%	
		5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,94 Indeks	
		6	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	
		7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	
		8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,8%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

3. Urusan Pangan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pangan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 21 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
1	Outcome: Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	95 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	40%	
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	92,8 Nilai	
		Persentase daerah rentan rawan pangan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	11%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

4. Urusan Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi melalui indikator Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi dan Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria sehingga Tujuan Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat

secara menyeluruh dapat terwujud. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanahan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 22 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pertanahan

No	Kinerja	Indikator			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi						
1	Outcome: Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	1	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	500 Bidang Tanah	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	1000 Kepala Keluarga	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*) serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 23 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,20 Poin	Target Provinsi dan Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	30,45%	
		3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan pengumpulan sampah	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan pengumpulan Sampah	29,70%	
Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
2	Outcome: Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,20 Poin	
		2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	30,45%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di tahun 2026 diharapkan terdapat peningkatan kualitas layanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.						
1	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan	1	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang	99%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil

No	Kinerja	Indikator			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
	kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital		memiliki akta kelahiran	memiliki akta kelahiran		Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	70 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	15 Desa	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	425 Orang	
		Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	0 Desa	
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	2,337 Desa	
		Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan	1,000 Lembaga	

No.	Kinerja	Indikator		Target 2025	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
		Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif		
2,	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	1,51 %	
3,	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	10 %	
4,	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	Persentase BUM Desa Maju	6 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Provinsi Lampung termasuk provinsi yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukkan dari tren laju pertumbuhan penduduk yang berangsur menurun dari tahun ke tahun. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
1	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,71 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	19 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
		3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,11 Rata-rata Anak per Wanita	
		4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	85,3%	
		5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	65 Indeks	
		6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	10,9%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

9. Urusan Perhubungan

Sektor Perhubungan adalah salah satu sektor yang penting dan menentukan dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan, Efisiensi transportasi manusia dan barang akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian suatu daerah. Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kinerja pelayanan perhubungan. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang perhubungan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perhubungan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
1	Outcome: Terwujudnya Peningkatan	1	Rasio Konektivitas Simpul	Rasio Konektivitas Simpul	0,35 Rasio	Daerah menyesuaikan besaran target

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
	Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi		Transportasi Provinsi	Transportasi Provinsi		dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	27,73%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari semakin membaiknya indeks SPBE Provinsi Lampung. Beberapa arah sinergi pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 27 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, danpenyeludupan.						
1	Outcome: Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	1	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	2 level	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2 level	
		3	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	4 level	
		4	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	20%	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
		5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75 Nilai	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai salah satu urusan bidang yang paling tinggi menyerap angkatan kerja serta menjadi ujung tombak perekonomian apalagi pasca pandemi di Provinsi Lampung, tentunya indikator-indikator yang tersaji harus dapat memenuhi target. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kinerja	Indikator			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
1	Outcome: Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,12 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Update dan pengumpulan Data UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM	5%	
		3	Proporsi Jumlah UKM	Proporsi Jumlah UKM	2,70%	
		4	Rasio Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan	2,93%	
		5	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	6,90%	
		6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	2%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

12. Urusan Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang penanaman modal dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 29 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri						
1	Outcome: Pencapaian Target Realisasi Penanaman Modal	1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp 10,2 T	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kepemudaan dan olahraga dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas						
1	Outcome: Meningkatnya Kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	1	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	-	71,38%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3	-	8,78%	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
		Provinsi		Kab/Kota		
			bulan terakhir			
		3	Indeks Pembangunan Pemuda	-	53,68 Nilai	
		4	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	-	23,79%	
		5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	-	39,41%	
		6	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	-	12 Kegiatan	
		7	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	-	99%	
		8	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	-	79%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

14. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang statistik dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Statistik

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan						
1	Outcome: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,9 Poin	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

15. Urusan Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planni*ng), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang persandian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Persandian

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru **2. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
1	Outcome: Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	40 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Lampung yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kebudayaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kebudayaan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
1	Outcome: Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	81,09%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	8,50 %	
		3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni	2,64%	
		4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat dalam setahun terakhir	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat dalam setahun terakhir	17,05%	
		5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya	28,97%	

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
			Tak Benda yang dilestarikan	Tak Benda yang dilestarikan		
		6	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	41,59%	
		7	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	0,45%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

17. Urusan Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang perpustakaan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
1	Outcome: Meningkatnya Kegemaran Membaca dan	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70 Indeks	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil

	Literasi Masyarakat	2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72 Nilai	Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

18. Urusan Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Lampung, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kearsipan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kearsipan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						
1	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	67 Nilai	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi prioritas dan focus perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Lampung. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi,

serta kehutanan. Untuk mendukung peningkatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing serta pengawasan perikanan yang integrative maka dibutuhkan beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 36 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	1	Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	39,27 Kg/KAP/TH	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Produksi Garam	Produksi Garam	110 Ton	
		3	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	166.068 Ton	
		4	Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	198.982 Ton	
		5	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	83%	
		6	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Kawasan konservasi daerah yang operasional	152.096 Ha	
		7	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	1 Dokumen	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata telah lama menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Indonesia. Pembangunan pariwisata haruslah berbasis pemberdayaan masyarakat yang utuh dan berkelanjutan. Pengembangan

potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang baik dapat mendorong akselerasi pemasaran pariwisata Indonesia. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pariwisata

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi						
1	Outcome: Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	1	Jumlah devisa sektor pariwisata	-	Rp 11.615.250.000	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	-	20.500.000 Perjalanan	
		3	Rasio PDB Pariwisata	-	1,65%	
		4	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	-	590.000 Orang	
		5	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	-	580.000 Orang	
		6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	-	7,4%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang pertanian dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 38 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Meningkatnya Produksi Pertanian	1	Jumlah Produksi Jagung	Jumlah Produksi Jagung	2.887.502 Ton	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	2.875.716 Ton	
		3	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	39.337 Ton	
		4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	1.678 Ton	
		5	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	85.143 Ton	
		6	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	47.722 Ton	
		7	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	156.866.08 Ton	
		8	Jumlah Produksi Telur	Jumlah Produksi Telur	256.456.47 Ton	
		9	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	312.872 Ha	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

4. Urusan Kehutanan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.

Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang kehutanan dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 39 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kehutanan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta cita: Memantapkan sistem pertahanankeamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
1	Outcome: Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	1	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	6.500 Ha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp 339.000.000.000	
		3	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	50 Ha	
		4	Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan	Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan	0,01%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Beberapa arahan sinergi pembangunan dalam bidang energi dan sumber daya mineral dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. 40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta cita: Memantapkan sistem pertahanankeamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					

1	Outcome: Pencapaian Ketahanan Energi	1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	36,6 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Konsumsi Listrik per Kapita	Konsumsi Listrik per Kapita	685 Kwh/Kapita	
		3	Intensitas Energi Primer	Intensitas Energi Primer	145,4 (SBM/Rp Milyar)	
		4	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,90%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

6. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan ekspor. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari meningkatnya kinerja ekspor bernilai tambah tinggi, meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah serta terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perdagangan

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri						
1	Outcome: Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik danGlobal	1	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	-	6,2 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Pertumbuhan Total Perdagangan Dengan Provinsi Lainnya	-	5 %	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

7. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Lampung. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya

yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Beberapa arahan pembangunan dalam Bidang Perdagangan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 42 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perindustrian

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri						
1	Outcome: Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp, Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp, Triliun)	Rp, 5,7	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	71%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

8. Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang Transmigrasi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 43 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Transmigrasi

No	Ast cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan					
1,	Outcome: Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah	5%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

No	Ast cita/ Outcome	Indikator Outcome		Target 2026	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
	pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi		serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

9. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Badan Kesbangpol. Secara uraian tugas, berfungsi membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Beberapa arahan pembangunan dalam bidang kesbangpol dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 44 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kesbangpol

No	Asta Cita/ Outcome	Indikator Outcome			Target 2026	Keterangan
			Provinsi	Kab/Kota		
Asta Cita: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 3. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
1	Outcome: Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	82,12 %	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2025 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		2	Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Ormas	68 Nilai	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Tahun 2025

5.5 Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen perencanaan daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan hubungan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana, selain mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan juga memberikan penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan, sebagai berikut :

Gambar 5. 11 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

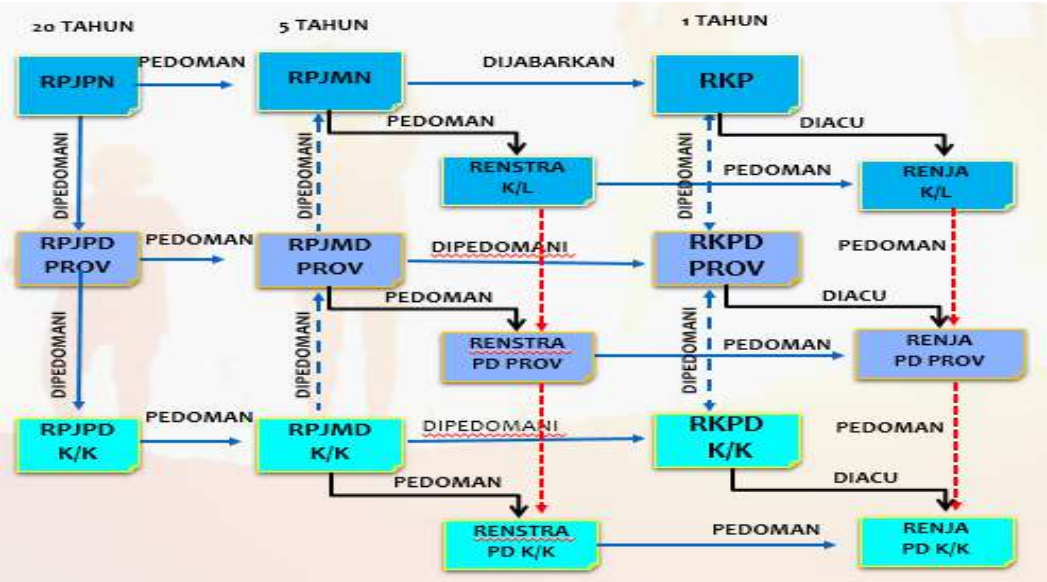

Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : "Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD".

Dalam rangka sinergitas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada Tahun 2026 diarahkan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel 5. 45 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
	01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Sekretariat DPRD
	01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	01.05 PP: Pengarustamaan, Pemajuan dan Pengehakan HAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		
	02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	02.02 PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya • Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	02.03 PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	==	==
	02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
	02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Program Pengaturan Pertahanan di Wilayah Pesisir , Laut dan Pulau	Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	==	==
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	==	==

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	02.10 PP: Swasembada Pangan	• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Air	• Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
	02.11 PP: Swasembada Energi	• Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	02.12 PP: Swasembada Air	• Program Pengelolaan Aspek Kegeologian • Program Pengelolaan Sumber Daya Air • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	• Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Kehutanan • Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	• Program Perekonomian dan Pembangunan • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	• Biro Perekonomian • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	02.14 PP: Ekonomi Digital	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM	• Badan Pendapatan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi dan UMKM

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	02.15 PP: Ekoistem Ekonomi Sirkular	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya • Dinas Lingkungan Hidup
	02.16 PP. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies dan Genetik	• Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	• Dinas Kehutanan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Lingkungan Hidup
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	• Program Pengelolaan Hutan • Program Pengelolaan Hutan Adat	Dinas Kehutanan
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumer Pertumbuhan Baru	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		
	03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata & Ekraf
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan	Dinas Pariwisata & Ekraf
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Kesejahteraan Rakyat	• Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung • Biro Kesejahteraan Rakyat
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technologi, Engineering, Art and Mathematic (STEAM)*	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tenaga Kerja	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah • Program Riset dan Inovasi Daerah	• Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	• Program Kepegawaian Daerah • Program Penataan Organisasi	• Badan Kepegawaian Daerah • Biro Organisasi
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	• Program Pengembangan Kurikulum • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pembinaan Perpustakaan	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Perpustakaan dan Arsip
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	• Dinas Kesehatan • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	04.12 PP: Pemberian makan Gratis untuk pemenuhan Gizi	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penyedian dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi • Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perkebunan • Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Dinas Kesehatan • Rumah Sakit Abdul Moeloek
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	• Dinas Kesehatan • Rumah Sakit Abdul Moeloek • Rumah Sakit Jiwa
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	• Dinas Kesehatan • Rumah Sakit Abdul Moeloek • Rumah Sakit Jiwa
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan	• Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan	• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Perlindungan dari Kekerasan		
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	• Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penempatan Tenaga Kerja	• Dinas Sosial • Dinas Tenaga Kerja
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor	• Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Pengembangan Ekspor • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Perkebunan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	05.03 PP: Optimalisasi *Backbone* Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasiona	• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Pengelolaan Perkeretaapian • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Perhubungan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	05.04 PP: Peningkatan Investigasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	• Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional • Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik , Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pengembangan Ekspor • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Kerja Sama Penanaman Modal	• Dinas Perindustrian Dan Perdagangan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu
	05.06 PP: Optimlisasi Investasi Strategis Negara	• Program Kerja Sama Penanaman Modal • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Ekonomi Terintegrasi	• Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pengelolaan Profil Kependudukan • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Sosial
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Hubungan Industrial • Program Pengawasan Ketenagakerjaan	• Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Tenaga Kerja
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan da Inovasi	• Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	• Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Lampung
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya • Program Penyelenggaraan Jalan	• Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	==	==
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	• Program Pengembangan Perumahan • Program Pengembangan Permukiman • Program Kawasan Permukiman	• Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan		
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	07.02 PP: Reformasi Hukum	• Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	• Biro Hukum • Inspektorat
	07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	• Program Penataan Organisasi • Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Program Penyelenggaraan Pengawasan	• Biro Organisasi • Biro Hukum • Inspektorat

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	• Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	• Badan Pendapatan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	• Badan Pendapatan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	• Badan Pendapatan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Badan Pendapatan Daerah Lampung • Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	07.16 PP: Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformasi untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Muslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	• Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penanggulangan Bencana • Program Pengelolaan Sumber Daya Air	• Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura • Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA) / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENDUKUNG PN DAN PP NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		• Program Penanggulangan Bencana	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Adapun tema dan prioritas pembangunan serta beberapa program unggulan kabupaten/kota dalam menunjang pembangunan provinsi pada Tahun 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut :

1. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

   TEMA : ***"Penguatan Ketahanan Pangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

   PRIORITAS PEMBANGUNAN :

   a) Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
   b) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;
   c) Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Ekonomi dan Sosial;
   d) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan;
   e) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
   f) Penguatan Ketahanan Pangan; dan
   g) Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Aman dan Berbudaya.

   PROGRAM UNGGULAN :

   a) Pasar Tematik "Jelajah Danau Ranau"

   Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau ini mengusung konsep perpaduan antara wisata dan perdagangan berlokasi di Kecamatan Lumbok Seminung;

   b) Seragam dan Tas Sekolah Gratis

   Upaya dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan cara pemberian seragam dan tas gratis kepada siswa SD dan SMP sederajat;

c) **Beasiswa S1 Jurusan Kopi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk kopi, maka direncanakan pemberiaan beasiswa S1 Jurusan Kopi untuk 2 orang mahasiswa asal Lampung Barat;

d) **Sekolah Kopi Masuk Pekon**

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk unggulan kopi, maka direncanakan akan melakukan pelatihan oleh para tutor yang berasal dari Sekolah Kopi untuk melatih para petani di masing-masing pekon;

e) **Koperasi Merah Putih**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung program unggulan Presiden, maka akan dibentuk 136 Koperasi Merah Putih pada 136 pekon dan kelurahan.; dan

f) **Pengembangan Geopark Kaldera Suoh**

Tujuan menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata utama, serta mendukung pengembangan ilmu kegeologian dan penelitian di bidang geologi.

2. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TEMA : ***"Memperkokoh Struktur Ekonomi yang Ditopang oleh Tata Kelola Pemerintahan Inovatif dan Berbasis Teknologi Informasi serta Perluasan Pembangunan Infrastruktur"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Penguatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
b) Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia;
c) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
d) Meningkatnya Infrastruktur untuk Konektivitas Wilayah, Pelayanan Dasar dan Energi;
e) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
f) Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN :

a) **Hilirisasi produk pertanian unggulan Lampung Utara hingga menjadi produk bernilai tinggi**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani serta mengoptimalkan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen menjalankan program hilirisasi produk pertanian unggulan. Program ini bertujuan untuk mengubah komoditas hasil pertanian dari bentuk mentah menjadi produk bernilai tambah yang lebih kompetitif di pasar.

Sebagai wilayah dengan potensi pertanian yang besar, Lampung Utara memiliki berbagai komoditas unggulan seperti kopi, singkong, dan berbagai hasil perkebunan lainnya. Namun, selama ini, sebagian besar produk masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai ekonominya belum maksimal. Oleh karena itu, Bupati menginisiasi langkah strategis untuk mendorong industrialisasi pertanian, sehingga produk-produk daerah dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Strategi utama dalam program ini mencakup:

1. Pengembangan Sentra Pengolahan, membangun fasilitas industri kecil dan menengah (IKM) yang berfokus pada pengolahan produk pertanian, seperti pengolahan kopi menjadi bubuk premium, serta singkong menjadi berbagai olahan pangan modern.
2. Kemitraan dengan Pelaku Usaha, mengembangkan kerja sama dengan perusahaan nasional dan internasional dalam pemasaran serta distribusi produk olahan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan UMKM, memberikan pelatihan kepada petani dan pelaku usaha kecil agar memiliki keterampilan dalam produksi, pengemasan, dan pemasaran produk bernilai tinggi.
4. Penguatan Branding dan Pasar, membantu produk lokal mendapatkan sertifikasi, merek dagang, serta akses ke pasar digital maupun ekspor.
5. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur, memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal serta memperbaiki infrastruktur pendukung, seperti jalan, irigasi, dan pusat distribusi.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian Lampung Utara, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui produk yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Dengan keberhasilan hilirisasi, Lampung Utara tidak hanya menjadi lumbung pangan, tetapi juga pusat industri agribisnis yang maju.

b) Menjamin ketersediaan sarana produksi bagi petani

Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas dalam menjamin ketersediaan sarana produksi bagi petani. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa petani memiliki akses yang cukup terhadap alat, bahan, dan fasilitas yang diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Dalam pelaksanaannya, program ini berfokus pada beberapa aspek utama:

1. Subsidi dan Kemudahan Akses Benih, Pupuk, serta Pestisida
   - Pemerintah memberikan subsidi untuk benih unggul, pupuk berkualitas, dan pestisida ramah lingkungan agar petani dapat memperoleh bahan produksi dengan harga terjangkau.
   - Menyediakan jalur distribusi yang lebih efektif agar petani dapat mengakses sarana produksi tepat waktu tanpa hambatan logistik.
2. Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Pendukung
   - Peningkatan akses jalan menuju lahan pertanian untuk kelancaran distribusi hasil panen.
   - Pembangunan gudang dan tempat penyimpanan yang memadai guna menjaga kualitas hasil pertanian sebelum dipasarkan.
3. Kemitraan dengan Produsen dan Distributor
   - Membangun kerja sama dengan perusahaan penyedia sarana produksi untuk memastikan suplai yang stabil dan berkualitas.
   - Mengembangkan sistem pengadaan berbasis kelompok tani sehingga harga dan distribusi lebih terkendali.
4. Pendampingan dan Edukasi bagi Petani

- Melalui pelatihan dan sosialisasi, petani diberikan pengetahuan tentang pemilihan sarana produksi yang tepat serta teknik pertanian modern.
- Mendorong penggunaan teknologi dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala
   - Pemerintah melakukan monitoring berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan mengatasi kendala yang muncul.
   - Evaluasi dilakukan dengan melibatkan petani agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan adanya program ini, diharapkan produktivitas pertanian di Lampung Utara meningkat, kesejahteraan petani lebih terjamin, dan daerah semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi dan akses sarana produksi guna mendukung petani dalam menghadapi tantangan pertanian yang semakin kompleks.

c) Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menempatkan Peningkatan Ketahanan Pangan sebagai salah satu program prioritas. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh warga, sekaligus mengoptimalkan potensi pertanian lokal sebagai sumber utama pangan daerah.

Strategi utama dalam program ini meliputi:

1. Penguatan Produksi Pangan Lokal
   - Mendorong petani untuk meningkatkan produksi komoditas pangan utama seperti padi, jagung, dan hortikultura.
   - Penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas hasil panen.
2. Diversifikasi Pangan dan Pengurangan Ketergantungan
   - Mengembangkan sumber pangan alternatif seperti umbi-umbian dan produk lokal yang bernilai gizi tinggi.

- Mendorong konsumsi pangan beragam guna mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.

3. Peningkatan Akses dan Keterjangkauan Pangan
   - Memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke wilayah terpencil.
   - Membangun pasar pangan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Penguatan Cadangan Pangan dan Antisipasi Krisis
   - Membentuk lumbung pangan desa untuk memastikan stok pangan tersedia sepanjang tahun.
   - Menyusun mekanisme respon cepat terhadap potensi krisis pangan akibat bencana atau gangguan lainnya.
5. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Memberikan pelatihan tentang pola konsumsi sehat dan bergizi.
   - Mengembangkan kebun pangan keluarga sebagai solusi ketahanan pangan rumah tangga.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian pangan daerah, serta membangun ekosistem pertanian dan pangan yang lebih berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, petani, dan masyarakat, Lampung Utara dapat menjadi daerah yang tangguh dalam menghadapi tantangan pangan di masa depan.

d) Pemberantasan Kemiskinan Dan Menuju Zero Stunting

Sebagai wujud komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas untuk pemberantasan kemiskinan dan menuju Zero Stunting. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta dukungan ekonomi yang berkelanjutan.

➢ Strategi Pemberantasan Kemiskinan

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
   - Menyediakan program bantuan modal dan pelatihan usaha bagi keluarga miskin.

- Mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.

2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Keterampilan
   - Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
3. Penyediaan Hunian Layak dan Infrastruktur Dasar
   - Program renovasi rumah tidak layak huni serta peningkatan akses air bersih dan listrik di wilayah tertinggal.
   - Perbaikan infrastruktur desa untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat miskin.

➢ Menuju Zero Stunting

1. Peningkatan Gizi Ibu dan Anak
   - Program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang berisiko stunting.
   - Penyuluhan tentang pola makan sehat dan bergizi bagi keluarga.
2. Akses Layanan Kesehatan yang Lebih Baik
   - Penguatan posyandu dan fasilitas kesehatan desa untuk mendeteksi serta menangani kasus stunting sejak dini.
   - Program imunisasi dan pemeriksaan rutin bagi anak-anak untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal.
3. Kolaborasi dengan Berbagai Sektor
   - Melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam menangani akar masalah stunting.
   - Kampanye kesadaran tentang pentingnya peran keluarga dalam pencegahan stunting.

Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen penuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bebas dari stunting.

e) Penguatan UMKM Dan Koperasi Melalui Program Kredit Usaha Dan Ekonomi Digital

Dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen menjalankan program prioritas penguatan UMKM dan koperasi melalui akses kredit usaha serta transformasi ekonomi digital. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha lokal berkembang, beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta memperluas akses pasar.

Strategi Penguatan UMKM dan Koperasi

1. Penyediaan Kredit Usaha dengan Skema Terjangkau
   - Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk menyediakan kredit berbunga rendah bagi UMKM dan koperasi.
   - Skema pembiayaan yang fleksibel diberikan agar pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis tanpa beban finansial yang berlebihan.
2. Pendampingan dan Pelatihan Manajemen Usaha
   - Program edukasi bagi pelaku UMKM dalam hal pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk.
   - Pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi usaha lokal.Transformasi Ekonomi Digital
3. Peningkatan Akses Teknologi dan Digitalisasi Bisnis
   - Pemerintah mendukung digitalisasi UMKM melalui platform e-commerce, pemasaran online, dan pembayaran digital.
   - Pelatihan tentang pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi operasional usaha.
4. Kemitraan dengan Platform Digital dan E-Commerce
   - Mendorong kerja sama dengan marketplace nasional dan internasional untuk membantu UMKM memasarkan produk secara lebih luas.
   - Penguatan branding dan sertifikasi produk agar memiliki standar yang lebih kompetitif di pasar digital.

5. Pembangunan Ekosistem Ekonomi Digital
    - Pengembangan infrastruktur digital seperti akses internet di pusat-pusat bisnis lokal.
    - Pembentukan pusat inovasi dan inkubator bisnis untuk mendukung wirausaha baru berbasis digital.

Melalui program ini, diharapkan UMKM dan koperasi di Lampung Utara semakin kuat, adaptif, dan mampu bersaing di era digital. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan agar ekonomi lokal tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan

f) Menjamin Ketersediaan Dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan

Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan Kesehatan dengan program penyediaan pelayanan Kesehatan keliling (Puskesmas Mider) integrasi layanan primer yang dilengkapi peralatan medis, tenaga Kesehatan, dan obat-obatan . Program ini bertujuan agar setiap warga, terutama di daerah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan berkesinambungan.

Strategi Utama Program:

1. Penguatan Fasilitas Kesehatan
    - Meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, puskesmas.
    - Pengadaan alat kesehatan modern untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih efektif.
    - Renovasi dan pembangunan fasilitas kesehatan baru di daerah yang masih minim akses.
2. Peningkatan Akses bagi Masyarakat
    - Program layanan kesehatan keliling (puskesmas mider) untuk menjangkau daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu.
    - Optimalisasi sistem rujukan agar pasien dapat memperoleh perawatan tepat waktu.
    - Penyediaan layanan ambulans gratis bagi warga yang membutuhkan penanganan darurat.
3. Ketersediaan Tenaga Medis dan Pelatihan SDM

- Penambahan tenaga medis, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan profesional di berbagai fasilitas kesehatan.
- Program pelatihan bagi tenaga medis dan kader kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Kemudahan Akses Jaminan Kesehatan
   - Optimalisasi layanan BPJS dan program jaminan kesehatan daerah agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis atau terjangkau.
   - Penyederhanaan prosedur administrasi agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh layanan kesehatan.
5. Edukasi dan Pencegahan Penyakit
   - Kampanye kesehatan mengenai pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit menular.
   - Program vaksinasi dan imunisasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat terhadap berbagai penyakit.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkualitas. Harapannya, setiap warga Kabupaten Lampung Utara dapat merasakan manfaat kesehatan yang lebih baik, tanpa adanya kendala akses atau biaya. Dengan infrastruktur yang semakin kuat dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, Lampung Utara bergerak menuju masa depan kesehatan yang lebih baik.

g) Menjamin Ketersediaan Dan Aksebilitas Pendidikan

Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Strategi Utama Program:

1. Peningkatan Infrastruktur Sekolah
   - Renovasi dan pembangunan sekolah baru terutama di daerah terpencil.
   - Penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik, termasuk laboratorium, perpustakaan, serta akses internet.
2. Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

- Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
- Bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP , untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

3. Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik
   - Program pelatihan guru untuk meningkatkan metode pengajaran yang lebih inovatif.
   - Penempatan guru di daerah terpencil untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan.
4. Akses Pendidikan yang Lebih Mudah dan Merata
   - Program sekolah inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
   - Mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan melalui sistem pembelajaran digital.
5. Penguatan Kurikulum Berbasis Keterampilan
   - Integrasi pendidikan vokasi dan kewirausahaan untuk membekali siswa dengan keterampilan kerja.
   - Kolaborasi dengan dunia industri dan universitas untuk menciptakan jalur pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Dengan akses yang lebih luas serta pendidikan yang berkualitas, generasi muda Lampung Utara diharapkan tumbuh menjadi individu yang cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global.

h) Penguatan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas & Lansia

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan penguatan kesetaraan gender serta perlindungan hak bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia sebagai program prioritas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama dalam

memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Strategi Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak

1. Peningkatan Perlindungan Hukum dan Sosial
    - Penguatan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
    - Pembentukan layanan pengaduan bagi korban kekerasan dan diskriminasi dengan dukungan
    - hukum dan psikososial.

. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
    - Program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan untuk meningkatkan
    - kemandirian ekonomi.
    - Kampanye kesetaraan gender di sekolah dan komunitas guna menanamkan nilai keadilan sejak dini.

3. Akses yang Lebih Baik bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia
    - Penyediaan fasilitas ramah disabilitas di ruang publik, termasuk layanan transportasi dan
    - pendidikan inklusif.
    - Program kesejahteraan bagi lansia melalui akses layanan kesehatan dan kegiatan sosial yang
    - meningkatkan kualitas hidup.

4. Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi
    - Penyuluhan mengenai perlindungan hak serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
    - pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi anak.
    - Penguatan peran kelompok masyarakat dan organisasi dalam mengawal kebijakan perlindungan.

5. Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Pembangunan
    - Mendorong representasi perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik.
    - Program mentoring bagi perempuan muda untuk meningkatkan kepemimpinan serta partisipasi dalam pembangunan daerah.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan adil bagi semua warga. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, perubahan menuju kesetaraan dan perlindungan hak yang lebih baik dapat diwujudkan secara nyata.

i) Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Perempuan Guna Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Sebagai bagian dari upaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas dalam peningkatan kapasitas pemuda dan perempuan. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi serta partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Strategi Penguatan Kapasitas Pemuda dan Perempuan

1. Pelatihan dan Sertifikasi Keterampilan
   - Program pelatihan berbasis industri, seperti keterampilan teknis, digital, dan kewirausahaan.
   - Sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan akses pemuda dan perempuan ke pasar tenaga kerja formal dan profesional.
2. Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM
   - Bantuan modal usaha dan pendampingan bagi wirausaha muda serta pelaku UMKM perempuan.
   - Kemitraan dengan dunia usaha untuk mendorong inovasi serta peluang pasar bagi bisnis lokal.
3. Akses Pendidikan dan Teknologi
   - Program beasiswa dan pendidikan vokasi bagi pemuda dan perempuan agar lebih siap memasuki dunia kerja.
   - Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pelatihan dan pemasaran produk usaha.
4. Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Daerah
   - Mendorong keterlibatan pemuda dan perempuan dalam pengambilan keputusan serta program sosial.
   - Kampanye kesetaraan gender dalam dunia kerja agar peluang karier lebih inklusif.

5. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur
    - Peningkatan akses terhadap fasilitas pelatihan, coworking space, dan inkubator bisnis.
    - Regulasi yang mendukung kesetaraan dan perlindungan hak tenaga kerja pemuda dan perempuan.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan bekal keterampilan yang tepat serta dukungan penuh dari berbagai sektor, pemuda dan perempuan Lampung Utara akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang lebih maju.

j) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi Dan Sistem Informasi Dan Implementasi Reformasi

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan sistem informasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mempercepat implementasi reformasi di berbagai sektor.

Strategi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

1. Digitalisasi Administrasi dan Pelayanan Publik
    - Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
    - Pengembangan aplikasi layanan digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintahan.
    - Akselerasi Penyelesaian Pelayanan Publik Di Kecamatan (seperti pembuatan KTP, Akte kelahiran, dll)
2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas
    - Implementasi sistem keterbukaan data untuk memastikan transparansi anggaran dan kebijakan daerah.
    - Penggunaan teknologi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. Inovasi dalam Reformasi Birokrasi
    - Simplifikasi prosedur administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
    - Penguatan kapasitas aparatur negara melalui pelatihan teknologi dan manajemen modern.
4. Pengembangan Smart City dan Infrastruktur Digital
    - Integrasi teknologi dalam pengelolaan kota untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih cerdas dan berorientasi pada kebutuhan warga.
    - Peningkatan infrastruktur komunikasi dan akses internet guna mendukung transformasi digital di berbagai sektor.
5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi
    - Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dalam menciptakan inovasi berbasis data.
    - Pengembangan sistem partisipatif di mana masyarakat dapat memberikan masukan langsung terhadap kebijakan daerah.

Melalui implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan transformasi digital dan reformasi birokrasi yang tepat, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

k) Membangun Dari Desa, Akselerasi Pembangunan Perdesaan Melalui Pengelolaan BUMdes Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas “Membangun Dari Desa” yang berfokus pada akselerasi pembangunan perdesaan melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini bertujuan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi desa-desa di seluruh wilayah.

Strategi Utama Program

1. Penguatan Peran BUMDes sebagai Motor Ekonomi Desa
    - Mendorong setiap desa memiliki dan mengelola BUMDes secara profesional.
    - Pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, pariwisata, kerajinan, dan perdagangan.
2. Pendampingan dan Penguatan Manajemen BUMDes
    - Penyediaan pelatihan bagi pengelola BUMDes agar memiliki keterampilan manajerial dan bisnis yang lebih baik.
    - Program mentoring dan kerja sama dengan dunia usaha untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing produk desa.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Ekonomi Desa
    - Mendorong transformasi digital BUMDes melalui pemasaran online dan sistem pembayaran digital.
    - Pengembangan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas operasional usaha desa.
4. Dukungan Infrastruktur dan Kebijakan Pemerintah
    - Peningkatan akses jalan, transportasi, dan fasilitas pendukung bagi usaha-usaha desa.
    - Kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi desa, termasuk insentif bagi BUMDes berprestasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kemandirian Desa
    - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha desa.
    - Mengembangkan model desa mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Melalui program Membangun Dari Desa, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan BUMDes yang lebih profesional serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah, desa-desa di Lampung Utara diharapkan menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

l) Memastikan Keamanan Dan Menjamin Kerukunan Antar Umat Beragama

Dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan penuh toleransi, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas untuk memastikan keamanan serta menjamin kerukunan antar umat beragama. Program ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang damai, meningkatkan rasa saling menghormati, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Strategi Utama Program

1. Membangun Dialog dan Kerja Sama Antar Umat Beragama
   - Memfasilitasi forum dialog lintas agama guna memperkuat komunikasi dan toleransi di masyarakat.
   - Mengembangkan program kerja sama antar komunitas keagamaan dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi.
2. Penguatan Peran Pemerintah dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban
   - Kolaborasi dengan aparat keamanan untuk memastikan stabilitas sosial dan mencegah konflik berbasis agama.
   - Peningkatan pengawasan terhadap provokasi dan hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat.
3. Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Toleransi
   - Kampanye kesadaran tentang pentingnya nilai kebersamaan dan persaudaraan antar umat beragama.
   - Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan sikap saling menghormati sejak dini.
4. Optimalisasi Peran Tokoh Agama dan Masyarakat
   - Mendorong peran aktif pemuka agama dalam menjaga perdamaian dan memberikan pemahaman yang inklusif bagi masyarakat.
   - Menggalakkan program komunitas berbasis keagamaan yang memperkuat solidaritas sosial.
5. Penyediaan Sarana dan Kebijakan yang Mendukung Kerukunan
   - Memastikan kebebasan beribadah bagi seluruh umat dengan penyediaan fasilitas ibadah yang layak.

- Mendorong kebijakan daerah yang berlandaskan semangat persatuan dan keberagaman.

Melalui implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang damai dan menjamin hak setiap warga untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama, diharapkan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi semakin kuat dalam kehidupan sehari-hari.

m) Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastuktur Konektivitas Dan Pelayanan Dasar

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas dalam percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas serta pelayanan dasar. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas publik, sehingga mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih merata.

Strategi Utama Program

1. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan
   - Peningkatan kualitas jalan desa dan akses antar kecamatan guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
2. Penguatan Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi
   - Penyediaan akses internet yang lebih luas untuk mendukung transformasi digital, terutama di sekolah dan pusat layanan masyarakat.
   - Pengembangan pusat layanan informasi berbasis teknologi guna meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
3. Peningkatan Akses terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan
   - Pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai di daerah terpencil.

- Penguatan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas mider, serta penyediaan layanan kesehatan keliling bagi wilayah yang sulit dijangkau.

4. Optimalisasi Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi
   - Program penyediaan air bersih bagi seluruh masyarakat guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
   - Peningkatan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah agar lingkungan tetap sehat dan bersih.
5. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Listrik di Pedesaan
   - Pengembangan sumber energi terbarukan untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.
   - Program elektrifikasi desa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung kegiatan usaha lokal.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang lebih inklusif dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat. Dengan percepatan pembangunan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat serta potensi daerah berkembang secara optimal.

n) Pelestarian Lingkungan dan Pengembangan Sumber Energi Bersih Dan Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan program prioritas dalam pelestarian lingkungan serta pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menjaga ekosistem, mengurangi dampak lingkungan akibat aktivitas manusia, serta mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan sebagai sumber daya utama.

Strategi Pelestarian Lingkungan

1. Konservasi Sumber Daya Alam
   - Program penghijauan dan rehabilitasi hutan guna menjaga keseimbangan ekosistem.
   - Perlindungan kawasan konservasi dan habitat flora serta fauna endemik.

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah Secara Berkelanjutan
    - Optimalisasi sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R) untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
    - Pengembangan teknologi pengolahan limbah agar lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.
3. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Lingkungan
    - Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
    - Pemberdayaan komunitas lokal dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Pengembangan Sumber Energi Bersih dan Berkelanjutan

1. Pemanfaatan Energi Terbarukan
    - Mendorong penggunaan tenaga surya, hidro, dan biomassa sebagai alternatif energi bagi masyarakat.
    - Program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa yang belum terjangkau listrik konvensional.
2. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Hijau
    - Mendorong industri dan rumah tangga beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
    - Pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur publik.
3. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Akademisi
    - Kolaborasi dalam penelitian serta pengembangan inovasi energi hijau guna mendukung ekonomi berkelanjutan.
    - Insentif bagi usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya.

Melalui implementasi program ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan energi daerah dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan, Lampung Utara dapat menjadi contoh daerah yang maju dalam pelestarian lingkungan dan pemanfaatan energi bersih

3. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TEMA : ***"Penguatan Fondasi Transformasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dn Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila;
b) Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum dengan Aman dan Damai;
c) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*;
d) Memajukan dan Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) secara Berkelanjutan;
e) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Berkeadilan dan Berkelanjutan;
f) Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Pantai dan Pegunungan yang Maju; dan
g) Mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan berperan aktif dalam pergaulan antar Daerah dan Nasional.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Memprioritaskan pengembangan, sinergitas, dan kolaborasi kebudayaan dalam setiap aktivitas pembangunan di daerah, seperti pelibatan tokoh adat, tokoh agama untuk mensosialisasikan program-program Pemerintah Daerah;
b) Memprioritaskan kolaborasi penanganan keamanan dan penegakan hukum dari kelompok masyarakat terkecil di tingkat RT/RW, seperti mengaktifkan peran serta masyarakat melalui Siskamling;
c) Memprioritaskan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara digital, seperti membangun super aplikasi data terpusat dan kemudahan akses pelayanan melalui jaringan internet;
d) Memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung, berupa jalan, sekolah, fasilitas kesehatan dan kantor pelayanan administrasi;

f) Memprioritaskan pengembangan pariwisata dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan prinsip Asri, Bersih, Rapi dan Indah (ABRI), seperti penyediaan ruang publik yang tertata dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah; dan

g) Memprioritaskan peningkatan potensi dan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan investasi daerah, seperti membangun fasilitas publik, hotel, cafe, restoran, ruko dan lainnya.

4. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TEMA : ***"Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Pangan dan Infrastruktur guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Pemantapan Keunggulan dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;

b) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter;

c) Pemantapan Kebersamaan dalam Mengisi Pembangunan dan Menjaga Kondusifitas Wilayah;

d) Pemantapan Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Pertumbuhan Wilayah dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan

e) Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima (Profesional, Progresif, Bersih dan Akuntabel.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusif dan Kesehatan Masyarakat Semesta;

b) Penataan Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Gunung Sugih (TERBAGUS) dan Pemerataan Pemantapan Infrastruktur;

c) Mewujudkan Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan;

d) Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik dan Profesional; dan

e) Penguatan Harmoni Kehidupan dan Rasa Aman Masyarakat.

5. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TEMA : ***"Memacu Pembangunan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Lampung Timur Makmur"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah;
b) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan;
c) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
d) Peningkatan Perekonomian Daerah; dan
e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PROGRAM UNGGULAN :

a) Unit Reaksi Cepat Preservasi Jalan Kabupaten

   Untuk merespons keluhan masyarakat, Pemkab Lampung Timur membentuk Unit Reaksi Cepat sebagai tim teknis yang sigap menangani kerusakan jalan ringan dan darurat. Unit setingkat UPTD ini bekerja berbasis laporan masyarakat dan dilengkapi peralatan operasional, sebagai wujud layanan publik yang cepat, tepat, dan membangun kepercayaan.

b) Program Pemberdayaan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

   Program ini meningkatkan akses jalan antar desa sambil memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan langsung dan penciptaan lapangan kerja. Dilaksanakan dengan dukungan berbagai sumber pendanaan, program ini mendorong infrastruktur berbasis masyarakat untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi pengangguran.

c) Program Desa Makmur

   Program Desa Makmur merupakan inisiatif prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa secara terpadu. Program ini mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada desa miskin dan berpotensi. Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan berbagai sumber pendanaan, Program Desa Makmur diharapkan mampu menciptakan desa yang maju, berdaya, dan

tangguh dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025–2029.

d) Hilirisasi Perikanan Kec. Labuhan Maringgai dan sekitarnya
Mendukung prioritas nasional, pengembangan hilirisasi perikanan di Labuhan Maringgai didorong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan seperti rajungan, udang, dan bandeng melalui penguatan industri pengolahan, infrastruktur pendukung, serta akses permodalan. Program ini melibatkan dukungan pendanaan dari pemerintah dan mitra swasta untuk memperkuat peran daerah sebagai pusat industri perikanan berkelanjutan.

e) Pengembangan Pupuk Organik dan Pertanian Organik
Mendukung PHTC Provinsi Lampung, pengembangan pupuk dan pertanian organik di Kabupaten Lampung Timur menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta mendukung konservasi tanah dan air melalui praktik budidaya berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti limbah pertanian, kotoran ternak, dan bahan organik alami lainnya. Sistem ini tidak hanya menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dengan peluang pasar yang luas sekaligus mendukung program Hasil Terbaik Cepat Pemerintah Provinsi Lampung.

f) Pengembangan Hilirisasi Lada, Kopi & Kelapa
Mendukung prioritas nasional, Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan dan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa, lada hitam, dan kopi, yang dapat meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing daerah. Melalui peningkatan kapasitas petani, penyediaan sarana produksi dan alsintan, penguatan industri pengolahan, perbaikan infrastruktur hilirisasi, serta penguatan kelembagaan dan akses permodalan, program ini bertujuan mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

g) Subsidi Kredit IKM dan UMKM KUR Daerah
Mendukung PHTC Provinsi Lampung, program subsidi kredit melalui skema KUR Daerah merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memperkuat ekonomi kerakyatan

dengan meningkatkan akses pembiayaan bagi IKM dan UMKM, guna meningkatkan akses pasar, pertumbuhan usaha, perluasan lapangan kerja, dan penguatan struktur ekonomi lokal.

h) Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah

Pengembangan destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Lampung Timur, TNWK, Pantai Mangrove Center Maringgai, dan Taman Purbakala Pugung Raharjo, agar menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah serta pelestarian nilai-nilai ekologis, edukatif, dan budaya lokal. Selain itu, pariwisata juga memberikan nilai tambah pada produk budaya lokal, memperluas pasar dalam negeri, serta memicu efek berganda di sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan investasi, sehingga menjadi pengungkit ekonomi daerah yang berdaya saing.

i) Pengembangan Aplikasi Si BADAK Masuk Desa

Untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan mempermudah pembayaran pajak dan retribusi di desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur meluncurkan aplikasi "Si Badak Masuk BUMDes" yang memungkinkan masyarakat membayar pajak secara mudah, cepat, dan transparan melalui BUMDes.

j) Pengembangan Zonasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegras

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendorong transformasi layanan publik melalui digitalisasi layanan administrasi kependudukan, termasuk e-KTP. Digitalisasi ini penting untuk mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses layanan, mengurangi birokrasi, serta memastikan data kependudukan lebih akurat, efisien, dan transparan dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

k) Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dan Program PESONA

Kabupaten Lampung Timur menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital untuk mempercepat layanan perizinan usaha dan investasi secara daring, mengurangi hambatan birokrasi, dan mendukung iklim usaha yang kondusif. Inovasi ini memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta mendorong realisasi investasi daerah melalui layanan terintegrasi, termasuk perizinan kerja sama BUMDes dan pemanfaatan RTRW-RDTR digital.

l) Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Desa Migran Emas

Tingginya minat penduduk bekerja migram, mendorong Lampung Timur menyediakan perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Perda khusus dan pengembangan Desa Migran Emas, sebagai pusat edukasi, advokasi, dan penguatan ekonomi keluarga migran guna memastikan migrasi aman, pemanfaatan remitansi yang produktif, serta reintegrasi sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi PMI.

6. KABUPATEN TANGGAMUS

TEMA : ***"Peningkatan Infrastruktur untuk Penguatan Ketahanan Pangan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
b) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Produktifitas Sektor Pertanian serta Daya Saing Produk Unggulan;
c) Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur yang merata dan Konektivitas Kewilayahan;
d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pelayanan Publik Berkualitas; dan
e) Peningkatan Stabilitas Kamtibmas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN :

a) **Kartu Tanggamus Cerdas,** merupakan program unggulan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan dan pengembangan keterampilan vokasional kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan pendidikan formal, tetapi juga pada pemberdayaan melalui pelatihan vokasional di bidang teknologi, pertanian modern, dan keterampilan kreatif.
b) **Kartu Tanggamus Sehat** adalah program yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Tanggamus, dengan perhatian khusus pada desa-desa tertinggal. Malalui Kartu Tanggamus Sehat, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas dan berkualitas bagi

seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai.

c) **Program TanggamusNet** adalah program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, terutama daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh infrastruktur dasar yang memadai. Program ini mencakup perbaikan jalan, jembata, pengaliran listrik, dan penyediaan akses internet serta air bersih.

d) **Revitalisasi Fasilitas Kesehatan**, pada tahun 2026 dengan sasaran pembangunan 6 Unit Pustu dan peningkatan 1 unit Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap.

e) **Pembangunan Sekolah Unggulan**, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta menerapkan kurikulum berbasis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

f) **Program Gerakan Membangun Pesisir Tanggamus (GEMPITA)**. GEMPITA adalah suatu gerakan percepatan sinergitas pembangunan Wilayah Pesisir Tanggamus dan sekitarnya dengan mengoptimalkan segenap potensi SDM, SDA, infrastruktur, kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah pesisir untuk mewujudkan masyarakat pesisir tanggamus yang maju dan sejahtera.

7. KABUPATEN WAY KANAN

TEMA : ***"Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang didukung oleh Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Way Kanan Mandiri dan Sejahtera"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;

b) Peningkatan Sumber Daya Manusia;

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

d) Peningkatan Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
e) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif

PROGRAM UNGGULAN :

a) **Pilot Project Pengembangan Komoditas Unggulan Terpadu**: Pengembangan Komoditas Unggulan dilakukan secara Tematik dengan beberapa OPD terkait sehingga hulu hilir dapat dioptimalkan untuk menghasilkan program tepat guna efektif dan efisien.
b) **Rehabilitasi DAS Way Kanan** adalah upaya penanganan degradasi lingkungan di wilayah aliran sungai melalui tindakan fisik dan vegetatif yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis, hidrologis, dan sosial ekonomi dari DAS tersebut.

8. KABUPATEN TULANG BAWANG

TEMA : ***"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Tulang Bawang Maju dan Berkelanjutan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat, dunia usaha dan pemanfaatan potensi;
b) Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan mitigasi bencana;
c) Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
d) Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
e) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas, Bersih dan Transparan;
f) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas dan Berkelanjutan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis dan Berbudaya.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Peningkatan Infrastruktur

Fokus pada pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung mobilitas dan akses masyarakat.

b) Penguatan Ekonomi Lokal

Melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

c) Pelayanan Publik yang Inklusif

Menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.

d) Pemberdayaan Masyarakat

Melalui program-program bantuan dan sosialisasi, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi dalam pembangunan.

e) Reformasi Birokrasi

Memperbaiki manajemen pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

9. KABUPATEN PESAWARAN

TEMA : ***"Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Desa serta Daya Saing Daerah"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif;
b) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, dan Berdaya Saing;
c) Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal;
d) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas;
e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi;

PROGRAM UNGGULAN :

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, serta sebagai wilayah strategis penyangga ibu kota Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengusung tiga program unggulan yang menjadi prioritas utama: Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pertanian, serta Pengembangan Pariwisata dan UMKM.

a) Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pertanian

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas dan konektivitas jalan antar desa, kecamatan dan sentra

produksi, akses distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. Jalan yang baik membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap tantangan pembangunan.

Di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berupaya mendorong produktivitas petani melalui program modernisasi alat pertanian, pemberian bantuan bibit unggul, pupuk bersubsidi, serta pelatihan dan pendampingan teknologi pertanian. Langkah ini bertujuan meningkatkan hasil panen, menjaga ketahanan pangan, serta menjadikan pertanian sebagai sektor andalan yang berdaya saing.

b) Pengembangan Pariwisata dan UMKM

Kabupaten Pesawaran dikenal dengan keindahan alamnya, mulai dari pesisir pantai hingga wisata alam pegunungan. Potensi ini terus dikembangkan melalui pembukaan akses menuju destinasi wisata, peningkatan fasilitas, serta promosi digital pariwisata berbasis kearifan lokal. Tujuannya adalah menjadikan Pesawaran sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, sektor UMKM juga menjadi perhatian utama. Pemkab Pesawaran memberikan berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, fasilitasi perizinan usaha, kemudahan akses permodalan, serta promosi produk lokal melalui berbagai pameran dan platform digital. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh sebagai pilar ekonomi rakyat yang kuat dan mandiri.

Melalui sinergi antarprogram ini, Kabupaten Pesawaran tidak hanya membangun fisik wilayah, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi rakyat dan memperkuat identitas daerah. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pertanian yang maju, pariwisata yang berkembang, dan UMKM yang tangguh adalah fondasi utama dalam mewujudkan Pesawaran yang lebih Maju menuju Indonesia Emas 2045.

10. KABUPATEN PRINGSEWU

TEMA : ***"Memantapkan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
b) Penguatan Daya Saing Daerah;
c) Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial;
d) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah;
e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan; dan
f) Peningkatan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat

PROGRAM UNGGULAN :

1. Program Pringsewu Produktif
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Mewujudkan *One Villege One Produck* (Satu Desa Satu Produk) unggulan lokal sebagai daya ungkit perekonomian pekon;
   b. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM, wirausaha muda, ekonomi kreatif dan memfasilitasi kredit lunak serta pengembangan pemasaran hasil produksi berbasis teknologi;
   c. Memperbanyak lokasi-lokasi kuliner yang bersih dan nyaman bagi pengunjungnya;
   d. Peningkatan kapasitas BUMDes dalam jejaring kegiatan usaha dan pemasaran berbasis teknologi informasi; dan
   e. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan komunitas masyarakat.
2. Program Pringsewu Sehat.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan yang dilengkapi dengan sumber daya kesehatan yang memadai;
   b. Mewujudkan pariwisata kesehatan melalui penyediaan Rumah Sakit yang terakreditasi paripurna yang didukung oleh dokter spesialis yang memadai;

c. Optimalisasi kemitraan pengobatan pasien melalui penganggaran yang cukup untuk iuran BPJS dan memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak mampu; dan
d. Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian bantuan medis darurat bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Program Pringsewu Cerdas.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh desa;
   b. Menjamin keberlanjutan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar bagi seluruh anak;
   c. Menyediakan pendamping program makan bergizi untuk anak sekolah dan santri;
   d. Penguatan pendidikan karakter, mental dan spiritual; dan
   e. Membangun sinergisitas pemuda, atlit, dan organisasi olah raga untuk berprestasi.
4. Program Pringsewu Lancar.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Mewujudkan jalan poros kabupaten dalam kondisi mantab yang di dukung oleh prasarana dan sarana jalan secara memadai;
   b. Pengembangan simpul-simpul transportasi menjadi pusat kegiatan usaha masyarakat yang terintegrasi;
   c. Memfasilitasi revitalisasi rumah tidak layak huni;
   d. Merintis jalan-jalan alternatif (jalan lingkar) untuk memecah kemacetan di wilayah perkotaan Pringsewu; dan
   e. Penataan wajah Perkotaan Pringsewu sebagai ibukota kabupaten yang representatif melalui penataan trotoar, drainase dan ruang publik.
5. Program Pringsewu Tahan Pangan.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Memastikan ketersediaan benih, pupuk dan pestisida serta prasarana dan sarana pertanian;
   b. Peningkatan produktivitas perikanan dan peternakan;

c. Pengembangan bahan pangan organik melalui penyediaan pupuk kompos atau pupuk organik;
d. Mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan supply produk lokal; dan
e. Peningkatan produktivitas lahan pertanian dan pekarangan rumah.

6. Program Pringsewu Bersih.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat.
   b. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah secara modern melalui sistem pengelolaan sampah menjadi lebih bernilai ekonomis.
   c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
   d. Mendorong kebersihan sungai, drainase, lingkungan perkantoran, dan lembaga pendidikan.
7. Program Pringsewu Melayani.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Perluasan pelayanan dokumen kependudukan yang cepat dan lebih mudah di jangkau oleh masyarakat;
   b. Penyelenggaraan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang profesional, efektif, efesien dan berkeadilan;
   c. Penyaluran program bantuan kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran;
   d. Mewujudkan pengelolaan APBD secara tertib, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab; dan
   e. Mengoptimalkan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital.
8. Program Pringsewu Nyaman.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Mewujudkan kehidupan yang harmonis melalui penguatan budaya lokal gotong royong dan saling tolong menolong;
   b. Meningkatkan penanganan rumah kumuh dan lingkungan kumuh, penyediaan air bersih dan sanitasi layak;

c. Mendorong pemasangan sistem monitoring berbasis digital pada area publik dan lingkungan melalui partisipasi masyarakat untuk melacak tindak kejahatan dan musibah;
d. Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim; dan
e. Memperkuat sinergisitas TNI, POLRI dan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

9. Program Pringsewu Religius.
   Program ini diimplementasikan melalui:
   a. Meningkatkan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat;
   b. Mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai-nilai agama, budaya dan norma yang berlaku; dan
   c. Memperkuat peran rumah ibadah dan pusat-pusat keagamaan sebagai wadah pendidikan moral dan akhlak berkelanjutan bagi masyarakat; dan

Pemberdayaan guru ngaji, takmir, marbot dan pengelola tempat ibadah lainnya dan pembangunan sarana sanitasi pada pondok pesantren

.

11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TEMA : *"**Peningkatan SDM yang Adaptif dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Produktivitas Daerah Berkelanjutan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif;
b) Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah;
c) Peningkatan Infrastruktur;
d) Penanggulangan Kemiskinan; dan
e) Peningkatan Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi;
f) Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang aman dan berbudaya; dan
g) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,

PROGRAM UNGGULAN :

a) Menjamin Pembangunan Infarstruktur dengan memperhatikan Pelestarian Lingkungan Hidup;
b) Optimalisasi peningkatan kualitas SDM dengan memastikan pelayanan kesehatan dan Pendidikan bagi seluruh Masyarakat Tulang Bawang Barat;
c) Mengembangkan Peternakan menuju Tulang Bawang Barat Lumbung Ternak Kambing di Provinsi Lampung;
d) Nenemo Mandiri Pangan dan K3W (Kandang, kebun, kolam dan Wisata;
e) Pengembangan Nuwo SIP (Rumah sehat, Indah dan Produktif) dan Gerakan LIMAS (Peduli Rumah Sesama);
f) Medorong Peningkatan UMKM dan memastikan diverisifikasi Tanaman, dalam pengembangan hilirisasi Industri Pengolahan;
g) Memastikan Tubaba Berkurban terus Meningkat.

12. KABUPATEN MESUJI

TEMA : ***"Penguatan Infrastruktur dalam Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah;
b) Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan;
c) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
d) Peningkatan Perekonomian Daerah; dan
e) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Peningkatan Panjang Jalan dengan Cor Beton;
b) Membuka Jalan-jalan Usaha Tani;
c) Memberi Bantuan Sarana Produksi Pertanian;
d) Melanjutkan Bantuan Pembangunan Bedah Rumah;
e) Pemberian Tunjangan Guru Ngaji;
f) Pemberian Bantuan Operasional Pondok Pesantren Yang Memiliki Santri Mukim Minimal 20 orang;
g) Pemberian Tunjangan Penjaga Kuburan – Makam;

h) Pemberian Santunan Anak Yatim Piatu Setiap Bulan Usia Maksimal 12 Tahun;
i) Pemberian Bantuan Sepatu, Pakaian Harian, Pakaian Pramuka, Pakaian Olah Raga, Tas Sekolah, Topi Bagi Anak Sekolah SD dan SMP;
j) Pendidikan Gratis SD Negeri dan SMP Negeri;
k) Membuka Lapangan Kerja bagi Anak Putus Sekolah dan masyarakat;
l) Pemberian Bantuan Iuran (PBI) BPJS Diharapkan Semua Masyarakat Memiliki BPJS Aktif;
m) Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit yang Melayani;
n) Pembuatan Kolamisasi Bagi Rumah Tangga Sasaran;
o) Memberikan Kemudahan Penggunaan Alat Berat untuk Desa-Desa;
p) Tarif Karcis Taman Kehati akan di Kembalikan Tarif Masuk Semula Rp. 10.000,-;
q) Membantu dan Pemfasilitasi Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil;
r) Memberikan Bantuan Keuangan untuk Tempat Ibadah;
s) Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Kabupaten Mesuji;
t) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan;
u) Peningkatan Sarana dan Prasaran Pendidikan;
v) Pembangunan Jembatan; dan
w) Revitalisasi saluran irigasi tersier dan skunder.

13. KABUPATEN PESISIR BARAT

TEMA : ***"Akselerasi Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Pesisir Barat Sebagai Pusat Pariwisata;
b) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
d) Peningkatan Infrastruktur Daerah;
e) Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel; dan
f) Penguatan Nilai-Nilai Religius Terdepan di Provinsi Lampung

PROGRAM UNGGULAN :

a) Pesisir Barat Menyala

Penerangan pada pusat kegiatan masyarakat dan jalan sebanyak 1.000 pcs.

b) Peningkatan Kualitas RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR (sebelumnya tipe D, naik menjadi tipe C)

14. KOTA BANDAR LAMPUNG

TEMA : ***"Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur dan Lingkungan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

a) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemantapan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terintegrasi;
b) Memacu Perekonomian Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
c) Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas;
d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Sistem Informasi Daerah;
e) Memantapkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal; dan
f) Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan,

PROGRAM UNGGULAN :

a) Pendidikan Gratis;
   - Penerimaan Siswa Biling
     Program ini bertujuan membantu peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu di lingkungan sekolah negeri untuk dapat mengenyam pendidikan di bidang sekolah dasar.

   - Penyediaan dana SPP Biling
     Guna meringankan beban ekonomi orang tua dari peserta didik maka pemerintah kota bandar lampung melalui dinas pendidikan memberikan bantuan biaya, agar para siswa biling mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan
   - Penyediaan perlengkapan siswa biling

Program ini bertujuan membantu peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu di lingkungan sekolah negeri untuk mendapat kan perlengkapan dasar bersekolah, (pakaian, sepatu, tas, alat tulis) pendidikan gratis tanpa diskriminatif (bina lingkungan)

c) Perluasan Akses yaitu dengan Merehabilitasi, serta Membangun Sekolah Guna Kenyamanan dalam Melaksanakan Proses Belajar Mengajar;
d) Pengembangan Kompetensi Pendidik guna Peningkatan Mutu Pendidikan;
e) Pengentasan Angka Anak Tidak Sekolah, Program Rencananya akan dijalankan dengan memberikan Bantuan Beasiswa terhadap Anak yang Putus Sekolah;
e) Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Warga Kota Bandar Lampung untuk Jenjang SMA / SMK / Perguruan Tinggi khususnya warga Kota Bandar Lampung yang Berprestasi serta secara Ekonomi tergolong Lemah;
f) Bantuan Rekening Listrik Masjid;
g) Pelayanan Kesehatan/Berobat Melahirkan;
h) Pinjaman tanpa Bunga bagi UMKM;
i) Insentif RT, Kepala Lingkungan, LINMAS, BABINSA, BHABINKAMTIBMAS;
j) Insentif Guru Ngaji dan Marbot;
k) Insentif Operator Pelayanan Faskes, Kader Posyandu, PPKBD dan BKB;
l) Bantuan Beras bagi Penduduk Kurang Mampu;
m) Umroh dan Wisata Rohani Gratis;
n) Pembangunan Infrastruktur;
o) Layanan Ambulance Gratis dan Ambulance Jenazah Gratis (Hotline 0822 7822 1400);
p) Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Stunting dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting;
q) Cepat Tanggap Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Warga (Hotline WA. 0811729444 & 0721 252741);

r) Administrasi Kependudukan Pendaftaran Online Langsung Jadi, serta Perekaman Jemput Bola Langsung di datangi bagi Manula dan Sakit;
s) Pengelolaan Sampah dan Lingkungan;
t) Peningkatan Ketahanan Bencana; dan
u) Pengembangan Destinasi Wisata.

15. KOTA METRO

TEMA : ***"Penguatan Infrastruktur untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

PRIORITAS PEMBANGUNAN:

a) Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;
b) Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
c) Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi serta Pengendalian Inflasi Daerah;
d) Penataan Ruang, Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Terpadu;
e) Menjaga Harmoni Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
f) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Sistem ketahanan Pangan dan Ketahanan Bencana;
g) Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Kualitas layanan Publik; dan
h) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum.

PROGRAM UNGGULAN :

a) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
c) Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
e) Program Pengembangan Permukiman;
f) Program Pelayanan Penanaman Modal;
g) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
h) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

i) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
j) Program Pengelolaan Persampahan;
k) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
l) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
m) Program Pengelolaan Pendidikan;
n) Program Pengelolaan Pendidikan;
o) Program Pengelolaan Pendidikan;
p) Program Pengelolaan Pendidikan;
q) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
r) Program Riset dan Inovasi Daerah;
s) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat;
t) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
u) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
v) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;;
w) Pogram Penyelenggaraan Jalan;
x) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
y) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
z) Program Pengelolaan Kesehatan;
aa) Program Pengelolaan Pendidikan;
bb) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
cc) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
dd) Program Kepegawaian Daerah
ee) Program Pengelolaan Keuangan Daerah"
ff) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
gg) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
hh) Program Pengembangan Kebudayaan
ii) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
jj) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

PEMERINTAH
DAERAH
PROVINSI
LAMPUNG

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Lampung
2026

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang akan dilaksanakan merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, dilakukan melalui pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : pendekatan partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), politik, dan teknokratik. **Pendekatan partisipatif** dilakukan dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak/pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan Bersama terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. **Pendekatan bottom up** dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan hasil dari Musrenbang Provinsi. **Pendekatan *top down*** dilakukan dengan menjabarkan dan menyelaraskan arah-kebijakan pemerintah pusat, dalam setiap dokumen perencanaan daerah, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah. Sedangkan **pendekatan teknokratik** dilakukan melalui evaluasi dan penelaahan dokumen perencanaan sebelumnya, melakukan analisis dan diskusi dengan para ahli, serta elaborasi referensi dan data-data yang relevan.

Selanjutnya **pendekatan politik** dilakukan dengan menjabarkan dan menajamkan visi dan misi kepala daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif setiap tahun, disamping itu juga memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran dari DPRD Provinsi Lampung. Oleh karenanya pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan pula sinkronisasi program-program prioritas daerah berdasarkan aspek pendekatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Disisi yang lain, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional, strategi penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan tematik- holistik, integratif, dan spasial, dimana:

- Tematik- holistik yaitu pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan sumber daya pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (hulu – hilir) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- Integratif yaitu pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses teadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- Spasial yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi pemanfaatan ruang dan indikasi lokasi sesuai dengan kewenangan masing-masing hierarki pemerintahan, dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan pada tingkat pemerintah provinsi mencakup penyelenggaran urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu : 1) Urusan Pemerintahan Wajib, meliputi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; serta 2) Urusan Pemerintahan Pilihan.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021, kemudian pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari CSR, dan hibah.

6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun transisi pembangunan dan tahun pertama kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 serta sekaligus tahun pertama periode pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Pada tahun kedua RPJMD Tahun 2025-2029, kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada tema **"Penguatan**

Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan prioritas daerah difokuskan pada Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi, Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi, Pengentasan Kemiskinan, Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman dan Berbudaya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pembangunan daerah tahun 2026 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Tahun 2026, kerangka pendanaan daerah Provinsi Lampung dihadapkan pada tantangan dan risiko dari faktor global/nasional/regional baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis.

Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Lampung tahun 2026. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,2 trilyun, belanja daerah sebesar Rp8 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp794 Juta.

Tabel 6. 1 Kerangka Pendanaan Provinsi Lampung Tahun 2026

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah(Rp.)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**7.250.000.000.000,00**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.675.032.820.130,00**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	2.881.083.331.000,00
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	*971.008.331.000,00*
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	*356.000.000.000,00*
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	*800.000.000.000,00*
	d. Pajak Rokok	*740.000.000.000,00*
	e. Pajak Air Permukaan	*10.000.000.000,00*
	f. Pajak Alat Berat	*2.000.000.000,00*
	g. Opsen MBLB	*2.075.000.000,00*
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	481.946.670.000,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	202.001.691.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110.001.128.130,00
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.463.958.189.270,00**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.431.028.425.470,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	3.372.087.747.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah(Rp.)
4 . 2 . 1 . 1 . 1	Dana Transfer Umum (DBH)	159.990.021.000,00
4 . 2 . 1 . 1 . 2	DAU	2.138.935.822.000,00
4 . 2 . 1 . 1 . 3	Dana Transfer Khusus (DAK Fisik)	60.159.863.000,00
4 . 2 . 1 . 1 . 3	Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik)	1.013.002.041.000,00
4 . 2 . 1 . 2	Insentif Fiskal (IF)	-
4 . 2 . 2	PendapatanTransfer Antar Daerah	32.929.763.800,00
4 . 3	**Lain-lain PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**111.008.990.600,00**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	111.008.990.600,00
5	**BELANJA DAERAH**	**8.114.000.000.000,00**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**5.000.885.771.844,54**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.040.054.260.608,37
5 . 1 . 2	Belanja Barang Jasa	1.586.821.234.090,97
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	41.457.723.215,00
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	30.000.000,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	328.522.553.930,20
5 . 1 . 6	Belanja Bansos	4.000.000.000,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**1.671.831.671.370,00**
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**50.000.000.000,00**
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**1.391.282.556.785,46**
	SELISIH PENDAPATAN DAN BELANJA	**-864.000.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.004.000.000.000,00**
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.000.000.000,00
	Kas di BUD	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	
	Kas di Bendahara BOS	
	Kas di BLUD	
	Kas Lainnya	
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman	1.000.000.000.000,00
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**140.000.000.000,00**
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.000.000.000,00
	Penyertaan Modal BUMD	
	Pemenuhan Penyertaan Modal Pada Bank Lampung	
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	100.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**864.000.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**

6.2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung tahun 2026

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

Rencana program prioritas dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 adalah sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 6. 2 Rencana Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
PD 1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;	1.1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.124.791.870,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	916.692.639,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Penyelenggaraan Jalan	1.633.562.832.840,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.307.902.400,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.700.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	323.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Penerbangan	-	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	-	Dinas Perhubungan
PD 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	2.1 Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pengembangan Kebudayaan	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pembinaan Sejarah	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pengelolaan Permuseuman	3.656.295.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
		Program Pembinaan Perpustakaan	525.647.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	391.153.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Kesejahteraan Rakyat	74.970.042.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.410.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung
	2.2 Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	16.250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	800.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.482.450.740,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	650.263.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	65.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	217.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	650.263.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Rumah Sakit Jiwa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	650.263.000,00	Rumah Sakit Jiwa
	2.4 Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program Rehabilitasi Sosial	5.193.046.691,00	Dinas Sosial

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pengendalian Penduduk	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PD 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	2.1 Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.207.866.000,00	Biro Perekonomian
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	450.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	578.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.050.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.360.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	397.840.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	611.617.890,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	916.692.639,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.850.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Hutan	444.134.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.124.791.870,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	368.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	132.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	11.479.878.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	578.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.050.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.360.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	397.840.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	501.880.600,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	2.3 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.207.866.000,00	Biro Perekonomian
		Program Penyelenggaraan Jalan	1.633.562.832.840,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.307.902.400,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.700.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	323.500.000,00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	-	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	341.297.463,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	23.317.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Hutan	444.134.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	702.750.000,00	Dinas Kehutanan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.075.250.000,00	Dinas Kehutanan
PD 4. Pengentasan Kemiskinan	4.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	40.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	475.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	140.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	130.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	315.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	280.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	240.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	45.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	578.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
PD 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;	5.1 Terwujudnya Birokrasi berintegritas	Program Pendaftaran Penduduk	148.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.482.450.740,00	Biro Umum
		Program Penataan Organisasi	610.491.900,00	Biro Organisasi
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	105.315.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.482.450.740,00	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
		Program Kepegawaian Daerah	1.613.549.260,00	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Badan Pengembangan SDM Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.599.891.800,00	Badan Pengembangan SDM Daerah
		Program Pelayanan Penghubung	1.162.425.500,00	Badan Penghubung Provinsi Lampung
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.430.950.000,00	Inspektorat Lampung
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	81.578.000,00	Inspektorat Lampung
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	839.519.700,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan	2.010.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Evaluasi Pembangunan Daerah		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.493.552.426.142,46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;	6.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	23.317.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	702.750.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Penanggulangan Bencana	34.254.789.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Hutan	444.134.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	446.897.600,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	341.297.463,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	62.395.440,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	351.544.327,00	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ALOKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.075.250.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	32.426.611.769,80	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	62.395.440,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	351.544.327,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.700.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Hutan	444.134.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	702.750.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.124.791.870,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PD 7. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;	7.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	845.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Kesejahteraan Rakyat	74.970.042.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

6.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2026

Tabel 6. 3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).			
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.482.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	01.02PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	7.588.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	01.03PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	01.04PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
	01.05PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	845.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.		-	
	02.01PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.02PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	28.735.806.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	02.03PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	==	-	==
	02.04PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.05PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
	02.06PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	130.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	845.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	==	-	==
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	==	-	==
	02.10 PP: Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	36.000.000,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
		Program Penyuluhan Pertanian	397.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.426.611.769,80	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
	02.11 PP: Swasembada Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.124.791.870,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	916.692.639,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	02.12 PP: Swasembada Air	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	446.897.600,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.426.611.769,80	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.200.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	69.750.000,00	Dinas Kehutanan
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.207.866.000,00	Biro Perekonomian
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.850.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	02.14 PP: Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.300.896.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	475.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Umkm	140.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Umkm
	02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.550.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	62.395.440,00	Dinas Lingkungan Hidup
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	702.750.000,00	Dinas Kehutanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	130.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	130.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	23.317.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	135.008.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	54.501.000,00	
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	351.544.327,00	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	135.008.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	54.501.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau / Green Jobs	Program Pengelolaan Persampahan	351.544.327,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.124.791.870,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	Program Pengelolaan Hutan	444.134.000,00	Dinas Kehutanan
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	130.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	315.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	280.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.		-	
	03.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.700.000.000,00	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
	PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	Program Pengelolaan Pelayaran	323.500.000,00	Dinas Perhubungan
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.124.791.870,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	475.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	140.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	315.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.493.552.426.142,46	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.300.896.000,00	Badan Pendapatan
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	400.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekraf
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	272.500.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekraf

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.		-	
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.410.000.000,00	
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Kesejahteraan Rakyat	74.970.042.000,00	Biro Kesra
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.410.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)	Program Pengelolaan Pendidikan	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	644.930.133.400,00	Diknas
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.095.000.000,00	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	230.000.000,00	Dispora
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	475.000.000,00	Dinas Koperasi UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	75.000.000,00	Dinas Koperasi UMKM
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	368.000.000,00	Balitbangda
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	132.000.000,00	Balitbangda
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Program Kepegawaian Daerah	1.613.549.260,00	Bkd
		Program Penataan Organisasi	610.491.900,00	Biro Organisasi
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pengembangan Kurikulum	-	Dikbud

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Kebudayaan	2.215.097.900,00	Dispora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	800.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
		Program Pembinaan Perpustakaan	525.647.200,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100.000.000,00	Dinas Pppa
	04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	578.000.000,00	Dinas PMDT
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan, RSUAM
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	650.263.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	65.000.000,00	Rsam
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	217.000.000,00	Rsj
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	-	Dinas Kesehatan, RSAM, RSJ
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	50.000.000,00	Dinas PPPA

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.700.000.000,00	Dinas PMDT
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	220.128.100,00	Dinas PPPA
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	800.000.000,00	Dispora
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	350.000.000,00	Dinas PPPA
		Program Perlindungan Perempuan	1.202.681.900,00	Dinas PPPA
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Program Rehabilitasi Sosial	5.193.046.691,00	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	110.000.000,00	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	230.000.000,00	
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	16.250.000.000,00	Dispora
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	16.250.000.000,00	Dispora
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.		-	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	6.000.000,00	Dinas KPTPH
		Program Pengembangan Ekspor	45.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	130.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	327.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.050.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Peternakan & Keswan
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	611.617.890,00	Dinas EDSM
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.850.000.000,00	Bappeda
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.307.902.400,00	Dinas BMBK
		Program Penyelenggaraan Jalan	1.633.562.832.840,00	Dinas PKPCK
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.612.987.150,07	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.776.639.000,00	Dinas PKPCK
	05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.850.000.000,00	Bappeda

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Jalan	1.633.562.832.840,00	Dinas BMBK
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.700.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	323.500.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	25.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	45.000.000,00	Dinas PTSP
	05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	Dinas PTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	28.735.806.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.		-	
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.010.000.000,00	Bappeda
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.520.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Pendaftaran Penduduk	148.000.000,00	Disdukcapil

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	55.000.000,00	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	110.000.000,00	Dinas Sosial
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Program Pemberdayaan Sosial	110.142.880,00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	120.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Hubungan Industrial	968.513.000,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	225.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	38.268.328,00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.095.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Penempatan Tenaga Kerja	230.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	800.000.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	475.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Lampung
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	26.622.791.267,56	Dinas PKPCK

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	15.800.000.000,00	Dinas PKPCK
		Program Penataan Bangunan Gedung	32.568.382.942,34	Dinas PKPCK
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.612.987.150,07	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Jalan	1.633.562.832.840,00	Dinas PKPCK
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.776.639.000,00	Dinas PKPCK
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.307.902.400,00	Dinas PKPCK
		Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.010.000.000,00	Dinas PKPCK
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.850.000.000,00	Bappeda
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Bukan Kewenangan Provinsi	-	
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	206.135.000,00	Dinas PKPCK
		Program Pengembangan Permukiman	21.600.000.000,00	Dinas PKPCK
		Program Kawasan Permukiman	9.963.064.000,00	Dinas PKPCK
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerja sama Desa	20.000.000,00	Dinas PMDT

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.		-	
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	Kesbangpol
	07.02 PP: Reformasi Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.116.763.145,00	Biro Hukum
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.430.950.000,00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	81.578.000,00	Inspektorat
	07.03	Program Penataan Organisasi	610.491.900,00	Biro Organisasi
	PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.116.763.145,00	Biro Hukum
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.430.950.000,00	Inspektorat
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.116.763.145,00	Biro Hukum
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.430.950.000,00	Inspektorat Lampung

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	81.578.000,00	Inspektorat Lampung
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN)	Program Pemberdayaan Sosial	110.142.880,00	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	5.193.046.691,00	Dinas Sosial
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	1.613.549.260,00	Badan Kepegawaian Daerah Lampung
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penataan Organisasi	610.491.900,00	Biro Organisasi
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	839.519.700,00	Biro Pem Otda
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	610.491.900,00	Biro Organisasi
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.493.552.426.142,46	Badan Pendapatan Daerah Lampung
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.493.552.426.142,46	Badan Pendapatan Daerah Lampung
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negera	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.300.896.000,00	Badan Pendapatan Daerah Lampung
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.300.896.000,00	Badan Pendapatan Daerah Lampung
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	40.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	120.000.000,00	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.		-	
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	-	
	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	34.254.789.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.426.611.769,80	
	08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	34.254.789.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.4 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026

Tabel 6. 4 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Program pengelolaan pendidikan	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	5.410.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program pengembangan kebudayaan	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengembangan kesenian tradisional	900.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pembinaan sejarah	150.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	200.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pengelolaan permuseuman	3.656.295.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	140.243.866.790,00	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	650.263.000,00	Dinas Kesehatan
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	65.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	217.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	140.243.866.790,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	650.263.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	140.243.866.790,00	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	650.263.000,00	Rumah Sakit Jiwa
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	2.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.550.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan gedung	32.568.382.942,34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	7.612.987.150,07	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penyelenggaraan penataan ruang	3.776.639.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan perumahan	206.135.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program kawasan permukiman	9.963.064.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	26.622.791.267,56	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
2	Pengendalian Inflasi	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	67.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program pengembangan ekspor	45.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	240.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	240.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	578.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
3	Penurunan Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	140.243.866.790,00	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	650.263.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	140.243.866.790,00	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program rehabilitasi sosial	5.193.046.691,00	Dinas Sosial
		Program pengendalian penduduk	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	175.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.120.000.000,00	Bappeda
4	Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	475.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pengembangan umkm	140.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	280.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program pengelolaan perikanan tangkap	500.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	280.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.500.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	174.944.355,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	139.783.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	578.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penanganan kerawanan pangan	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	1.075.750.000,00	Dinas Kehutanan
		Program pengelolaan ketenagalistrikan	1.416.692.639,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		Program perencanaan dan pembangunan industri	28.985.806.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program fasilitasi dan koordinasi hukum	1.302.091.385,00	Biro Hukum
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	140.243.866.790,00	Dinas Kesehatan
		Program penyelenggaraan jalan	1.631.667.616.690,00	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	32.426.611.769,80	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	2.200.000.000,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.550.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program penataan bangunan gedung	32.568.382.942,34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pengembangan perumahan	206.135.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	26.622.791.267,56	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
		Program pemberdayaan sosial	110.142.880,00	Dinas Sosial

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	120.000.000,00	Dinas Sosial
		Program rehabilitasi sosial	5.193.046.691,00	Dinas Sosial
		Program perlindungan dan jaminan sosial	110.000.000,00	Dinas Sosial
		Program penanganan bencana	20.697.706.077,20	Dinas Sosial
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	305.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.802.725.390,00	Dinas Perkebunan
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	501.880.600,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Ketahanan Pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	6.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penanganan kerawanan pangan	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Alokasi Pagu Anggaran (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		Program pengawasan keamanan pangan	11.479.878.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	578.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	139.783.000,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.802.725.390,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program penyuluhan pertanian	175.573.893,00	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	501.880.600,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	139.783.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Tabel 6. 5 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung Tahun 2026

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**2.277.329.607.100,00**	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.277.329.607.100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.410.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	644.930.133.400,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.626.989.473.700,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**790.910.000.000,00**	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	213.154.000.000,00	Dinas Kesehatan
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	217.000.000,00	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	140.243.866.790,00	Dinas Kesehatan
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	650.263.000,00	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.977.870.210,00	Dinas Kesehatan
10	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	65.000.000,00	Dinas Kesehatan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	61.137.000.000,00	Rumah Sakit Jiwa
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.821.608.811,80	Rumah Sakit Jiwa
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	240.876.100,00	Rumah Sakit Jiwa
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.074.515.088,20	Rumah Sakit Jiwa
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	514.619.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
21	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	512.119.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**1.868.768.009.092,41**	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.691.997.000.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
24	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.307.902.400,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.126.264.760,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.633.562.832.840,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	90.463.000.000,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
28	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	32.426.611.769,80	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.036.388.230,20	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.308.009.092,41	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
31	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.612.987.150,07	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.568.382.942,34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
33	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.550.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
34	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.800.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
35	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
36	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	21.600.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
37	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.776.639.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**68.323.990.907,59**	
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	68.323.990.907,59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
40	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.963.064.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
41	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	206.135.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
42	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	26.622.791.267,56	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.532.000.640,03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**106.835.000.000,00**	
44	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.676.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
45	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	34.254.789.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.421.210.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	63.159.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
48	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	845.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.314.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**46.860.000.000,00**	
50	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	46.860.000.000,00	Dinas Sosial
51	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	110.142.880,00	Dinas Sosial
52	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	20.697.706.077,20	Dinas Sosial
53	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	120.000.000,00	Dinas Sosial

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
54	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	65.000.000,00	Dinas Sosial
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.564.104.351,80	Dinas Sosial
56	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.000.000,00	Dinas Sosial
57	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.193.046.691,00	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**33.827.000.000,00**	
58	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.827.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
59	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	968.513.000,00	Dinas Tenaga Kerja
60	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.095.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
61	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	230.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
62	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	225.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.270.218.672,00	Dinas Tenaga Kerja
64	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	38.268.328,00	Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**12.493.000.000,00**	
65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.493.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
66	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
67	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
69	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.470.190.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
71	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	220.128.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
72	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.202.681.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**12.099.878.000,00**	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
73	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12.099.878.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
74	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
75	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	11.479.878.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
76	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
77	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	578.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**1.900.000.000,00**	
78	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.900.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
79	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
80	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	700.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**16.306.000.000,00**	
81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.306.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
82	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	54.501.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
83	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	124.360.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
84	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	23.317.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
85	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	351.544.327,00	Dinas Lingkungan Hidup
86	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	62.395.440,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
87	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	341.297.463,00	Dinas Lingkungan Hidup
88	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	28.490.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
89	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	26.040.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.159.046.570,00	Dinas Lingkungan Hidup
91	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	135.008.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**6.048.000.000,00**	
92	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.048.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
93	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
94	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	148.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
95	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	42.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
96	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	55.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.748.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**12.790.000.000,00**	
98	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.790.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
99	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	385.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
100	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
101	PROGRAM PENATAAN DESA	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
102	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.665.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**250.000.000,00**	
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
105	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
106	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
107	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**19.902.000.000,00**	
108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.902.000.000,00	Dinas Perhubungan
109	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	323.500.000,00	Dinas Perhubungan
110	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	Dinas Perhubungan
111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.878.500.000,00	Dinas Perhubungan
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.700.000.000,00	Dinas Perhubungan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**33.808.000.000,00**	
113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.808.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
114	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.520.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
115	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.588.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.700.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**15.898.000.000,00**	
117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.898.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
118	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	315.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
120	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	475.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
121	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
122	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	70.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
123	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	140.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
124	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.783.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**17.590.000.000,00**	
126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.590.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
127	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
128	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
129	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
130	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.990.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
132	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	450.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**39.072.000.000,00**	
133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39.072.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
134	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	16.250.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
135	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	800.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
136	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
137	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.722.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**120.000.000,00**	
138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	120.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
139	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	120.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**100.000.000,00**	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
141	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**7.121.392.900,00**	
142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.121.392.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
143	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
144	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
145	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.656.295.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
146	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.215.097.900,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
147	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	900.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**14.898.000.000,00**	
148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.898.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
149	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	391.153.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
150	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	525.647.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.981.199.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**100.000.000,00**	
152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
153	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
154	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**21.738.000.000,00**	
155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.738.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
156	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	130.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
157	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	130.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
158	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	280.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
159	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	315.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
160	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	327.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.556.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**14.402.000.000,00**	
162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14.402.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
163	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	350.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
164	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	272.500.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
165	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	377.500.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
166	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	400.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.002.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**95.173.122.000,00**	
168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52.404.122.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
169	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.246.282.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
171	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.360.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
172	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
173	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	397.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
174	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.723.000.000,00	Dinas Perkebunan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
175	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154.944.355,00	Dinas Perkebunan
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.403.453.960,00	Dinas Perkebunan
177	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.782.725.390,00	Dinas Perkebunan
178	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	139.783.000,00	Dinas Perkebunan
179	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	215.573.893,00	Dinas Perkebunan
180	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	26.519.402,00	Dinas Perkebunan
181	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.046.000.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
182	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	501.880.600,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.490.532.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
184	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.626.913.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
185	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.343.615.400,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
186	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	60.000.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
187	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	23.059.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	**64.826.000.000,00**	
188	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	64.826.000.000,00	Dinas Kehutanan
189	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	702.750.000,00	Dinas Kehutanan
190	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.075.250.000,00	Dinas Kehutanan
191	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	69.750.000,00	Dinas Kehutanan
192	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	444.134.000,00	Dinas Kehutanan
193	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.534.116.000,00	Dinas Kehutanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**20.529.000.000,00**	
194	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.529.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
195	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	446.897.600,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
196	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.124.791.870,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
197	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	916.692.639,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
198	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	611.617.890,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.429.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**16.235.193.500,00**	
200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.235.193.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
201	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	45.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
202	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
203	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
204	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.910.193.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
205	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
206	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	40.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
207	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	240.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**28.760.806.500,00**	
208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	28.760.806.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
209	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
210	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
211	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	28.735.806.500,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**80.000.000,00**	
212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
213	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
214	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
	SEKRETARIAT DAERAH	**256.422.000.000,00**	
215	SEKRETARIAT DAERAH	1.327.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
216	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	704.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
217	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	623.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
218	SEKRETARIAT DAERAH	3.248.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
219	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.248.000.000,00	Biro Administrasi Pimpinan
220	SEKRETARIAT DAERAH	2.135.000.000,00	Biro Hukum
221	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.116.763.145,00	Biro Hukum
222	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.018.236.855,00	Biro Hukum
223	SEKRETARIAT DAERAH	75.694.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
224	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	74.970.042.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
225	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	723.958.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
226	SEKRETARIAT DAERAH	1.368.000.000,00	Biro Organisasi
227	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	610.491.900,00	Biro Organisasi
228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	757.508.100,00	Biro Organisasi
229	SEKRETARIAT DAERAH	1.394.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
230	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	839.519.700,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
231	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	554.480.300,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
232	SEKRETARIAT DAERAH	1.700.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
233	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.225.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
234	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
235	SEKRETARIAT DAERAH	1.680.000.000,00	Biro Perekonomian
236	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	472.134.000,00	Biro Perekonomian
237	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.207.866.000,00	Biro Perekonomian
238	SEKRETARIAT DAERAH	167.876.000.000,00	Biro Umum
239	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	167.876.000.000,00	Biro Umum
	SEKRETARIAT DPRD	**229.482.000.000,00**	
240	SEKRETARIAT DPRD	229.482.000.000,00	Sekretariat DPRD
241	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	105.315.000.000,00	Sekretariat DPRD
242	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.167.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
	PERENCANAAN	**28.596.000.000,00**	
243	PERENCANAAN	28.596.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
244	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.850.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
245	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.736.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
246	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.010.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	KEUANGAN	**1.807.348.000.000,00**	
247	KEUANGAN	94.199.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
248	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.300.896.000,00	Badan Pendapatan Daerah
249	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.898.104.000,00	Badan Pendapatan Daerah
250	KEUANGAN	1.713.149.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
251	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.446.888.520,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
252	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.493.552.426.142,46	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
253	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.149.685.337,54	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	KEPEGAWAIAN	**20.096.000.000,00**	
254	KEPEGAWAIAN	20.096.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
255	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.613.549.260,00	Badan Kepegawaian Daerah
256	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.482.450.740,00	Badan Kepegawaian Daerah
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**22.157.000.000,00**	
257	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	22.157.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
258	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.599.891.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
259	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.557.108.200,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**8.979.000.000,00**	
260	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.979.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
261	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	368.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU	PERANGKAT DAERAH
262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.479.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
263	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	132.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	**17.788.000.000,00**	
264	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	17.788.000.000,00	Badan Penghubung
265	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.162.425.500,00	Badan Penghubung
266	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.625.574.500,00	Badan Penghubung
	INSPEKTORAT DAERAH	**38.556.000.000,00**	
267	INSPEKTORAT DAERAH	38.556.000.000,00	Inspektorat
268	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.043.472.000,00	Inspektorat
269	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.430.950.000,00	Inspektorat
270	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	81.578.000,00	Inspektorat
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**19.482.000.000,00**	
271	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.482.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
272	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
273	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
274	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
275	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
276	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
277	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.482.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah

6.5 Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel 6. 6 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.210.000.000,00
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	300.000.000,00
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.575.840.000,00
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	75.000.000.000,00
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.575.840.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	45.000.000.000,00
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	86.700.000,00
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.575.840.000,00
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.650.000.000,00
14	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	700.000.000,00
15	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	369.663.042,00
16	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	750.000.000,00
17	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	547.541.370,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
18	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.000.000,00
19	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100.000.000,00
20	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.617.000,00
21	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	1.000.000,00
22	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	4.000.000,00
23	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.000.000,00
24	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	559.509.000,00
25	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	30.000.000,00
26	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	547.541.370,00
27	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.000.000,00
28	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100.000.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
29	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.617.000,00
30	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Pengasuhan	45.804.571,00
31	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	4.000.000,00
32	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.000.000,00
33	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	30.000.000,00
34	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	547.541.370,00
35	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.000.000,00
36	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	18.278.300,00
37	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.617.000,00
38	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	20.448.800,00
39	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	1.000.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
40	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	4.000.000,00
41	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	10.000.000,00
42	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	559.509.000,00
43	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	30.000.000,00
44	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	2.000.000,00
45	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.000.000,00
46	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	18.278.300,00
47	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	20.000.000,00
48	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	1.998.000,00
49	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	2.532.750,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
50	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.000.000,00
51	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	559.509.000,00
52	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	30.000.000,00
53	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.238.058.647,20
54	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	122.090.000,00
55	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	559.509.000,00
56	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	30.000.000,00
57	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	290.169.930,00

6.6 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, terdapat 49 perangkat daerah yang melaksanakan 206 program yang terdiri dari 623 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2026 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2026.

Tabel 6. 7 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8	19	2.284.451.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	5	20	213.154.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada	3	8	2.000.000.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	3	6	514.619.000.000,00
5	Rumah Sakit Jiwa	4	11	61.137.000.000,00
6	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	12	1.691.997.000.000,00
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	9	90.463.000.000,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	12	23	156.532.000.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	63.159.000.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	43.676.000.000,00
11	Dinas Sosial	7	18	46.860.000.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja	6	20	33.827.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	25	12.743.000.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	10	21	16.306.000.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	6.048.000.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	5	11	12.870.000.000,00
17	Dinas Perhubungan	1	2	19.902.000.000,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5	14	34.028.000.000,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	17	15.898.000.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	17.590.000.000,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	16	39.072.000.000,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	16	14.998.000.000,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	25	21.738.000.000,00
24	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	16	14.402.000.000,00
25	Dinas Perkebunan	6	15	17.723.000.000,00
26	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	11	25.046.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
27	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	8	22	64.504.000.000,00
28	Dinas Kehutanan	2	5	64.826.000.000,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	22	20.529.000.000,00
30	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10	21	44.996.000.000,00
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	6	1.394.000.000,00
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	8	75.694.000.000,00
33	Biro Hukum	2	5	2.135.000.000,00
34	Biro Perekonomian	2	6	1.680.000.000,00
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	9	1.700.000.000,00
36	Biro Administrasi Pembangunan	2	7	1.327.000.000,00
37	Biro Organisasi	2	5	1.368.000.000,00
38	Biro Umum	1	10	167.876.000.000,00
39	Biro Administrasi Pimpinan	1	7	3.248.000.000,00
40	Sekretariat DPRD	2	16	229.482.000.000,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	28.596.000.000,00
42	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	15	1.713.149.000.000,00
43	Badan Pendapatan Daerah	2	9	94.199.000.000,00
44	Badan Kepegawaian Daerah	2	9	20.096.000.000,00
45	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	10	22.157.000.000,00
46	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2	8.979.000.000,00
47	Badan Penghubung	2	8	17.788.000.000,00
48	Inspektorat	3	10	38.556.000.000,00
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	6	12	19.482.000.000,00
TOTAL		**206**	**623**	**8.114.000.000.000,00**

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2026

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024 serta mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini. Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merancang langkah-langkah pembangunan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup indikator kinerja utama daerah yang mencerminkan kinerja Kepala Daerah, serta indikator kinerja daerah yang merepresentasikan kinerja Kepala Perangkat Daerah. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja dilakukan untuk menyediakan informasi kinerja yang relevan dan akurat, guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada pencapaian hasil. Indikator kinerja ini berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung, Indikator Kinerja Daerah (IKD) penyelenggraan pemerintahan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Selain penetapan IKU, IKD dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indek Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan, Gini Rasio, Inflasi, Tingkat Kemantapan Jalan, Nilai Tukar Petani (NTP), Persentase Peningkatan PAD, dan Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca (GRK). Target Indikator Kinerja Makro tahun 2026 tercantum pada tabel pada tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7. 1 Asumsi Makro Provinsi Lampung Tahun 2026

INDIKATOR MAKRO		Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	5,2 - 5,7*
2.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	51,37	54,0-56,0
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,13	73,80-74,4
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	3,51 - 4,05*
5.	Kemiskinan (%)	10,62	8,90 - 9,90*
6.	Gini Rasio (Nilai)	0,301	0,274 - 0,290*
7.	Inflasi (%)	1,50	2,5 -/+ 1,0
8.	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78,08	85,7
9.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Nilai)	124,97	125-127
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,87	-4,61
11.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	60,64	62,41 – 64,03*

*) Target hasil kesepakatan pada Forum Rakortek Pembangunan Tahun 2025 antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan pada Tabel 7.1, Provinsi Lampung memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang maksimal dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memproyeksikan indikator makro tahun 2026, dengan memperhatikan capaian tahun 2024 untuk mencapai target-target tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh positif meskipun saat ini masih dibayangi ekonomi dunia yang diperkirakan akan mengalami pelambatan. Upaya peningkatan nilai tambah ekonomi penting dilakukan dengan pemaksimalan potensi daerah seperti pertanaian, pariwisata hingga pengelolaan sumber daya alam lainnya (perikanan dan kelautan) sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung lebih baik lagi. Hal ini memicu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Lampung pada tahun 2026.

Kenaikan IPM tahun 2024 dibanding tahun 2023 juga sangat baik. Capaian Lampung Tahun 2023 menjadikan Lampung masuk dalam daerah dengan kategori IPM “tinggi”. Dengan meningkatnya IPM, diindikasikan kualitas pendidikan meningkat. Indek kualitas Kesehatan juga meningkat

serta daya beli atau indeks pengeluaran yang merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan meningkat dan dapat tumbuh siginifikan.

TPT tahun 2025 dan 2026 diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk berinventasi di Lampung. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Lampung.

NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2024 sebesar 124,97. Angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2024 dibanding tahun 2023 yang sebesar 109,36. Hal ini menunjukkan Daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang dapat menggambarkan salah satu indicator peningkatan kesejahteraan petani.

Selama ini capaian penurunan intensitas emisi GRK terus menurun dan upaya yang dilakukan penurunan intensitas emisi GRK menjadi perhatian pemerintah daerah: ekonomi hijau (menyediakan pupuk organik), program prioritas gubernur (inisiasi lumbung energi terbarukan yang akan mulai di tahun 2026 keatas), menurunkan kebijakan pemerintah pusat yakni mendukung kegiatan ekonomi biru untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan, serta menciptakan sektor pariwisata yang ramah lingkungan.

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. IKU menggambarkan secara langsung kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai instrumen pengukuran, IKU bersifat strategis dan berorientasi pada hasil. Artinya, IKU tidak sekadar mengukur banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi lebih menekankan pada capaian nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Melalui IKU, dapat diketahui sejauh mana program dan kebijakan daerah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Penetapan IKU menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, serta menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah. Capaian terhadap indikator ini menjadi ukuran utama dalam menentukan keberhasilan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kontribusi seluruh perangkat daerah berbeda-beda sesuai dengan cascading kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung. Target capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 diselaraskan dengan target RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan Target Indikator Makro hasil Rakortekbang Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASELINE	TARGET	
				2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,57 (2024)	5,1	5,2 - 5,7
2	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,46	3,47	3,48
3	Gini Rasio	indeks	0,301	0,298	0,274 - 0,290
4	Pertumbuhan PMTB	persen	1,78 (2024)	3,9	4
5	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	persen	9,09 (2024)	8,5	9,5
6	Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)	persen	-2,09	1,2	1,21
7	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	81,56 (2023)	83,07	83,58
8	Persentase Desa Mandiri	persen	23,51	23,67	23,96
9	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	5,58	5,64	5,69
10	Kemantapan Jalan	persen	78,08	78	85,7
11	Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	19,45	20,17	20,88
12	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	35,22	36	36,6
13	Tingkat kemiskinan	persen	10,62	9,75	8,90 - 9,90
14	Tingkat inflasi	persen	1,5	2,5 + 1	2,5 + 1

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	BASELINE	TARGET	
				2025	2026
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,19	3,93	3,51 - 4,05
16	Indeks Modal Manusia	indeks	0,52 (2023)	0,54	0,55
17	Rata rata lama sekolah	tahun	8,36	8,46	8,55
18	Harapan Lama sekolah	tahun	12,78	12,82	12,83
19	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	53,17 (2023)	53,51	53,68
20	Umur Harapan Hidup	tahun	74,39	74,55	74,74
21	Prevalensi Stunting	persen	15,9 (2024)	13,2	12,8
22	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64,78 (2022)	66,22	66,94
23	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,43 (2023)	0,422	0,42
24	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,5	84,5
25	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,5	84,5
26	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	60,64	62,79	62,41 – 64,03
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	70,57 (2023)	70,99	71,2
28	Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,1	129,97	129,01
29	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9,15	9,52	9,95
30	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79,5	80,5
31	Indeks pembangunan Kebudayaan	indeks	57,82 (2023)	58,5	59,6
32	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79,5	80,5
33	Ekspresi Budaya	persen	26,14 (2023)	37,31	38,71

7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) sangat penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik yang unik, yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. IKD dibagi berdasarkan beberapa aspek yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang kinerja daerah tersebut. Indikator kinerja daerah diukur berdasarkan empat aspek utama: Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Pelayanan Umum.

Dalam konteks geografi dan demografi, kinerja daerah diukur berdasarkan kondisi fisik dan sosial masyarakat yang memengaruhi pembangunan. Distribusi penduduk menjadi salah satu hal yang penting. Jika penduduk terdistribusi tidak merata, misalnya sebagian besar tinggal di daerah perkotaan, maka akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi bisa jadi tidak merata. Pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan ini agar semua wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat menikmati fasilitas yang memadai. Selain itu, angka pertumbuhan penduduk dan tingkat pelayanan dasar juga menjadi indikator utama. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan kebijakan yang lebih matang dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik, sementara tingkat layanan dasar menggambarkan seberapa efektif upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aksesibilitas terhadap layanan dasar juga menjadi hal yang sangat penting di daerah dengan kondisi geografis yang menantang.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, indikator yang mengukur kesejahteraan masyarakat, seperti Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan menjadi sangat penting. IPM menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran juga menjadi indikator yang tidak kalah penting. Pengentasan kemiskinan memerlukan upaya pemerintah daerah dalam memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan yang memadai juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa akses terhadap layanan ini merata, tanpa ada yang tertinggal.

Daya saing daerah mencerminkan seberapa kompetitif sebuah daerah di tingkat nasional bahkan internasional. Besarnya nilai tambah perekonomian daerah menjadi indikator utama dalam aspek ini. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar pula potensi daerah tersebut untuk berkembang dan menarik perhatian investor. Diversifikasi ekonomi juga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Dengan keberagaman sektor ekonomi, daerah lebih

tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan dapat menciptakan peluang baru bagi masyarakat. Indeks daya saing daerah mengukur kualitas faktor-faktor seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, dan iklim investasi yang ada di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi dan teknologi, akan semakin meningkatkan daya saing daerah dan menjadikannya lebih menarik bagi investasi.

Kinerja pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh seberapa baik **pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat**. Pelayanan publik yang efisien dan berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Indeks ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Kecepatan respon terhadap permohonan dan keluhan masyarakat juga menjadi indikator yang penting. Jika pemerintah daerah mampu merespons dengan cepat dan menyelesaikan masalah secara efisien, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penggunaan indikator kinerja daerah berorientasi pada outcome, yakni perubahan atau manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai hasil dari intervensi pemerintah daerah. Dengan demikian, IKD tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah Per Aspek Pemerintahan

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,07	83,58	Dinas KPTPH
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**	%	8,5	7,56	Dinas KPTPH
3	Kapasitas Air Baku (m3/kapita)**	m3/kapita	0,44	1,18	Dinas PSDA
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan **	%	18,72	21,2896	Dinas PKPCK
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	70,99	71,2	DLH

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	5	6,8	Dinas PKPCK
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	Ton/hari	4.719,02	4.765,79	DLH
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah**	%	14,46	17,8816	Dinas PKPCK
9.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)** a. Kumulatif** b. Tahunan**		 9,52 15,32	 9,95 17,14	Dinas LH, Kehutanan, KPTPH, ESDM, PKPCK, Perhubungan, DKP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PSDA, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Bappeda
10	Indeks Risiko Bencana**	Angka	129,97	129,01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		0,537	0,546	Dinas LH
12	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	0,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,17	1,12	Disdukcapil
14	Rasio Jenis Kelamin	%	104,12	104	Disdukcapil
	Kepadatan Penduduk	Orang/km^2	283,67	286	Disdukcapil
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1	5,45	
2	Tingkat Kemiskinan**	%	9,75	8,90 - 9,90	Dinsos
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	54,99	54,0-56,0	KPTPH, Disbun, Disnak, DKP, Dispar, Diskop, Disperindag, dll
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	3,93	3,51 - 4,05	Disnaker
5	Indeks Gini	Angka	0,298	0,274 - 0,290	
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,54	0,55	
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,55	74,74	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,27	0,29	Dinkes
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**	Angka	122	109	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
9	Prevalensi Stunting**	%	13,2	12,8	Dinkes

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
10	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	90	90	Dinkes
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)**	%	60	64	Dinas Kesehatan
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**	%	95	95	Dinas Kesehatan, RSAM, RSBNH
11	Cakupan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (%)**	%	70	72	Dinas Kesehatan
12	Rata-Rata Lama Sekolah**	Tahun	8.46	8.55	Disdikbud
13	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	12,82	12,83	Disdikbud
14	Angka Literasi **	%	69,26	70,12	Disdikbud
	Angka Numerasi**		66,23	68,53	
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:**	%	30,2	32,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Literasi membaca		20,3	22,2	
	- Numerasi				
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)**	%	7,77	8,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)**	%	72,42	73,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	65.77	69.03	Dinas Perpustakaan dan Arsip
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja (%)**	%	22	24	Dinas Tenaga Kerja
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	38,39	45,53	Disnaker
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	74,1	74,5	
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Angka	58,5	59,6	Disdikbud
24	Indeks Perlindungan Anak**	Angka	66,22	66,94	Dinas PPPA
25	Indeks Ketimpangan Gender**	Angka	0,38	0,36	Dinas PPPA
26	Indeks Pembangunan Pemuda**	Angka	53.51	53.68	Dispora

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
27	Persentase Penurunan Konflik Sosial**	%	100	100	Badan Kesbangpol
28	Ketahanan Sosial Budaya	%	81,8	83,8	Badan Kesbangpol
29	Persentase Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana	%	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Angka Ketergantungan	%	47,3	47	
	(Dependency Ratio)				
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	18,97	19,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,62	1,65	Disparekraf
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)**	ribu orang	6,5	8	Disparekraf
5	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,54	0,62	
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	NA	NA	Disparekraf
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**		2,65	2,7	Dinas Koperasi dan UKM
8.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**	%	0,66	0,67	Dinas Koperasi dan UKM
9.	Rasio Kewirausahaan Daerah**	%	2,9	2,93	Dinas Koperasi dan UKM
10.	Return on Asset (ROA) BUMD**	%	4,06	4,11	Biro Perekonomian
11.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**		32	33	Dinas Tenaga Kerja
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,6	70,7	Dinas Tenaga Kerja
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	55,34	56,24	Dinas PPPA, Disnaker
14.	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	65,7	65,9	Balitbangda

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
15.	Indeks Ekonomi Hijau**	Angka	59,19	60,16	Dinas Kehutanan, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas KPTH, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
16.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	36	36,6	Dinas ESDM, Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Perindustrian
17.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Angka	5,85	5,9	Dinas Kominfo
19.	Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	2,28	2,78	DPM PTSP
20.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	%	68,95	70,192	Dinas PKPCK
21.	Nilai Survey Penilaian Integritas**	Angka	67,33	68,83	Inspektorat
22.	Persentase Desa Mandiri	%	23,67	23,96	Dinas PMDT
23.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	1,8	2	BPKAD
24.	Tingkat Inflasi**	%	2,5 + 1	2,5 + 1	Biro Perekonomian
25.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**	%	14	14	Biro Perekonomian
29.	Inklusi Keuangan**	%	85,5	88,43	Biro Perekonomian
30.	Persentase BUMD Berkinerja Sehat	%	67	100	Biro Perekonomian
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Hukum**	Angka	87,5	87,8	Biro Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Angka	4,1	4,2	Dinas Kominfo
3	Indeks Pelayanan Publik**	Angka	4,3	4,4	Bapenda, DPM PTSP, RSAM, RSJ, RSBNH
4	Persentase Penegakan Perda**	%	78	80	SatPol PP
5	Persentase Capaian Aksi HAM**	%	75	78	Badan Kesbangpol

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
6	Indeks Demokrasi Indonesia**	Angka	79,5	80,5	Badan Kesbangpol
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**	Angka	73	73	Satpol PP
8	Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	*3,47*	*3,48*	Balitbangda
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,5	87	Biro Organisasi
10	Nilai Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	%	83,1	83,5	Badan Penghubung
		%	89,8	89,9	BAPENDA
		%	82	84	RSUAM
		%	89,5	89,75	RSJ
		Indeks	3,44	3,44	PMPTSP

7.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menilai sejauh mana suatu pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Setiap urusan atau sektor pemerintahan memiliki tantangan dan tujuan yang berbeda, sehingga dibutuhkan indikator yang relevan untuk mengevaluasi kinerjanya. Penetapan indikator kinerja kunci per urusan penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam berbagai bidang, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	Pendidikan				
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah	%	72,99	73,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayan
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus	%	61,22	70,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayan
	Kesehatan				
1	Prevalensi Wasting	%	6,8	6,5	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu	kasus	122	109	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi	%	12,62	11,63	Dinas Kesehatan
4	Notifikasi Kasus Tuberkulosis	%	90	90	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
5	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	70	72	Dinas Kesehatan
6	Laju Kematian/Net Death Rate	%	27	26	RSUD Abdul Moeloek
7	Readmission Rate (Tingkat Rawat Inap Ulang)	%	5	4,9	RS Jiwa Daerah
8	Jumlah layanan spesialis	orang	5	6	RS Bandar Negara Husada
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan penyediaan lahan untuk kepentingan umum	persen	41	43	PKPCK
2	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	persen	100	100	PKPCK
3	Tingkat kemantapan jalan	persen	78	85,7	BMBK
4	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (pada WS kewenangan provinsi)	persen	27,63	28,34	PSDA
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir ROB pada WS kewenangan provinsi	persen	24,86	26,1	PSDA
6	Persentase luas layanan irigasi multi komoditas (pada DI kewenangan provinsi)	persen	71	76	PSDA
	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	persen	2	4	PKPCK
2	Persentase Rumah tidak Layak huni yang tertangani	persen	66,29	66,62	PKPCK
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses air minum Aman	persen	9,84	10,2	PKPCK
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses sanitasi Aman	persen	2,49	2,66	PKPCK
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	82	83	Satpol PP
	Sosial				
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	%	19,71	19,93	Dinas Sosial

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
	Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Tertangani				
2	Persentase penguatan dan pemahaman penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	20	20	Dinas Sosial
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	Tenaga Kerja				
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	96	96,14	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase	%	34	38	Dinas Tenaga Kerja
	Tenaga Kerja Perusahaan				
	yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan				
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	5,7	5,8	Dinas PPPA
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensin	%	100	100	Dinas PPPA
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	100	100	Dinas PPPA
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	100	Dinas PPPA
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	Dinas PPPA
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	76	76,54	Dinas PPPA
	Pangan				
1	Persentase Rata-rata Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu) dan Hortikultura (Aneka Cabai, Bawang Merah, Pisang dan Nanas)	%	100	100	Dinas KPTPH
	- Padi	Ton	3.500.000	3.727.500	
	- Jagung	Ton	3.008.103	3.202.277	
	- Ubi Kayu	Ton	7.285.241	6.665.093	
	- Aneka Cabai	Ton	38.948	39.337	

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
	- Bawang Merah	Ton	1.661	1.678	
	- Pisang	Ton	1.593.967	1.609.907	
	- Nanas	Ton	711.102	725.324	
	Lingkungan Hidup				
1	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	persen	9,11	9,47	DLH
2	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	persen	94	95	DLH
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	persen	92,5	93	Disdukcapil
2	Persentase pemanfaatan data kependudukan	persen	82,05	84,62	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Desa Mandiri	persen	23,67	23,96	Dinas PMDt
2	Persentase BUMDes Maju	persen	2,26	2,88	Dinas PMDt
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	Indeks	64,6	66,3	Dinas PPPA
	Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,26	0,55	Dinas Perhubungan
2	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Provinsi	persen	28,92	29,58	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,1	4,2	Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
2	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Indeks	-	1,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	72	72,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	%	0,8	1	Dinas Koperasi dan UKM
	Penanaman Modal				
1	Realisasi dan Investasi	Triliun Rupiah	9,85	10,2	DPMPTSP
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	3,44	3,44	DPMPTSP
	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Persentase pemuda Aktif Dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan (%)	%	6,58	6,98	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Lampung Yang Meraih Juara 1, 2 dan 3 pada Event - event Nasional dan Internasional	Orang	85	95	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Jumlah Keikutsertaan Masyarakat Sebagai Peserta dalam event-event Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Orang	5000	8000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Statistik				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,7	2,9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Persandian				
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI v.5.0	300	310	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Kebudayaan				
1	Persentase warisan seni dan budaya tak benda yang bersertifikasi nasional	%	92	94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan				
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	70,05	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan				
1	Nilai Pengawasan Kearsipan (NHPK)	Niali	87	87,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	86,4	86,7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
	Kelautan dan Perikanan				
1	Nilai Tukar Nelayan	persen	110,26	110,54	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
2	Nilai Tukar Pembudidaya	persen	97,62	98,06	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata				
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	juta orang	1,9	20,5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan (length of stay)	hari	1,3	1,4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Rata-rata pengeluaran wisatawan (spending money)	juta rupiah	1,8	1,9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Pertanian				
1	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	ton	871.199	888.623	Dinas Perkebunan
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	1,36	1,72	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	87	88	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	persen	54,47	59,57	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Kehutanan				
1	Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dan atau KUPS	kelompok	45	45	Dinas Kehutanan
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	persen	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
	Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer* (%)	persen	36	36,6	ESDM
2	Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)**	SBM/Rp	176	172	ESDM
3	Konsumsi listrik per kapita (kWh)**	kWh	680	685	ESDM
4	Rasio Elektrifikasi	persen	99,9	99,9	ESDM
	Perdagangan				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	Persen	11,96	12,1	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	Nilai	≤ 5	≤ 5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian				
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	18,97	19,15	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Transmigrasi				

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100	100	100	Dinas PMDT
2	Persentase calon peserta	100	100	100	Dinas PMDT
	transmigran yang difasilitasi untuk dibina				
IV	**UNSUR PENDUKUNG**				
	Sekretariat Daerah				
1	Indeks RB Provinsi Lampung	Indeks	83,00-84,00	84,01-85,00	Sekretariat Daerah
2	Skor RB General		74	75	Sekretariat Daerah
3	Skor RB Tematik		9	10	Sekretariat Daerah
4	Nilai Kematangan Organisasi Daerah		41,5	43	Biro Organisasi
5	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan		11,5	11,75	Biro Organisasi
6	Pencapaian Kinerja LPPD	skor	2,8	Skor ≥ 2,50	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				- < 3,00	
7	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah yang terlegitimasi.	%	80	80	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
8	Nilai survey kepuasan pelayanan internal dan eksternal pada Biro Administrasi Pimpinan	nilai	70	80	Biro Administrasi Pimpinan
9	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasi	%	100	100	Biro Hukum
10	Persentase jumlah perkara hukum yang difasilitasi	%	100	100	Biro Hukum
11	Nilai survey kepuasan pelayanan internal	skor/nilai	81	82,5	Biro Umum
12	Persentase pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	skor/nilai	71,7	71,75	Biro Umum
13	Efektivitas (ketepatan) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	%	72,00	74,00	Biro Administrasi Pembangunan
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai	78	79	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Sekretariat DPRD				
1	Persentase Jumlah Peraturan Daerah	%	100	100	Sekretariat DPRD
V	**UNSUR PENUNJANG**				
	Perencanaan				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	94	94,5	Bappeda

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	PD PENGAMPU
2	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi	nilai	25	25,2	Bappeda
3	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi	nilai	21	22	Bappeda
	Keuangan				
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	-9,12	-17,19	Bapenda
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpajakan	%	89,8	89,9	Bapenda
	Kepegawaian				
1	Indeks sistem merit	Nilai	304,5	321,5	BKD
	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya sesuai sasaran pelatihan	Persen	70	72	BPSDM
2	Nilai Survey Kepuasan Peserta Pelatihan	Nilai	87	89	BPSDM
	Penelitian dan Pengembangan				
1	persentase rumusan kebijakan (*policy paper*) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan	Persen	60	61	Balitbangda
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65,7	65,9	Balitbangda
VI	**UNSUR PENGAWASAN**				
	Inspektorat Daerah				
1	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks	3,17	3,18	Inspektorat
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	Indeks	16,85	17,05	Inspektorat
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	3,01	3,02	Inspektorat
4	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3,06	3,08	Inspektorat
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	79,5	80,5	
2	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	70	72	

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2026

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2045. RPJPD ini mengusung visi besar **Lampung SMART 2045: "Sejahtera, Maju, Merata, dan Berkelanjutan"**, sebagai landasan utama pembangunan jangka panjang daerah menuju masa depan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tahun 2026 juga menjadi tahun ke-2 pelaksanaan program-program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yang berlandaskan pada visi **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"**. Visi ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong kemajuan daerah secara kolaboratif dan berkontribusi aktif dalam mempercepat pembangunan nasional.

Tema Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 adalah **" Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** RKPD Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah, meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi, kolaborasi, dan berbasis hasil untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan konsisten dengan visi pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan, serta dapat dievaluasi secara terukur. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko pembangunan ke dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan program, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Perpres ini menekankan pentingnya identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, serta pemantauan risiko secara sistematis untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Manajemen risiko pembangunan merupakan instrumen penting dalam mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan, baik yang bersumber dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, maupun kejadian luar biasa seperti bencana dan krisis global. Di tingkat daerah, penerapan manajemen risiko diarahkan untuk meningkatkan daya adaptif, responsif, dan ketangguhan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gangguan terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah mewujudkan masyarakat Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUDHI ALFADRI,SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001